PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO

wonosobo
the soul of java

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 10 TAHUN 2025

TANGGAL 15 AGUSTUS 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI :

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Lampiran I

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 1

Lampiran II

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025.....3

Lampiran III

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025.....11

Lampiran IV

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN
BESERTA SUB KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025.....589

Lampiran V

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025.....938

Lampiran VI

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK
PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025.....943

Lampiran VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN
RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025.....949

Lampiran VIII

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA
PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN RANCANGAN
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 968

DAFTAR ISI

Lampiran IX
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 1156
Lampiran X
DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 1170
Lampiran XI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH 1171
Lampiran XII
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 1542
Lampiran XIII
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025 1543
Lampiran XIV
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2025 1545
Lampiran XV
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS) TAHUN ANGGARAN 2025 1546
Lampiran XVI
DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 1547
Lampiran XVII
DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 1548

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan /atau keadaan luar biasa;

d. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan keadaan yang menyebabkan perubahan asumsi kebijakan umum anggaran Tahun 2025, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2024 harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2025, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.066.894.346.175,00 berkurang sebesar Rp.43.793.542.695,00 sehingga menjadi Rp.2.023.100.803.480,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

1. Semula	Rp. 2.022.945.975.042,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 33.552.116.390,91)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.989.393.858.651,09

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 2.066.894.346.175,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 43.793.542.695,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2.023.100.803.480,00

c. Pembiayaan daerah

1. Semula	Rp. 43.948.371.133,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 10.241.426.304,09)
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 33.706.944.828,91
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp. 370.439.864.042,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.800.668.609,09
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.382.240.532.651,09

b. Pendapatan transfer

1. Semula	Rp. 1.651.720.111.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 45.352.785.000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.606.367.326.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp. 786.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 786.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1. Semula	Rp.142.085.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 12.584.089.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.129.500.911.000,00

b. Retribusi daerah;

1. Semula	Rp.198.126.653.597,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.096.862.170,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 209.223.515.767,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1. Semula	Rp. 25.779.572.231,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.025.000.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 27.804.572.231,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1. Semula	Rp. 4.448.638.214,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.11.262.895.439,09
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.15.711.533.653,09

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp. 1.536.807.893.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 68.569.220.064,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1.468.238.672.936,00

b. Transfer antar daerah

1. Semula	Rp. 114.912.218.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.216.435.064,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 138.128.653.064,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Pendapatan hibah

a. Semula	Rp.	786.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	786.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional:

1. Semula	Rp.1.483.115.784.127,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.081.201.295,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.453.034.582.832,00

b. Belanja modal:

1. Semula	Rp. 203.648.525.448,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.742.741.400,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 192.905.784.048,00

c. Belanja tidak terduga:

1. Semula	Rp. 5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 2.050.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.450.000.000,00

d. Belanja transfer:

1. Semula	Rp. 374.630.036.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 919.600.000,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 373.710.436.600,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:

1. Semula	Rp. 867.677.690.562,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 47.972.469.717,50
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 915.650.160.279,50

b. Belanja barang dan jasa:

1. Semula	Rp. 550.382.654.327,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 82.507.661.438,50)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 467.874.992.888,50

c. Belanja subsidi:

1. Semula	Rp. 755.155.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 755.155.000,00

d. Belanja hibah:

1. Semula	Rp. 56.474.384.238,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.587.890.426,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 60.062.274.664,00

e. Belanja bantuan sosial:

1. Semula	Rp. 7.825.900.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 326.100.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 8.152.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah:

1. Semula	Rp. 10.317.251.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.629.629.490,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 8.687.621.510,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

1. Semula	Rp.41.684.994.448,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.141.304.717,00
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 46.826.299.165,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung:

1. Semula	Rp. 52.722.892.209,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 29.046.331.590,00)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 25.426.960.619,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1. Semula	Rp. 87.685.563.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 13.448.534.750,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 101.134.097.750,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

1. Semula	Rp. 8.324.151.009,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.862.903.995,00
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 10.187.055.004,00

b. Belanja modal aset lainnya:

1. Semula	Rp. 1.163.273.782,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 519.523.782,00)
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 643.750.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp. 5.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 2.050.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.450.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil:	
1. Semula	Rp. 14.881.618.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 14.881.618.600,00
b. Belanja bantuan keuangan:	
1. Semula	Rp.359.748.418.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 919.600.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 358.828.818.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:	
1. Semula	Rp. 43.948.371.133,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 10.241.426.304,09)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 33.706.944.828,91
b. Pengeluaran pembiayaan:	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran:

a. Semula	Rp. 43.948.371.133,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 10.241.426.304,09)
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran setelah perubahan	Rp. 33.706.944.828,91

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k. Lampiran XI : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*Multi Years*);
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
q. Lampiran XVII : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONI ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-132 /2025)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**370.439.864.042,00**	**382.240.532.651,09**	**11.800.668.609,09**
4.1.01	Pajak Daerah	142.085.000.000,00	129.500.911.000,00	-12.584.089.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	198.126.653.597,00	209.223.515.767,00	11.096.862.170,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.779.572.231,00	27.804.572.231,00	2.025.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.448.638.214,00	15.711.533.653,09	11.262.895.439,09
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.651.720.111.000,00**	**1.606.367.326.000,00**	**-45.352.785.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.536.807.893.000,00	1.468.238.672.936,00	-68.569.220.064,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.912.218.000,00	138.128.653.064,00	23.216.435.064,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**786.000.000,00**	**786.000.000,00**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	786.000.000,00	786.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**2.022.945.975.042,00**	**1.989.393.858.651,09**	**-33.552.116.390,91**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.483.115.784.127,00**	**1.453.034.582.832,00**	**-30.081.201.295,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	867.677.690.562,00	915.650.160.279,50	47.972.469.717,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.382.654.327,00	467.874.992.888,50	-82.507.661.438,50
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	755.155.000,00	755.155.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	56.474.384.238,00	60.062.274.664,00	3.587.890.426,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.825.900.000,00	8.152.000.000,00	326.100.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**203.648.525.448,00**	**192.905.784.048,00**	**-10.742.741.400,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.317.251.000,00	8.687.621.510,00	-1.629.629.490,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.684.994.448,00	46.826.299.165,00	5.141.304.717,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.473.292.209,00	25.426.960.619,00	-29.046.331.590,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.685.563.000,00	101.134.097.750,00	13.448.534.750,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.324.151.009,00	10.187.055.004,00	1.862.903.995,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.163.273.782,00	643.750.000,00	-519.523.782,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.500.000.000,00**	**3.450.000.000,00**	**-2.050.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	3.450.000.000,00	-2.050.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**374.630.036.600,00**	**373.710.436.600,00**	**-919.600.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.881.618.600,00	14.881.618.600,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	359.748.418.000,00	358.828.818.000,00	-919.600.000,00
	Jumlah Belanja	**2.066.894.346.175,00**	**2.023.100.803.480,00**	**-43.793.542.695,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-43.948.371.133,00**	**-33.706.944.828,91**	**10.241.426.304,09**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**43.948.371.133,00**	**33.706.944.828,91**	**-10.241.426.304,09**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.948.371.133,00	33.706.944.828,91	-10.241.426.304,09
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**43.948.371.133,00**	**33.706.944.828,91**	**-10.241.426.304,09**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	180.501.962.631,00	187.100.824.801,09	1.040.238.410.655,00	1.036.691.923.523,00	176.040.257.523,00	169.673.878.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.278.668.178,00	1.206.365.802.374,00	-9.912.865.804,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4.000.000,00	4.000.000,00	631.263.569.206,00	619.225.595.835,00	27.693.910.143,00	35.384.406.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.957.479.349,00	654.610.002.514,00	-4.347.476.835,00
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	631.263.569.206,00	619.225.595.835,00	27.693.910.143,00	35.384.406.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.957.479.349,00	654.610.002.514,00	-4.347.476.835,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	178.087.962.631,00	184.686.824.801,09	341.472.997.060,00	351.493.250.728,00	57.707.486.340,00	36.160.605.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.180.483.400,00	387.653.856.140,00	-11.526.627.260,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	720.000.000,00	0,00	129.014.385.516,00	123.795.460.620,00	7.120.410.104,00	7.012.380.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.134.795.620,00	130.807.840.828,00	-5.326.954.792,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Wonosobo 1	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	4.315.574.290,00	4.269.642.198,00	17.736.360,00	283.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.310.650,00	4.552.892.198,00	219.581.548,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kertek 1	2.552.988.000,00	2.929.075.000,00	3.254.592.000,00	3.681.055.003,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.592.000,00	3.722.055.003,00	426.463.003,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Selomerto 1	5.451.926.552,00	4.977.727.437,00	6.120.361.706,00	6.070.361.706,00	163.000.000,00	213.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283.361.706,00	6.283.361.706,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Leksono 1	1.350.000.000,00	1.500.000.000,00	2.098.231.100,00	2.380.707.057,00	16.640.000,00	33.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.871.100,00	2.413.847.057,00	298.975.957,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Watumalang	2.678.000.000,00	2.400.000.000,00	3.377.022.000,00	3.235.383.104,00	94.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.022.000,00	3.358.383.104,00	-112.638.896,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Mojotengah	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	4.491.607.950,00	5.126.458.448,00	198.000.000,00	257.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689.607.950,00	5.383.958.448,00	694.350.498,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Garung	3.918.295.000,00	3.918.295.000,00	4.481.126.500,00	4.741.277.572,00	230.250.000,00	221.368.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.376.500,00	4.962.646.119,00	251.269.619,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Kejajar 1	2.600.000.000,00	2.650.000.000,00	3.236.366.007,00	3.372.715.180,00	72.525.000,00	111.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308.891.007,00	3.483.740.180,00	174.849.173,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Kalikajar 1	2.057.822.300,00	2.296.811.500,00	2.635.011.300,00	2.900.329.157,00	45.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.011.300,00	2.942.329.157,00	262.317.857,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sapuran	4.600.000.000,00	4.490.000.000,00	5.265.502.497,00	5.266.402.607,00	180.400.000,00	491.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445.902.497,00	5.757.702.607,00	311.800.110,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kepil 1	2.631.280.000,00	2.700.000.000,00	3.355.014.999,00	3.586.250.506,00	59.600.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.614.999,00	3.653.250.506,00	238.635.507,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Kaliwiro	3.624.600.000,00	3.624.600.000,00	4.689.733.339,00	4.776.475.588,00	31.925.000,00	31.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.658.339,00	4.808.400.588,00	86.742.249,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Wadaslintang 1	2.637.871.950,00	2.850.000.000,00	3.398.851.710,00	3.713.739.007,00	47.500.000,00	75.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.351.710,00	3.788.989.007,00	342.637.297,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Sukoharjo 1	1.970.678.000,00	1.999.976.000,00	3.081.312.400,00	3.118.454.702,00	109.564.600,00	174.298.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.877.000,00	3.292.753.564,00	101.876.564,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Kalibawang	1.674.650.000,00	1.674.650.000,00	2.558.669.080,00	2.552.908.654,00	32.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.669.080,00	2.635.908.654,00	45.239.574,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Wonosobo 2	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.769.323.480,00	1.756.652.005,00	43.000.000,00	116.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.323.480,00	1.872.952.005,00	60.628.525,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Kertek 2	2.149.875.000,00	2.307.423.000,00	2.858.721.000,00	2.917.765.970,00	29.955.000,00	527.315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.676.000,00	3.445.081.870,00	556.405.870,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Selomerto 2	1.060.990.000,00	1.075.800.000,00	1.864.607.000,00	1.919.891.495,00	23.000.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.607.000,00	1.958.841.495,00	71.234.495,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Leksono 2	850.000.000,00	900.000.000,00	1.794.487.000,00	1.851.520.687,00	0,00	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.487.000,00	1.891.020.687,00	96.533.687,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Kejajar 2	934.770.650,00	900.000.000,00	1.855.929.649,00	1.861.260.556,00	39.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.529.649,00	1.898.860.556,00	3.330.907,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Kalikajar 2	1.947.038.279,00	2.209.298.279,00	2.593.351.279,00	2.835.092.180,00	46.750.000,00	155.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.101.279,00	2.990.542.180,00	350.440.901,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Kepil 2	1.948.797.900,00	1.948.797.900,00	2.802.540.900,00	2.957.621.171,00	79.200.000,00	82.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881.740.900,00	3.040.296.171,00	158.555.271,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Wadaslintang 2	1.233.500.000,00	1.499.370.685,00	2.022.992.461,00	2.401.922.110,00	35.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.992.461,00	2.503.922.110,00	445.929.649,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Sukoharjo 2	894.879.000,00	915.000.000,00	1.816.717.420,00	1.840.039.070,00	12.567.380,00	27.063.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.284.800,00	1.867.103.069,00	37.818.269,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	Laboratorium Kesehatan Daerah	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Setjonegoro	120.000.000.000,00	125.600.000.000,09	136.000.964.477,00	147.843.864.375,00	48.938.862.896,00	25.773.312.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.939.827.373,00	173.617.177.271,00	-11.322.650.102,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	27.120.641.033,00	28.286.570.923,00	75.584.436.040,00	80.204.955.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.705.077.073,00	108.491.526.183,00	5.786.449.110,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	27.120.641.033,00	28.286.570.923,00	75.584.436.040,00	80.204.955.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.705.077.073,00	108.491.526.183,00	5.786.449.110,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	820.000.000,00	820.000.000,00	9.714.117.689,00	9.180.874.089,00	12.445.000.000,00	15.478.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159.117.689,00	24.659.698.089,00	2.500.580.400,00
1	04	1.04.2.15.2.10.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	820.000.000,00	820.000.000,00	9.714.117.689,00	9.180.874.089,00	12.445.000.000,00	15.478.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159.117.689,00	24.659.698.089,00	2.500.580.400,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	16.388.378.563,00	14.179.125.648,00	2.409.425.000,00	2.345.087.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797.803.563,00	16.524.213.148,00	-2.273.590.415,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan polisi Pamong Praja	0,00	0,00	8.851.955.753,00	7.694.521.675,00	408.475.000,00	463.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260.430.753,00	8.157.659.175,00	-1.102.771.578,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	7.536.422.810,00	6.484.603.973,00	2.000.950.000,00	1.881.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537.372.810,00	8.366.553.973,00	-1.170.818.837,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	0,00	14.278.707.104,00	14.326.506.300,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.478.707.104,00	14.426.506.300,00	-52.200.804,00
1	06	1.06.2.13.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	14.278.707.104,00	14.326.506.300,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.478.707.104,00	14.426.506.300,00	-52.200.804,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.254.608.000,00	1.884.608.000,00	121.368.746.651,00	121.152.421.134,00	15.724.111.877,00	12.606.934.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.092.858.528,00	133.759.355.272,00	-3.333.503.256,00
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	4.836.600.000,00	7.654.150.000,00	3.303.400.000,00	2.285.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.000.000,00	9.940.000.000,00	1.800.000.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	4.836.600.000,00	7.654.150.000,00	3.303.400.000,00	2.285.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.000.000,00	9.940.000.000,00	1.800.000.000,00
2	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	0,00	0,00	3.381.425.520,00	2.904.440.671,00	7.151.500.000,00	5.928.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532.925.520,00	8.832.440.671,00	-1.700.484.849,00
2	04	1.04.2.15.2.10.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	3.173.219.028,00	2.718.386.284,00	7.151.500.000,00	5.928.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324.719.028,00	8.646.386.284,00	-1.678.332.744,00
2	04	1.04.2.15.2.10.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	208.206.492,00	186.054.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.206.492,00	186.054.387,00	-22.152.105,00
2	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	6.916.910.000,00	5.799.984.962,00	2.400.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919.310.000,00	5.801.784.962,00	-1.117.525.038,00
2	06	1.06.2.13.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	6.916.910.000,00	5.799.984.962,00	2.400.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919.310.000,00	5.801.784.962,00	-1.117.525.038,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	90.000.000,00	90.000.000,00	10.158.667.040,00	12.647.139.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158.667.040,00	12.647.139.565,00	2.488.472.525,00
2	07	2.07.3.31.3.32.01.0000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	90.000.000,00	90.000.000,00	10.158.667.040,00	12.647.139.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158.667.040,00	12.647.139.565,00	2.488.472.525,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	170.960.000,00	170.960.000,00	24.145.715.034,00	23.506.756.091,00	601.196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.746.911.534,00	23.506.756.091,00	-1.240.155.443,00
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	170.960.000,00	170.960.000,00	24.145.715.034,00	23.506.756.091,00	601.196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.746.911.534,00	23.506.756.091,00	-1.240.155.443,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	993.648.000,00	1.623.648.000,00	18.175.738.810,00	16.940.325.952,00	3.864.047.315,00	3.914.775.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.039.786.125,00	20.855.101.328,00	-1.184.684.797,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas lingkungan Hidup	496.824.000,00	811.824.000,00	15.452.481.746,00	16.829.083.131,00	3.726.431.965,00	3.914.775.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.178.913.711,00	20.743.858.507,00	1.564.944.796,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas lingkungan Hidup	496.824.000,00	811.824.000,00	2.723.257.064,00	111.242.821,00	137.615.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.872.414,00	111.242.821,00	-2.749.629.593,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	7.865.794.955,00	6.845.523.192,00	264.900.000,00	236.234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130.694.955,00	7.081.757.692,00	-1.048.937.263,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	7.865.794.955,00	6.845.523.192,00	264.900.000,00	236.234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130.694.955,00	7.081.757.692,00	-1.048.937.263,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	18.515.264.102,00	16.791.726.884,00	68.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.583.864.102,00	16.791.726.884,00	-1.792.137.218,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	16.953.344.102,00	15.883.155.981,00	68.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.944.102,00	15.883.155.981,00	-1.138.788.121,00
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	1.561.920.000,00	908.570.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.920.000,00	908.570.903,00	-653.349.097,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	11.242.504.079,00	11.217.601.031,00	228.374.262,00	71.274.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470.878.341,00	11.288.875.293,00	-182.003.048,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	11.130.504.079,00	11.170.461.031,00	194.974.262,00	71.274.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325.478.341,00	11.241.735.293,00	-83.743.048,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	59.000.000,00	24.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	24.880.000,00	-34.120.000,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	53.000.000,00	22.260.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400.000,00	22.260.000,00	-64.140.000,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	5.173.475.266,00	4.403.740.487,00	23.627.120,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.102.386,00	4.553.740.487,00	-643.361.899,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	5.173.475.266,00	4.403.740.487,00	23.627.120,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.102.386,00	4.553.740.487,00	-643.361.899,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	7.095.720.165,00	6.544.090.704,00	216.066.680,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311.786.845,00	6.563.090.704,00	-748.696.141,00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	1.162.389.218,00	972.211.778,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.389.218,00	972.211.778,00	-215.177.440,00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	5.933.330.947,00	5.571.878.926,00	191.066.680,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124.397.627,00	5.590.878.926,00	-533.518.701,00
2	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	0,00	2.525.000.000,00	4.344.852.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.000.000,00	4.344.852.553,00	1.819.852.553,00
2	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	2.525.000.000,00	4.344.852.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.000.000,00	4.344.852.553,00	1.819.852.553,00
2	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	0,00	1.335.931.680,00	1.552.089.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.931.680,00	1.552.089.042,00	216.157.362,00
2	30	3.30.2.17.0.00.03.0000	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	1.335.931.680,00	1.552.089.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.931.680,00	1.552.089.042,00	216.157.362,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	14.552.354.200,00	18.735.554.200,00	34.789.282.161,00	33.838.749.695,00	217.451.982,00	160.215.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006.734.143,00	33.998.964.845,00	-1.007.769.298,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	577.000.000,00	424.065.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000.000,00	424.065.362,00	-152.934.638,00
3	07	2.07.3.31.3.32.01.0000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
3	07	2.07.3.31.3.32.01.0000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	0,00	0,00	527.000.000,00	424.065.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000.000,00	424.065.362,00	-102.934.638,00
3	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0,00	0,00	10.488.543.600,00	11.259.007.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488.543.600,00	11.259.007.681,00	770.464.081,00
3	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	9.283.543.600,00	10.349.007.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283.543.600,00	10.349.007.681,00	1.065.464.081,00
3	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	1.205.000.000,00	910.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000.000,00	910.000.000,00	-295.000.000,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.229.354.200,00	8.912.554.200,00	10.008.845.326,00	8.598.372.408,00	162.701.982,00	157.215.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171.547.308,00	8.755.587.558,00	-1.415.959.750,00
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.229.354.200,00	8.912.554.200,00	10.008.845.326,00	8.598.372.408,00	162.701.982,00	157.215.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171.547.308,00	8.755.587.558,00	-1.415.959.750,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.323.000.000,00	9.823.000.000,00	13.714.893.235,00	13.557.304.244,00	54.750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769.643.235,00	13.560.304.244,00	-209.338.991,00
3	30	3.30.2.17.0.00.03.0000	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.323.000.000,00	9.823.000.000,00	13.714.893.235,00	13.557.304.244,00	54.750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769.643.235,00	13.560.304.244,00	-209.338.991,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	585.000.000,00	585.000.000,00	91.475.653.162,00	88.117.276.161,00	2.022.123.000,00	937.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.497.776.162,00	89.054.462.161,00	-4.443.314.001,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	585.000.000,00	585.000.000,00	44.255.261.050,00	42.025.426.836,00	1.114.923.000,00	937.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.370.184.050,00	42.962.612.836,00	-2.407.571.214,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.000.626.460,00	745.560.804,00	57.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.626.460,00	775.560.804,00	-282.065.656,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	0,00	0,00	868.660.000,00	442.563.596,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.660.000,00	472.563.596,00	-426.096.404,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	0,00	0,00	597.271.500,00	536.647.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.271.500,00	536.647.068,00	-60.624.432,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	0,00	0,00	3.708.714.723,00	3.679.512.411,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.714.723,00	3.679.512.411,00	-32.202.312,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Umum Sekretariat Daerah	585.000.000,00	585.000.000,00	34.185.234.780,00	33.549.133.709,00	650.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.835.234.780,00	34.299.133.709,00	-536.101.071,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.322.997.345,00	993.684.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.997.345,00	993.684.273,00	-329.313.072,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.307.637.585,00	1.043.796.166,00	352.923.000,00	127.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.560.585,00	1.170.982.166,00	-489.578.419,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	0,00	0,00	725.520.767,00	715.917.153,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.520.767,00	715.917.153,00	-31.603.614,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	0,00	0,00	538.597.890,00	318.611.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.597.890,00	318.611.656,00	-219.986.234,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	47.220.392.112,00	46.091.849.325,00	907.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.127.592.112,00	46.091.849.325,00	-2.035.742.787,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	47.220.392.112,00	46.091.849.325,00	907.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.127.592.112,00	46.091.849.325,00	-2.035.742.787,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.824.610.318.731,00	1.779.911.356.170,00	88.488.603.039,00	73.909.418.116,50	5.176.060.000,00	4.360.796.000,00	5.500.000.000,00	3.450.000.000,00	374.630.036.600,00	373.710.436.600,00	473.794.699.639,00	455.430.650.716,50	-18.364.048.922,50
5	01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	9.795.457.707,00	8.387.905.300,00	545.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341.207.707,00	8.433.655.300,00	-1.907.552.407,00
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	475.000.000,00	269.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000.000,00	269.310.000,00	-205.690.000,00
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	9.320.457.707,00	8.118.595.300,00	545.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866.207.707,00	8.164.345.300,00	-1.701.862.407,00
5	02		KEUANGAN	1.824.610.318.731,00	1.779.911.356.170,00	71.430.710.066,00	58.437.385.722,50	4.545.300.000,00	4.246.546.000,00	5.500.000.000,00	3.450.000.000,00	374.630.036.600,00	373.710.436.600,00	456.106.046.666,00	439.844.368.322,50	-16.261.678.343,50
5	02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.824.610.318.731,00	1.779.911.356.170,00	71.430.710.066,00	58.437.385.722,50	4.545.300.000,00	4.246.546.000,00	5.500.000.000,00	3.450.000.000,00	374.630.036.600,00	373.710.436.600,00	456.106.046.666,00	439.844.368.322,50	-16.261.678.343,50
5	02	5.02.0.00.0.00.04.0001	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	0,00	7.262.435.266,00	7.084.127.094,00	85.010.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347.445.266,00	7.152.627.094,00	-194.818.172,00
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	7.262.435.266,00	7.084.127.094,00	85.010.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347.445.266,00	7.152.627.094,00	-194.818.172,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	11.395.957.234,00	10.540.842.178,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525.957.234,00	10.540.842.178,00	-985.115.056,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	11.395.957.234,00	10.540.842.178,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525.957.234,00	10.540.842.178,00	-985.115.056,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	inspektorat	0,00	0,00	11.395.957.234,00	10.540.842.178,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525.957.234,00	10.540.842.178,00	-985.115.056,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.938.555.480,00	1.988.339.480,00	87.361.385.232,00	80.988.730.193,50	4.264.421.066,00	5.166.773.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.625.806.298,00	86.155.504.102,50	-5.470.302.195,50
7	01		KECAMATAN	1.938.555.480,00	1.988.339.480,00	87.361.385.232,00	80.988.730.193,50	4.264.421.066,00	5.166.773.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.625.806.298,00	86.155.504.102,50	-5.470.302.195,50
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Wonosobo	0,00	0,00	11.600.785.901,00	10.563.912.933,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650.785.901,00	10.563.912.933,00	-1.086.872.968,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Wonosobo Barat	2.750.000,00	2.750.000,00	826.865.630,00	826.865.630,00	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.405.630,00	847.405.630,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja											
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Wonosobo Timur	0,00	0,00	853.332.000,00	853.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.332.000,00	853.332.000,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Jlamprang	0,00	0,00	664.237.267,00	664.237.267,00	337.500.000,00	337.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.737.267,00	1.001.737.267,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Kejiwan	47.675.000,00	47.675.000,00	759.297.904,00	759.297.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.297.904,00	759.297.904,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Sambek	19.600.000,00	19.600.000,00	837.729.483,00	822.729.483,00	30.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.729.483,00	867.729.483,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Mlipak	50.000.000,00	50.000.000,00	682.099.993,00	682.099.993,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.099.993,00	727.099.993,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0008	Kelurahan Pagerkukuh	107.315.600,00	107.315.600,00	692.500.490,00	692.500.490,00	222.500.000,00	222.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000.490,00	915.000.490,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0009	Kelurahan Rojoimo	85.000.000,00	85.000.000,00	856.697.040,00	638.297.040,00	23.000.000,00	241.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.697.040,00	879.697.040,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0010	Kelurahan Kramatan	86.110.000,00	86.110.000,00	703.446.565,00	703.446.565,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.446.565,00	728.446.565,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0011	Kelurahan Tawangsari	22.700.000,00	22.700.000,00	648.854.499,00	648.854.499,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.854.499,00	656.854.499,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0012	Kelurahan Jaraksari	6.000.000,00	6.000.000,00	1.076.284.453,00	1.076.284.453,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.284.453,00	1.226.284.453,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0013	Kelurahan Bumireso	56.800.000,00	56.800.000,00	618.304.592,00	618.304.592,00	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.304.592,00	853.304.592,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0014	Kelurahan Kalianget	42.200.000,00	42.200.000,00	844.177.760,00	844.177.760,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.177.760,00	944.177.760,00	100.000.000,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Kertek	4.984.080,00	4.984.080,00	5.004.270.265,00	4.509.804.430,00	74.876.593,00	30.645.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079.146.858,00	4.540.449.431,00	-538.697.427,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Kertek	123.350.000,00	123.350.000,00	755.774.224,00	755.773.454,00	300.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.774.224,00	1.155.773.454,00	99.999.230,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Wringinanom	125.000.000,00	125.000.000,00	789.121.410,00	590.321.410,00	27.000.000,00	425.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.121.410,00	1.016.121.410,00	200.000.000,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Selomerto	0,00	0,00	4.404.268.412,00	3.880.146.615,00	176.579.240,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.847.652,00	3.990.146.615,00	-590.701.037,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Selomerto	850.000,00	42.850.000,00	671.067.241,00	671.067.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.067.241,00	671.067.241,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Wonorejo	21.200.000,00	21.200.000,00	611.360.066,00	611.360.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.360.066,00	611.360.066,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Leksono	0,00	0,00	3.493.706.614,00	3.086.242.948,00	147.820.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.526.614,00	3.161.242.948,00	-480.283.666,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0002	Kelurahan Leksono	506.000.000,00	506.000.000,00	629.890.000,00	629.890.000,00	424.500.000,00	424.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.390.000,00	1.054.390.000,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Watumalang	0,00	0,00	3.768.625.219,00	3.212.983.727,00	561.899.619,00	502.899.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.524.838,00	3.715.883.346,00	-614.641.492,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0002	Kelurahan Wonoroto	65.260.000,00	65.260.000,00	599.898.400,00	599.898.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.898.400,00	599.898.400,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Mojotengah	0,00	4.287.000,00	5.117.204.056,00	4.542.484.419,00	80.000.000,00	116.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.204.056,00	4.659.184.419,00	-538.019.637,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0002	Kelurahan Kalibeber	84.456.800,00	84.456.800,00	771.327.419,00	771.327.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.327.419,00	771.327.419,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0003	Kelurahan Mudal	83.652.000,00	83.652.000,00	914.313.963,00	711.613.963,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.313.963,00	1.111.613.963,00	197.300.000,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0004	Kelurahan Andongsili	36.100.000,00	36.100.000,00	681.975.552,00	681.975.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.975.552,00	681.975.552,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Garung	0,00	0,00	3.925.629.252,00	3.766.686.093,50	31.884.101,00	26.867.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.513.353,00	3.793.553.869,50	-163.959.483,50	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0002	Kelurahan Garung	23.281.000,00	23.281.000,00	730.285.173,00	730.285.173,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.285.173,00	880.285.173,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kejajar	0,00	0,00	4.845.594.945,00	4.639.620.671,00	85.800.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.394.945,00	4.672.120.671,00	-259.274.274,00	

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja											
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0002	Kelurahan kejajar	0,00	0,00	613.236.426,00	641.728.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.236.426,00	641.728.426,00	28.492.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Kalikajar	0,00	0,00	3.570.878.132,00	3.310.986.194,00	43.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.628.132,00	3.310.986.194,00	-303.641.938,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0002	Kelurahan Kalikajar	19.000.000,00	22.497.000,00	580.899.132,00	580.899.132,00	470.000.000,00	670.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.899.132,00	1.250.899.132,00	200.000.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Sapuran	0,00	0,00	3.929.058.915,00	3.639.302.476,00	116.500.000,00	105.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.558.915,00	3.744.952.476,00	-300.606.439,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0002	Kelurahan Sapuran	128.550.000,00	128.550.000,00	676.800.000,00	676.800.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.800.000,00	687.800.000,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Kepil	0,00	0,00	3.761.765.974,00	3.351.001.801,00	163.171.513,00	113.171.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.937.487,00	3.464.173.314,00	-460.764.173,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0002	Kelurahan Kepil	110.000.000,00	110.000.000,00	733.208.030,00	733.208.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.208.030,00	733.208.030,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan kaliwiro	0,00	0,00	3.704.007.033,00	3.491.780.737,00	70.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.007.033,00	3.553.780.737,00	-220.226.296,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0002	Kelurahan Kaliwiro	24.350.000,00	24.350.000,00	630.255.549,00	630.255.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.255.549,00	630.255.549,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Wadaslintang	0,00	0,00	3.863.499.648,00	3.466.105.800,00	80.000.000,00	57.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943.499.648,00	3.523.505.800,00	-419.993.848,00
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0002	Kelurahan Wadaslintang	56.371.000,00	56.371.000,00	702.800.000,00	691.200.000,00	11.100.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.900.000,00	713.900.000,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00	2.804.936.034,00	2.640.293.789,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.936.034,00	2.640.293.789,00	-216.642.245,00
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Kalibawang	0,00	0,00	2.411.114.571,00	2.349.346.069,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.114.571,00	2.349.346.069,00	-101.768.502,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	7.997.745.993,00	7.795.221.831,00	74.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071.845.993,00	7.795.221.831,00	-276.624.162,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	7.997.745.993,00	7.795.221.831,00	74.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071.845.993,00	7.795.221.831,00	-276.624.162,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	7.997.745.993,00	7.795.221.831,00	74.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071.845.993,00	7.795.221.831,00	-276.624.162,00
			TOTAL	**2.023.442.799.042,00**	**1.990.205.682.651,09**	**1.483.115.784.127,00**	**1.453.034.582.832,00**	**203.648.525.448,00**	**192.905.784.048,00**	**5.500.000.000,00**	**3.450.000.000,00**	**374.630.036.600,00**	**373.710.436.600,00**	**2.066.894.346.175,00**	**2.023.100.803.480,00**	**-43.793.542.695,00**

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.022.945.975.042,00	1.989.393.858.651,09	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	370.439.864.042,00	382.240.532.651,09	
4.1.01	Pajak Daerah	142.085.000.000,00	129.500.911.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	198.126.653.597,00	209.223.515.767,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.779.572.231,00	27.804.572.231,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.448.638.214,00	15.711.533.653,09	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.651.720.111.000,00	1.606.367.326.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.536.807.893.000,00	1.468.238.672.936,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.912.218.000,00	138.128.653.064,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	786.000.000,00	786.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	786.000.000,00	786.000.000,00	

BELANJA DAERAH	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.000.000,00	330.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	496.722.841.351,00	502.047.830.472,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase arsip dalam kondisi baik Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Pendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	40.200.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.000.000,00	175.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Aset Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	143.730.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.000.000,00	280.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.000.000,00	796.500.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			

Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.399.998,00	139.401.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	210.600.000,00	179.099.000,00	
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar Persentase sekolah ramah anak Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik			
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.300.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.390.000.000,00	2.316.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	648.900.000,00	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.911.500.000,00	2.391.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	355.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	135.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.549.889.186,00	40.332.398.562,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.237.300.000,00	3.157.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.211.449.580,00	9.692.212.438,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.677.241.234,00	5.690.189.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.950.000,00	73.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	2.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	669.050.000,00	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	190.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	175.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.783.000,00	8.783.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.492.000.000,00	615.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	710.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.000.000,00	505.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	35.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	150.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	550.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	2.942.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.096.300.000,00	2.344.240.728,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	99.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	450.300.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (APK) SMP/MTs/Paket B			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	225.000.000,00	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	206.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	150.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			

Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.000.000,00	550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.172.400.000,00	2.523.329.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000.000,00	1.540.535.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.400.000,00	131.667.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.050.957.631,00	18.801.065.599,00	
5.1.05	Belanja Hibah	8.807.850.000,00	9.042.200.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.282.208.594,00	4.479.250.037,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.064.873.775,00	2.705.850.764,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.766.000,00	146.766.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	39.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	255.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	50.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	243.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.000.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	300.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	428.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			

Indikator Keluaran	: Persentase Anak Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	33.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.524.800.000,00	2.360.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.250.000,00	678.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.000.000,00	94.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.413.040,00	125.685.040,00	
5.1.05	Belanja Hibah	14.807.709.000,00	14.882.709.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.586.960,00	41.287.960,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	16.027.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	53.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	135.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan) belas tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menegah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	454.979.520,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.275.760.000,00	5.453.020.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	285.510.480,00	

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	82.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.500.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	273.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	47.600.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	4.925.000.000,00	3.280.842.857,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.450.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.005.000.000,00	869.842.857,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	51.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
Indikator Hasil	: Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Kegiatan	: 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	160.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
Indikator Keluaran	: Persentase PAUD yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

Indikator Hasil	: Rasio ketercukupan guru SMP			
Kegiatan	: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Kepala Sekolah yang mengikuti seleksi			
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	72.800.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.600.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	63.725.964.638,00	60.975.328.519,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Logistik Untuk Pelaksanaan koordinasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.996.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	42.393.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.952.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.830.000,00	44.817.575,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	91.120.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Sarana Pendukung Kerja			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.375.000,00	152.375.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan Keamanan Kebersihan Kantor			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	102.848.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.000.000,00	711.689.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Gedung kantor Persentase Realisasi Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kantor			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	168.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi Gizi buruk pada anak balita (Persen) Ratio Bed rawat inap Persatuan Penduduk Presentase fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki ijin Operasional Presentasi Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar Presentase kasus gawat darurat yang ditangani SPGDT (sistem penanganan Gawat darurat Terpadu) Angka Kesakitan Pemyakit Tidak Menular Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada anak baita (Persen) Angka Kesakitan Penyakit Menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Presentase Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai standar Presentase Desa ODF Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi syarat sesuai standar Presentase sarana air Minum yang Sesuai standar Prevalensi Ibu Hamil kurang Energi kronik (KEK) Cakupan Penduduk yang Memiliki jaminan Kesehatan Presentase Orang Terduga TBC yang Dilayani Sesuia standart Indeks Kepuasan Pelanggan labkesda rata -Rata capaian SPM Puskesmas Presentse Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana Sesuai standart SPM Presentase Penduduk usia produktf (15-59) tahun yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standart Presentase Penduduk Usia lanjut yang Mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase Orang Dengan gangguan Jiwa Berat yang mendapat pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Presentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas cakupan jaminan Kesehatan Masyarakat miskin Presentase bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	900.000.000,00	800.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.173.111.104,00	1.173.111.104,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	175.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.075.000,00	45.075.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.805.500.000,00	2.061.436.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.936.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.466.930,00	36.218.826,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.659.248.000,00	2.485.458.104,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.351.000,00	702.389.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.708.520.092,00	17.458.520.092,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.108.000,00	123.108.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prevalensi penderita DBD per 100.000 penduduk AFP Non Polio per 100.000 penduduk <15 tahun Angka keberhasilan pengobatan penderita TBC (sucses rate) (%) Persentase kasus gawat darurat terpadu yang ditangani dengan SPGDT Cakupan balita mendapat vitamin A Cakupan K4 (%) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) (%) Cakupan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita (D/S) Cakupan pemberian PMT pada balita gizi kurang Cakupan pemberian PMT pada ibu hamil KEK Cakupan pemberian tamblet Fe pada ibu hamil Persentase anak sekolah yang dimunisasi campak Persentase anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase caries gigi pada anak Persentase kasus kusta baru tanpa cacat Persentase puskesmas yang melaksanakan GERMAS Persentase puskesmas yang diakreditasi Persentase Pos Lansia yang aktif Persentase Posbindu Aktif Persentase penyehat tradisional yang terdaftar dan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Persentase penemuan pneumonia pada balita Persentase penemuan penderita diare Persentase penduduk usia produktif (15- 59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penduduk dengan akes jamban sehat Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat ARV			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			

Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	99.989.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.600.000,00	261.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.000.000,00	184.182.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	14.783.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.000.000,00	73.126.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.275.000,00	106.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.400.000,00	13.027.580,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	21.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.302.520,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	38.731.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.800.000,00	142.046.820,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.150.000,00	122.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	39.078.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	853.195.000,00	1.267.634.230,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	23.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.500.000,00	397.991.470,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	90.000.000,00	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.835.000,00	472.981.570,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.555.000,00	179.077.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	21.193.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.506.700,00	144.823.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.276.303.978,00	36.033.371.680,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.520.870,00	33.617.870,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.507.970,00	247.547.970,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	25.360.780,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.574.000,00	217.151.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.000.000,00	49.570.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	77.234.720,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.000.000,00	486.852.440,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.145.000,00	11.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	25.470.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.800.000,00	37.329.360,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.024.030,00	421.024.030,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.028.108,00	67.131.628,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	101.240.000,00	40.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	14.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.000.000,00	29.333.500,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

Indikator Hasil	: Koordinasi ke prov dan pusat dalam rangka rakor dan konsultasi Rapat koordinasi dan visitasi tenaga kesehatan Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang diterbitkan Pertemuan pengelola SDMK triwulanan Faskes yang dilakukan monitoring SDMK nya
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin undefined
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	10.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.654.200,00	20.333.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.165.000,00	71.165.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: undefined			

Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.048.000,00	663.048.000,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Indikator Hasil	: Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT) Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat			
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Persentase apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan yang memiliki ijin			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.800.000,00	107.076.050,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Persentase PIRT yang memiliki SPP-PIRT			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.780.130,00	362.629.810,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Persentase TPM dam DAM yang memiliki sertifikat Laik Higiene			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	42.107.270,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah penjual jajan anak sekolah dan PKL yang memperoleh pembinaan			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	68.624.810,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Persentase sampel makanan yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.404.870,00	153.321.370,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase makanan yang mengandung bahan berbahaya			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	0,00	

Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase FKD Aktif Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.597.000,00	91.872.780,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Wonosobo 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.534.693.274,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.482.263.640,00	1.901.638.274,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.736.360,00	283.250.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PEMENUHAN SPM KESEHATAN DI PUSKESMAS			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	114.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			

Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.290.000,00	22.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.859.000,00	272.859.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	3.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.030,00	12.900.030,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.815.320,00	134.815.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	166.000.000,00	166.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	53.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.667.000,00	5.667.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.173.000,00	24.173.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.533.000,00	1.533.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	9.240.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.673.300,00	2.673.300,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			

Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Kertek 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Presentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.294.216.480,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.511.988.000,00	1.644.234.523,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.000.000,00	41.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.040.000,00	32.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	45.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	7.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.435.000,00	285.435.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	7.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	6.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.454.000,00	105.454.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	137.500.000,00	137.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.860.000,00	40.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.925.000,00	43.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Tercapainya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.220.000,00	10.220.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Selomerto 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas yang Terpenuhi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Terpenuhi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Terpenuhi Belanja Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas yang Terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	2.324.900.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.288.926.552,00	2.914.026.552,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.000.000,00	213.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.800.000,00	105.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.490.000,00	20.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.434.000,00	232.434.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	4.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	9.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.719.674,00	132.719.674,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	159.000.000,00	159.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.900.000,00	97.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.390.000,00	42.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.000,00	369.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.872.480,00	7.872.480,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Leksono 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	938.705.157,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.333.360.000,00	677.130.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.640.000,00	33.140.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-Rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Kesehatan Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.545.000,00	76.545.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	3.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.291.000,00	180.291.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.497.000,00	4.497.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.430.500,00	80.430.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	107.720.500,00	107.720.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.429.500,00	253.429.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.905.000,00	13.905.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.600,00	452.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

Indikator Hasil	: Rata Rata Capaian Program SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Kesehatan Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	4.640.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Watumalang			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	:			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.077.119.488,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.584.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.365.241.616,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	123.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata- rata capaian SPM puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.120.000,00	99.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.580.000,00	17.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	1.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.052.000,00	250.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	9.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.542.000,00	4.542.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.448.000,00	168.448.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	158.500.000,00	158.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.140.000,00	41.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.615.000,00	19.615.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.171.000,00	1.171.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	2.820.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren Prosentase FKD Aktif			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.994.000,00	6.994.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Mojotengah			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.830.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.602.000.000,00	2.406.850.498,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	53.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	204.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.715.000,00	134.715.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	8.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	4.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.002.890,00	240.002.890,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.650.000,00	149.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	175.500.000,00	175.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.100.000,00	91.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.480.000,00	24.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.560.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.410.060,00	34.410.060,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Garung			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas yang Terpenuhi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.773.542.669,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.688.045.000,00	2.174.653.403,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.250.000,00	221.368.547,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata - rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.800.000,00	121.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	13.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.810.000,00	194.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.572.500,00	8.572.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.950.000,00	154.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	150.550.000,00	150.550.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.193.000,00	32.193.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata - rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.296.000,00	7.296.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kejajar 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.187.829.724,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.527.475.000,00	1.476.054.451,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.525.000,00	111.025.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.560.000,00	97.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	24.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.913.000,00	204.913.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	3.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	5.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.821.605,00	2.821.605,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	4.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.073.400,00	126.073.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	138.000.000,00	138.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.220.001,00	48.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.665.000,00	36.665.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.718.000,00	2.718.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Kalikajar 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.030.091.294,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.012.822.300,00	1.248.048.863,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	42.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata- rata capaian SPM puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.890.000,00	70.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.362.800,00	174.362.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.765.000,00	87.765.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	110.500.000,00	110.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.240.000,00	51.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.060.000,00	97.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.200,00	246.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase FKD Aktif
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.445.000,00	4.445.000,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Sapuran
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Prosentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.664.928.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.419.600.000,00	2.755.572.110,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.400.000,00	491.300.000,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Rata- rata capaian SPM puskesmas
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: 0

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.270.000,00	90.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	6.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	3.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.620.000,00	307.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	1.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	1.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.404.200,00	2.404.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.360.800,00	170.360.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	160.500.000,00	160.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.320.000,00	34.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.625.000,00	14.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.500,00	1.092.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase FKD Aktif Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.889.997,00	40.889.997,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kepil 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.345.710.609,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.571.680.000,00	1.457.204.898,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.600.000,00	67.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.100.000,00	53.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.747.800,00	264.747.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.285.000,00	156.285.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	148.000.000,00	148.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.720.000,00	41.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.185.000,00	64.185.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.200,00	447.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase FKD Aktif			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.749.999,00	4.749.999,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kaliwiro			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			

Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.451.982.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.592.675.000,00	2.227.435.249,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.925.000,00	31.925.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata - Rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.480.000,00	102.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	27.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	7.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.564.500,00	243.564.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.140.000,00	13.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.657.500,00	11.657.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.360.000,00	213.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	208.000.000,00	208.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.593.839,00	126.593.839,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.670.000,00	125.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.500,00	649.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase FKD Aktif			

Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.513.000,00	7.513.000,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Wadaslintang 1
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Belanja Barang dan Jasa BLUD yang terpenuhi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Terpenuhi Belanja Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Yang Terpenuhi
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.400.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.590.371.950,00	1.505.259.247,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.500.000,00	75.250.000,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.875.000,00	127.875.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	12.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.969.800,00	195.969.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	6.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	5.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.429.760,00	11.429.760,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.970.480,00	150.970.480,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	149.830.000,00	149.830.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.980.000,00	77.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.390.000,00	34.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.220,00	397.220,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.717.500,00	6.717.500,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sukoharjo 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Prosentase pengunjung Puskesmas yang dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.396.716.240,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.861.113.400,00	501.539.462,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.564.600,00	174.298.862,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	4.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.925.000,00	161.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	8.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.462.640,00	170.462.640,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	122.500.000,00	122.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619.400.000,00	619.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.550.000,00	29.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.360,00	331.360,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.520.000,00	35.520.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan Desa siaga aktifa mandiri Presentase posyandu dengan strata mandiri			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase FKD Aktif Prosentase puskesmas yang melakukan assesment tingkat ketrampilan kader			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	5.270.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			

Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Kalibawang			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	906.929.746,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.642.650.000,00	729.959.828,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	58.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	25.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.560.160,00	43.560.160,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.240.000,00	21.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.930.000,00	3.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.250.000,00	282.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.030.000,00	6.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.556.840,00	7.556.840,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.150.000,00	156.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	107.730.000,00	107.730.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.870.140,00	256.870.140,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.195.000,00	13.195.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.280,00	371.280,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.795.660,00	5.795.660,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Wonosobo 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	545.697.428,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.257.000.000,00	698.631.097,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.000.000,00	116.300.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.524.480,00	20.524.480,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.740.000,00	10.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	3.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.715.000,00	190.715.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	8.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	7.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.990.000,00	105.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	92.000.000,00	92.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.861.800,00	32.861.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.840.000,00	27.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.000,00	459.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.053.200,00	5.053.200,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Kertek 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			

Indikator Keluaran	: Presentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.077.780.097,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.119.920.000,00	1.101.184.873,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.955.000,00	327.315.900,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	200.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata- rata capaian SPM puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.960.000,00	72.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	10.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	13.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.638.600,00	313.638.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	5.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.005.000,00	126.005.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	128.000.000,00	128.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.240.000,00	34.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00	6.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	883.000,00	883.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif			

Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Presentase keluarga PHBS
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.334.400,00	5.334.400,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Selomerto 2
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	703.287.907,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.037.990.000,00	389.986.588,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	38.950.000,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Rata- rata capaian SPM puskesmas
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM di puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.065.000,00	61.065.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.160.000,00	160.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	630.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	7.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.530.000,00	7.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.399.000,00	112.399.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	122.000.000,00	122.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.400.000,00	257.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.580.000,00	58.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.000,00	578.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.365.000,00	16.365.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			

Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Leksono 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	657.787.885,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	249.245.802,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	39.500.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.743.000,00	129.743.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.720.000,00	12.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	2.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.365.400,00	171.365.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.675.000,00	90.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	110.050.000,00	110.050.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.750.000,00	335.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.670.000,00	55.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase FKD Aktif Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.783.600,00	5.783.600,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Kejajar 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas Yang Dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	462.445.022,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.170.650,00	438.056.535,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	37.600.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.600.000,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas undefined			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.780.000,00	171.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.120.000,00	27.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.741.000,00	138.741.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.433.000,00	5.433.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	9.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.090.000,00	110.090.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	117.000.000,00	117.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.559.999,00	315.559.999,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.445.000,00	34.445.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	7.980.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Kalikajar 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Layanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	990.618.003,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.288.279,00	1.151.411.177,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.750.000,00	155.450.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.613.000,00	15.613.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.970.000,00	17.970.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.850.000,00	177.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	4.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	5.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.870.000,00	151.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	125.000.000,00	125.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	51.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.070.000,00	62.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kepil 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kepil 2 tercapai Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	867.395.859,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.869.597.900,00	1.157.282.312,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.200.000,00	82.675.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.508.000,00	94.508.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.860.000,00	10.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.895.000,00	231.895.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	6.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	9.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.625.000,00	144.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	145.500.000,00	145.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.880.200,00	188.880.200,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.155.000,00	49.155.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	6.480.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.479.800,00	17.479.800,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Wadaslintang 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Presentase pengunjung puskesmas yang dilayani			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	908.491.121,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.500.000,00	668.938.528,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	102.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.360.000,00	99.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.330.000,00	9.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	6.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.320.000,00	13.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.085.710,00	169.085.710,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	5.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.530.000,00	4.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.178.751,00	131.178.751,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	114.500.000,00	114.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.500.000,00	234.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.188.000,00	18.188.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rata-rata capaian SPM Puskesmas			

Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sukoharjo 2
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Presentase Pengunjung yang dilayani
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	664.631.069,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.311.620,00	241.002.201,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.567.380,00	27.063.999,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Rata-rata Capaian SPM Puskesmas
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.480.000,00	111.480.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.255.000,00	6.255.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.260.000,00	13.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.580.000,00	164.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	6.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.100.000,00	131.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	118.386.000,00	118.386.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.440.000,00	304.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.220.000,00	47.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.000,00	403.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Cakupan Asesment Tingkat Keterampilan Kader			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Kelompok Rentan Presentase Asesment Tingkat Keterampilan Kader			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.891.800,00	6.891.800,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0026 Laboratorium Kesehatan Daerah			
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelanggan Labkesda			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	720.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Setjonegoro			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Setjonegoro			

Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	27.051.964.477,00	26.605.891.809,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Layanan SPM Rumah Sakit Terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	36.000.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.949.000.000,00	84.697.972.566,00	
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	540.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.200.000.000,00	6.100.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.001.000.000,00	2.208.561.760,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.350.000.000,00	1.242.438.240,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Bed Occupancy Ratio/ tingkat pemakaian bed pasien di RS Baku mutu limbah cair: COD (Chemical Oxygen Demand)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.465.436.896,00	11.465.436.896,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.422.426.000,00	4.756.876.000,00	

Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik undefined
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	110.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	0,00	

Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	11.305.580.693,00	10.291.093.024,00	

Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	54.908.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	63.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	24.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	269.185.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	883.842.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	153.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.450.000.000,00	0,00	
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Indikator Hasil	: Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik			
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Irigasi Yang Ditangani			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.100.000.000,00	3.214.348.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000.000,00	1.720.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			

Indikator Hasil	: Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak			
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak (Komulatif)			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	140.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	950.000.000,00	850.000.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Indikator Hasil	: Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Aman Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air limbah domestik layak Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Sanitasi (Tempat BABS)			
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.600.000,00	233.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.400.000,00	294.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	225.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	117.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.875.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	70.000.000,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
Indikator Hasil	: Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat			
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Drainase Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat			
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	900.000.000,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Indikator Hasil	: Persentase bangunan gedung Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Yang memenuhi Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)			
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung Yang Memilik Persetujuan Bangunan Gedung (komulatif)			
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.458.380,00	653.252.000,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Lahan Yang Di Tata Sesuai Rencana Teknis			
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	120.993.023,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	263.180.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.030.000.000,00	

Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Indikator Hasil	: Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani			
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Yang Tertangani			
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	266.748.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Diganti			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.057.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.800.000.000,00	9.508.439.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.058.240,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	110.370.510,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	324.640.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.292.578.000,00	57.320.446.250,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.171.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	298.828.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	950.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	4.703.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.375.000,00	205.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	9.200.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.058.395.000,00	3.496.773.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000.000,00	6.339.512.736,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dilebarkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Indikator Hasil	: Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.190.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pengguna Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Indikator Hasil	: Persentase penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR) yang dilegalisasi			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	64.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.000.000,00	632.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	215.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.936.960,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	283.063.040,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	129.584.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	55.416.000,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
Unit Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dengan RKPD			
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.910.000,00	17.826.952,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.243.250,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.478.407.644,00	5.661.394.433,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.397.263,00	

Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.756.088,00	48.771.851,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.855.900,00	21.427.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.410.000,00	43.764.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.354.488,00	713.890.772,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	202.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	57.237.466,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	45.195.727,00	
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Indikator Hasil	: Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperolah fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			
Kegiatan	: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen data BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	104.874.580,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.780.160,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	220.000.000,00	220.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.176.640,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	315.000.000,00	315.000.000,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: "Persentase penetapan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)"			
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawaswan permukiman kumuh yang disusun pada tahun N			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.725.000,00	73.408.040,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
Indikator Hasil	: Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang tertangani			
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani diluar Kawasan Permukiman Kumuh			
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			

Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	165.000.000,00	205.000.000,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Indikator Hasil	: Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)			
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Perumahan yang Terlayani Jumlah lokasi yang disediakan PSU			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.465.968,00	1.281.074.879,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.320.000.000,00	15.378.824.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.057.984,00	62.674.984,00	
Program	: 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi			
Kegiatan	: 1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum			
Sub Kegiatan	: 1.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.474.617,00	31.135.142,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan polisi Pamong Praja			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Prosentase kebutuhan Administrasi terpenuhi Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Dokumen perancanaan dan evaluasi perencanaan			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.365.304.173,00	4.704.486.529,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.576.000,00	54.576.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur yang menerima sarana prasarana tercapainya pemahaman ASN			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tercukupinya kebutuhan umum kantor cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundandan undangan			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	99.148.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: tercukupinya kebutuhan sarana prasarana			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.275.000,00	17.275.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: tercukupinya kebutuhan jasa administrasi			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah kendaraan Dinas operasional / lapangan yang di bayarkan pejak dann perizinannya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhab terpeliharanya barang-barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	150.165.521,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.376.000,00	17.376.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.000.000,00	615.000.000,00	
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase warga negara yang memperolehn layanan akibat dari Penagakan hukum, perda dan perkada Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban Ketentraman dan Keindahan)			
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: tercapainya tingkat keamanan dan kenyamanan			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.205.580,00	807.543.080,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387.200.000,00	445.862.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.594.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	516.546.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.215.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	6.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.067.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	18.310.520,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	467.037.525,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan keteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada jumlah PPNS yang terbina			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.020.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.812.372.810,00	4.537.276.566,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	39.291.281,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	10.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	148.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	135.280.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	41.860.000,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	2.580.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.550.000,00	23.550.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah desa dan kelurahan tangguh bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	53.819.892,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.819.980,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	24.544.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.250.000,00	101.605.536,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.750.000,00	37.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	46.993.932,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	465.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	84.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.537.186,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)			
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (response time)			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	35.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	49.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.850.000.000,00	1.800.400.000,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			

Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah relawan kebakaran dibawah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	11.055.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	17.977.600,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (response time)			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.350.000,00	33.103.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.650.000,00	0,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			

Organisasi	: 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Unit Organisasi	: 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program renja Perangkat Daerah dan RKPD			
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.096.234.724,00	4.089.660.948,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	46.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	26.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi belanja pengadaan barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	37.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.444.480,00	242.025.200,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	83.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	110.000.000,00	
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi Rasio penerima program usaha produktif laki- laki : perempuan			
Kegiatan	: 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			
Indikator Keluaran	: Cakupan pemberdayaan sosial KAT yang terfasilitasi kegiatan (pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas)			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	28.392.400,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.500.000,00	37.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab./kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	126.579.472,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	358.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	27.476.410,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	4.800.000,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	21.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	93.923.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.998.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	71.782.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	93.557.256,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	470.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	10.414.570,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	61.713.740,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.400.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	18.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan rehablitasi sosia			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	67.365.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			

Indikator Hasil	: Persentase KPM PKH graduasi Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial			
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kab/kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	41.121.860,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.382.360,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.627.900,00	572.527.900,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.488.400.000,00	6.784.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.735.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			

Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	55.880.684,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	3.499.000,00	
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	6.450.000,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			

Indikator Hasil	: Persentase kelengkapan makam pahlawan dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
Organisasi	: 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi			
Unit Organisasi	: 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi			
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.756.117.040,00	4.606.945.944,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksanya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	26.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	3.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	63.775.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksanya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.000.000,00	88.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	504.000.000,00	467.900.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	86.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	69.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	
Program	: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi			
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000.000,00	6.695.543.621,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Persentase instruktur yang mendapatkan sertifikat kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: [deleted] Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/start up wirausaha baru			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Menurunnya angka kasus penempatan PMI (Pra dan Purna Penempatan)			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	170.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Indikator Hasil	: Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan			
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Menurunnya jumlah perselisihan			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perselisihan yang Dicegah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentasi anggaran responsif gender Persentase perempuan sebagai tenaga professional Persentasi SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih Persentase APBDes responsif gender Partisipasi angkatan kerja perempuan Proposi kursi yang duduki perempuan di DPR			
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase penganggaran Responsif Gender Persentase pelembagaan Responsif Gender			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	34.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	91.580.000,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Peningkatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan perempuan Persentase anggota program pemberdayaan perempuan yang aktif			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	21.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Indikator Keluaran	: Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	29.310.000,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase organisasi wanita kabupaten yang aktif Penyelenggaraan hari anak			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	237.292.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	93.150.000,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif			
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pengaduan korbaN kekerasan terhadap perempuan yang di tangani			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	49.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.900.000,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan konseling Cakupan lembaga layanan tingkat desa			
Kegiatan	: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Terbentukya lembaga layanan perempuan dan anak di tingkat desa Tercapainnya penyelenggaraan Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak Pelaksanaan sosialisasi Raperda KLA Pelaksanaan monitoring lembaga layanan tingkat desa			
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	30.598.903,00	
Kegiatan	: 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan Penyelenggaraan kegiatan hari ibu Penyelenggaraan kegiatan hari kartini			
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	26.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	84.000.000,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate			
Kegiatan	: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedia data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate			
Sub Kegiatan	: 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	7.500.000,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Indikator Hasil	: Persentase desa ramah anak			
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase desa ramah anak Kegiatan pemenuhan hak anak yang terlaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	39.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	63.700.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Persentase korban kekerasan anak yang ditangani Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif			
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.920.000,00	52.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			

Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	21.898.857.534,00	21.592.789.581,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.500.000,00	145.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	80.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.194.000,00	163.006.510,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.500,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.749.500,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.553.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	471.447.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.000.000,00	134.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	856.662.608,00	802.262.608,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.297.392,00	17.297.392,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	
Program	: 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Rasio desa berlumbung pangan			
Kegiatan	: 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan			
Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	9.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	36.000.000,00	
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan pangan utama (beras) Ketersediaan energi per kapita/hari			
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	70.000.000,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase desa berstatus rawan pangan			
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya cadangan pangan Kabupaten / Kota			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase bahan pangan Aman			
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Bahan Pangan Aman			
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
Unit Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
Program	: 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
Indikator Hasil	: Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			
Kegiatan	: 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penanganan sengketa tanah garapan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mediasi			
Sub Kegiatan	: 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.936.492,00	125.282.492,00	
Program	: 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
Indikator Hasil	: Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			
Kegiatan	: 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penetapan tanah pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas umum			
Sub Kegiatan	: 2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.270.000,00	60.771.895,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.291.413.611,00	7.744.824.820,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.117.000,00	45.710.712,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.778.200,00	13.280.636,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.088.000,00	155.225.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	969.410,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.030.590,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	69.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.870.000,00	228.586.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	174.200.001,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	15.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	32.651.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan dokumen KLHS			
Kegiatan	: 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pendukung RPPLH			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.572.936,00	
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen KLHS KRP yang disusun			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	57.925.380,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	89.639.200,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase luas lahan kritis diluar kawasan hutan Persentase penduduk yang mendapatkan layanan informasi lingkungan hidup Presentase penurunan emisi gas rumah kaca Persentase mata air yang rusak dan/atau menurun debitnya Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas			
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah matai yang rusak atau mati presentase pencemaran pada titik pantau (air permukaan)			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	144.614.640,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	174.934.444,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	10.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah lahan kritis yang direhabilitasi Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	66.550.820,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indikator Hasil	: Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan			
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Luas RTH perkotaan			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.387.052.763,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	46.875.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			
Indikator Keluaran	: Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.500.000,00	86.431.108,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	0,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3			
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Jumlah limbah B3 yang disimpan sementara			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.276.108,00	
Kegiatan	: 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah limbah B3 yang disimpan sementara			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.314.280,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Indikator Hasil	: Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi			
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi			
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.718.950,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase pengurangan sampah Persentase penanganan sampah			
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	110.505.880,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.001,00	14.856.261,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.717.251.000,00	1.677.251.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.499.999,00	30.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.819.190.000,00	1.839.189.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	95.697.150,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	100.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.001.065.524,00	5.956.571.168,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.960.376,00	170.460.376,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	51.763.274,00	
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan dokumen KLHS			
Kegiatan	: 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pendukung RPPLH			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi lingkungan hidup Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Persentase mata air yang rusak dan/atau menurun debitnya Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas			
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pencemaran pada titik pantau (air permukaan) Jumlah mata air yang rusak/mati			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	33.301.070,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.459.650,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.740.350,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah media informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	41.924.120,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi Jumlah lahan kritis yang direhabilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indikator Hasil	: Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan			
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Luas RTH perkotaan			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.522.797.414,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.875.000,00	0,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3			
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Jumlah limbah B3 yang disimpan sementara			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah limbah B3 yang disimpan sementara			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Indikator Hasil	: Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi			
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi			
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendampingan dan penyuluhan lingkungan hidup			
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan KIE			
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	31.942.631,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan lingkungan			
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kasus LH yang ditangani atau diselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.075.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase pengurangan sampah Persentase penanganan sampah			
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselaranan program perangkat daerah dengan rencana kerja perangkat daerah			
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.500.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.117.045.595,00	4.675.954.041,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	147.578.517,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.997.500,00	17.985.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	201.840.930,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.900.000,00	208.234.500,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	135.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.300.000,00	469.747.994,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.202.500,00	156.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	21.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)			
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: % anak yang memiliki KIA % peningkatan kepemilikan KTP elektronik % penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.000.000,00	736.533.350,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: % peningkatan pemahaman petugas			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	98.784.000,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			

Indikator Hasil	: Rasio kepemilikan akta kematian Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen Persentase anak yang memiliki akte kelahiran			
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: % anak yang memiliki akte kelahiran % penduduk meninggal yang dibuatkan akte kematian			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	27.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: penyelesaian digitalisasi arsip			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan Persentase cakupan updating data kependudukan			

Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Indikator Keluaran	: ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	10.250.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.149.360,00	15.149.360,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	18.000.000,00	

Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat komputer yang diunakan untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	

Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi	: 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unit Organisasi	: 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
Indikator Hasil	: Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik

Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa			
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan penataan desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.894.200.000,00	1.610.965.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.400.000,00	1.800.000,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk			
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota			
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	19.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	26.848.130,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	26.708.810,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase BUMDes berkembang dan maju Persentase BUMDes berbadan hukum Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa Persentase desa berkinerja baik			

Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat tepat waktu Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	19.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	17.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.527.710.000,00	3.272.561.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	82.199.772,00	

Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	61.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	25.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	22.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	11.593.280,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Indikator Hasil	: persentase posyandu aktif persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa persentase lembaga kemasyarakatan aktif			
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Kemasyarakatan desa aktif melakukan kegiatan pemberdayaan			
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	24.945.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	31.481.670,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	500.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: - Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik			
Kegiatan	: 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.200.000,00	

Kegiatan	: 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Lap Keu Akhir thn, Lap Keu Audited dan Lap Keu Bulanan)			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.694.584.102,00	4.425.311.164,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	54.196.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	10.159.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.080.000,00	21.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	218.892.461,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	33.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.400.000,00	363.784.700,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.000.000,00	123.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	13.830.000,00	
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun Rata-rata jumlah anak per keluarga			
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk GDPK yang diimplementasikan sebagai dasar perencanaan Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek			

Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	9.999.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0004 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	28.993.000,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pemutakhiran data Rumah Data Paripurna di kampung KB Persentase ketersediaan data kependudukan			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	50.828.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.078.000,00	60.078.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.400.000,00	168.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	126.000.000,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Indikator Hasil	: Kepersertaan KB pria Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Drop out KB Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 51 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)			
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan advokasi KIE			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	42.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.544.000,00	806.515.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	360.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	169.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.380.000,00	19.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.965.000,00	248.159.450,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga penyuluh yang berkompeten			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.000.000,00	795.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	40.655.350,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase SDM yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	36.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.061.808.000,00	2.047.487.201,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	19.260.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.600.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	7.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.830.000,00	45.516.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	19.916.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	40.616.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria			
Indikator Keluaran	: Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	16.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	16.809.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	13.675.145,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Indikator Keluaran	: Persentase Kampung KB Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Persentase peran serta organsiasi kemasyarakat Persentase Pokja Bangga Kencana			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.425.000,00	15.849.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.790.000,00	322.790.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			

Indikator Hasil	: rata rata usia kawin pertama wanita rata rata usia melahirkan pertama perempuan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa angka kelahiran remaja perempuan usai 15-19 ASFR cakupan PUS peserta KB anggta UPPKS yang ber KB Mandiri cakupan anggota bina keluarga remaja cakupan anggota bina keluarga balita cakupan anggota bina keluarga lansia ber KB
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan pembinaan keluarga/realisasi kegiatan
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.000.000,00	265.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	195.000.000,00	

Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Indikator Keluaran	: Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	13.261.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	13.261.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.034.000.000,00	2.034.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.440.800.000,00	2.440.800.000,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
Unit Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

Indikator Hasil	: Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota			
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.715.000.000,00	1.139.300.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.325.000.000,00	4.780.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.818.760,00	878.089.327,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
Indikator Keluaran	: Jumlah terminal tipe c yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.328.756,00	98.892.013,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.500.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
Indikator Keluaran	: Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang dikeluarkan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.940.000,00	6.448.000,00	

Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.030.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.822.780,00	176.625.044,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.263.000,00	129.109.616,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.054.240,00	779.233.381,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	8.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen andalalin yang disetujui			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	2.748.150,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruas Jalan yang di Audit atau di Inspeksi			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.105.000,00	341.832.403,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah ruas jalan yang dilalui trayek angkutan umum			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.735.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.850.000,00	35.588.000,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Indikator Hasil	: Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah ijin usaha yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.201.492,00	139.820.350,00	
Kegiatan	: 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	30.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.482.984.873,00	4.359.331.859,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.560.000,00	70.560.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terealisasi			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.603.720,00	367.603.720,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.744.062,00	67.602.341,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	72.672.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	89.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.125.686,00	290.928.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	88.518.869,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	45.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000,00	32.455.999,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.821.409,00	81.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	92.155.537,00	
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Indikator Hasil	: Nilai kelembagaan PPID Nilai informasi tersedia setiap saat Nilai aksesibilitas website			
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Nilai Keterbukaan Informasi Publik			
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media			
Indikator Keluaran	: Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.865.000,00	144.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.074.970,00	136.577.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.796.490,00	28.371.490,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.195.200.000,00	3.276.632.718,00	
5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	11.885.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.212.500,00	16.300.000,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Indikator Hasil	: Nilai manajemen SPBE Nilai tata kelola SPBE Nilai layanan SPBE Nilai kebijakan internal SPBE			
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tingkat Kematangan Kebijakan Internet Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan TNDE			

Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	14.927.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.115.369,00	1.075.957.248,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.974.262,00	58.974.262,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas			
Indikator Keluaran	: Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	12.300.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
Organisasi	: 3.30.2.17.0.00.03.0000 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Unit Organisasi	: 3.30.2.17.0.00.03.0000 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan omzet koperasi			
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan pengawasan dan pembinaan koperasi Jumlah Koperasi yang diawasi Pertumbuhan Omzet Koperasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.692.000,00	14.895.260,00	
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
Indikator Hasil	: Presentase Koperasi Aktif Persentase KSP/USP koperasi sehat			
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah USP Sehat Jumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan koperasi Presentase KSP/USP Sehat Jumlah KSP Sehat Presentase Koperasi Aktif			
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	20.880.470,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.239.680,00	19.729.997,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Persentase koperasi produksi Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar online Persentase koperasi yang mengakses pembiayaan perbankan			
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase koperasi produksi secara keseluruhan Jumlah Koperasi Aktif Kategori Sehat yang bisa 5mengakses Perbankan Presentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar online Jumlah Koperasi yang menghasilkan produk			
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	94.064.018,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/ UB Presentase Masyarakat Miskin Yang Menjadi Wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB Persentase usaha mikro yang mengakses pembiayaan perbankan Presentase Rumah Tangga Miskin yang Menjadi Wirausaha yang Mengakses Modal Usaha Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha			
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemudahan perijinan Presentase Usaha mikro yang mengakses pembiayaan perbankan Jumlah usaha mikro telah di data untuk di kembangkan Jumlah usaha mikro telah di data untuk di kembangkan (terget awal 100. target akhir 300) Jumlah usaha mikro yang akan di berdayakan Jumlah Usaha Mikro yang akan diberdayakan Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi kemudahan perijinan Pertumbuhan Jumlah usaha mikro Presentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB			
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000,00	602.519.297,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
Indikator Hasil	: Presentase Unit usaha Mikro Naik Kelas Yang Difasilitasi Presentase Usaha Mikro yang Mempunyai Izin Usaha			
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Indikator Keluaran	: Presentase Unit Usaha Mikro naik kelas yang difasilitasi presentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil			
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro			

Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.845.000,00	44.845.000,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	755.155.000,00	755.155.000,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: undefined			
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.819.713.826,00	2.793.774.905,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.000.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.237.405,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	109.577.121,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	28.154.820,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	96.000.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	134.087.420,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.808.552,00	791.694.472,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	86.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.580.008,00	33.290.004,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan NIlai Investasi di Bidang Pertanian Pertumbuhan NIlai Investasi di Bidang Pariwisata			
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Kajian Draft Raperbup atau Raperda/NA Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	8.479.400,00	
Kegiatan	: 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Pra Feasibility Study potensi dan peluang investasi di Kabupaten Wonosobo dalam satu tahun			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	56.900.000,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi			
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	8.450.000,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang Pertanian dan Pariwisata Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi			
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.500.000,00	77.466.900,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya			
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Presentase Pengelolaan Data/informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi			
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.872.880,00	38.228.040,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	23.627.120,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			

Indikator Hasil	: Persentase pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda Persentase organisasi pemuda yang aktif			
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelatihan dunia usaha			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda			
Indikator Keluaran	: Jumlah yang menerima penghargaan pemuda			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	80.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Indikator Hasil	: Persentase atlet berprestasi			
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase Atlet Berprestasi			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.600.000,00	74.150.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.303.400.000,00	2.285.850.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Cabor dalam Kegiatan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat/kota			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	800.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet cabor yang mengikuti pembinaan persentase Penyediaan Data dan Informasi Sektoral jumlah pelatih dan atlet yang mengikuti pelatihan Jumlah atlet berprestasi yang diberikan penghargaan			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Olahraga yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	80.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.080.000.000,00	5.750.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Olahraga Rekreasi yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	150.000.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan			
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prestasi Bidang Pramuka			
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	230.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan data sektoral			
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase PD yang sudah memutakhirkan data sektoral di porrtal satu data			
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	22.260.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	33.400.000,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Indikator Hasil	: Indeks Keamanan Informasi			
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Sistem Informasi yang sudah dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	24.880.000,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: Persentase obyek budaya yang terinventarisis Persentase obyek budaya yang dilestarikan			
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku budaya lokal			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	27.134.680,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	224.320.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	835.000.000,00	2.585.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	49.389.673,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	1.367.864.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pendampingan			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.000.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Indikator Hasil	: Persentase kelompok seni pertunjukan tradisional yang mendukung event pariwisata skala kabupaten			
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah kesenian yang terfasilitasi Jumlah kesenian yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase cagar budaya yang ditetapkan Persentase obyek diduga cagar budaya yang terdata			
Kegiatan	: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah ODCB dan CB yanag ditetapkan bupati			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	32.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah CB yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	19.143.600,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan Persentase pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat Persentase penambahan koleksi Persentase perpustakaan terakreditasi Persentase koleksi digital			
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan			

Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.270.818,00	445.915.378,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan informasi Perpustakaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.307.880,00	36.307.880,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.208.376,00	34.118.376,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan jumlah kunjungan perpustakaan			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.156.000,00	16.029.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.783.510,00	54.783.510,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.132.634,00	375.057.634,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
Indikator Hasil	: Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa Cakupan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya			
Kegiatan	: 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan jumlah koleksi naskah kuno yang dikelola dan dialihmedia			
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.530.000,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			

Kegiatan	: 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan gaji dan tunjangan ASN Presentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.417.473.565,00	4.374.692.365,00	
Kegiatan	: 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	116.800.000,00	
Kegiatan	: 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase realisasi pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.356.850,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.066.680,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.127.280,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.000.000,00	576.900.000,00	
Kegiatan	: 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.156.592,00	48.156.592,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan arsip secara baku Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori baik Persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik			
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perawatan arsip daerah			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.450.000,00	159.346.119,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah OPD dan desa yang menggunakan sistem kearsipan sesuai dengan NSPK
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.766.660,00	18.983.850,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Wonosobo
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	

Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengembangan kapasitas nelayan kecil
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
Indikator Keluaran	: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	30.000.000,00	

Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Indikator Hasil	: Pertumbuhan produksi perikanan budidaya Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan Persentase jumlah kelompok tani ikan yang aktif Persentase UPR aktf

Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya peningkatan kapasistas bagi pembudidaya ikan kecil			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	154.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	445.000.000,00	456.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	140.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase reaslisasi belanja pelayanan administrasi			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.665.287.036,00	5.014.739.479,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan sarpras pendukung kerja			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.834.680,00	13.834.680,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	37.282.400,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan sarpras pendukung kerja			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.000.000,00	110.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan sarpras pendukung kerja			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.000.000,00	143.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.262.000,00	220.262.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan sarpras pendukung kerja			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	62.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.738.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	7.000.000,00	
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Operasional Obyek Wisata Milik Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Lokasi Jumlah Destinasi Wisata yang terkelola			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.390.000.000,00	1.269.330.850,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	44.915.150,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	1.642.960,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Titik Kawasan Jumlah KSPK yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.607.232,00	289.664.893,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.718.360,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.059.700,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan event wisata tingkat nasional Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan Pertumbuhan jumlah kemitraan pariwisata			
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Jumlah Promosi wisata dalam dan luar negeri entang daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten			
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.316.378,00	142.791.378,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	0,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.183.622,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.793.628,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.700.000,00	55.106.770,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.300.000,00	2.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	335.637.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	267.076.000,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan Persentase klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang			
Kegiatan	: 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase zona ekonomi kreatif yang dimanfaatkan Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	286.361.670,00	
Kegiatan	: 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0004 Penyediaan Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0021 Perlindungan Hasil Kreativitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Indikator Hasil	: Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi Persentase kelembagaan pariwisata Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi			
Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Indikator Keluaran	: Presentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi tingkat dasar			
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	42.448.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	34.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	41.381.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Prosentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas			
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	142.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	58.670.000,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			

Indikator Hasil	: Produksi tanaman hortikultura (Manggis) Produksi tanaman hortikultura (sawi) Produksi ternak (Domba) Produksi tanaman biofarmaka (Jahe) Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo Produksi ternak (Sapi perah) Produksi tanaman pangan (Ubi Kayu) Produksi tanaman pangan (Padi) Produksi tanaman hortikultura (Durian) Produksi tanaman pangan (Ubi Jalar) Produksi ternak (Kambing) Produksi tanaman hortikultura (cabe) Produksi ternak (Sapi Potong) Produksi bunga (Krisan) Produksi ternak (unggas) Produksi bunga (Mawar) Produksi tanaman biofarmaka (Kapulaga) Produksi tanaman hortikultura (Bawang Daun) Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi Produksi tanaman hortikultura (Bawang Putih) Produksi tanaman hortikultura (Nanas) Produksi tanaman hortikultura (Duku/ langsat) Produksi tanaman perkebunan (Kelapa) Produksi tanaman hortikultura (Pisang) Produksi tanaman hortikultura (kentang) Produksi ternak (Kelinci) Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim Produksi tanaman hortikultura (Pepaya) Produksi tanaman hortikultura (Nangka) Produksi tanaman hortikultura (Salak) Produksi tanaman hortikultura (Kubis) Produksi tanaman perkebunan (Kopi) Produksi tanaman pangan (Jagung)
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penmgawasan penggunaan sarana pertanian
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.712.800,00	225.262.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	344.287.200,00	394.737.200,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.831.513.050,00	3.036.162.631,00	
5.1.05	Belanja Hibah	877.511.250,00	1.379.890.750,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.333.212,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	24.666.788,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	40.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pendaftaran Varietas Unggul Lokal Terlaksananya Kontes Domba Wonosobo			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengadaan ternak			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	150.300.000,00	

5.1.05	Belanja Hibah	2.050.000.000,00	2.354.700.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			
Indikator Keluaran	: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.994.300,00	5.994.300,00	
5.1.05	Belanja Hibah	633.000.000,00	633.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	19.250.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	221.500.000,00	125.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	180.000.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Indikator Hasil	: Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) / zoonosis yang ditangani			
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengendalian dan penanggulanagan penyakit hewan dan zonosii			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.525.000,00	85.000.000,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	70.000.000,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Gapoktan aktif Persentase kelompok tani aktif			
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyuluhan pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	578.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Organisasi	: 3.30.2.17.0.00.03.0000 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Unit Organisasi	: 3.30.2.17.0.00.03.0000 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat			
Kegiatan	: 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD Capaian Triwulan, LKJIP, POBL, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Tindak Pengendalian, Indikator Kinerja Tahunan dll Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan & Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.975.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.935.398.624,00	7.784.052.031,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.765.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	19.750.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	19.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	19.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.422.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.600.000,00	87.265.600,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Mebel Lainnya yang Dipelihara Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	987.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.065.332,00	989.065.332,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.732.323.914,00	1.665.087.891,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase Jumlah BMD yang terpelihara Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Pemeliharaan Mebel Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.377.000,00	70.857.830,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.060.601,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	19.750.000,00	
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
Indikator Hasil	: Persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap barang perdagangan			
Kegiatan	: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
Indikator Keluaran	: Persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap barang perdagangan Jumlah Perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di fasilitasi Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang di terbitkan			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.544.990,00	61.650.438,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase pasar dalam kondisi baik Persentase kios/ los yang dimanfaatkan			
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Presentase los/kios yang dimanfaatkan Jumlah sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun/renovasi/rehap Jumlah sarana distribusi perdagangan yang tersedia Persentase pasar dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.183.375,00	989.800.829,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.750.000,00	70.000.200,00	
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan dibina Jumlah Pengelola sarana Distribusi Perdagangan dibina Jumlah pengelola pasar yang akan adakan pembinaan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	31.007.926,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.350.000,00	12.657.696,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
Indikator Hasil	: Persentase disparitas harga kepokmas antar wilayah Jumlah Barang Penting yang Di awasi Jumlah Pelaku Usaha Distribusi Pupuk Bersubsidi yang di Awasi			
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah stok barang pokok dan penting yang tersedia Jumlah barang pokok dan barang penting yang diawasi stoknya jumlah barang penting yang diawasi Presentase dispasirtas harga kepokmas antar wilayah Jumlah pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.630.000.000,00	1.542.000.000,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan pemantauan harga Jumlah barang pokok dan penting yang diawasi stoknya			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	55.206.018,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan komoditas eksport			
Kegiatan	: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah produk unggulan yang menjadi komoditas ekspor jumlah kegiatan pameran dagang lokal Jumlah Kegiatan pameran yang dilaksanakan Jumlah komoditas ekspor yang di promosikan Jumlah Komoditas Ekspor yang di promosikan Jumlah pelaku usaha yang telah dibina dan dilatih jumlah produk ekspor yang mempunyai citra pertumbuhan jumlah komoditas ekspor			
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	35.048.421,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
Indikator Hasil	: Rasio metrologi legal yang ditera, tera ulang 8%			
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan TTU di Kantor Terlaksananya Pembinaan pelaku usaha pengguna UTTP Terlaksananya Sidang Pasar			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	35.685.585,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	19.627.550,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.750.000,00	0,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan omset market place lokal produk UMKM Persentase market place lokal yang memasarkan produk lokal Persentase toko modern yang memasarkan produk lokal			
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah market place yang memasarkan produk lokal Jumlah produk lokal yang dipasarkan di Toko Modern presentase marketplace lokal yang memasarkan produk lokal Pertumbuhan omset market place lokal produk umkm Presentase toko modern yang memasarkan produk lokal jumlah produk lokal yang masuk sistem jaringan perdagangan			
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.155.396,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
Organisasi	: 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi			
Unit Organisasi	: 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi			
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri			
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	300.000.000,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan penyediaan informasi industri			
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	24.065.362,00	

Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Program	: 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Indikator Hasil	: Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman
Kegiatan	: 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman
Sub Kegiatan	: 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
Indikator Keluaran	: Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000,00	0,00	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja administrasi umum Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.334.200,00	9.696.678,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.495.062,00	5.919.300,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.770.000,00	38.966.838,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.200.000,00	58.960.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.659.160,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.190.000,00	
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan			
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.530.438,00	395.931.868,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.427.200,00	38.420.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.409.000,00	129.550.060,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah kesepakatan (MOU) yang dihasilkan			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.401.400,00	54.886.060,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah			

Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	12.826.596,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	52.690.800,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.960.000,00	17.040.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			
Indikator Keluaran	: Rata-rata Nilai RB Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	120.456.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	119.405.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	74.204.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah			
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase realisasi belanja pelayanan administrasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.117.500,00	6.683.968,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.134.000,00	6.198.150,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.820.000,00	6.219.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	45.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.000.000,00	
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: persentase peraturan daeerah yang di tindaklanjuti dengan peraturan bupat			
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Indikator Keluaran	: persentase jumlah gugatan yang difasilitasi Persentase penyusunan produk hukum nilai JDIH kabupaten			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	164.442.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	120.695.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	144.708.450,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			

Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.371.037,00	11.436.967,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.477.340,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.925.000,00	20.500.700,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	

Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.288.000,00	69.769.660,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.930.686,00	13.798.412,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.000.000,00	
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: Presentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan			
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
Indikator Keluaran	: Presentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.926.728.200,00	3.256.629.082,00	
5.1.05	Belanja Hibah	295.400.000,00	80.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.871.800,00	138.840.972,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	74.959.278,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Umum Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	21.231.143.517,00	19.670.953.373,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000,00	2.223.939.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.190.000.000,00	1.235.340.902,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	650.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000.000,00	100.000.000,00	

Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.098.080,00	581.098.080,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.858.500,00	2.801.578.500,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.156.687,00	510.156.687,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	510.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.342.085,00	1.250.342.085,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	30.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.045.115.040,00	1.419.204.111,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	325.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.520.871,00	35.520.871,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	600.000.000,00	600.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Fasilitasi Rumah Tangga Sekretariat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	900.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	365.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah			
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	41.530.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.423.000,00	27.423.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor Yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.197.155,00	9.197.155,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP			

Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP/jumlah seluruh BUMD x 100 Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan/jumlah semua rekomendasi bidang perekonomian dan SDA x 100			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	180.072.314,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.296.990,00	213.131.358,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
Indikator Keluaran	: Jumlah kebijakan sumber daya Alam yang dipublikasikan			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.000.200,00	476.788.508,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.461.938,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Pelayanan Administrasi Kantor yang Terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.381.400,00	92.700.398,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.303.400,00	136.606.975,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.249.000,00	7.249.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.500.000,00	334.180.075,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Pengadaan Sarpras Pendukung Kinerja yang Terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.923.000,00	127.186.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000,00	1.815.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	35.400.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	52.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	15.400.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Realisasi Pelaksanaan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan Daerah, dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.537.025,00	121.812.025,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.020.000,00	209.048.633,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.331.760,00	37.084.060,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah			
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan sarpras pendukung kierja Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.275.494,00	10.275.494,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	2.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.780.000,00	58.280.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan sarpras pendukung kierja Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan sarpras pendukung kierja			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.869.801,00	1.869.801,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.930.686,00	19.260.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik Persentase pemenuhan sarpras pendukung kierja Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.628.701,00	39.233.086,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Presentase rekomendasi hasil koordinasi bagian administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti Rata-rata Capaian kinerja Perangkat Daerah Pertriwulan			
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Presentase rekomendasi hasil koordinasi bagian administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti Rata-rata Capaian kinerja Perangkat Daerah Pertriwulan			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.776.000,00	16.772.179,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.943.748,00	435.984.403,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.096.337,00	110.022.190,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi/ jumlah pelayanan perkantoran			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	56.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarpras pendukung kinerja yang terpenuhi/ jumlah kebutuhan sarpras pendukung kinerja			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jumlah anggaran belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	36.600.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Jumlah anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			

Indikator Hasil	: Indeks Tata Kelola Pengadaan			
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Indeks tata Kelola Pengadaan			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.097.890,00	77.271.156,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	27.557.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	42.283.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD			
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.615.561.529,00	3.243.100.422,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	241.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	165.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.800.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	336.350.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	570.850.000,00	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase realisasi belanja Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.519.860.000,00	1.502.144.470,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase realisasi pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.288.688,00	716.288.688,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	110.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	375.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Indikator Keluaran	: Presentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	27.776.249.594,00	27.776.249.594,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.370.000,00	24.370.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.821.022.301,00	7.301.441.151,00	
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Indikator Hasil	: Persentase Hasil Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Persentase Peraturan Daerah Inisiatif DPRD			
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	102.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.000.000,00	310.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Agenda Kerja DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.142.380.000,00	1.550.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	172.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	195.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.860.000,00	483.260.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Persentase aspirasi masyarakat yang sesuai dengan prioritas daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses			
Indikator Keluaran	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000.000,00	1.378.135.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Belanja Belanja Administrasi Umum			
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.385.000,00	3.525.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.238.280,00	6.025.768,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.494.463.870,00	6.143.926.432,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	5.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	31.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	1.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.782.000,00	109.168.800,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	131.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.658.240,00	486.275.300,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.583.052,00	109.583.052,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	34.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	25.362.374,00	
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase kesesuaian program RKPD dan RPJMD			
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan yang disusun			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	52.458.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	185.340.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.250.000,00	58.496.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	70.750.000,00	45.750.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD yang Tersusun Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	18.695.320,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu			
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.200.950,00	66.078.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.679.835,00	175.251.160,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.216.480,00	137.146.592,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	36.190.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	126.593.954,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	104.479.168,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			

Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	44.110.182.280,00	39.074.833.860,50	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	23.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	264.127.165,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.000.000,00	316.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	357.608.052,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.300.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696.000.000,00	466.546.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.087.621.389,00	12.495.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.500.000,00	1.128.551.392,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	215.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	245.800.000,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	15.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	15.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	20.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	101.362.004,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	45.500.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.500.000,00	205.833.920,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.000.000,00	103.045.154,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.716.000,00	37.216.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	359.748.418.000,00	358.828.818.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	3.450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.881.618.600,00	14.881.618.600,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	169.770.000,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	25.066.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	452.172.913,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	227.406.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	57.187.100,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.995.306,00	333.995.571,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.327.495.091,00	941.545.091,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000.000,00	1.434.575.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	180.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0001 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN			
Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah			
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program renja Perangkat Daerah dan RKPD			
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.999.908,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.837.475.266,00	4.468.519.114,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	47.800.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Adminisrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.250.000,00	49.199.692,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	59.999.880,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.400.000,00	132.211.119,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	48.500.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.002.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.600.000,00	234.200.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	102.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	38.000.000,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi			
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	6.433.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.900.000,00	95.523.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	38.233.010,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	164.348.881,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang Difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	6.148.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	446.610.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Yang Difasilitasi Pengembangan Kompetensi			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	40.001.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.020.000,00	976.764.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.998.500,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan / Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	8.566.990,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	8.241.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.990.000,00	11.796.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.010.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	7.200.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program	: 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			
Indikator Hasil	: Presentase Inovasi yang diterapkan Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			
Kegiatan	: 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			
Indikator Keluaran	: Prosentase Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan			
Sub Kegiatan	: 5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	62.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.03.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	24.574.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.03.2.01.0006 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	104.190.000,00	
Kegiatan	: 5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 5.05.03.2.02.0002 Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	15.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.03.2.02.0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	47.420.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.03.2.02.0026 Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	14.825.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 inspektorat			
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 inspektorat			
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program renja Perangkat Daerah dan RKP			
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	53.159.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.200.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.386.853.234,00	8.424.476.396,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen layanan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	400.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	43.769.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	21.660.082,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	166.275.018,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang dan Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	2.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	347.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.000.000,00	222.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	34.711.200,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
Indikator Hasil	: Persentase tindak lanjut hasil review APIP dan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan			
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Presentase Pemeriksaan Internal yang dilaksanakan Presenstase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.780.000,00	104.302.382,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.480.000,00	76.688.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	15.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.930.000,00	102.958.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.614.000,00	12.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.100.000,00	109.663.100,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Presentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Presentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dan Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	27.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.600.000,00	69.720.000,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Indikator Hasil	: Persentase perangkat daerah yang didampingi dan diasistensi Capaian pemenuhan data dukung area intervensi			
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			
Indikator Keluaran	: Presentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pendampingan dan Asistensi Presentase Pemenuhan Data Dukung Area Intervensi			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	11.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	79.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	15.110.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN			
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kinerja ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	10.713.563.738,00	9.704.092.770,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD perjalanan dinas Rapat			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.709.900,00	6.709.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.606.800,00	10.606.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	40.150.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pengadaan peralatan (kamera vidcom, microphone vidcom, Printer, Laptop, sarpras LAN)			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.500.000,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktiû tas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	24.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Peningkatan Efektiûtas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecam Cakupan Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.700.000,00	98.700.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.015.463,00	61.075.463,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi FKDM Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.290.000,00	51.090.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	91.838.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Wonosobo Barat			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	12.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.259.302,00	8.259.302,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.900.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.540.000,00	20.540.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	13.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.660.698,00	104.598.240,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	6.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	17.300.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.005.630,00	462.408.088,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	65.000.000,00	

Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	

Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Wonosobo Timur
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.865.000,00	2.684.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.205.700,00	8.645.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	2.602.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.408.500,00	4.408.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena Dukungan Jasa Penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.150.000,00	62.718.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	6.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	6.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	5.950.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.982.800,00	612.782.800,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.330.000,00	68.330.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiba			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			

Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Jlamprang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.685.000,00	3.685.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	37.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.377.889,00	112.417.889,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	10.100.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.854.378,00	321.214.378,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.540.000,00	89.540.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Kejiwan			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	1.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.280.320,00	5.580.320,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	9.540.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.346.800,00	13.346.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.556.000,00	126.096.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	29.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	8.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.630.784,00	355.630.784,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.589.000,00	95.589.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase Konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	9.560.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.895.000,00	15.895.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Sambek			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.434.000,00	30.434.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.280.000,00	14.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.120.005,00	145.200.005,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	60.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.437.478,00	295.357.478,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.410.000,00	153.410.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Presentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.950.000,00	48.950.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.598.000,00	31.598.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Mlipak			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.040.000,00	22.340.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	10.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.600.000,00	115.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.160.000,00	14.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.439.545,00	292.239.545,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.289.638,00	103.289.638,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase Konflik Antar Kelompok/Desa/Kelurahan Terselesaikan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.810.810,00	66.810.810,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.060.000,00	8.060.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Pagerkukuh			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran presentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000,00	1.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.498.270,00	5.798.270,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.268.450,00	3.268.450,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.485.800,00	5.785.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.900.600,00	5.834.128,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Fasilitasi Pelayanan Umum Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.685.360,00	98.351.832,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Sarpras Kantor Dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.656.810,00	2.656.810,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.845.200,00	4.845.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.158.555,00	11.158.555,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.695.920,00	391.695.920,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.848.765,00	101.848.765,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.893.880,00	17.893.880,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.480.880,00	6.480.880,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.812.000,00	9.812.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Rojoimo			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian Pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	6.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	41.400.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.557.040,00	114.257.040,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	6.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	7.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	15.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	200.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Presentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang Terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.440.000,00	375.440.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran, Kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan ketertiban Umum tingkat Kecematan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Mengingkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0010 Kelurahan Kramatan			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.994.405,00	2.994.405,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.442.160,00	85.142.160,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	7.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Lembaga Pemberdayaan Masyrakat yang terfasilitasi persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.390.000,00	407.390.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	57.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0011 Kelurahan Tawangsari			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.544.000,00	2.544.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktiû tas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.780.474,00	9.780.474,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.112.240,00	117.910.640,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Presentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.020.970,00	287.222.570,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.580.000,00	58.580.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Prosentase konflik antar kelompok/ desa/ kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.300.595,00	78.300.595,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.716.220,00	7.716.220,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0012 Kelurahan Jaraksari			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan Sarpras Kantor Pendukung Kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya pelayanan Administrasi Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.264.000,00	15.264.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.867.360,00	111.867.360,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.461.093,00	13.461.093,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.713.430,00	583.713.430,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.349.000,00	80.349.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.779.570,00	175.779.570,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0013 Kelurahan Bumireso			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor Yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.700.000,00	112.840.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Jasa Pemeliharaan kantor yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	9.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	19.600.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Akt			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.044.592,00	321.804.592,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnnya Rasa Cinta Tanah Air yang Didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0014 Kelurahan Kalianget			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi PerkantoranPresentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.097.760,00	151.697.760,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	18.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	33.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.800.000,00	453.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi PKK			

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan,			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Cakupan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kertek			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kertek			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.097.759.696,00	3.633.938.861,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.400,00	3.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.805.250,00	10.805.250,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.075.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	330.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.876.593,00	30.645.001,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.040.000,00	118.965.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.215.919,00	31.215.919,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedi Persentase penurunan kasus pernikahan usia anak nilai rata-rata persepsi pelayanan undefined			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	31.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	73.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R Persentase desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase pelanggaran pilkades yang terselesaikan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar Persentase kenaikan Indeks ketahanan ekonomi IDM Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar.			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Administrasi dan Keuangan Desa, APBDes, RKPDes, PERDES PERKADES, Inventarisasi Aset Desa			

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	89.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kertek			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Kertek			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Komponen Instalasai Penerangan Bangunan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,Cakupan Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.044.275,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.551.499,00	12.253.744,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	7.160.660,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.313.100,00	26.313.100,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Yang Menerima Jasa Pelayanan Umum Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.760.000,00	53.760.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Sarpras Kantor Dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	100.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif undefined			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.823.950,00	12.823.950,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.275.775,00	510.206.375,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: undefined			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.855.625,00	57.105.625,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian Pelanggaran,Kebencanaan,Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instanksi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	

Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator Keluaran	: Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.500.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kertek
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Wringinanom
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Komponen Instalasai Penerangan Bangunan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,Cakupan Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.847.998,00	6.847.998,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	1.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.724.000,00	5.724.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	27.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Yang Menerima Jasa Pelayanan Umum Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.800.000,00	105.840.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Sarpras Kantor Dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	57.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.353.625,00	9.322.150,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	398.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.852.600,00	216.977.600,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.232.000,00	81.252.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian Pelanggaran,Kebencanaan,Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.444.125,00	55.630.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.127.062,00	25.927.062,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Selomerto			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Selomerto			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.720.374.462,00	3.204.777.665,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.080.240,00	8.080.240,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.874.210,00	23.034.210,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.579.240,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.179.500,00	106.419.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang melakukan verval data secara kontinyu			

Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.000.000,00	130.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	6.500.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Selomerto			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Selomerto			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	8.232.230,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	3.181.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	3.207.770,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.630.000,00	21.260.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	10.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.303.136,00	159.013.136,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	3.578.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	4.800.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi persentase kenaikan BUMDes rintisan menjadi BUMDes dengan status berkembang			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif jumlah pelaksanaan Musrenbang			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.385.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.984.105,00	359.509.105,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase ZIS Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades persentase kenaikan ZIS			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Selomerto			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Wonorejo			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			

Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.020.290,00	13.920.290,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	41.790.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.530.304,00	131.090.304,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.586.176,00	3.586.176,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.758.000,00	6.758.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi persentase kenaikan BUMDes rintisan menjadi BUMDes dengan status berkembang			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: jumlah pelaksanaan Musrenbang Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.015.296,00	289.015.296,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasi Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan			

Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.033.000,00	10.033.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.967.000,00	4.967.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase ZIS Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Leksono			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Leksono			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.285.000,00	7.285.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.838.926.614,00	2.433.642.948,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.119.600,00	24.119.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.410.300,00	4.410.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.093.100,00	49.093.100,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.820.000,00	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	33.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.592.000,00	63.592.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.360.000,00	66.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.790.000,00	44.790.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.130.000,00	36.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Leksono			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Leksono			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	2.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.917.780,00	7.217.880,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.724.700,00	5.724.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	24.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Produktiûtas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.070.000,00	12.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.310.000,00	43.310.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.002.520,00	11.002.520,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat aktif			

Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.445.390,00	12.445.390,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.993.985,00	378.693.885,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.103.625,00	52.103.625,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.900.000,00	56.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	7.420.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cintatanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.727.000,00	18.727.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Watumalang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Watumalang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: umlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.938.625.219,00	2.398.983.727,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	32.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	4.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	13.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	336.899.619,00	334.199.619,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	143.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	83.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	57.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	7.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Cakupan lembaga masyarakat aktif			

Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi pembinaan dan monev BankeuDes			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Layanan Administrasi Kependudukan dan Jemput Bola Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	71.300.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

Indikator Hasil	: Cakupan lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Bazar UMKM Tk. Kecamatan Fasilitasi Pertemuan Keluarga FSG Disabilitas Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, dan Sosial			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	63.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi kegiatan TP. PKK Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	78.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi pembinaan LINMAS dan RELAWAN Fasilitasi kerukunan umat beragama Fasilitasi patroli wilayah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi), KerukunanAntar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya GunaMewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Fasilitasi kegiatan forkopimca			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	148.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi pembinaan BUMDes			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Watumalang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Wonoroto			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.516.000,00	3.516.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.040.000,00	73.560.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.624.000,00	5.624.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.024.375,00	57.024.375,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.281.525,00	348.761.525,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.012.500,00	61.012.500,00	

Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mojotengah
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mojotengah
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran-Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Lainnya
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja ASN
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.228.538.110,00	3.670.758.473,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.704.600,00	12.704.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	29.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kinerja dan aparatur dan layanan pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.300.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	96.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	18.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	107.200.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa pemeliharaan sarpras kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	

Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Desa Yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Pelaporan Tepat Waktu Meningkatnya Senergitas dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.996.270,00	42.996.270,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Layanan Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.411.961,00	85.411.961,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.217.096,00	45.217.096,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegitan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase antar Kelompok/Desa/Kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	43.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang di laksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang di dukung pemahaman terhadap wawan Kebangsaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.932.663,00	181.692.663,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya APBDes Meningkatnya Kapasitas perangkat Desa Terlaksananya Pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.143.660,00	23.143.660,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.739.696,00	21.739.696,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mojotengah			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Kalibeber			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Administrasi Umum			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktivitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	12.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.200.000,00	100.960.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jasa Sarana Prasarana Kantor yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	2.398.150,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	42.461.850,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.710.419,00	423.810.419,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase Konflik Antar Kelompok Desa/Kelurahan yang Terselesaikan			

Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.457.000,00	52.457.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan ZIS			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mojotengah			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Mudal			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Presentase Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	1.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	6.225.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Peneydiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.720.000,00	98.760.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Pememliharaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.415.500,00	10.415.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.309.500,00	3.309.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			

Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.039.600,00	404.299.600,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.884.363,00	104.884.363,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban UmumTingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

Indikator Keluaran	: Terlaksananya FKUB			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Kegiatan HUT RI dan hari Jadi			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mojotengah			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Andongsili			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.283.087,00	8.283.087,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.159.800,00	2.159.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.720.000,00	89.760.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jasa Sarana Prasarana Kantor yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			

Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan lembaga masyarakat aktif Jumlah pelaksanaan Musrenbang			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.863.660,00	13.863.660,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.736.005,00	331.556.005,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.253.000,00	120.253.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok /desa/kelurahan yang terselesaikan			

Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pendampingan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	30.940.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Garung			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Garung			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Perencanaan dan evaluasi kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.093.057.252,00	3.004.950.670,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	22.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengadaan barang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.384.101,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	26.867.776,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	28.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	74.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Cakupan desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	41.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.436.000,00	32.436.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Layanan administrasi kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.536.000,00	69.536.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	47.347.098,50	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	70.632.224,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Terlaksanaya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.200.000,00	187.200.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Terwujudnya pemerintahan desa yang efektif dan profesional			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	45.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	4.384.101,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Garung			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Garung			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.020,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.199.980,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	20.400.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	6.924.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.729.600,00	99.005.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.540.000,00	18.540.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentasi lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan lembaga masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.395.573,00	397.395.573,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasiliasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase penyelesaian pelanggan Ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	51.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan Hari jadi Kab Wonosobo dan HUT RI			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kejajar			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kejajar			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Perencanaan Sesuai Standard Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Terwujudnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: JUMLAH ASN YANG TERPENUHI GAJI DAN TUNJANGAN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.974.526.633,00	3.803.652.358,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.696.400,00	7.696.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Sofa Telephone Genggam Meja Pelayanan Komputer Printer Backdrop			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.500.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.300.000,00	23.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: TERPENUHI KEBUTUHAN JASA KANTOR			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.656.000,00	19.656.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.473.600,00	125.153.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	65.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	58.300.001,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Nila IKM			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester Persentase Desa dan Kelurahan dengan Skala Prioritas usulan 3 Aspek (Ekonomi, Sosial dan Infrastruktur) secara Proporsional Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	43.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang dilayani Jemput bola Rakor yang Dilaksanakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Terkait Layanan Publik Persentase Desa/Kelurahan yang Memenuhi Target Pembayaran PBB			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.721.000,00	50.871.000,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	36.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk pengelolaan sampah Persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMDes meningkat			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.609.902,00	71.609.902,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

Indikator Hasil	: persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: persentase Terjalinya Kerukunan antara Umat,suku,Golongan dan Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	42.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	116.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

Indikator Hasil	: Pesentase desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Presentase kenaikan indeks ketahanan ekonomi IDM
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.071.410,00	16.221.410,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	41.710.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.300.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kejajar
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan kejajar
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja

Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	8.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000,00	21.840.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.440.269,00	274.132.269,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.476.157,00	243.476.157,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	7.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	5.950.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kalikajar			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kalikajar			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Prosentase Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan , Dokumen Evaluasi, Dan Laporan KeuanganTepat Waktu			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.684.414.132,00	2.454.772.194,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	6.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.060.000,00	15.460.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.750.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	86.200.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	8.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.500.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya keterbukaan informasi publik			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.379.000,00	54.482.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.690.000,00	15.240.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya keterbukaan informasi publik			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	11.197.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya keterbukaan informasi publik			

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.730.000,00	64.530.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.511.000,00	117.486.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap permberdayaan PKK di Tingkat Desa dan Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.100.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase konflik antar kelompok/desa/keluraha n yang terselesaikan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.457.000,00	39.932.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.215.000,00	14.215.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase pelanggaran tramtibum yang terlaporkan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.920.000,00	92.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.840.000,00	7.840.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.159.000,00	71.359.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.833.000,00	42.033.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kalikajar			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Kalikajar			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Prosentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	5.910.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase Penyediaan Sarana Prasarana Kerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	120.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Prosentase Pemenuhan Sarana prasarana pendukung Kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.173.600,00	67.023.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Prosentase Asset Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.400,00	736.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

Indikator Hasil	: Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.665.000,00	411.815.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.407.300,00	17.407.300,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.356.532,00	38.356.532,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.050.300,00	10.050.300,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sapuran			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sapuran			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.340.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.159.139.283,00	2.933.532.844,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: cetak amplop dinas cetak banner cetak stop map kop dinas foto copy Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan isi ulang tabung gas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Komputer Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	3.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.963.200,00	10.543.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.248.300,00	4.248.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.655.000,00	3.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.054.000,00	17.054.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pengadaan peralatan zoom/vidcom (kamera vidcom, microphone vidcom, Printer, Laptop)			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.000.000,00	81.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	24.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Belanja Materai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Langganan Internet Langganan PDAM			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.980.000,00	93.020.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 pemeliharaan kendara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pemeliharaan komputer pemeliharaan laptop pemeliharaan printer			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	52.300.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan Fasilitasi Penanganan Stunting Fasilitasi TKPK Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektiûtas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecam Jumlah Laporan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	12.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			

Indikator Keluaran	: Fasilitasi Penanganan Disabilitas Fasilitasi Penanganan Kenakalan Remaja Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak Fasilitasi Desa Siaga Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan rakor desa cantik lomba desa pembinaan UMKM pembinaan ODF Pembinaan UKS Pembinaan Perpustakaan fasilitasi forum kesehatan desa pembinaan karang taruna Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan Layanan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.060.000,00	60.060.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Fasilitasi Penanganan Disabilitas Fasilitasi Penanganan Kenakalan Remaja Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak Fasilitasi Desa Siaga Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan rakor desa cantik lomba desa pembinaan UMKM pembinaan ODF Pembinaan UKS Pembinaan Perpustakaan fasilitasi forum kesehatan desa pembinaan karang taruna			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Fasilitasi PKK Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.382.250,00	86.982.250,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi FKUB Fasilitasi FKDM Kecamatan (kegiatan Forkompincam) Pembinaan Linmas/SAR/Relawan Penanggulangan Bencana Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Lomba Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional fasilitasi Festival anak soleh indonesia fasilitasi Lomba masjid			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.420.000,00	16.420.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			

Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator Keluaran	: Bimtek Penyusunan APBDes, Monitoring Evalualisi APBDes, Sosialisasi APBDes, Verifikasi APBDes monitoring musrenbangdes fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa fasilitasi penyusunan APBDes, pembinaan penatausahaan keuangan dan tatakelola aset desa Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan, tata ruang desa, kerjasama desa Rakor Pemerintahan desa penyusunan Produk hukum desa Pembinaan pemerintahan desa (Kades dan BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, Posyandu) fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.228.132,00	42.478.132,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.596.750,00	38.596.750,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.967.000,00	4.967.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	1.325.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sapuran
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Sapuran
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.685,00	1.048.685,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.940.340,00	6.940.340,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.986.900,00	1.986.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.143.903,00	2.143.903,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	10.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.360.000,00	27.360.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.205.000,00	3.205.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Capaian Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.585.860,00	8.585.860,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.639.212,00	484.639.212,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase penurunan kasus pernikahan usia anak			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.091.060,00	74.091.060,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.816.000,00	12.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.253.040,00	7.253.040,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kepil			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kepil			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: persantase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.025.424.376,00	2.639.660.203,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Penyediaan komponen listrik Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Komputer Cetak amplop dinas Cetak banner Cetak stop map kop dinas Foto copy Isi ulang tabung gas Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Perjalanan dinas Rapat
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.190.000,00	14.190.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya (sarpras, mebeul, dll)
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.171.513,00	43.171.513,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	70.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	61.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Pemeliharaan printer Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Pemeliharaan komputer Pemeliharaan laptop			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.971.598,00	46.971.598,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan Fasilitasi Penanganan Stunting Fasilitasi TKPK Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektiûtas Kegiatan Pem			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Layanan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Fasilitasi Penanganan Disabilitas Fasilitasi Penanganan Kenakalan Remaja Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak Fasilitasi Desa Siaga Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan rakor desa cantik lomba desa pembinaan UMKM pembinaan ODF Pembinaan UKS Pembinaan Perpustakaan fasilitasi forum kesehatan desa pembinaan karang taruna			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	33.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi PKK Kecamatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi FKDM Kecamatan (kegiatan Forkompincam) Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Linmas/SAR/Relawan Penanggulangan Bencana Kecamatan			

Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.275.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional fasilitasi Festival anak soleh indonesia			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	11.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Presentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Indikator Keluaran	: Bintek penyusunan APBDesa Monev APBDesa Verifikasi APBDesa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kepil			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Kepil			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrassi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	330.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.000,00	742.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.600.000,00	134.010.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Sarpras Kantor Yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.318.000,00	2.318.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Presentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.764.000,00	10.764.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.575.030,00	477.570.030,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.948.000,00	44.543.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Terselesaikanya Konflik Antar Kelompok Desa/Kelurahan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.016.000,00	20.016.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			

Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.375.000,00	26.375.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan kaliwiro			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan kaliwiro			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pelaporan tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pelaporan evaluasi kinerja tepat waktu Laporan perencanaan tepat waktu Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan gaji dan tunjanagn ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.847.039.417,00	2.701.813.121,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase realisasi belanja administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	9.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.273.785,00	21.273.785,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Mebel			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	52.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja pelayanan administrasi Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum Cakupan pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	22.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.590.376,00	129.140.376,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	25.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan desa yang melakukan verval data secara kontinyu			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	97.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelangggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan Persentase penyelesaian pelangggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	108.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	

Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Indikator Hasil	: Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	47.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.103.455,00	26.103.455,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan kaliwiro
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.12.0002 Kelurahan Kaliwiro
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran	: jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Realisasi Belanja Adminitrasi Umum Pesentase realisasi Belanja Pelayanna Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	14.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	15.360.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai yang menerima jasa pelayanan umum Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Persentase realisasi belanja pelayanna Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	9.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.730.000,00	111.270.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.927.390,00	10.927.390,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.001.159,00	316.551.159,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.400.000,00	60.400.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentasepenyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

Indikator Keluaran	: Jumlah patroli wilayah penegakan perda			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	19.190.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.097.000,00	15.097.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penurunan angka pelanggaran			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Wadaslintang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Wadaslintang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Penyelesaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Dokumen Evaluasi Kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.039.399.649,00	2.694.405.801,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	4.095.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.605.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: meningkatksn Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	57.400.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.779.999,00	21.779.999,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.720.000,00	81.520.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	44.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	22.050.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

Indikator Keluaran	: Cakupan Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Layanan Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	68.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	58.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran, Kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase Konflik antar Kelompok / Desa / Kelurahan Terselesaikan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	66.030.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang Didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	126.520.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Kuwalitas Administrasi Tata Pemerintah Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Wadaslintang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.13.0002 Kelurahan Wadaslintang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Prosentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.605.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kinerja aparatur dan layanan pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	6.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	16.100.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase jasa kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.487.000,00	9.487.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.540.000,00	98.740.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase jasa pemeliharaan sarpras kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	3.144.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.389.000,00	440.943.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Presentase Lembaga Masyarakat yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.840.000,00	18.481.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sukoharjo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sukoharjo			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan & evaluasi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.092.693.385,00	1.951.736.640,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	27.365.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktiû tas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	14.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	70.635.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	28.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Layanan Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	67.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.342.649,00	100.342.649,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	106.314.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kalibawang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kalibawang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.967.000,00	2.967.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.967.000,00	2.967.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.678.725.457,00	1.652.011.045,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	993.500,00	993.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.563.227,00	10.563.227,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.997.600,00	1.997.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.690,00	4.999.690,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.880.000,00	9.880.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.240.000,00	15.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.520.000,00	67.520.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Aset kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.483.259,00	39.483.259,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.796.160,00	6.796.160,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Desa Yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.518.000,00	21.568.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Layanan Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.008.000,00	56.958.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.416.000,00	16.416.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi PKK Kecamatan Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.690.000,00	109.390.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman, dan Ketertiban umum tingkat kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan dan Ketertiban Umumtingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.951.000,00	57.926.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.558.678,00	125.279.588,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.242.000,00	17.492.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.330.000,00	18.330.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas perangkat desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.468.000,00	87.268.000,00	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan Pelaporan yang disusum tepat waktu
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.218.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	100.000.000,00	

Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.538.625.993,00	2.353.023.596,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.820.000,00	53.508.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	15.159.728,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	3.900.060,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.218.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	83.860.275,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.100.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	83.386.112,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	7.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	20.692.000,00	
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Tersusun			

Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.000.000,00	1.165.663.484,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik yang Tersusun			
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	287.982.450,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.574.400.000,00	1.535.052.000,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun N yang tersusun			
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	254.555.725,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.450.000.000,00	1.350.000.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			

Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya yang Tersusun
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	59.684.253,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	30.000.000,00	

Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang tersusun
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	50.188.217,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	93.160.616,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	169.919.315,00	

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.948.371.133,00	33.706.944.828,91	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.948.371.133,00	33.706.944.828,91	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai											
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.64 angka											
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	160.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	395.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000.000,00	330.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
3	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1500 Orang/bulan	496.722.841.351,00	502.047.830.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.722.841.351,00	502.047.830.472,00	DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase arsip dalam kondisi baik Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Pendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	1 Kegiatan 100 % 1 Paket 12 Bulan											
4	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	40.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	18.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	345.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000.000,00	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %											
9	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	143.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	143.730.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %											
11	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	355.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000.000,00	280.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
13	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	75.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	795.000.000,00	796.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000.000,00	796.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit 100 %											
15	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	125.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
18	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
19	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	182.399.998,00	139.401.000,00	210.600.000,00	179.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.999.998,00	318.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar Persentase sekolah ramah anak Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	100 % 25 % 27.83 % 35 % 55 % 79.99 % 81.74 % 84.47 % 99 %										
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100 %											
20	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
21	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
23	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	400.000.000,00	203.300.000,00	2.390.000.000,00	2.316.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000.000,00	2.520.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
24	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	201.100.000,00	0,00	648.900.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	600.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4568 Peserta Didik	400.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
27	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	245 Orang	2.911.500.000,00	2.391.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.500.000,00	2.391.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
28	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	150.000.000,00	355.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	355.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
29	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	444 Satuan Pendidikan	260.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	185.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	460 Satuan Pendidikan	47.787.189.186,00	43.489.598.562,00	11.888.690.814,00	15.382.401.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.675.880.000,00	58.872.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Reguler
31	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar													
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4 Ruang	80.950.000,00	73.000.000,00	669.050.000,00	702.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	775.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Alokasi Umum (DAU)
32	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	460 Dokumen	130.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	190.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
33	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
34	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	200.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	631.783.000,00	28.783.000,00	1.492.000.000,00	615.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.783.000,00	643.783.000,00	Bantuan Keuangan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
36	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	200.000.000,00	100.000.000,00	350.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	810.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
37	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	350.000.000,00	0,00	650.000.000,00	505.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	505.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
38	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	460 Orang	70.000.000,00	35.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	35.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
39	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	460 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
40	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	200.000.000,00	558.000.000,00	2.000.000.000,00	2.942.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	3.500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
41	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4658 Peserta Didik	6.096.300.000,00	2.344.240.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096.300.000,00	2.344.240.728,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
42	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	0,00	99.700.000,00	0,00	450.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) -
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (APK) SMP/MTs/Paket B	95.75 %											
43	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
44	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
46	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium													
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
47	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	225.000.000,00	100.000.000,00	175.000.000,00	206.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	306.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
48	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	0,00	150.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	850.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU)
49	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
51	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium													
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00	0,00	400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	200.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU)
52	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula													
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
53	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	0,00	0,00	650.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	550.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU)
54	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2541 Peserta Didik	3.172.400.000,00	2.523.329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.400.000,00	2.523.329.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
55	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2641 Peserta Didik	300.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	256 Orang	2.210.000.000,00	1.540.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000.000,00	1.540.535.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
57	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	256 Orang	232.400.000,00	131.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.400.000,00	131.667.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
58	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	72 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
59	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	72 Satuan Pendidikan	29.858.807.631,00	27.843.265.599,00	4.347.082.369,00	7.185.100.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.205.890.000,00	35.028.366.400,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Reguler
60	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	71.766.000,00	146.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.766.000,00	146.766.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
61	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	75.000.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	39.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
62	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi													
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
63	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	72 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
64	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU)
65	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	82 Orang	75.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	255.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
66	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			0	1 0	0,00	50.000.000,00	0,00	243.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) -
67	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0,00	0,00	400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
68	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	228.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000.000,00	728.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Anak Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	80.77 %											
69	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400.000,00	33.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
70	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	400 Orang	2.524.800.000,00	2.360.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.800.000,00	2.360.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
71	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	788.250.000,00	678.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.250.000,00	678.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
72	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	400 Satuan Pendidikan	174.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	94.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
73	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	400 Satuan Pendidikan	15.023.122.040,00	15.008.394.040,00	42.586.960,00	57.314.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065.709.000,00	15.065.709.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-BOP PAUD
74	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	80.000.000,00	53.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	53.240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
75	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	215.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	135.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
76	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
77	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	130.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
78	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
79	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
80	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan) belas tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menegah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	78.85 %											
81	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 Peserta Didik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
82	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
83	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18 Satuan Pendidikan	6.275.760.000,00	5.907.999.520,00	0,00	367.760.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.760.000,00	6.275.760.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
84	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	18 Dokumen	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			0	0 0	0,00	285.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.550.000,00	- Dana Alokasi Umum (DAU)
86	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	29 Ruang	4.925.000.000,00	3.328.442.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.000.000,00	3.328.442.857,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
87	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Unit	2.005.000.000,00	877.292.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.000.000,00	877.292.857,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
88	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	250 Peserta Didik	200.000.000,00	51.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	51.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
89	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
90	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150 Angka											
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100 %											
91	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	500 Orang	260.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	160.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase PAUD yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100 %											
92	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	3 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio ketercukupan guru SMP	1 %											
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Calon Kepala Sekolah yang mengikuti seleksi	20 angka											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	145.000.000,00	72.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	72.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda Persentase organisasi pemuda yang aktif	0.49 % 2.26 % 85 %											
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan dunia usaha	3 Pelatihan											
94	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota													
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	300 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
95	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda													
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	250 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
96	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kegiatan	200.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	180.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
97	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota													
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	300 Orang	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi	6.08 %											
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Atlet Berprestasi	6.40 %											
98	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
99	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	106.600.000,00	74.150.000,00	3.303.400.000,00	2.285.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.000.000,00	2.360.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor dalam Kegiatan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat/kota	18 Cabor											
100	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	1.100.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	800.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet cabor yang mengikuti pembinaan persentase Penyediaan Data dan Informasi Sektoral jumlah pelatih dan atlet yang mengikuti pelatihan Jumlah atlet berprestasi yang diberikan penghargaan	30 % 24 % 100 % 100 %											
101	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota													
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	300 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang difasilitasi	1 Lembaga											
102	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.180.000.000,00	5.830.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000.000,00	5.830.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Organisasi Olahraga Rekreasi yang difasilitasi	1 Lembaga											
103	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	250.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	150.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	6.08 %											
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Prestasi Bidang Pramuka	100 %											
104	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	350.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	230.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
		Dinas Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
105	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	10.000.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
106	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan	63.725.964.638,00	60.975.328.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.725.964.638,00	60.975.328.519,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Logistik Untuk Pelaksanaan koordinasi	100 %											
107	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	5.996.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.996.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
108	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00	42.393.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	42.393.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
109	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	11.952.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	11.952.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
110	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.830.000,00	44.817.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.830.000,00	44.817.575,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
111	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan Dokumen	9.000.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
112	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	150.000.000,00	91.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	91.120.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Pendukung Kerja	100 %											
113	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	185.375.000,00	152.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.375.000,00	152.375.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan Kemanan Kebersihan Kantor	22 Orang											
114	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.000.000,00	102.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	102.848.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
115	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	722.000.000,00	711.689.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000.000,00	711.689.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Gedung kantor Persentase Realisasi Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kantor	100 % 100 %											
116	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	210.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	168.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
117	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	15.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
118	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Gizi buruk pada anak balita (Persen) Ratio Bed rawat inap Persatuan Penduduk Presentase fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki ijin Operasional Presentasi Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar Presentase kasus gawat darurat yang ditangani SPGDT (sistem penanganan Gawat darurat Terpadu) Angka Kesakitan Pemyakit Tidak Menular Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada anak baita (Persen) Angka Kesakitan Penyakit Menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Presentase Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai standar Presentase Desa ODF Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi syarat sesuai standar Presentase sarana air Minum yang Sesuai standar Prevalensi Ibu Hamil kurang Energi kronik (KEK) Cakupan Penduduk yang Memiliki jaminan Kesehatan Presentase Orang Terduga TBC yang Dilayani Sesuia standart Indeks Kepuasan Pelanggan labkesda rata -Rata capaian SPM Puskesmas Presentse Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana Sesuai standart SPM Presentase Penduduk usia produktf (15-59) tahun yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standart Presentase Penduduk Usia lanjut yang Mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase Orang Dengan gangguan Jiwa Berat yang mendapat pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Presentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas cakupan jaminan Kesehatan Masyarakat miskin Presentase bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	0,17 Presen 0,73 / 1000 100,00 Prosen 100 Prosen 100 Prosen 12,50 Prosen 2,1709 Prosen 3,10 Prosen 3,57 Prosen 44,39 Prosen 68,71 Prosen 80 Prosen 81,45 Prosen 8,15 Prosen 85,99 Prosen 85 Prosen 87,25 Prosen 88,36 Prosen 88,42 Prosen 90,00 Prosen 90,75 Prosen 90 Prosen 98,75 prosen 98,86 Prosen 99,48 Prosen											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	88 %											
119	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
120	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas													
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	0,00	0,00	2.148.111.104,00	2.148.111.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.111.104,00	2.148.111.104,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Dana Alokasi Umum (DAU)
121	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
122	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	155.075.000,00	45.075.000,00	1.951.436.000,00	2.061.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.511.000,00	2.106.511.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
123	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
124	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	55 Unit	43.466.930,00	36.218.826,00	2.659.248.000,00	2.485.458.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.714.930,00	2.521.676.930,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
125	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	24 Unit	521.351.000,00	702.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.351.000,00	702.389.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
126	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 paket Paket	17.708.520.092,00	17.458.520.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708.520.092,00	17.458.520.092,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok
127	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 kali Paket	123.108.000,00	123.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.108.000,00	123.108.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi penderita DBD per 100.000 penduduk AFP Non Polio per 100.000 penduduk <15 tahun Angka keberhasilan pengobatan penderita TBC (sucses rate) (%) Persentase kasus gawat darurat terpadu yang ditangani dengan SPGDT Cakupan balita mendapat vitamin A Cakupan K4 (%) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) (%) Cakupan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita (D/S) Cakupan pemberian PMT pada balita gizi kurang Cakupan pemberian PMT pada ibu hamil KEK Cakupan pemberian tamblet Fe pada ibu hamil Persentase anak sekolah yang dimunisasi campak Persentase anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase caries gigi pada anak Persentase kasus kusta baru tanpa cacat Persentase puskesmas yang melaksanakan GERMAS Persentase puskesmas yang diakreditasi Persentase Pos Lansia yang aktif Persentase Posbindu Aktif Persentase penyehat tradisional yang terdaftar dan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Persentase penemuan pneumonia pada balita Persentase penemuan penderita diare Persentase penduduk usia produktif (15- 59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penduduk dengan akes jamban sehat Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat ARV	2 % 90 % 100 % 100 % 99 % 100 % 100 % 75 % 100 % 100 % 100 % 98 % 100 % 13.5 % 15 % >99.5 % 55 % 80 % 80 % 75 % 30 % >99.5 % 100 % 100 % 100 % <25 angka 100 %											
128	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13083 Orang	165.000.000,00	99.989.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	99.989.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
129	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	261.600.000,00	261.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.600.000,00	261.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pajak Rokok
130	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	259.000.000,00	184.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000.000,00	184.182.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
131	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	60.000.000,00	14.783.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	14.783.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
132	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	166.000.000,00	73.126.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000.000,00	73.126.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
133	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355.000 Orang	259.275.000,00	106.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.275.000,00	106.070.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
134	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108636 Orang	135.400.000,00	13.027.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400.000,00	13.027.580,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
135	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	107.000 Orang	75.000.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	21.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
136	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.000 Orang	50.000.000,00	40.302.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.302.520,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
137	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.000 Orang	97.000.000,00	38.731.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	38.731.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
138	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10075 Orang	214.800.000,00	142.046.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.800.000,00	142.046.820,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
139	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12500 Orang	191.150.000,00	122.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.150.000,00	122.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
140	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	120.000.000,00	39.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	39.078.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
141	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	853.195.000,00	1.267.634.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.195.000,00	1.267.634.230,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU)
142	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			0	5 Dokumen 0	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900.000,00	23.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
143	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	637.500.000,00	487.991.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500.000,00	487.991.470,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
144	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	580.835.000,00	472.981.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.835.000,00	472.981.570,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
145	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	75 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
146	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	292.555.000,00	179.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.555.000,00	179.077.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
147	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	110.000.000,00	21.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	21.193.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
148	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	350.506.700,00	144.823.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.506.700,00	144.823.100,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
149	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	35.276.303.978,00	36.033.371.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.276.303.978,00	36.033.371.680,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok
150	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	20.000 Orang	65.520.870,00	33.617.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520.870,00	33.617.870,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
151	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	258.507.970,00	247.547.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.507.970,00	247.547.970,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
152	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	100.000.000,00	25.360.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	25.360.780,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
153	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	318.574.000,00	267.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.574.000,00	267.151.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
154	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	24 Unit	122.000.000,00	49.570.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	49.570.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
155	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
156	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	145.000.000,00	77.234.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	77.234.720,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
157	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0 Unit	594.000.000,00	486.852.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000.000,00	486.852.440,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
158	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1866 Orang	28.145.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.145.000,00	11.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
159	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 Orang	60.000.000,00	25.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	25.470.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
160	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	65.800.000,00	37.329.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800.000,00	37.329.360,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
161	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	421.024.030,00	421.024.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.024.030,00	421.024.030,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal	100 %											
162	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	108.028.108,00	67.131.628,00	101.240.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.268.108,00	107.131.628,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0 Unit											
163	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	35 Unit	35.000.000,00	14.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	14.140.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
164	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	24 Unit	455.000.000,00	29.333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000.000,00	29.333.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Koordinasi ke prov dan pusat dalam rangka rakor dan konsultasi Rapat koordinasi dan visitasi tenaga kesehatan Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang diterbitkan Pertemuan pengelola SDMK triwulanan Faskes yang dilakukan monitoring SDMK nya	10 dokumen 15 Dokumen 250 Orang 4 Dokumen 60 Orang											
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin undefined	96 % undefined undefined											
165	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0 Dokumen	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen											
166	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	30.000.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
167	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	215 Orang	73.654.200,00	20.333.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.654.200,00	20.333.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
168	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Dokumen	71.165.000,00	71.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.165.000,00	71.165.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	undefined	undefined undefined											
169	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	663.048.000,00	663.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.048.000,00	663.048.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT) Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	80 % 83.83 % 95.21 % 98.00 %											
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan yang memiliki ijin	100 %											
170	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Apotek Dokumen	158.800.000,00	107.076.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.800.000,00	107.076.050,00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang memiliki SPP-PIRT	88 %											
171	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 Dokumen	429.780.130,00	362.629.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.780.130,00	362.629.810,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM dam DAM yang memiliki sertifikat Laik Higiene	80 %											
172	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 Dokumen	95.000.000,00	42.107.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	42.107.270,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah penjual jajan anak sekolah dan PKL yang memperoleh pembinaan	30 angka											
173	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0 Dokumen	200.000.000,00	68.624.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	68.624.810,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sampel makanan yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan	75 %											
174	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan													
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	203.404.870,00	153.321.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.404.870,00	153.321.370,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,95 angka 30.18 angka 83.00 % 85.00 %											
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase makanan yang mengandung bahan berbahaya	21.99 %											
175	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase FKD Aktif Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu	97 % 75 % 100 %											
176	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16 Dokumen	284.597.000,00	91.872.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.597.000,00	91.872.780,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
		Puskesmas Wonosobo 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88,36 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja											
177	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.482.263.640,00	3.436.331.548,00	17.736.360,00	283.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.719.581.548,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	88,36 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PEMENUHAN SPM KESEHATAN DI PUSKESMAS	100 %											
178	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
179	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
180	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	743 Orang	22.290.000,00	22.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.290.000,00	22.290.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
181	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
182	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52 Orang	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
183	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
184	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	436 Dokumen	272.859.000,00	272.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.859.000,00	272.859.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
185	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15 Dokumen	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
186	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	114 Dokumen	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
187	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31 Dokumen	12.900.030,00	12.900.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.030,00	12.900.030,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
188	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	33 Orang	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
189	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	170 Dokumen	134.815.320,00	134.815.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.815.320,00	134.815.320,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
190	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	82 Dokumen	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000.000,00	219.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
191	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	5.667.000,00	5.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667.000,00	5.667.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
192	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
193	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
194	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
195	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	20 Dokumen	24.173.000,00	24.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.173.000,00	24.173.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
196	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00	1.533.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
197	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	138 Dokumen	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.000,00	9.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
198	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	88,36 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
199	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2.673.300,00	2.673.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.300,00	2.673.300,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kertek 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	86,10 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani	100 %											
200	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.511.988.000,00	2.938.451.003,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.988.000,00	2.979.451.003,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	82,63 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
201	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	32.040.000,00	32.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040.000,00	32.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
202	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
203	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
204	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
205	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70 Orang	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
206	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
207	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen	285.435.000,00	285.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.435.000,00	285.435.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
208	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
209	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13 Dokumen	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740.000,00	7.740.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
210	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13 Dokumen	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
211	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
212	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	105.454.000,00	105.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.454.000,00	105.454.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
213	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	178.360.000,00	178.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.360.000,00	178.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
214	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
215	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
216	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
217	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
218	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	43.925.000,00	43.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925.000,00	43.925.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
219	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
220	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tercapainya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen											
221	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	10.220.000,00	10.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220.000,00	10.220.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Selomerto 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88,33 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas yang Terpenuhi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Terpenuhi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Terpenuhi Belanja Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas yang Terpenuhi	12 Bulan 1 Paket 2 Paket 12 Bulan											
222	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.288.926.552,00	5.238.926.552,00	163.000.000,00	213.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.926.552,00	5.451.926.552,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	91 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas	100 %											
223	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	432 Orang	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800.000,00	105.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
224	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	683 Orang	20.490.000,00	20.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490.000,00	20.490.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
225	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
226	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34 Orang	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
227	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	232.434.000,00	232.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.434.000,00	232.434.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
228	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33 Dokumen	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
229	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
230	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
231	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
232	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	132.719.674,00	132.719.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.719.674,00	132.719.674,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
233	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	256.900.000,00	256.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.900.000,00	256.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
234	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	42.390.000,00	42.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.390.000,00	42.390.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
235	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
236	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	14 Dokumen	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	91 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keluarga PHBS	100% Keluarga											
237	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	7.872.480,00	7.872.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872.480,00	7.872.480,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Leksono 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	80,00 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
238	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.333.360.000,00	1.615.835.957,00	16.640.000,00	33.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00	1.648.975.957,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata Capaian SPM Puskesmas	83,33 % Tahun											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kesehatan Puskesmas	100 % Tahun											
239	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350 Orang	76.545.000,00	76.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.545.000,00	76.545.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
240	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	373 Orang	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
241	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	7 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
242	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
243	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	180.291.000,00	180.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.291.000,00	180.291.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
244	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
245	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
246	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	4.497.000,00	4.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497.000,00	4.497.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
247	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	24 Orang	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
248	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	80.430.500,00	80.430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.430.500,00	80.430.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
249	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	361.150.000,00	361.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.150.000,00	361.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
250	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.905.000,00	13.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905.000,00	13.905.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
251	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	452.600,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00	452.600,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
252	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata Rata Capaian Program SPM Puskesmas	88,33 % Tahun											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kesehatan Puskesmas	100 % Tahun											
253	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Watumalang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani	100 %											
254	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.584.000.000,00	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.000.000,00	0,00	Pendapatan dari BLUD
255	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	2.442.361.104,00	0,00	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.361.104,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata- rata capaian SPM puskesmas	88.33 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas	100 %											
256	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	99.120.000,00	99.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.120.000,00	99.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
257	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
258	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8636 Orang	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580.000,00	17.580.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
259	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
260	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	199 Orang	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
261	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	543 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
262	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	250.052.000,00	250.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.052.000,00	250.052.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
263	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
264	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.000,00	9.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
265	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4.542.000,00	4.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542.000,00	4.542.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
266	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	73 Orang	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
267	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	168.448.000,00	168.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.448.000,00	168.448.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
268	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	199.640.000,00	199.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.640.000,00	199.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
269	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
270	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
271	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
272	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
273	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	19.615.000,00	19.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615.000,00	19.615.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
274	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00	1.171.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
275	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
276	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,95 angka 30.18 angka 83.00 % 85.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren Prosentase FKD Aktif	97 % 100 % 75 %											
277	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.994.000,00	6.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994.000,00	6.994.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Mojotengah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercukupinya pelayanan kesehatan di Puskesmas	88,44 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengunjung Puskesmas yang dilayani	1 Unit Kerja											
278	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.602.000.000,00	4.236.850.498,00	198.000.000,00	257.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00	4.494.350.498,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	83,29 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas	100 %											
279	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	134.715.000,00	134.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.715.000,00	134.715.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
280	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
281	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.000,00	8.670.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
282	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
283	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	75 Orang	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
284	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
285	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50 Dokumen	240.002.890,00	240.002.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.002.890,00	240.002.890,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
286	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19 Dokumen	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
287	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920.000,00	10.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
288	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
289	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
290	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	149.650.000,00	149.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.650.000,00	149.650.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
291	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	266.600.000,00	266.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.600.000,00	266.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
292	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
293	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
294	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
295	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	30 Dokumen	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480.000,00	24.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
296	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100 Dokumen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
297	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	19 Dokumen	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
298	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	83,29 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas	100 %											
299	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50 Dokumen	34.410.060,00	34.410.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.410.060,00	34.410.060,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Garung													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	90 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Terpenuhi Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas yang Terpenuhi	1 Tahun 12 Bulan											
300	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.688.045.000,00	3.948.196.072,00	230.250.000,00	221.368.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918.295.000,00	4.169.564.619,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata - rata Capaian SPM Puskesmas	95 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
301	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800.000,00	121.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
302	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
303	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6210 Orang	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740.000,00	13.740.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
304	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	213 Orang	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
305	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	568 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
306	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
307	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	194.810.000,00	194.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.810.000,00	194.810.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
308	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
309	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
310	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8.572.500,00	8.572.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572.500,00	8.572.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
311	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	235 Orang	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
312	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	154.950.000,00	154.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.950.000,00	154.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
313	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	194.950.000,00	194.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.950.000,00	194.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
314	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
315	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
316	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
317	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	32.193.000,00	32.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.193.000,00	32.193.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
318	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
319	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
320	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata - rata Capaian SPM Puskesmas	95 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
321	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.296.000,00	7.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296.000,00	7.296.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kejajar 1													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kejajar 1 tercapai	88,36 %												
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kejajar 1 tercapai	1 Unit Kerja												
322	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.527.475.000,00	2.663.884.175,00	72.525.000,00	111.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.774.909.175,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	88 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %												
323	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	97.560.000,00	97.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.560.000,00	97.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
324	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.000,00	24.450.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
325	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
326	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
327	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	204.913.000,00	204.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.913.000,00	204.913.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
328	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
329	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
330	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	2.821.605,00	2.821.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.605,00	2.821.605,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
331	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
332	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	126.073.400,00	126.073.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.073.400,00	126.073.400,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
333	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	186.220.001,00	186.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.220.001,00	186.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
334	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
335	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	36.665.000,00	36.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.665.000,00	36.665.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
336	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
337	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
338	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kalikajar 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	90,15 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang dilayani	100 %											
339	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.012.822.300,00	2.278.140.157,00	45.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.822.300,00	2.320.140.157,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata- rata capaian SPM puskesmas	88,33 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas	100 %											
340	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	70.890.000,00	70.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.890.000,00	70.890.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
341	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
342	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
343	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16 Orang	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
344	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
345	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200 Dokumen	174.362.800,00	174.362.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.362.800,00	174.362.800,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
346	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20 Dokumen	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
347	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200 Dokumen	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
348	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38 Dokumen	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
349	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
350	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50 Dokumen	87.765.000,00	87.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.765.000,00	87.765.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
351	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	50 Dokumen	161.740.000,00	161.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.740.000,00	161.740.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
352	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
353	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
354	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
355	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30 Orang	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
356	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	50 Dokumen	97.060.000,00	97.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.060.000,00	97.060.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
357	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	246.200,00	246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.200,00	246.200,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
358	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	90 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
359	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,95 angka 30.18 angka 83.00 % 85.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase FKD Aktif	97 % 100 % 75 %											
360	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445.000,00	4.445.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Sapuran													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	85.02 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani	100 %											
361	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.419.600.000,00	4.420.500.110,00	180.400.000,00	491.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000.000,00	4.911.800.110,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata- rata capaian SPM puskesmas	108.84 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
362	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			0	0 0	90.270.000,00	90.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.270.000,00	90.270.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
363	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	6.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
364	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
365	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	45 Orang	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
366	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
367	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	307.620.000,00	307.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.620.000,00	307.620.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
368	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
369	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
370	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	2.404.200,00	2.404.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.200,00	2.404.200,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
371	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
372	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen	170.360.800,00	170.360.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.360.800,00	170.360.800,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
373	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Dokumen	194.820.000,00	194.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.820.000,00	194.820.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
374	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
375	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
376	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
377	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	13 Dokumen	1.092.500,00	1.092.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.500,00	1.092.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
378	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
379	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,95 angka 30.18 angka 83.00 % 85.00 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase FKD Aktif Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren	97 % 100 % 75 %											
380	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	40.889.997,00	40.889.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.889.997,00	40.889.997,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kepil 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase pengunjung puskesmas yang dilayani	1 Unit Kerja											
381	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.571.680.000,00	2.802.915.507,00	59.600.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.280.000,00	2.869.915.507,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	88,33 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas	100 %											
382	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 Orang	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
383	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
384	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3500 Orang	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
385	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
386	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
387	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
388	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	72 Dokumen	264.747.800,00	264.747.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.747.800,00	264.747.800,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
389	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
390	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	82 Dokumen	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
391	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
392	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
393	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	115 Dokumen	156.285.000,00	156.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.285.000,00	156.285.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
394	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	750 Dokumen	189.720.000,00	189.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.720.000,00	189.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
395	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
396	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
397	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
398	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	26 Dokumen	64.185.000,00	64.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.185.000,00	64.185.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
399	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	447.200,00	447.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.200,00	447.200,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
400	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	60 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,95 angka 30.18 angka 83.00 % 85.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase FKD Aktif	95 %											
401	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	4.749.999,00	4.749.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749.999,00	4.749.999,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kaliwiro													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	84 Angka											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani	100 %											
402	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.592.675.000,00	3.679.417.249,00	31.925.000,00	31.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.600.000,00	3.711.342.249,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata - Rata Capaian SPM Puskesmas	81,09 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
403	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	102.480.000,00	102.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.480.000,00	102.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
404	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	910 Orang	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
405	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			0	0 0	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
406	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	53 Orang	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
407	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	243.564.500,00	243.564.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.564.500,00	243.564.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
408	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
409	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140.000,00	13.140.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
410	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.657.500,00	11.657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657.500,00	11.657.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
411	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			0	0 0	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
412	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	213.360.000,00	213.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.360.000,00	213.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
413	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	334.593.839,00	334.593.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.593.839,00	334.593.839,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
414	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	125.670.000,00	125.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.670.000,00	125.670.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
415	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	649.500,00	649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.500,00	649.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
416	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase FKD Aktif	100 % 97 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
417	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.513.000,00	7.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513.000,00	7.513.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Wadaslintang 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	1 Tahun											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Terpenuhi Belanja Barang dan Jasa BLUD yang terpenuhi Belanja Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Yang Terpenuhi	1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja											
418	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.590.371.950,00	2.905.259.247,00	47.500.000,00	75.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.871.950,00	2.980.509.247,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	85,33 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
419	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	127.875.000,00	127.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.875.000,00	127.875.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
420	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
421	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3505 Orang	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
422	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
423	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	582 Orang	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
424	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	377 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
425	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Dokumen	195.969.800,00	195.969.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.969.800,00	195.969.800,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
426	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	212 Dokumen	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
427	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
428	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	11.429.760,00	11.429.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429.760,00	11.429.760,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
429	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
430	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	150.970.480,00	150.970.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.970.480,00	150.970.480,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
431	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	227.810.000,00	227.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.810.000,00	227.810.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
432	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	26 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
433	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	562 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
434	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
435	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	22 Orang	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
436	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	34.390.000,00	34.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.390.000,00	34.390.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
437	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen	397.220,00	397.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.220,00	397.220,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
438	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	66 Dokumen	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
439	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1317 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	85,33 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
440	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	37 Dokumen	6.717.500,00	6.717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717.500,00	6.717.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Sukoharjo 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	89,58 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase pengunjung Puskesmas yang dilayani	100 %											
441	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.861.113.400,00	1.898.255.702,00	109.564.600,00	174.298.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.678.000,00	2.072.554.564,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	83.33 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
442	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27 Orang	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
443	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	273 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
444	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2540 Orang	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
445	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
446	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	259 Orang	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
447	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	292 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	161.925.000,00	161.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.925.000,00	161.925.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
449	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22 Dokumen	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
450	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
451	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
452	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3 Orang	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
453	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	170.462.640,00	170.462.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.462.640,00	170.462.640,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
454	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	741.900.000,00	741.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.900.000,00	741.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
455	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
456	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	259 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
457	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	292 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
458	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
459	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550.000,00	29.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
460	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	331.360,00	331.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.360,00	331.360,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
461	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	10 Dokumen	35.520.000,00	35.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.520.000,00	35.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
462	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
463	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	38 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan Desa siaga aktifa mandiri Presentase posyandu dengan strata mandiri	1,95 angka 30,18 angka 83 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase FKD Aktif Prosentase puskesmas yang melakukan assesment tingkat ketrampilan kader	97 % 100 %											
464	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kalibawang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kalibawang	92.09 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kalibawang	1 Unit Kerja											
465	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.642.650.000,00	1.636.889.574,00	32.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.650.000,00	1.719.889.574,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	89.90 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
466	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270 Orang	43.560.160,00	43.560.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560.160,00	43.560.160,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
467	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
468	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1380 Orang	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240.000,00	21.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
469	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
470	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
471	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	282.250.000,00	282.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.250.000,00	282.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
472	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	154 Dokumen	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
473	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	6.030.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
474	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.556.840,00	7.556.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556.840,00	7.556.840,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
475	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	24 Orang	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
476	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen	156.150.000,00	156.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.150.000,00	156.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
477	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	364.600.140,00	364.600.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.600.140,00	364.600.140,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
478	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
479	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
480	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
481	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	13.195.000,00	13.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195.000,00	13.195.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
482	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	371.280,00	371.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.280,00	371.280,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
483	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal	100 %											
484	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	89.90 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
485	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.795.660,00	5.795.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795.660,00	5.795.660,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Wonosobo 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas	88,36 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pengunjung Puskesmas Dilayani	1 Unit Kerja											
486	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.257.000.000,00	1.244.328.525,00	43.000.000,00	116.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	1.360.628.525,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM puskesmas	88,33 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
487	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang	20.524.480,00	20.524.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.524.480,00	20.524.480,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
488	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
489	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	358 Orang	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740.000,00	10.740.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
490	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
491	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	116 Orang	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
492	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
493	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	156 Dokumen	190.715.000,00	190.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.715.000,00	190.715.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
494	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
495	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	139 Dokumen	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	8.340.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
496	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	86 Dokumen	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
497	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15 Orang	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
498	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	163 Dokumen	105.990.000,00	105.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.990.000,00	105.990.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
499	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	88 Dokumen	124.861.800,00	124.861.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.861.800,00	124.861.800,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
500	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
501	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
502	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
503	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	32 Dokumen	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840.000,00	27.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
504	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	7 Dokumen	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
505	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	16 Dokumen	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
506	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata capaian SPM puskesmas	88,33 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
507	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 Dokumen	5.053.200,00	5.053.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053.200,00	5.053.200,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kertek 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	84,07 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani	100 %											
508	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.119.920.000,00	2.178.964.970,00	29.955.000,00	527.315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.875.000,00	2.706.280.870,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata- rata capaian SPM puskesmas	91.08 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
509	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578 Orang	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.960.000,00	72.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
510	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	562 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
511	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4514 Orang	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
512	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
513	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	448 Orang	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
514	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	362 Dokumen	313.638.600,00	313.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.638.600,00	313.638.600,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
515	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
516	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	84 Dokumen	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
517	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	86 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
518	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	52 Orang	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
519	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	126.005.000,00	126.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.005.000,00	126.005.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
520	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	354 Dokumen	162.240.000,00	162.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240.000,00	162.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
521	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
522	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
523	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
524	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920.000,00	6.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
525	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
526	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	34 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
527	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,95 angka 30.18 angka 83.00 % 85.00 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keluarga PHBS	100 %											
528	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	56 Dokumen	5.334.400,00	5.334.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334.400,00	5.334.400,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Selomerto 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani	100 %											
529	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.037.990.000,00	1.093.274.495,00	23.000.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.990.000,00	1.132.224.495,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata- rata capaian SPM puskesmas	88.33 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM di puskesmas	100 %											
530	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	61.065.000,00	61.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.065.000,00	61.065.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
531	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
532	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
533	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
534	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
535	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
536	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	160.160.000,00	160.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.160.000,00	160.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
537	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
538	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
539	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530.000,00	7.530.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
540	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
541	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	112.399.000,00	112.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.399.000,00	112.399.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
542	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	379.400.000,00	379.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.400.000,00	379.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
543	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
544	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
545	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
546	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	58.580.000,00	58.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580.000,00	58.580.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
547	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
548	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
549	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
550	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	88.33 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas	100 %											
551	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	16.365.000,00	16.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365.000,00	16.365.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Leksono 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	89.58 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani	100 %											
552	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	850.000.000,00	907.033.687,00	0,00	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	946.533.687,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	88.33 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
553	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	228 Orang	129.743.000,00	129.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.743.000,00	129.743.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
554	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
555	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1368 Orang	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720.000,00	12.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
556	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
557	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	203 Orang	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
558	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	225 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
559	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	171.365.400,00	171.365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.365.400,00	171.365.400,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
560	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
561	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920.000,00	10.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
562	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
563	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	36 Orang	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
564	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	90.675.000,00	90.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.675.000,00	90.675.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
565	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	445.800.000,00	445.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.800.000,00	445.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
566	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
567	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
568	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
569	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	55.670.000,00	55.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.670.000,00	55.670.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
570	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
571	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
572	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,95 angka 30.18 angka 83.00 % 85.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase FKD Aktif Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren	97 % 100 % 75 %											
573	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.783.600,00	5.783.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783.600,00	5.783.600,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kejajar 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88,36 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas Yang Dilayani	100 %											
574	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	895.170.650,00	900.501.557,00	39.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.770.650,00	938.101.557,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Puskesmas undefined	88,36 % undefined undefined											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
575	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	171.780.000,00	171.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780.000,00	171.780.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
576	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
577	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120.000,00	27.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
578	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	46 Orang	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
579	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29 Orang	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
580	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	138.741.000,00	138.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.741.000,00	138.741.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
581	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	5.433.000,00	5.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433.000,00	5.433.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
582	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.000,00	9.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
583	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
584	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	46 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
585	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	110.090.000,00	110.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.090.000,00	110.090.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
586	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	20 Dokumen	432.559.999,00	432.559.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.559.999,00	432.559.999,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
587	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	7 Dokumen	34.445.000,00	34.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.445.000,00	34.445.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
588	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	25 Dokumen	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
589	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	190 Dokumen	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	87,9 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
590	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kalikajar 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Puskesmas	88 angka											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani	100 %											
591	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100% Unit Kerja	1.900.288.279,00	2.142.029.180,00	46.750.000,00	155.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.038.279,00	2.297.479.180,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	90 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
592	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	462 Orang	15.613.000,00	15.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613.000,00	15.613.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
593	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4219 Orang	17.970.000,00	17.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970.000,00	17.970.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
594	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
595	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	561 Orang	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
596	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	177.850.000,00	177.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.850.000,00	177.850.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
597	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
598	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
599	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
600	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
601	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	151.870.000,00	151.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.870.000,00	151.870.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
602	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	176.300.000,00	176.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.300.000,00	176.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
603	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	62.070.000,00	62.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.070.000,00	62.070.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
604	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
605	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	90 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
606	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kepil 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kepil 2 tercapai Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	92,13% Tahun											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja											
607	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.869.597.900,00	2.024.678.171,00	79.200.000,00	82.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.797.900,00	2.107.353.171,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	88,69% Tahun											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100% Tahun											
608	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	94.508.000,00	94.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.508.000,00	94.508.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
609	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860.000,00	10.860.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
610	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	120 Orang	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
611	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	147 Orang	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
612	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen	231.895.000,00	231.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.895.000,00	231.895.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
613	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
614	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
615	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.000,00	9.240.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
616	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	120 Orang	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
617	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 Dokumen	144.625.000,00	144.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.625.000,00	144.625.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
618	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	334.380.200,00	334.380.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.380.200,00	334.380.200,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
619	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	14 Dokumen	49.155.000,00	49.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.155.000,00	49.155.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
620	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
621	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	83,07% Tahun											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
622	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14 Dokumen	17.479.800,00	17.479.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.479.800,00	17.479.800,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Wadaslintang 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase pengunjung puskesmas yang dilayani	100 %											
623	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.198.500.000,00	1.577.429.649,00	35.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.500.000,00	1.679.429.649,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	82,9 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
624	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	530 Orang	99.360.000,00	99.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.360.000,00	99.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
625	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4833 Orang	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330.000,00	9.330.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
626	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
627	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	384 Orang	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
628	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	169.085.710,00	169.085.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.085.710,00	169.085.710,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
629	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
630	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	172 Dokumen	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
631	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	91 Dokumen	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
632	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	91 Orang	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
633	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	47 Dokumen	131.178.751,00	131.178.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.178.751,00	131.178.751,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
634	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	349.000.000,00	349.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000.000,00	349.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
635	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	30 Dokumen	18.188.000,00	18.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.188.000,00	18.188.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
636	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
637	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	25 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata-rata capaian SPM Puskesmas	82.9 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
638	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	102 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Sukoharjo 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	89,58 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pengunjung yang dilayani	100 %											
639	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	882.311.620,00	905.633.270,00	12.567.380,00	27.063.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.879.000,00	932.697.269,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Puskesmas	86 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
640	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	243 Orang	111.480.000,00	111.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.480.000,00	111.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
641	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1832 Orang	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255.000,00	6.255.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
642	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260.000,00	13.260.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
643	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	209 Orang	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
644	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164.580.000,00	164.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.580.000,00	164.580.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
645	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
646	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
647	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00	6.540.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
648	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
649	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	131.100.000,00	131.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100.000,00	131.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
650	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	422.826.000,00	422.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.826.000,00	422.826.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
651	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	47.220.000,00	47.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.220.000,00	47.220.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
652	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
653	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Asesment Tingkat Keterampilan Kader	100 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Kelompok Rentan Presentase Asesment Tingkat Keterampilan Kader	100 % 100 %											
654	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.891.800,00	6.891.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.800,00	6.891.800,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Laboratorium Kesehatan Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Pelanggan Labkesda	87.25 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Dokumen											
655	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Dokumen	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		RSUD Setjonegoro													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %											
656	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang/bulan	27.051.964.477,00	26.605.891.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.051.964.477,00	26.605.891.809,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan SPM Rumah Sakit Terpenuhi	100 %											
657	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	108.949.000.000,00	121.237.972.566,00	11.051.000.000,00	9.551.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000.000,00	130.788.972.566,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupancy Ratio/ tingkat pemakaian bed pasien di RS Baku mutu limbah cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	70.00 angka 80.00 angka											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar	90.5 %											
658	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya													
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5 Unit	0,00	0,00	37.887.862.896,00	16.222.312.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887.862.896,00	16.222.312.896,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
		Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik undefined	100 % undefined undefined											
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen											
659	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	70.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
660	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
661	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan	11.305.580.693,00	10.291.093.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305.580.693,00	10.291.093.024,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
662	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
663	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	54.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	54.908.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
664	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	63.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
665	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
666	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
667	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	270.000.000,00	269.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	269.185.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
668	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
669	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	20.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
670	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
671	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
672	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900.000.000,00	883.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	883.842.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
673	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	325.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
674	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	25.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
675	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	150.000.000,00	153.500.000,00	4.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000.000,00	153.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	69,5 %											
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Irigasi Yang Ditangani	160,25 KM											
676	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4 KM	0,00	20.000.000,00	3.100.000.000,00	3.214.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00	3.234.348.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
677	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	156,25 KM	2.490.000.000,00	1.720.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000.000,00	1.740.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
678	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi													
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	48 Bendung	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
679	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	30 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
680	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi													
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	32 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
681	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	6 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak	100 %											
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak (Komulatif)	2508 SR											
682	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	180 Orang	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
683	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	16 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
684	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	280 SR	1.000.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	990.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Aman Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air limbah domestik layak Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Sanitasi (Tempat BABS)	14,33 % 63,58 % 95,00 %											
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5879 SR											
685	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)													
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	329.600.000,00	233.500.000,00	170.400.000,00	294.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	528.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
686	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman													
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	150 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
687	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	250.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
688	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat													
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	183 Rumah Tangga	1.000.000.000,00	1.992.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.992.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
689	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	130 Orang	75.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	70.000.000,00	Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	85 %											
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	10293,3072 279792 M											
690	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	10 Sistem Drainase Perkotaan	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
691	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	10 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	900.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Yang memenuhi Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	31,6 % 50 %											
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Yang Memilik Persetujuan Bangunan Gedung (komulatif)	150 Unit											
692	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	900 Dokumen	772.458.380,00	653.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.458.380,00	653.252.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-											
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aset Lahan Yang Di Tata Sesuai Rencana Teknis	2 Angka											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
693	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	0,00	384.173.023,00	0,00	1.030.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.173.023,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	56,84 % 64,5 %											
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Tertangani	96,64 Km											
694	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan													
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	800 Dokumen	255.000.000,00	266.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00	266.748.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
695	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Diganti	3 Jembatan	0,00	15.057.400,00	3.800.000.000,00	9.508.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00	9.523.496.400,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
696	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan													
			Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	0,00	11.058.240,00	1.800.000.000,00	110.370.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	121.428.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB
697	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	175 KM	0,00	324.640.000,00	57.292.578.000,00	57.320.446.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.292.578.000,00	57.645.086.250,00	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
698	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar													
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	7 KM	0,00	1.171.500,00	300.000.000,00	298.828.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
699	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	86 Jembatan	0,00	950.000,00	200.000.000,00	199.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
700	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	0,00	22.000.000,00	0,00	4.703.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000.000,00	- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
701	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	330 KM	236.375.000,00	205.800.000,00	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.375.000,00	215.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
702	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	106 KM	0,00	28.900.000,00	4.058.395.000,00	3.496.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058.395.000,00	3.525.673.000,00	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
703	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	102 KM	4.480.000.000,00	6.339.512.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000.000,00	6.339.512.736,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB
704	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	2 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	95 Angka											
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	142 Angka											
705	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	500 Orang	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
706	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	500 Orang	56.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.190.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengguna Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	100 %											
707	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga											
708	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100 % 86,25 %											
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR) yang dilegalisasi	3 dokumen											
709	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	64.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
710	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	706.000.000,00	632.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000.000,00	632.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
711	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota													
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	2 Dokumen	350.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	215.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	2 dokumen											
712	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	16.936.960,00	0,00	283.063.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	2 dokumen											
713	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000,00	129.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	129.584.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
714	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	50.000.000,00	55.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.416.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dengan RKPD	100 %											
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %											
715	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	34.910.000,00	17.826.952,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.910.000,00	117.826.952,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
716	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	10.000.000,00	4.243.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.243.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 Dokumen											
717	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	5.478.407.644,00	5.661.394.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.407.644,00	5.661.394.433,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
718	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	10.000.000,00	7.397.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.397.263,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
719	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.756.088,00	48.771.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.756.088,00	48.771.851,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
720	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	14.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
721	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.855.900,00	21.427.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.855.900,00	21.427.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
722	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
723	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	108.410.000,00	43.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.410.000,00	43.764.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan											
724	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
725	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
726	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
727	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	746.354.488,00	713.890.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.354.488,00	713.890.772,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
728	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	200.000.000,00	202.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	202.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
729	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
730	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00	57.237.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	57.237.466,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
731	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	70.000.000,00	45.195.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	45.195.727,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperolah fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %											
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana	2 dokumen											
732	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000,00	104.874.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	104.874.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	142 unit 11 Unit Rumah											
733	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													
			0	16 0	225.000.000,00	221.780.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	221.780.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
734	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana													
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	9 Unit Rumah	320.000.000,00	317.176.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	317.176.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	"Persentase penetapan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)"	100 %											
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawaswan permukiman kumuh yang disusun pada tahun N	1 Dokumen											
735	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	105.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	72,34 Ha											
736	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	88.725.000,00	73.408.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.725.000,00	73.408.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	34,56 %											
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani diluar Kawasan Permukiman Kumuh	5 Unit Rumah											
737	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	165.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	205.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	70 % 93 %											
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Unit Perumahan yang Terlayani Jumlah lokasi yang disediakan PSU	33 Unit 102 lokasi											
738	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	11 Lokasi	1.733.465.968,00	1.281.074.879,00	12.320.000.000,00	15.378.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053.465.968,00	16.659.898.879,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
739	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang													
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	64.057.984,00	62.674.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.057.984,00	62.674.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi	50 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum	1 Kegiatan											
740	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	35.474.617,00	31.135.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.474.617,00	31.135.142,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %											
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan sengketa tanah garapan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mediasi	4 Angka											
741	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	134.936.492,00	125.282.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.936.492,00	125.282.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %											
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan tanah pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas umum	1 Dokumen											
742	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	73.270.000,00	60.771.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.270.000,00	60.771.895,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	57,83 % 91,97 %											
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan	159 Ruas											
743	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit	0,00	0,00	6.040.000.000,00	5.920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000.000,00	5.920.000.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
744	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	1.360.818.760,00	878.089.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.818.760,00	878.089.327,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe c yang dikelola	1 Unit											
745	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)													
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	109.328.756,00	98.892.013,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.828.756,00	98.892.013,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang dikeluarkan	39 Dokumen											
746	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	12.940.000,00	6.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940.000,00	6.448.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala	5700 Unit											
747	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	0,00	0,00	1.030.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000.000,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
748	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7000 Dokumen	175.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
749	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	151.822.780,00	176.625.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.822.780,00	176.625.044,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100 Angka											
750	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	126.263.000,00	129.109.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.263.000,00	129.109.616,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
751	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	689.054.240,00	779.233.381,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.054.240,00	787.233.381,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen andalalin yang disetujui	5 Dokumen											
752	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin													
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	6.100.000,00	2.748.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	2.748.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang di Audit atau di Inspeksi	5 Ruas											
753	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal													
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	298.105.000,00	341.832.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.105.000,00	341.832.403,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan yang dilalui trayek angkutan umum	20 Ruas											
754	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	23.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.735.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
755	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	37.850.000,00	35.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.850.000,00	35.588.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	35 %											
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	1 Dokumen											
756	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	120.201.492,00	139.820.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.201.492,00	139.820.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau													
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	2 Unit	62.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Satuan polisi Pamong Praja													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase kebutuhan Administrasi terpenuhi Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 15 Laporan											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perancanaan dan evaluasi perencanaan	2 dokumen											
758	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
759	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100 %											
760	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.365.304.173,00	4.704.486.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365.304.173,00	4.704.486.529,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
761	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	54.576.000,00	54.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.576.000,00	54.576.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang menerima sarana prasarana tercapainya pemahaman ASN	100 persen 100 %											
762	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
763	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tercukupinya kebutuhan umum kantor cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundandan undangan	2 Laporan 30 Dokumen 100 %											
764	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
765	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
766	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
767	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
768	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
769	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	125.000.000,00	99.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	99.148.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tercukupinya kebutuhan sarana prasarana	100 %											
770	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
771	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	400.000,00	400.000,00	21.275.000,00	17.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675.000,00	17.675.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercukupinya kebutuhan jasa administrasi	100 %											
772	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
773	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas operasional / lapangan yang di bayarkan pejak dann perizinannya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhab terpeliharanya barang-barang milik daerah	3 gedung 22 unit 100 %											
774	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	140.000.000,00	150.165.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	150.165.521,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
775	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	17.376.000,00	17.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.376.000,00	17.376.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
776	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000.000,00	615.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase warga negara yang memperolehn layanan akibat dari Penagakan hukum, perda dan perkada Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban Ketentraman dan Keindahan)	100 persen 100 Persen											
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya tingkat keamanan dan kenyamanan	96 %											
777	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	806.205.580,00	807.543.080,00	387.200.000,00	445.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.405.580,00	1.253.405.580,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
778	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	215.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.594.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
779	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
780	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat													
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	100 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
781	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3 laporan	575.000.000,00	516.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000.000,00	516.546.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
782	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	10.000.000,00	5.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.215.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
783	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah													
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada	100 %											
784	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	15.000.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	6.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
785	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah													
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	2 laporan	10.000.000,00	9.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
786	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah													
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	10.000.000,00	6.067.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.067.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
787	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	14.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	14.225.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
788	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2 Laporan	30.000.000,00	18.310.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	18.310.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
789	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	500.000.000,00	467.037.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	467.037.525,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan keteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada jumlah PPNS yang terbina	1 Laporan 100 %											
790	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %											
791	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.020.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
792	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.020.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %											
793	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.812.372.810,00	4.537.276.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.372.810,00	4.537.276.566,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
794	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
795	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	39.291.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	39.291.281,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
796	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
797	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	10.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
798	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
799	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	148.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
800	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
801	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
802	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
803	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	175.000.000,00	135.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	135.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
804	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
805	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
806	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000,00	41.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	41.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50 %											
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	39000 Orang											
807	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	39000 Orang	6.450.000,00	2.580.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	26.130.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah desa dan kelurahan tangguh bencana	26 Desa 2300 Orang											
808	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
809	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	85.000.000,00	53.819.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	53.819.892,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
810	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana													
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	15 Kawasan	10.000.000,00	4.819.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.819.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
811	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	5 Orang	50.000.000,00	24.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	24.544.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
812	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
813	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	109.250.000,00	101.605.536,00	50.750.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	138.605.536,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
814	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	90 Orang Kawasan	100.000.000,00	46.993.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	46.993.932,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %											
815	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0 Dokumen	500.000.000,00	465.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	465.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
816	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0 Orang	110.000.000,00	84.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	84.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
817	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1 Dokumen											
818	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota													
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	20.000.000,00	10.537.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.537.186,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	75 %											
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (response time)	75 %											
819	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	80.000.000,00	35.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	35.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
820	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)													
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
821	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	0,00	49.600.000,00	1.850.000.000,00	1.800.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	75 %											
822	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran dibawah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	200 Orang											
823	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat													
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	25.000.000,00	11.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	11.055.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
824	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran													
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan	25.000.000,00	17.977.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	17.977.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (response time)	75 %											
825	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	44.350.000,00	33.103.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	33.103.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program renja Perangkat Daerah dan RKPD	100 persen											
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	10 Dokumen											
826	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
827	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	27 org/bln											
828	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4.096.234.724,00	4.089.660.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.234.724,00	4.089.660.948,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 Persen											
829	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
830	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	46.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
831	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	26.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
832	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
833	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi belanja pengadaan barang milik daerah	100 Persen											
834	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
835	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
836	1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Penerimaan Pinjaman Daerah
837	1.06.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud													
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen											
838	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
839	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	37.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
840	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	260.444.480,00	242.025.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.444.480,00	242.025.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen											
841	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.000.000,00	83.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	83.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
842	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
843	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	110.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi Rasio penerima program usaha produktif laki- laki : perempuan	4,03 persen 4,3 persen 50 angka											
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan pemberdayaan sosial KAT yang terfasilitasi kegiatan (pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas)	100 kELUARGA											
844	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT													
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Keluarga	100.000.000,00	65.892.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	65.892.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
845	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT													
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab./kota	15 Orang											
846	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	130.000.000,00	126.579.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	126.579.472,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
847	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	380.000.000,00	358.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	358.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
848	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	45.000.000,00	27.476.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	27.476.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
849	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	100 % 77,28 %											
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	75 Orang											
850	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
851	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	15.000.000,00	21.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	21.010.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
852	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	130.000.000,00	93.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	93.923.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
853	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30.000.000,00	21.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	21.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
854	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	100.000.000,00	71.782.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	71.782.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
855	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	650.000.000,00	563.557.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	563.557.256,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
856	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak													
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	30.000.000,00	10.414.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.414.570,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
857	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25.000.000,00	21.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	21.710.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
858	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	65.000.000,00	61.713.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	61.713.740,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
859	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	50.000.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	36.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
860	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.000.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	18.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
861	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan													
			0	50 0	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan rehablitasi sosia	25 Persen											
862	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	100.000.000,00	67.365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	67.365.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
863	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA													
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM PKH graduasi Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	2,3 persen 80 persen 90 persen 95,5 persen											
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kab/kota	7 Dokumen											
864	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	479809 Orang	95.000.000,00	41.121.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	41.121.860,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
865	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	66071 Keluarga	75.000.000,00	73.382.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	73.382.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
866	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40000 Keluarga	6.957.027.900,00	7.357.027.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957.027.900,00	7.357.027.900,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
867	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	40.000.000,00	34.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	34.735.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 Persen											
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 persen											
868	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	70.000.000,00	55.880.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	55.880.684,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
869	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	40.000.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	24.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
870	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	40.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
871	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	25.000.000,00	3.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3.499.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	4 kegiatan											
872	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	20.000.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	6.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kelengkapan makam pahlawan dalam kondisi baik	84 Persen											
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Dokumen											
873	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
874	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	130 Makam	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik	80 Persen											
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan penyelenggaraan penataan desa	4 dokumen											
875	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	600 Unit	1.894.200.000,00	1.610.965.900,00	2.400.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.600.000,00	1.612.765.900,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk	24 persen											
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	1 dokumen											
876	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	19.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	19.780.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
877	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	26.848.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	26.848.130,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
878	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	40.000.000,00	26.708.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	26.708.810,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes berkembang dan maju Persentase BUMDes berbadan hukum Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa Persentase desa berkinerja baik	4,3 % 59,46 % 6,97 % 75 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat tepat waktu Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu	1 Dokumen											
879	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
880	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	19.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	19.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
881	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	17.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
882	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	3.527.710.000,00	3.272.561.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.710.000,00	3.272.561.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
883	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	100.000.000,00	82.199.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	82.199.772,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
884	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	200.000.000,00	61.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	61.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
885	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	75.000.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	25.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
886	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	21.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
887	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	22.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
888	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
889	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1 Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
890	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000,00	11.593.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	11.593.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase posyandu aktif persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100 % 85 % 92 %											
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan desa aktif melakukan kegiatan pemberdayaan	6 Dokumen											
891	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	110.000.000,00	24.945.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	24.945.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
892	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
893	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
894	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	70.000.000,00	31.481.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	31.481.670,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
895	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
896	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %											
897	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.756.117.040,00	4.606.945.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.117.040,00	4.606.945.944,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.4 % 81.4 Paket											
898	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
899	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.000.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	26.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
900	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	31.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
901	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	3.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
902	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	125.000.000,00	63.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	63.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 % 90 %											
903	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
904	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.5 Laporan 62.5 %											
905	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113.000.000,00	88.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000.000,00	88.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
906	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
907	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	504.000.000,00	467.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000.000,00	467.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.6 % 77.6 Unit											
908	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	100.000.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	86.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
909	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
910	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
911	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	69.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
912	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-											
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-											
913	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro													
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	23.32 %											
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK	17.49 %											
914	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 Orang	3.355.000.000,00	6.695.543.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.000.000,00	6.695.543.621,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
915	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja													
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga	100.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase instruktur yang mendapatkan sertifikat kompetensi	3.5 %											
916	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-											
917	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	3 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	2.332 %											
918	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-											
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/start up wirausaha baru	26.67 persen 35 % 26.67 %											
919	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	750 Orang	50.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
920	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja													
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
921	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan													
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	10 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
922	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	4 kelompok Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka kasus penempatan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	35 %											
923	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	500 Orang	225.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	170.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
924	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan													
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	300 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	100.00 % 84.00 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	25 %											
925	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan													
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 laporan Perusahaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
926	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan													
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 dokumen Perusahaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
927	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah perselisihan	75 %											
928	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
929	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1 Perkara	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
930	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3 laporan Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
931	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 kegiatan Lembaga	150.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
932	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2 kegiatan Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-											
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	100 %											
933	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
934	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	20 sentra IKM Dokumen	227.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000.000,00	80.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
935	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 lokasi Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
936	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 paket 1 lokasi Dokumen	200.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	300.000.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-											
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi industri	92 %											
937	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas													
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	50.000.000,00	24.065.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	24.065.362,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	100.00 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	100 Kepala keluarga 100 %											
938	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman													
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	5 kepala keluarga Kepala Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
939	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
940	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tahun											
941	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	176 Orang/bulan	21.898.857.534,00	21.592.789.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.898.857.534,00	21.592.789.581,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan											
942	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
943	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	125.500.000,00	145.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500.000,00	145.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
944	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	80.100.000,00	80.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100.000,00	80.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
945	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
946	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	256.194.000,00	163.006.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.194.000,00	163.006.510,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
947	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
948	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	5.250.500,00	0,00	129.749.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
949	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	28.553.000,00	0,00	471.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
950	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan											
951	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
952	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	163.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000.000,00	134.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
953	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	856.662.608,00	802.262.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.662.608,00	802.262.608,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
954	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	170.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
955	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.297.392,00	17.297.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.297.392,00	17.297.392,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
956	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio desa berlumbung pangan	12 %											
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	1 Paket 12 %											
957	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya													
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit	75.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama (beras) Ketersediaan energi per kapita/hari	265.00 % 3,050.00 kkal											
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Paket											
958	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	125.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa berstatus rawan pangan	32.00 %											
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan Kabupaten / Kota	12 Bulan											
959	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	140.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan Aman	94 %											
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bahan Pangan Aman	94 %											
960	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
961	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-											
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Wonosobo	21 naluB											
962	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan kapasitas nelayan kecil	12 Bulan											
963	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil													
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan Persentase jumlah kelompok tani ikan yang aktif Persentase UPR aktf	3,50 % 5.00 % 84 % 87.50 %											
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya peningkatan kapasistas bagi pembudidaya ikan kecil	12 Bulan											
964	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil													
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	9 Kelompok	595.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000.000,00	610.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
965	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha													
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	15 Kelompok	130.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
966	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan													
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 Kelompok	125.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 Bulan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
967	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
968	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	175.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi tanaman hortikultura (Manggis) Produksi tanaman hortikultura (sawi) Produksi ternak (Domba) Produksi tanaman biofarmaka (Jahe) Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo Produksi ternak (Sapi perah) Produksi tanaman pangan (Ubi Kayu) Produksi tanaman pangan (Padi) Produksi tanaman hortikultura (Durian) Produksi tanaman pangan (Ubi Jalar) Produksi ternak (Kambing) Produksi tanaman hortikultura (cabe) Produksi ternak (Sapi Potong) Produksi bunga (Krisan) Produksi ternak (unggas) Produksi bunga (Mawar) Produksi tanaman biofarmaka (Kapulaga) Produksi tanaman hortikultura (Bawang Daun) Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi Produksi tanaman hortikultura (Bawang Putih) Produksi tanaman hortikultura (Nanas) Produksi tanaman hortikultura (Duku/ langsat) Produksi tanaman perkebunan (Kelapa) Produksi tanaman hortikultura (Pisang) Produksi tanaman hortikultura (kentang) Produksi ternak (Kelinci) Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim Produksi tanaman hortikultura (Pepaya) Produksi tanaman hortikultura (Nangka) Produksi tanaman hortikultura (Salak) Produksi tanaman hortikultura (Kubis) Produksi tanaman perkebunan (Kopi) Produksi tanaman pangan (Jagung)	12.500 ekor 162,176 ton 21.785 ton 55,00 % 60.499 ton 80,099 ton											
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya penmgawasan penggunaan sarana pertanian	80 %											
969	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	770.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000.000,00	620.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
970	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8 Laporan	3.709.024.300,00	4.416.053.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709.024.300,00	4.416.053.381,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
971	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih													
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	7 Ton	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
972	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan													
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan	75.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendaftaran Varietas Unggul Lokal Terlaksananya Kontes Domba Wonosobo	5 Varietas 1 Laporan											
973	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
974	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan													
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya pengadaan ternak	31 Paket											
975	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	20 Ekor	2.050.000.000,00	2.505.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000.000,00	2.505.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-											
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-											
976	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	75.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
977	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian													
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	4 Ha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	20											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
978	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
979	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit													
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
980	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	638.994.300,00	638.994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.994.300,00	638.994.300,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
981	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	15 Unit	250.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	145.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
982	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan													
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	200.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	180.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) / zoonosis yang ditangani	100.00 %											
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulanagan penyakit hewan dan zonosii	12 Bulan											
983	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan													
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	15 Wilayah	100.525.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.525.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-											
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-											
984	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	100.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Gapoktan aktif Persentase kelompok tani aktif	65,00 % 70 %											
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan pertanian	15 BPP											
985	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	250.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	350.000.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
986	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit	100.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
987	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
988	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian													
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	113 Orang	60.000.000,00	578.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	578.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
989	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	180.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
990	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani													
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	3 Unit	75.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
991	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian													
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 %											
992	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	10.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	82 orang 100 %											
993	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	8.291.413.611,00	7.744.824.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291.413.611,00	7.744.824.820,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100 %											
994	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
995	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	53.117.000,00	45.710.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.117.000,00	45.710.712,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
996	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.778.200,00	13.280.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778.200,00	13.280.636,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
997	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
998	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	184.088.000,00	155.225.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.088.000,00	155.225.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
999	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	969.410,00	0,00	19.030.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1000	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1001	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	117 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1002	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1003	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1004	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1005	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	78.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	69.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1006	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1007	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	216 Laporan	255.870.000,00	228.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.870.000,00	228.586.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 % 100 %											
1008	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	205.000.000,00	174.200.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	174.200.001,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1009	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	35.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1010	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000,00	32.651.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	32.651.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1011	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen KLHS	100 %											
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendukung RPPLH	2 Dokumen											
1012	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota													
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	0,00	32.572.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.572.936,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS KRP yang disusun	4 Dokumen											
1013	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	90.000.000,00	57.925.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	57.925.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1014	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	50.000.000,00	89.639.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	89.639.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase luas lahan kritis diluar kawasan hutan Persentase penduduk yang mendapatkan layanan informasi lingkungan hidup Presentase penurunan emisi gas rumah kaca Persentase mata air yang rusak dan/atau menurun debitnya Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas	30 % 30.00 % 4 % 8,00 % 800 angka											
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah matai yang rusak atau mati presentase pencemaran pada titik pantau (air permukaan)	110 titik 71 %											
1015	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	0,00	144.614.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.614.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1016	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	0,00	174.934.444,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.934.444,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lahan kritis yang direhabilitasi Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi	17 Ha 1 kegiatan											
1017	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi													
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	0,00	66.550.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	44,5 %											
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH perkotaan	20,86 %											
1018	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	17.68 Ha	0,00	1.387.052.763,00	0,00	46.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.927.763,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1019	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan													
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	124.500.000,00	86.431.108,00	105.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	91.931.108,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	20 %											
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang disimpan sementara	104,7 ton/tahun											
1020	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3													
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	40 Laporan	0,00	4.276.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276.108,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah limbah B3 yang disimpan sementara	104,7 ton/th											
1021	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	6.314.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	41,04 %											
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	20 Dokumen											
1022	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	0,00	50.718.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.718.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah Persentase penanganan sampah	11 % 45,18 undefined											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	65000 Ton											
1023	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	30 Kelompok	0,00	110.505.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.505.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1024	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	26 Unit	1.500.001,00	14.856.261,00	3.559.940.999,00	3.546.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.441.000,00	3.561.296.261,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1025	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota													
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	0,00	95.697.150,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.697.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1026	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	900 Ton	6.001.065.524,00	5.956.571.168,00	41.960.376,00	190.460.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043.025.900,00	6.147.031.544,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1027	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah													
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	3 Laporan	0,00	51.763.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.763.274,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1028	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1029	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	117 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1030	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1031	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1032	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 % 100 %											
1033	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen KLHS	100 %											
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendukung RPPLH	2 Dokumen											
1034	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota													
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi lingkungan hidup Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Persentase mata air yang rusak dan/atau menurun debitnya Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas	30 % 4 % 8 % 800 angka											
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencemaran pada titik pantau (air permukaan) Jumlah mata air yang rusak/mati	71 % 110 titik											
1035	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1036	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	80.000.000,00	33.301.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	33.301.070,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1037	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	230.459.650,00	0,00	90.740.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.200.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1 Dokumen											
1038	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	50.000.000,00	41.924.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	41.924.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi Jumlah lahan kritis yang direhabilitasi	1 kegiatan 17 Ha											
1039	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi													
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	44,5 %											
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH perkotaan	20,86 %											
1040	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	17.68 Ha	1.522.797.414,00	0,00	46.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.672.414,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	20 %											
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang disimpan sementara	104,7 ton/tahun											
1041	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3													
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	40 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah limbah B3 yang disimpan sementara	104,7 ton/th											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1042	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	41,04 %											
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	20 Dokumen											
1043	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendampingan dan penyuluhan lingkungan hidup	59,3 %											
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan KIE	10 Lembaga											
1044	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup													
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	80.000.000,00	31.942.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	31.942.631,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan lingkungan	100 %											
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus LH yang ditangani atau diselesaikan	100 %											
1045	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Pengaduan	10.000.000,00	4.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.075.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah Persentase penanganan sampah	11 % 45,18 undefined											
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	65000 Ton											
1046	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	30 Kelompok	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1047	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota													
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1048	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah													
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselaranan program perangkat daerah dengan rencana kerja perangkat daerah	100 %											
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen											
1049	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 kali Dokumen	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1050	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 kali Laporan	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan											
1051	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali Orang/bulan	5.117.045.595,00	4.675.954.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117.045.595,00	4.675.954.041,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan											
1052	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1053	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.000.000,00	147.578.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	147.578.517,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1054	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.997.500,00	17.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.997.500,00	17.985.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1055	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1056	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	275.000.000,00	201.840.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	201.840.930,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1057	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
1058	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	2.100.000,00	2.100.000,00	214.900.000,00	218.234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000.000,00	220.334.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan											
1059	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1060	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	150.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	135.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1061	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	491.300.000,00	469.747.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.300.000,00	469.747.994,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %											
1062	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan Unit	149.202.500,00	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.202.500,00	156.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1063	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1064	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	20.000.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1065	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	100 angka 58,13 angka											
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	% anak yang memiliki KIA % peningkatan kepemilikan KTP elektronik % penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	58.13 % 80 % 100 %											
1066	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 bulan Laporan	915.000.000,00	736.533.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000.000,00	736.533.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	% peningkatan pemahaman petugas	100 %											
1067	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	150.000.000,00	98.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	98.784.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan akta kematian Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	57,49 angka 80 % 90 %											
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	% anak yang memiliki akte kelahiran % penduduk meninggal yang dibuatkan akte kematian	90 % 57.49 %											
1068	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5 Dokumen	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1069	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 bulan Layanan	40.000.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	27.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1070	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	penyelesaian digitalisasi arsip	100 %											
1071	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan Persentase cakupan updating data kependudukan	100 % 20 % 80 %											
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100 %											
1072	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	100 buku Dokumen	40.000.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	10.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1073	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	15.149.360,00	15.149.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149.360,00	15.149.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1074	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah perangkat komputer yang diunakan untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50 unit											
1075	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentasi anggaran responsif gender Persentase perempuan sebagai tenaga professional Persentasi SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih Persentase APBDes responsif gender Partisipasi angkatan kerja perempuan Proposi kursi yang duduki perempuan di DPR	100 % 47,40 % 52,00 % 54,99 % 59,71 - 6,66 -											
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penganggaran Responsif Gender Persentase pelembagaan Responsif Gender	100 % 100 %											
1076	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG													
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	90.000.000,00	34.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	34.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1077	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota													
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	250 Orang	215.000.000,00	91.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	91.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan perempuan Persentase anggota program pemberdayaan perempuan yang aktif	100 % 90 %											
1078	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	55.000.000,00	21.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	21.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1079	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	28 Lembaga	75.000.000,00	29.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	29.310.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi wanita kabupaten yang aktif Penyelenggaraan hari anak	100 % 100 %											
1080	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	13 Lembaga	260.000.000,00	237.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	237.292.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1081	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1082	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota	55 Orang	115.000.000,00	93.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	93.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100 % 60 %											
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengaduan korbaN kekerasan terhadap perempuan yang di tangani	100 %											
1083	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	12 Orang	80.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	49.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1084	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Layanan	50.000.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	46.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan layanan konseling Cakupan lembaga layanan tingkat desa	0,21 - 36,23 -											
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentukya lembaga layanan perempuan dan anak di tingkat desa Tercapainnya penyelenggaraan Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak Pelaksanaan sosialisasi Raperda KLA Pelaksanaan monitoring lembaga layanan tingkat desa	100 % 100 % 100 % 100 %											
1085	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	80.000.000,00	30.598.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	30.598.903,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Penyelenggaraan kegiatan hari ibu Penyelenggaraan kegiatan hari kartini	100 % 100 % 100 %											
1086	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	48 Lembaga	60.000.000,00	26.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	26.820.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1087	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	120.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	84.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	100 %											
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	100 %											
1088	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	20.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa ramah anak	30,18 -											
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa ramah anak Kegiatan pemenuhan hak anak yang terlaksanakan	100 % 30,18 %											
1089	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	48 Organisasi	100.000.000,00	39.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	39.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1090	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	120.000.000,00	63.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	63.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang ditangani Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 % 60 %											
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	100 %											
1091	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	97 Orang	81.920.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.920.000,00	52.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %											
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %											
1092	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1093	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Lap Keu Akhir thn, Lap Keu Audited dan Lap Keu Bulanan)	100 %											
1094	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.694.584.102,00	4.425.311.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694.584.102,00	4.425.311.164,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1095	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1096	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.500.000,00	54.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	54.196.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1097	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.500.000,00	10.159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	10.159.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1098	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.080.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080.000,00	21.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1099	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1100	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	255.000.000,00	218.892.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00	218.892.461,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1101	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1102	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1103	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.900.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900.000,00	33.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1104	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	543.400.000,00	363.784.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.400.000,00	363.784.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1105	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00	123.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1106	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1107	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.000.000,00	13.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	13.830.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun Rata-rata jumlah anak per keluarga	100 % 1,52 angka											
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk GDPK yang diimplementasikan sebagai dasar perencanaan Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek	100 % 95 % 1 Dokumen 100 %											
1108	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	9.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	9.999.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1109	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan													
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1110	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	7 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	28.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	28.993.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data Rumah Data Paripurna di kampung KB Persentase ketersediaan data kependudukan	95 - 81 - 100 %en											
1111	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	12 Dokumen	95.000.000,00	50.828.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	50.828.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1112	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	265 Laporan	60.078.000,00	60.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.078.000,00	60.078.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1113	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	168.400.000,00	168.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400.000,00	168.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1114	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kepersertaan KB pria Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Drop out KB Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 51 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	2,57 % 38,51 % 7,84 % 78,78 % 9,92 %											
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan advokasi KIE	100 %											
1115	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	50.000.000,00	42.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	42.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1116	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	836.544.000,00	806.515.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.544.000,00	806.515.650,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1117	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1118	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	180.000.000,00	169.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	169.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1119	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	81.380.000,00	19.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.380.000,00	19.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1120	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	48 Organisasi	327.965.000,00	248.159.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.965.000,00	248.159.450,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh yang berkompeten	100 %											
1121	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	265 Orang	795.000.000,00	795.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000.000,00	795.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1122	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi	60.000.000,00	40.655.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	40.655.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Tersedia	80 %											
1123	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400.000,00	36.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1124	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4800 Orang	2.061.808.000,00	2.047.487.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.808.000,00	2.047.487.201,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1125	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP													
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	20 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1126	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	23.400.000,00	19.260.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	19.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1127	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	100 Orang	20.000.000,00	7.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1128	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	49.830.000,00	45.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.830.000,00	45.516.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1129	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	174 Orang	50.000.000,00	19.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	19.916.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1130	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak													
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	65.000.000,00	40.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	40.616.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1131	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria													
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	180 Orang	50.000.000,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	16.040.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1132	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	62 Orang	60.000.000,00	16.809.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	16.809.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1133	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan													
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	200 Orang	40.000.000,00	13.675.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	13.675.145,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Persentase peran serta organsiasi kemasyarakat Persentase Pokja Bangga Kencana	100 % 100 % 100 % 100 %											
1134	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1135	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	4 Laporan	32.425.000,00	15.849.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.425.000,00	15.849.560,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1136	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	265 Kampung	322.790.000,00	322.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.790.000,00	322.790.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	rata rata usia kawin pertama wanita rata rata usia melahirkan pertama perempuan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa angka kelahiran remaja perempuan usai 15-19 ASFR cakupan PUS peserta KB anggta UPPKS yang ber KB Mandiri cakupan anggota bina keluarga remaja cakupan anggota bina keluarga balita cakupan anggota bina keluarga lansia ber KB	18.80 angka 20.50 angka 2.48 persen 29.50 persen 49.41 persen 73.76 persen 84.25 persen 84.85 persen 89.95 persen											
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kegiatan pembinaan keluarga/realisasi kegiatan	100 %											
1137	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1138	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)													
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan / Dokumen	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1139	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Laporan	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1140	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	15 Unit	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1141	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	50.000.000,00	13.261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	13.261.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1142	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150 Organisasi	50.000.000,00	13.261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	13.261.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1143	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	2.034.000.000,00	2.034.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000.000,00	2.034.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1144	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	2.440.800.000,00	2.440.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.800.000,00	2.440.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
		Dinas Komunikasi dan Informatika													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 % 100% %											
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %											
1145	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1146	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
1147	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.482.984.873,00	4.359.331.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482.984.873,00	4.359.331.859,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1148	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	70.560.000,00	70.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560.000,00	70.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terealisasi	100 %											
1149	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	367.603.720,00	367.603.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.603.720,00	367.603.720,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1150	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1151	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.744.062,00	67.602.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.744.062,00	67.602.341,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1152	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1153	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1140 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1154	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	72.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	72.672.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1155	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1156	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1157	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1158	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	89.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1159	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1160	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	373.125.686,00	290.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.125.686,00	290.928.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1161	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	80.000.000,00	88.518.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	88.518.869,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1162	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1163	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	30.000.000,00	45.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	45.780.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1164	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	116.000.000,00	32.455.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000.000,00	32.455.999,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1165	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.821.409,00	81.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.821.409,00	81.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1166	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	92.155.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	92.155.537,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai kelembagaan PPID Nilai informasi tersedia setiap saat Nilai aksesibilitas website	93 angka 94 angka 95,5 angka											
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94.00 Angka											
1167	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media													
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	115.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	190.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1168	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat													
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas	227.865.000,00	144.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.865.000,00	144.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1169	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	30 Permohonan	199.074.970,00	136.577.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.074.970,00	136.577.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1170	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik													
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	107.796.490,00	28.371.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.796.490,00	28.371.490,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1171	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	20 Media	2.645.200.000,00	3.726.632.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.200.000,00	3.726.632.718,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1172	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik													
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	45.000.000,00	11.885.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	11.885.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1173	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik													
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	65 Orang	100.212.500,00	16.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.212.500,00	16.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai manajemen SPBE Nilai tata kelola SPBE Nilai layanan SPBE Nilai kebijakan internal SPBE	2,82 angka 3,20 angka 3,45 angka 3,60 angka											
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internet Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1174	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan TNDE	100 %											
1175	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE													
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	125.000.000,00	14.927.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	14.927.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1176	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	24 Perangkat Daerah	1.223.115.369,00	1.075.957.248,00	78.974.262,00	58.974.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.089.631,00	1.134.931.510,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1177	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas													
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	80.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	12.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral	90 %											
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang sudah memutakhirkan data sektoral di porrtal satu data	62.00 %											
1178	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia													
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	53.000.000,00	22.260.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400.000,00	22.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	400 Indeks											
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi yang sudah dilaksanakan	70 %											
1179	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	59.000.000,00	24.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	24.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	undefined	undefined undefined											
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	12 Bulan											
1180	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.819.713.826,00	2.793.774.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819.713.826,00	2.793.774.905,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-											
1181	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	12 Bulan											
1182	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	22.237.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	22.237.405,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1183	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	210.000.000,00	109.577.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	109.577.121,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1184	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	28.154.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	28.154.820,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1185	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1186	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	130.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	96.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
1187	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	400.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1188	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
1189	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan Laporan	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1190	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	134.087.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	134.087.420,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1191	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	827.808.552,00	791.694.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.808.552,00	791.694.472,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
1192	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	125.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	86.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1193	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	36.580.008,00	33.290.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.580.008,00	33.290.004,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1194	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1195	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan NIlai Investasi di Bidang Pertanian Pertumbuhan NIlai Investasi di Bidang Pariwisata	5 % 7 %											
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kajian Draft Raperbup atau Raperda/NA Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Kali											
1196	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	20.000.000,00	8.479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	8.479.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pra Feasibility Study potensi dan peluang investasi di Kabupaten Wonosobo dalam satu tahun	4 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1197	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	56.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	56.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi	2 % 3 %											
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan											
1198	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.000.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	8.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang Pertanian dan Pariwisata Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi	2 % 3 %											
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48 Pelaku Usaha											
1199	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	450 Pelaku Usaha	122.500.000,00	77.466.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500.000,00	77.466.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	100 %											
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	250 Pelaku Usaha											
1200	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
1201	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
1202	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Pengelolaan Data/informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi	100 %											
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket											
1203	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	121.872.880,00	38.228.040,00	23.627.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500.000,00	38.228.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan Persentase pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat Persentase penambahan koleksi Persentase perpustakaan terakreditasi Persentase koleksi digital	3.01 persen 36.43 persen 39.00 persen 4.20 persen 5.40 persen 6.78 persen											
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	30 %											
1204	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	210 Perpustakaan	486.270.818,00	445.915.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.270.818,00	445.915.378,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1205	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan													
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	240 Dokumen	36.307.880,00	36.307.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.307.880,00	36.307.880,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
1206	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	51.208.376,00	34.118.376,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.208.376,00	34.118.376,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1207	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah kunjungan perpustakaan	300 %											
1208	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial													
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	50 Perpustakaan	44.156.000,00	16.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.156.000,00	16.029.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1209	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
1210	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20 Orang	54.783.510,00	54.783.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.783.510,00	54.783.510,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
1211	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat													
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	15 Lokus	424.132.634,00	375.057.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.132.634,00	375.057.634,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa Cakupan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	1.022 angka 1.072 angka 2.053 angka											
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah koleksi naskah kuno yang dikelola dan dialihmedia	10 %											
1212	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan													
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	6 Eksemplar	25.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1213	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1214	2.24.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan gaji dan tunjangan ASN Presentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja	33 ASN 100 % Persen											
1215	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.417.473.565,00	4.374.692.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417.473.565,00	4.374.692.365,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 %											
1216	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1217	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	25.000.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1218	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1219	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4380 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1220	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	120.000.000,00	116.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	116.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase realisasi pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1221	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	76.356.850,00	0,00	172.066.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.423.530,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1222	2.24.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1223	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	212 Laporan	2.127.280,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.280,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1224	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	120.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1225	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1226	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	580.000.000,00	576.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000.000,00	576.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1227	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1228	2.24.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1229	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	28.156.592,00	48.156.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.156.592,00	48.156.592,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1230	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	100.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan arsip secara baku Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori baik Persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik	100 % 55 % 90,21 %											
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perawatan arsip daerah	3 kegiatan											
1231	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2000 Arsip	192.450.000,00	159.346.119,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.450.000,00	163.346.119,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan desa yang menggunakan sistem kearsipan sesuai dengan NSPK	240 angka											
1232	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	115.766.660,00	18.983.850,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.766.660,00	33.983.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek budaya yang terinventarisis Persentase obyek budaya yang dilestarikan	12.37 % 76.00 %											
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku budaya lokal	210 Angka											
1233	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 dokumen Objek	40.000.000,00	27.134.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	27.134.680,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1234	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	400 Orang	1.085.000.000,00	2.809.320.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000.000,00	2.809.320.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	80 Angka											
1235	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 dokumen Objek	80.000.000,00	49.389.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	49.389.673,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1236	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional													
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	1.200.000.000,00	1.367.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.367.864.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1237	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pendampingan	35 Angka											
1238	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat													
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni pertunjukan tradisional yang mendukung event pariwisata skala kabupaten	3.90 %											
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian yang terfasilitasi Jumlah kesenian yang terfasilitasi	30 Angka 80 Angka											
1239	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang ditetapkan Persentase obyek diduga cagar budaya yang terdata	14.00 % 7.72 %											
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah ODCB dan CB yanag ditetapkan bupati	15 Angka											
1240	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	40.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	32.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah CB yang dikelola	15 Angka											
1241	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	30.000.000,00	19.143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.143.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase reaslisasi belanja pelayanan administrasi	100 %											
1242	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	5.665.287.036,00	5.014.739.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665.287.036,00	5.014.739.479,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan sarpras pendukung kerja	100 %											
1243	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1244	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.834.680,00	13.834.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.834.680,00	13.834.680,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1245	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1246	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	83.000.000,00	37.282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00	37.282.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan sarpras pendukung kerja	100 %											
1247	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	95.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	110.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan sarpras pendukung kerja	100 %											
1248	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1249	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000.000,00	143.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1250	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1251	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220.262.000,00	220.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.262.000,00	220.262.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan sarpras pendukung kerja	100 %											
1252	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	80.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	62.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1253	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.738.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1254	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	45.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Operasional Obyek Wisata Milik Pemerintah Daerah	12 bulan											
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi Jumlah Destinasi Wisata yang terkelola	7 Lokasi 7 lokasi											
1255	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi	1.390.000.000,00	1.269.330.850,00	0,00	44.915.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000.000,00	1.314.246.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1256	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	1.642.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1.642.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Titik Kawasan Jumlah KSPK yang dikelola	5 titik kawasan 5 Angka											
1257	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	322.607.232,00	289.664.893,00	36.718.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.325.592,00	289.664.893,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1258	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1259	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota													
			0	0 0	30.000.000,00	21.059.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	21.059.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan event wisata tingkat nasional Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan Pertumbuhan jumlah kemitraan pariwisata	30.00 % 35.00 % 9.00 %											
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Promosi wisata dalam dan luar negeri entang daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten	4 Paket 35 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1260	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	166.316.378,00	142.791.378,00	28.683.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	142.791.378,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1261	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	13 Dokumen	50.000.000,00	40.793.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.793.628,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1262	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	97.700.000,00	55.106.770,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	57.406.770,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1263	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	500.000.000,00	335.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	335.637.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1264	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	350.000.000,00	267.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	267.076.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan Persentase klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang	4.00 % 8.00 %											
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase zona ekonomi kreatif yang dimanfaatkan Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif	65 %											
1265	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	245.000.000,00	286.361.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	286.361.670,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-											
1266	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur													
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1267	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual													
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1268	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1269	3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas													
			Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi Persentase kelembagaan pariwisata Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	25.00 % 30.00 % 40.00 %											
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi tingkat dasar	34 %											
1270	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	60.000.000,00	42.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	42.448.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1271	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	50.000.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	34.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1272	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	80 Orang	60.000.000,00	41.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	41.381.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1273	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Prosentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas	4 %											
1274	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	150.000.000,00	142.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	142.690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1275	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	30 Orang	75.000.000,00	58.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	58.670.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan omzet koperasi	2.00 %											
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan pengawasan dan pembinaan koperasi Jumlah Koperasi yang diawasi Pertumbuhan Omzet Koperasi	300 Kali 300 Koperasi 300 Koperasi 2 %											
1276	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	220 Koperasi Unit Usaha	43.692.000,00	14.895.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692.000,00	14.895.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Aktif Persentase KSP/USP koperasi sehat	71.26 % 80.90 %											
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah USP Sehat Jumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan koperasi Presentase KSP/USP Sehat Jumlah KSP Sehat Presentase Koperasi Aktif	46 USP 200 kali 76,60% % 10 KSP 70,39 %											
1277	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100 Koperasi Unit Usaha	37.000.000,00	20.880.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	20.880.470,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1278	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan													
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 Koperasi Unit Usaha	50.239.680,00	19.729.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.239.680,00	19.729.997,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi produksi Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar online Persentase koperasi yang mengakses pembiayaan perbankan	1.50 % 27.66 % 96.12 %											
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase koperasi produksi secara keseluruhan Jumlah Koperasi Aktif Kategori Sehat yang bisa 5mengakses Perbankan Presentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar online Jumlah Koperasi yang menghasilkan produk	50 Koperasi 8 Koperasi 1,40 % 21,28 %											
1279	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	190 orang Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1280	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40 orang Unit Usaha	65.000.000,00	94.064.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	94.064.018,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/ UB Presentase Masyarakat Miskin Yang Menjadi Wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB Persentase usaha mikro yang mengakses pembiayaan perbankan Presentase Rumah Tangga Miskin yang Menjadi Wirausaha yang Mengakses Modal Usaha Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0.39 % 1.90 % 1.90 % 22.00 % 2.40 % 4,00 % 89.00 %											
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemudahan perijinan Presentase Usaha mikro yang mengakses pembiayaan perbankan Jumlah usaha mikro telah di data untuk di kembangkan Jumlah usaha mikro telah di data untuk di kembangkan (terget awal 100. target akhir 300) Jumlah usaha mikro yang akan di berdayakan Jumlah Usaha Mikro yang akan diberdayakan Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi kemudahan perijinan Pertumbuhan Jumlah usaha mikro Presentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB	260 UKM 22 % 237 UKM 237 UKM 280 UKM 280 UKM 260 UKM 0.39 % 2.40 %											
1281	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 UKM Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1282	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	4 PAKET Unit Usaha	290.000.000,00	602.519.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	602.519.297,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Unit usaha Mikro Naik Kelas Yang Difasilitasi Presentase Usaha Mikro yang Mempunyai Izin Usaha	0.50 % 22.00 %											
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Presentase Unit Usaha Mikro naik kelas yang difasilitasi presentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	70 UKM 90 UKM 0.50 % 22 %											
1283	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1 Lembaga Keuangan Unit Usaha	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat	100 % 12 Laporan 95 %											
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD Capaian Triwulan, LKJIP, POBL, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Tindak Pengendalian, Indikator Kinerja Tahunan dll Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan & Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen											
1284	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen Dokumen	2.500.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.975.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1285	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen Laporan	2.500.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.975.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan											
1286	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Pegawai Orang/bulan	7.935.398.624,00	7.784.052.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935.398.624,00	7.784.052.031,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Paket 1 Paket 1 Paket 50 Kali 1 Paket 1 Paket											
1287	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.765.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1288	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	19.750.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.750.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1289	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1290	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun Paket	30.000.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1291	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1.800.000,00	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.422.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1292	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	111.600.000,00	87.265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600.000,00	87.265.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Mebel Lainnya yang Dipelihara Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40 Unit 30 Unit 3 laporan											
1293	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1294	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan 12 Bulan 12 Bulan											
1295	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.250.000,00	987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	987.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1296	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.004.065.332,00	989.065.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.065.332,00	989.065.332,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1297	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.732.323.914,00	1.665.087.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.323.914,00	1.665.087.891,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase Jumlah BMD yang terpelihara Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Pemeliharaan Mebel Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35 Unit 12 Bulan 2 Unit 39 Unit 100 %											
1298	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit Unit	64.377.000,00	70.857.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.377.000,00	70.857.830,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1299	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit Unit	5.000.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1300	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit Unit	15.000.000,00	7.060.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.060.601,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1301	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun Unit	30.000.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap barang perdagangan	100.00 %											
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap barang perdagangan Jumlah Perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di fasilitasi Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang di terbitkan	9 Izin 12 izin 100 %											
1302	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Paket Dokumen	17.544.990,00	61.650.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544.990,00	61.650.438,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar dalam kondisi baik Persentase kios/ los yang dimanfaatkan	74.00 % 94.00 %											
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase los/kios yang dimanfaatkan Jumlah sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun/renovasi/rehap Jumlah sarana distribusi perdagangan yang tersedia Persentase pasar dalam kondisi baik	95 % 95 % 95 % 74 % 94 %											
1303	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Paket Unit	675.183.375,00	989.800.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.183.375,00	989.800.829,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1304	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Paket Unit	86.750.000,00	70.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.750.000,00	70.000.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan dibina Jumlah Pengelola sarana Distribusi Perdagangan dibina Jumlah pengelola pasar yang akan adakan pembinaan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	95 % 95 Pengelola 95 % 98 %											
1305	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	150 PKL Dokumen	40.500.000,00	31.007.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	31.007.926,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1306	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Pasar+5UPTD Dokumen	43.350.000,00	12.657.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350.000,00	12.657.696,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase disparitas harga kepokmas antar wilayah Jumlah Barang Penting yang Di awasi Jumlah Pelaku Usaha Distribusi Pupuk Bersubsidi yang di Awasi	2.00 % 20 Barang 86.00 Distributor											
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah stok barang pokok dan penting yang tersedia Jumlah barang pokok dan barang penting yang diawasi stoknya jumlah barang penting yang diawasi Presentase dispasirtas harga kepokmas antar wilayah Jumlah pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi	20 Barang 79 barang 86 Usaha 100 % 2 %											
1307	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat													
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1.630.000.000,00	1.542.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000.000,00	1.542.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemantauan harga Jumlah barang pokok dan penting yang diawasi stoknya	79 barang 200 kali											
1308	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 PASAR Laporan	70.000.000,00	55.206.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	55.206.018,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan komoditas eksport	5.55 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan yang menjadi komoditas ekspor jumlah kegiatan pameran dagang lokal Jumlah Kegiatan pameran yang dilaksanakan Jumlah komoditas ekspor yang di promosikan Jumlah Komoditas Ekspor yang di promosikan Jumlah pelaku usaha yang telah dibina dan dilatih jumlah produk ekspor yang mempunyai citra pertumbuhan jumlah komoditas ekspor	80 produk 1 kegiatan 3 kegiatan 10 komoditas 10 % 50 orang 80 produk 5.55 %											
1309	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor													
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	1 Paket Produk	32.000.000,00	35.048.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	35.048.421,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rasio metrologi legal yang ditera, tera ulang 8%	8% persen											
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya pelayanan TTU di Kantor Terlaksananya Pembinaan pelaku usaha pengguna UTTP Terlaksananya Sidang Pasar	12 Bulan 50 orang 30 kali											
1310	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3250 UTTP Unit	60.000.000,00	35.685.585,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	38.685.585,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1311	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Pelaku Usaha Orang	40.250.000,00	19.627.550,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	19.627.550,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan omset market place lokal produk UMKM Persentase market place lokal yang memasarkan produk lokal Persentase toko modern yang memasarkan produk lokal	2.50 % 59.00 % 80.18 %											
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah market place yang memasarkan produk lokal Jumlah produk lokal yang dipasarkan di Toko Modern presentase marketplace lokal yang memasarkan produk lokal Pertumbuhan omset market place lokal produk umkm Presentase toko modern yang memasarkan produk lokal jumlah produk lokal yang masuk sistem jaringan perdagangan	3 Produk 18 Prdk 59 % 2.50 % 80.18 % 4 Produk											
1312	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40 UMKM UMKM	20.000.000,00	9.155.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	9.155.396,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	100 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja administrasi umum Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 % 100 %											
1313	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.334.200,00	9.696.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334.200,00	9.696.678,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1314	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.495.062,00	5.919.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.495.062,00	5.919.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1315	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.040.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1316	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	178.770.000,00	38.966.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.770.000,00	38.966.838,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %											
1317	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.200.000,00	58.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200.000,00	58.960.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
1318	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	22.659.160,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.659.160,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1319	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.190.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	6 dokumen											
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	48 dokumen 46 dokumen											
1320	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	313.530.438,00	395.931.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.530.438,00	395.931.868,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1321	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	76.427.200,00	38.420.000,00	57.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.427.200,00	68.420.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1322	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	222.409.000,00	129.550.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.409.000,00	129.550.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kesepakatan (MOU) yang dihasilkan	15 dokumen											
1323	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	84.401.400,00	54.886.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.401.400,00	54.886.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket											
1324	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	12.826.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	12.826.596,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1325	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	10.000.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.820.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1326	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1327	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	120.000.000,00	52.690.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	52.690.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan											
1328	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1329	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1330	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			0	0 0	18.960.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960.000,00	17.040.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1331	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1332	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Rata-rata Nilai RB Perangkat Daerah	71 angka											
1333	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	44 Dokumen	250.000.000,00	120.456.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	120.456.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1334	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	240.000.000,00	119.405.300,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	149.405.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1335	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	170.000.000,00	74.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	74.204.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen											
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen											
1336	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase realisasi belanja pelayanan administrasi	100 persen											
1337	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.117.500,00	6.683.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117.500,00	6.683.968,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1338	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.134.000,00	6.198.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134.000,00	6.198.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1339	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.820.000,00	6.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820.000,00	6.219.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1340	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan											
1341	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit											
1342	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	20.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1343	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase peraturan daeerah yang di tindaklanjuti dengan peraturan bupat	100 persen											
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	persentase jumlah gugatan yang difasilitasi Persentase penyusunan produk hukum nilai JDIH kabupaten	100 persen 100 persen 100 persen											
1344	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	12 Dokumen	120.000.000,00	164.442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	164.442.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1345	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	95.000.000,00	120.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	120.695.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1346	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	12 Dokumen	190.000.000,00	144.708.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	144.708.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1347	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.371.037,00	11.436.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.371.037,00	11.436.967,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1348	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.000.000,00	4.477.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.477.340,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1349	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1350	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	52.925.000,00	20.500.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.925.000,00	20.500.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1351	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1352	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1353	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.288.000,00	69.769.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.288.000,00	69.769.660,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1354	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	20.930.686,00	13.798.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930.686,00	13.798.412,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1355	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 %											
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100 %											
1356	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	3.222.128.200,00	3.337.029.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.128.200,00	3.337.029.082,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1357	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8 Dokumen	211.871.800,00	138.840.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.871.800,00	138.840.972,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1358	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	100.000.000,00	74.959.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	74.959.278,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Umum Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang/bulan											
1359	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	21.231.143.517,00	19.670.953.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231.143.517,00	19.670.953.373,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket											
1360	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1361	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1362	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1363	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1364	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1365	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1366	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1367	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.600.000.000,00	2.223.939.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	2.223.939.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1368	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.190.000.000,00	1.235.340.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000.000,00	1.235.340.902,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1369	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	400.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	650.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1370	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	250.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan											
1371	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1372	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	581.098.080,00	581.098.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.098.080,00	581.098.080,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1373	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1374	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.386.858.500,00	2.801.578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.858.500,00	2.801.578.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit											
1375	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	500.156.687,00	510.156.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.156.687,00	510.156.687,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1376	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	500.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	510.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1377	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	89 Unit	110.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	160.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1378	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1379	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	800.342.085,00	1.250.342.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.342.085,00	1.250.342.085,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1380	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 orang/bulan											
1381	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	2.045.115.040,00	1.419.204.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.115.040,00	1.419.204.111,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1382	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	250.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	325.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1383	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	35.520.871,00	35.520.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.520.871,00	35.520.871,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1384	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terwujudnya Fasilitasi Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5 paket											
1385	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1386	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1387	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	500.000.000,00	365.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	365.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	12 bulan											
1388	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1389	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1390	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1391	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	100.000.000,00	41.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	41.530.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang	12 bulan											
1392	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1393	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.423.000,00	27.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.423.000,00	27.423.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor Yang Tersedia	100 %											
1394	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	9.197.155,00	9.197.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197.155,00	9.197.155,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1395	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	100 %											
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP/jumlah seluruh BUMD x 100 Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan/jumlah semua rekomendasi bidang perekonomian dan SDA x 100	100 % 100 %												
1396	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	25 Dokumen	250.000.000,00	180.072.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	180.072.314,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1397	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	15 Laporan	371.296.990,00	213.131.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.296.990,00	213.131.358,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan sumber daya Alam yang dipublikasikan	12 dokumen											
1398	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	25 Dokumen	495.000.200,00	476.788.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000.200,00	476.788.508,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1399	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	50.000.000,00	25.461.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.461.938,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Kantor yang Terpenuhi	100 %											
1400	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	92.381.400,00	92.700.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.381.400,00	92.700.398,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1401	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	135.303.400,00	136.606.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.303.400,00	136.606.975,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1402	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1460 Dokumen	7.249.000,00	7.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249.000,00	7.249.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1403	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	457.500.000,00	334.180.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.500.000,00	334.180.075,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarpras Pendukung Kinerja yang Terpenuhi	100 %											
1404	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	352.923.000,00	127.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.923.000,00	127.186.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %											
1405	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1406	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.800.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	35.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpenuhi	100 %											
1407	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	55.000.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	52.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1408	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	18.700.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00	15.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Realisasi Pelaksanaan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan Daerah, dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	100 %											
1409	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	79.537.025,00	121.812.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.537.025,00	121.812.025,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1410	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	294.020.000,00	209.048.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.020.000,00	209.048.633,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1411	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	135.331.760,00	37.084.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.331.760,00	37.084.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan sarpras pendukung kierja Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik	100 persen 100 persen 100 persen											
1412	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.275.494,00	10.275.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275.494,00	10.275.494,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1413	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1414	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1415	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.780.000,00	58.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.780.000,00	58.280.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan sarpras pendukung kerja Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik	100 persen 100 persen 100 persen											
1416	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan sarpras pendukung kerja	100 persen 100 persen 100 persen											
1417	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.869.801,00	1.869.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.801,00	1.869.801,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1418	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.930.686,00	19.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930.686,00	19.260.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik Persentase pemenuhan sarpras pendukung kerja Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen											
1419	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	43.628.701,00	39.233.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.628.701,00	39.233.086,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1420	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase rekomendasi hasil koordinasi bagian administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti Rata-rata Capaian kinerja Perangkat Daerah Pertriwulan	100 persen 85 persen											
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase rekomendasi hasil koordinasi bagian administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti Rata-rata Capaian kinerja Perangkat Daerah Pertriwulan	100 persen 85 persen											
1421	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	37.776.000,00	16.772.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.776.000,00	16.772.179,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1422	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	350.943.748,00	435.984.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.943.748,00	435.984.403,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1423	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19 Laporan	149.096.337,00	110.022.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.096.337,00	110.022.190,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi/ jumlah pelayanan perkantoran	100 %											
1424	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1425	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1426	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1427	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	140.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	56.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarpras pendukung kinerja yang terpenuhi/ jumlah kebutuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
1428	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jumlah anggaran belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1429	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1430	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600.000,00	36.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Jumlah anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1431	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1432	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	95 %											
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks tata Kelola Pengadaan	89,25 Nilai											
1433	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	148.097.890,00	77.271.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.097.890,00	77.271.156,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1434	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan Dokumen	55.000.000,00	27.557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	27.557.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1435	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	80.000.000,00	42.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	42.283.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.02	SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 % 2 dokumen											
1436	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.615.561.529,00	3.243.100.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.561.529,00	3.243.100.422,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %											
1437	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	undefined undefined											
1438	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	0,00	241.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1439	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	32.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1440	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	165.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1441	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1442	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1443	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1444	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	142.800.000,00	0,00	907.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase realisasi belanja Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1445	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1446	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1447	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.519.860.000,00	1.502.144.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.860.000,00	1.502.144.470,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase realisasi pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined	100 % undefined undefined											
1448	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	616.288.688,00	716.288.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.288.688,00	716.288.688,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1449	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1450	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	110.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1451	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 %											
1452	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	250.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	375.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %											
1453	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	27.776.249.594,00	27.776.249.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.776.249.594,00	27.776.249.594,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1454	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	44.370.000,00	24.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.370.000,00	24.370.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	100 %											
1455	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Laporan	6.821.022.301,00	7.301.441.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821.022.301,00	7.301.441.151,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Hasil Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Persentase Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	100 % 20 %											
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD	4 dokumen 30 dokumen											
1456	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	700.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	102.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1457	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	580.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000.000,00	310.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100 %											
1458	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Layanan Agenda Kerja DPRD	100 %											
1459	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	2.142.380.000,00	1.550.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.380.000,00	1.550.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1460	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	216.000.000,00	172.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	172.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1461	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1462	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	100 Dokumen	437.860.000,00	483.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.860.000,00	483.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang sesuai dengan prioritas daerah	100 %											
1463	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses													
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.400.000.000,00	1.378.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	1.378.135.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.01	PERENCANAAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Belanja Belanja Administrasi Umum	100 %											
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %											
1464	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.385.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385.000,00	3.525.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1465	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.238.280,00	6.025.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238.280,00	6.025.768,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen											
1466	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6.494.463.870,00	6.143.926.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494.463.870,00	6.143.926.432,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1467	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1468	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1469	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	36.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	31.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1470	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1471	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1472	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	195.782.000,00	109.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.782.000,00	109.168.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1473	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1474	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	0,00	0,00	460.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1475	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1476	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	146.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	131.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1477	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	514.658.240,00	486.275.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.658.240,00	486.275.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1478	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	106.583.052,00	109.583.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.583.052,00	109.583.052,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1479	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1480	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	24.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	34.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1481	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	53.000.000,00	25.362.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	25.362.374,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RKPD dan RPJMD	100 %											
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100 %											
1482	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	100.000.000,00	52.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	52.458.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1483	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	300.000.000,00	185.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	185.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD	100 %											
1484	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	129.250.000,00	58.496.000,00	70.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	104.246.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD yang Tersusun Tepat Waktu	2 Dokumen											
1485	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	18.695.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	18.695.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu	100 %											
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu	100 %											
1486	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 Laporan	132.200.950,00	66.078.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.200.950,00	66.078.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1487	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	218.679.835,00	175.251.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.679.835,00	175.251.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	100% undefined 100 %											
1488	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	242.216.480,00	137.146.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.216.480,00	137.146.592,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1489	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	9 Laporan	140.000.000,00	36.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	36.190.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu	100 %											
1490	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	200.000.000,00	126.593.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	126.593.954,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1491	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	150.000.000,00	104.479.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	104.479.168,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Presentase Inovasi yang diterapkan Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	14 % 81 %											
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Prosentase Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	81 %											
1492	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	125.000.000,00	62.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	62.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1493	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	50.000.000,00	24.574.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	24.574.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1494	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah													
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	104.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	104.190.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi	14 %											
1495	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1496	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	25.000.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	15.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1497	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	75.000.000,00	47.420.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	47.420.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1498	5.05.03.2.02.0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	2 Laporan	50.000.000,00	14.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	14.825.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1499	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	44.110.182.280,00	39.074.833.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.110.182.280,00	39.074.833.860,50	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1500	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	30.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1501	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	220.000.000,00	264.127.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	264.127.165,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1502	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	233.000.000,00	316.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000.000,00	316.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1503	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1504	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	350.000.000,00	357.608.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	357.608.052,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1505	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1506	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket Unit	700.000,00	0,00	99.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1507	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Paket Unit	4.000.000,00	0,00	696.000.000,00	466.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	466.546.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1508	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan Laporan	8.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1509	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan Laporan	19.087.621.389,00	12.495.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.087.621.389,00	12.495.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1510	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	1.155.500.000,00	1.128.551.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.500.000,00	1.128.551.392,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1511	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	210.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	215.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1512	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	75.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1513	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	130.000.000,00	245.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	245.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tepat waktu	100 %											
1514	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	17.000.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	15.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1515	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	17.000.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	15.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1516	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD													
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	19.000.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	18.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1517	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	24.000.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	20.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1518	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD													
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1519	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD													
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	12.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1520	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	198.000.000,00	101.362.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00	101.362.004,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1521	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	51.000.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	45.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-											
1522	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen	293.500.000,00	205.833.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500.000,00	205.833.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-											
1523	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	157.000.000,00	103.045.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000.000,00	103.045.154,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-											
1524	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Tahun Laporan	36.716.000,00	37.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.748.418.000,00	358.828.818.000,00	359.785.134.000,00	358.866.034.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa
1525	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Tahun Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00	3.450.000.000,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00	3.450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1526	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Tahun Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.881.618.600,00	14.881.618.600,00	14.881.618.600,00	14.881.618.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-											
1527	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Aplikasi Dokumen	325.000.000,00	169.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	169.770.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-											
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-											
1528	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	35.000.000,00	25.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	25.066.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1529	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan Laporan	550.000.000,00	452.172.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	452.172.913,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1530	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Paket Laporan	275.000.000,00	227.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	227.406.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1531	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	100.000.000,00	57.187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	57.187.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-											
1532	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	340.995.306,00	333.995.571,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.995.306,00	433.995.571,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1533	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	265 Desa/Kelurahan Obyek Pajak	1.327.495.091,00	941.545.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.495.091,00	941.545.091,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1534	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Paket Dokumen	2.025.000.000,00	1.434.575.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000.000,00	1.614.575.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Pejabat Pengelola Keuangan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-											
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-											
1535	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Tahun Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Desa
1536	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Tahun Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1537	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Tahun Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kepegawaian Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program renja Perangkat Daerah dan RKPD	100 %											
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %											
1538	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000,00	1.999.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.999.908,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1539	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %											
1540	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.837.475.266,00	4.468.519.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.475.266,00	4.468.519.114,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1541	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61.800.000,00	47.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800.000,00	47.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Adminisrasi Umum	100 %											
1542	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.500.000,00	6.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.330.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1543	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	77.250.000,00	49.199.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.250.000,00	49.199.692,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1544	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1545	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.000.000,00	59.999.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	59.999.880,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1546	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1547	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	267.400.000,00	132.211.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.400.000,00	132.211.119,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1548	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	65.000.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	48.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1549	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000,00	4.002.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.002.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1550	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1551	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	262.600.000,00	234.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.600.000,00	234.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1552	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	100.000.000,00	102.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	102.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1553	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	115 Unit	30.000.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	21.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1554	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1555	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	38.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	88 %											
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian yang difasilitasi	1022 Orang											
1556	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	16.000.000,00	6.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	6.433.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1557	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK													
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen Dokumen	218.900.000,00	95.523.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.900.000,00	95.523.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1558	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	331 Dokumen	82.000.000,00	38.233.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	38.233.010,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1559	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN													
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1560	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	35.000.000,00	164.348.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	164.348.881,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1561	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	300 Dokumen	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang Difasilitasi	100 %											
1562	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750 Dokumen	15.000.000,00	6.148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	6.148.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1563	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	200.000.000,00	446.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	446.610.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang Difasilitasi Pengembangan Kompetensi	3926 orang											
1564	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 Dokumen	60.000.000,00	40.001.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	40.001.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1565	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	20 Dokumen	611.020.000,00	976.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.020.000,00	976.764.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1566	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	125 Orang	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1567	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional													
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	80 Orang	15.000.000,00	7.998.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.998.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan / Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen											
1568	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	35.000.000,00	8.566.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	8.566.990,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1569	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	8 Orang	20.000.000,00	8.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	8.241.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1570	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	35 Orang	7.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1571	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 Orang	15.990.000,00	11.796.000,00	20.010.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	31.796.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1572	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	18.000.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	7.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		inspektorat													
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program renja Perangkat Daerah dan RKP	100 %											
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %											
1573	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	160.000.000,00	53.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	53.159.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1574	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %											
1575	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	8.386.853.234,00	8.424.476.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386.853.234,00	8.424.476.396,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen layanan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	100 %											
1576	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	800.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1577	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1578	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.000.000,00	43.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	43.769.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1579	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.000.000,00	21.660.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	21.660.082,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1580	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1581	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	350.000.000,00	166.275.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	166.275.018,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1582	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67 Unit	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1583	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang dan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1584	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	2.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1585	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1586	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	330.000.000,00	347.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	347.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1587	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	282.000.000,00	222.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000.000,00	222.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1588	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	20.000.000,00	34.711.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	34.711.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1589	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1590	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1591	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut hasil review APIP dan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	100 %											
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Pemeriksaan Internal yang dilaksanakan Presenstase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	100 % 100 %											
1592	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	60.780.000,00	104.302.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780.000,00	104.302.382,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1593	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	131.480.000,00	76.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.480.000,00	76.688.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1594	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	35.000.000,00	15.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	15.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1595	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	45.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1596	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan	89.930.000,00	102.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.930.000,00	102.958.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1597	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal													
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	22.614.000,00	12.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.614.000,00	12.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1598	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	156.100.000,00	109.663.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100.000,00	109.663.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Presentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dan Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/Daerah	100 % 100 %											
1599	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	50.000.000,00	27.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	27.170.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1600	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24 Laporan	116.600.000,00	69.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600.000,00	69.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang didampingi dan diasistensi Capaian pemenuhan data dukung area intervensi	100 % 80 %											
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pendampingan dan Asistensi Presentase Pemenuhan Data Dukung Area Intervensi	80 % 100 %											
1601	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0 perangkat daerah	25.000.000,00	11.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	11.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1602	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0 Kegiatan	85.000.000,00	79.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	79.040.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1603	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	30.000.000,00	15.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Wonosobo													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100 %											
1604	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1605	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja ASN	100 %											
1606	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	10.713.563.738,00	9.704.092.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713.563.738,00	9.704.092.770,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD perjalanan dinas Rapat	12 Bulan											
1607	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.709.900,00	6.709.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709.900,00	6.709.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1608	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1609	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1610	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.606.800,00	10.606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606.800,00	10.606.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1611	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1612	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	45.000.000,00	40.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	40.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pengadaan peralatan (kamera vidcom, microphone vidcom, Printer, Laptop, sarpras LAN)	100 %											
1613	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produkt Kinerja karena dukungan jasa penunjang	12 laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1614	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1615	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1616	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %											
1617	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1618	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1619	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82,50 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 %											
1620	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30.900.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900.000,00	24.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1621	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Peningkatan Efektiûtas Kegiatan P di Tingkat Kecamatan Cakupan Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	12 dokumen 100 % 100 %											
1622	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan											
1623	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700.000,00	98.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-											
1624	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	66.015.463,00	61.075.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.015.463,00	61.075.463,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	4 Pokja keluarga											
1625	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	4 Keluarga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi FKDM Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan											
1626	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	56.290.000,00	51.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.290.000,00	51.090.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1627	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100 %											
1628	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	570 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1629	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	100 %											
1630	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	95.000.000,00	91.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	91.838.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1631	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	15.000.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1632	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	20.000.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1633	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Wonosobo Barat													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
1634	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1635	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	10.000.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1636	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1637	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.259.302,00	8.259.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.302,00	8.259.302,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1638	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1639	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
1640	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540.000,00	20.540.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1641	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.440.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440.000,00	13.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1642	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	144.660.698,00	104.598.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.660.698,00	104.598.240,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1643	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1644	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.400.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	6.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1645	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15.000.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	17.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1646	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1647	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1648	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	424.005.630,00	462.408.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.005.630,00	462.408.088,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1649	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2600 Keluarga	75.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	65.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
1650	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1651	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
1652	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Wonosobo Timur													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1653	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.865.000,00	2.684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	2.684.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1654	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.205.700,00	8.645.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205.700,00	8.645.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1655	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.940.000,00	2.602.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	2.602.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1656	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.408.500,00	4.408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.500,00	4.408.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1657	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1658	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena Dukungan Jasa Penunjang	100 %											
1659	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1660	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1661	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1662	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	86.150.000,00	62.718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.150.000,00	62.718.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1663	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4.200.000,00	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	6.040.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1664	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	2.800.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	6.420.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1665	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.500.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	5.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1666	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1667	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1668	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	598.982.800,00	612.782.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.982.800,00	612.782.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
1669	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	68.330.000,00	68.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.330.000,00	68.330.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
1670	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1671	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
1672	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Jlamprang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
1673	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1674	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1675	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1676	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.000,00	3.685.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1677	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1678	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
1679	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1680	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1681	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1682	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.377.889,00	112.417.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.377.889,00	112.417.889,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1683	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1684	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1685	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.500.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	10.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1686	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1687	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1688	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	324.854.378,00	321.214.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.854.378,00	321.214.378,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
1689	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1413 Keluarga	89.540.000,00	89.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.540.000,00	89.540.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat kecamatan	100 %											
1690	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
1691	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Kejiwan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
1692	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1693	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1694	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1695	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.280.320,00	5.580.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280.320,00	5.580.320,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1696	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1697	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540.000,00	9.540.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1698	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1699	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	13.346.800,00	13.346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346.800,00	13.346.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1700	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	126.556.000,00	126.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.556.000,00	126.096.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1701	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	27.500.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	29.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1702	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6.000.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	8.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1703	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1704	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1705	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1706	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	355.630.784,00	355.630.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.630.784,00	355.630.784,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
1707	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	500 Keluarga	95.589.000,00	95.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.589.000,00	95.589.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat Kecamatan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1708	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1709	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	17.000.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	9.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
1710	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	15.895.000,00	15.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895.000,00	15.895.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Sambek													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	100 %											
1711	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1712	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1713	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1714	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1715	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1716	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.434.000,00	30.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.434.000,00	30.434.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
1717	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1718	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1719	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1720	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1721	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280.000,00	14.280.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1722	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	147.120.005,00	145.200.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.120.005,00	145.200.005,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1723	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1724	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1725	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1726	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1727	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1728	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1729	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	308.437.478,00	295.357.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.437.478,00	295.357.478,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
1730	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1124 Keluarga	153.410.000,00	153.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.410.000,00	153.410.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100 %											
1731	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950.000,00	48.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
1732	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	31.598.000,00	31.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.598.000,00	31.598.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Mlipak													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	12 Bulan											
1733	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1734	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1735	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1736	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1737	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1738	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	19.040.000,00	22.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040.000,00	22.340.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	12 Bulan											
1739	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	12 Bulan											
1740	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1741	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.500.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	10.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1742	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121.600.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600.000,00	115.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang terfasilitasi	100 %											
1743	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1744	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1745	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.160.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160.000,00	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1746	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1747	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	297.439.545,00	292.239.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.439.545,00	292.239.545,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	12 Bulan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1748	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1800 Keluarga	103.289.638,00	103.289.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.289.638,00	103.289.638,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik Antar Kelompok/Desa/Kelurahan Terselesaikan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
1749	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	66.810.810,00	66.810.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.810.810,00	66.810.810,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1750	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	1 Tahun											
1751	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060.000,00	8.060.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Pagerkukuh													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran presentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
1752	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1753	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 TAHUN Paket	3.498.270,00	5.798.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.270,00	5.798.270,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1754	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.268.450,00	3.268.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.450,00	3.268.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1755	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.485.800,00	5.785.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.800,00	5.785.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1756	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1757	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8.900.600,00	5.834.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.600,00	5.834.128,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
1758	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Fasilitasi Pelayanan Umum Kantor	100 %											
1759	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1760	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	99.685.360,00	98.351.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685.360,00	98.351.832,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarpras Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %											
1761	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2.656.810,00	2.656.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.810,00	2.656.810,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1762	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	4.845.200,00	4.845.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845.200,00	4.845.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1763	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1764	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.158.555,00	11.158.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158.555,00	11.158.555,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1765	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1766	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	391.695.920,00	391.695.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.695.920,00	391.695.920,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK	100 %											
1767	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	989 Keluarga	101.848.765,00	101.848.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.848.765,00	101.848.765,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
1768	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	17.893.880,00	17.893.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893.880,00	17.893.880,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1769	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	6.480.880,00	6.480.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.880,00	6.480.880,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100 %											
1770	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	9.812.000,00	9.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812.000,00	9.812.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Rojoimo													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
1771	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1772	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	6.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1773	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1774	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1775	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
1776	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	23.000.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	41.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1777	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1778	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1779	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	140.557.040,00	114.257.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.557.040,00	114.257.040,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1780	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	4.000.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	6.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1781	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.000.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	7.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1782	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	215.000.000,00	15.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang Terlaksana	100 %											
1783	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1784	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1785	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	375.440.000,00	375.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.440.000,00	375.440.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 %											
1786	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1300 Keluarga	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran, Kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan ketertiban Umum tingkat Kecematan	100 %											
1787	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1788	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mengingkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan	100 %											
1789	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Kramatan													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
1790	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1791	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1792	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1793	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.994.405,00	2.994.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.405,00	2.994.405,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1794	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1795	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
1796	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1797	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1798	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1799	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	87.442.160,00	85.142.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.442.160,00	85.142.160,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1800	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1801	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1802	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lembaga Pemberdayaan Masyrakat yang terfasilitasi persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	undefined undefined 100 %											
1803	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1804	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1805	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	407.390.000,00	407.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.390.000,00	407.390.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
1806	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	989 Keluarga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1807	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1808	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
1809	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Tawangsari													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
1810	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1811	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1812	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1813	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1814	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1815	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
1816	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1817	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produkt Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1818	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1819	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.780.474,00	9.780.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.474,00	9.780.474,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1820	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	118.112.240,00	117.910.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.112.240,00	117.910.640,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1821	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1822	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1823	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100 %											
1824	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1825	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1826	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	287.020.970,00	287.222.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.020.970,00	287.222.570,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 %											
1827	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	833 Keluarga	58.580.000,00	58.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580.000,00	58.580.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase konflik antar kelompok/ desa/ kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat Kecamatan	100 %											
1828	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	78.300.595,00	78.300.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300.595,00	78.300.595,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1829	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	7.716.220,00	7.716.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716.220,00	7.716.220,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
1830	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Jaraksari													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan Sarpras Kantor Pendukung Kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Kantor	100 %											
1831	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1832	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1833	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1834	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1835	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1836	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.264.000,00	15.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264.000,00	15.264.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
1837	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1838	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	111.867.360,00	111.867.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.867.360,00	111.867.360,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1839	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1840	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1841	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1842	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	13.461.093,00	13.461.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461.093,00	13.461.093,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1843	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1844	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1845	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	583.713.430,00	583.713.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.713.430,00	583.713.430,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1846	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2850 Keluarga	80.349.000,00	80.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.349.000,00	80.349.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											
1847	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	175.779.570,00	175.779.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.779.570,00	175.779.570,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1848	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
1849	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Bumireso													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor Yang Tersedia	100 %											
1850	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1851	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1852	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1853	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1854	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1855	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
1856	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1857	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1858	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1859	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1860	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	113.700.000,00	112.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700.000,00	112.840.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Pemeliharaan kantor yang Tersedia	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1861	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1862	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	9.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1863	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	19.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Akt	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1864	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1865	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1866	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	328.044.592,00	321.804.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.044.592,00	321.804.592,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
1867	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	700 Keluarga	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
1868	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnnya Rasa Cinta Tanah Air yang Didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan	100 %											
1869	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Kalianget													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi PerkantoranPresentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
1870	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1871	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1872	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1873	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1874	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1875	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1876	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1877	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1878	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	172.097.760,00	151.697.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.097.760,00	151.697.760,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %											
1879	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1880	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.880.000,00	18.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	18.180.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1881	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	33.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	100 %											
1882	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1883	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1884	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	472.800.000,00	453.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.800.000,00	453.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi PKK	100 %											
1885	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2569 Keluarga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan,	100 %											
1886	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %											
1887	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Kertek													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	20 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen											
1888	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1889	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %											
1890	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4.097.759.696,00	3.633.938.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.759.696,00	3.633.938.861,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1891	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1892	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1893	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.999.400,00	3.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.400,00	3.999.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1894	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.805.250,00	10.805.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805.250,00	10.805.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1895	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1896	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	23.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.075.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
1897	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	350.000,00	330.000,00	74.876.593,00	30.645.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.226.593,00	30.975.001,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
1898	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1899	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1900	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	117.040.000,00	118.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.040.000,00	118.965.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit											
1901	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	31.215.919,00	31.215.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.215.919,00	31.215.919,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1902	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1903	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedi Persentase penurunan kasus pernikahan usia anak nilai rata-rata persepsi pelayanan undefined	100 % 25 % 80 % undefined undefined											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	2 Laporan											
1904	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21 Desa/Kel Laporan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1905	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21 Desa/Kel Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen											
1906	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	21 Desa/Kel Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21 Laporan 100 %											
1907	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21 Desa/Kel Laporan	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R Persentase desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi	10 % 100 % 18 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan											
1908	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	4 Keluarga											
1909	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	21 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 %											
1910	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1911	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelanggaran pilkades yang terselesaikan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang											
1912	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1913	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar Persentase kenaikan Indeks ketahanan ekonomi IDM Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar.	100 % 14 % 19 Dokumen											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Administrasi dan Keuangan Desa, APBDes, RKPDes, PERDES PERKADES, Inventarisasi Aset Desa	19 Dokumen											
1914	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	120.000.000,00	89.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	89.375.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1915	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1916	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kertek													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,Cakupan Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	6 paket											
1917	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.044.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.275,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1918	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.551.499,00	12.253.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551.499,00	12.253.744,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1919	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1920	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.500.000,00	7.160.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.160.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1921	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1922	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	26.313.100,00	26.313.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.313.100,00	26.313.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Yang Menerima Jasa Pelayanan Umum Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	8 Pegawai 1 tahun											
1923	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1924	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760.000,00	53.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarpras Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %											
1925	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1926	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			0	0 0	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1927	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			0	1 0	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	106.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif undefined	100 % undefined undefined											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Lembaga											
1928	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	73 Lembaga Kemasyarakatan	12.823.950,00	12.823.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823.950,00	12.823.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1929	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1930	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	73 Pokmas / Ormas	507.275.775,00	510.206.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.275.775,00	510.206.375,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	undefined	undefined undefined											
1931	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	53.855.625,00	57.105.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.855.625,00	57.105.625,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran,Kebencanaan,Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instanksi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 tahun 1 Kegiatan											
1932	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1933	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi	1 Tahun											
1934	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	25.000.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Wringinanom													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,Cakupan Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	5 Paket											
1935	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1936	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.847.998,00	6.847.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847.998,00	6.847.998,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1937	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1938	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1939	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1940	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.724.000,00	5.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724.000,00	5.724.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Paket											
1941	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Yang Menerima Jasa Pelayanan Umum Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	8 Pegawai 100 % 1 Paket											
1942	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1943	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	106.800.000,00	105.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800.000,00	105.840.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarpras Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %											
1944	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1945	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1946	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	240.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	57.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas											
1947	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	12.353.625,00	9.322.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353.625,00	9.322.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1948	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	0,00	1.200.000,00	0,00	398.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1949	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	209.852.600,00	216.977.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.852.600,00	216.977.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan PKK	1 Tahun											
1950	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	35 Keluarga	83.232.000,00	81.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232.000,00	81.252.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran,Kebencanaan,Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kali 2 Kali											
1951	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.444.125,00	55.630.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.444.125,00	55.630.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1952	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi	1 Tahun											
1953	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	64.127.062,00	25.927.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.127.062,00	25.927.062,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Selomerto													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	75 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 Laporan											
1954	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1955	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 Laporan											
1956	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	3.720.374.462,00	3.204.777.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.374.462,00	3.204.777.665,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1957	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1958	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1959	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1960	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.080.240,00	8.080.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080.240,00	8.080.240,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1961	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1962	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.874.210,00	23.034.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.874.210,00	23.034.210,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1963	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1964	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1965	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	66.579.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.579.240,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1966	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1967	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1968	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	109.179.500,00	106.419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.179.500,00	106.419.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1969	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1970	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1971	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang melakukan verval data secara kontinyu	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional	6 Laporan 100 %											
1972	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1973	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan	100 %											
1974	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif	8 Laporan											
1975	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif	65 %											
1976	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	12 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades	12 Dokumen											
1977	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	139.000.000,00	130.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000.000,00	130.575.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1978	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	8.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	70 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1979	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1980	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1981	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	6 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Selomerto													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	90 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1982	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1983	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	6.000.000,00	8.232.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	8.232.230,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1984	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	2.000.000,00	3.181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.181.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1985	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun Paket	2.250.000,00	3.207.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	3.207.770,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1986	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Laporan	7.630.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630.000,00	21.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1987	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 materai Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1988	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun Laporan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1989	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun Laporan	181.303.136,00	159.013.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.303.136,00	159.013.136,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1990	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit Unit	1.800.000,00	3.578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	3.578.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1991	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit Unit	2.200.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	4.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi persentase kenaikan BUMDes rintisan menjadi BUMDes dengan status berkembang	10.19 % 35 % 70 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif jumlah pelaksanaan Musrenbang	16 Ormas/pokmas 100 % 2 angka											
1992	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	18.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.385.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1993	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahun Pokmas / Ormas	357.984.105,00	359.509.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.984.105,00	359.509.105,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-											
1994	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Tahun Keluarga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											
1995	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 kegiatan Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase ZIS Kecamatan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades persentase kenaikan ZIS	100 % 100 %											
1996	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Wonorejo													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	90 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1997	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1998	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.020.290,00	13.920.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.290,00	13.920.290,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1999	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2001	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2002	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.250.000,00	41.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250.000,00	41.790.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2003	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2004	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2005	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.530.304,00	131.090.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.530.304,00	131.090.304,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2006	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.586.176,00	3.586.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586.176,00	3.586.176,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2007	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6.758.000,00	6.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758.000,00	6.758.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi persentase kenaikan BUMDes rintisan menjadi BUMDes dengan status berkembang	100 % 10.19 % 35 % 70 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah pelaksanaan Musrenbang Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	2 angka 100 %											
2008	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2009	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	289.015.296,00	289.015.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.015.296,00	289.015.296,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasi Kegiatan PKK	100 %											
2010	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	800 Keluarga	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											
2011	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.033.000,00	10.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033.000,00	10.033.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2012	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	4.967.000,00	4.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967.000,00	4.967.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase ZIS Kecamatan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades	100 % 100 %											
2013	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	31 Orang	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Leksono													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
2014	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.285.000,00	7.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.000,00	7.285.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2015	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
2016	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.838.926.614,00	2.433.642.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.926.614,00	2.433.642.948,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
2017	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2018	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.119.600,00	24.119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.119.600,00	24.119.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2019	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2020	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.410.300,00	4.410.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.300,00	4.410.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2021	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2022	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2023	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	49.093.100,00	49.093.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.093.100,00	49.093.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2024	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	77.820.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.820.000,00	42.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2025	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	70.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	33.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2026	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2027	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.592.000,00	63.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.592.000,00	63.592.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2028	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	20.000.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2029	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-											
2030	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	66.360.000,00	66.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.360.000,00	66.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2031	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											
2032	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	44.790.000,00	44.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.790.000,00	44.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-											
2033	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-											
2034	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	12 Keluarga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-											
2035	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.130.000,00	36.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.130.000,00	36.130.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2036	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2037	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-											
2038	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Leksono													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2039	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2040	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.917.780,00	7.217.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.780,00	7.217.880,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2041	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.724.700,00	5.724.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724.700,00	5.724.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2042	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2043	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2044	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
2045	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Produktiûtas Kinerja k dukungan jasa penunjang	100 %											
2046	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070.000,00	12.070.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2047	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.310.000,00	43.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310.000,00	43.310.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
2048	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2049	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2050	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.002.520,00	11.002.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002.520,00	11.002.520,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
2051	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	12.445.390,00	12.445.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.445.390,00	12.445.390,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2052	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2053	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	380.993.985,00	378.693.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.993.985,00	378.693.885,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
2054	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55 Keluarga	52.103.625,00	52.103.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.103.625,00	52.103.625,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konûik ant kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
2055	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	56.900.000,00	56.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900.000,00	56.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2056	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cintatanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2057	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	18.727.000,00	18.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.727.000,00	18.727.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Watumalang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen											
2058	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	umlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	1 lap akhir											
2059	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.938.625.219,00	2.398.983.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.625.219,00	2.398.983.727,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan											
2060	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2061	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	32.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2062	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2063	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2064	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan											
2065	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2066	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	336.899.619,00	334.199.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.899.619,00	334.199.619,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2067	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	143.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	143.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan											
2068	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2069	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	27.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2070	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	89.000.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	83.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	100 %											
2071	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	60.000.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	57.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2072	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.000.000,00	7.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.890.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2073	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional	100 % 100 %											
2074	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.000.000,00	23.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.810.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2075	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Fasilitasi pembinaan dan monev BankeuDes	12 bulan											
2076	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan Administrasi Kependudukan dan Jemput Bola Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 dokumen 12 bulan											
2077	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	86.000.000,00	71.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	71.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Fasilitasi Bazar UMKM Tk. Kecamatan Fasilitasi Pertemuan Keluarga FSG Disabilitas Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, dan Sosial	1 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan											
2078	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	60.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	63.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi kegiatan TP. PKK Kecamatan	12 bulan											
2079	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Keluarga	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi pembinaan LINMAS dan RELAWAN Fasilitasi kerukunan umat beragama Fasilitasi patroli wilayah	2 kegiatan 12 bulan 12 bulan											
2080	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2081	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi), KerukunanAntar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya GunaMewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Fasilitasi kegiatan forkopimca	2 kegiatan 12 bulan											
2082	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	150.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	148.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2083	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi pembinaan BUMDes	1 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen											
2084	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2085	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2086	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Wonoroto													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kantor	4 Laporan											
2087	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2088	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2089	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2090	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.516.000,00	3.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.000,00	3.516.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan											
2091	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2092	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	76.040.000,00	73.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.040.000,00	73.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	15 Unit											
2093	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5.624.000,00	5.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624.000,00	5.624.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2094	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2095	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan											
2096	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	57.024.375,00	57.024.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.024.375,00	57.024.375,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas											
2097	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2098	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	346.281.525,00	348.761.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.281.525,00	348.761.525,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	989 Keluarga											
2099	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	989 Keluarga	61.012.500,00	61.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.012.500,00	61.012.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	99 Orang											
2100	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	99 Orang	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Mojotengah													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran-Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Lainnya	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	100 %											
2101	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %											
2102	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	4.228.538.110,00	3.670.758.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.538.110,00	3.670.758.473,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan kantor	100 %											
2103	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2104	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12.704.600,00	12.704.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.704.600,00	12.704.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2105	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2106	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	400 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2107	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	25.000.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	29.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja dan aparatur dan layanan pemerintahan	100 %											
2108	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.000.000,00	0,00	80.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2109	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 kegiatan Unit	0,00	3.300.000,00	0,00	96.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
2110	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2111	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	18.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2112	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2113	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.000.000,00	107.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	107.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa pemeliharaan sarpras kantor yang tersedia	100 %											
2114	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2115	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2116	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Desa Yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Pelaporan Tepat Waktu Meningkatnya Senergitas dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	100 % 100 %											
2117	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	42.996.270,00	42.996.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.996.270,00	42.996.270,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2118	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	100 %											
2119	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan Administrasi Kependudukan	100 angka											
2120	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	85.411.961,00	85.411.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.411.961,00	85.411.961,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
2121	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	45.217.096,00	45.217.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.217.096,00	45.217.096,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegitan PKK	100 %											
2122	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase antar Kelompok/Desa/Kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat Kecamatan	100 %											
2123	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2124	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang di laksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang di dukung pemahaman terhadap wawan Kebangsaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 % 100 %											
2125	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Orang	181.932.663,00	181.692.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.932.663,00	181.692.663,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersusunnya APBDes Meningkatnya Kapasitas perangkat Desa Terlaksananya Pilkades	100 % undefined undefined 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2126	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	23.143.660,00	23.143.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.143.660,00	23.143.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2127	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	21.739.696,00	21.739.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.739.696,00	21.739.696,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kalibeber													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 %											
2128	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2129	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2130	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2131	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.180.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2132	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2133	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktivitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang	100 %											
2134	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.500.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	12.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2135	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141.200.000,00	100.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200.000,00	100.960.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Sarana Prasarana Kantor yang Tersedia	100 %											
2136	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.500.000,00	2.398.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.398.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2137	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2138	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	7.660.000,00	42.461.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660.000,00	42.461.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2139	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2140	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	415.710.419,00	423.810.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.710.419,00	423.810.419,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 %											
2141	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	996 Keluarga	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik Antar Kelompok Desa/Kelurahan yang Terselesaikan	100 %											
2142	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	52.457.000,00	52.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.457.000,00	52.457.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2143	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kenaikan ZIS	100 %											
2144	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	165 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Mudal													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan											
2145	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2146	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2147	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2148	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2149	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2150	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225.000,00	6.225.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peneydiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan											
2151	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2152	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	101.720.000,00	98.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.720.000,00	98.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pememliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan											
2153	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	10.415.500,00	10.415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415.500,00	10.415.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2154	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.309.500,00	3.309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.500,00	3.309.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2155	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan											
2156	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2157	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2158	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	404.039.600,00	404.299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.039.600,00	404.299.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK	12 Bulan											
2159	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	104.884.363,00	104.884.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.884.363,00	104.884.363,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban UmumTingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya FKUB	2 Laporan											
2160	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Kegiatan HUT RI dan hari Jadi	2 Kegiatan											
2161	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Andongsili													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 %											
2162	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2163	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.283.087,00	8.283.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283.087,00	8.283.087,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2164	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.159.800,00	2.159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.800,00	2.159.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2165	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2166	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2167	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang	100 %											
2168	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2169	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2170	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.720.000,00	89.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.720.000,00	89.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Sarana Prasarana Kantor yang Tersedia	100 %											
2171	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.000.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2172	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2173	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan lembaga masyarakat aktif Jumlah pelaksanaan Musrenbang	100 % 228 Orang 1 angka											
2174	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	13.863.660,00	13.863.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863.660,00	13.863.660,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2175	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
2176	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	314.736.005,00	331.556.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.736.005,00	331.556.005,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 %											
2177	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1067 Keluarga	131.253.000,00	120.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.253.000,00	120.253.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok /desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											
2178	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pendampingan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 %											
2179	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	35.000.000,00	30.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	30.940.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Garung													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %											
2180	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2181	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %											
2182	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.093.057.252,00	3.004.950.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.057.252,00	3.004.950.670,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2183	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2184	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2185	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2186	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2187	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2188	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang	100 %											
2189	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	19.384.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384.101,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2190	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	12.500.000,00	26.867.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	26.867.776,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %											
2191	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2192	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2193	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	74.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											
2194	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2195	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2196	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 laporan											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 %											
2197	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	46.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	41.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2198	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21 Dokumen	36.436.000,00	32.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.436.000,00	32.436.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan administrasi kependudukan	100 %											
2199	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44 Laporan	69.536.000,00	69.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.536.000,00	69.536.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana	100 %											
2200	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	55.200.000,00	47.347.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	47.347.098,50	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 persen											
2201	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	160 Keluarga	90.000.000,00	70.632.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	70.632.224,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanaya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %											
2202	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	15.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2203	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2204	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	207.200.000,00	187.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.200.000,00	187.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya pemerintahan desa yang efektif dan profesional	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %											
2205	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22 Dokumen	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800.000,00	45.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2206	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	60 Dokumen	12.000.000,00	4.384.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.384.101,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Garung													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2207	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2208	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.020,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2209	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2210	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.199.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.199.980,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2211	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2212	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	15.000.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	20.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2213	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2214	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	7.800.000,00	6.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	6.924.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2215	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	103.729.600,00	99.005.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.729.600,00	99.005.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2216	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2217	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2218	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540.000,00	18.540.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentasi lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan lembaga masyarakat Aktif	100 %											
2219	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LEMBAGA Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2220	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 0	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - -
2221	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 POKMAS Pokmas / Ormas	397.395.573,00	397.395.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.395.573,00	397.395.573,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasiliasinya Kegiatan PKK	100 %											
2222	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 KELUARGA Keluarga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penyelesaian pelanggan Ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100 angka											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2223	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2224	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya kegiatan Hari jadi Kab Wonosobo dan HUT RI	100 %											
2225	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Kejajar													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Perencanaan Sesuai Standard Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	100 % 20 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %											
2226	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2227	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 tahun Dokumen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2228	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 tahun Dokumen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2229	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 tahun Dokumen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2230	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2231	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JUMLAH ASN YANG TERPENUHI GAJI DAN TUNJANGAN	35 ORANG											
2232	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun Orang/bulan	3.974.526.633,00	3.803.652.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974.526.633,00	3.803.652.358,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
2233	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2234	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2235	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2236	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket	7.696.400,00	7.696.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696.400,00	7.696.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2237	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 tahun Dokumen	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2238	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2239	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sofa Telephone Genggam Meja Pelayanan Komputer Printer Backdrop	3 set 1 unit 1 set 2 unit 1 unit 1 set											
2240	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Set Unit	0,00	0,00	54.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2241	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	31.300.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300.000,00	23.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERPENUHI KEBUTUHAN JASA KANTOR	1 TAHUN											
2242	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2243	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	19.656.000,00	19.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656.000,00	19.656.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2244	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan	131.473.600,00	125.153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.473.600,00	125.153.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2245	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun Unit	63.000.000,00	65.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	65.010.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2246	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2247	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun Unit	25.000.000,00	58.300.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	58.300.001,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nila IKM	90 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester Persentase Desa dan Kelurahan dengan Skala Prioritas usulan 3 Aspek (Ekonomi, Sosial dan Infrastruktur) secara Proporsional Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional	100 % 100 % 100 %											
2248	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 dokumen Laporan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Penduduk yang dilayani Jemput bola Rakor yang Dilaksanakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Terkait Layanan Publik Persentase Desa/Kelurahan yang Memenuhi Target Pembayaran PBB	500 orang 50 % 100 % 2 kali											
2249	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Dokumen Laporan	48.721.000,00	50.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.721.000,00	50.871.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %											
2250	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk pengelolaan sampah Persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMDes meningkat	11 % 100 % 100 %											
2251	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 tahun Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2252	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Dokumen Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-											
2253	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 tahun Keluarga	71.609.902,00	71.609.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.609.902,00	71.609.902,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Terjalinya Kerukunan antara Umat,suku,Golongan dan Masyarakat	100 %											
2254	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 tahun Laporan	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2255	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 tahun Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades	undefined undefined											
2256	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 dokumen Orang	125.000.000,00	116.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	116.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2257	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 tahun Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pesentase desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Presentase kenaikan indeks ketahanan ekonomi IDM	100 % 13.22 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita	5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %											
2258	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 tahun Dokumen	16.071.410,00	16.221.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071.410,00	16.221.410,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2259	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 tahun Dokumen	40.000.000,00	41.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	41.710.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2260	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 tahun Dokumen	15.000.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2261	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 tahun Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan kejajar													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	20 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
2262	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2263	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2264	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2265	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2266	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2267	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2268	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2269	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.240.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240.000,00	21.840.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2270	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2271	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2272	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2273	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	291.440.269,00	274.132.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.440.269,00	274.132.269,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-											
2274	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1086 Keluarga	193.476.157,00	243.476.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.476.157,00	243.476.157,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											
2275	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	9.050.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	7.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2276	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades	100 % 100 %											
2277	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Kalikajar													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan , Dokumen Evaluasi, Dan Laporan KeuanganTepat Waktu	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9.864 %											
2278	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9,864 %											
2279	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.684.414.132,00	2.454.772.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.414.132,00	2.454.772.194,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9.864 %											
2280	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2281	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2282	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2283	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2284	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2285	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan Laporan	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2286	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	17.060.000,00	15.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060.000,00	15.460.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9,864 %											
2287	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit Unit	250.000,00	0,00	43.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9,864 %											
2288	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2289	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	22.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2290	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	90.000.000,00	86.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	86.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9,864 %											
2291	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan Unit	42.700.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700.000,00	42.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2292	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 bulan Unit	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2293	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan Unit	6.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2294	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan Unit	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	93 %											
2295	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	55.379.000,00	54.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.379.000,00	54.482.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2296	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	17.690.000,00	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690.000,00	15.240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	93 &											
2297	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	14.000.000,00	11.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	11.197.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	100 %											
2298	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	69.730.000,00	64.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.730.000,00	64.530.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpenuhinya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat	100 %											
2299	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	121.511.000,00	117.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.511.000,00	117.486.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan PKK di Tingkat Desa dan Kecamatan	100 %											
2300	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200 Keluarga Keluarga	80.000.000,00	79.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	79.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase konflik antar kelompok/desa/keluraha n yang terselesaikan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan											
2301	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	42.457.000,00	39.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.457.000,00	39.932.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2302	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	14.215.000,00	14.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215.000,00	14.215.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelanggaran tramtibum yang terlaporkan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan	100 %											
2303	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 Orang	93.920.000,00	92.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.920.000,00	92.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2304	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	100 %											
2305	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 Dokumen	73.159.000,00	71.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.159.000,00	71.359.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2306	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Dokumen	45.833.000,00	42.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833.000,00	42.033.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Kalikajar													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Prosentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket 1 Dokumen 2 Laporan 3 Paket 100 % 1 Paket											
2307	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2308	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2309	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2310	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2311	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2312	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.000,00	5.910.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Sarana Prasarana Kerja	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2313	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Prosentase Pemenuhan Sarana prasarana pendukung Kinerja	100 % 2 orang 100 %											
2314	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2315	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2316	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	61.173.600,00	67.023.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.173.600,00	67.023.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Prosentase Asset Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	3 Laporan 100 %											
2317	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2318	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	736.400,00	736.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.400,00	736.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2319	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 % 6 pokmas											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terpenuhinya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	6 pokmas 2 orang 100 %											
2320	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2321	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	0,00	0,00	350.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	550.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2322	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	417.665.000,00	411.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.665.000,00	411.815.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-											
2323	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	13 Keluarga	17.407.300,00	17.407.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.407.300,00	17.407.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-											
2324	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	38.356.532,00	38.356.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.356.532,00	38.356.532,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2325	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-											
2326	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10.050.300,00	10.050.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050.300,00	10.050.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kecamatan Sapuran													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	undefined undefined											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan bulan											
2327	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.000.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2328	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan ASN	12 bulan											
2329	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	3.159.139.283,00	2.933.532.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.139.283,00	2.933.532.844,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cetak amplop dinas cetak banner cetak stop map kop dinas foto copy Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan isi ulang tabung gas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Komputer Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan											
2330	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.760.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	3.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2331	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.963.200,00	10.543.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.963.200,00	10.543.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2332	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.248.300,00	4.248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.300,00	4.248.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2333	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.000,00	3.655.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2334	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2335	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	17.054.000,00	17.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054.000,00	17.054.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pengadaan peralatan zoom/vidcom (kamera vidcom, microphone vidcom, Printer, Laptop)	1 paket											
2336	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	94.000.000,00	81.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000.000,00	81.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2337	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	22.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	24.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Materai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Langganan Internet Langganan PDAM	125 lembar 12 bulan											
2338	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan Laporan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2339	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan Laporan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2340	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	93.980.000,00	93.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.980.000,00	93.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 pemeliharaan kendara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pemeliharaan komputer pemeliharaan laptop pemeliharaan printer	4 unit 12 unit 22 unit											
2341	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	45.000.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	52.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2342	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2343	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82,50 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan Fasilitasi Penanganan Stunting Fasilitasi TKPK Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektiûtas Kegiatan P di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan	1 kali 1 kali 12 bulan 1 dokumen 4 laporan											
2344	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Bulan Laporan	10.000.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2345	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi Penanganan Disabilitas Fasilitasi Penanganan Kenakalan Remaja Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak Fasilitasi Desa Siaga Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan rakor desa cantik lomba desa pembinaan UMKM pembinaan ODF Pembinaan UKS Pembinaan Perpustakaan fasilitasi forum kesehatan desa pembinaan karang taruna Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan Layanan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 % 12 laporan 12 bulan 100 %											
2346	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Bulan Laporan	60.060.000,00	60.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.060.000,00	60.060.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Fasilitasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Fasilitasi Penanganan Disabilitas Fasilitasi Penanganan Kenakalan Remaja Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak Fasilitasi Desa Siaga Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan rakor desa cantik lomba desa pembinaan UMKM pembinaan ODF Pembinaan UKS Pembinaan Perpustakaan fasilitasi forum kesehatan desa pembinaan karang taruna	1 tahun										
2347	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 tahun Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Fasilitasi PKK Kecamatan	undefined keluarga 12 bulan											
2348	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	12 Bulan Keluarga	105.382.250,00	86.982.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.382.250,00	86.982.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi FKUB Fasilitasi FKDM Kecamatan (kegiatan Forkompincam) Pembinaan Linmas/SAR/Relawan Penanggulangan Bencana Kecamatan	1 laporan 12 bulan 1 kali											
2349	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2350	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Lomba Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional fasilitasi Festival anak soleh indonesia fasilitasi Lomba masjid	1 tahun											
2351	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 tahun Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2352	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Bulan Dokumen	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	16.420.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	16 desa											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bimtek Penyusunan APBDes, Monitoring Evaluasi APBDes, Sosialisasi APBDes, Verifikasi APBDes monitoring musrenbangdes fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa fasilitasi penyusunan APBDes, pembinaan penatausahaan keuangan dan tatakelola aset desa Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan, tata ruang desa, kerjasama desa Rakor Pemerintahan desa penyusunan Produk hukum desa Pembinaan pemerintahan desa (Kades dan BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, Posyandu) fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	16 Desa 16 desa 16 desa 16 desa 16 Desa											
2353	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Bulan Dokumen	93.228.132,00	42.478.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.228.132,00	42.478.132,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2354	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan Dokumen	38.596.750,00	38.596.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596.750,00	38.596.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2355	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 tahun Dokumen	4.967.000,00	4.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967.000,00	4.967.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2356	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Sapuran													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
2357	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.048.685,00	1.048.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.685,00	1.048.685,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2358	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.940.340,00	6.940.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.340,00	6.940.340,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2359	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.986.900,00	1.986.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.900,00	1.986.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2360	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.143.903,00	2.143.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.903,00	2.143.903,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2361	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2362	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	110 Unit	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2363	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2364	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2365	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	27.360.000,00	27.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360.000,00	27.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2366	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00	3.205.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2367	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2368	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %											
2369	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.585.860,00	8.585.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585.860,00	8.585.860,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2370	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2371	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	484.639.212,00	484.639.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.639.212,00	484.639.212,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase penurunan kasus pernikahan usia anak	20 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2372	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2493 Keluarga	74.091.060,00	74.091.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.091.060,00	74.091.060,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	100 %											
2373	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	12.816.000,00	12.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816.000,00	12.816.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2374	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	7.253.040,00	7.253.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253.040,00	7.253.040,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
2375	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	158 Orang	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Kepil													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persantase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen											
2376	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2377	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan ASN	12 bulan 19 orang 12 bulan											
2378	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	3.025.424.376,00	2.639.660.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.424.376,00	2.639.660.203,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen listrik Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Komputer Cetak amplop dinas Cetak banner Cetak stop map kop dinas Foto copy Isi ulang tabung gas Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Perjalanan dinas Rapat	1 paket 12 bulan 4 pak 16 meter 38 buah 850 lembar 33 kali 12 laporan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 6 orang 638 orang											
2379	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2380	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2381	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2382	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190.000,00	14.190.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya (sarpras, mebeul, dll)	2 unit											
2383	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	63.171.513,00	43.171.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.171.513,00	43.171.513,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2384	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan											
2385	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2386	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	61.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan printer Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Pemeliharaan komputer Pemeliharaan laptop	9 unit 11 unit 2 unit 4 unit 8 unit 8 unit 2 unit 3 unit 9 unit											
2387	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit Unit	48.971.598,00	46.971.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.971.598,00	46.971.598,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2388	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2389	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan Fasilitasi Penanganan Stunting Fasilitasi TKPK Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan P di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %											
2390	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2391	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan 12 bulan											
2392	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Fasilitasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Fasilitasi Penanganan Disabilitas Fasilitasi Penanganan Kenakalan Remaja Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak Fasilitasi Desa Siaga Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan rakor desa cantik lomba desa pembinaan UMKM pembinaan ODF Pembinaan UKS Pembinaan Perpustakaan fasilitasi forum kesehatan desa pembinaan karang taruna	100 %											
2393	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40.000.000,00	33.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	33.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi PKK Kecamatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2394	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	420 Keluarga	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi FKDM Kecamatan (kegiatan Forkompincam) Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Linmas/SAR/Relawan Penanggulangan Bencana Kecamatan	12 Laporan											
2395	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00	40.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.275.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional fasilitasi Festival anak soleh indonesia	300 Orang											
2396	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2397	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	134 Orang	20.000.000,00	11.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.025.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2398	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar	undefined undefined											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bintek penyusunan APBDesa Monev APBDesa Verifikasi APBDesa	20 Desa 100 % 20 Desa 100 % 20 Desa 100 %											
2399	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2400	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Kepil													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrassi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Kantor	100 %											
2401	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2402	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2403	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2404	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2405	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2406	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	742.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja	100 %											
2407	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2408	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920.000,00	10.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2409	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.600.000,00	134.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.600.000,00	134.010.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarpras Kantor Yang Tersedia	100 %											
2410	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2411	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2412	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.000,00	2.318.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100 %											
2413	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.764.000,00	10.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764.000,00	10.764.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2414	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	475.575.030,00	477.570.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.575.030,00	477.570.030,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 %											
2415	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2000 Keluarga	42.948.000,00	44.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.948.000,00	44.543.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikanya Konflik Antar Kelompok Desa/Kelurahan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
2416	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	20.016.000,00	20.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016.000,00	20.016.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2417	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	26.375.000,00	26.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.375.000,00	26.375.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan kaliwiro													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan tepat waktu	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaporan evaluasi kinerja tepat waktu Laporan perencanaan tepat waktu Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	3 Dokumen 3 Dokumen 15 %											
2418	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2419	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan gaji dan tunjanagn ASN	24 Orang/bulan											
2420	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.847.039.417,00	2.701.813.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.039.417,00	2.701.813.121,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 % 100 %											
2421	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2422	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2423	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.600.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	9.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2424	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2425	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2426	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.273.785,00	21.273.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.273.785,00	21.273.785,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Mebel	100 %											
2427	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	60.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	52.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2428	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja pelayanan administrasi Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum Cakupan pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100 % 100 % 100 %											
2429	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2430	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.300.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2431	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	131.590.376,00	129.140.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.590.376,00	129.140.376,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Unit											
2432	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2433	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2434	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kenaikan desa yang melakukan verval data secara kontinyu	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester	100 %											
2435	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2436	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan	100 %											
2437	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk penanggulangan bencana	100 % 100 %											
2438	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R	9,43 %											
2439	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	400 Keluarga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelangggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan Persentase penyelesaian pelangggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan	100 % 100 %											
2440	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2441	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %											
2442	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Orang	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2443	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita	5 % 100 % 100 % 100 %											
2444	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2445	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	26.103.455,00	26.103.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.103.455,00	26.103.455,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2446	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2447	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Kaliwiro													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Realisasi Belanja Adminitrasi Umum Pesentase realisasi Belanja Pelayanna Administrasi	100 % 100 % 100 % 100 %											
2448	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2449	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	14.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2450	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2451	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2452	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360.000,00	15.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima jasa pelayanan umum Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Persentase realisasi belanja pelayanna Administrasi	100 % 100 % 100 %											
2453	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.000,00	9.720.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2454	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	112.730.000,00	111.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.730.000,00	111.270.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan kondisi baik	10 Unit											
2455	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2456	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2457	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2458	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.927.390,00	10.927.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927.390,00	10.927.390,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2459	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2460	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	316.001.159,00	316.551.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.001.159,00	316.551.159,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2461	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	250 Keluarga	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400.000,00	60.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentasepenyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli wilayah penegakan perda	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2462	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.880.000,00	19.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.000,00	19.190.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2463	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	15.097.000,00	15.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097.000,00	15.097.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penurunan angka pelanggaran	100 %											
2464	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3600 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Wadaslintang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelesaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Dokumen Evaluasi Kinerja	100 % 100 %											
2465	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2466	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %											
2467	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	3.039.399.649,00	2.694.405.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.399.649,00	2.694.405.801,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2468	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2469	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2470	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	3.000.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.095.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2471	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2472	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30.000.000,00	30.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.605.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatksn Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintah	100 %											
2473	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2474	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	60.000.000,00	57.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	57.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang	100 %											
2475	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	21.779.999,00	21.779.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.779.999,00	21.779.999,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2476	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	102.720.000,00	81.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.720.000,00	81.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Tersedia	100 %											
2477	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00	44.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2478	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2479	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.000.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	22.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Tepat waktu	100 %											
2480	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2481	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan Administrasi Kependudukan	100 %											
2482	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 Laporan	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana	100 %											
2483	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	70.000.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	58.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2484	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200 Keluarga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran, Kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik antar Kelompok / Desa / Kelurahan Terselesaikan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
2485	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	75.000.000,00	66.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	66.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang Didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan	100 %											
2486	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	150.000.000,00	126.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	126.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kuwalitas Administrasi Tata Pemerintah Desa	100 %											
2487	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2488	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2489	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2490	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	16 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Wadaslintang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2491	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2492	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2493	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2494	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2495	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	5.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.605.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur dan layanan pemerintahan	100 %											
2496	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2497	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	4.500.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	16.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa kantor yang tersedia	100 %											
2498	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2499	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487.000,00	9.487.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2500	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	98.540.000,00	98.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.540.000,00	98.740.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa pemeliharaan sarpras kantor yang tersedia	100 %											
2501	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.000,00	3.144.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2502	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2503	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2504	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %											
2505	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2506	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
2507	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	440.389.000,00	440.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.389.000,00	440.943.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	210 Keluarga											
2508	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	210 Keluarga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Lembaga Masyarakat yang Terfasilitasi	100 %											
2509	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	19.840.000,00	18.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840.000,00	18.481.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	150 orang											
2510	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Sukoharjo													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	100 % 15 &											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan & evaluasi Perangkat Daerah	3 dokumen											
2511	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2512	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %											
2513	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.092.693.385,00	1.951.736.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.693.385,00	1.951.736.640,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	12 Bulan											
2514	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2515	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2516	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2517	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2518	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2519	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	25.000.000,00	27.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	27.365.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
2520	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2521	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produkt Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
2522	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2523	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	17.000.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	14.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2524	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	73.000.000,00	70.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	70.635.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
2525	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2526	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	3.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2527	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82,5 angka											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 %											
2528	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2529	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan Administrasi Kependudukan	12 bulan											
2530	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
2531	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	12 bulan											
2532	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200 Keluarga	100.342.649,00	100.342.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.342.649,00	100.342.649,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konûikant kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan	100 %											
2533	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2534	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2535	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	350 Orang	130.000.000,00	106.314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	106.314.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2536	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu	17 Desas											
2537	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2538	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2539	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Kalibawang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen											
2540	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.967.000,00	2.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.000,00	2.967.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2541	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.967.000,00	2.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.000,00	2.967.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang											
2542	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	1.678.725.457,00	1.652.011.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.725.457,00	1.652.011.045,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2543	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	993.500,00	993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.500,00	993.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2544	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.563.227,00	10.563.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563.227,00	10.563.227,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2545	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.997.600,00	1.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.600,00	1.997.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2546	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.999.690,00	4.999.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.690,00	4.999.690,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2547	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
2548	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2549	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2550	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2551	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	15.240.000,00	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00	15.240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2552	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	69.520.000,00	67.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.520.000,00	67.520.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset kondisi baik	100 %											
2553	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	39.483.259,00	39.483.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.483.259,00	39.483.259,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2554	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2555	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6.796.160,00	6.796.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796.160,00	6.796.160,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Desa Yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tepat Waktu	100 %											
2556	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	23.518.000,00	21.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.518.000,00	21.568.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2557	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Layanan Administrasi Kependudukan	12 laporan											
2558	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	60.008.000,00	56.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.008.000,00	56.958.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan											
2559	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	16.416.000,00	16.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416.000,00	16.416.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi PKK Kecamatan Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	100 %											
2560	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	121.690.000,00	109.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.690.000,00	109.390.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman, dan Ketertiban umum tingkat kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan dan Ketertiban Umumtingkat Kecamatan	100 %											
2561	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	56.951.000,00	57.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.951.000,00	57.926.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %											
2562	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	130.558.678,00	125.279.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.558.678,00	125.279.588,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2563	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	20.242.000,00	17.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242.000,00	17.492.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2564	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	18.330.000,00	18.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.330.000,00	18.330.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas perangkat desa	100 %											
2565	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	94.468.000,00	87.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.468.000,00	87.268.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pelaporan yang disusum tepat waktu	100 %											
2566	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.000.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.218.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2567	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat waktu	100 %											
2568	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.538.625.993,00	2.353.023.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.625.993,00	2.353.023.596,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2569	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.820.000,00	53.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820.000,00	53.508.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2570	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	14.500.000,00	15.159.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	15.159.728,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2571	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	6.500.000,00	3.900.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.900.060,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2572	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4.000.000,00	3.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.218.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2573	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	125.000.000,00	83.860.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	83.860.275,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
2574	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	900.000,00	900.000,00	49.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2575	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2576	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	2.500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2577	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2578	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.000.000,00	83.386.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	83.386.112,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %											
2579	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2580	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.500.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	7.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2581	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	20.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	20.692.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-											
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Tersusun	10 Dokumen											
2582	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800 Orang	780.000.000,00	1.165.663.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00	1.165.663.484,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-											
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik yang Tersusun	4 Dokumen											
2583	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600 Orang	1.674.400.000,00	1.823.034.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.400.000,00	1.823.034.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-											
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun N yang tersusun	3 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2584	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	800 Orang	1.750.000.000,00	1.604.555.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000.000,00	1.604.555.725,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-											
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya yang Tersusun	5 Dokumen											
2585	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	425.000.000,00	89.684.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000.000,00	89.684.253,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-											
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang tersusun	8 Dokumen											
2586	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 Orang	125.000.000,00	50.188.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	50.188.217,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2587	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	150.000.000,00	93.160.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	93.160.616,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2588	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	150.000.000,00	169.919.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	169.919.315,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1				PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	499.687.041.349,00	504.519.531.472,00	390.600.000,00	322.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.077.641.349,00	504.842.360.472,00
1	01	1	02	Kesehatan	256.843.508.406,00	269.178.099.028,00	12.884.588.340,00	13.078.287.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.728.096.746,00	282.256.386.336,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.375.080.693,00	12.326.528.024,00	4.580.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955.080.693,00	12.326.528.024,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.877.394.120,00	6.881.749.664,00	125.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.394.120,00	6.981.749.664,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12.247.528.983,00	11.166.799.897,00	71.275.000,00	17.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318.803.983,00	11.184.074.897,00
1	01	1	06	Sosial	4.804.679.204,00	4.932.886.148,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.679.204,00	5.032.886.148,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	5.813.667.040,00	5.461.595.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813.667.040,00	5.461.595.944,00
1	01	2	09	Pangan	23.765.715.034,00	23.251.756.091,00	601.196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366.911.534,00	23.251.756.091,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	9.185.416.221,00	8.498.658.769,00	19.030.590,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204.446.811,00	8.514.158.769,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.865.794.955,00	6.845.523.192,00	264.900.000,00	236.234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130.694.955,00	7.081.757.692,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.916.910.000,00	5.799.984.962,00	2.400.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919.310.000,00	5.801.784.962,00
1	01	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.768.124.102,00	5.289.893.625,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803.124.102,00	5.289.893.625,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	6.202.239.750,00	5.764.908.325,00	101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303.239.750,00	5.764.908.325,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	4.794.102.386,00	4.214.216.147,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794.102.386,00	4.364.216.147,00
1	01	2	20	Statistik	53.000.000,00	22.260.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400.000,00	22.260.000,00
1	01	2	24	Kearsipan	5.933.330.947,00	5.571.878.926,00	191.066.680,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124.397.627,00	5.590.878.926,00
1	01	3	26	Pariwisata	6.322.221.716,00	5.569.218.559,00	95.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417.221.716,00	5.679.218.559,00
1	01	3	30	Perdagangan	10.999.314.870,00	10.695.464.185,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044.314.870,00	10.695.464.185,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	44.255.261.050,00	42.025.426.836,00	1.114.923.000,00	937.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.370.184.050,00	42.962.612.836,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	47.220.392.112,00	46.091.849.325,00	907.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.127.592.112,00	46.091.849.325,00
1	01	5	01	Perencanaan	9.320.457.707,00	8.118.595.300,00	545.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866.207.707,00	8.164.345.300,00
1	01	5	02	Keuangan	71.430.710.066,00	58.437.385.722,50	4.545.300.000,00	4.246.546.000,00	5.500.000.000,00	3.450.000.000,00	374.630.036.600,00	373.710.436.600,00	456.106.046.666,00	439.844.368.322,50
1	01	5	03	Kepegawaian	7.262.435.266,00	7.084.127.094,00	85.010.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347.445.266,00	7.152.627.094,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	475.000.000,00	269.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000.000,00	269.310.000,00
1	01	6	01	Inspektorat	11.395.957.234,00	10.540.842.178,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525.957.234,00	10.540.842.178,00
1	01	7	01	Kecamatan	87.361.385.232,00	80.988.730.193,50	4.264.421.066,00	5.166.773.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.625.806.298,00	86.155.504.102,50
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.997.745.993,00	7.795.221.831,00	74.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071.845.993,00	7.795.221.831,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN										

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4.140.849.580,00	3.012.325.751,00	2.338.150.000,00	2.327.812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478.999.580,00	5.340.138.251,00
2	03	1	06	Sosial	195.000.000,00	96.229.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	96.229.684,00
3				EKONOMI										
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.668.023.380,00	11.243.262.899,00	70.550.973.000,00	79.910.455.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.218.996.380,00	91.153.718.159,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	4.345.000.000,00	7.185.543.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.000.000,00	7.185.543.621,00
3	04	2	09	Pangan	380.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	255.000.000,00
3	04	2	15	Perhubungan	3.173.219.028,00	2.718.386.284,00	7.151.500.000,00	5.928.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324.719.028,00	8.646.386.284,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	4.928.264.329,00	5.405.552.706,00	93.974.262,00	71.274.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.238.591,00	5.476.826.968,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.335.931.680,00	1.552.089.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.931.680,00	1.552.089.042,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	379.372.880,00	189.524.340,00	23.627.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000.000,00	189.524.340,00
3	04	2	21	Persandian	59.000.000,00	24.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	24.880.000,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	1.205.000.000,00	910.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000.000,00	910.000.000,00
3	04	3	27	Pertanian	9.283.543.600,00	10.349.007.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283.543.600,00	10.349.007.681,00
3	04	3	30	Perdagangan	2.715.578.365,00	2.861.840.059,00	9.750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.328.365,00	2.864.840.059,00
3	04	3	31	Perindustrian	527.000.000,00	424.065.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000.000,00	424.065.362,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP										

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.977.536.960,00	3.616.780.000,00	453.463.040,00	294.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.000.000,00	3.911.280.000,00
4	05	2	10	Pertanahan	208.206.492,00	186.054.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.206.492,00	186.054.387,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	8.990.322.589,00	8.441.667.183,00	3.845.016.725,00	3.899.275.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.835.339.314,00	12.340.942.559,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM										
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.836.723.569,00	2.299.124.425,00	12.320.000.000,00	15.378.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156.723.569,00	17.677.948.425,00
6				KESEHATAN										
6	07	1	02	Kesehatan	84.629.488.654,00	82.315.151.700,00	44.822.898.000,00	23.082.318.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.452.386.654,00	105.397.469.804,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.185.220.000,00	10.593.262.356,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218.820.000,00	10.593.262.356,00
7				PARIWISATA										
7	08	3	26	Pariwisata	3.686.623.610,00	3.029.153.849,00	67.701.982,00	47.215.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754.325.592,00	3.076.368.999,00
8				PENDIDIKAN										
8	10	1	01	Pendidikan	131.576.527.857,00	114.706.064.363,00	27.303.310.143,00	35.061.577.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.879.838.000,00	149.767.642.042,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	4.836.600.000,00	7.654.150.000,00	3.303.400.000,00	2.285.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.000.000,00	9.940.000.000,00
8	10	2	22	Kebudayaan	2.525.000.000,00	4.344.852.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.000.000,00	4.344.852.553,00
8	10	2	23	Perpustakaan	1.162.389.218,00	972.211.778,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.389.218,00	972.211.778,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
9	11	1	06	Sosial	9.279.027.900,00	9.297.390.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.027.900,00	9.297.390.468,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.561.920.000,00	908.570.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.920.000,00	908.570.903,00
9	11	3	32	Transmigrasi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
				TOTAL	**1.483.115.784.127,00**	**1.453.034.582.832,00**	**203.648.525.448,00**	**192.905.784.048,00**	**5.500.000.000,00**	**3.450.000.000,00**	**374.630.036.600,00**	**373.710.436.600,00**	**2.066.894.346.175,00**	**2.023.100.803.480,00**

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80.000.000,00	53.240.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.000.000,00	550.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	33.400.000,00	33.400.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.524.800.000,00	2.360.800.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000,00	20.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.925.000.000,00	3.328.442.857,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	25.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	285.550.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00	0,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200.000.000,00	51.760.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	130.000.000,00	190.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.000.000,00	810.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.123.783.000,00	643.783.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.096.300.000,00	2.344.240.728,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.200.000.000,00	3.500.000.000,00
		Total	19.523.283.000,00	14.196.216.585,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Literasi dan Numerasi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145.000.000,00	72.800.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	70.000.000,00	35.150.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100.000.000,00	50.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	550.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150.000.000,00	355.400.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.911.500.000,00	2.391.800.000,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	200.000.000,00	150.000.000,00
		Total	3.576.500.000,00	3.605.150.000,00
3.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	200.000.000,00	175.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	260.000.000,00	185.000.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	75.000.000,00	255.000.000,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	150.000.000,00	100.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	700.000.000,00	500.000.000,00
		Total	1.385.000.000,00	1.215.000.000,00
4.	Kekhususan PAUD	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	130.000.000,00	70.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	174.000.000,00	94.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	788.250.000,00	678.250.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000,00	50.000.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	215.000.000,00	135.000.000,00
		Total	1.407.250.000,00	1.027.250.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	25.892.033.000,00	20.043.616.585,00
B SPM Bidang Kesehatan				
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.232.788.640,00	2.167.777.840,00
		Total	2.232.788.640,00	2.167.777.840,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	261.600.000,00	261.600.000,00
		Total	261.600.000,00	261.600.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	259.000.000,00	184.182.000,00
		Total	259.000.000,00	184.182.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	60.000.000,00	14.783.100,00
		Total	60.000.000,00	14.783.100,00
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	542.695.000,00	449.821.950,00
		Total	542.695.000,00	449.821.950,00
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	259.275.000,00	106.070.000,00
		Total	259.275.000,00	106.070.000,00
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	135.400.000,00	13.027.580,00
		Total	135.400.000,00	13.027.580,00
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	75.000.000,00	21.700.000,00
		Total	75.000.000,00	21.700.000,00
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000,00	40.302.520,00
		Total	50.000.000,00	40.302.520,00
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	256.480.000,00	198.211.750,00
		Total	256.480.000,00	198.211.750,00
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	322.230.000,00	249.476.820,00
		Total	322.230.000,00	249.476.820,00
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	191.150.000,00	122.700.000,00
		Total	191.150.000,00	122.700.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	4.645.618.640,00	3.829.653.560,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00	110.000.000,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000,00	990.000.000,00
		Total	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	250.000.000,00	225.000.000,00
		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	500.000.000,00	528.000.000,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,00	0,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	75.000.000,00	70.000.000,00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.000.000.000,00	1.992.000.000,00
		Total	1.825.000.000,00	2.815.000.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.925.000.000,00	3.915.000.000,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	320.000.000,00	317.176.640,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	225.000.000,00	221.780.160,00
		Total	545.000.000,00	538.956.800,00
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	104.874.580,00
		Total	100.000.000,00	104.874.580,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	645.000.000,00	643.831.380,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1.	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	575.000.000,00	516.546.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	40.000.000,00	0,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000,00	0,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
		Total	700.000.000,00	526.546.000,00
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	30.000.000,00	26.130.000,00
		Total	30.000.000,00	26.130.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	85.000.000,00	53.819.892,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	46.993.932,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	160.000.000,00	138.605.536,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	30.000.000,00	30.000.000,00
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00
		Total	575.000.000,00	269.419.360,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000,00	84.720.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000,00	465.860.000,00
		Total	810.000.000,00	750.580.000,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	25.000.000,00	17.977.600,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25.000.000,00	11.055.000,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	35.240.000,00
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	50.000.000,00	33.103.000,00
		Total	180.000.000,00	97.375.600,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			2.295.000.000,00	1.670.050.960,00
F SPM Bidang Sosial				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000,00	10.414.570,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000,00	21.710.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00	71.782.900,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	650.000.000,00	563.557.256,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	65.000.000,00	61.713.740,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000,00	36.400.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	75.000.000,00	75.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.000.000,00	18.500.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000,00	21.998.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	130.000.000,00	93.923.000,00
		Penyediaan Permakanan	70.000.000,00	70.000.000,00
		Penyediaan Sandang	15.000.000,00	21.010.000,00
		Total	1.270.000.000,00	1.066.009.466,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	25.000.000,00	3.499.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	40.000.000,00	6.000.000,00
		Penyediaan Makanan	70.000.000,00	55.880.684,00
		Penyediaan Sandang	40.000.000,00	24.400.000,00
		Total	175.000.000,00	89.779.684,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	1.445.000.000,00	1.155.789.150,00

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.345.923.268,00	707.504.000,00	545.401.482,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.004.679.204,00	5.032.886.148,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	132.068.492,00	50.000.000,00	50.718.950,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	307.756.845,00	130.149.360,00	78.399.360,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	24.366.911.534,00	23.251.756.091,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.331.525.429,00	18.305.456.903,00	19.112.015.308,50
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	574.479.444,00	140.000.000,00	73.336.940,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	77.965.067,00	195.000.000,00	96.229.684,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	785.327.446,00	1.941.734.652,00	1.903.187.127,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	81.247.806,00	20.000.000,00	9.155.396,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	201.770.964,00	75.000.000,00	45.000.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	418.549.308,00	140.000.000,00	105.590.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	738.616.428,00	245.000.000,00	286.361.670,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100.885.482,00	240.000.000,00	180.137.516,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.611.013.648,00	340.000.000,00	602.519.297,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.803.124.102,00	5.289.893.625,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	500.077.641.349,00	504.842.360.472,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	328.273.968,00	1.065.000.000,00	835.317.350,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.360.878.035,00	5.123.200.000,00	5.049.723.600,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.004.056.460,00	555.000.000,00	315.000.000,00
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	24.620.548,00	0,00	0,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	6.303.239.750,00	5.764.908.325,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21.551.185.988,00	7.140.000.000,00	9.280.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	9.204.446.811,00	8.514.158.769,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	18.670.581.920,00	1.439.420.000,00	1.882.864.481,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.102.188.996,00	1.495.000.000,00	1.086.030.526,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.972.115.010,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	184.654.107,00	100.000.000,00	65.379.400,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	80.873.760.000,00	1.825.000.000,00	2.815.000.000,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.800.520.000,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20.517.123,00	43.692.000,00	14.895.260,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	42.416.352.112,00	41.860.394.325,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.787.200.000,00	6.090.000.000,00	5.324.348.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	27.996.033.810,00	193.725.000,00	75.408.040,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	967.587.520,00	3.555.000.000,00	6.730.543.621,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	269.728.096.746,00	282.256.386.336,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.834.053.172,00	0,00	1.414.173.023,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	99.663.978,00	25.530.000,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.247.441.076,00	1.125.000.000,00	880.000.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	82.068.492,00	110.000.000,00	58.313.135,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.732.529.908,00	9.934.466.900,00	10.066.294.109,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	143.619.861,00	425.000.000,00	89.684.253,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.531.792.332,00	1.213.994.300,00	1.063.994.300,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	41.034.246,00	86.400.000,00	22.260.000,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	4.794.102.386,00	4.364.216.147,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.477.232.856,00	960.000.000,00	761.832.513,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	742.000.000,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	127.206.163,00	220.000.000,00	103.150.000,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	151.328.223,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	369.308.214,00	780.000.000,00	1.165.663.484,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.086.915.107,00	1.674.400.000,00	1.823.034.450,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	41.034.246,00	80.000.000,00	30.000.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	3.017.445.993,00	2.799.015.771,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.908.025.266,00	5.269.762.613,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.741.616.153,00	100.000.000,00	70.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	741.620.134,00	81.920.000,00	52.000.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	475.000.000,00	269.310.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	36.930.821,00	50.000.000,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.401.757.290,00	4.692.768.038,00	4.629.463.270,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.885.482,00	10.000.000,00	4.075.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.350.000.000,00	772.458.380,00	653.252.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	6.417.221.716,00	5.679.218.559,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.576.540.304,00	850.000.000,00	508.102.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.832.430.708,00	2.856.087.703,00	2.706.593.113,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	38.690.204.847,00	36.727.805.020,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	41.034.246,00	145.500.000,00	38.228.040,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.606.513.599,00	1.083.097.265,00	645.739.254,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	451.376.706,00	544.478.000,00	444.298.800,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	246.205.476,00	125.000.000,00	70.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	566.272.593,00	335.000.000,00	235.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.055.377.022,00	4.152.710.000,00	3.559.254.852,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	41.034.246,00	0,00	0,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	24.620.548,00	134.936.492,00	125.282.492,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	19.662.281.265,00	1.987.211.165,00	1.605.344.546,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	328.273.968,00	800.000.000,00	800.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.074.281.135,00	645.000.000,00	643.831.380,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	328.273.968,00	1.896.600.000,00	1.612.765.900,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	389.825.337,00	425.000.000,00	313.268.148,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	164.136.984,00	235.000.000,00	140.000.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.291.881.303,00	5.711.240.000,00	4.231.455.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.784.989.700,00	640.000.000,00	360.739.320,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	41.034.246,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	11.044.314.870,00	10.695.464.185,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	65.287.531.331,00	59.348.945.744,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.090.275.342,00	2.255.000.000,00	1.947.375.600,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.031.195.177,00	667.000.000,00	582.748.282,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	26.770.455.700,00	5.551.142.000,00	5.099.239.956,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	213.378.080,00	145.000.000,00	72.800.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.357.249.270,00	845.783.375,00	1.103.466.651,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.797.299.973,00	2.455.000.000,00	4.293.708.953,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20.177.096,00	182.201.492,00	169.820.350,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	402.795.441,00	87.239.680,00	40.610.467,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	12.318.803.983,00	11.184.074.897,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.885.482,00	50.000.000,00	24.065.362,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.813.667.040,00	5.461.595.944,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	55.030.945.211,00	10.142.517.536,00	8.476.565.934,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	960.201.356,00	1.799.672.414,00	1.525.858.871,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100.885.482,00	17.544.990,00	61.650.438,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.703.760.190,00	1.370.000.000,00	1.133.375.066,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.202.791.516,00	877.867.200,00	784.946.900,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.385.325.295,00	696.200.000,00	471.325.094,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.221.371,00	35.474.617,00	31.135.142,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100.885.482,00	73.270.000,00	60.771.895,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.630.705.511,00	3.440.148.960,00	4.254.667.558,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5	01		PERENCANAAN			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	8.143.110.442,00	7.157.866.726,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100.885.482,00	0,00	0,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	984.821.904,00	1.195.000.000,00	843.704.776,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7.656.990.300,00	1.161.859.218,00	972.211.778,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	616.744.716,00	65.000.000,00	94.064.018,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.460.600.000,00	1.606.000.000,00	1.096.280.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	410.342.460,00	350.000.000,00	230.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	41.034.246,00	59.000.000,00	24.880.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.396.550.000,00	770.000.000,00	900.000.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
7	01		KECAMATAN			
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.129.101.677,00	1.408.935.103,00	1.303.442.204,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	652.444.512,00	327.216.660,00	197.329.969,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	164.136.984,00	1.750.000.000,00	1.604.555.725,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.677.676.589,00	435.000.000,00	319.689.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	2.068.125.996,00	1.086.985.000,00	733.759.310,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	20.517.123,00	0,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	886.339.712,00	7.167.027.900,00	7.506.267.120,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.567.664.311.958,00	158.399.838.000,00	149.459.842.042,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	91.034.246,00	80.000.000,00	31.942.631,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	984.931.381,00	2.728.999.580,00	2.306.732.125,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.181.786.283,00	185.000.000,00	77.100.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	69.915.303.669,00	58.184.206.469,50
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	902.753.412,00	580.671.796,00	322.947.576,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.341.423.224,00	165.000.000,00	205.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	20.517.123,00	20.000.000,00	7.500.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	17.955.080.693,00	12.326.528.024,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	10.678.453.234,00	9.889.850.696,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.925.716.955,00	477.000.000,00	400.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.797.180.967,00	5.393.548.957,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	86.309.496.306,00	6.979.024.300,00	8.031.053.381,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	157.981.848,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	325.401.570,00	260.000.000,00	141.418.903,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	305.673.947,00	0,00	0,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.012.337.720,00	1.582.089.631,00	1.222.159.410,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.442.741,00	140.000.000,00	100.000.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	247.026.160,00	130.000.000,00	96.400.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	77.009.560,00	100.525.000,00	85.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	492.410.952,00	35.000.000,00	8.450.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.943.490.397,00	2.990.115.662,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	53.344.520,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	7.002.394.120,00	6.981.749.664,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.299.403.263.282,00	126.906.862.658,00	103.555.816.018,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.328.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.564.722.132,00	650.000.000,00	430.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	24.620.548,00	25.000.000,00	10.590.388,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	82.068.492,00	70.000.000,00	51.143.600,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.775.543.416,00	1.879.325.592,00	1.626.613.553,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	205.171.228,00	890.000.000,00	1.098.960.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	160.669.500.000,00	72.422.348.000,00	82.861.945.136,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	164.136.984,00	1.700.000.000,00	1.597.206.018,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	6.750.545.595,00	6.090.940.982,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	402.800.000,00	164.190.000,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.878.450.154,00	1.826.060.606,00	1.781.320.606,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	53.344.520,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.109.997.731.204,00	381.287.252.600,00	377.908.213.678,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	24.234.859.630,00	14.117.523.952,00	16.722.573.863,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	205.171.230,00	122.500.000,00	77.466.900,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	79.606.437,00	32.000.000,00	35.048.421,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.199.435.584,00	730.000.000,00	556.427.270,00

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000						Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	649.077.864.898,00	663.951.994.825,00	664.550.002.514,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	642.287.864.898,00	656.611.994.825,00	654.610.002.514,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	642.287.864.898,00	656.611.994.825,00	654.610.002.514,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	151.600.684.111,00	151.461.954.111,00	149.459.842.042,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75.963.445.840,00	76.058.105.840,00	75.202.373.728,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.707.140.000,00	2.391.800.000,00	2.391.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	55.400.000,00	355.400.000,00	355.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60.297.732.112,00	60.297.732.112,00	58.872.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	775.000.000,00	775.000.000,00	775.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	623.783.000,00	623.783.000,00	643.783.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	505.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	35.150.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.344.240.728,00	2.344.240.728,00	2.344.240.728,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	0,00	550.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	43.910.519.271,00	43.677.129.271,00	44.218.263.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	450.000.000,00	306.500.000,00	306.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.523.329.200,00	2.523.329.200,00	2.523.329.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.053.925.000,00	1.540.535.000,00	1.540.535.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	131.667.000,00	131.667.000,00	131.667.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34.837.232.071,00	34.837.232.071,00	35.028.366.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	46.766.000,00	146.766.000,00	146.766.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	75.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	143.500.000,00	293.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	528.000.000,00	528.000.000,00	728.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.197.159.000,00	19.185.399.000,00	19.135.399.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	33.400.000,00	33.400.000,00	33.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.360.800.000,00	2.360.800.000,00	2.360.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	678.250.000,00	678.250.000,00	678.250.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	94.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.065.709.000,00	15.065.709.000,00	15.065.709.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	65.000.000,00	53.240.000,00	53.240.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.529.560.000,00	12.541.320.000,00	10.903.805.714,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.279.560.000,00	6.279.560.000,00	6.275.760.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000,00	100.000.000,00	285.550.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.960.000.000,00	4.960.000.000,00	3.328.442.857,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.065.000.000,00	1.065.000.000,00	877.292.857,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	40.000.000,00	51.760.000,00	51.760.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	72.800.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	72.800.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	72.800.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	490.379.380.787,00	504.842.240.714,00	504.842.360.472,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	487.798.580.787,00	502.047.710.714,00	502.047.830.472,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	487.798.580.787,00	502.047.710.714,00	502.047.830.472,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	592.200.000,00	592.200.000,00	592.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	143.730.000,00	143.730.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	143.730.000,00	143.730.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.080.100.000,00	1.130.100.000,00	1.130.100.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	746.500.000,00	796.500.000,00	796.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.500.000,00	478.500.000,00	478.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	318.500.000,00	318.500.000,00	318.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.790.000.000,00	7.340.000.000,00	9.940.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.790.000.000,00	7.340.000.000,00	9.940.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.130.000.000,00	6.680.000.000,00	9.280.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	2.400.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	2.360.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000,00	825.000.000,00	800.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	800.000.000,00	825.000.000,00	800.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.730.000.000,00	3.255.000.000,00	5.830.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	2.730.000.000,00	3.255.000.000,00	5.830.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	133.693.936.197,00	130.958.524.042,00	130.807.840.828,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	133.693.936.197,00	130.958.524.042,00	130.807.840.828,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	133.693.936.197,00	130.958.524.042,00	130.807.840.828,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.901.740.144,00	66.826.740.144,00	66.826.740.144,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.185.316.127,00	25.185.316.126,00	25.185.316.126,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	2.148.111.104,00	2.148.111.104,00	2.148.111.104,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.106.511.001,00	2.106.511.000,00	2.106.511.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.702.714.930,00	2.521.676.930,00	2.521.676.930,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	521.351.000,00	702.389.000,00	702.389.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	17.458.520.092,00	17.458.520.092,00	17.458.520.092,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	123.108.000,00	123.108.000,00	123.108.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.565.818.889,00	41.490.818.890,00	41.490.818.890,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99.989.200,00	99.989.200,00	99.989.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	261.600.000,00	261.600.000,00	261.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	184.182.000,00	184.182.000,00	184.182.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.783.100,00	14.783.100,00	14.783.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	73.126.950,00	73.126.950,00	73.126.950,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	106.070.000,00	106.070.000,00	106.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.027.580,00	13.027.580,00	13.027.580,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40.302.520,00	40.302.520,00	40.302.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	38.731.750,00	38.731.750,00	38.731.750,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	142.046.820,00	142.046.820,00	142.046.820,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	122.700.000,00	122.700.000,00	122.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.078.500,00	39.078.500,00	39.078.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.267.634.230,00	1.267.634.230,00	1.267.634.230,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.900.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	487.991.470,00	487.991.470,00	487.991.470,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	472.981.570,00	472.981.570,00	472.981.570,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	179.077.000,00	179.077.000,00	179.077.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	21.193.000,00	21.193.000,00	21.193.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	144.823.100,00	144.823.100,00	144.823.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36.108.371.679,00	36.033.371.680,00	36.033.371.680,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	33.617.870,00	33.617.870,00	33.617.870,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	247.547.970,00	247.547.970,00	247.547.970,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	25.360.780,00	25.360.780,00	25.360.780,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	267.151.000,00	267.151.000,00	267.151.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	49.570.250,00	49.570.250,00	49.570.250,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	77.234.720,00	77.234.720,00	77.234.720,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	486.852.440,00	486.852.440,00	486.852.440,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	37.329.360,00	37.329.360,00	37.329.360,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	421.024.030,00	421.024.030,00	421.024.030,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	107.131.628,00	107.131.628,00	107.131.628,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	107.131.628,00	107.131.628,00	107.131.628,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.473.500,00	43.473.500,00	43.473.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	14.140.000,00	14.140.000,00	14.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	29.333.500,00	29.333.500,00	29.333.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	784.946.900,00	784.946.900,00	784.946.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	101.898.900,00	101.898.900,00	101.898.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	20.333.900,00	20.333.900,00	20.333.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	71.165.000,00	71.165.000,00	71.165.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	663.048.000,00	663.048.000,00	663.048.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	663.048.000,00	663.048.000,00	663.048.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	733.759.310,00	733.759.310,00	733.759.310,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	107.076.050,00	107.076.050,00	107.076.050,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	107.076.050,00	107.076.050,00	107.076.050,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	362.629.810,00	362.629.810,00	362.629.810,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	362.629.810,00	362.629.810,00	362.629.810,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	42.107.270,00	42.107.270,00	42.107.270,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	42.107.270,00	42.107.270,00	42.107.270,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	68.624.810,00	68.624.810,00	68.624.810,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	68.624.810,00	68.624.810,00	68.624.810,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	153.321.370,00	153.321.370,00	153.321.370,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	153.321.370,00	153.321.370,00	153.321.370,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	91.872.780,00	91.872.780,00	91.872.780,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.872.780,00	91.872.780,00	91.872.780,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	91.872.780,00	91.872.780,00	91.872.780,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.181.617.063,00	62.521.204.908,00	62.370.521.694,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.786.423.888,00	61.126.011.733,00	60.975.328.519,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.786.423.888,00	61.126.011.733,00	60.975.328.519,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.680.375,00	201.680.375,00	201.680.375,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.996.100,00	5.996.100,00	5.996.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.393.850,00	42.393.850,00	42.393.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.952.850,00	11.952.850,00	11.952.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.817.575,00	44.817.575,00	44.817.575,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.120.000,00	91.120.000,00	91.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.375.000,00	152.375.000,00	152.375.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.375.000,00	152.375.000,00	152.375.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.537.800,00	814.537.800,00	814.537.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.848.000,00	102.848.000,00	102.848.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	711.689.800,00	711.689.800,00	711.689.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0002						Puskesmas Wonosobo 1	4.606.135.727,00	4.606.135.727,00	4.552.892.198,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	883.880.879,00	883.880.879,00	830.637.350,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	883.880.879,00	883.880.879,00	830.637.350,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.290.000,00	22.290.000,00	22.290.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	272.859.000,00	272.859.000,00	272.859.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.900.030,00	12.900.030,00	12.900.030,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	134.815.320,00	134.815.320,00	134.815.320,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	272.243.529,00	272.243.529,00	219.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.667.000,00	5.667.000,00	5.667.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.173.000,00	24.173.000,00	24.173.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.240.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.673.300,00	2.673.300,00	2.673.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.673.300,00	2.673.300,00	2.673.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.673.300,00	2.673.300,00	2.673.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.719.581.548,00	3.719.581.548,00	3.719.581.548,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.719.581.548,00	3.719.581.548,00	3.719.581.548,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.719.581.548,00	3.719.581.548,00	3.719.581.548,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						Puskesmas Kertek 1	3.857.384.667,00	3.857.384.667,00	3.722.055.003,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	867.713.664,00	867.713.664,00	732.384.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	867.713.664,00	867.713.664,00	732.384.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.040.000,00	32.040.000,00	32.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.600.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	285.435.000,00	285.435.000,00	285.435.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.740.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.454.000,00	105.454.000,00	105.454.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	313.689.664,00	313.689.664,00	178.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	43.925.000,00	43.925.000,00	43.925.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	680.000,00	680.000,00	680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.220.000,00	10.220.000,00	10.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.220.000,00	10.220.000,00	10.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.220.000,00	10.220.000,00	10.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.979.451.003,00	2.979.451.003,00	2.979.451.003,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.979.451.003,00	2.979.451.003,00	2.979.451.003,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.979.451.003,00	2.979.451.003,00	2.979.451.003,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						Puskesmas Selomerto 1	6.411.664.078,00	6.411.664.078,00	6.283.361.706,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	951.865.046,00	951.865.046,00	823.562.674,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	951.865.046,00	951.865.046,00	823.562.674,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	105.800.000,00	105.800.000,00	105.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.490.000,00	20.490.000,00	20.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	232.434.000,00	232.434.000,00	232.434.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.480.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	132.719.674,00	132.719.674,00	132.719.674,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	385.202.372,00	385.202.372,00	256.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	42.390.000,00	42.390.000,00	42.390.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	369.000,00	369.000,00	369.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.872.480,00	7.872.480,00	7.872.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.872.480,00	7.872.480,00	7.872.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.872.480,00	7.872.480,00	7.872.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.451.926.552,00	5.451.926.552,00	5.451.926.552,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	5.451.926.552,00	5.451.926.552,00	5.451.926.552,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.451.926.552,00	5.451.926.552,00	5.451.926.552,00
1.02.0.00.0.00.01.0005						Puskesmas Leksono 1	2.529.596.789,00	2.529.596.789,00	2.413.847.057,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	875.980.832,00	875.980.832,00	760.231.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	875.980.832,00	875.980.832,00	760.231.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.545.000,00	76.545.000,00	76.545.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	180.291.000,00	180.291.000,00	180.291.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.497.000,00	4.497.000,00	4.497.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80.430.500,00	80.430.500,00	80.430.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	476.899.732,00	476.899.732,00	361.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.905.000,00	13.905.000,00	13.905.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	452.600,00	452.600,00	452.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.648.975.957,00	1.648.975.957,00	1.648.975.957,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.648.975.957,00	1.648.975.957,00	1.648.975.957,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.648.975.957,00	1.648.975.957,00	1.648.975.957,00
1.02.0.00.0.00.01.0006						Puskesmas Watumalang	3.449.963.868,00	3.449.963.868,00	3.358.383.104,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	877.608.764,00	877.608.764,00	786.028.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	877.608.764,00	877.608.764,00	786.028.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99.120.000,00	99.120.000,00	99.120.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.580.000,00	17.580.000,00	17.580.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	250.052.000,00	250.052.000,00	250.052.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.240.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.542.000,00	4.542.000,00	4.542.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	168.448.000,00	168.448.000,00	168.448.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	291.220.764,00	291.220.764,00	199.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.615.000,00	19.615.000,00	19.615.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.994.000,00	6.994.000,00	6.994.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.994.000,00	6.994.000,00	6.994.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.994.000,00	6.994.000,00	6.994.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.565.361.104,00	2.565.361.104,00	2.565.361.104,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.565.361.104,00	2.565.361.104,00	2.565.361.104,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.565.361.104,00	2.565.361.104,00	2.565.361.104,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						Puskesmas Mojotengah	5.460.587.587,00	5.460.587.587,00	5.383.958.448,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	931.827.029,00	931.827.029,00	855.197.890,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	931.827.029,00	931.827.029,00	855.197.890,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	134.715.000,00	134.715.000,00	134.715.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.670.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	240.002.890,00	240.002.890,00	240.002.890,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.920.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	149.650.000,00	149.650.000,00	149.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	343.229.139,00	343.229.139,00	266.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.480.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	34.410.060,00	34.410.060,00	34.410.060,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.410.060,00	34.410.060,00	34.410.060,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.410.060,00	34.410.060,00	34.410.060,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.494.350.498,00	4.494.350.498,00	4.494.350.498,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	4.494.350.498,00	4.494.350.498,00	4.494.350.498,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.494.350.498,00	4.494.350.498,00	4.494.350.498,00
1.02.0.00.0.00.01.0008						Puskesmas Garung	5.041.627.697,00	5.041.627.697,00	4.962.646.119,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	864.767.078,00	864.767.078,00	785.785.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	864.767.078,00	864.767.078,00	785.785.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	121.800.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.740.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	194.810.000,00	194.810.000,00	194.810.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	870.000,00	870.000,00	870.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.572.500,00	8.572.500,00	8.572.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	154.950.000,00	154.950.000,00	154.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	273.931.578,00	273.931.578,00	194.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	32.193.000,00	32.193.000,00	32.193.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.296.000,00	7.296.000,00	7.296.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.296.000,00	7.296.000,00	7.296.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.296.000,00	7.296.000,00	7.296.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.169.564.619,00	4.169.564.619,00	4.169.564.619,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	4.169.564.619,00	4.169.564.619,00	4.169.564.619,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.169.564.619,00	4.169.564.619,00	4.169.564.619,00
1.02.0.00.0.00.01.0009						Puskesmas Kejajar 1	3.548.173.578,00	3.548.173.578,00	3.483.740.180,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	766.464.403,00	766.464.403,00	702.031.005,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	766.464.403,00	766.464.403,00	702.031.005,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.560.000,00	97.560.000,00	97.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.450.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	204.913.000,00	204.913.000,00	204.913.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.821.605,00	2.821.605,00	2.821.605,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	126.073.400,00	126.073.400,00	126.073.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	250.593.397,00	250.593.397,00	186.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1,00	1,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	36.665.000,00	36.665.000,00	36.665.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.774.909.175,00	2.774.909.175,00	2.774.909.175,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.774.909.175,00	2.774.909.175,00	2.774.909.175,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.774.909.175,00	2.774.909.175,00	2.774.909.175,00
1.02.0.00.0.00.01.0010						Puskesmas Kalikajar 1	3.077.317.324,00	3.077.317.324,00	2.942.329.157,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	752.732.167,00	752.732.167,00	617.744.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	752.732.167,00	752.732.167,00	617.744.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.890.000,00	70.890.000,00	70.890.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	174.362.800,00	174.362.800,00	174.362.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.765.000,00	87.765.000,00	87.765.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	296.728.167,00	296.728.167,00	161.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	97.060.000,00	97.060.000,00	97.060.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	246.200,00	246.200,00	246.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.445.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.445.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.445.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.320.140.157,00	2.320.140.157,00	2.320.140.157,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.320.140.157,00	2.320.140.157,00	2.320.140.157,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.320.140.157,00	2.320.140.157,00	2.320.140.157,00
1.02.0.00.0.00.01.0011						Puskesmas Sapuran	5.811.733.918,00	5.811.733.918,00	5.757.702.607,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	859.043.811,00	859.043.811,00	805.012.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	859.043.811,00	859.043.811,00	805.012.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.270.000,00	90.270.000,00	90.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.870.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	307.620.000,00	307.620.000,00	307.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.404.200,00	2.404.200,00	2.404.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	170.360.800,00	170.360.800,00	170.360.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	248.851.311,00	248.851.311,00	194.820.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.625.000,00	14.625.000,00	14.625.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.092.500,00	1.092.500,00	1.092.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	40.889.997,00	40.889.997,00	40.889.997,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.889.997,00	40.889.997,00	40.889.997,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.889.997,00	40.889.997,00	40.889.997,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.911.800.110,00	4.911.800.110,00	4.911.800.110,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	4.911.800.110,00	4.911.800.110,00	4.911.800.110,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.911.800.110,00	4.911.800.110,00	4.911.800.110,00
1.02.0.00.0.00.01.0012						Puskesmas Kepil 1	3.715.646.508,00	3.715.646.508,00	3.653.250.506,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	840.981.002,00	840.981.002,00	778.585.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840.981.002,00	840.981.002,00	778.585.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.100.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	264.747.800,00	264.747.800,00	264.747.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156.285.000,00	156.285.000,00	156.285.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	252.116.002,00	252.116.002,00	189.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	64.185.000,00	64.185.000,00	64.185.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	447.200,00	447.200,00	447.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.749.999,00	4.749.999,00	4.749.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.749.999,00	4.749.999,00	4.749.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.749.999,00	4.749.999,00	4.749.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.869.915.507,00	2.869.915.507,00	2.869.915.507,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.869.915.507,00	2.869.915.507,00	2.869.915.507,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.869.915.507,00	2.869.915.507,00	2.869.915.507,00
1.02.0.00.0.00.01.0013						Puskesmas Kaliwiro	4.929.004.530,00	4.929.004.530,00	4.808.400.588,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.210.149.281,00	1.210.149.281,00	1.089.545.339,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.210.149.281,00	1.210.149.281,00	1.089.545.339,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	102.480.000,00	102.480.000,00	102.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	243.564.500,00	243.564.500,00	243.564.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.657.500,00	11.657.500,00	11.657.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	213.360.000,00	213.360.000,00	213.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	455.197.781,00	455.197.781,00	334.593.839,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	125.670.000,00	125.670.000,00	125.670.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	649.500,00	649.500,00	649.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.513.000,00	7.513.000,00	7.513.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.513.000,00	7.513.000,00	7.513.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.513.000,00	7.513.000,00	7.513.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.711.342.249,00	3.711.342.249,00	3.711.342.249,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.711.342.249,00	3.711.342.249,00	3.711.342.249,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.711.342.249,00	3.711.342.249,00	3.711.342.249,00
1.02.0.00.0.00.01.0014						Puskesmas Wadaslintang 1	3.863.690.845,00	3.863.690.845,00	3.788.989.007,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	876.464.098,00	876.464.098,00	801.762.260,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	876.464.098,00	876.464.098,00	801.762.260,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	127.875.000,00	127.875.000,00	127.875.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.240.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.969.800,00	195.969.800,00	195.969.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.429.760,00	11.429.760,00	11.429.760,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	150.970.480,00	150.970.480,00	150.970.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	302.511.838,00	302.511.838,00	227.810.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	660.000,00	660.000,00	660.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	34.390.000,00	34.390.000,00	34.390.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	397.220,00	397.220,00	397.220,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.717.500,00	6.717.500,00	6.717.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.717.500,00	6.717.500,00	6.717.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.717.500,00	6.717.500,00	6.717.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.980.509.247,00	2.980.509.247,00	2.980.509.247,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.980.509.247,00	2.980.509.247,00	2.980.509.247,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.980.509.247,00	2.980.509.247,00	2.980.509.247,00
1.02.0.00.0.00.01.0015						Puskesmas Sukoharjo 1	3.439.252.116,00	3.439.252.116,00	3.292.753.564,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.361.427.552,00	1.361.427.552,00	1.214.929.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.361.427.552,00	1.361.427.552,00	1.214.929.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	161.925.000,00	161.925.000,00	161.925.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	170.462.640,00	170.462.640,00	170.462.640,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	888.398.552,00	888.398.552,00	741.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	29.550.000,00	29.550.000,00	29.550.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	331.360,00	331.360,00	331.360,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	35.520.000,00	35.520.000,00	35.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.072.554.564,00	2.072.554.564,00	2.072.554.564,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.072.554.564,00	2.072.554.564,00	2.072.554.564,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.072.554.564,00	2.072.554.564,00	2.072.554.564,00
1.02.0.00.0.00.01.0016						Puskesmas Kalibawang	2.670.733.934,00	2.670.733.934,00	2.635.908.654,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	945.048.700,00	945.048.700,00	910.223.420,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	945.048.700,00	945.048.700,00	910.223.420,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.560.160,00	43.560.160,00	43.560.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.240.000,00	21.240.000,00	21.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	282.250.000,00	282.250.000,00	282.250.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.556.840,00	7.556.840,00	7.556.840,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156.150.000,00	156.150.000,00	156.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	399.425.420,00	399.425.420,00	364.600.140,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.195.000,00	13.195.000,00	13.195.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	371.280,00	371.280,00	371.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.795.660,00	5.795.660,00	5.795.660,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.795.660,00	5.795.660,00	5.795.660,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.795.660,00	5.795.660,00	5.795.660,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.719.889.574,00	1.719.889.574,00	1.719.889.574,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.719.889.574,00	1.719.889.574,00	1.719.889.574,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.719.889.574,00	1.719.889.574,00	1.719.889.574,00
1.02.0.00.0.00.01.0017						Puskesmas Wonosobo 2	2.047.374.692,00	2.047.374.692,00	1.872.952.005,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	681.692.967,00	681.692.967,00	507.270.280,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	681.692.967,00	681.692.967,00	507.270.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.524.480,00	20.524.480,00	20.524.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.740.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	190.715.000,00	190.715.000,00	190.715.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.990.000,00	105.990.000,00	105.990.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	299.284.487,00	299.284.487,00	124.861.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	27.840.000,00	27.840.000,00	27.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	459.000,00	459.000,00	459.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	960.000,00	960.000,00	960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.053.200,00	5.053.200,00	5.053.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.053.200,00	5.053.200,00	5.053.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.053.200,00	5.053.200,00	5.053.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.360.628.525,00	1.360.628.525,00	1.360.628.525,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.360.628.525,00	1.360.628.525,00	1.360.628.525,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.360.628.525,00	1.360.628.525,00	1.360.628.525,00
1.02.0.00.0.00.01.0018						Puskesmas Kertek 2	3.525.147.274,00	3.525.147.274,00	3.445.081.870,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	813.532.004,00	813.532.004,00	733.466.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	813.532.004,00	813.532.004,00	733.466.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.960.000,00	72.960.000,00	72.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.440.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	313.638.600,00	313.638.600,00	313.638.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	126.005.000,00	126.005.000,00	126.005.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	242.305.404,00	242.305.404,00	162.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.920.000,00	6.920.000,00	6.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	883.000,00	883.000,00	883.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.334.400,00	5.334.400,00	5.334.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.334.400,00	5.334.400,00	5.334.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.334.400,00	5.334.400,00	5.334.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.706.280.870,00	2.706.280.870,00	2.706.280.870,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.706.280.870,00	2.706.280.870,00	2.706.280.870,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.706.280.870,00	2.706.280.870,00	2.706.280.870,00
1.02.0.00.0.00.01.0019						Puskesmas Selomerto 2	2.033.206.120,00	2.033.206.120,00	1.958.841.495,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	884.616.625,00	884.616.625,00	810.252.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	884.616.625,00	884.616.625,00	810.252.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.065.000,00	61.065.000,00	61.065.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	960.000,00	960.000,00	960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	160.160.000,00	160.160.000,00	160.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	630.000,00	630.000,00	630.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.530.000,00	7.530.000,00	7.530.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.399.000,00	112.399.000,00	112.399.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	453.764.625,00	453.764.625,00	379.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	58.580.000,00	58.580.000,00	58.580.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	578.000,00	578.000,00	578.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.365.000,00	16.365.000,00	16.365.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.365.000,00	16.365.000,00	16.365.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.365.000,00	16.365.000,00	16.365.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.132.224.495,00	1.132.224.495,00	1.132.224.495,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.132.224.495,00	1.132.224.495,00	1.132.224.495,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.132.224.495,00	1.132.224.495,00	1.132.224.495,00
1.02.0.00.0.00.01.0020						Puskesmas Leksono 2	1.908.581.137,00	1.908.581.137,00	1.891.020.687,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	956.263.850,00	956.263.850,00	938.703.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	956.263.850,00	956.263.850,00	938.703.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129.743.000,00	129.743.000,00	129.743.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.720.000,00	12.720.000,00	12.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	171.365.400,00	171.365.400,00	171.365.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.920.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	90.675.000,00	90.675.000,00	90.675.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	463.360.450,00	463.360.450,00	445.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	55.670.000,00	55.670.000,00	55.670.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.783.600,00	5.783.600,00	5.783.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.783.600,00	5.783.600,00	5.783.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.783.600,00	5.783.600,00	5.783.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	946.533.687,00	946.533.687,00	946.533.687,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	946.533.687,00	946.533.687,00	946.533.687,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	946.533.687,00	946.533.687,00	946.533.687,00
1.02.0.00.0.00.01.0021						Puskesmas Kejajar 2	1.998.089.628,00	1.998.089.628,00	1.898.860.556,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.052.008.071,00	1.052.008.071,00	952.778.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.052.008.071,00	1.052.008.071,00	952.778.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	171.780.000,00	171.780.000,00	171.780.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.120.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	138.741.000,00	138.741.000,00	138.741.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.433.000,00	5.433.000,00	5.433.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.240.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.090.000,00	110.090.000,00	110.090.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	531.789.071,00	531.789.071,00	432.559.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	34.445.000,00	34.445.000,00	34.445.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	840.000,00	840.000,00	840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	938.101.557,00	938.101.557,00	938.101.557,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	938.101.557,00	938.101.557,00	938.101.557,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	938.101.557,00	938.101.557,00	938.101.557,00
1.02.0.00.0.00.01.0022						Puskesmas Kalikajar 2	3.289.419.714,00	3.289.419.714,00	2.990.542.180,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	987.040.534,00	987.040.534,00	688.163.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	987.040.534,00	987.040.534,00	688.163.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.613.000,00	15.613.000,00	15.613.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.970.000,00	17.970.000,00	17.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	177.850.000,00	177.850.000,00	177.850.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	151.870.000,00	151.870.000,00	151.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	475.177.534,00	475.177.534,00	176.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	62.070.000,00	62.070.000,00	62.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.297.479.180,00	2.297.479.180,00	2.297.479.180,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.297.479.180,00	2.297.479.180,00	2.297.479.180,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.297.479.180,00	2.297.479.180,00	2.297.479.180,00
1.02.0.00.0.00.01.0023						Puskesmas Kepil 2	3.202.344.710,00	3.202.344.710,00	3.040.296.171,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.077.511.739,00	1.077.511.739,00	915.463.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.077.511.739,00	1.077.511.739,00	915.463.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94.508.000,00	94.508.000,00	94.508.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.860.000,00	10.860.000,00	10.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	231.895.000,00	231.895.000,00	231.895.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.240.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	144.625.000,00	144.625.000,00	144.625.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	496.428.739,00	496.428.739,00	334.380.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	49.155.000,00	49.155.000,00	49.155.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	720.000,00	720.000,00	720.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.479.800,00	17.479.800,00	17.479.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.479.800,00	17.479.800,00	17.479.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.479.800,00	17.479.800,00	17.479.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.107.353.171,00	2.107.353.171,00	2.107.353.171,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.107.353.171,00	2.107.353.171,00	2.107.353.171,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.107.353.171,00	2.107.353.171,00	2.107.353.171,00
1.02.0.00.0.00.01.0024						Puskesmas Wadaslintang 2	2.541.777.877,00	2.541.777.877,00	2.503.922.110,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	857.348.228,00	857.348.228,00	819.492.461,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	857.348.228,00	857.348.228,00	819.492.461,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99.360.000,00	99.360.000,00	99.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.330.000,00	9.330.000,00	9.330.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169.085.710,00	169.085.710,00	169.085.710,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.530.000,00	4.530.000,00	4.530.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	131.178.751,00	131.178.751,00	131.178.751,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	386.855.767,00	386.855.767,00	349.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.188.000,00	18.188.000,00	18.188.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	420.000,00	420.000,00	420.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.679.429.649,00	1.679.429.649,00	1.679.429.649,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.679.429.649,00	1.679.429.649,00	1.679.429.649,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.679.429.649,00	1.679.429.649,00	1.679.429.649,00
1.02.0.00.0.00.01.0025						Puskesmas Sukoharjo 2	1.904.615.006,00	1.904.615.006,00	1.867.103.069,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	965.025.937,00	965.025.937,00	927.514.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	965.025.937,00	965.025.937,00	927.514.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	111.480.000,00	111.480.000,00	111.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.255.000,00	6.255.000,00	6.255.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.260.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	164.580.000,00	164.580.000,00	164.580.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.540.000,00	6.540.000,00	6.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	131.100.000,00	131.100.000,00	131.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	460.337.937,00	460.337.937,00	422.826.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	47.220.000,00	47.220.000,00	47.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	403.000,00	403.000,00	403.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.891.800,00	6.891.800,00	6.891.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.891.800,00	6.891.800,00	6.891.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.891.800,00	6.891.800,00	6.891.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	932.697.269,00	932.697.269,00	932.697.269,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	932.697.269,00	932.697.269,00	932.697.269,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	932.697.269,00	932.697.269,00	932.697.269,00
1.02.0.00.0.00.01.0026						Laboratorium Kesehatan Daerah	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0026	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0026	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0026	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000						RSUD Setjonegoro	174.081.713.662,00	173.749.160.802,91	173.617.177.271,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.222.312.896,00	16.222.312.896,00	16.222.312.896,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	16.222.312.896,00	16.222.312.896,00	16.222.312.896,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.859.400.766,00	157.526.847.906,91	157.394.864.375,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.070.428.201,00	26.737.875.341,00	26.605.891.809,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.070.428.201,00	26.737.875.341,00	26.605.891.809,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	130.788.972.565,00	130.788.972.565,91	130.788.972.566,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	130.788.972.565,00	130.788.972.565,91	130.788.972.566,00
1.03.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	108.030.519.632,00	107.079.869.207,00	108.491.526.183,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	108.030.519.632,00	107.079.869.207,00	108.491.526.183,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.575.000.000,00	4.975.000.000,00	5.324.348.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.575.000.000,00	4.975.000.000,00	5.324.348.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.825.000.000,00	3.025.000.000,00	3.234.348.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00	1.740.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	990.000.000,00	990.000.000,00	990.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.815.000.000,00	1.815.000.000,00	2.815.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.815.000.000,00	1.815.000.000,00	2.815.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	528.000.000,00	528.000.000,00	528.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	992.000.000,00	992.000.000,00	1.992.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	700.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	700.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	683.252.000,00	683.252.000,00	653.252.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	683.252.000,00	683.252.000,00	653.252.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	683.252.000,00	683.252.000,00	653.252.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.414.173.023,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.414.173.023,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.414.173.023,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	83.567.746.159,00	82.867.746.159,00	82.861.945.136,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	83.567.746.159,00	82.867.746.159,00	82.861.945.136,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	236.748.000,00	236.748.000,00	266.748.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00	9.523.496.400,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	1.520.000.000,00	220.000.000,00	121.428.750,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	57.572.908.000,00	57.572.908.000,00	57.645.086.250,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	4.725.000.000,00	4.725.000.000,00	4.725.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	3.580.000.000,00	3.580.000.000,00	3.525.673.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.618.090.159,00	6.218.090.159,00	6.339.512.736,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.209.000.000,00	1.099.000.000,00	1.096.280.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	914.000.000,00	914.000.000,00	911.280.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	635.000.000,00	635.000.000,00	632.280.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	160.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	95.000.000,00	129.584.000,00	129.584.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	40.000.000,00	55.416.000,00	55.416.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.130.521.473,00	12.389.871.048,00	12.326.528.024,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.305.086.473,00	10.354.436.048,00	10.291.093.024,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.305.086.473,00	10.354.436.048,00	10.291.093.024,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.843.000,00	423.843.000,00	423.843.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.908.000,00	54.908.000,00	54.908.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.185.000,00	269.185.000,00	269.185.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	971.092.000,00	971.092.000,00	971.092.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	868.842.000,00	883.842.000,00	883.842.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.500.000,00	530.500.000,00	530.500.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.500.000,00	153.500.000,00	153.500.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	32.051.695.304,00	32.023.261.856,00	33.492.138.760,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.124.254.633,00	24.095.821.185,00	24.659.698.089,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	643.831.380,00	643.831.380,00	643.831.380,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	104.874.580,00	104.874.580,00	104.874.580,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	104.874.580,00	104.874.580,00	104.874.580,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	538.956.800,00	538.956.800,00	538.956.800,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	221.780.160,00	221.780.160,00	221.780.160,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	317.176.640,00	317.176.640,00	317.176.640,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	75.408.040,00	75.408.040,00	75.408.040,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	73.408.040,00	73.408.040,00	73.408.040,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	73.408.040,00	73.408.040,00	73.408.040,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	165.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	165.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	165.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	16.173.819.863,00	16.172.573.863,00	16.722.573.863,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	16.173.819.863,00	16.172.573.863,00	16.722.573.863,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	16.111.144.879,00	16.109.898.879,00	16.659.898.879,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	62.674.984,00	62.674.984,00	62.674.984,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	31.135.142,00	31.135.142,00	31.135.142,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	31.135.142,00	31.135.142,00	31.135.142,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	31.135.142,00	31.135.142,00	31.135.142,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.035.060.208,00	6.967.872.760,00	6.981.749.664,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.644.202,00	122.070.202,00	122.070.202,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.400.952,00	117.826.952,00	117.826.952,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.243.250,00	4.243.250,00	4.243.250,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.676.130.977,00	5.647.517.529,00	5.661.394.433,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.676.130.977,00	5.647.517.529,00	5.661.394.433,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.061.064,00	138.061.064,00	138.061.064,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.397.263,00	7.397.263,00	7.397.263,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.771.851,00	48.771.851,00	48.771.851,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.427.950,00	21.427.950,00	21.427.950,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.764.000,00	43.764.000,00	43.764.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.290.772,00	755.490.772,00	755.490.772,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	747.690.772,00	713.890.772,00	713.890.772,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.933.193,00	304.733.193,00	304.733.193,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.500.000,00	202.300.000,00	202.300.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.237.466,00	57.237.466,00	57.237.466,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.195.727,00	45.195.727,00	45.195.727,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.927.440.671,00	7.927.440.671,00	8.832.440.671,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	186.054.387,00	186.054.387,00	186.054.387,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	125.282.492,00	125.282.492,00	125.282.492,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.282.492,00	125.282.492,00	125.282.492,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.282.492,00	125.282.492,00	125.282.492,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	60.771.895,00	60.771.895,00	60.771.895,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	60.771.895,00	60.771.895,00	60.771.895,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	60.771.895,00	60.771.895,00	60.771.895,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.741.386.284,00	7.741.386.284,00	8.646.386.284,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.571.565.934,00	7.571.565.934,00	8.476.565.934,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.893.089.327,00	5.893.089.327,00	6.798.089.327,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.015.000.000,00	5.015.000.000,00	5.920.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	878.089.327,00	878.089.327,00	878.089.327,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	98.892.013,00	98.892.013,00	98.892.013,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	98.892.013,00	98.892.013,00	98.892.013,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	6.448.000,00	6.448.000,00	6.448.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	6.448.000,00	6.448.000,00	6.448.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	276.625.044,00	276.625.044,00	276.625.044,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	126.625.044,00	176.625.044,00	176.625.044,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	889.042.997,00	916.342.997,00	916.342.997,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	96.209.616,00	129.109.616,00	129.109.616,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	792.833.381,00	787.233.381,00	787.233.381,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.748.150,00	2.748.150,00	2.748.150,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	2.748.150,00	2.748.150,00	2.748.150,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	369.132.403,00	341.832.403,00	341.832.403,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	369.132.403,00	341.832.403,00	341.832.403,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.588.000,00	35.588.000,00	35.588.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.588.000,00	35.588.000,00	35.588.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	169.820.350,00	169.820.350,00	169.820.350,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	139.820.350,00	139.820.350,00	139.820.350,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	139.820.350,00	139.820.350,00	139.820.350,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan polisi Pamong Praja	8.536.691.306,00	8.212.780.574,00	8.157.659.175,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.536.691.306,00	8.212.780.574,00	8.157.659.175,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.536.691.306,00	8.212.780.574,00	8.157.659.175,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.231.732.125,00	2.306.732.125,00	2.306.732.125,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.710.166.580,00	1.785.166.580,00	1.785.166.580,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.178.405.580,00	1.253.405.580,00	1.253.405.580,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	516.546.000,00	516.546.000,00	516.546.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.215.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	521.565.545,00	521.565.545,00	521.565.545,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	9.175.000,00	9.175.000,00	9.175.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	6.067.500,00	6.067.500,00	6.067.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.225.000,00	14.225.000,00	14.225.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	18.310.520,00	18.310.520,00	18.310.520,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	467.037.525,00	467.037.525,00	467.037.525,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.304.959.181,00	5.906.048.449,00	5.850.927.050,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.213.094.660,00	4.814.183.928,00	4.759.062.529,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.158.518.660,00	4.759.607.928,00	4.704.486.529,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.576.000,00	54.576.000,00	54.576.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.848.000,00	136.848.000,00	136.848.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.148.000,00	99.148.000,00	99.148.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.675.000,00	17.675.000,00	17.675.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.675.000,00	17.675.000,00	17.675.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.541.521,00	782.541.521,00	782.541.521,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.165.521,00	150.165.521,00	150.165.521,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.376.000,00	17.376.000,00	17.376.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	615.000.000,00	615.000.000,00	615.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.569.276.874,00	8.293.629.895,00	8.366.553.973,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.086.030.526,00	1.086.030.526,00	1.086.030.526,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	26.130.000,00	26.130.000,00	26.130.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	26.130.000,00	26.130.000,00	26.130.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	298.783.340,00	298.783.340,00	298.783.340,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	53.819.892,00	53.819.892,00	53.819.892,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4.819.980,00	4.819.980,00	4.819.980,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	24.544.000,00	24.544.000,00	24.544.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	138.605.536,00	138.605.536,00	138.605.536,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	46.993.932,00	46.993.932,00	46.993.932,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	750.580.000,00	750.580.000,00	750.580.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	465.860.000,00	465.860.000,00	465.860.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	84.720.000,00	84.720.000,00	84.720.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	10.537.186,00	10.537.186,00	10.537.186,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	10.537.186,00	10.537.186,00	10.537.186,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.947.375.600,00	1.947.375.600,00	1.947.375.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.885.240.000,00	1.885.240.000,00	1.885.240.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.240.000,00	35.240.000,00	35.240.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	29.032.600,00	29.032.600,00	29.032.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	11.055.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	17.977.600,00	17.977.600,00	17.977.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	33.103.000,00	33.103.000,00	33.103.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	33.103.000,00	33.103.000,00	33.103.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.535.870.748,00	5.260.223.769,00	5.333.147.847,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.739.999.467,00	4.464.352.488,00	4.537.276.566,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.739.999.467,00	4.464.352.488,00	4.537.276.566,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.591.281,00	229.691.281,00	229.691.281,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.291.281,00	39.291.281,00	39.291.281,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.900.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.100.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.100.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.280.000,00	180.280.000,00	180.280.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.280.000,00	135.280.000,00	135.280.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.860.000,00	381.860.000,00	381.860.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.860.000,00	41.860.000,00	41.860.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.443.710.310,00	45.326.176.732,00	20.228.291.262,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	39.481.525.348,00	39.363.991.770,00	14.426.506.300,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	582.748.282,00	582.748.282,00	582.748.282,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	65.892.400,00	65.892.400,00	65.892.400,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	65.892.400,00	65.892.400,00	65.892.400,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	516.855.882,00	516.855.882,00	516.855.882,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	126.579.472,00	126.579.472,00	126.579.472,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	358.000.000,00	358.000.000,00	358.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	27.476.410,00	27.476.410,00	27.476.410,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.133.375.066,00	1.133.375.066,00	1.133.375.066,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.066.009.466,00	1.066.009.466,00	1.066.009.466,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	21.010.000,00	21.010.000,00	21.010.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	93.923.000,00	93.923.000,00	93.923.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	21.998.000,00	21.998.000,00	21.998.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	71.782.900,00	71.782.900,00	71.782.900,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	563.557.256,00	563.557.256,00	563.557.256,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10.414.570,00	10.414.570,00	10.414.570,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	21.710.000,00	21.710.000,00	21.710.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	61.713.740,00	61.713.740,00	61.713.740,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	67.365.600,00	67.365.600,00	67.365.600,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	67.365.600,00	67.365.600,00	67.365.600,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.506.267.120,00	7.506.267.120,00	7.506.267.120,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.506.267.120,00	7.506.267.120,00	7.506.267.120,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	41.121.860,00	41.121.860,00	41.121.860,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	73.382.360,00	73.382.360,00	73.382.360,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.357.027.900,00	7.357.027.900,00	7.357.027.900,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	34.735.000,00	34.735.000,00	34.735.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	96.229.684,00	96.229.684,00	96.229.684,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	89.779.684,00	89.779.684,00	89.779.684,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	55.880.684,00	55.880.684,00	55.880.684,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	3.499.000,00	3.499.000,00	3.499.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.087.905.196,00	29.970.371.618,00	5.032.886.148,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	100.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	100.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.144.679.996,00	4.027.146.418,00	4.089.660.948,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.144.679.996,00	4.027.146.418,00	4.089.660.948,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.900.000,00	241.900.000,00	241.900.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.200.000.000,00	25.200.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	25.100.000.000,00	25.100.000.000,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.025.200,00	284.025.200,00	284.025.200,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.025.200,00	242.025.200,00	242.025.200,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.300.000,00	217.300.000,00	217.300.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.300.000,00	83.300.000,00	83.300.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.962.184.962,00	5.962.184.962,00	5.801.784.962,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.962.184.962,00	5.962.184.962,00	5.801.784.962,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	1.773.165.900,00	1.773.165.900,00	1.612.765.900,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	1.773.165.900,00	1.773.165.900,00	1.612.765.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1.773.165.900,00	1.773.165.900,00	1.612.765.900,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	73.336.940,00	73.336.940,00	73.336.940,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	73.336.940,00	73.336.940,00	73.336.940,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	19.780.000,00	19.780.000,00	19.780.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	26.848.130,00	26.848.130,00	26.848.130,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	26.708.810,00	26.708.810,00	26.708.810,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.559.254.852,00	3.559.254.852,00	3.559.254.852,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.559.254.852,00	3.559.254.852,00	3.559.254.852,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	19.460.000,00	19.460.000,00	19.460.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	17.640.000,00	17.640.000,00	17.640.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.272.561.800,00	3.272.561.800,00	3.272.561.800,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	82.199.772,00	82.199.772,00	82.199.772,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	61.250.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	22.750.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	11.593.280,00	11.593.280,00	11.593.280,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	556.427.270,00	556.427.270,00	556.427.270,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	556.427.270,00	556.427.270,00	556.427.270,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24.945.600,00	24.945.600,00	24.945.600,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	31.481.670,00	31.481.670,00	31.481.670,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000						Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	10.687.547.381,00	10.717.605.622,00	13.071.204.927,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.263.482.019,00	10.293.540.260,00	12.647.139.565,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.310.543.621,00	4.430.543.621,00	6.730.543.621,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	4.290.543.621,00	4.410.543.621,00	6.710.543.621,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.275.543.621,00	4.395.543.621,00	6.695.543.621,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	215.000.000,00	215.000.000,00	315.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	145.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	25.000.000,00	25.000.000,00	125.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.597.938.398,00	5.507.996.639,00	5.461.595.944,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.793.288.398,00	4.653.346.639,00	4.606.945.944,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.793.288.398,00	4.653.346.639,00	4.606.945.944,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.875.000,00	118.875.000,00	118.875.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.550.000,00	26.550.000,00	26.550.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.775.000,00	63.775.000,00	63.775.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.175.000,00	566.675.000,00	566.675.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.275.000,00	88.775.000,00	88.775.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.900.000,00	467.900.000,00	467.900.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.600.000,00	166.100.000,00	166.100.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.500.000,00	86.500.000,00	86.500.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.100.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.31.3.32.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	424.065.362,00	424.065.362,00	424.065.362,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	424.065.362,00	424.065.362,00	424.065.362,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	24.065.362,00	24.065.362,00	24.065.362,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	24.065.362,00	24.065.362,00	24.065.362,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	24.065.362,00	24.065.362,00	24.065.362,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	34.452.190.573,00	33.713.597.352,00	34.765.763.772,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.263.182.892,00	23.524.589.671,00	23.506.756.091,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	24.263.182.892,00	23.524.589.671,00	23.506.756.091,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.008.182.892,00	23.269.589.671,00	23.251.756.091,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.349.216.382,00	21.610.623.161,00	21.592.789.581,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.349.216.382,00	21.610.623.161,00	21.592.789.581,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.206.510,00	428.606.510,00	428.606.510,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.000.000,00	145.500.000,00	145.500.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.206.510,00	163.006.510,00	163.006.510,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.031.462.608,00	948.062.608,00	948.062.608,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	856.662.608,00	802.262.608,00	802.262.608,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.297.392,00	262.297.392,00	262.297.392,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.297.392,00	17.297.392,00	17.297.392,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10.189.007.681,00	10.189.007.681,00	11.259.007.681,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	810.000.000,00	810.000.000,00	910.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	780.000.000,00	780.000.000,00	880.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	590.000.000,00	590.000.000,00	690.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	510.000.000,00	510.000.000,00	610.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	9.379.007.681,00	9.379.007.681,00	10.349.007.681,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.014.024.300,00	7.061.053.381,00	8.031.053.381,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.414.024.300,00	4.461.053.381,00	5.076.053.381,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	620.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.754.024.300,00	3.801.053.381,00	4.416.053.381,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	2.505.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	2.505.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.211.023.381,00	1.063.994.300,00	1.063.994.300,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1.111.023.381,00	963.994.300,00	963.994.300,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	786.023.381,00	638.994.300,00	638.994.300,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	998.960.000,00	1.098.960.000,00	1.098.960.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	998.960.000,00	1.098.960.000,00	1.098.960.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	250.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	578.960.000,00	578.960.000,00	578.960.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000						Dinas lingkungan Hidup	20.903.500.411,00	20.284.603.544,00	20.743.858.507,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.903.500.411,00	20.284.603.544,00	20.743.858.507,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	20.903.500.411,00	20.284.603.544,00	20.743.858.507,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	180.137.516,00	180.137.516,00	180.137.516,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	32.572.936,00	32.572.936,00	32.572.936,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	32.572.936,00	32.572.936,00	32.572.936,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	147.564.580,00	147.564.580,00	147.564.580,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	57.925.380,00	57.925.380,00	57.925.380,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	89.639.200,00	89.639.200,00	89.639.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	336.099.904,00	336.099.904,00	396.099.904,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	269.549.084,00	269.549.084,00	329.549.084,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	84.614.640,00	84.614.640,00	144.614.640,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	184.934.444,00	184.934.444,00	184.934.444,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	66.550.820,00	66.550.820,00	66.550.820,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	66.550.820,00	66.550.820,00	66.550.820,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.505.858.871,00	1.505.858.871,00	1.525.858.871,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.505.858.871,00	1.505.858.871,00	1.525.858.871,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.433.927.763,00	1.433.927.763,00	1.433.927.763,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	71.931.108,00	71.931.108,00	91.931.108,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.590.388,00	10.590.388,00	10.590.388,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	4.276.108,00	4.276.108,00	4.276.108,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	4.276.108,00	4.276.108,00	4.276.108,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.314.280,00	6.314.280,00	6.314.280,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.314.280,00	6.314.280,00	6.314.280,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	20.718.950,00	20.718.950,00	50.718.950,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.718.950,00	20.718.950,00	50.718.950,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	20.718.950,00	20.718.950,00	50.718.950,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.694.294.109,00	9.694.294.109,00	10.066.294.109,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	9.694.294.109,00	9.694.294.109,00	10.066.294.109,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	110.505.880,00	110.505.880,00	110.505.880,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.561.296.261,00	3.561.296.261,00	3.561.296.261,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	95.697.150,00	95.697.150,00	195.697.150,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.875.031.544,00	5.875.031.544,00	6.147.031.544,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	51.763.274,00	51.763.274,00	51.763.274,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.155.800.673,00	8.536.903.806,00	8.514.158.769,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.419.466.725,00	7.800.569.857,00	7.744.824.820,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.419.466.725,00	7.800.569.857,00	7.744.824.820,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.896.548,00	190.396.548,00	223.396.548,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.710.712,00	45.710.712,00	45.710.712,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.780.636,00	13.280.636,00	13.280.636,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.225.200,00	122.225.200,00	155.225.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.586.000,00	299.586.000,00	299.586.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.586.000,00	228.586.000,00	228.586.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.851.400,00	242.351.401,00	242.351.401,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.200.000,00	174.200.001,00	174.200.001,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.651.400,00	32.651.400,00	32.651.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000						Dinas lingkungan Hidup	111.242.821,00	111.242.821,00	111.242.821,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	75.225.190,00	75.225.190,00	75.225.190,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	33.301.070,00	33.301.070,00	33.301.070,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	33.301.070,00	33.301.070,00	33.301.070,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	41.924.120,00	41.924.120,00	41.924.120,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	41.924.120,00	41.924.120,00	41.924.120,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	31.942.631,00	31.942.631,00	31.942.631,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.942.631,00	31.942.631,00	31.942.631,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	31.942.631,00	31.942.631,00	31.942.631,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	4.075.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	4.075.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	4.075.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.677.075.330,00	7.048.233.574,00	7.081.757.692,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.677.075.330,00	7.048.233.574,00	7.081.757.692,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	834.349.350,00	770.317.350,00	835.317.350,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	735.565.350,00	671.533.350,00	736.533.350,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	735.565.350,00	671.533.350,00	736.533.350,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	98.784.000,00	98.784.000,00	98.784.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	98.784.000,00	98.784.000,00	98.784.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	77.100.000,00	77.100.000,00	77.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	77.100.000,00	77.100.000,00	77.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	27.100.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	78.399.359,00	78.399.360,00	78.399.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	43.399.359,00	43.399.360,00	43.399.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15.149.359,00	15.149.360,00	15.149.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.687.226.621,00	6.122.416.864,00	6.090.940.982,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.271.271.680,00	4.642.429.923,00	4.675.954.041,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.271.271.680,00	4.642.429.923,00	4.675.954.041,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.414.447,00	397.414.447,00	377.404.447,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.578.517,00	147.578.517,00	147.578.517,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.985.000,00	17.985.000,00	17.985.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.850.930,00	221.850.930,00	201.840.930,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.000.000,00	255.334.500,00	220.334.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.000.000,00	255.334.500,00	220.334.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.337.994,00	619.737.994,00	609.747.994,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.337.994,00	479.737.994,00	469.747.994,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.202.500,00	202.500.000,00	202.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.702.500,00	156.000.000,00	156.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.949.911.115,00	16.744.386.364,00	16.791.726.884,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	763.570.903,00	763.570.903,00	908.570.903,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	363.102.000,00	363.102.000,00	508.102.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	126.500.000,00	126.500.000,00	126.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	34.920.000,00	34.920.000,00	34.920.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	91.580.000,00	91.580.000,00	91.580.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.160.000,00	51.160.000,00	51.160.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	21.850.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	29.310.000,00	29.310.000,00	29.310.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	185.442.000,00	185.442.000,00	330.442.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.292.000,00	92.292.000,00	237.292.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	93.150.000,00	93.150.000,00	93.150.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	96.400.000,00	96.400.000,00	96.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	96.400.000,00	96.400.000,00	96.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.900.000,00	46.900.000,00	46.900.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	141.418.903,00	141.418.903,00	141.418.903,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.598.903,00	30.598.903,00	30.598.903,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.598.903,00	30.598.903,00	30.598.903,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.820.000,00	110.820.000,00	110.820.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.820.000,00	26.820.000,00	26.820.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	103.150.000,00	103.150.000,00	103.150.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	103.150.000,00	103.150.000,00	103.150.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	39.450.000,00	39.450.000,00	39.450.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	63.700.000,00	63.700.000,00	63.700.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.186.340.212,00	15.980.815.461,00	15.883.155.981,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	444.298.800,00	444.298.800,00	444.298.800,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	38.992.300,00	38.992.300,00	38.992.300,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	9.999.300,00	9.999.300,00	9.999.300,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	28.993.000,00	28.993.000,00	28.993.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	405.306.500,00	405.306.500,00	405.306.500,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	50.828.500,00	50.828.500,00	50.828.500,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.078.000,00	60.078.000,00	60.078.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	168.400.000,00	168.400.000,00	168.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.099.239.956,00	5.099.239.956,00	5.099.239.956,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.646.345.100,00	1.646.345.100,00	1.646.345.100,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	42.520.000,00	42.520.000,00	42.520.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	806.515.650,00	806.515.650,00	806.515.650,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	169.600.000,00	169.600.000,00	169.600.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	19.550.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	248.159.450,00	248.159.450,00	248.159.450,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	835.655.350,00	835.655.350,00	835.655.350,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	795.000.000,00	795.000.000,00	795.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40.655.350,00	40.655.350,00	40.655.350,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.278.599.946,00	2.278.599.946,00	2.278.599.946,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.047.487.201,00	2.047.487.201,00	2.047.487.201,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	19.260.000,00	19.260.000,00	19.260.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	7.880.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.516.000,00	45.516.000,00	45.516.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	19.916.000,00	19.916.000,00	19.916.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	40.616.000,00	40.616.000,00	40.616.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	16.040.000,00	16.040.000,00	16.040.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	16.809.600,00	16.809.600,00	16.809.600,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	13.675.145,00	13.675.145,00	13.675.145,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	338.639.560,00	338.639.560,00	338.639.560,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	15.849.560,00	15.849.560,00	15.849.560,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	322.790.000,00	322.790.000,00	322.790.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.049.723.600,00	5.049.723.600,00	5.049.723.600,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	548.400.000,00	548.400.000,00	548.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.501.323.600,00	4.501.323.600,00	4.501.323.600,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13.261.800,00	13.261.800,00	13.261.800,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13.261.800,00	13.261.800,00	13.261.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.034.000.000,00	2.034.000.000,00	2.034.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.440.800.000,00	2.440.800.000,00	2.440.800.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.593.077.856,00	5.387.553.105,00	5.289.893.625,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.728.495.395,00	4.522.970.644,00	4.425.311.164,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.728.495.395,00	4.522.970.644,00	4.425.311.164,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.192.461,00	315.167.761,00	315.167.761,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.500.000,00	54.196.000,00	54.196.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.880.000,00	10.159.300,00	10.159.300,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.260.000,00	21.260.000,00	21.260.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.892.461,00	218.892.461,00	218.892.461,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.160.000,00	398.184.700,00	398.184.700,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.760.000,00	363.784.700,00	363.784.700,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.830.000,00	148.830.000,00	148.830.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.830.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	10.206.744.835,00	9.861.427.071,00	11.288.875.293,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.159.604.835,00	9.814.287.071,00	11.241.735.293,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.077.667.558,00	3.029.667.558,00	4.254.667.558,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.077.667.558,00	3.029.667.558,00	4.254.667.558,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	115.000.000,00	115.000.000,00	190.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	94.900.000,00	94.900.000,00	144.900.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	136.577.750,00	136.577.750,00	136.577.750,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	28.371.490,00	28.371.490,00	28.371.490,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.674.632.718,00	2.626.632.718,00	3.726.632.718,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	11.885.600,00	11.885.600,00	11.885.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.155.159.410,00	1.155.159.410,00	1.222.159.410,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.095.159.410,00	1.095.159.410,00	1.162.159.410,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	14.927.900,00	14.927.900,00	14.927.900,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.067.931.510,00	1.067.931.510,00	1.134.931.510,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.926.777.867,00	5.629.460.103,00	5.764.908.325,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.591.761.401,00	4.294.443.637,00	4.429.891.859,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.521.201.401,00	4.223.883.637,00	4.359.331.859,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.560.000,00	70.560.000,00	70.560.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	367.603.720,00	367.603.720,00	367.603.720,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	367.603.720,00	367.603.720,00	367.603.720,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.202.341,00	219.202.341,00	210.274.341,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.602.341,00	67.602.341,00	67.602.341,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.600.000,00	81.600.000,00	72.672.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.400.000,00	392.400.000,00	401.328.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.000.000,00	89.000.000,00	89.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282.000.000,00	282.000.000,00	290.928.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.810.405,00	355.810.405,00	355.810.405,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.518.869,00	88.518.869,00	88.518.869,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.780.000,00	45.780.000,00	45.780.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.455.999,00	32.455.999,00	32.455.999,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.900.000,00	81.900.000,00	81.900.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.155.537,00	92.155.537,00	92.155.537,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	22.260.000,00	22.260.000,00	22.260.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	22.260.000,00	22.260.000,00	22.260.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.260.000,00	22.260.000,00	22.260.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	22.260.000,00	22.260.000,00	22.260.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	24.880.000,00	24.880.000,00	24.880.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	24.880.000,00	24.880.000,00	24.880.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.880.000,00	24.880.000,00	24.880.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24.880.000,00	24.880.000,00	24.880.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.493.340.633,00	4.581.865.800,00	4.553.740.487,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.493.340.633,00	4.581.865.800,00	4.553.740.487,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	65.379.400,00	65.379.400,00	65.379.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.479.400,00	8.479.400,00	8.479.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	8.479.400,00	8.479.400,00	8.479.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	56.900.000,00	56.900.000,00	56.900.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	56.900.000,00	56.900.000,00	56.900.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	77.466.900,00	77.466.900,00	77.466.900,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	77.466.900,00	77.466.900,00	77.466.900,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	77.466.900,00	77.466.900,00	77.466.900,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	38.228.040,00	38.228.040,00	38.228.040,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.228.040,00	38.228.040,00	38.228.040,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	38.228.040,00	38.228.040,00	38.228.040,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.303.816.293,00	4.392.341.460,00	4.364.216.147,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.733.375.051,00	2.821.900.218,00	2.793.774.905,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.733.375.051,00	2.821.900.218,00	2.793.774.905,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.969.346,00	260.969.346,00	260.969.346,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.237.405,00	22.237.405,00	22.237.405,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.577.121,00	109.577.121,00	109.577.121,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.154.820,00	28.154.820,00	28.154.820,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.400.000,00	150.400.000,00	150.400.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.400.000,00	100.400.000,00	100.400.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	929.781.892,00	929.781.892,00	929.781.892,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.087.420,00	134.087.420,00	134.087.420,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	791.694.472,00	791.694.472,00	791.694.472,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.290.004,00	199.290.004,00	199.290.004,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.290.004,00	33.290.004,00	33.290.004,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	6.641.170.141,00	6.553.874.347,00	6.563.090.704,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	972.211.778,00	972.211.778,00	972.211.778,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	972.211.778,00	972.211.778,00	972.211.778,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	516.341.634,00	516.341.634,00	516.341.634,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	445.915.378,00	445.915.378,00	445.915.378,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	36.307.880,00	36.307.880,00	36.307.880,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	34.118.376,00	34.118.376,00	34.118.376,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	455.870.144,00	455.870.144,00	455.870.144,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	16.029.000,00	16.029.000,00	16.029.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	54.783.510,00	54.783.510,00	54.783.510,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	375.057.634,00	375.057.634,00	375.057.634,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5.668.958.363,00	5.581.662.569,00	5.590.878.926,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	197.329.969,00	197.329.969,00	197.329.969,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	163.346.119,00	163.346.119,00	163.346.119,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	163.346.119,00	163.346.119,00	163.346.119,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	33.983.850,00	33.983.850,00	33.983.850,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	33.983.850,00	33.983.850,00	33.983.850,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.471.628.394,00	5.384.332.600,00	5.393.548.957,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.452.771.802,00	4.365.476.008,00	4.374.692.365,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.452.771.802,00	4.365.476.008,00	4.374.692.365,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.800.000,00	151.800.000,00	151.800.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.800.000,00	116.800.000,00	116.800.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.900.000,00	708.900.000,00	708.900.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	576.900.000,00	576.900.000,00	576.900.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.156.592,00	158.156.592,00	158.156.592,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.156.592,00	48.156.592,00	48.156.592,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11.562.663.845,00	11.131.155.042,00	13.100.440.111,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.684.852.553,00	2.684.852.553,00	4.344.852.553,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.633.708.953,00	2.633.708.953,00	4.293.708.953,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.276.455.280,00	1.276.455.280,00	2.836.455.280,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	27.134.680,00	27.134.680,00	27.134.680,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.249.320.600,00	1.249.320.600,00	2.809.320.600,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.317.253.673,00	1.317.253.673,00	1.417.253.673,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	49.389.673,00	49.389.673,00	49.389.673,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.267.864.000,00	1.267.864.000,00	1.367.864.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	51.143.600,00	51.143.600,00	51.143.600,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	19.143.600,00	19.143.600,00	19.143.600,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	19.143.600,00	19.143.600,00	19.143.600,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8.877.811.292,00	8.446.302.489,00	8.755.587.558,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.877.811.292,00	8.446.302.489,00	8.755.587.558,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.551.613.553,00	1.526.613.553,00	1.626.613.553,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.340.888.960,00	1.315.888.960,00	1.315.888.960,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.339.246.000,00	1.314.246.000,00	1.314.246.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.642.960,00	1.642.960,00	1.642.960,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	189.664.893,00	189.664.893,00	289.664.893,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	189.664.893,00	189.664.893,00	289.664.893,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	21.059.700,00	21.059.700,00	21.059.700,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	21.059.700,00	21.059.700,00	21.059.700,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	843.704.776,00	843.704.776,00	843.704.776,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	843.704.776,00	843.704.776,00	843.704.776,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	142.791.378,00	142.791.378,00	142.791.378,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	40.793.628,00	40.793.628,00	40.793.628,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	57.406.770,00	57.406.770,00	57.406.770,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	335.637.000,00	335.637.000,00	335.637.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	267.076.000,00	267.076.000,00	267.076.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	186.361.670,00	186.361.670,00	286.361.670,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	186.361.670,00	186.361.670,00	286.361.670,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	186.361.670,00	186.361.670,00	286.361.670,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	319.689.000,00	319.689.000,00	319.689.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	118.329.000,00	118.329.000,00	118.329.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	42.448.000,00	42.448.000,00	42.448.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	41.381.000,00	41.381.000,00	41.381.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	201.360.000,00	201.360.000,00	201.360.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	142.690.000,00	142.690.000,00	142.690.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	58.670.000,00	58.670.000,00	58.670.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.976.442.293,00	5.569.933.490,00	5.679.218.559,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.336.963.213,00	4.905.454.410,00	5.014.739.479,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.336.963.213,00	4.905.454.410,00	5.014.739.479,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.717.080,00	64.717.080,00	64.717.080,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.834.680,00	13.834.680,00	13.834.680,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.282.400,00	37.282.400,00	37.282.400,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.762.000,00	410.762.000,00	410.762.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.000.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.262.000,00	220.262.000,00	220.262.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000						Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.025.896.939,00	14.778.641.228,00	15.112.393.286,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.052.089.043,00	1.052.089.043,00	1.552.089.042,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.052.089.043,00	1.052.089.043,00	1.552.089.042,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	14.895.260,00	14.895.260,00	14.895.260,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	14.895.260,00	14.895.260,00	14.895.260,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	14.895.260,00	14.895.260,00	14.895.260,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40.610.467,00	40.610.467,00	40.610.467,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.610.467,00	40.610.467,00	40.610.467,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.880.470,00	20.880.470,00	20.880.470,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	19.729.997,00	19.729.997,00	19.729.997,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	44.064.019,00	44.064.019,00	94.064.018,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.064.019,00	44.064.019,00	94.064.018,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	44.064.019,00	44.064.019,00	94.064.018,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	152.519.297,00	152.519.297,00	602.519.297,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	152.519.297,00	152.519.297,00	602.519.297,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	152.519.297,00	152.519.297,00	602.519.297,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13.973.807.896,00	13.726.552.185,00	13.560.304.244,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	13.973.807.896,00	13.726.552.185,00	13.560.304.244,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	31.650.438,00	61.650.438,00	61.650.438,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	31.650.438,00	61.650.438,00	61.650.438,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	31.650.438,00	61.650.438,00	61.650.438,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.213.466.650,00	1.103.466.650,00	1.103.466.651,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.184.801.028,00	1.059.801.028,00	1.059.801.029,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.114.800.828,00	989.800.828,00	989.800.829,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	70.000.200,00	70.000.200,00	70.000.200,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	28.665.622,00	43.665.622,00	43.665.622,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	16.007.926,00	31.007.926,00	31.007.926,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12.657.696,00	12.657.696,00	12.657.696,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.670.806.018,00	1.597.206.018,00	1.597.206.018,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.630.000.000,00	1.542.000.000,00	1.542.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.630.000.000,00	1.542.000.000,00	1.542.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	40.806.018,00	55.206.018,00	55.206.018,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40.806.018,00	55.206.018,00	55.206.018,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	21.448.421,00	35.048.421,00	35.048.421,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.448.421,00	35.048.421,00	35.048.421,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	21.448.421,00	35.048.421,00	35.048.421,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	57.263.135,00	58.313.135,00	58.313.135,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	57.263.135,00	58.313.135,00	58.313.135,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	37.635.585,00	38.685.585,00	38.685.585,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	19.627.550,00	19.627.550,00	19.627.550,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	9.155.396,00	9.155.396,00	9.155.396,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	9.155.396,00	9.155.396,00	9.155.396,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9.155.396,00	9.155.396,00	9.155.396,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.970.017.838,00	10.861.712.127,00	10.695.464.185,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.097.555.684,00	7.900.299.973,00	7.784.052.031,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.097.555.684,00	7.900.299.973,00	7.784.052.031,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.703.000,00	150.703.000,00	150.703.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.750.400,00	19.750.400,00	19.750.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.265.600,00	87.265.600,00	87.265.600,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.692.140.723,00	2.705.140.723,00	2.655.140.723,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	987.500,00	987.500,00	987.500,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	994.065.332,00	1.039.065.332,00	989.065.332,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.697.087.891,00	1.665.087.891,00	1.665.087.891,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.668.431,00	101.618.431,00	101.618.431,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.857.830,00	70.857.830,00	70.857.830,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.060.601,00	7.060.601,00	7.060.601,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001						Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	745.560.804,00	775.560.804,00	775.560.804,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	745.560.804,00	775.560.804,00	775.560.804,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	745.560.804,00	775.560.804,00	775.560.804,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	618.787.988,00	648.787.988,00	648.787.988,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	563.901.928,00	593.901.928,00	593.901.928,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	395.931.868,00	395.931.868,00	395.931.868,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	38.420.000,00	68.420.000,00	68.420.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	129.550.060,00	129.550.060,00	129.550.060,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	54.886.060,00	54.886.060,00	54.886.060,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	54.886.060,00	54.886.060,00	54.886.060,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.772.816,00	126.772.816,00	126.772.816,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.622.816,00	56.622.816,00	56.622.816,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.696.678,00	9.696.678,00	9.696.678,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.919.300,00	5.919.300,00	5.919.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.966.838,00	38.966.838,00	38.966.838,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.960.000,00	58.960.000,00	58.960.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.960.000,00	58.960.000,00	58.960.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.190.000,00	11.190.000,00	11.190.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002						Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	472.563.596,00	472.563.596,00	472.563.596,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.657.396,00	74.657.396,00	74.657.396,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.826.596,00	12.826.596,00	12.826.596,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.820.000,00	6.820.000,00	6.820.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.690.800,00	52.690.800,00	52.690.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.340.000,00	21.340.000,00	21.340.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.040.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	344.066.200,00	344.066.200,00	344.066.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	120.456.900,00	120.456.900,00	120.456.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	149.405.300,00	149.405.300,00	149.405.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	74.204.000,00	74.204.000,00	74.204.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003						Bagian Hukum Sekretariat Daerah	411.647.068,00	436.647.068,00	536.647.068,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	304.845.950,00	329.845.950,00	429.845.950,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	304.845.950,00	329.845.950,00	429.845.950,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	129.442.500,00	129.442.500,00	164.442.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	65.695.000,00	90.695.000,00	120.695.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	109.708.450,00	109.708.450,00	144.708.450,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.801.118,00	106.801.118,00	106.801.118,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.101.118,00	64.101.118,00	64.101.118,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.683.968,00	6.683.968,00	6.683.968,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.198.150,00	6.198.150,00	6.198.150,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.219.000,00	6.219.000,00	6.219.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004						Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	3.629.512.411,00	3.629.512.411,00	3.679.512.411,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.500.829.332,00	3.500.829.332,00	3.550.829.332,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.500.829.332,00	3.500.829.332,00	3.550.829.332,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.287.029.082,00	3.287.029.082,00	3.337.029.082,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	138.840.972,00	138.840.972,00	138.840.972,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	74.959.278,00	74.959.278,00	74.959.278,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.683.079,00	128.683.079,00	128.683.079,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.615.007,00	37.615.007,00	37.615.007,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.436.967,00	11.436.967,00	11.436.967,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.477.340,00	4.477.340,00	4.477.340,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.500.700,00	20.500.700,00	20.500.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.269.660,00	70.269.660,00	70.269.660,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.769.660,00	69.769.660,00	69.769.660,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.798.412,00	20.798.412,00	20.798.412,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.798.412,00	13.798.412,00	13.798.412,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005						Bagian Umum Sekretariat Daerah	37.634.035.337,00	34.848.098.946,00	34.299.133.709,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.429.944.074,00	20.319.918.610,00	19.670.953.373,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.429.944.074,00	20.319.918.610,00	19.670.953.373,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.568.000.000,00	3.733.280.002,00	3.733.280.002,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000.000,00	2.223.939.100,00	2.223.939.100,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.190.000.000,00	1.235.340.902,00	1.235.340.902,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.544.956.580,00	3.359.676.580,00	3.409.676.580,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	581.098.080,00	581.098.080,00	581.098.080,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.936.858.500,00	2.751.578.500,00	2.801.578.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.310.498.772,00	2.440.498.772,00	2.490.498.772,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.156.687,00	510.156.687,00	510.156.687,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	110.000.000,00	110.000.000,00	160.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.150.342.085,00	1.250.342.085,00	1.250.342.085,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.030.635.911,00	2.379.724.982,00	2.379.724.982,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.045.115.040,00	1.419.204.111,00	1.419.204.111,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35.520.871,00	35.520.871,00	35.520.871,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.000.000.000,00	1.865.000.000,00	1.865.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	500.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006						Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	993.684.273,00	993.684.273,00	993.684.273,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	895.454.118,00	895.454.118,00	895.454.118,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	393.203.672,00	393.203.672,00	393.203.672,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	180.072.314,00	180.072.314,00	180.072.314,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	213.131.358,00	213.131.358,00	213.131.358,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	502.250.446,00	502.250.446,00	502.250.446,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	476.788.508,00	476.788.508,00	476.788.508,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25.461.938,00	25.461.938,00	25.461.938,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.230.155,00	98.230.155,00	98.230.155,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.010.000,00	57.010.000,00	57.010.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.530.000,00	41.530.000,00	41.530.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.023.000,00	29.023.000,00	29.023.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.423.000,00	27.423.000,00	27.423.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.197.155,00	12.197.155,00	12.197.155,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.197.155,00	9.197.155,00	9.197.155,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	970.982.166,00	970.982.166,00	1.170.982.166,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.261.573,00	370.736.448,00	570.736.448,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.700.398,00	92.700.398,00	92.700.398,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.606.975,00	36.606.975,00	136.606.975,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.249.000,00	7.249.000,00	7.249.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.705.200,00	234.180.075,00	334.180.075,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.186.000,00	127.186.000,00	127.186.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.186.000,00	127.186.000,00	127.186.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.615.000,00	37.215.000,00	37.215.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.800.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.900.000,00	67.900.000,00	67.900.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	401.019.593,00	367.944.718,00	367.944.718,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	120.537.025,00	121.812.025,00	121.812.025,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	209.048.633,00	209.048.633,00	209.048.633,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	71.433.935,00	37.084.060,00	37.084.060,00
4.01.0.00.0.00.01.0008						Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	615.917.153,00	765.917.153,00	715.917.153,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	462.778.772,00	612.778.772,00	562.778.772,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	462.778.772,00	612.778.772,00	562.778.772,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	16.772.179,00	16.772.179,00	16.772.179,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	335.984.403,00	485.984.403,00	435.984.403,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	110.022.190,00	110.022.190,00	110.022.190,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.138.381,00	153.138.381,00	153.138.381,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.775.494,00	82.775.494,00	82.775.494,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.275.494,00	10.275.494,00	10.275.494,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.280.000,00	58.280.000,00	58.280.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.129.801,00	21.129.801,00	21.129.801,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.869.801,00	1.869.801,00	1.869.801,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.260.000,00	19.260.000,00	19.260.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.233.086,00	49.233.086,00	49.233.086,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.233.086,00	39.233.086,00	39.233.086,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	318.611.656,00	318.611.656,00	318.611.656,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	147.111.656,00	147.111.656,00	147.111.656,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	147.111.656,00	147.111.656,00	147.111.656,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	77.271.156,00	77.271.156,00	77.271.156,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	27.557.500,00	27.557.500,00	27.557.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	42.283.000,00	42.283.000,00	42.283.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.500.000,00	171.500.000,00	171.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.500.000,00	93.500.000,00	93.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.946.613.210,00	45.099.487.452,00	46.091.849.325,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	44.946.613.210,00	45.099.487.452,00	46.091.849.325,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.131.455.000,00	4.131.455.000,00	4.231.455.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	412.000.000,00	412.000.000,00	412.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	2.301.320.000,00	2.301.320.000,00	2.401.320.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.550.260.000,00	1.550.260.000,00	1.550.260.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	172.800.000,00	172.800.000,00	172.800.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	383.260.000,00	383.260.000,00	483.260.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.378.135.000,00	1.378.135.000,00	1.378.135.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	1.378.135.000,00	1.378.135.000,00	1.378.135.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.815.158.210,00	40.968.032.452,00	41.860.394.325,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.656.864.307,00	3.309.738.549,00	3.243.100.422,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.656.864.307,00	3.309.738.549,00	3.243.100.422,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241.000.000,00	241.000.000,00	241.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	241.000.000,00	241.000.000,00	241.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.800.000,00	297.800.000,00	297.800.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.575.144.470,00	1.575.144.470,00	1.575.144.470,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.502.144.470,00	1.502.144.470,00	1.502.144.470,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	856.288.688,00	856.288.688,00	1.026.288.688,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	616.288.688,00	616.288.688,00	716.288.688,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	110.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.800.619.594,00	27.800.619.594,00	27.800.619.594,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	27.776.249.594,00	27.776.249.594,00	27.776.249.594,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	24.370.000,00	24.370.000,00	24.370.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	5.912.441.151,00	6.412.441.151,00	7.301.441.151,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5.912.441.151,00	6.412.441.151,00	7.301.441.151,00
5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.767.538.823,00	8.663.446.918,00	8.433.655.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.767.538.823,00	8.663.446.918,00	8.433.655.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	8.498.228.823,00	8.394.136.918,00	8.164.345.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	360.739.320,00	360.739.320,00	360.739.320,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	237.798.000,00	237.798.000,00	237.798.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	52.458.000,00	52.458.000,00	52.458.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	185.340.000,00	185.340.000,00	185.340.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	104.246.000,00	104.246.000,00	104.246.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	104.246.000,00	104.246.000,00	104.246.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	18.695.320,00	18.695.320,00	18.695.320,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	18.695.320,00	18.695.320,00	18.695.320,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	645.739.254,00	645.739.254,00	645.739.254,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	241.329.540,00	241.329.540,00	241.329.540,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	66.078.380,00	66.078.380,00	66.078.380,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	175.251.160,00	175.251.160,00	175.251.160,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	173.336.592,00	173.336.592,00	173.336.592,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	137.146.592,00	137.146.592,00	137.146.592,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	36.190.000,00	36.190.000,00	36.190.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	231.073.122,00	231.073.122,00	231.073.122,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	126.593.954,00	126.593.954,00	126.593.954,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	104.479.168,00	104.479.168,00	104.479.168,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.491.750.249,00	7.387.658.344,00	7.157.866.726,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.550.768,00	9.550.768,00	9.550.768,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.025.768,00	6.025.768,00	6.025.768,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.477.809.955,00	6.373.718.050,00	6.143.926.432,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.477.809.955,00	6.373.718.050,00	6.143.926.432,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.168.800,00	212.168.800,00	212.168.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.168.800,00	109.168.800,00	109.168.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.775.300,00	618.775.300,00	618.775.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	486.275.300,00	486.275.300,00	486.275.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.445.426,00	173.445.426,00	173.445.426,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.583.052,00	109.583.052,00	109.583.052,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.362.374,00	25.362.374,00	25.362.374,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	269.310.000,00	269.310.000,00	269.310.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	269.310.000,00	269.310.000,00	269.310.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	191.714.200,00	191.714.200,00	191.714.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	62.950.000,00	62.950.000,00	62.950.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	24.574.200,00	24.574.200,00	24.574.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	104.190.000,00	104.190.000,00	104.190.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	77.595.800,00	77.595.800,00	77.595.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	47.420.800,00	47.420.800,00	47.420.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.02	0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	14.825.000,00	14.825.000,00	14.825.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000						Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	450.382.207.311,00	450.868.536.050,00	439.844.368.322,50
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02				KEUANGAN	450.382.207.311,00	450.868.536.050,00	439.844.368.322,50
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	377.155.836.408,00	377.130.739.128,00	377.908.213.678,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	231.912.004,00	231.912.004,00	231.912.004,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.000.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.000.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	18.150.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	98.062.004,00	101.362.004,00	101.362.004,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	230.931.200,00	205.833.920,00	205.833.920,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	230.931.200,00	205.833.920,00	205.833.920,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	111.470.604,00	111.470.604,00	103.045.154,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	111.470.604,00	111.470.604,00	103.045.154,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	376.441.752.600,00	376.441.752.600,00	377.197.652.600,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	358.110.134.000,00	358.110.134.000,00	358.866.034.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.881.618.600,00	14.881.618.600,00	14.881.618.600,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	139.770.000,00	139.770.000,00	169.770.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	139.770.000,00	139.770.000,00	169.770.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	784.214.403,00	761.832.513,00	761.832.513,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	784.214.403,00	761.832.513,00	761.832.513,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	27.399.250,00	25.066.000,00	25.066.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	472.221.553,00	452.172.913,00	452.172.913,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	227.406.500,00	227.406.500,00	227.406.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	57.187.100,00	57.187.100,00	57.187.100,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.995.175.662,00	2.990.115.662,00	2.990.115.662,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.995.175.662,00	2.990.115.662,00	2.990.115.662,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	433.995.571,00	433.995.571,00	433.995.571,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	934.545.091,00	941.545.091,00	941.545.091,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.626.635.000,00	1.614.575.000,00	1.614.575.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.446.980.838,00	69.985.848.747,00	58.184.206.469,50
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.443.689.356,00	44.098.659.297,00	39.074.833.860,50
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.443.689.356,00	44.098.659.297,00	39.074.833.860,50
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	609.836.047,00	947.375.217,00	962.375.217,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.737.165,00	249.127.165,00	264.127.165,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	221.000.000,00	316.640.000,00	316.640.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.098.882,00	357.608.052,00	357.608.052,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.970.546.000,00	3.966.546.000,00	3.966.546.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	470.546.000,00	466.546.000,00	466.546.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.104.109.435,00	20.474.468.233,00	13.634.651.392,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.983.558.043,00	19.334.916.841,00	12.495.100.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.112.551.392,00	1.128.551.392,00	1.128.551.392,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.800.000,00	498.800.000,00	545.800.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.800.000,00	198.800.000,00	245.800.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0001						Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.03.0.00.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian Daerah	7.337.651.578,00	6.954.247.871,00	7.152.627.094,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	7.337.651.578,00	6.954.247.871,00	7.152.627.094,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.667.669.481,00	1.667.669.481,00	1.882.864.481,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	336.537.991,00	336.537.991,00	336.537.991,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	6.433.000,00	6.433.000,00	6.433.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	95.523.100,00	95.523.100,00	95.523.100,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	38.233.010,00	38.233.010,00	38.233.010,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	164.348.881,00	164.348.881,00	164.348.881,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	376.758.500,00	376.758.500,00	452.758.500,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6.148.500,00	6.148.500,00	6.148.500,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	370.610.000,00	370.610.000,00	446.610.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	895.569.000,00	895.569.000,00	1.034.764.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	40.001.500,00	40.001.500,00	40.001.500,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	837.569.000,00	837.569.000,00	976.764.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	7.998.500,00	7.998.500,00	7.998.500,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	58.803.990,00	58.803.990,00	58.803.990,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.566.990,00	8.566.990,00	8.566.990,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	8.241.000,00	8.241.000,00	8.241.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	31.796.000,00	31.796.000,00	31.796.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.669.982.097,00	5.286.578.390,00	5.269.762.613,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.999.908,00	3.999.908,00	3.999.908,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.908,00	1.999.908,00	1.999.908,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.930.538.598,00	4.533.134.891,00	4.516.319.114,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.868.738.598,00	4.485.334.891,00	4.468.519.114,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.800.000,00	47.800.000,00	47.800.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.140.691,00	258.940.691,00	256.740.691,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.330.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.199.692,00	49.199.692,00	49.199.692,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.999.880,00	59.999.880,00	59.999.880,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.611.119,00	134.411.119,00	132.211.119,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.002.900,00	267.202.900,00	267.202.900,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.002.900,00	4.002.900,00	4.002.900,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.000.000,00	234.200.000,00	234.200.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.800.000,00	174.800.000,00	177.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	100.000.000,00	102.200.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						inspektorat	10.754.058.403,00	10.497.331.075,00	10.540.842.178,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.754.058.403,00	10.497.331.075,00	10.540.842.178,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	10.754.058.403,00	10.497.331.075,00	10.540.842.178,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	570.401.482,00	545.401.482,00	545.401.482,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	473.511.482,00	448.511.482,00	448.511.482,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	104.302.382,00	104.302.382,00	104.302.382,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	76.688.000,00	76.688.000,00	76.688.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	15.640.000,00	15.640.000,00	15.640.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	127.958.000,00	102.958.000,00	102.958.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	12.260.000,00	12.260.000,00	12.260.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	109.663.100,00	109.663.100,00	109.663.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	96.890.000,00	96.890.000,00	96.890.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27.170.000,00	27.170.000,00	27.170.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	69.720.000,00	69.720.000,00	69.720.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	75.590.000,00	105.590.000,00	105.590.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	75.590.000,00	105.590.000,00	105.590.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	11.440.000,00	11.440.000,00	11.440.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	49.040.000,00	79.040.000,00	79.040.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15.110.000,00	15.110.000,00	15.110.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.108.066.921,00	9.846.339.593,00	9.889.850.696,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.359.000,00	54.359.000,00	54.359.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.159.000,00	53.159.000,00	53.159.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.642.692.621,00	8.380.965.293,00	8.424.476.396,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.642.692.621,00	8.380.965.293,00	8.424.476.396,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.704.100,00	243.704.100,00	243.704.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.769.000,00	43.769.000,00	43.769.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.660.082,00	21.660.082,00	21.660.082,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.275.018,00	166.275.018,00	166.275.018,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.600.000,00	385.600.000,00	385.600.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.000.000,00	347.000.000,00	347.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.711.200,00	381.711.200,00	381.711.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.711.200,00	34.711.200,00	34.711.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Wonosobo	11.396.772.590,00	10.495.652.479,00	10.563.912.933,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	11.396.772.590,00	10.495.652.479,00	10.563.912.933,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	11.396.772.590,00	10.495.652.479,00	10.563.912.933,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	136.050.000,00	136.050.000,00	136.050.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.350.000,00	32.350.000,00	32.350.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.350.000,00	24.350.000,00	24.350.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	98.700.000,00	98.700.000,00	98.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	98.700.000,00	98.700.000,00	98.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	151.075.463,00	151.075.463,00	151.075.463,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.075.463,00	61.075.463,00	61.075.463,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	61.075.463,00	61.075.463,00	61.075.463,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.090.000,00	66.090.000,00	66.090.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	66.090.000,00	66.090.000,00	66.090.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	51.090.000,00	51.090.000,00	51.090.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	129.138.000,00	129.138.000,00	129.138.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	129.138.000,00	129.138.000,00	129.138.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	91.838.000,00	91.838.000,00	91.838.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.650.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18.650.000,00	18.650.000,00	18.650.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.824.419.127,00	9.923.299.016,00	9.991.559.470,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.536.952.427,00	9.635.832.316,00	9.704.092.770,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.536.952.427,00	9.635.832.316,00	9.704.092.770,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.466.700,00	91.466.700,00	91.466.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.709.900,00	6.709.900,00	6.709.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.606.800,00	10.606.800,00	10.606.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.150.000,00	40.150.000,00	40.150.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.000.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002						Kelurahan Wonosobo Barat	847.405.630,00	847.405.630,00	847.405.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	514.005.630,00	542.408.088,00	542.408.088,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	439.005.630,00	477.408.088,00	477.408.088,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	424.005.630,00	462.408.088,00	462.408.088,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	75.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	236.400.000,00	207.997.542,00	207.997.542,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.159.302,00	42.159.302,00	42.159.302,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.259.302,00	8.259.302,00	8.259.302,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.540.000,00	20.540.000,00	20.540.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.540.000,00	20.540.000,00	20.540.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.200.698,00	117.798.240,00	117.798.240,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.440.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.760.698,00	104.598.240,00	104.598.240,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003						Kelurahan Wonosobo Timur	853.332.000,00	853.332.000,00	853.332.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	673.712.800,00	692.112.800,00	692.112.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	605.382.800,00	623.782.800,00	623.782.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	594.382.800,00	612.782.800,00	612.782.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	68.330.000,00	68.330.000,00	68.330.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	68.330.000,00	68.330.000,00	68.330.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.619.200,00	117.219.200,00	117.219.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.821.600,00	23.641.000,00	23.641.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.865.000,00	2.684.400,00	2.684.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.645.700,00	8.645.700,00	8.645.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.602.400,00	2.602.400,00	2.602.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.408.500,00	4.408.500,00	4.408.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.387.600,00	75.168.200,00	75.168.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.937.600,00	62.718.200,00	62.718.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.410.000,00	18.410.000,00	18.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.040.000,00	6.040.000,00	6.040.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004						Kelurahan Jlamprang	1.001.737.267,00	1.001.737.267,00	1.001.737.267,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	722.754.378,00	722.754.378,00	722.754.378,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	633.214.378,00	633.214.378,00	633.214.378,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	321.214.378,00	321.214.378,00	321.214.378,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	89.540.000,00	89.540.000,00	89.540.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	89.540.000,00	89.540.000,00	89.540.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	203.982.889,00	203.982.889,00	203.982.889,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.965.000,00	26.965.000,00	26.965.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.685.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.417.889,00	120.417.889,00	120.417.889,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.417.889,00	112.417.889,00	112.417.889,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005						Kelurahan Kejiwan	759.297.904,00	759.297.904,00	759.297.904,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	461.219.784,00	461.219.784,00	461.219.784,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	365.630.784,00	365.630.784,00	365.630.784,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	355.630.784,00	355.630.784,00	355.630.784,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	95.589.000,00	95.589.000,00	95.589.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	95.589.000,00	95.589.000,00	95.589.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	59.560.000,00	59.560.000,00	59.560.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	59.560.000,00	59.560.000,00	59.560.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.895.000,00	15.895.000,00	15.895.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.895.000,00	15.895.000,00	15.895.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.895.000,00	15.895.000,00	15.895.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	222.623.120,00	222.623.120,00	222.623.120,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.080.320,00	29.080.320,00	29.080.320,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.580.320,00	5.580.320,00	5.580.320,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.540.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.442.800,00	141.442.800,00	141.442.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.346.800,00	13.346.800,00	13.346.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.096.000,00	126.096.000,00	126.096.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.100.000,00	52.100.000,00	52.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.800.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006						Kelurahan Sambek	867.729.483,00	867.729.483,00	867.729.483,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	460.767.478,00	460.767.478,00	460.767.478,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	307.357.478,00	307.357.478,00	307.357.478,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	295.357.478,00	295.357.478,00	295.357.478,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	153.410.000,00	153.410.000,00	153.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	153.410.000,00	153.410.000,00	153.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.950.000,00	48.950.000,00	48.950.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.950.000,00	48.950.000,00	48.950.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48.950.000,00	48.950.000,00	48.950.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.598.000,00	31.598.000,00	31.598.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.598.000,00	31.598.000,00	31.598.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	31.598.000,00	31.598.000,00	31.598.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	326.414.005,00	326.414.005,00	326.414.005,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.934.000,00	45.934.000,00	45.934.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.434.000,00	30.434.000,00	30.434.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.480.005,00	160.480.005,00	160.480.005,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.200.005,00	145.200.005,00	145.200.005,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007						Kelurahan Mlipak	727.099.993,00	727.099.993,00	727.099.993,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	410.729.183,00	405.529.183,00	405.529.183,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	307.439.545,00	302.239.545,00	302.239.545,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	297.439.545,00	292.239.545,00	292.239.545,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	103.289.638,00	103.289.638,00	103.289.638,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	103.289.638,00	103.289.638,00	103.289.638,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	76.810.810,00	76.810.810,00	76.810.810,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76.810.810,00	76.810.810,00	76.810.810,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	66.810.810,00	66.810.810,00	66.810.810,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.060.000,00	8.060.000,00	8.060.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.060.000,00	8.060.000,00	8.060.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.060.000,00	8.060.000,00	8.060.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	231.500.000,00	236.700.000,00	236.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.740.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.040.000,00	22.340.000,00	22.340.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.000.000,00	125.700.000,00	125.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.760.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.160.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008						Kelurahan Pagerkukuh	915.000.490,00	915.000.490,00	915.000.490,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	704.703.240,00	704.703.240,00	704.703.240,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	602.854.475,00	602.854.475,00	602.854.475,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.158.555,00	11.158.555,00	11.158.555,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	391.695.920,00	391.695.920,00	391.695.920,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	101.848.765,00	101.848.765,00	101.848.765,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	101.848.765,00	101.848.765,00	101.848.765,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.374.760,00	24.374.760,00	24.374.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.374.760,00	24.374.760,00	24.374.760,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.893.880,00	17.893.880,00	17.893.880,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.480.880,00	6.480.880,00	6.480.880,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.812.000,00	9.812.000,00	9.812.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.812.000,00	9.812.000,00	9.812.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9.812.000,00	9.812.000,00	9.812.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176.110.490,00	176.110.490,00	176.110.490,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.756.648,00	21.756.648,00	21.756.648,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.798.270,00	5.798.270,00	5.798.270,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.268.450,00	3.268.450,00	3.268.450,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.785.800,00	5.785.800,00	5.785.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.834.128,00	5.834.128,00	5.834.128,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.351.832,00	109.351.832,00	109.351.832,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.351.832,00	98.351.832,00	98.351.832,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.502.010,00	22.502.010,00	22.502.010,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.656.810,00	2.656.810,00	2.656.810,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.845.200,00	4.845.200,00	4.845.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0009						Kelurahan Rojoimo	879.697.040,00	879.697.040,00	879.697.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	440.440.000,00	440.440.000,00	440.440.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	385.440.000,00	385.440.000,00	385.440.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	375.440.000,00	375.440.000,00	375.440.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	410.257.040,00	410.257.040,00	410.257.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.000.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.157.040,00	124.757.040,00	124.757.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.657.040,00	114.257.040,00	114.257.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.600.000,00	228.600.000,00	228.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010						Kelurahan Kramatan	728.446.565,00	728.446.565,00	728.446.565,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	477.390.000,00	477.390.000,00	477.390.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	417.390.000,00	417.390.000,00	417.390.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407.390.000,00	407.390.000,00	407.390.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	154.556.565,00	154.556.565,00	154.556.565,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.614.405,00	18.614.405,00	18.614.405,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.994.405,00	2.994.405,00	2.994.405,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.942.160,00	93.942.160,00	93.942.160,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.142.160,00	85.142.160,00	85.142.160,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011						Kelurahan Tawangsari	656.854.499,00	656.854.499,00	656.854.499,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	355.802.570,00	355.802.570,00	355.802.570,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297.222.570,00	297.222.570,00	297.222.570,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	287.222.570,00	287.222.570,00	287.222.570,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	58.580.000,00	58.580.000,00	58.580.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	58.580.000,00	58.580.000,00	58.580.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	86.016.815,00	86.016.815,00	86.016.815,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86.016.815,00	86.016.815,00	86.016.815,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.300.595,00	78.300.595,00	78.300.595,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.716.220,00	7.716.220,00	7.716.220,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	185.035.114,00	185.035.114,00	185.035.114,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.644.000,00	15.644.000,00	15.644.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.391.114,00	128.391.114,00	128.391.114,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.780.474,00	9.780.474,00	9.780.474,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.910.640,00	117.910.640,00	117.910.640,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012						Kelurahan Jaraksari	1.226.284.453,00	1.226.284.453,00	1.226.284.453,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	834.062.430,00	834.062.430,00	834.062.430,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	753.713.430,00	753.713.430,00	753.713.430,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	583.713.430,00	583.713.430,00	583.713.430,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80.349.000,00	80.349.000,00	80.349.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.349.000,00	80.349.000,00	80.349.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	185.779.570,00	185.779.570,00	185.779.570,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	185.779.570,00	185.779.570,00	185.779.570,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	175.779.570,00	175.779.570,00	175.779.570,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	186.442.453,00	186.442.453,00	186.442.453,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.114.000,00	35.114.000,00	35.114.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.264.000,00	15.264.000,00	15.264.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.867.360,00	123.867.360,00	123.867.360,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.867.360,00	111.867.360,00	111.867.360,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.461.093,00	27.461.093,00	27.461.093,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.461.093,00	13.461.093,00	13.461.093,00
7.01.0.00.0.00.01.0013						Kelurahan Bumireso	853.304.592,00	853.304.592,00	853.304.592,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	589.804.592,00	589.804.592,00	589.804.592,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	521.804.592,00	521.804.592,00	521.804.592,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	321.804.592,00	321.804.592,00	321.804.592,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.500.000,00	218.500.000,00	218.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.360.000,00	23.360.000,00	23.360.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.040.000,00	126.040.000,00	126.040.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.840.000,00	112.840.000,00	112.840.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014						Kelurahan Kalianget	944.177.760,00	944.177.760,00	944.177.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	663.600.000,00	653.600.000,00	653.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	583.600.000,00	573.600.000,00	573.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	463.600.000,00	453.600.000,00	453.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	245.577.760,00	255.577.760,00	255.577.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.900.000,00	31.900.000,00	31.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.897.760,00	168.497.760,00	168.497.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.097.760,00	151.697.760,00	151.697.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.780.000,00	55.180.000,00	55.180.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.180.000,00	18.180.000,00	18.180.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.600.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						Kecamatan Kertek	4.828.062.296,00	4.542.649.989,00	4.540.449.431,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119.500.000,00	119.500.000,00	119.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	134.375.000,00	134.375.000,00	134.375.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	134.375.000,00	134.375.000,00	134.375.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	89.375.000,00	89.375.000,00	89.375.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.219.187.296,00	3.933.774.989,00	3.931.574.431,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.921.551.726,00	3.636.139.419,00	3.633.938.861,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.921.551.726,00	3.636.139.419,00	3.633.938.861,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.279.650,00	56.279.650,00	56.279.650,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.999.400,00	3.999.400,00	3.999.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.805.250,00	10.805.250,00	10.805.250,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.075.000,00	23.075.000,00	23.075.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.975.001,00	30.975.001,00	30.975.001,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.975.001,00	30.975.001,00	30.975.001,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.165.000,00	141.165.000,00	141.165.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.965.000,00	118.965.000,00	118.965.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.215.919,00	59.215.919,00	59.215.919,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.215.919,00	31.215.919,00	31.215.919,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0002						Kelurahan Kertek	1.155.773.454,00	1.155.773.454,00	1.155.773.454,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	880.135.950,00	880.135.950,00	880.135.950,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	825.280.325,00	823.030.325,00	823.030.325,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.823.950,00	12.823.950,00	12.823.950,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	512.456.375,00	510.206.375,00	510.206.375,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	54.855.625,00	57.105.625,00	57.105.625,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	54.855.625,00	57.105.625,00	57.105.625,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	229.637.504,00	229.637.504,00	229.637.504,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.377.504,00	48.377.504,00	48.377.504,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.253.744,00	12.253.744,00	12.253.744,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.160.660,00	7.160.660,00	7.160.660,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.313.100,00	26.313.100,00	26.313.100,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.260.000,00	67.260.000,00	67.260.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.760.000,00	53.760.000,00	53.760.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.500.000,00	106.500.000,00	106.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003						Kelurahan Wringinanom	1.016.121.410,00	1.016.121.410,00	1.016.121.410,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	705.438.225,00	705.438.225,00	707.551.750,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	622.206.225,00	622.206.225,00	626.299.750,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.353.625,00	12.353.625,00	9.322.150,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	209.852.600,00	209.852.600,00	216.977.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	83.232.000,00	83.232.000,00	81.252.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	83.232.000,00	83.232.000,00	81.252.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.624.125,00	38.624.125,00	58.810.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.624.125,00	38.624.125,00	58.810.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.444.125,00	35.444.125,00	55.630.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.487.062,00	60.487.062,00	25.927.062,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.487.062,00	60.487.062,00	25.927.062,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60.487.062,00	60.487.062,00	25.927.062,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	211.571.998,00	211.571.998,00	223.831.998,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.231.998,00	18.231.998,00	18.091.998,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.847.998,00	6.847.998,00	6.847.998,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.560.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.724.000,00	5.724.000,00	5.724.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.340.000,00	120.340.000,00	115.740.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.440.000,00	110.440.000,00	105.840.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	63.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	57.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Selomerto	4.146.560.897,00	4.000.620.291,00	3.990.146.615,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	137.075.000,00	137.075.000,00	137.075.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	137.075.000,00	137.075.000,00	137.075.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	130.575.000,00	130.575.000,00	130.575.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.707.485.897,00	3.561.545.291,00	3.551.071.615,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.361.191.947,00	3.215.251.341,00	3.204.777.665,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.361.191.947,00	3.215.251.341,00	3.204.777.665,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.874.450,00	48.874.450,00	48.874.450,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.080.240,00	8.080.240,00	8.080.240,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.034.210,00	23.034.210,00	23.034.210,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.419.500,00	132.419.500,00	132.419.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.419.500,00	106.419.500,00	106.419.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002						Kelurahan Selomerto	671.067.241,00	671.067.241,00	671.067.241,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	411.084.105,00	411.084.105,00	417.894.105,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	371.084.105,00	371.084.105,00	377.894.105,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	18.385.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	351.084.105,00	351.084.105,00	359.509.105,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	222.483.136,00	222.483.136,00	215.673.136,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.670.000,00	28.670.000,00	36.881.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.232.230,00	8.232.230,00	8.232.230,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	3.181.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.207.770,00	3.207.770,00	3.207.770,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.230.000,00	14.230.000,00	21.260.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.813.136,00	188.813.136,00	170.413.136,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.413.136,00	177.413.136,00	159.013.136,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	8.378.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.800.000,00	1.800.000,00	3.578.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	4.800.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003						Kelurahan Wonorejo	611.360.066,00	611.360.066,00	611.360.066,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	361.015.296,00	361.015.296,00	361.015.296,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	299.015.296,00	299.015.296,00	299.015.296,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	289.015.296,00	289.015.296,00	289.015.296,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.033.000,00	10.033.000,00	10.033.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.967.000,00	4.967.000,00	4.967.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	214.344.770,00	214.344.770,00	214.344.770,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.210.290,00	63.210.290,00	63.210.290,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.920.290,00	13.920.290,00	13.920.290,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.790.000,00	41.790.000,00	41.790.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.790.304,00	140.790.304,00	140.790.304,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.090.304,00	131.090.304,00	131.090.304,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.344.176,00	10.344.176,00	10.344.176,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.586.176,00	3.586.176,00	3.586.176,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.758.000,00	6.758.000,00	6.758.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						Kecamatan Leksono	3.423.599.784,00	3.072.084.753,00	3.161.242.948,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	116.150.000,00	116.150.000,00	116.150.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.360.000,00	71.360.000,00	71.360.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	66.360.000,00	66.360.000,00	66.360.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	44.790.000,00	44.790.000,00	44.790.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44.790.000,00	44.790.000,00	44.790.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.130.000,00	46.130.000,00	46.130.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46.130.000,00	46.130.000,00	46.130.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.130.000,00	36.130.000,00	36.130.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.986.319.784,00	2.634.804.753,00	2.723.962.948,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.285.000,00	11.285.000,00	11.285.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.285.000,00	7.285.000,00	7.285.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.695.999.784,00	2.344.484.753,00	2.433.642.948,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.695.999.784,00	2.344.484.753,00	2.433.642.948,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.623.000,00	92.623.000,00	92.623.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.119.600,00	24.119.600,00	24.119.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.410.300,00	4.410.300,00	4.410.300,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.093.100,00	49.093.100,00	49.093.100,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.592.000,00	83.592.000,00	83.592.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.592.000,00	63.592.000,00	63.592.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.820.000,00	27.820.000,00	27.820.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.820.000,00	17.820.000,00	17.820.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002						Kelurahan Leksono	1.054.390.000,00	1.054.390.000,00	1.054.390.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	843.242.900,00	843.242.900,00	843.242.900,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	791.139.275,00	791.139.275,00	791.139.275,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.445.390,00	12.445.390,00	12.445.390,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	378.693.885,00	378.693.885,00	378.693.885,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52.103.625,00	52.103.625,00	52.103.625,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	52.103.625,00	52.103.625,00	52.103.625,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64.320.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64.320.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.900.000,00	56.900.000,00	56.900.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.727.000,00	18.727.000,00	18.727.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.727.000,00	18.727.000,00	18.727.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.727.000,00	18.727.000,00	18.727.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.100.100,00	128.100.100,00	128.100.100,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.417.580,00	26.417.580,00	26.417.580,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.217.880,00	7.217.880,00	7.217.880,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.724.700,00	5.724.700,00	5.724.700,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.380.000,00	55.380.000,00	55.380.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.070.000,00	12.070.000,00	12.070.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.310.000,00	43.310.000,00	43.310.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.802.520,00	21.802.520,00	21.802.520,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.002.520,00	11.002.520,00	11.002.520,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0000						Kecamatan Watumalang	4.087.158.623,00	3.693.048.123,00	3.715.883.346,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	171.460.000,00	150.110.000,00	150.110.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.820.000,00	68.810.000,00	68.810.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00	23.810.000,00	23.810.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.820.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	89.640.000,00	71.300.000,00	71.300.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	89.640.000,00	71.300.000,00	71.300.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	138.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	154.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	154.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	144.000.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.508.698.623,00	3.128.938.123,00	3.151.773.346,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.770.259.004,00	2.376.148.504,00	2.398.983.727,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.770.259.004,00	2.376.148.504,00	2.398.983.727,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.500.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	497.439.619,00	502.899.619,00	502.899.619,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	334.199.619,00	334.199.619,00	334.199.619,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.240.000,00	143.700.000,00	143.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.500.000,00	105.100.000,00	105.100.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.000.000,00	83.600.000,00	83.600.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.000.000,00	75.390.000,00	75.390.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002						Kelurahan Wonoroto	599.898.400,00	599.898.400,00	599.898.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.024.375,00	57.024.375,00	57.024.375,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.024.375,00	57.024.375,00	57.024.375,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	57.024.375,00	57.024.375,00	57.024.375,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	421.774.025,00	421.774.025,00	421.774.025,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	360.761.525,00	360.761.525,00	360.761.525,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	348.761.525,00	348.761.525,00	348.761.525,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	61.012.500,00	61.012.500,00	61.012.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	61.012.500,00	61.012.500,00	61.012.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.600.000,00	111.600.000,00	111.600.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.516.000,00	10.516.000,00	10.516.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.516.000,00	3.516.000,00	3.516.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.460.000,00	80.460.000,00	80.460.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.560.000,00	73.560.000,00	73.560.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.624.000,00	20.624.000,00	20.624.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.624.000,00	5.624.000,00	5.624.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000						Kecamatan Mojotengah	5.050.790.799,00	4.708.007.016,00	4.659.184.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	140.408.231,00	140.408.231,00	140.408.231,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.996.270,00	50.996.270,00	50.996.270,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42.996.270,00	42.996.270,00	42.996.270,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.411.961,00	85.411.961,00	85.411.961,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	85.411.961,00	85.411.961,00	85.411.961,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	165.217.096,00	165.217.096,00	165.217.096,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.217.096,00	45.217.096,00	45.217.096,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.217.096,00	45.217.096,00	45.217.096,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	181.692.663,00	181.692.663,00	181.692.663,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	181.692.663,00	181.692.663,00	181.692.663,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	181.692.663,00	181.692.663,00	181.692.663,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.883.356,00	44.883.356,00	44.883.356,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.883.356,00	44.883.356,00	44.883.356,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.143.660,00	23.143.660,00	23.143.660,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21.739.696,00	21.739.696,00	21.739.696,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.466.589.453,00	4.123.805.670,00	4.074.983.073,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.062.364.853,00	3.719.581.070,00	3.670.758.473,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.364.853,00	3.719.581.070,00	3.670.758.473,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.324.600,00	60.324.600,00	60.324.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.704.600,00	12.704.600,00	12.704.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.900.000,00	146.900.000,00	146.900.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.200.000,00	107.200.000,00	107.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002						Kelurahan Kalibeber	771.327.419,00	771.327.419,00	771.327.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	503.810.419,00	503.810.419,00	503.810.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	438.810.419,00	438.810.419,00	438.810.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	423.810.419,00	423.810.419,00	423.810.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.857.000,00	57.857.000,00	57.857.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	57.857.000,00	57.857.000,00	57.857.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52.457.000,00	52.457.000,00	52.457.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	184.660.000,00	184.660.000,00	184.660.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.440.000,00	20.440.000,00	20.440.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.260.000,00	113.360.000,00	113.360.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.760.000,00	100.960.000,00	100.960.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.960.000,00	50.860.000,00	50.860.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000,00	2.398.150,00	2.398.150,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.460.000,00	42.461.850,00	42.461.850,00
7.01.0.00.0.00.06.0003						Kelurahan Mudal	1.111.613.963,00	1.111.613.963,00	1.111.613.963,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	921.183.963,00	921.183.963,00	921.183.963,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	816.299.600,00	816.299.600,00	816.299.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	404.299.600,00	404.299.600,00	404.299.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	104.884.363,00	104.884.363,00	104.884.363,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	104.884.363,00	104.884.363,00	104.884.363,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.430.000,00	138.430.000,00	138.430.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.105.000,00	16.105.000,00	16.105.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.225.000,00	6.225.000,00	6.225.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.200.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.760.000,00	98.760.000,00	98.760.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.125.000,00	16.125.000,00	16.125.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.415.500,00	10.415.500,00	10.415.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.309.500,00	3.309.500,00	3.309.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004						Kelurahan Andongsili	681.975.552,00	681.975.552,00	681.975.552,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	465.672.665,00	465.672.665,00	465.672.665,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	345.419.665,00	345.419.665,00	345.419.665,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.863.660,00	13.863.660,00	13.863.660,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	331.556.005,00	331.556.005,00	331.556.005,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	120.253.000,00	120.253.000,00	120.253.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120.253.000,00	120.253.000,00	120.253.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.940.000,00	30.940.000,00	30.940.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.940.000,00	30.940.000,00	30.940.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.940.000,00	30.940.000,00	30.940.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	145.362.887,00	145.362.887,00	145.362.887,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.502.887,00	27.502.887,00	27.502.887,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.283.087,00	8.283.087,00	8.283.087,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.159.800,00	2.159.800,00	2.159.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.660.000,00	104.660.000,00	104.660.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.760.000,00	89.760.000,00	89.760.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000						Kecamatan Garung	3.880.834.337,50	3.881.533.469,00	3.793.553.869,50
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	143.772.000,00	143.772.000,00	143.772.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74.236.000,00	74.236.000,00	74.236.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.436.000,00	32.436.000,00	32.436.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	69.536.000,00	69.536.000,00	69.536.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	69.536.000,00	69.536.000,00	69.536.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	117.979.322,50	117.979.322,50	117.979.322,50
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.347.098,50	47.347.098,50	47.347.098,50
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.347.098,50	47.347.098,50	47.347.098,50
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.632.224,00	70.632.224,00	70.632.224,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.632.224,00	70.632.224,00	70.632.224,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	187.200.000,00	187.200.000,00	187.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	187.200.000,00	187.200.000,00	187.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187.200.000,00	187.200.000,00	187.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.184.101,00	50.184.101,00	50.184.101,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.184.101,00	50.184.101,00	50.184.101,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.384.101,00	4.384.101,00	4.384.101,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.370.698.914,00	3.371.398.045,50	3.283.418.446,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.092.231.138,00	3.092.930.269,50	3.004.950.670,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.092.231.138,00	3.092.930.269,50	3.004.950.670,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.100.000,00	84.100.000,00	84.100.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.867.776,00	26.867.776,00	26.867.776,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.867.776,00	26.867.776,00	26.867.776,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.500.000,00	103.500.000,00	103.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002						Kelurahan Garung	880.285.173,00	880.285.173,00	880.285.173,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	607.395.573,00	607.395.573,00	607.395.573,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	562.395.573,00	562.395.573,00	562.395.573,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	397.395.573,00	397.395.573,00	397.395.573,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	188.389.600,00	188.389.600,00	188.389.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.920.000,00	52.920.000,00	52.920.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.020,00	20.000.020,00	20.000.020,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.199.980,00	6.199.980,00	6.199.980,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.429.600,00	106.429.600,00	106.429.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.924.000,00	6.924.000,00	6.924.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.005.600,00	99.005.600,00	99.005.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.040.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.540.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000						Kecamatan Kejajar	4.862.034.106,00	4.702.664.861,00	4.672.120.671,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93.871.000,00	93.871.000,00	93.871.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.871.000,00	50.871.000,00	50.871.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.871.000,00	50.871.000,00	50.871.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	123.109.902,00	123.109.902,00	123.109.902,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	71.609.902,00	71.609.902,00	71.609.902,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	71.609.902,00	71.609.902,00	71.609.902,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	126.600.000,00	126.600.000,00	126.600.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	126.600.000,00	126.600.000,00	126.600.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	116.600.000,00	116.600.000,00	116.600.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85.231.410,00	85.231.410,00	85.231.410,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.231.410,00	85.231.410,00	85.231.410,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.221.410,00	16.221.410,00	16.221.410,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	41.710.000,00	41.710.000,00	41.710.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.385.721.794,00	4.226.352.549,00	4.195.808.359,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.993.565.793,00	3.834.196.548,00	3.803.652.358,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.993.565.793,00	3.834.196.548,00	3.803.652.358,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.236.400,00	66.236.400,00	66.236.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.696.400,00	7.696.400,00	7.696.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.109.600,00	145.109.600,00	145.109.600,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.656.000,00	19.656.000,00	19.656.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.153.600,00	125.153.600,00	125.153.600,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.310.001,00	143.310.001,00	143.310.001,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.010.000,00	65.010.000,00	65.010.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.300.001,00	58.300.001,00	58.300.001,00
7.01.0.00.0.00.08.0002						Kelurahan kejajar	641.728.426,00	641.728.426,00	641.728.426,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	527.608.426,00	527.608.426,00	527.608.426,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	284.132.269,00	284.132.269,00	284.132.269,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	274.132.269,00	274.132.269,00	274.132.269,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	243.476.157,00	243.476.157,00	243.476.157,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	243.476.157,00	243.476.157,00	243.476.157,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.920.000,00	73.920.000,00	73.920.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.320.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.760.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.840.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000						Kecamatan Kalikajar	3.366.704.685,00	3.270.364.772,00	3.310.986.194,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	145.449.000,00	145.449.000,00	145.449.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	69.722.000,00	69.722.000,00	69.722.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	54.482.000,00	54.482.000,00	54.482.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.240.000,00	15.240.000,00	15.240.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	11.197.000,00	11.197.000,00	11.197.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11.197.000,00	11.197.000,00	11.197.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	64.530.000,00	64.530.000,00	64.530.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.530.000,00	64.530.000,00	64.530.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	196.586.000,00	196.586.000,00	196.586.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	117.486.000,00	117.486.000,00	117.486.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	117.486.000,00	117.486.000,00	117.486.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	79.100.000,00	79.100.000,00	79.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	79.100.000,00	79.100.000,00	79.100.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.147.000,00	54.147.000,00	54.147.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.147.000,00	54.147.000,00	54.147.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.932.000,00	39.932.000,00	39.932.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.215.000,00	14.215.000,00	14.215.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.760.000,00	100.760.000,00	100.760.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.760.000,00	100.760.000,00	100.760.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.920.000,00	92.920.000,00	92.920.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	113.392.000,00	113.392.000,00	113.392.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	113.392.000,00	113.392.000,00	113.392.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	71.359.000,00	71.359.000,00	71.359.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	42.033.000,00	42.033.000,00	42.033.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.756.370.685,00	2.660.030.772,00	2.700.652.194,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.510.490.685,00	2.414.150.772,00	2.454.772.194,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.510.490.685,00	2.414.150.772,00	2.454.772.194,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.320.000,00	58.820.000,00	58.820.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.960.000,00	15.460.000,00	15.460.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.000.000,00	112.700.000,00	112.700.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.500.000,00	86.200.000,00	86.200.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.560.000,00	70.360.000,00	70.360.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.200.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002						Kelurahan Kalikajar	1.250.899.132,00	1.250.899.132,00	1.250.899.132,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	984.322.300,00	984.322.300,00	984.322.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	966.915.000,00	966.915.000,00	966.915.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	411.815.000,00	411.815.000,00	411.815.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	17.407.300,00	17.407.300,00	17.407.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	17.407.300,00	17.407.300,00	17.407.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.156.532,00	42.156.532,00	42.156.532,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.156.532,00	42.156.532,00	42.156.532,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.356.532,00	38.356.532,00	38.356.532,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.050.300,00	10.050.300,00	10.050.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.050.300,00	10.050.300,00	10.050.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.050.300,00	10.050.300,00	10.050.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	214.370.000,00	214.370.000,00	214.370.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.910.000,00	5.910.000,00	5.910.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.923.600,00	76.923.600,00	76.923.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.023.600,00	67.023.600,00	67.023.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.686.400,00	2.686.400,00	2.686.400,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	736.400,00	736.400,00	736.400,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000						Kecamatan Sapuran	3.899.874.222,00	3.701.075.623,00	3.744.952.476,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	82.460.000,00	82.460.000,00	82.460.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.060.000,00	60.060.000,00	60.060.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.060.000,00	60.060.000,00	60.060.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	126.382.250,00	107.982.250,00	107.982.250,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	105.382.250,00	86.982.250,00	86.982.250,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	105.382.250,00	86.982.250,00	86.982.250,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	176.420.000,00	176.420.000,00	176.420.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	176.420.000,00	176.420.000,00	176.420.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.420.000,00	16.420.000,00	16.420.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.366.882,00	87.366.882,00	87.366.882,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.366.882,00	87.366.882,00	87.366.882,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	42.478.132,00	42.478.132,00	42.478.132,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38.596.750,00	38.596.750,00	38.596.750,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.967.000,00	4.967.000,00	4.967.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.409.245.090,00	3.228.846.491,00	3.272.723.344,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.088.454.590,00	2.889.655.991,00	2.933.532.844,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.088.454.590,00	2.889.655.991,00	2.933.532.844,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.160.500,00	41.160.500,00	41.160.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.980.000,00	3.980.000,00	3.980.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.543.200,00	10.543.200,00	10.543.200,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.248.300,00	4.248.300,00	4.248.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.054.000,00	17.054.000,00	17.054.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.250.000,00	105.650.000,00	105.650.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.750.000,00	81.150.000,00	81.150.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.620.000,00	112.620.000,00	112.620.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.020.000,00	93.020.000,00	93.020.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.300.000,00	75.300.000,00	75.300.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.300.000,00	52.300.000,00	52.300.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002						Kelurahan Sapuran	687.800.000,00	687.800.000,00	687.800.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	567.316.132,00	567.316.132,00	567.316.132,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	493.225.072,00	493.225.072,00	493.225.072,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.585.860,00	8.585.860,00	8.585.860,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	484.639.212,00	484.639.212,00	484.639.212,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	74.091.060,00	74.091.060,00	74.091.060,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	74.091.060,00	74.091.060,00	74.091.060,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.069.040,00	20.069.040,00	20.069.040,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.069.040,00	20.069.040,00	20.069.040,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.816.000,00	12.816.000,00	12.816.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.253.040,00	7.253.040,00	7.253.040,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.414.828,00	74.414.828,00	74.414.828,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.769.828,00	14.769.828,00	14.769.828,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.048.685,00	1.048.685,00	1.048.685,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.940.340,00	6.940.340,00	6.940.340,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.986.900,00	1.986.900,00	1.986.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.143.903,00	2.143.903,00	2.143.903,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.940.000,00	37.940.000,00	37.940.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.360.000,00	27.360.000,00	27.360.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.705.000,00	10.705.000,00	10.705.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000						Kecamatan Kepil	3.852.090.914,00	3.431.841.149,00	3.464.173.314,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	153.700.000,00	153.700.000,00	153.700.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.700.000,00	33.700.000,00	33.700.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.700.000,00	33.700.000,00	33.700.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.275.000,00	40.275.000,00	40.275.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.275.000,00	40.275.000,00	40.275.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.275.000,00	40.275.000,00	40.275.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	148.025.000,00	148.025.000,00	148.025.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	148.025.000,00	148.025.000,00	148.025.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.025.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.325.090.914,00	2.904.841.149,00	2.937.173.314,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.027.577.803,00	2.607.328.038,00	2.639.660.203,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.027.577.803,00	2.607.328.038,00	2.639.660.203,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.970.000,00	33.970.000,00	33.970.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.190.000,00	14.190.000,00	14.190.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.171.513,00	113.171.513,00	113.171.513,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	43.171.513,00	43.171.513,00	43.171.513,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.371.598,00	61.371.598,00	61.371.598,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.971.598,00	46.971.598,00	46.971.598,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002						Kelurahan Kepil	733.208.030,00	733.208.030,00	733.208.030,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	532.877.030,00	532.877.030,00	532.877.030,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	488.334.030,00	488.334.030,00	488.334.030,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.764.000,00	10.764.000,00	10.764.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	477.570.030,00	477.570.030,00	477.570.030,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	44.543.000,00	44.543.000,00	44.543.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	44.543.000,00	44.543.000,00	44.543.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.016.000,00	20.016.000,00	20.016.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.016.000,00	20.016.000,00	20.016.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.016.000,00	20.016.000,00	20.016.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.375.000,00	26.375.000,00	26.375.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.375.000,00	26.375.000,00	26.375.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	26.375.000,00	26.375.000,00	26.375.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.940.000,00	153.940.000,00	153.940.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.392.000,00	5.392.000,00	5.392.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	330.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	742.000,00	742.000,00	742.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.030.000,00	145.030.000,00	145.030.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.920.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.010.000,00	134.010.000,00	134.010.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.518.000,00	3.518.000,00	3.518.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.318.000,00	2.318.000,00	2.318.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000						Kecamatan kaliwiro	3.653.695.998,00	3.549.373.249,00	3.553.780.737,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	127.500.000,00	127.500.000,00	127.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	127.500.000,00	127.500.000,00	127.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	89.103.455,00	89.103.455,00	89.103.455,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89.103.455,00	89.103.455,00	89.103.455,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.103.455,00	26.103.455,00	26.103.455,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.176.592.543,00	3.072.269.794,00	3.076.677.282,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.801.728.382,00	2.697.405.633,00	2.701.813.121,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.801.728.382,00	2.697.405.633,00	2.701.813.121,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.573.785,00	71.573.785,00	71.573.785,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.273.785,00	21.273.785,00	21.273.785,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.290.376,00	153.290.376,00	153.290.376,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.140.376,00	129.140.376,00	129.140.376,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002						Kelurahan Kaliwiro	630.255.549,00	630.255.549,00	630.255.549,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	387.878.549,00	387.878.549,00	387.878.549,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327.478.549,00	327.478.549,00	327.478.549,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.927.390,00	10.927.390,00	10.927.390,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	316.551.159,00	316.551.159,00	316.551.159,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.400.000,00	60.400.000,00	60.400.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60.400.000,00	60.400.000,00	60.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.287.000,00	34.287.000,00	34.287.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.287.000,00	34.287.000,00	34.287.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.190.000,00	19.190.000,00	19.190.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.097.000,00	15.097.000,00	15.097.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.090.000,00	173.090.000,00	173.090.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.100.000,00	38.100.000,00	38.100.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.990.000,00	120.990.000,00	120.990.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.720.000,00	9.720.000,00	9.720.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.270.000,00	111.270.000,00	111.270.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000						Kecamatan Wadaslintang	3.803.150.014,00	3.464.092.931,00	3.523.505.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	148.500.000,00	148.500.000,00	148.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.030.000,00	66.030.000,00	66.030.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	66.030.000,00	66.030.000,00	66.030.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	66.030.000,00	66.030.000,00	66.030.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	126.520.000,00	126.520.000,00	126.520.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	126.520.000,00	126.520.000,00	126.520.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	126.520.000,00	126.520.000,00	126.520.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.269.100.014,00	2.930.042.931,00	2.989.455.800,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.974.050.015,00	2.634.992.932,00	2.694.405.801,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.974.050.015,00	2.634.992.932,00	2.694.405.801,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.300.000,00	52.300.000,00	52.300.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.095.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.605.000,00	30.605.000,00	30.605.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.400.000,00	57.400.000,00	57.400.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.400.000,00	57.400.000,00	57.400.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.299.999,00	103.299.999,00	103.299.999,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.779.999,00	21.779.999,00	21.779.999,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.520.000,00	81.520.000,00	81.520.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.050.000,00	72.050.000,00	72.050.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002						Kelurahan Wadaslintang	713.900.000,00	713.900.000,00	713.900.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	520.943.000,00	520.943.000,00	520.943.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450.943.000,00	450.943.000,00	450.943.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	440.943.000,00	440.943.000,00	440.943.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.481.000,00	18.481.000,00	18.481.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.481.000,00	18.481.000,00	18.481.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18.481.000,00	18.481.000,00	18.481.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.476.000,00	149.476.000,00	149.476.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.605.000,00	11.605.000,00	11.605.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.605.000,00	5.605.000,00	5.605.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.700.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.527.000,00	108.527.000,00	108.527.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.487.000,00	9.487.000,00	9.487.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.740.000,00	98.740.000,00	98.740.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.644.000,00	6.644.000,00	6.644.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.144.000,00	3.144.000,00	3.144.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000						Kecamatan Sukoharjo	2.757.332.774,00	2.583.409.267,00	2.640.293.789,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.842.649,00	130.842.649,00	130.842.649,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.342.649,00	100.342.649,00	100.342.649,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.342.649,00	100.342.649,00	100.342.649,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	116.314.500,00	116.314.500,00	116.314.500,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	116.314.500,00	116.314.500,00	116.314.500,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	106.314.500,00	106.314.500,00	106.314.500,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.244.275.625,00	2.070.352.118,00	2.127.236.640,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.068.775.625,00	1.894.852.118,00	1.951.736.640,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.068.775.625,00	1.894.852.118,00	1.951.736.640,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.365.000,00	50.365.000,00	50.365.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.365.000,00	27.365.000,00	27.365.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.635.000,00	85.635.000,00	85.635.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.635.000,00	70.635.000,00	70.635.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000						Kecamatan Kalibawang	2.341.082.607,00	2.368.972.756,00	2.349.346.069,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	97.026.000,00	97.026.000,00	97.026.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.068.000,00	40.068.000,00	40.068.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.568.000,00	21.568.000,00	21.568.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	56.958.000,00	56.958.000,00	56.958.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	56.958.000,00	56.958.000,00	56.958.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	125.806.000,00	125.806.000,00	125.806.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.416.000,00	16.416.000,00	16.416.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.416.000,00	16.416.000,00	16.416.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	109.390.000,00	109.390.000,00	109.390.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	109.390.000,00	109.390.000,00	109.390.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.926.000,00	57.926.000,00	57.926.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	57.926.000,00	57.926.000,00	57.926.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	57.926.000,00	57.926.000,00	57.926.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	161.101.588,00	161.101.588,00	161.101.588,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	161.101.588,00	161.101.588,00	161.101.588,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	125.279.588,00	125.279.588,00	125.279.588,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17.492.000,00	17.492.000,00	17.492.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.330.000,00	18.330.000,00	18.330.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.268.000,00	87.268.000,00	87.268.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.268.000,00	87.268.000,00	87.268.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	87.268.000,00	87.268.000,00	87.268.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.811.955.019,00	1.839.845.168,00	1.820.218.481,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.934.000,00	5.934.000,00	5.934.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.967.000,00	2.967.000,00	2.967.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.967.000,00	2.967.000,00	2.967.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.643.747.583,00	1.671.637.732,00	1.652.011.045,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.643.747.583,00	1.671.637.732,00	1.652.011.045,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.434.017,00	28.434.017,00	28.434.017,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	993.500,00	993.500,00	993.500,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.563.227,00	10.563.227,00	10.563.227,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.997.600,00	1.997.600,00	1.997.600,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.690,00	4.999.690,00	4.999.690,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.880.000,00	9.880.000,00	9.880.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.060.000,00	83.060.000,00	83.060.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.240.000,00	15.240.000,00	15.240.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.520.000,00	67.520.000,00	67.520.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.779.419,00	50.779.419,00	50.779.419,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.483.259,00	39.483.259,00	39.483.259,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.796.160,00	6.796.160,00	6.796.160,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.794.386.085,00	7.439.357.863,00	7.795.221.831,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.794.386.085,00	7.439.357.863,00	7.795.221.831,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.794.386.085,00	7.439.357.863,00	7.795.221.831,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	815.663.484,00	815.663.484,00	1.165.663.484,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	815.663.484,00	815.663.484,00	1.165.663.484,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	815.663.484,00	815.663.484,00	1.165.663.484,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.923.034.450,00	1.823.034.450,00	1.823.034.450,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.923.034.450,00	1.823.034.450,00	1.823.034.450,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.923.034.450,00	1.823.034.450,00	1.823.034.450,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.514.555.725,00	1.514.555.725,00	1.604.555.725,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.514.555.725,00	1.514.555.725,00	1.604.555.725,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.514.555.725,00	1.514.555.725,00	1.604.555.725,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	89.684.253,00	89.684.253,00	89.684.253,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	89.684.253,00	89.684.253,00	89.684.253,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	89.684.253,00	89.684.253,00	89.684.253,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	313.268.148,00	313.268.148,00	313.268.148,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	313.268.148,00	313.268.148,00	313.268.148,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.188.217,00	50.188.217,00	50.188.217,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	93.160.616,00	93.160.616,00	93.160.616,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	169.919.315,00	169.919.315,00	169.919.315,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.138.180.025,00	2.883.151.803,00	2.799.015.771,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.218.000,00	101.218.000,00	101.218.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.760.695.850,00	2.505.667.628,00	2.406.531.596,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.707.187.850,00	2.452.159.628,00	2.353.023.596,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.508.000,00	53.508.000,00	53.508.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.138.063,00	91.138.063,00	106.138.063,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.159.728,00	15.159.728,00	15.159.728,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.900.060,00	3.900.060,00	3.900.060,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.218.000,00	3.218.000,00	3.218.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.860.275,00	68.860.275,00	83.860.275,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	900.000,00	900.000,00	900.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	900.000,00	900.000,00	900.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.136.112,00	106.136.112,00	106.136.112,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.386.112,00	83.386.112,00	83.386.112,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.092.000,00	78.092.000,00	78.092.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.692.000,00	20.692.000,00	20.692.000,00
						TOTAL	**2.049.376.447.542,50**	**2.049.376.447.543,91**	**2.023.100.803.480,00**

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75,000,000.00	75,000,000.00							75,000,000.00	75,000,000.00
2	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,674,400,000.00	1,823,034,450.00							1,674,400,000.00	1,823,034,450.00
3	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	780,000,000.00	1,165,663,484.00							780,000,000.00	1,165,663,484.00
4	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	425,000,000.00	89,684,253.00							425,000,000.00	89,684,253.00
5	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,750,000,000.00	1,604,555,725.00							1,750,000,000.00	1,604,555,725.00
6	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	425,000,000.00	313,268,148.00							425,000,000.00	313,268,148.00
7	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	6,979,024,300.00	8,031,053,381.00							6,979,024,300.00	8,031,053,381.00
8	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	1,213,994,300.00	1,063,994,300.00							1,213,994,300.00	1,063,994,300.00
9	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	100,525,000.00	85,000,000.00							100,525,000.00	85,000,000.00
10	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	100,000,000.00	70,000,000.00							100,000,000.00	70,000,000.00
11	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	890,000,000.00	1,098,960,000.00							890,000,000.00	1,098,960,000.00
12	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	125,000,000.00	70,000,000.00							125,000,000.00	70,000,000.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
13	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	140,000,000.00	100,000,000.00							140,000,000.00	100,000,000.00
14	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	40,000,000.00	40,000,000.00							40,000,000.00	40,000,000.00
15	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	75,000,000.00	45,000,000.00							75,000,000.00	45,000,000.00
16	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	80,000,000.00	30,000,000.00							80,000,000.00	30,000,000.00
17	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	1,125,000,000.00	880,000,000.00							1,125,000,000.00	880,000,000.00
18	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	4,971,375,000.00	7,215,837,876.00	67,450,973,000.00	75,646,107,260.00					72,422,348,000.00	82,861,945,136.00
19	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	770,000,000.00	900,000,000.00							770,000,000.00	900,000,000.00
20	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	1,654,600,000.00	2,520,500,000.00	170,400,000.00	294,500,000.00					1,825,000,000.00	2,815,000,000.00
21	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00							1,100,000,000.00	1,100,000,000.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
22	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	2,990,000,000.00	2,090,000,000.00	3,100,000,000.00	3,234,348,000.00					6,090,000,000.00	5,324,348,000.00
23	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	1,322,936,960.00	1,096,280,000.00	283,063,040.00						1,606,000,000.00	1,096,280,000.00
24	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	772,458,380.00	653,252,000.00							772,458,380.00	653,252,000.00
25	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	164,190,000.00	-							164,190,000.00	-
26	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,700,000,000.00	1,597,206,018.00							1,700,000,000.00	1,597,206,018.00
27	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	50,000,000.00	24,065,362.00							50,000,000.00	24,065,362.00
28	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	845,783,375.00	1,103,466,651.00							845,783,375.00	1,103,466,651.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
29	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32,000,000.00	35,048,421.00							32,000,000.00	35,048,421.00
30	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20,000,000.00	9,155,396.00							20,000,000.00	9,155,396.00
31	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100,250,000.00	55,313,135.00	9,750,000.00	3,000,000.00					110,000,000.00	58,313,135.00
32	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1,842,607,232.00	1,581,698,403.00	36,718,360.00	44,915,150.00					1,879,325,592.00	1,626,613,553.00
33	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1,164,016,378.00	841,404,776.00	30,983,622.00	2,300,000.00					1,195,000,000.00	843,704,776.00
34	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	245,000,000.00	286,361,670.00							245,000,000.00	286,361,670.00
35	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	70,000,000.00	51,143,600.00							70,000,000.00	51,143,600.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
36	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	340,000,000.00	602,519,297.00							340,000,000.00	602,519,297.00
37	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	800,000,000.00	800,000,000.00							800,000,000.00	800,000,000.00
38	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	65,000,000.00	94,064,018.00							65,000,000.00	94,064,018.00
39	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	87,239,680.00	40,610,467.00							87,239,680.00	40,610,467.00
40	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	43,692,000.00	14,895,260.00							43,692,000.00	14,895,260.00
41	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17,544,990.00	61,650,438.00							17,544,990.00	61,650,438.00
42	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	555,000,000.00	315,000,000.00							555,000,000.00	315,000,000.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
43	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	-	-							-	-
44	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang		384,173,023.00		1,030,000,000.00						1,414,173,023.00
45	3. Transformasi Tata Kelola	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Perangkat Daerah	856,790,768,178.00	834,137,103,744.50	15,919,012,836.00	7,974,044,409.00					872,709,781,014.00	842,111,148,153.50
46	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	131,096,527,857.00	114,398,264,363.00	27,303,310,143.00	35,061,577,679.00					158,399,838,000.00	149,459,842,042.00
47	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	335,000,000.00	235,000,000.00							335,000,000.00	235,000,000.00
48	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	145,000,000.00	72,800,000.00							145,000,000.00	72,800,000.00
49	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	82,083,964,658.00	80,473,497,914.00	6,935,035,104.00	6,860,005,208.00					89,018,999,762.00	87,333,503,122.00
50	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Setjonegoro	-	-	37,887,862,896.00	16,222,312,896.00					37,887,862,896.00	16,222,312,896.00
51	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	877,867,200.00	784,946,900.00							877,867,200.00	784,946,900.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
52	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	1,086,985,000.00	733,759,310.00							1,086,985,000.00	733,759,310.00
53	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	580,671,796.00	322,947,576.00							580,671,796.00	322,947,576.00
54	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	120,842,543,929.00	121,334,234,653.00	1,833,588,340.00	3,527,287,308.00					122,676,132,269.00	124,861,521,961.00
55	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Setjonegoro	136,000,964,477.00	147,843,864,375.00	11,051,000,000.00	9,551,000,000.00					147,051,964,477.00	157,394,864,375.00
56	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	544,478,000.00	444,298,800.00							544,478,000.00	444,298,800.00
57	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,517,542,000.00	5,099,239,956.00	33,600,000.00						5,551,142,000.00	5,099,239,956.00
58	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,123,200,000.00	5,049,723,600.00							5,123,200,000.00	5,049,723,600.00
59	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	130,000,000.00	96,400,000.00							130,000,000.00	96,400,000.00
60	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	220,000,000.00	103,150,000.00							220,000,000.00	103,150,000.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
61	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	81,920,000.00	52,000,000.00							81,920,000.00	52,000,000.00
62	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20,000,000.00	7,500,000.00							20,000,000.00	7,500,000.00
63	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	850,000,000.00	508,102,000.00							850,000,000.00	508,102,000.00
64	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	260,000,000.00	141,418,903.00							260,000,000.00	141,418,903.00
65	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	650,000,000.00	430,000,000.00							650,000,000.00	430,000,000.00
66	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	350,000,000.00	230,000,000.00							350,000,000.00	230,000,000.00
67	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3,836,600,000.00	6,994,150,000.00	3,303,400,000.00	2,285,850,000.00					7,140,000,000.00	9,280,000,000.00
68	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5,711,240,000.00	4,231,455,000.00							5,711,240,000.00	4,231,455,000.00
69	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	53,000,000.00	22,260,000.00	33,400,000.00						86,400,000.00	22,260,000.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
70	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	59,000,000.00	24,880,000.00							59,000,000.00	24,880,000.00
71	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,440,148,960.00	4,254,667,558.00							3,440,148,960.00	4,254,667,558.00
72	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,488,115,369.00	1,150,885,148.00	93,974,262.00	71,274,262.00					1,582,089,631.00	1,222,159,410.00
73	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	475,000,000.00	269,310,000.00							475,000,000.00	269,310,000.00
74	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	2,341,799,580.00	1,860,869,625.00	387,200,000.00	445,862,500.00					2,728,999,580.00	2,306,732,125.00
75	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	477,000,000.00	400,000,000.00							477,000,000.00	400,000,000.00
76	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	3,555,000,000.00	6,730,543,621.00							3,555,000,000.00	6,730,543,621.00
77	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	235,000,000.00	140,000,000.00							235,000,000.00	140,000,000.00
78	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	182,201,492.00	169,820,350.00							182,201,492.00	169,820,350.00
79	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	645,000,000.00	643,831,380.00							645,000,000.00	643,831,380.00
80	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1,797,523,952.00	1,343,749,863.00	12,320,000,000.00	15,378,824,000.00					14,117,523,952.00	16,722,573,863.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
81	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	193,725,000.00	75,408,040.00							193,725,000.00	75,408,040.00
82	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	165,000,000.00	205,000,000.00							165,000,000.00	205,000,000.00
83	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,000,000.00	65,379,400.00							100,000,000.00	65,379,400.00
84	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35,000,000.00	8,450,000.00							35,000,000.00	8,450,000.00
85	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	122,500,000.00	77,466,900.00							122,500,000.00	77,466,900.00
86	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-							-	-
87	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	121,872,880.00	38,228,040.00	23,627,120.00						145,500,000.00	38,228,040.00
88	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	50,000,000.00	-							50,000,000.00	-
89	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7,167,027,900.00	7,506,267,120.00							7,167,027,900.00	7,506,267,120.00
90	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	667,000,000.00	582,748,282.00							667,000,000.00	582,748,282.00
91	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,370,000,000.00	1,133,375,066.00							1,370,000,000.00	1,133,375,066.00
92	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	140,000,000.00	73,336,940.00							140,000,000.00	73,336,940.00
93	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,894,200,000.00	1,610,965,900.00	2,400,000.00	1,800,000.00					1,896,600,000.00	1,612,765,900.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
94	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	730,000,000.00	556,427,270.00							730,000,000.00	556,427,270.00
95	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan	16,255,456,903.00	15,963,215,308.50	2,050,000,000.00	3,148,800,000.00					18,305,456,903.00	19,112,015,308.50
96	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan	1,408,935,103.00	1,303,442,204.00							1,408,935,103.00	1,303,442,204.00
97	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	195,000,000.00	96,229,684.00							195,000,000.00	96,229,684.00
98	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2,991,017,536.00	2,548,565,934.00	7,151,500,000.00	5,928,000,000.00					10,142,517,536.00	8,476,565,934.00
99	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	35,474,617.00	31,135,142.00							35,474,617.00	31,135,142.00
100	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,152,710,000.00	3,559,254,852.00							4,152,710,000.00	3,559,254,852.00
101	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1,136,859,218.00	972,211,778.00	25,000,000.00						1,161,859,218.00	972,211,778.00
102	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusi dan merata	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	25,530,000.00	-		-					25,530,000.00	-
103	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1,157,216,000.00	747,777,078.00			5,500,000,000.00	3,450,000,000.00	374,630,036,600.00	373,710,436,600.00	381,287,252,600.00	377,908,213,678.00
104	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	960,000,000.00	761,832,513.00							960,000,000.00	761,832,513.00
105	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	134,936,492.00	125,282,492.00							134,936,492.00	125,282,492.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
106	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	73,270,000.00	60,771,895.00							73,270,000.00	60,771,895.00
107	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	3,693,490,397.00	2,710,115,662.00	250,000,000.00	280,000,000.00					3,943,490,397.00	2,990,115,662.00
108	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	569,250,000.00	314,989,320.00	70,750,000.00	45,750,000.00					640,000,000.00	360,739,320.00
109	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,083,097,265.00	645,739,254.00							1,083,097,265.00	645,739,254.00
110	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	1,987,211,165.00	1,605,344,546.00							1,987,211,165.00	1,605,344,546.00
111	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	4,635,768,038.00	4,599,463,270.00	57,000,000.00	30,000,000.00					4,692,768,038.00	4,629,463,270.00
112	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	707,504,000.00	545,401,482.00							707,504,000.00	545,401,482.00
113	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	140,000,000.00	105,590,000.00							140,000,000.00	105,590,000.00
114	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan	2,856,087,703.00	2,706,593,113.00							2,856,087,703.00	2,706,593,113.00
115	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah	1,419,410,000.00	1,862,864,481.00	20,010,000.00	20,000,000.00					1,439,420,000.00	1,882,864,481.00
116	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	308,216,660.00	178,329,969.00	19,000,000.00	19,000,000.00					327,216,660.00	197,329,969.00
117	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan	1,826,060,606.00	1,781,320,606.00	-						1,826,060,606.00	1,781,320,606.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
118	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130,149,360.00	60,399,360.00		18,000,000.00					130,149,360.00	78,399,360.00
119	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,065,000,000.00	835,317,350.00							1,065,000,000.00	835,317,350.00
120	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	185,000,000.00	77,100,000.00							185,000,000.00	77,100,000.00
121	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan	1,941,734,652.00	1,903,187,127.00							1,941,734,652.00	1,903,187,127.00
122	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	435,000,000.00	319,689,000.00							435,000,000.00	319,689,000.00
123	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2,455,000,000.00	4,293,708,953.00							2,455,000,000.00	4,293,708,953.00
124	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-							-	-
125	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,399,700,000.00	1,004,480,526.00	95,300,000.00	81,550,000.00					1,495,000,000.00	1,086,030,526.00
126	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	399,350,000.00	146,975,600.00	1,855,650,000.00	1,800,400,000.00					2,255,000,000.00	1,947,375,600.00
127	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	240,000,000.00	180,137,516.00							240,000,000.00	180,137,516.00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
128	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	605,459,650.00	461,325,094.00	90,740,350.00	10,000,000.00					696,200,000.00	471,325,094.00
129	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	1,647,297,414.00	1,473,483,871.00	152,375,000.00	52,375,000.00					1,799,672,414.00	1,525,858,871.00
130	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	50,000,000.00	50,718,950.00							50,000,000.00	50,718,950.00
131	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup	25,000,000.00	10,590,388.00							25,000,000.00	10,590,388.00
132	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	80,000,000.00	31,942,631.00							80,000,000.00	31,942,631.00
133	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	10,000,000.00	4,075,000.00							10,000,000.00	4,075,000.00
134	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	6,332,565,525.00	6,229,393,733.00	3,601,901,375.00	3,836,900,376.00					9,934,466,900.00	10,066,294,109.00
JUMLAH					1,483,115,784,127.00	1,453,034,582,832.00	203,648,525,448.00	192,905,784,048.00	5,500,000,000.00	3,450,000,000.00	374,630,036,600.00	373,710,436,600.00	2,066,894,346,175.00	2,023,100,803,480.00

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO

DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		TOTAL
	I	II	III	IV	V	FUNGSIONAL	STAF	
1.	2.					3	4	5. (2+3+4)
Golongan X (PPPK)						29		29
Golongan VII (PPPK)						228		228
Golongan V (PPPK)						30		30
Golongan IX (PPPK)						2031		2031
Jumlah Golongan PPPK		0	0	0	0	2318	0	2318
Golongan IV/e						1		1
Golongan IV/d		1						1
Golongan IV/c		21				185	1	207
Golongan IV/b		5	45	2		447		499
Golongan IV/a			67	19		258	2	346
Jumlah Golongan IV		27	112	21	0	890	3	1053
Golongan III/d			22	111		903	13	1049
Golongan III/c			1	72		893	17	983
Golongan III/b				57		435	111	603
Golongan III/a				14		569	152	735
Jumlah Golongan III		0	23	254	0	2800	293	3370
Golongan II/d						99	96	195
Golongan II/c						121	167	288
Golongan II/b						8	18	26
Golongan II/a							125	125
Jumlah Golongan II		0	0	0	0	228	406	634
Golongan I/d							29	29
Golongan I/c							19	19
Golongan I/b								
Golongan I/a								
Jumlah Golongan I		0	0	0	0	0	48	48
Grand Total		27	135	275		6237	750	7424

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH / KURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	71,655,000,000.00	75,756,036,031.00	4,101,036,031.00	105.72
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	203,206,238,087.00	196,646,187,282.00	(6,560,050,805.00)	96.77
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25,464,935,245.00	25,809,039,238.00	344,103,993.00	101.35
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14,271,932,788.00	9,158,113,410.00	(5,113,819,378.00)	64.17
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	314,598,106,120.00	307,369,375,961.00	(7,228,730,159.00)	97.70
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,325,111,779,585.00	1,336,062,892,256.00	10,951,112,671.00	100.83
	Dana desa	250,681,274,000.00	250,203,172,000.00	(478,102,000.00)	
	Insentif Fiskal	19,550,481,000.00	19,550,481,000.00	0.00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	203,591,161,000.00	181,742,111,722.00	(21,849,049,278.00)	89.27
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1,798,934,695,585.00	1,787,558,656,978.00	(11,376,038,607.00)	99.37
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
4.3.01	Pendapatan Hibah	11,381,382,835.00	10,918,091,444.00	(463,291,391.00)	95.93
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	
4.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	11,381,382,835.00	10,918,091,444.00	(463,291,391.00)	95.93
	JUMLAH PENDAPATAN	2,124,914,184,540.00	2,105,846,124,383.00	(19,068,060,157.00)	99.10
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	815,968,407,564.00	813,155,898,509.00	(2,812,509,055.00)	99.66
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571,459,506,660.00	547,721,173,944.00	(23,738,332,716.00)	95.85
5.1.04	Belanja Subsidi	640,000,000.00	574,096,661.00	(65,903,339.00)	
5.1.05	Belanja Hibah	153,555,537,605.00	151,469,623,746.00	(2,085,913,859.00)	98.64
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10,464,300,000.00	10,391,240,400.00	(73,059,600.00)	99.30
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,552,087,751,829.00	1,523,312,033,260.00	(28,775,718,569.00)	98.15
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Tanah	8,445,850,000.00	1,209,626,140.00	(7,236,223,860.00)	14.32
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	51,996,997,722.00	46,521,357,115.00	(5,475,640,607.00)	89.47
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	54,001,801,096.00	53,094,884,557.00	(906,916,539.00)	98.32
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	136,623,971,000.00	128,968,218,227.00	(7,655,752,773.00)	94.40
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	6,898,779,904.00	6,791,551,850.00	(107,228,054.00)	98.45
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	979,344,769.00	734,709,700.00	(244,635,069.00)	75.02
	JUMLAH BELANJA BELANJA MODAL	**258,946,744,491.00**	**237,320,347,589.00**	**(21,626,396,902.00)**	**91.65**
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**				
5.3.01	Belanja Tak Terduga	2,120,000,000.00	225,212,485.00	(1,894,787,515.00)	10.62
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**2,120,000,000.00**	**225,212,485.00**	**(1,894,787,515.00)**	**10.62**
	JUMLAH BELANJA	**1,813,154,496,320.00**	**1,760,857,593,334.00**	**(52,296,902,986.00)**	**97.12**
5.4	**TRANSFER**				
5.4.01	BELANJA TRANSFER / BAGI HASIL				
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6,940,500,000.00	6,940,500,000.00	0.00	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2,110,635,000.00	2,110,635,000.00	0.00	
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Desa	**9,051,135,000.00**	**9,051,135,000.00**	**0.00**	**100.00**
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	393,356,883,070.00	392,878,781,070.00	(478,102,000.00)	99.88
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	393,356,883,070.00	392,878,781,070.00	(478,102,000.00)	99.88
	Jumlah Transfer / Bantuan Keuangan	**393,356,883,070.00**	**392,878,781,070.00**	**(478,102,000.00)**	**99.88**
	Jumlah Transfer	**402,408,018,070.00**	**401,929,916,070.00**	**(478,102,000.00)**	**99.88**
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**2,215,562,514,390.00**	**2,162,787,509,404.00**	**(52,775,004,986.00)**	**97.62**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(90,648,329,850.00)**	**(56,941,385,021.00)**	**(71,843,065,143.00)**	**62.82**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	98,025,712,685.00	98,025,712,684.91	(0.09)	100.00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**98,025,712,685.00**	**98,025,712,684.91**	**(0.09)**	100.00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.01	Pembentukan Dana Cadaangan	0.00	0.00	0.00	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,377,382,835.00	7,377,382,835.00	0.00	100.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**7,377,382,835.00**	**7,377,382,835.00**	**0.00**	**100.00**
	PEMBIAYAAN NETTO	90,648,329,850.00	90,648,329,849.91	(0.09)	100.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	33,706,944,828.91	33,706,944,828.91	

2. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REF	2024 (dalam rupiah)	2023 (dalam rupiah)
ASET	C.1.		
ASET LANCAR	C.1.a.		
Kas			
Kas di Kas Daerah	C.1.a.1).	20,754,055,433.00	83,309,803,483.00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.a.2).	28,575,900.00	110,807,216.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.a.3).	-	43,113,566.00
Kas di BLUD	C.1.a.4).	9,313,148,031.91	10,150,848,398.91
Kas Lainnya	C.1.a.5).		
Kas Dana BOS		1,253,194,183.00	1,014,029,022.00
Kas Lainnya		2,499,578,025.00	3,736,643,019.00
Piutang	C.1.a.6).		
Piutang Pajak Daerah	C.1.a.7).a)	13,873,406,014.00	11,359,268,270.00
Piutang Retribusi Daerah	C.1.a.7).b)	8,301,538,190.00	4,025,674,302.00
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	C.1.a.7).c)	-	24,450,709,706.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	C.1.a.7).d)	375,035,871.40	3,954,114,450.40
Piutang Transfer Lainnya dari Pusat - Dana Perimbangan	C.1.a.7).e)	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	C.1.a.7).f)	6,167,940,036.00	3,174,734,387.00
Piutang Lainnya	C.1.a.7).	6,077,750,594.00	6,081,900,594.00
Penyisihan Piutang Pendapatan	C.1.a.8).	(20,233,780,615.94)	(16,455,170,868.84)
Beban Dibayar Dimuka	C.1.a.9).	97,453,886.00	166,353,469.67
Persediaan	C.1.a.10).	34,232,045,572.10	33,614,700,012.97
Jumlah Aset Lancar		**82,739,941,120.47**	**168,737,529,028.11**
INVESTASI JANGKA PANJANG	C.1.b.		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	C.1.b.1).		
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**-**	**-**
Investasi Jangka Panjang Permanen	C.1.b.2).		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		330,422,502,527.82	300,533,317,974.08
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		**330,422,502,527.82**	**300,533,317,974.08**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**330,422,502,527.82**	**300,533,317,974.08**
ASET TETAP	C.1.c.		
Tanah	C.1.c.1).	793,674,993,350.06	777,161,335,964.06
Peralatan dan Mesin	C.1.c.2).	701,518,632,664.51	763,121,291,355.61
Gedung dan Bangunan	C.1.c.3).	1,499,440,860,936.14	1,265,821,194,286.17
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.1.c.4).	3,036,884,120,936.27	2,899,895,910,200.59
Aset Tetap Lainnya	C.1.c.5).	52,280,397,340.29	126,942,634,058.18
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.c.6).	5,425,884,949.00	4,728,161,487.00
Akumulasi Penyusutan	C.1.c.7).	(2,745,964,596,867.13)	(2,601,052,863,747.23)
Jumlah Aset Tetap		**3,343,260,293,309.15**	**3,236,617,663,604.37**
PROPERTI INVESTASI	C.1.d.		
Properti Investasi - Tanah	C.1.d.1).	62,379,077,064.00	62,959,530,699.00
Properti Investasi - Peralatan dan Mesin			
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	C.1.d.2).	14,622,857,280.00	14,577,359,861.00
Properti Investasi - Jalan, Irigasi, dan			
Properti Investasi - Aset Tetap Lainnya			
Akumulasi Penyusutan Properti	C.1.d.3).	(4,628,754,813.00)	(5,004,686,770.00)
Jumlah Properti Investasi		**72,373,179,531.00**	**72,532,203,790.00**
DANA CADANGAN	C.1.d.		
Dana Cadangan		-	-
Jumlah Dana Cadangan		**-**	**-**
ASET LAINNYA	C.1.e.		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	C.1.e.1).	24,039,159.00	30,039,159.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.1.e.2).	14,351,051,019.00	185,861,241,481.00
Aset Tidak Berwujud	C.1.e.3).	4,973,526,393.00	9,155,067,109.00
Amortisasi	C.1.e.4).	(2,157,124,124.00)	(5,210,636,461.00)
Aset Lain-lain	C.1.e.5).	64,642,771,600.75	65,780,164,904.66
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	C.1.e.6).	(18,303,802,122.33)	(46,243,876,166.71)
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	C.1.e.7).	-	-
Treasury Deposit Facility Trnsfer ke Daerah (TDF-TKD)	C.1.e.8).	-	2,958,287,000.00
Jumlah Aset Lainnya		**63,530,461,925.41**	**212,330,287,025.95**
JUMLAH ASET		**3,892,326,378,413.85**	**3,918,218,797,632.51**

URAIAN	REF	2024 (dalam rupiah)	2023 (dalam rupiah)
KEWAJIBAN	C.2.		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.a.		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	C.2.a.1).	98,761,433.00	301,119,529.00
Utang Bunga			
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.a.2).	5,191,096,515.51	2,292,947,719.90
Utang Belanja	C.2.a.3).	12,969,407,246.00	17,051,137,881.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.a.4).	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**18,259,265,194.51**	**19,645,205,129.90**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**-**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN JUMLAH		**18,259,265,194.51**	**19,645,205,129.90**
EKUITAS			
EKUITAS	C.3.	3,874,063,113,219.34	3,971,105,796,292.61
JUMLAH EKUITAS JUMLAH		**3,874,063,113,219.34**	**3,971,105,796,292.61**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS JUMLAH		**3,892,322,378,413.85**	**3,990,751,001,422.51**

3. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Untuk Tahun Yang berakhir Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	E.2.a.		
Arus Masuk Kas	E.2.a.1)		
Penerimaan Pajak Daerah		75,756,036,031.00	65,448,626,748.00
Penerimaan Retribusi Daerah		196,646,187,282.00	11,205,591,108.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		25,809,039,238.00	23,040,333,270.00
Penerimaan Lain - Lain PAD yang Sah		8,872,074,910	166,361,920,051.91
Penerimaan Dana Bagi Hasil pajak		35,433,346,000.00	36,777,428,277.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1,499,676,000.00	2,159,463,211.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		877,850,621,000.00	832,084,548,325.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		421,279,249,256.00	463,806,105,588.00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Insentif Daerah		19,550,481,000.00	13,020,711,000.00
Penerimaan Dana Desa		250,203,172,000.00	247,153,737,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		124,196,881,222.00	123,940,726,171.00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi		57,545,230,500.00	22,101,445,223.00
Penerimaan Hibah		10,918,091,444.00	49,177,364,845.00
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**2,105,560,085,883.00**	**2,056,278,000,817.91**
Arus Keluar Kas	E.2.a.2)		
Pembayaran Pegawai		813,155,898,509.00	813,687,908,377.00
Pembayaran Barang		547,721,173,944.00	437,524,507,656.00
Pembayaran Subsidi		574,096,661.00	638,215,332.00
Pembayaran Hibah		151,469,623,746.00	136,542,227,583.00
Pembayaran Bantuan Sosial		10,391,240,400.00	12,130,400,000.00
Pembayaran Bantuan keuangan		392,878,781,070.00	364,178,746,070.00
Pembayaran Tidak Terduga		225,212,485.00	4,741,409,823.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		6,940,500,000.00	5,523,000,000.00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		2,110,635,000.00	1,117,362,500.00
Jumlah Arus Keluar Kas		**1,925,467,161,815.00**	**1,776,083,777,341.00**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		**180,092,924,068.00**	**280,194,223,476.91**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	E.2.b.		
Arus Masuk Kas	E.2.b.1)		
Pencairan Dana Cadangan		-	30,000,000,000.00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	76,102,524.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		62,302,000.00	-
Penjualan Aset Lainnya		223,736,500.00	926,302,224.00
Jumlah Arus masuk Kas		**286,038,500.00**	**31,002,404,748.00**
Arus Keluar Kas	E.2.b.2)		
Pembentukan Dana Cadangan		-	15,000,000,000.00
Perolehan Tanah		1,209,626,140.00	-
Perolehan peralatan dan Mesin		46,521,357,115.00	71,513,835,592.00
Perolehan Gedung dan bangunan		53,094,884,557.00	75,966,224,399.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		128,968,218,227.00	173,441,211,700.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		6,791,551,850.00	8,956,129,217.00
Perolehan Aset Lainnya		734,709,700.00	24,697,500.00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		7,377,382,835.00	6,570,912,000.00
			-
Jumlah Arus Keluar Kas		**244,697,730,424.00**	**351,473,010,408.00**
ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		**(244,411,691,924.00)**	**(320,470,605,660.00)**

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	E.2.c.		
Arus Masuk Kas	E.2.c.1)		
Penerimaan Kembali Dana Bergulir		-	10,100,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas		**-**	**10,100,000.00**
Arus Keluar Kas	E.2.c.2)		
Jumlah Arus Keluar Kas		**-**	**-**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		**-**	**10,100,000.00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	E.2.d.		
Arus Masuk Kas	E.2.d.1)		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		110,404,016,368.05	117,391,512,088.41
Kiriman Uang Masuk		5,096,000.00	38,392,491.00
Penerimaan Koreksi		-	2,528,360.00
Jumlah Arus Masuk Kas		**110,409,112,368.05**	**117,432,432,939.41**
Arus Keluar Kas	E.2.d.2)		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		110,606,374,464.05	117,099,154,682.41
Kiriman Uang Keluar		663,180.00	138,408,446.00
Pengeluaran Koreksi		-	2,500,326.00
Jumlah Arus Keluar Kas		**110,607,037,644.05**	**117,240,063,454.41**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		**(197,925,276.00)**	**192,369,485.00**
Kenaikan / Penurunan Kas	E.2.	(64,516,693,132.00)	(40,073,912,698.09)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD,BOS, Peduli Covid	E.1.	**98,365,244,704.91**	**138,439,157,403.00**
Kas di Kas Daerah		83,309,803,483.00	93,480,222,258.00
Kas di Bendahara Penerimaan		110,807,216.00	26,771,800.00
Kas di Bendahara Pengeluaran		43,113,566.00	42,209,500.00
Kas di BLUD		10,150,848,398.91	43,186,557,273.00
Kas di Dana BOS		1,014,029,022.00	
Kas Lainnya		3,736,643,019.00	1,703,396,572.00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD , BOS	E.3.	**33,848,551,572.91**	**98,365,244,704.91**
Kas di Kas Daerah	E.3.a.	20,754,055,433.00	83,309,803,483.00
Kas di Bendahara Penerimaan	E.3.b.	28,575,900.00	110,807,216.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	E.3.c.	-	43,113,566.00
Kas di BLUD	E.3.d.	9,313,148,031.91	10,150,848,398.91
Kas di Dana BOS	E.3.a.	1,253,194,183.00	1,014,029,022.00
Kas Lainnya	E.3.e.	2,499,578,025.00	3,736,643,019.00
Saldo Akhir Kas		**33,848,551,572.91**	**98,365,244,704.91**

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menjalankan asas tersebut untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas perlu ditegakkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi utama, yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi menegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah serta mewakili pemerintah daerah terkait kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBD, khususnya dalam penyediaan barang dan/atau jasa.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan tambahan berupa Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 ini adalah sebagai gambaran dan penjelasan posisi keuangan serta target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan:

1. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya; dan
2. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana halnya dengan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo

TA 2024 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. PP Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
17. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaiman telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
23. PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
24. PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);
27. PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
28. PP Nomor 1 tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6906);
29. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
30. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63):

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
33. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
34. Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
35. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
37. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
38. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
39. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
40. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
41. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14);
42. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
43. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 17);

44. Perbup Wonosobo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Perbup Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 3);
45. Perbup Wonosobo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 30);
46. Perbup Wonosobo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Perbup Wonosobo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Wonosobo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 94);
47. Perbup Wonosobo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 34);
48. Perbup Wonosobo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Wonosobo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 71);
49. Perbup Wonosobo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 15 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 15).

C. Sistematika Penulisan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN
- A. Maksud dan Tujuan
- B. Landasan Hukum
- C. Sistematika Penulisan

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- A. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
- A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

C. Kebijakan Akuntansi Akun yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
D. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
E. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
F. Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
C. Neraca
D. Laporan Operasional (LO)
E. Laporan Arus Kas (LAK)
F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Bab VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

1. Kerangka Ekonomi Makro

a. Perkembangan Nilai PDRB

Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro di tingkat nasional adalah pendapatan nasional, yang dalam lingkup regional disebut produk regional. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1 Perkembangan Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Harga Berlaku Nilai (Miliar Rupiah)	Harga Konstan Nilai (Miliar Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2020	18.838,68	13.566,18
2.	2021	19.856,86	14.064,76
3.	2022	21.587,23	14.770,50
4.	2023*	23.329,92	15.405,98
5.	2024**	25.028,17	16.109,38

Catatan/*Note*: * Angka Sementara/ *Preliminary Figures* ** Angka Sangat Sementara/ *Very Preliminary Figures*
Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Tabel II.1 tersebut menunjukkan PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku dan konstan selama lima tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan.

Tabel II.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2023 atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2020	(1,64)
2.	2021	3,68
3.	2022	5,02
4.	2023*	4,3
5.	2024**	4,57

Catatan/*Note*: * Angka Sementara/ *Preliminary Figures* ** Angka Sangat Sementara/ *Very Preliminary Figures*
Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Tabel II.2 tersebut menunjukkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten menurun secara signifikan menjadi 4,3% namun kembali naik di angka 4,57% pada Tahun 2024.

b. Peran Masing-masing Sektor dalam PDRB

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku selama lima tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 - 2024 terus mengalami kenaikan. PDRB juga dapat dilihat dari sisi lapangan usaha yaitu penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya, untuk Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku

   Penunjang utama PDRB ADHB Kabupaten Wonosobo dari tahun 2020 - tahun 2024 adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sedangkan yang terkecil adalah dari sektor pengadaan listrik dan gas. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat sebagai berikut.

   a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp7.333.570.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
   b) Pertambangan dan Penggalian tahun 2024 sebesar Rp240.240.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami kenaikan;
   c) Industri Pengolahan tahun 2024 sebesar Rp4.435.830.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
   d) Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2024 sebesar Rp7.840.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
   e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2024 sebesar Rp24.320.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 selalu mengalami kenaikan;
   f) Konstruksi tahun 2024 sebesar Rp1.766.030.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami kenaikan;
   g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2024 sebesar Rp4.094.910.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami kenaikan;
   h) Transportasi dan Pergudangan tahun 2024 sebesar Rp1.570.240.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami kenaikan;
   i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2024 sebesar Rp845.140.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami kenaikan;
   j) Informasi dan Komunikasi tahun 2024 sebesar Rp389.270.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
   k) Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2024 sebesar Rp777.690.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
   l) Real Estate tahun 2024 sebesar Rp357.190.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 cenderung selalu mengalami kenaikan;
   m) Jasa Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp65.910.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 selalu mengalami kenaikan;

n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2024 sebesar Rp554.220.000.000,00, jika diperhatikan tahun 2021 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami kenaikan kembali;
o) Jasa Pendidikan tahun 2024 sebesar Rp1.574.420.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2024 sebesar Rp384.400.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
q) Jasa Lainnya tahun 2024 sebesar Rp606.960.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;

2) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan

Penunjang utama PDRB ADHK Kabupaten Wonosobo dari tahun 2020 - 2024 adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, sedangkan yang terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp4.550.580.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
b) Pertambangan dan Penggalian tahun 2024 sebesar Rp150.410.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami kenaikan;
c) Industri Pengolahan tahun 2024 sebesar Rp2.650.660.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2023 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2024;
d) Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2024 sebesar Rp6.430.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2024 sebesar Rp18.260.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 selalu mengalami kenaikan;
f) Konstruksi tahun 2024 sebesar Rp1.092.200.000.000,00, pada tahun 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2023 sebesar Rp2.873.140.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami kenaikan;
h) Transportasi dan Pergudangan tahun 2024 sebesar Rp1.069,860.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami kenaikan;
i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2024 sebesar Rp595.920.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami kenaikan;
j) Informasi dan Komunikasi tahun 2024 sebesar Rp395.660.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
k) Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2024 sebesar Rp443.620.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
l) Real Estate tahun 2024 sebesar Rp280.450.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 cenderung selalu mengalami kenaikan;

m) Jasa Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp40.980.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 selalu mengalami kenaikan;
n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2024 sebesar Rp357.520.000.000,00, jika diperhatikan tahun 2021 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami kenaikan kembali;
o) Jasa Pendidikan tahun 2024 sebesar Rp904.370.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2024 sebesar Rp246.120.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;
q) Jasa Lainnya tahun 2024 sebesar Rp433.200.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan;

c. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2024 laju inflasi di Kabupaten Wonosobo relatif terkendali dengan angka rata-rata 2,8%. Pada tahun 2024, Kabupaten Wonosobo mengalami inflasi sebesar 1,52% yang mana nilai inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan inflasi di Jawa Tengah sebesar 1,67%. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 s/d 2024

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2020	1,71
2.	2021	1,88
3.	2022	6,81
4.	2023	2,56
5.	2024	1,52

Sumber: 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; 2) Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo.

d. PDRB Per Kapita

Tolok ukur lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro di tingkat dalam lingkup regional adalah produk regional bruto per kapita. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo tahun 2020-2024 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dengan rincian disajikan dalam tabel II.4 berikut ini.

Tabel II.4 Perkembangan Nilai PDRB Per Kapita Seri 2010 Atas Dasar Realisasi Harga Berlaku Kabupaten Wonosobo (Tahun 2020-2024)

No	Tahun	Realisasi (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	2020	21,43
2.	2021	22,38
3.	2022	24,02
4.	2023	25,65
5.	2024	27,19

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

e. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Indikator tingkat pengangguran terbuka baik dalam satuan unit (orang) maupun persen yang berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru dan untuk melihat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,02% yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 4,95%. TPT Kabupaten Wonosobo tahun 2020 - 2024 untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.5 berikut ini.

Tabel II.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2020	5,37
2.	2021	5,26
3.	2022	5,01
4.	2023	4,95
5.	2024	4,02

Sumber: 1) Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2023, 2) Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2024, 3) Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Wonosobo selama tahun 2020 - 2024 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.6 berikut ini.

Tabel II.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2020	69,04
2.	2021	69,24
3.	2022	68,69
4.	2023	70,18
5.	2024	70,63

Sumber: 1) Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo 2024; 2) Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

g. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) adalah indikator atau alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai ukuran indeks gini berada pada rentang antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai indeks gini, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Hal tersebut menggambarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar dibandingkan dengan yang diterima kelompok penduduk miskin. Idealnya, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Sehingga pada prinsipnya semakin kecil nilai indeks gini semakin menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Indeks Gini Kabupaten Wonosobo pada rentang Tahun 2021 – 2024 mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam rentang selama periode 4 tahun tersebut terjadi penurunan ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk

Tabel II.7 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)
1.	2021	0,384
2.	2022	0,363
3.	2023	0,356
4.	2024	0,334

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

h. Angka Kemiskinan

Pengukuran angka kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2020 - 2024 cenderung fluktuatif dengan rincian disajikan dalam tabel II.8 berikut ini.

Tabel II.8 Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2020	362.683	137,64	17,36
2.	2021	373.474	139,67	17,67
3.	2022	399.180	128,11	16,17
4.	2023	425.105	123,70	15,58
5.	2024	456.351	121,49	15,28

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Kemiskinan juga dapat dilihat menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.9 berikut ini.

Tabel II.9 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2020	2,43	0,47
2.	2021	2,75	0,65
3.	2022	3,18	0,86
4.	2023	2,60	0,63
5.	2024	2,41	0,60

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Pembangunan di tahun 2024 merupakan implementasi tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 dengan tema "Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah". Untuk mendukung penguatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkelanjutan tersebut diperlukan sinergi dan harmonisasi antara berbagai pihak yang terkait melalui implementasi program dan kegiatan prioritas.

Dasar dari kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang efektif dan efisien adalah berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besarnya pendapatan dari sektor-sektor potensial serta pemanfaatan aset daerah. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi untuk

mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026. Sedangkan kebijakan anggaran didasarkan pada *money follow priority program.*

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan tahun 2024 kebijakan perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan ekonomi meliputi peningkatan ekspor dan investasi, pembangunan sektor unggulan antara lain pariwisata, pertanian, perikanan dan industri pengolahan, peningkatan pertumbuhan dan kualitas UMKM melalui digitalisasi, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konsumsi masyarakat terutama konsumsi dalam negeri, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, yang muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang ideal, penyusunan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2024 mendasarkan pada asumsi sebagai berikut.

a. Pertumbuhan Ekonomi (%) sebesar 3,60 - 4,70
b. Laju Inflasi (%) sebesar 3,00 ± 1,00
c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Trilyun Rp) sebesar 24,94
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebesar 3,00 – 4,00
e. Angka Kemiskinan (%) sebesar 15,08 – 14,50
f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,20

B. Kebijakan Keuangan

1. Arah Kebijakan Keuangan daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan efek optimalisasi tersebut tidak memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan memperhatikan aspek keadilan.

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun

anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu, transparan, partisipatif, tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan yang tertuang dalan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2024, arah kebijakan yang ditempuh tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang.

2. Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah baik pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah disesuaikan dengan arah kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan target pendapatan asli daerah mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta regulasi daerah yang telah ditetapkan.

3. Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah.
b. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024.

Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan menjadi :

a. Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
b. Belanja Modal
c. Belanja Tak Terduga
d. Belanja Transfer yang terdiri dari belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil Penggunaan belanja daerah pada tahun 2024 tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya terkait penggunaan DAU untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan dan penggajian PPPK.

4. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan untuk pembiayaan Pemilu tahun 2024. Pengeluaran

pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD. Pembiayaan daerah juga diarahkan untuk menutup defisit anggaran.

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Estimasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD TA 2024 sebesar Rp2.124.914.184.540,00 dari anggaran semula Rp2.076.589.927.944,00 mengalami kenaikan sebesar Rp65.132.519.505,00.
Estimasi Pendapatan Daerah TA 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel II.10 berikut ini.

Tabel II.10 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Kabupaten Wonosobo TA 2024

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pendapatan Asli Daerah	291.824.704.944,00	14,05	314.598.106.120,00	14,81	22.773.401.176,00	7,80
2.	Pendapatan Transfer	1.773.681.223.000,00	85,41	1.798.934.695.585,00	84,66	25.253.472.585,00	1,42
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.084.000.000,00	0,53	11.381.382.835,00	0,54	297.382.835,00	2,68
	JUMLAH	**2.076.589.927.944,00**	**100,00**	**2.124.914.184.540,00**	**100,00**	**48.324.256.596,00**	**2,33**

Perbandingan Estimasi Pendapatan TA 2024 dengan TA 2023 untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan dalam tabel II.11 berikut ini.

Tabel II.11 Estimasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5) *100
1.	Pendapatan Asli Daerah	314.598.106.120,00	14,81	274.325.652.841,00	13,20	40.272.453.279,00	14,68
2.	Pendapatan Transfer	1.798.934.695.585,00	84,66	1.753.866.111.012,00	84,37	45.068.584.573,00	2,57
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.381.382.835,00	0,54	50.544.912.420,00	2,43	(39.163.529.585,00)	(77,48)
	JUMLAH	**2.124.914.184.540,00**	**100,00**	**2.078.736.676.273,00**	**100,00**	**46.177.508.267,00**	**2,22**

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel II.10 di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan TA 2024 diestimasikan mengalami kenaikan dari Rp291.824.704.944,00 menjadi Rp314.598.106.120,00 atau naik sekitar 7,80% dari APBD penetapan TA 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel II.12 berikut ini.

Tabel II.12 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2024

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)* 100
1.	Pajak Daerah	69.405.000.000,00	23,78	71.655.000.000,00	22,78	2.250.000.000,00	3,24
2.	Retribusi Daerah	21.106.350.000,00	7,23	203.206.238.087,00	64,59	182.099.888.087,00	862,77
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.320.779.534,00	8,33	25.464.935.245,00	8,09	1.144.155.711,00	4,70
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	176.992.575.410,00	60,65	14.271.932.788,00	4,54	(162.720.642.622,00)	(91,94)
	JUMLAH	**291.824.704.944,00**	**100,00**	**314.598.106.120,00**	**100,00**	**22.773.401.176,00**	**7,80**

Tabel II.12 tersebut menunjukkan yaitu Pajak Daerah mengalami perubahan 3,24% atau meningkat sebesar Rp2.250.000.000,00, Retribusi Daerah mengalami perubahan 862,77% atau meningkat sebesar Rp182.099.888.087,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami perubahan 4,70% atau meningkat sebesar Rp1.144.155.711,00, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami perubahan (91,94%) atau menurun sebesar Rp162.720.642.622,00.

Tabel II.12 di atas menunjukkan bahwa Estimasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 setelah perubahan, apabila dibandingkan dengan estimasi TA 2023 setelah perubahan mengalami kenaikan dan penurunan, dengan rincian disajikan dalam tabel II.13 berikut ini.

Tabel II.13 Estimasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024		TA 2023		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5) *100
1.	Pajak Daerah	71.655.000.000,00	22,78	62.430.000.000,00	22,76	9.225.000.000,00	14,78
2.	Retribusi Daerah	203.206.238.087,00	64,59	11.793.625.000,00	4,30	191.412.613.087,00	1.623,02
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.464.935.245,00	8,09	24.320.779.534,00	8,87	1.144.155.711,00	4,70
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14.271.932.788,00	4,54	175.781.248.307,00	64,08	(161.509.315.519,00)	(91,88)
	JUMLAH	**314.598.106.120,00**	**100,00**	**274.325.652.841,00**	**100,00**	**40.272.453.279,00**	**14,68**

b. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Tabel II.10 di atas Pendapatan Transfer diestimasikan mengalami kenaikan secara keseluruhan 1,42% atau sebesar Rp25.253.472.585,00, dengan rincian disajikan dalam tabel II.14 berikut ini.

Tabel II.14 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2024

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3) *100
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.697.073.000,00	88,89	1.595.343.534.585,00	88,68	18.646.461.585,00	1,18
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	196.984.150.000,00	11,11	203.591.161.000,00	11,32	6.607.011.000,00	3,35
	JUMLAH	**1.773.681.223.000,00**	**100,00**	**1.798.934.695.585,00**	**100,00**	**25.253.472.585,00**	**1,42**

Tabel II.10 di atas menunjukkan estimasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 setelah perubahan dibandingkan dengan TA 2023 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.15 berikut ini.

Tabel II.15 Estimasi Pendapatan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.595.343.534.585,00**	**100,00**	**1.592.029.805.236,00**	**100,00**	**3.313.729.349,00**	**0,21**
	Dana Perimbangan	1.325.111.779.585,00	83,06	1.331.855.357.236,00	83,66	(6.743.577.651,00)	(0,51)
	Dana Insentif Daerah	19.550.481.000,00	1,23	13.020.711.000,00	0,82	6.529.770.000,00	50,15
	Dana Desa	250.681.274.000,00	15,71	247.153.737.000,00	15,52	3.527.537.000,00	1,43
2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**203.591.161.000,00**	**100,00**	**161.836.305.776,00**	**100,00**	**41.754.855.224,00**	**25,80**
	Pendapatan Bagi Hasil	136.085.191.000,00	66,84	139.571.305.776,00	86,24	(3.486.114.776,00)	(2,50)
.	Bantuan Keuangan	67.505.970.000,00	33,16	22.265.000.000,00	13,76	45.240.970.000,00	203,19
	JUMLAH	**1.798.934.695.585,00**	**100,00**	**1.753.866.111.012,00**	**100,00**	**45.068.584.573,00**	**2,57**

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel II.10 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diestimasikan mengalami kenaikan sebesar Rp297.382.835,00 atau 2,68%. kenaikan ini terjadi pada Pendapatan Hibah.

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.16 berikut ini.

Tabel II.16 Estimasi Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pendapatan Hibah	11.084.000.000,00	100,00	11.381.382.835,00	100,00	297.382.835,00	2,68
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan PerUndang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**11.084.000.000,00**	**100,00**	**11.381.382.835,00**	**100,00**	**297.382.835,00**	**2,68**

Jika dilihat Tabel II.16 di atas menunjukkan estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 setelah perubahan dibandingkan dengan TA 2023 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.17 berikut ini

Tabel II.17 Estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Pendapatan Hibah	11.381.382.835,00	100,00	50.544.912.420,00	100,00	(39.163.529.585,00)	(77,48)
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan PerUndang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**11.381.382.835,00**	**100,00**	**50.544.912.420,00**	**100,00**	**(39.163.529.585,00)**	**(77,48)**

2. Indikator Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Wonosobo TA 2024 diproyeksikan akan mengalami kenaikan. Belanja daerah pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.215.562.514.390,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp105.414.160.897,00 atau 5% dari APBD Penetapan tahun 2024 yaitu Rp2.110.148.353.493,00. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel II.18 berikut.

Tabel II.18 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2024

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Operasi	1.480.525.124.786,00	70,16	1.552.087.751.829,00	70,05	71.562.627.043,00	4,83
2.	Belanja Modal	228.707.778.637,00	10,84	258.946.744.491,00	11,69	30.238.965.854,00	13,22
3.	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	0,26	2.120.000.000,00	0,10	(3.380.000.000,00)	(61,45)
4.	Belanja Transfer	395.415.450.070,00	18,74	402.408.018.070,00	18,16	6.992.568.000,00	1,77
	JUMLAH	**2.110.148.353.493,00**	**100,00**	**2.215.562.514.390,00**	**100,00**	**105.414.160.897,00**	**5,00**

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Wonosobo setelah perubahan APBD TA 2024 jika dibandingkan dengan TA 2023 cenderung mengalami peningkatan. Rincian proyeksi belanja darah disajikan dalam tabel II.19 berikut.

Tabel II.19 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024		TA 2023		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1	Belanja Operasi	1.552.087.751.829,00	70,05	1.484.311.311.183,00	67,16	67.776.440.646,00	4,57
2	Belanja Modal	258.946.744.491,00	11,69	349.382.856.914,00	15,81	(90.436.112.423,00)	(25,88)
3	Belanja Tidak Terduga	2.120.000.000,00	0,10	5.500.000.000,00	0,25	(3.380.000.000,00)	(61,45)
4	Belanja Transfer	402.408.018.070,00	18,16	370.819.108.570,00	16,78	31.588.909.500,00	8,52
	JUMLAH	**2.215.562.514.390,00**	**100,00**	**2.210.013.276.667,00**	**100,00**	**5.549.237.723,00**	**0,25**

a. Belanja Operasi

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp71.562.627.043,00 atau 4,57%. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.20 berikut ini

Tabel II.20 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2024

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Pegawai	799.992.431.262,00	54,03	815.968.407.564,00	52,57	15.975.976.302,00	2,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	526.146.283.154,00	35,54	571.459.506.660,00	36,82	45.313.223.506,00	8,61
3.	Belanja Subsidi	450.000.000,00	0,03	640.000.000,00	0,04	190.000.000,00	42,22
4.	Belanja Hibah	144.864.910.370,00	9,78	153.555.537.605,00	9,89	8.690.627.235,00	6,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	9.071.500.000,00	0,61	10.464.300.000,00	0,67	1.392.800.000,00	15,35
	JUMLAH	**1.480.525.124.786,00**	**100,00**	**1.552.087.751.829,00**	**100,00**	**71.562.627.043,00**	**4,83**

Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Operasi pada APBD setelah perubahan TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 cenderung mengalami peningkatan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel II.21 berikut.

Tabel II.21 Proyeksi Belanja Operasi Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Pegawai	815.968.407.564,00	52,57	870.672.836.879,00	58,66	(54.704.429.315,00)	(6,28)
2.	Belanja Barang dan Jasa	571.459.506.660,00	36,82	462.160.694.544,00	31,14	109.298.812.116,00	23,65
3.	Belanja Subsidi	640.000.000,00	0,04	842.880.000,00	0,06	(202.880.000,00)	(24,07)
4.	Belanja Hibah	153.555.537.605,00	9,89	138.351.699.760,00	9,32	15.203.837.845,00	10,99
5.	Belanja Bantuan Sosial	10.464.300.000,00	0,67	12.283.200.000,00	0,83	(1.818.900.000,00)	(14,81)
	JUMLAH	**1.552.087.751.829,00**	**100,00**	**1.484.311.311.183,00**	**100,00**	**67.776.440.646,00**	**4,57**

b. Belanja Modal

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 13,22% dari Rp228.707.778.637,00 menjadi Rp258.946.744.491,00. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel II.22 berikut.

Tabel II.22 Proyeksi Perubahan Target Belanja Modal Kabupaten Wonosobo TA 2024

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Tanah	3.999.350.000,00	1,75	8.445.850.000,00	3,26	4.446.500.000,00	111,18
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	39.315.333.121,00	17,19	51.996.997.722,00	20,08	12.681.664.601,00	32,26
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	54.525.421.038,00	23,84	54.001.801.096,00	20,85	(523.619.942,00)	(0,96)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.924.846.000,00	54,18	136.623.971.000,00	52,76	12.699.125.000,00	10,25
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.082.233.709,00	2,66	6.898.779.904,00	2,66	816.546.195,00	13,43
6.	Belanja Aset Lainnya	860.594.769,00	0,38	979.344.769,00	0,38	118.750.000,00	13,80
	JUMLAH	**228.707.778.637,00**	**100,00**	**258.946.744.491,00**	**100,00**	**30.238.965.854,00**	**13,22**

Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Modal setelah perubahan APBD TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.23 berikut ini.

Tabel II.23 Proyeksi Belanja Modal Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Tanah	8.445.850.000,00	3,26	6.900.000.000,00	1,97	1.545.850.000,00	22,40
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	51.996.997.722,00	20,08	76.212.556.484,00	21,81	(24.215.558.762,00)	(31,77)
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	54.001.801.096,00	20,85	77.744.157.300,00	22,25	(23.742.356.204,00)	(30,54)
4.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	136.623.971.000,00	52,76	179.415.331.115,00	51,35	(42.791.360.115,00)	(23,85)
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.898.779.904,00	2,66	9.085.812.015,00	2,60	(2.187.032.111,00)	(24,07)
6.	Belanja Aset Lainnya	979.344.769,00	0,38	25.000.000,00	0,01	954.344.769,00	3.817,38
	JUMLAH	**258.946.744.491,00**	**100,00**	**349.382.856.914,00**	**100,00**	**(90.436.112.423,00)**	**(25,88)**

c. Belanja Tidak Terduga
Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa Belanja Tidak Terduga diproyeksikan mengalami penurunan dari Rp5.500.000.000,00 menjadi Rp2.120.000.000,00.

d. Belanja Transfer
Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa Belanja Transfer diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 1,77% dari Rp395.415.450.070,00 menjadi Rp402.408.018.070,00 Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel II.24 berikut.

Tabel II.24 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2024

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Bagi Hasil	9.051.135.000,00	2,29	9.051.135.000,00	2,25	-	-
2.	Belanja Bantuan Keuangan	386.364.315.070,00	97,71	393.356.883.070,00	97,75	6.992.568.000,00	1,81
	JUMLAH	**395.415.450.070,00**	**100,00**	**402.408.018.070,00**	**100,00**	**6.992.568.000,00**	**1,77**

Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Transfer setelah perubahan APBD TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 mengalami kenaikan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel II.25 berikut.

Tabel II.25 Proyeksi Belanja Tranfer Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024		TA 2023		Kenaikan / (P enurunan)	
		Anggaran	(%)	Anggaran	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Bagi Hasil	9.051.135.000,00	2,25	6.640.362.500,00	1,79	2.410.772.500,00	36,30
2.	Belanja Bantuan Keuangan	393.356.883.070,00	97,75	364.178.746.070,00	98,21	29.178.137.000,00	8,01
	JUMLAH	**402.408.018.070,00**	**100,00**	**370.819.108.570,00**	**100,00**	**31.588.909.500,00**	**8,52%**

3. Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto Kabupaten Wonosobo TA 2024 diestimasikan akan mengalami kenaikan sehingga dilakukan perubahan sebesar Rp57.089.904.301,00 atau 137,01% yang sebelumnya sebesar Rp33.558.425.549,00 menjadi Rp90.648.329.850,00. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel II.26 berikut.

Tabel II.26 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2024

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)*100
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	40.638.425.549,00	98.025.712.685,00	57.387.287.136,00	141,21
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.080.000.000,00	7.377.382.835,00	297.382.835,00	4,20
	Pembiayaan Netto (1-2)	**33.558.425.549,00**	**90.648.329.850,00**	**57.089.904.301,00**	**170,12**

Rencana Pembiayaan Netto pada APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo TA 2024 jika dibandingkan dengan TA 2023 cenderung mengalami penurunan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel II.27 berikut.

Tabel II.27 Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	98.025.712.685,00	156.276.600.394,00	(58.250.887.709,00)	(37,27)
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.377.382.835,00	25.000.000.000,00	(17.622.617.165,00)	(70,49)
	Pembiayaan Netto	**90.648.329.850,00**	**131.276.600.394,00**	**(40.628.270.544,00)**	**(30,95)**

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tabel II.26 menunjukkan bahwa estimasi rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2024 meningkat sebesar Rp57.387.287.136,00 atau 141,21%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel II.28 berikut.

Tabel II.28 Estimasi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2024

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)*100
1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	28.620.530.749,00	98.025.712.685,00	69.405.181.936,00	242,50
2.	Pencairan Dana Cadangan	12.017.894.800,00	-	(12.017.894.800,00)	(100,00)
	JUMLAH	**40.638.425.549,00**	**98.025.712.685,00**	**57.387.287.136,00**	**141,21**

Tabel II.28 di atas menunjukkan estimasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 jika dibandingkan dengan TA 2023 cenderung mengalami peningkatan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel II.29 berikut.

Tabel II.29 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	8)=(7)/(5)*100
1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	98.025.712.685,00	100,00	138.294.495.194,00	88,49	(40.268.782.509,00)	(29,12)
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	(17.982.105.200,00)	11,51	(17.982.105.200,00)	(100,00)
	JUMLAH	**98.025.712.685,00**	**100,00**	**156.276.600.394,00**	**100,00**	**(58.250.887.709,00)**	**(37,27)**

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tabel II.26 di atas menunjukkan bahwa estimasi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp7.377.382.835,00, meningkat sebesar Rp297.382.835,00 atau 4,20% dibandingkan pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel II.30 berikut.

Tabel II.30 Estimasi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2024

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.080.000.000,00	100,00	7.377.382.835,00	100,00	297.382.835,00	4,20
	JUMLAH	**7.080.000.000,00**	**100,00**	**7.377.382.835,00**	**100,00**	**297.382.835,00**	**4,20**

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024

Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

No	Keterangan	Tahun Anggaran 2024		Persentase	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)=(4)-(3)
A	**Pendapatan dan Belanja**				
1	Pendapatan	2.124.914.184.540,00	2.105.846.124.383,00	99,10	(19.068.060.157,00)
2	Belanja dan Transfer	2.215.562.514.390,00	2.162.787.509.404,00	97,62	(52.775.004.986,00)
	Surplus/(Defisit)	(90.648.329.850,00)	(56.941.535.021,00)	62,82	33.706.944.829,00
B	**Pembiayaan**				
1	Penerimaan Pembiayaan	98.025.712.685,00	98.025.712.684,91	100,00	(0,09)
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.377.382.835,00	7.377.382.835,00	100,00	-
	Pembiayaan Neto	90.648.329.850,00	90.648.329.849,91	100,00	(0,09)
Sisa	**Lebih Pembiayaan Anggaran**	**-**	**33.706.944.828,91**	**-**	**-**

Tabel III.1 tersebut menunjukkan ikhtisar anggaran dan realisasi TA 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut.

a. Pendapatan Kabupaten Wonosobo TA 2024 diproyeksikan dalam APBD sebesar Rp2.124.914.184.540,00, sedangkan realisasinya sebesar 99,10% yaitu sebesar Rp2.105.846.124.383,00. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi pendapatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.1 berikut ini.

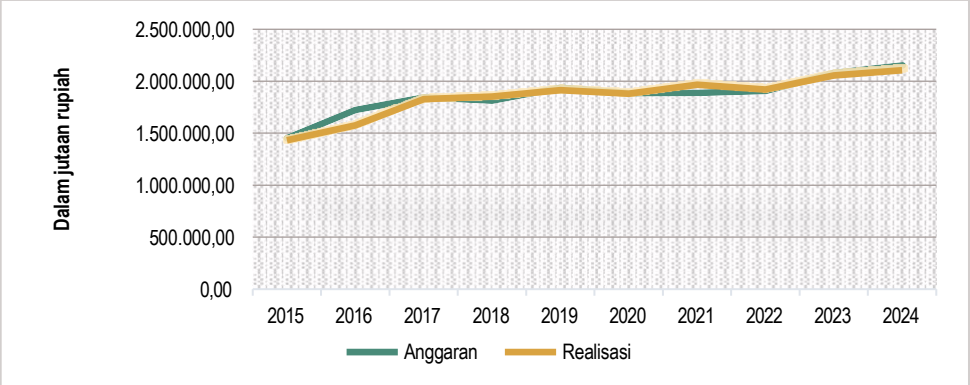

Gambar III.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2015 s/d TA 2024

b. Belanja dan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2024 diproyeksikan dalam APBD sebesar Rp2.215.562.514.390,00 sedangkan realisasinya hanya sebesar 97,62% yaitu sebesar Rp2.162.787.509.404,00. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi belanja dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.2 berikut ini.

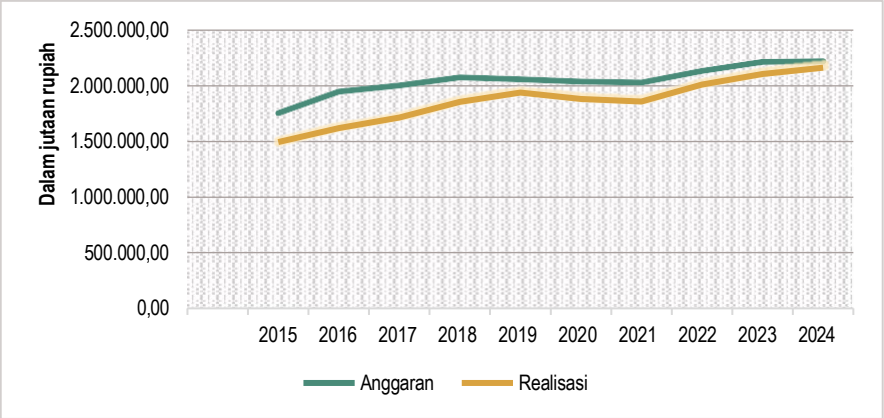

Gambar III.2 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2015 s/d TA 2024

c. APBD TA 2024 telah ditetapkan defisit sebesar (Rp90.648.329.850,00) dan dapat terealisasi sebesar (Rp56.941.385.021,00).
d. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2024 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp98.025.712.685,00 sedangkan realisasinya kurang sedikit dari ketetapan 100,00% yaitu sebesar Rp98.025.712.684,91.
e. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2024 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp7.377.382.835,00 sedangkan realisasinya sebesar 100,00% yaitu sebesar Rp7.377.382.835,00
f. Pembiayaan neto Kabupaten Wonosobo TA 2024 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp90.648.329.850,00, sedangkan realisasinya kurang sedikit dari ketetapan sebesar 100,00% yaitu sebesar Rp90.648.329.849,91.

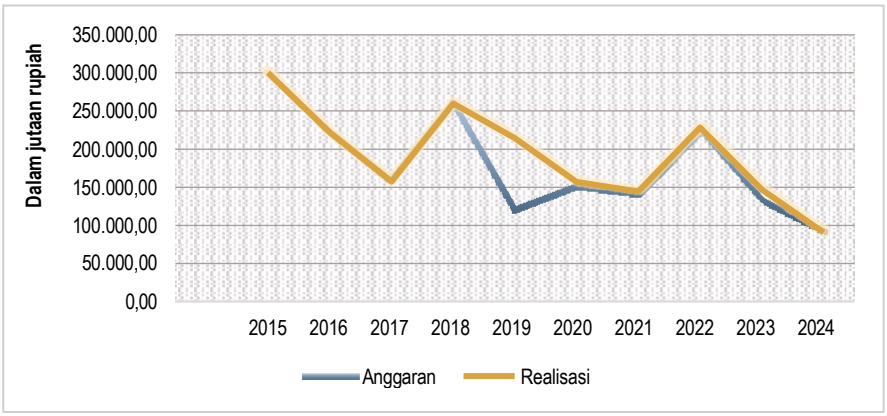

Gambar III.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto TA 2015 s/d TA 2024

g. Dalam APBD TA 2024 SILPA yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp33.706.944.828,91. Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.4 berikut ini.

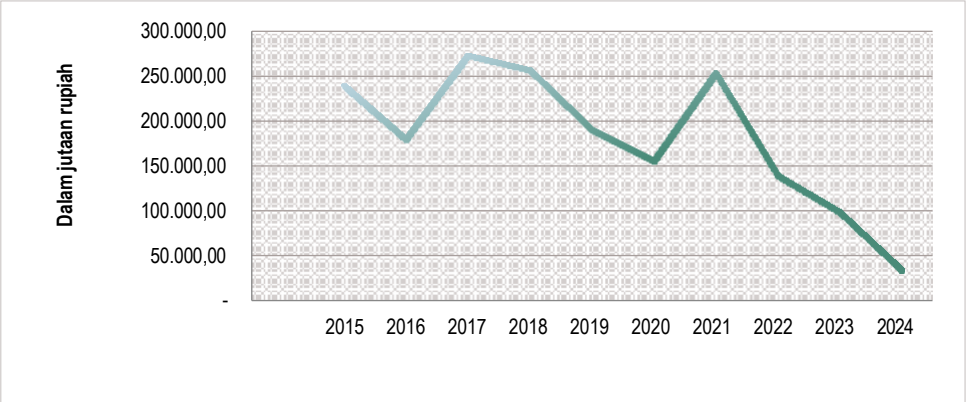

Gambar III.4 Realisasi SILPA TA 2015 s/d TA 2024

2. Realisasi TA 2024 Dibandingkan dengan Realisasi TA 2023

Perbandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2024 dan TA 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2 Komparasi Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Tahun Anggaran 2023

No	Keterangan	Tahun Anggaran 2024		Realisasi TA 2023	Persentase (%)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)/(5)x100
A	**Pendapatan dan Belanja**				
1	Pendapatan	2.124.914.184.540,00	2.105.846.124.383,00	2.057.280.405.565,91	2,36
2	Belanja dan Transfer	2.215.562.514.390,00	2.162.787.509.404,00	2.105.985.875.749,00	2,70
	Surplus/(Defisit)	(90.648.329.850,00)	(56.941.385.021,91)	(48.705.470.183,09)	16,91
B	**Pembiayaan**				
1	Penerimaan Pembiayaan	98.025.712.685,00	98.025.712.684,91	168.302.094.868,00	(41,76)
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.377.382.835,00	7.377.382.835,00	21.570.912.000,00	(65,80)
	Pembiayaan Neto	90.648.329.850,00	90.648.329.849,91	146.731.182.868,00	(38,22)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**-**	**33.706.944.828,91**	**98.025.712.684,91**	**(65,61)**

Tabel III.2 tersebut menunjukkan komparasi realisasi TA 2024 dan realisasi TA 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut.

a. Realisasi pendapatan TA 2024 sebesar Rp2.105.846.124.383,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.057.280.405.565,91 mengalami kenaikan sebesar 2,36%.
b. Realisasi belanja dan transfer TA 2024 sebesar Rp2.162.787.509.404,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.105.985.875.749,00 mengalami penurunan sebesar 2,70%.
c. Realisasi defisit TA 2024 sebesar (Rp56.941.385.021,00) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang mengalami defisit sebesar (Rp48.705.470.183,09) mengalami penurunan 16,91%.
d. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 sebesar Rp98.025.712.684,91 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp168.302.094.868,00 mengalami penurunan sebesar 41,76%.
e. Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2024 sebesar Rp7.377.382.835,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp21.570.912.000,00 mengalami penurunan sebesar 65,80%.
f. Realisasi pembiayaan netto TA 2024 sebesar Rp90.648.329.849,91 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp146.731.182.868,00 mengalami kenaikan sebesar 38,22%.

g. Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2024 sebesar Rp33.706.944.828,91 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp98.025.712.684,91 mengalami penurunan sebesar 65,61%.

3. Belanja yang Diamanatkan (*Mandatory Spending)* Peraturan Perundang-undangan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada lampiran huruf E. Hal khusus lainnya, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya termasuk kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain:

a. Anggaran Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengalokasikan fungsi pendidikan dalam APBD TA 2024 mencapai 31,19% dengan rincian perhitungan sebagaimana tabel III.3 berikut.

Tabel III.3 Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan Dalam APBD TA 2024

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rupiah) Anggaran	Realisasi
A.			
	a. Urusan Pendidikan	**669.600.128.265,00**	**681.342.711.394,00**
	1) Belanja Operasi:	**617.358.107.456,00**	**630.062.798.624,00**
	a) Belanja Pegawai	487.606.775.453,00	504.560.045.610,00
	b) Belanja Barang dan jasa	86.372.829.143,00	82.876.845.389,00
	c) Belanja Hibah	43.378.502.860,00	42.625.907.625,00
	2) Belanja Modal	**52.242.020.809,00**	**51.279.912.770,00**
	b. Urusan Bidang kebudayaan	**2.736.000.000,00**	**2.726.321.782,00**
	1) Belanja Operasi	**2.736.000.000,00**	**2.726.321.782,00**
	a) Belanja barang dan Jasa	780.000.000,00	770.321.782,00
	b) Belanja Hibah	1.956.000.000,00	1.956.000.000,00
	2) Belanja Modal	-	-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	**1.315.480.000,00**	**1.239.026.717,00**
	1) Belanja Operasi	**879.827.900,00**	**816.196.717,00**
	Belanja barang dan Jasa	879.827.900,00	816.196.717,00
	2) Belanja Modal	**435.652.100,00**	**422.830.000,00**
	d. Urusan Pemuda dan Olah Raga	**17.310.000.000,00**	**16.946.592.679,00**
	1) Belanja Operasi	**6.381.750.000,00**	**6.095.311.201,00**
	a) Belanja barang dan Jasa	2.121.750.000,00	2.035.311.201,00
	b) Belanja Hibah	4.260.000.000,00	4.060.000.000,00
	2) Belanja Modal	**10.928.250.000,00**	**10.851.281.478,00**
	e. Belanja di luar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	**-**	**-**
	1) Belanja Operasi	**-**	**-**
	2) Belanja Modal	**-**	**-**
B.	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)**	**690.961.608.265,00**	**702.254.652.572,00**
C.	**Total Belanja Daerah**	**2.215.562.514.390,00**	**2.162.787.509.404,00**
D.	**Rasio Anggaran Pendidikan (B/C) x 100%**	**31,19**	**32,47**

b. Anggaran Infrastruktur

Alokasi *Mandatory Spending* infrastruktur publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah dengan rincian sebagaimana tabel III.4 berikut.

Tabel III.4 Alokasi Belanja Infrastruktur Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rupiah) Anggaran
A.	**Total Belanja Daerah**	**2.215.562.514.390,00**
B.	**Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau Desa**	**402.408.018.070,00**
	1. Belanja Bagi Hasil	9.051.135.000,00
	2. Belanja Bantuan Keuangan	393.356.883.070,00
C.	**Selisih (A-B)**	**1.813.154.496.320,00**
D.	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	**725.261.798.528,00**

Tabel III.4 menunjukkan total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke desa sebesar Rp1.813.154.496.320 diantaranya terdistribusi ke beberapa belanja antara lain :

			(Rupiah)
a.	Belanja Pegawai	:	815.968.407.564,00
b.	Belanja Barang dan Jasa di luar belanja pemeliharaan	:	550.204.876.618,00
			1.366.173.284.182,00

Jika total belanja pegawai dan belanja barang jasa diluar pemeliharaan senilai Rp1.366.173.284.182,00 dikurangi belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke desa sebagaimana tabel III.4 sebesar Rp725.261.798.528,00 diperoleh hasil Rp446.981.212.138,00. Jika dilihat dari perhitungan di atas maka belanja APBD 2024 sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Adapun perhitungan Belanja Infrastruktur daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel III.5 dibawah ini.

Tabel III.5 Belanja Yang Diamanatkan (*Mandatory Spending*) Alokasi Fungsi Infrastruktur Publik

No		Komponen Perhitungan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A.	**1.**	**Belanja Modal**	**258.946.744.491,00**	**237.320.347.589,00**
		Belanja Modal Tanah	8.445.850.000,00	1.209.626.140,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.996.997.722,00	46.521.357.115,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.001.801.096,00	53.094.884.557,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	136.623.971.000,00	128.968.218.227,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.898.779.904,00	6.791.551.850,00
		Belanja Modal Aset Lainnya	979.344.769,00	734.709.700,00
	2.	**Belanja Pemeliharaan**	**21.254.630.042,00**	**20.693.802.283,00**
		Jumlah A (1+2)	**280.201.374.533,00**	**258.014.149.872,00**
B.	**1**	**Belanja Hibah**	**71.490.407.200,00**	**1.125.000.000,00**
	2	**Belanja Bantuan Sosial**	**1.125.000.000,00**	**10.391.240.400,00**
		Jumlah B (1+2)	**72.615.407.200,00**	**11.516.240.400,00**
C.		**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (A+B)**	**352.816.781.733,00**	**269.530.390.272,00**

Dari jumlah Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp352.816.781.733,00 sebagaimana tabel III.4 dibagi total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke desa sebesar Rp1.813.154.496.320,00 sebagaimana tabel III.5 maka prosentase alokasi belanja infrastruktur Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar 19,46%, atau belum memenuhi ketentuan sebesar paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke desa. Sejak penyusunan perencanaan pada RKPD 2024 belum memperhitungkan ketentuan untuk anggaran belanja infrastruktur publik sebesar 40%.

c. Dana Tranfer ke Desa

Dalam hal alokasi dana transfer ke desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (Dana transfer Umum), yakni DAU dan DBH (Dana Bagi Hasil) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perhitungan Bagi Hasil ke Desa berdasarkan target Tahun Anggaran 2024 sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel III.6 Perhitungan Bagi Hasil Ke Desa Berdasarkan Target

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rupiah) Anggaran	Keterangan
A.	**PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA**		
	1. Anggaran Pajak Daerah Dalam APBD Perubahan 2024	71.655.000.000,00	
	2. Anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Minimal 10% Dari Target Pajak Daerah	7.165.500.000,00	
	3. Anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dipasang pada APBD 2024/Perubahan APBD 2024	6.940.500.000,00	Terdapat Kurang Pasang Anggaran Bagi Hasil Pajak Berdasarkan Target Sebesar Rp225.000.000,00
B.	**PERHITUNGAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**		
	1. Anggaran Retribusi Daerah Dalam APBD Perubahan 2024	203.206.238.087,00	
	2. Dikurangi Retribusi Pelayanan Kesehatan	(179.747.328.769,00)	
		23.458.909.318,00	
	3. Anggaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Minimal 10% Dari Target retribusi Daerah	2.345.890.931,80	
	4. Anggaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Dipasang pada APBD 2024/Perubahan APBD 2024	2.110.635.000,00	Terdapat Kurang Pasang Anggaran Bagi Hasil Retribusi Berdasarkan Target Sebesar Rp235.255.931,80

Adapun perhitungan Bagi Hasil ke Desa berdasarkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel III.7 Perhitungan Bagi Hasil Ke Desa Berdasarkan Realisasi

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rupiah) Anggaran	Keterangan
A.	**PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA**		
	1. Anggaran Pajak Daerah Dalam APBD Perubahan 2024	75.756.036.031,00	
	2. Anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Minimal 10% Dari Target Pajak Daerah	7.575.603.603,10	
	3. Anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dipasang pada APBD 2024/Perubahan APBD 2024	6.940.500.000,00	Terdapat Kurang Pasang Anggaran Bagi Hasil Pajak Berdasarkan Realisasi Sebesar Rp635.103.603,10
B.	**PERHITUNGAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**		
	1. Anggaran Retribusi Daerah Dalam APBD Perubahan 2024	196.646.187.282,00	
	2. Dikurangi Retribusi Pelayanan Kesehatan	(177.579.311.366,00)	
		19.066.875.916,00	
	3. Anggaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Minimal 10% Dari Target retribusi Daerah	1.906.687.591,60	
	4. Anggaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Dipasang pada APBD 2024/Perubahan APBD 2024	2.110.635.000,00	Terdapat Lebih Pasang Anggaran Bagi Hasil Retribusi Berdasarkan Realisasi Sebesar Rp203.947.408,00

Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar 12,40% dari DBH dan DAU, telah memenuhi ketentuan yaitu paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel III.8 Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa Dalam Perubahan APBD 2024

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rupiah) Anggaran	Realisasi
A.	**DANA PERIMBANGAN**	**1.325.111.779.585,00**	**1.336.062.892.256,00**
B.	**Dikurangi Dana Alokasi Khusus**	**433.509.588.585,00**	**421.279.249.256,00**
	1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	128.165.157.000,00	126.115.328.554,00
	2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	305.344.431.585,00	295.163.920.702,00
C.	**DANA TRANSFER UMUM (A-B)**	**891.602.191.000,00**	**914.783.643.000,00**
	Yang terdiri dari		
	1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	36.722.239.000,00	36.933.022.000,00
	2. Dana Alokasi Umum	854.879.952.000,00	877.850.621.000,00
		891.602.191.000,00	914.783.643.000,00
	ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan	**89.160.219.100,00**	**91.478.364.300,00**
	ADD yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2024	**110.516.209.070,00**	**110.516.209.070,00**
	Prosentase	**12,40%**	**12,08%**

d. Anggaran Diklat ASN

Berdasarkan ketentuan yang diamanatkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, pada lampiran huruf E. Hal khusus lainnya, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 202 harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.
Adapun perhitungan Anggaran Diklat ASN Tahun Anggaran 2024 sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

		Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah Total	:	2.215.562.514.390,00	2.162.787.509.404,00
Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah	:	6.588.013.127,00	6.140.046.860,00
Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tanpa Belanja Gaji Dan Belanja Pemeliharaan		2.219.411.666,00	2.159.783.740,00
Capaian Alokasi Anggaran Untuk Pendidikan Dan Pelatihan ASN	:	0,10%	0,10%

Dari perhitungan tersebut, Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN pada APBD Tahun 2024 belum memenuhi ketentuan paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, karena baru terpenuhi sebesar 0,10%. Perhitungan anggaran pendidikan dan pelatihan hanya diukur dari anggaran pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang pendidikan dan pelatihan, dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan pada SKPD lain juga menganggarkan pendidikan dan pelatihan ASN yang mengarah pada pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagai contoh Inspektorat. Sejak penyusunan perencanaan pada RKPD 2024 belum memperhitungkan ketentuan untuk anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

e. Anggaran Pengawasan

kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain:

1) Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: Pemerintah Daerah kabupaten/kota: sampai dengan Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;

3) Diatas Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
4) Diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rpl5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
5) Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan.

Adapun perhitungan Anggaran Pengawasan ASN Tahun Anggaran 2024 sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

		Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah Total	:	2.215.562.514.390,00	2.162.787.509.404,00
Pagu Anggaran Inspektorat	:	9.322.100.122,00	9.024.890.013,00
Pagu Anggaran Inspektorat Tanpa Belanja Gaji	:	2.119.562.069,00	2.081.147.487,00
Capaian Alokasi Anggaran Untuk Pendidikan Dan Pelatihan ASN	:	0,10%	0,10%

Dari perhitungan tersebut, anggaran pengawasan pada APBD Tahun 2024 belum sesuai dengan ketentuan yaitu 0,5% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00. Belum terpenuhinya ketentuan diatas antara lain karena anggaran yang dialokasikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan untuk memenuhi prioritas pembangunan pada tahun direncanakan. Secara Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri di Inspektorat, untuk menghabiskan anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 masih belum mampu. Apabila terdapat Sisa Lebih Penggunan Anggaran (SiLPA) yang terlalu besar, maka akan mempengaruhi penilaian kinerja SKPD.

Anggaran KesehatanDalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.

Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional diarahkan juga pada peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Opitmalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

B. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebagai penyumbang tertinggi, Transfer Pemerintah Provinsi sebagai penyumbang terbesar ketiga, dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan bagian terbesar dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan tersebut berasal dari DAU, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu meskipun upaya-upaya optimalisasi pendapatan telah dilakukan namun kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah sehingga perlu pemecahan yang tepat. Upaya–upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan sudah terlihat dari semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkakan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak dan retribusi yang dapat memberatkan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta solusi yang dapat ditempuh adalah:

a. Menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak/retribusi tepat waktu serta penegakan peraturan perundangan perpajakan dan retribusi daerah, agar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui:
    1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pajak dan retribusi daerah;
    2) Penagihan pajak secara persuasif;
    3) Pemeriksaan dan pemantauan terhadap pembukuan wajib pajak;
    4) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
b. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang belum sesuai dengan potensi dan menjadi hak pemerintah daerah, upaya yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi.
c. Guna terus meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya bidang pajak dan retribusi daerah telah ditempuh langkah-langkah antara lain:
    1) Melakukan penggalian potensi-potensi pendapatan daerah, mengintensifkan siklus pendataan sampai dengan penarikan, pendataan ulang WP dan WR;
    2) Melakukan *update database* potensi pajak dan retribusi guna memetakan sember-sumber PAD yang sah.
    3) Melakukan pengawasan yang baik kepada petugas penarik/pemungut serta memberikan sanksi kepada WP dan WR yang tidak memenuhi kewajibannya.

2. Hambatan Pencapaian Target Belanja

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini berarti bahwa APBD disusun tidak saja berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Secara umum permasalahan belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang direncanakan. Kemudian di sisi lain tingkat penyerapan belanja dari tahun ke tahun berkisar 90%, sehingga berakibat sisa anggaran yang besar, hal ini disebabkan berbagai masalah antara lain jumlah paket pekerjaan yang banyak, tetapi tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani paket pekerjaan tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup disebabkan banyak kegiatan dalam proses gagal lelang, ataupun ketentuan peraturan yang turun terlambat pada beberapa jenis kegiatan yang dananya dibiayai dari pusat dan juga adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat ditengah pelaksanaan APBD sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan.

3. Hambatan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan daerah adalah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan daerah untuk dapat menutup defisit anggaran daerah.

4. Hambatan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi sangat penting barang daerah atau aset tetap dapat dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi beberapa hal menjadi hambatan antara lain karena jumlah fisik aset tetap yang banyak, sehingga membutuhkan ketelitian dan ketekunan, serta kompetensi SDM pada SKPD kurang memadai terkait dengan kemampuan dan kemauan serta permasalahan teknis lainnya yang membutuhkan komitmen kita bersama agar pengelolaan barang menjadi semakin baik.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menindaklanjuti PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar-periode maupun antar-entitas.

A. Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi

Berdasarkan Pasal 1 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang dimaksud Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

1. Domisili dan Dasar Hukum Entitas serta Juridiksi Tempat Entitas Berada

Entitas Pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdomisili di wilayah Kecamatan Wonosobo yang merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Wonosobo tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 2-4, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah 56311.

a) Letak Geografi

Kabupaten Wonosobo secara administratif dibagi menjadi 15 wilayah kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan. Secara geografis terletak antara 7o 11’ - 7o 36’ garis Lintang Selatan (LS) serta 109o 43’ - 110o 04’ garis Bujur Timur (BT). Berada pada rentang ketinggian 250 dpl – 2.250 dpl dominasi pada rentang 500 dpl – 1.000 dpl atau sebesar 50% dari keseluruhan luas wilayah Wonosobo. Berjarak dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) 120 km dan 520 km dari Ibukota Negara (Jakarta).

b) Luas Wilayah

Kabupaten Wonosobo memiliki luas 98.468 hektar (984,68 km2) atau 3,03% (persen) dari luas Jawa Tengah dengan komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99%), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99%), hutan negara 18.909,72 ha (19.20%), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01%). Kondisi kemiringan biogeofisik sebagai berikut:

1) $3\text{-}8^0$ seluas 0,544 km^2
2) $8\text{-}15^0$ seluas 247,691 km2

3) 15-400 seluas 421,736 km2
4) >400 seluas 318,299 km^2

c) Batas Wilayah

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu:

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

d) Jenis Tanah

Keadaan tanah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Tanah Andosol (25%) terdapat di Kecamatan Kejajar, sebagian Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar.
2) Tanah Regosol (40%) terdapat di Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Garung.
3) Tanah Podsolik (35%) terdapat di Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sapuran.

Jenis tanah meliputi Tanah Andosol seluas 10.817,7 hektar (ha), Tanah Regosol seluas 19.372,7 ha, Tanah Latosol seluas 63.043,4 ha, Tanah Argonosol seluas 761,1 ha, Tanah Mediterian merah kuning seluas 3.054 ha dan Tanah Gramosol seluas 1.778,6 ha.

e) Iklim

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 24 – 30℃ di siang hari, turun menjadi 20℃ pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15℃ pada malam hari dan 15 – 20℃ di siang hari. Curah hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 3.400 mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan Watumalang (1.554 mm).

f) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Wonosobo berdasarkan data BPS Kabupaten Wonosobo tahun 2024 adalah sebanyak 920.506 jiwa dengan rasio jenis kelamin 103,66.

2. Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo

Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Periode 2021-2025 dijabat oleh H. Afif Nurhidayat, S.Ag dan Dr. H. Muhammad Albar, M.M. dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada tanggal 26 Februari 2021 beliau merupakan pemimpin yang ke-24 sejak Wonosobo berdiri tahun 1825.

Pada TA 2024 Kabupaten Wonosobo telah mengadakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dilaksanakan secara serentak di daerah lain di

Indonesia. Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 812/PL.02.6-Pu/3307/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 menyatakan bahwa pasangan Nomor urut 1 yaitu Afif Nurhidayat, S.Ag dan Amir Husein unggul dengan perolehan suara sah terbanyak sebesar 318.163 yang selanjutnya pada hari Selasa 20 Februari 2025 dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo periode 2025 – 2030.

3. DPRD Kabupaten Wonosobo

Berikut susunan pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 170/20 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Keanggotaan 2019-2024 dan Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 170/26 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel IV.1 Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2019 - 2024

No.	Nama	Jabatan	Keterangan/Unsur
1	Eko Prasetyo Heru Wibowo, SH	Ketua DPRD	F. PDIP
2	Amir Husein	Wakil Ketua I DPRD	F. PKB
3	Sumardiyo, S.E.	Wakil Ketua II DPRD	F. P Gerinda
4	Agus Riyadi	Wakil Ketua III DPRD	F. P Golkar
5	Drs. Tono Prihatono	Sekretaris DPRD	Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Pada Tahun 2024 Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan Pemilihan Umum. SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo Nomor 858 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 telah menetapkan anggota dewan terpilih. Selanjutnya pada hari Senin 12 Agustus 2024 telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan 2024-2029. Kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan Tahun 2014-2029 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel IV.2 Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2024 - 2029

No.	Nama	Jabatan	Keterangan/Unsur
1	Eko Prasetyo Heru Wibowo, SH	Ketua DPRD	F. PDIP
2	Achmad Faqih, M.H	Wakil Ketua I DPRD	F. PKB
3	Sumardiyo, S.E.	Wakil Ketua II DPRD	F. P Gerinda
4	Mugi Sugeng, S.E., S.H	Wakil Ketua III DPRD	F. P Demokrat
5	Drs. Tono Prihatono	Sekretaris DPRD	Pemerintah Kabupaten Wonosobo

4. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Jumlah OPD di Kabupaten Wonosobo sebanyak 40 yang merupakan entitas akuntansi, didalamnya terdapat 1 OPD selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT. Setjonegoro, disamping itu ada 24 BLUD Unit Puskesmas di bawah OPD Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (2), disebutkan bahwa Kelurahan tidak termasuk sebagai OPD. Kelurahan merupakan Unit dibawah OPD Kecamatan, sehingga dalam struktur pengelolaan keuangan daerah kepala kelurahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, jumlah kelurahan sebanyak 29. Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dilihat lebih rinci pada Lampiran IV.1.

B. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang/kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan

untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face***)** laporan keuangan atau CaLK.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

C. Kebijakan Akuntansi Akun yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan - LRA

1) Pendapatan - LRA

a) Definisi Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

(2) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

(3) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

(4) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

(5) Pendapatan LRA terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah - LRA
- Pendapatan Transfer – LRA
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

b) Pengakuan Pendapatan - LRA

(1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010, maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

(2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

(a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

(b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

(c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Koordinator pengelolaan/Pemungut Pendapatan/ Pembantu Bendahara

Penerimaan (di lingkungan Perangkat Daerah) dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD/Bendahara Penerimaan.

(d) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan.

(e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c) Pengukuran Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(3) Untuk Pendapatan - LRA yang tidak melalui RKUD, diukur sesuai jumlah nilai kas yang diterima berdasarkan dokumen Pengesahan Pendapatan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan laporan entitas penerima.

d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

(2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

(a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

(b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

(c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

(d) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan Asli Daerah - LRA

a) Definisi Pendapatan Asli Daerah - LRA

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

(2) PAD bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.
(3) Klasifikasi Pendapatan - LRA secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b) Pengakuan PAD - LRA
PAD - LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.
(1) Pajak Diterima Dimuka
Pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
(2) Pendapatan yang tidak ada penetapan
(3) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Pengakuan PAD – LRA yang tidak melalui RKUD:
(4) PAD – LRA
Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang diterima oleh BLUD diakui berdasarkan pengesahan realisasi pendapatan melalui melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).

c) Pengukuran PAD - LRA
(1) PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

Pengukuran PAD – LRA yang tidak melalui RKUD:

(2) PAD – LRA berupa Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang diterima oleh BLUD diukur berdasarkan nilai kas yang diterima pada Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh BUD.

d) Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA
PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

3) Pendapatan Transfer - LRA

a) Definisi Pendapatan Transfer - LRA
(1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
(2) Pendapatan Transfer - LRA atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus yang diperoleh dari Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

b) Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA
   (1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit/Bukti Aktivitas Transaksi dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
   (2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA yang tidak melalui RKUD:

   (3) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN – LRA yang mempunyai karakteristik Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya dan hanya menerus salurkan kepada entitas lain yaitu Pemerintah Desa maka diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) yang dikeluarkan oleh BUD sesuai daftar rincian SP2D Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan tidak diakui sebagai Pendapatan-LO.
   (4) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik diakui berdasarkan pengesahan realisasi pendapatan transfer melalui Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) yang diterbitkan oleh BUD.

c) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA
   (1) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA yang tidak melalui RKUD:

   (2) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN – LRA diukur berdasarkan nilai kas yang diterima pada SP2DD yang diterbitkan BUD sesuai daftar rincian SP2D Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi OM SPAN.
   (3) Pendapatan Transfer – LRA berupa DAK Non Fisik diukur berdasarkan nilai kas yang diterima pada pengesahan realisasi pendapatan transfer melalui Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) yang diterbitkan oleh BUD.

d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA
   Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

a) Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA
   (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).
   (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

(a) Pendapatan Hibah – LRA,
(b) Dana Darurat – LRA,
(c) Pendapatan Lainnya – LRA.

b) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA yang tidak melalui RKUD:

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA yang telah diterima oleh satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa melalui RKUD diakui melalui pengesahan oleh BUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui SP2B yang dikeluarkan BUD).
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA berupa Pendapatan Hibah - LRA yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas tanpa melalui RKUD contohnya: dana yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi *COVID*-19, dana hibah dari Lembaga/masyarakat/BUMD/BUMN diakui melalui pengesahan oleh BUD dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui SP2B yang dikeluarkan BUD).

c) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diukur berdasarkan dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.
(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diukur berdasarkan SP3B yang dilaporkan oleh entitas penerima dan telah disahkan oleh BUD melalui SP2B.

d) Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b. Belanja

1) Definisi Belanja
a) Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan/atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
b) Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan LRA.
c) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

d) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
e) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
f) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
g) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
h) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
i) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
j) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
k) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan ATB.
l) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
m) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
n) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
o) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

(1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
(2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

p) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Belanja

a) Pengakuan Belanja dilakukan pada saat:
(1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
(2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi Perbendaharaan dengan terbitnya SP2D Ganti Uang (GU), SP2D GU Nihil, dan SP2D Tutup Uang (TU) Nihil.

b) Pengakuan Belanja yang dikeluarkan oleh entitas secara langsung tanpa melalui RKUD.

c) Belanja BLUD diakui berdasarkan pengesahan realisasi belanja melalui SP2B yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP3B.

d) Belanja yang bersumber dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri diakui berdasarkan pengesahan belanja melalui Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B;

e) Belanja yang bersumber dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, dan BOP Kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) diakui berdasarkan pengesahan realisasi belanja melalui SPB yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B;

f) Belanja Hibah yang bersumber dari BOSP, BOP PAUD, BOP Kesetaraan yang dihibahkan kepada Sekolah Swasta, TK/PAUD Swasta/BOP Pendidikan Kesetaraan diakui berdasarkan pengesahan realisasi belanja melalui SPB yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B;

g) Belanja yang berasal dari DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diakui berdasarkan pengesahan realisasi belanja melalui SPB yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B.

h) Belanja atas penggunaan dana yang bersumber dari hibah langsung yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (misalnya: sumbangan penanganan pandemi *COVID*-19) diakui berdasarkan pengesahan realisasi belanja melalui SP2B yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP3B.

3) Pengukuran Belanja

a) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

b) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
c) Pengembalian Belanja ke RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa/pengawas, kelebihan Belanja dan kesalahan Kode Rekening Belanja yang dilakukan pada Tahun Anggaran yang sama dicatat sebagai pengurang Belanja pada entitas yang bersangkutan.
d) Pengembalian Belanja ke RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa/pengawas, dan kelebihan Belanja pada Tahun Anggaran yang lalu dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah di BPPKAD.

Pengukuran Belanja yang dikeluarkan oleh entitas secara langsung tanpa melalui RKUD.

a) Belanja BLUD diukur sesuai jumlah nilai kas yang dikeluarkan pada Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh BUD.
b) Belanja yang bersumber dari BOSP pada SD Negeri dan SMP Negeri diukur sesuai jumlah nilai kas yang dikeluarkan pada SPB yang diterbitkan oleh BUD.
c) Belanja yang bersumber dari BOP PAUD pada TK Negeri, dan BOP Kesetaraan pada SKB diukur sesuai jumlah nilai kas yang dikeluarkan pada SPB yang diterbitkan oleh BUD.
d) Belanja Hibah yang bersumber dari BOSP, BOP PAUD, BOP Kesetaraan yang dihibahkan kepada Sekolah Swasta, TK/PAUD Swasta/BOP Pendidikan Kesetaraan diukur sesuai jumlah nilai kas yang dikeluarkan pada SPB) yang diterbitkan oleh BUD.
e) Belanja yang berasal dari DAK Non Fisik – BOK diukur sesuai jumlah nilai kas yang dikeluarkan pada SPB yang diterbitkan oleh BUD.
f) Belanja atas penggunaan dana yang bersumber dari hibah langsung yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (misalnya: sumbangan penanganan pandemi *COVID*-19) diukur sesuai jumlah nilai kas yang dikeluarkan pada SP2B yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP3B.

4) Penyajian dan Pengungkapan Belanja

a) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   (1) Belanja Operasi;
   (2) Belanja Modal;
   (3) Belanja Tak Terduga;
   dan dijelaskan dalam CaLK.
b) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
c) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja

modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

d) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Transfer

1) Definisi Transfer
   a) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
   b) Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat, dana bagi hasil dan bantuan keuangan oleh pemerintah daerah.
   c) Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Transfer
   a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
   b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN dan mempunyai karakteristik Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya dan hanya menerus salurkan kepada entitas lain yaitu Pemerintah Desa maka diakui berdasarkan penerbitan SP2D Pengesahan oleh BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi OM SPAN dan tidak diakui sebagai Beban pada LO.

3) Pengukuran Transfer
   a) Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
   b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN, diukur sesuai nilai kas pada SP2D Pengesahan yang diterbitkan BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil Pemotongan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi *OM SPAN*.

4) Penyajian dan Pengungkapan Transfer

   Pengungkapan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dalam CaLK sebagai berikut:
   a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi Transfer Masuk pada LRA dan realisasi Pendapatan Transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Masuk dengan realisasinya.
c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi Transfer Masuk dalam LRA dengan realisasi Pendapatan Transfer pada LO.
d) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
e) Informasi lainnya yang dinggap perlu.

d. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari :

1) Penerimaan pembiayaan, dan
2) Pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

1) Penerimaan Pembiayaan

a) Definisi Penerimaan Pembiayaan
(1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
(2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

b) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d) Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan
(1) Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
(2) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
(3) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, Kenaikan/Penurunan

realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Definisi Pengeluaran Pembiayaan
   1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
   2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.
   3) Bantuan yang diberikan kepada pihak ketiga/kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada pihak ketiga/kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

b) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

c) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
   Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

d) Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
   (1) Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
   (2) Pengeluaran Pembiayaan berupa dana bergulir yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
   (3) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana bergulir tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
   (4) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
   (5) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
   a) SAL adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
   b) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
   c) Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
   d) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
      (1) Surplus/Defisit – LRA
      (2) Pembiayaan Netto
      (3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
      (4) Perubahan SAL
   e) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
   f) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
   g) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
   h) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.
   i) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

2) Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
   a) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
   b) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

3) Penyajian dan Pengungkapan Saldo SAL
   SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*on face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

f. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berikut adalah pengukuran aset menurut klasifikasinya.

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a) **Kas dan Setara Kas**

(1) Definisi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(a) Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

i. Kas di Kas Daerah;
Merupakan kas milik Pemerintah Daerah yang ada pada RKUD, yang merupakan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan, dan pengeluaran pada tahun pelaporan.

ii. Kas di Bendahara Penerimaan;
Merupakan saldo kas di bank maupun tunai atas penerimaan pendapatan yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan.

iii. Kas di Bendahara Pengeluaran;
Merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran baik kas tunai maupun kas bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran merupakan sisa uang persediaan, sisa SP2D TU, Potongan pajak baik pajak pusat maupun daerah yang dipungut bendahara, Jasa Giro atas pengelolaan rekening bendahara pengeluaran.

iv. Kas di BLUD;
Merupakan posisi saldo kas di bank maupun tunai pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD pada tanggal pelaporan yang bersumber dari operasional BLUD.

v. Kas Dana BOS;
Merupakan seluruh kas, baik saldo kas di bank maupun tunai pada Bendahara BOSP.

vi. Kas Lainnya;
Merupakan kas yang tidak dapat diidentifikasi sebagai Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas Dana BOS. Saldo Kas akibat penerimaan yang bersumber dari hibah langsung yang

diterima dan digunakan secara langsung oleh SKPD tanpa melalui RKUD contohnya: kas yang bersumber dari pendapatan hibah dalam negeri maupun luar negeri dari kelompok masyarakat/perorangan/badan/Lembaga/organisasi/Lembaga swasta/organisasi swasta/sumbangan pihak ketiga, kas yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi *COVID*-19 diklasifikasikan pada Kas Lain-lain.

(b) Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

i. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
ii. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

(2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

(a) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
i. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
ii. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

(b) Atas dasar huruf (a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

(c) Kas dan setara kas diakui saat Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) diterima di RKUD dengan melakukan reklasifikasi dari Aset Lainnya

(d) Kas dan setara kas juga diakui atas dasar pengesahan atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja yang tidak melalui RKUD yakni melalui :
i. SP2B pada BLUD dan Kas dari pendapatan hibah secara langsung,
ii. SP2T yang diterbitkan oleh BUD,
iii. SPB yang dikeluarkan BUD atas belanja yang bersumber dari: BOSP pada Satuan Pendidikan Negeri, BOP PAUD pada TK Negeri, BOP Kesetaraan pada SKB, BOK pada Puskesmas.

(3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

(a) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

(b) rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD, namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
(c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) **Investasi Jangka Pendek**
(1) Definisi Investasi Jangka Pendek
(a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
(b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam BAS.
(2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek
(a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
i. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
ii. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.
(b) Penerimaan dari pelepasan/pengurang investasi jangka pendek dapat diakui sebagai penerimaan kas apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena PP daerah.
(c) Pengeluaran kas dapat diakui pada saat perolehan investasi jangka pendek dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam LRA.
(d) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) yang diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

(3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek
   (a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diukur dan dicatat sebagai berikut:
      i. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut
      ii. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
   (b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
(4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
   (a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
   (b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
      i. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
      ii. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
      iii. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
      iv. Kenaikan/Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
      v. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

c) **Piutang**
(1) Definisi Piutang
   (a) Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
   (b) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
   (c) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
   (d) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal penetapan sampai dengan tanggal pelaporan;

(e) Umur penyisihan piutang adalah jangka waktu dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
(f) Nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
(g) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
(h) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

(2) Pengakuan Piutang
(a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
i. Terdapat surat ketetapan/dokumen lain yang sah yang belum dilunasi;
ii. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
(b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
i. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
ii. jumlah piutang dapat diukur.
(c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.
(d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAU yang belum dibayarkan.
(e) Dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Daerah melakukan reklasifikasi Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke *TDF* (Aset Lainnya).
(f) Piutang DAK diakui berdasarkan berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAU yang belum dibayarkan.
(g) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
i. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
ii. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak

tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

(h) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum diterima.

(i) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum diterima.

(j) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

(k) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan atau/ tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

(l) Piutang lain-lain PAD yang Sah yang timbul atas penyaluran remunerasi DBH/DAU diakui ketika Bank Indonesia telah memberikan remunerasi melalui TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum diterima pada RKUD sampai dengan tanggal pelaporan. Pengurangan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diakui ketika remunerasi atas dana perimbangan/dana bagi hasil melalui fasilitas TDF telah disalurkan ke RKUD.

(3) Pengukuran Piutang

(a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

i. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

ii. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

iii. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

(b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

i. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

ii. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

iii. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

iv. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

i. DBH diukur pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran;

ii. DAU diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAU yang belum dibayarkan;

iii. DAK diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAK yang belum dibayarkan.

(d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

i. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

ii. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

(e) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang, masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(f) Penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

(g) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  i. Kualitas Piutang Lancar;
  ii. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  iii. Kualitas Piutang Diragukan;
  iv. Kualitas Piutang Macet.

(h) Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  i. Pajak dibayar sendiri Oleh WP (*self assessment*); dan
  ii. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assesment*).

(i) Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagaimana Tabel IV.3 sebagai berikut.

Tabel IV.3 Penggolongan Kualitas Piutang

NO	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
1	PAJAK dengan *Self Assesment*	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 5 Tahun
		Macet	Diatas 5 Tahun
2	PAJAK dengan *Official Assesment*	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 5 Tahun
		Macet	Diatas 5 Tahun
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Obyek Retribusi	Lancar	0 s/d 1 Bulan
		Kurang Lancar	Lebih dari 1 bulan s/d 3 Bulan
		Diragukan	Lebih dari 3 bulan s/d 12 Bulan
		Macet	Lebih dari 12 Bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Yang disebutkan Retribusi	Lancar	0 s/d 1 Tahun
		Kurang Lancar	Lebih dari 1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 3 Tahun
		Macet	Diatas 3 Tahun
5	TP-TGR	Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas piutang tersebut diatas.	

(4) Pemberhentian

(a) Pemberhentian Pengakuan

i. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

ii. Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau yang melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhitungnya pajak daerah dapat dilakukan pemberhentian pengakuan selain pelunasan.

iii. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau yang melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi daerah dapat dilakukan pemberhentian pengakuan selain pelunasan.

iv. Tata cara penghapusan piutang daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

v. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang merupakan dua hal yang diperlakukan secara terpisah.

vi. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
vii. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
viii. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel.*
ix. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
x. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
    - Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
        - Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
        - Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
        - Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
    - Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
    - Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
xi. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
xii. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
xiii. Perlakuan akuntansi penghapusan piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan
xiv. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebagaimana Tabel IV.4 berikut:

Tabel IV.4 Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur/Kualitas Piutang	KET
1.	Lancar	0 %	-
2.	Kurang Lancar	10 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
3.	Diragukan	50 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4	Macet	100 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

xv. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

xvi. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

(5) Penyajian dan Pengungkapan Piutang

(a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

i. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
ii. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
iii. penjelasan atas penyelesaian piutang;
iv. jaminan atau sita jaminan jika ada;
v. Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

(b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

(c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

(d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada

periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d) **Beban Dibayar Dimuka**

(1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

(2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun Sebagian atau keseluruhan manfaat atas barang/jasa/fasilitas dari pihak lain belum diterima/dinikmati.

(3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan selisih pembayaran yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar total kas yang dikeluarkan dibagi dengan total bulan masa pemanfaatan barang/jasa/fasilitas, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka diukur dengan pendekatan bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

(a) Apabila Transaksi terjadi pada tanggal 1 s/d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai beban selama satu bulan, tetapi jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai beban;

(b) Periode yang diperhitungkan sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah total bulan pemanfaatan aset/pertanggungan asuransi dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai Beban.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar dan diungkapkan secara cukup dalam CaLK.

e) **Persediaan**

(1) Definisi Persediaan

(a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

i. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

ii. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

iii. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

iv. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

(c) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam BAS.

(2) Pengakuan Persediaan
   (a) Persediaan diakui:
      i. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
      ii. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.
   (b) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*Stock opname*).

(3) Pengukuran Persediaan
   (a) Metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
   (b) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan/harga pokok produksi/nilai wajar.
   (c) Persediaan disajikan sebesar:
      i. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
      ii. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
      iii. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
   (a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
   (b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
      i. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
      ii. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang dan tidak disajikan dalam Neraca namun jenis, jumlah, dan nilainya diungkapkan dalam CaLK;
      iii. Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa

dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

f) **Aset Untuk Dikonsolidasikan.**

(1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan
Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

(2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

(3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan
Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan
Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas pelaporan. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

2) Aset Non Lancar

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, properti investasi, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a) **Investasi Jangka Panjang**

(1) Definisi Investasi Jangka Panjang

(a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

(c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

(d) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

(e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

(f) Diskonto atau premi adalah selisih kurang atau selisih lebih antara harga beli dengan nilai nominal pada suatu pembelian investasi

(g) Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi:
   i. Investasi surat berharga melalui pembelian saham dan/atau pembelian surat utang;
   ii. Investasi langsung melalui penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman.

(h) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam BAS.

(2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

(a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   i. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
   ii. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

(b) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

(c) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
   i. Dividen Tunai;
   ii. Dividen Saham; dan
   iii. Bagian Laba.

(d) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   i. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada Neraca dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LO, piutang dividen akan berkurang pada saat kas diterima di RKUD dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran.
   ii. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penerimaan dividen tunai akan mengurangi piutang dividen dan dicatat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam LRA.

(e) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

(f) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

i. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.

ii. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai penambahan nilai investasi pada Neraca dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada LO.

(3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

(a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

(b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

i. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

ii. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

iii. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

iv. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

v. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

vi. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan

digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

vii. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

viii. Secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang karena dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Jika dana tersebut hendak disalurkan kembali kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggarannya sehingga dana tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagai dana bergulir dimana dana bergulir dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke RKUD (*revolving fund*).

(c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

(d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

(e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
   i. Metode Biaya;
   ii. Metode Ekuitas;
   iii. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

(f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

(g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

(h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(i) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal

sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

(a) Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

(b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

(5) Penyisihan Investasi Non permanen Dana Bergulir

(a) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

(b) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

(c) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan presentase penyisihan digambarkan dalam tabel IV.5 berikut.

Tabel IV.5 Presentase Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

(d) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

b) **Aset Tetap**

(1) Definisi Aset Tetap

(a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

(c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

(d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

(e) Masa manfaat adalah:

i. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

ii. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

(f) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

(g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

(h) Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

(i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(l) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

i. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
ii. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
iii. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
iv. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

(m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

(o) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

(p) Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

(q) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam BAS.

(2) Pengakuan Aset Tetap

(a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

(b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
i. Berwujud;
ii. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
iii. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
iv. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
v. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
vi. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

(c) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

(d) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

(e) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti

pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

(f) Batasan nilai satuan minimum kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) aset tetap pada perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut :
   i. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
   ii. Pengeluaran untuk Gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   iii. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

(g) Aset Tetap yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat dalam buku inventaris diluar pembukuan (*ekstrakomptable*).

(h) Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya Tanaman yang dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah Tanaman yang dipelihara/dirawat pada Taman Kota, Alun-alun, Arboretum (kebun botani yang mengkoleksi pepohonan) dan Taman Tepian Jalan Protokol dengan beberapa jenis pohon sebagai berikut : Alpukat, Angsana, Belimbing, Beringin, Bintaro, Bungur, Cemara, Dadap Merah, Durian, Flambboyan, Glodokan/Glodongan, Ipik/Gayam, Jati, Jimitri, Kamboja, Karet, Kayu Putih, Kelapa, Kelengkeng, Kepel, Kersen, Ketapang, Keruing, Kupu-kupu, Mahoni, Manggis, Melinjo, Nangka, Nagasari/Dewadaru, Pagoda, Palem Sadang, Petai, Pinisium, Pulle, Rambutan, Sapu Tangan, Sawo, Sepatu Dea, Sikat Botol, Sukun, Tanjung, Tabebuya, dan Trembesi.

(3) Pengukuran Aset Tetap

(a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

(b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

(d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat

diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

(e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

(f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel IV.6 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga Perolehan/biaya pembebasan tanah, Biaya yang ditimbulkan dalam rangka perolehan tanah (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Appraisal Tanah, biaya memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan.
Peralatan dan Mesin	Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya ditimbulkan dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Teknis Pengadaan).
Gedung dan Bangunan	Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan perolehan Gedung dan Bangunan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Biaya perolehan atas Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui swakelola terdiri dari biaya bahan baku (termasuk Honorarium tim/pejabat pengadaan Bahan Baku), tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan (Termasuk Jasa Konsultan Perencanaan) dan pengawasan (Termasuk Jasa Konsultan Pengawas), Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya langsung yang timbul dalam rangka perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Biaya perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui swakelola meliputi biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan (Termasuk Jasa Konsultan Perencanaan) dan pengawasan (Termasuk Jasa Konsultan Pengawas), Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Aset Tetap Lainnya	Harga Pembelian/biaya perolehan, biaya langsung yang timbul dalam rangka Perolehan Aset Tetap Lainnya (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi). Biaya perolehan atas Aset Tetap Lainnya melalui swakelola untuk Aset Tetap Renovasi meliputi: biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

(g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*.
(h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
(i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

(j) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan secara Gabungan

(k) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

(l) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
(m) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

(n) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
(o) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/ fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

(p) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

(q) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

(r) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

(s) Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

(t) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

(u) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

(v) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset hibah/donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

(w) Aset Hibah/Donasi yang perolehannya tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran maka jenis aset ini tidak diterima melalui BUD, melainkan diterima langsung oleh Satker/SKPD. Untuk memastikan agar hibah/donasi tersebut dapat tercatat, maka dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah, Proses pengesahan ini diajukan oleh SKPD penerima kepada BUD.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

(x) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan

awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

(y) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan termasuk pengembangan, reklasifikasi, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

i. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
   - bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
   - bertambah umur ekonomis, dan/atau
   - bertambah volume, dan/atau
   - bertambah kapasitas produksi

ii. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*) aset tetap yaitu :
   - pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
   - pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
   - nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

(z) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penyusutan

(aa) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) tersebut dihitung berdasarkan penyusutan bulanan sejak aset tetap tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaanya berpindah.

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan :
Masa Manfaat : dihitung secara bulanan (tahun x 12 bulan).
Perolehan Aset Tahun 20XX : ditetapkan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

(bb) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dalam LO dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca sebagai pengurang nilai aset tetap.

(cc) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana diuraikan pada tabel IV.7 di bawah ini:

Tabel IV.7 Masa Manfaat Aset Tetap

Masa Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	ASET TETAP	
1.3.02	Peralatan dan Mesin	
1.3.02.01	Alat Besar	
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	10
1.3.02.01.02	Alat Besar Apung	8
1.3.02.01.03	Alat Bantu	7
1.3.02.02	Alat Angkutan	
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1.3.02.02.03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.3.02.02.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.3.02.02.05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.02.03.03	Alat Ukur	5
1.3.02.04	Alat Pertanian	
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	4
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.02.05.01	Alat Kantor	5
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.02.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.02.06.01	Alat Studio	5
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	5
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	5
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.02.08	Alat Laboratorium	
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	8
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.02.08.03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1.3.02.08.06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*	15
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1.3.02.09	Alat Persenjataan	
1.3.02.09.01	Senjata Api	10
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.02.09.03	Senjata Sinar	3
1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	3

Masa Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.02.10	Komputer	
1.3.02.10.01	Komputer Unit	4
1.3.02.10.02	Peralatan computer	2
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	
1.3.02.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	8
1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	8
1.3.02.12	Alat Pengeboran	
1.3.02.12.01	Alat Pengeboran Mesin	10
1.3.02.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.3.02.13	Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	
1.3.02.13.01	Sumur	20
1.3.02.13.02	Produksi	4
1.3.02.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	4
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.02.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	8
1.3.02.14.02	Alat Bantu Produksi	7
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.02.15.01	Alat Deteksi	8
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	2
1.3.02.15.03	Alat Sar	5
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	20
1.3.02.16	Alat Peraga	
1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	15
1.3.02.18	Rambu-rambu	
1.3.02.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1.3.02.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1.3.02.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	
1.3.02.19.01	Peralatan Olah Raga	3
1.3.03	Gedung dan Bangunan	
1.3.03.01	Bangunan Gedung	
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.03.02	Monumen	
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.03.03	Bangunan Menara	
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	50
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	
1.3.04.01.01	Jalan	10
1.3.04.01.02	Jembatan	50
1.3.04.02	Bangunan Air	
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.04.02.02	Bangunan Air Pasang Surut	50
1.3.04.02.03	Bangunan Air Rawa dan Polder	25
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.04.03	Instalasi Air Bersih/Baku	30
1.3.04.03.01	Instalasi Air Kotor	30
1.3.04.03.02	Instalasi	
1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.04.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.04.03.07	Instalasi Pertahanan	30
1.3.04.03.08	Instalasi Gas	30
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.04.03.10	Instalasi Lain	20
1.3.04.04	Jaringan	
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	30

Masa Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	40
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	20
1.3.04.04.04	Jaringan Gas	30
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	
1.3.05.02.01.01	Alat Musik	
1.3.05.02.01.01.02	Alat Musik Modern	5
1.3.05.07	Aset Tetap dalam Renovasi	
1.3.05.07.01	Aset Tetap dalam Renovasi	10

(dd) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu:
i. Tanah,
ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan,
iii. Bahan Perpustakaan Tercetak,
iv. Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro,
v. Kartografi, Naskah dan lukisan,
vi. Musik,
vii. Karya Grafika (*Graphic Material*),
viii. *Three Dimensional Artefacs And Realita*,
ix. *Tarscalt*,
x. Barang Bercorak Kesenian selain Alat Musik Modern,
xi. Alat Bercorak kebudayaan,
xii. Tanda Penghargaan,
xiii. Hewan Piaraan,
xiv. Ternak,
xv. Hewan Lainnya,
xvi. Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip),
xvii. *Crustea*(Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya),
xviii. *Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya),
xix. *Coelenterata* (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya),
xx. *Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya),
xxi. *Amphibia* (Kodok Dan Sebangsanya),
xxii. Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya),
xxiii. *Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya),
xxiv. *Algae* (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air),
xxv. Biota Perairan Lainnya,
xxvi. Tanaman,
xxvii. Barang Koleksi Non Budaya.

(ee) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

(ff) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
i. Penambahan masa manfaat Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

ii. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

(gg) Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

i. Penambahan masa manfaat atas aset tetap yang diperbaiki atau direnovasi maksimal sebesar masa manfaat awal aset tetap tersebut diperoleh. Sebagai ilustrasi masa manfaat gedung tempat kerja selama 50 tahun, sudah manfaatkan selama 10 tahun sehingga sisa masa manfaat tinggal 40 tahun, kemudian pada tahun ke 11 dilakukan renovasi yang mencapai 75% sehingga menambah masa manfaat selama 15 tahun, apabila sisa masa manfaat 40 tahun ditambah penambahan masa manfaat 15 tahun maka masa manfaat gedung tersebut menjadi 55 tahun, hal ini tidak sesuai dengan masa manfaat apabila membangun gedung baru yang hanya 50 tahun masa manfaatnya. Dengan demikian masa manfaat setelah adanya penambahan adalah maksimal sebesar masa manfaat awal gedung/aset tetap tersebut dibangun.

ii. Penambahan masa manfaat atas peningkatan/ perbaikan/renovasi beberapa aset tetap ditentukan dalam Tabel IV.8 berikut :

Tabel IV.8 Penambahan Masa Manfaat Atas Peningkatan/ Perbaikan/Renovasi Beberapa Aset Tetap

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar :			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 50%	3
		> 50%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 50%	3
		> 50%	4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 50%	3
		> 50%	4
Alat Angkutan :			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 50%	1
		> 50%	2

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 50%	1
		> 50%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Bengkel & Alat Ukur :			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		> 50%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Pertanian :			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga :			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar :			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan :			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		5>0% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat laboratorium :			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 60%	4
		>60% s.d 80%	6
		>80%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	*Overhaul*	0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 60%	4
		>60% s.d 80%	6
		>80%	8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory Lainnya	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	5
		>75%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Persenjataan :			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Komputer :			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	0
		>50%	2
Alat Eksplorasi :			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Pengeboran :			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian :			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Bantu Explorasi :			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat keselamatan Kerja :			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Kerja Penerbangan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Peraga :			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Proses / Produksi :			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Rambu-rambu :			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Olah Raga :			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	0% s.d. 50%	0

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50%	2
Bangunan Gedung :			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Monumen :			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Menara :			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Jalan dan Jembatan :			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 80%	7
		>80%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	50
Bangunan Air :			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	50
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 80%	15
		>80%	25
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 80%	5
		>80%	10
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Instalasi :			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 80%	5
		>80%	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 80%	5
		>80%	10
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	15
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	15
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	10
		>80%	20
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	10
		>80%	20
Jaringan :			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	10
		>80%	20
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
ASET TETAP DALAM RENOVASI :			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50%	7
Jalan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	5
		>75%	7

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

(hh) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

(ii) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

(jj) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang.

Reklasifikasi Aset Tetap

(kk) Timbulnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan untuk melakukan reklasifikasi terhadap suatu jenis aset tetap ke jenis aset tetap yang lain (sebagai contoh: Rambu-rambu lalu lintas darat yang sebelumnya masuk ke dalam jenis aset tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan ketentuan harus

dicatat dalam jenis aset tetap Peralatan dan Mesin) maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

i. Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap akun aset tetap terdampak sesuai dengan nilai perolehan ke dalam jenis aset yang baru;
ii. Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap saldo akumulasi penyusutan atas akun aset tetap terdampak ke dalam jenis aset yang baru dan jika berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi terjadi perbedaan penentuan masa manfaat yang berpengaruh pada nilai akumulasi penyusutan maka dilakukan penyesuaian.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

(a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

(b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

(c) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

i. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
ii. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
   - penambahan;
   - pelepasan;
   - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   - mutasi aset tetap lainnya.
iii. Informasi penyusutan yang meliputi:
   - Nilai penyusutan;
   - Metode penyusutan yang digunakan;
   - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

(d) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

i. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
ii. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
iii. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

iv. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

v. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

vi. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

vii. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

viii. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

ix. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

(5) Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

(a) KDP mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi padau mumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

(b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

(c) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

i. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

ii. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

iii. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

(d) KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
(e) KDP ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

(f) KDP dicatat dengan biaya perolehan.
(g) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
    i. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
    ii. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
    iii. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
(h) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
    i. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
    ii. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
    iii. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
    iv. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
    v. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
(i) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
    i. Asuransi;
    ii. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
    iii. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
(j) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
    i. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
    ii. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
    iii. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi
(k) Penghentian KDP
    KDP dapat diberhentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik atau kejadian lainnya. Penghentian Konstuksi Dalam Pengerjaan dapat berupa:
    i. Penghentian Sementara

Apabila KDP dihentikan sementara pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap disajikan dalam Neraca dan diungkapkan dalam CaLK;

ii. Penghentian Permanen
Apabila KDP dihentikan secara permanen pembangunannya, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK

(l) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu entitas Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi:

i. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
ii. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
iii. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
iv. Uang muka kerja yang diberikan; dan
v. Retensi.

c) Properti Investasi

(1) Definisi Properti Investasi

(a) Aset Pendasar (*underlying aset*) yaitu aset yang terikat pada suatu sewa, di mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa.

(b) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, arus kas dan/atau untuk meningkatkan nilai aset, dan tidak untuk:

i. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
ii. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(c) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa, dapat melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

(d) Sewa Operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansional seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

(e) Sewa Pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

(f) Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa, arus kas dan/atau untuk meningkatkan nilai aset dengan keadaan sebagai berikut:

i. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau

ii. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil tersebut.

(g) Berikut yang termasuk properti investasi:
   i. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas yang lain dalam jangka pendek;
   ii. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Dengan kata lain, jika tanah milik Pemerintah daerah tidak dipakai untuk kegiatan operasional namun akan dijual dimasa mendatang karena diyakini nilai tanah akan bertambah maka pengelompokannya masuk dalam properti investasi;
   iii. bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   iv. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   v. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi (tidak termasuk proses perencanaan pembangunan atau pengembangan).

(h) Berikut yang tidak termasuk properti investasi:
   i. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
   ii. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga, untuk:
      - digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
      - dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
   iii. properti yang digunakan sendiri, properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk

digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual,

iv. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
v. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
vi. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;
vii. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

(i) Dalam hal entitas pemerintah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasinya sebagai berikut:
   i. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
   ii. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% total luas aset digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah).

(j) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan dan sewa properti investasi yang terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Penyewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap.

(k) Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

(2) Pengakuan Properti Investasi

(a) Properti Investasi diakui sebagai aset apabila memenuhi kriteria:
   i. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

ii. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

(b) Dalam menentukan suatu properti investasi yang memenuhi kriteria huruf (a) angka i Pengakuan properti investasi diatas, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

(c) Kriteria sebagaimana huruf (a) angka ii Pengakuan properti investasi diatas biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

(d) Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

(e) Pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Biaya tersebut dicatat sebagai surplus/defisit pada saat terjadinya transaksi.

(f) Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengukuran Saat Pengakuan Awal Properti Investasi

(a) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

(b) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

(c) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Biaya perolehan properti investasi mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang perolehan Aset Tetap dalam kebijakan akuntansi ini.

(d) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya dibawah ini:

i. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
ii. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
iii. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

(e) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai sesuai dengan perikatan yang timbul. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

(f) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai akun kewajiban.

(g) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari akun kewajiban. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

(h) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (1) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (2) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

(i) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
i. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
ii. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
iii. selisih antara (1) dan (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

(j) Nilai wajar suatu aset dimana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
   i. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
   ii. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

(k) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnnya dalam satu entitas pelaporan dinilai menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

(4) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi

(a) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(b) Properti investasi, kecuali Tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyusutan Aset Tetap dalam kebijakan akuntansi ini.

(c) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

(d) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

(e) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

(f) Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui, dengan menggunakan penilaian secara internal atau independen;

(g) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan

nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

(h) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.

(i) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas pelaporan harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

(j) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, entitas pelaporan harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

i. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;

ii. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan

iii. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

(5) Alih Guna Properti Investasi

(a) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

i. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

ii. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

iii. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;

iv. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

(b) Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika:
   i. Terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk diijual, maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan;
   ii. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
   iii. pemerintah daerah memutuskan untuk melepas Properti Investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

(c) Entitas pelaporan dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika entitas pelaporan memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

(d) Apabila entitas pelaporan menggunakan metode biaya, alih guna antara Properti Investasi, Properti Yang Digunakan Sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.

(e) Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

(6) Pelepasan Properti Investasi

(a) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
   i. pelepasan; atau
   ii. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara pemanen; dan
   iii. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

(b) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

(c) Jika entitas pelaporan mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui.

(d) Apabila penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tidak dapat secara praktis dilakukan, pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk

menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

(e) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

(f) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

(g) Entitas pelaporan mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

(h) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai Surplus/Defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

(7) Penyajian Properti Investasi

(a) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.

(b) Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

(8) Pengungkapan Properti Investasi

Hal-hal yang yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam CaLK antara lain:

(a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

(b) metode penyusutan yang digunakan;

(c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

(e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;

ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

iii. pelepasan;

iv. penyusutan;

v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
vi. perubahan lain.

(f) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
i. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
iii. tanggal efektif penilaian kembali;
iv. nilai tercatat sebelum revaluasi;
v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;
vii. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti Investasi;

(g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

(h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

(i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

(j) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

(k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan peghasilan rental selama periode tersebut;
iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

(l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

(m) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain;

(n) informasi lain yang terkait dengan properti investasi.

d) Dana Cadangan

(1) Definisi Dana Cadangan

(a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

(b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

(c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

(2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

(3) Pengukuran Dana Cadangan

(a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan;

(b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;

(c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan;

(d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

(a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK;

(b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut;

(c) Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK;

(d) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

e) Aset Lainnya

(1) Definisi Aset Lainnya

(a) Aset Lainnya merupakan Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

(b) Aset Lainnya terdiri dari:

i. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

ii. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

iii. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
iv. Aset Tidak Berwujud;
v. Aset Lain-lain;
vi. Aset yang Dibatasi Penggunaannya;
vii. *Treasury Deposit Facility.*

(c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

(d) Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian Daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

(e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
i. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/ kemitraan.
ii. Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate*, Transfer – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
iii. Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
iv. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
v. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

(f) Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

(g) Jenis ATB adalah:

i. *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
ii. Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
iii. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
iv. *Software* komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
v. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
vi. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
vii. ATB Lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada.
viii. ATB dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

(h) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) termasuk aset hilang akibat

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dalam proses Tuntutan Ganti Kerugian (sebelum dikenakan/ditetapkan TGR).

(i) Aset yang dibatasi penggunaannya adalah Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan atau pihak luar lainnya. Contoh Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah : Kas Dana Tugas Pembantuan, Kas Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin).

(j) *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

(k) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam BAS.

(2) Pengakuan Aset Lainnya

(a) Aset Lainnya diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal

(b) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

(c) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

(d) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

i. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

ii. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

(e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

i. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

ii. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BGS/BOT, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

iii. Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

iv. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
v. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang (BAST).
vi. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
vii. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

(f) ATB diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas.
(g) Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.
(h) Dana Transfer - TDF diakui ketika pokok dana perimbangan/dana bagi hasil telah ditransfer dari rekening kas umum negara ke rekening TDF. Pengurangan Dana Transfer - TDF diakui pada saat penerimaan kas pada RKUD dari rekening TDF;
(i) Pengakuan Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah saat Kas tersebut ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu.

(3) Pengukuran Aset Lainnya
(a) Aset lainnya diukur dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
(b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
(c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari SKTJM atau SKP2K.
(d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
i. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
ii. Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah, dicatat sebesar nilai tanah yang dikerjasamakan tidak termasuk nilai bangunan dan gedung serta Aset Tetap lain yang berada diatasnyaa yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah.
iii. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan

Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

iv. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(e) ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

(f) Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
   i. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
   ii. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan, biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan, dan biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

(g) Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah:
   i. ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
   ii. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
   iii. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

(h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

(i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya (termasuk saldo Akumulasi Penyusutan).

(j) Proses penghapusan terhadap Aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

(k) Pengukuran Aset yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang ditempatkan pada suatu rekening.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
   (a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
   (b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
   (c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
   (d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
   (e) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
      i. Masa manfaat dan metode amortisasi;
      ii. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
      iii. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
   (f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
   (g) Aset yang Dibatasi Penggunaanya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penempatan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan atau penempatan dana, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
   (h) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Amortisasi Aset Lainnya

   (i) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
   (j) Aset Lainnya ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
   (k) Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
   (l) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
   (m) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
   (n) Masa manfaat ATB adalah sebagai berikut:

Tabel IV.9 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.01.	*Goodwill*	5
1.5.3.02.	Lisensi dan *franchise*	10
1.5.3.03.	Hak cipta	20
1.5.3.04.	Paten	20
1.5.3.05.	*Software*	10

(o) Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai "Beban Amortisasi".

g. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(1) Definisi Utang PFK
(a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
(b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

(2) Pengakuan Utang PFK
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D.

(3) Pengukuran Utang PFK
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang PFK
(a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

(b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain, jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
(c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Utang Bunga

(1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

(a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
(b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

(2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

(3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

c) Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

(2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

(3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

(1) Definisi Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
(a) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
(b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
(c) Akun ini menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
(d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

(2) Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

(3) Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
(a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
(b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada

saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
(a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
(b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

(3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

(1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

(2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

(3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca. Pendapatan Diterima Dimuka dicatat berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

(a) Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Diterima dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan masa pajak dikalikan dengan jumlah bulan yang belum terlampaui masa pajaknya.

(b) Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan pemanfaatan Kekayaan Daerah dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya oleh pihak penyewa. Pendapatan Diterima Dimuka diukur dengan pendekatan bulan, bukan harian dengan perhitungan sebagai berikut:

i. Apabila transaksi terjadi pada tanggal 1 s.d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai Pendapatan selama satu bulan, namun jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai pendapatan;
ii. Untuk periode yang diperhitungkan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka adalah total bulan Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan cara Sewa dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai pendapatan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

g) Utang Beban

1) Definisi Utang Beban
Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
(a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;
(b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelangganya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya;
(c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
(d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

3) Pengakuan Utang Beban
Utang beban diakui pada saat:
(a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
(b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
(c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

4) Pengukuran Utang Beban
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

5) Penyajian dan Pengungkapan Utang Beban
Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa

dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

h) Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

(2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

(3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan

a) Utang Dalam Negeri

(1) Definisi Utang Dalam Negeri
Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
(a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
(b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;
(c) Utang Dalam Negeri – obligasi;
(d) Utang pemerintah pusat;
(e) Utang pemerintah provinsi; dan
(f) Utang pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pengakuan Utang Dalam Negeri
(a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
(b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

(3) Pengukuran Utang Dalam Negeri
   (a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
   (b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
   (c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri
   Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Utang Luar Negeri

Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.
Pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima Pinjaman Luar Negeri dengan penerus pinjaman dan dapat meneruspinjamkan dan/atau menerushibahkan kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Definisi Utang Luar Negeri
   (a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
   (b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
   (c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

(d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

(e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value)* dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

(2) Pengakuan Utang Luar Negeri
Sesuai PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

(3) Pengukuran Utang Luar Negeri

(a) Sesuai paragraf 32 PSAP Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal Neraca.

(b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

(a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

(b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

(c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

(d) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

c) Utang Jangka Panjang Lainnya

(1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan

(b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
(c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
(d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
(e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

(2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
(b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

(3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
(a) Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
(b) Pengukuran mengenai Utang Kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang Kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang Kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
(b) Pengungkapan mengenai Utang Kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
(c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

h. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1) Definisi Ekuitas
a) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
b) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.
c) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

d) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
e) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun Aset adalah akun Kewajiban.
f) Dengan tidak diakomodirnya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

2) Pengakuan Ekuitas
Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
3) Pengukuran Ekuitas
Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
4) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas
Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

i. Pendapatan-LO

1) Definisi Pendapatan – LO
a) Pendapatan-LO adalah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b) Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
c) PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
d) BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit satuan kerja perangkat daerah pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
e) Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
f) *TDF* adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum daerah sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
g) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2) Pengakuan Pendapatan – LO

Pengakuan Pendapatan – LO Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan-LO diklasifkasikan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan-LO untuk pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

(2) Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Pendapatan-LO diakui ketika pembayaran dilakukan oleh wajib pajak. Dalam situasi tertentu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

(3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.

(4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Dalam situasi tertentu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

(5) Pengakuan Pendapatan LO yang tidak ada penetapan terlebih dahulu, diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

(6) Pendapatan dari hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan atau dalam bentuk bank garansi kemudian mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(7) Pada saat penyusunan laporan keuangan terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu :

i. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan *metode official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

ii. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

(8) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

(9) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Transfer - LO dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(10) Pendapatan Transfer-LO yang diterima secara non tunai menggunakan fasilitas TDF diakui ketika Dana Perimbangan dan atau Dana Bagi Hasil disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening TDF.

(11) Dalam hal terdapat penerimaan remunerasi atas mekanisme penyaluran Pendapatan Transfer-LO melalui TDF namun belum diterima di rekening kas umum daerah, maka remunerasi tersebut diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO.

(12) Untuk pendapatan hibah langsung berupa uang yang diterima satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah tanpa melalui RKUD maka pendapatan Hibah-LO diakui saat dilakukan Pengesahan Pendapatan melalui SP2B oleh BUD atas SP3B dari satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah.

(13) Dalam hal Pendapatan hibah langsung berupa Barang/Jasa maka Pendapatan Hibah-LO diakui saat dilakukan Pengesahan Pendapatan melalui Surat Pengesahan Sumbangan Barang/Jasa (SPS-BJ) oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Sumbangan Barang/Jasa (SP2S-BJ) dari Satker/SKPD.

3) Pengukuran Pendapatan – LO

a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
d) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer-LO diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
e) Dalam hal melalui mekanisme TDF maka Pendapatan Transfer-LO diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang diterima di rekening TDF.
f) Dalam hal melalui mekanisme TDF terdapat remunerasi namun belum diterima di RKUD maka Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO diukur dan dicatat sebesar nilai nominal remunerasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah.
g) Pendapatan-LO berupa Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak, sedangkan dalam bentuk barang/jasa dicatat sesuai dengan BAST dan jika data tersebut tidak diperoleh maka dicatat berdasarkan nilai wajar yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah/Donasi Langsung yang dikeluarkan oleh entitas penerima.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan – LO
a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
b) Pengungkapan Pendapatan – LO dalam CaLK meliputi:
(1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
(2) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
(3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
(4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
(5) Informasi lainnya yang diangap perlu.

j. Beban

1) Definisi Beban
a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
b) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.
c) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

d) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
e) Beban pegawai merupakan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada bupati/wakil bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
f) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
g) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
h) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
i) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
j) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
k) Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
l) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
m) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
n) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
o) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

p) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
q) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

2) Pengakuan Beban
a) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
b) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
c) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
d) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
e) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
(1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
(2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
(3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
f) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
g) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
h) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas

tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

i) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas contoh gaji dan tunjangan PNS. Sedangkan beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pembayaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran contoh seperti bukti pembayaran honorarium .

j) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

k) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

l) Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

m) Beban Hibah diakui bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD sebab harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

n) Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

o) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

p) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

q) Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D/Penyaluran Dana Transfer atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

3) Pengukuran Beban

a) Beban diukur dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;

b) beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan

c) dalam hal terjadi kesalahan atas transaksi perolehan Aset Tetap yang diperoleh dari Beban maka dilakukan koreksi pengurangan beban tersebut dan menambah Aset Tetap.

4) Penyajian dan Pengungkapan Beban
   a) Beban disajikan dalam LO Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
      (1) Beban Operasi, yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
      (2) Beban Transfer
      (3) Beban Non Operasional
      (4) Beban Luar Biasa
   b) Dalam rangka memenuhi ketentuan Format LO sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 maka Beban Barang dan Jasa yang merupakan Bagian Beban Operasi perlu dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Lain-lain.
   c) Beban Barang dan Jasa BLUD yang merupakan bagian dari Beban Barang dan Jasa dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
   d) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
   e) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
      (1) Pengeluaran beban tahun berkenaan.
      (2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
      (3) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
      (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

a. Definisi

1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos- pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6) Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Koreksi Kesalahan

1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   (a) Kesalahan yang tidak berulang
   Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
      (1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
      (2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
   (b) Kesalahan yang berulang dan sistemik
   Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
6) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
7) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
8) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja :
   (a) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
   (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambahakun pendapatan lain-lain-LRA.
   (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
   (d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
9) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
   (a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan

kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

(b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

10) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban :
   (a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.
   (b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
11) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LRA :
   (a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
   (b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
      (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
      (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
12) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
   Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
   (a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
   (b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
      (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
      (2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

13) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
    (a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    (b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

    Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
    (a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
14) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
    Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
    (a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
    (b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
15) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
16) Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
17) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

18) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

a) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
b) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
c) Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
d) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   (1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
   (2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
e) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
f) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

d. Perubahan Estimasi Akuntansi

a) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
b) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
c) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

e. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

a) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
b) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif

penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

c) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

d) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah- olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

e) Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
   (1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   (2) Fungsi tersebut tetap ada.
   (3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.
   (4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

f. Peristiwa Luar Biasa

a) Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

b) Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

c) Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

d) Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata

anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

e) Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
f) Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   (1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
   (2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   (3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
   (4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
g) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

E. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Kebijakan Akuntansi ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi untuk pencatatan dan pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

a. Definisi

1) Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :
   a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
   b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan);
2) Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan.
3) Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit/pemeriksaan laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

b. Pengakuan dan Pengukuran Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

a) Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.
b) Peristiwa yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan tergantung pada:

(1) Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
(2) Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

c) Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat diidentifikasikan menjadi dua jenis yaitu:
(1) Peristiwa Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan
Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan. Berikut beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya:
(a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
(b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak daerah (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
(c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan misal ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
(d) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
(e) Hasil pemeriksaan Auditor/Pemeriksa yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.
(2) Peristiwa Non Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan
Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan. Contoh dari peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan adalah :
(a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai asct dengan nilai secara teratur menggunakan wajar yang menyebabkan menurunnya niai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
(b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah tanggal pelaporan.

c. Pengungkapan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

1) Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggungjawab mengotorisasi laporan keuangan dalam CaLK *Audited*.
2) Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut dalam CaLK *Audited*.
3) Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup (a) Sifat peristiwa dan (b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat dalam CaLK *Audited*.

F. Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi. Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.

1) Definisi

a) Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas 2 nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu dan mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama 4 masa perjanjian konsesi jasa.
b) Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
c) Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
d) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
e) Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
   (1) Disediakan oleh mitra, yang (a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau (b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau

(2) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang (a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau (b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

2) Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

a) Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
   (1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
   (2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

b) Kebijakan Akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan terpenuhi.

c) Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

d) Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur ATB .

e) Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi ATB . Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

f) Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur ATB. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

g) Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

h) Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

i) Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

j) Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
   (1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
   (2) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
      - Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
      - Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

a) Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan.

b) Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
   (1) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
   (2) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

c) Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada Kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi ini.

d) Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai: pengurang

nilai pengakuan kewajiban yang diakui; bagian tagihan atas biaya keuangan; dan agian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

e) Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.

f) Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

a) Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

b) Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

c) Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.

d) Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas

penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

Membagi Perjanjian

a) Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.
b) Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada Kebijakanr akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan berpedoman pada Kebijakan akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

3) Penyajian dan Pengungkapan

a) Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengann pengaturan pada Kebijakan Akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.
b) Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam CaLK. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:
   (1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
   (2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
   (3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
      (a) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
      (b) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelakdanaan perjanjian konsesi jasa;
      (c) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;

(d) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
(e) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
(f) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa *(overhaul*);
(g) ketentuan pemberian ijin atau akses bag mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan

(4) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode pelaporan keuangan tahun berjalan;

(5) Pengungkapan sebagaimana dimaksud huruf b merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam Kebijakan Akuntansi lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai Kebijakan Akuntansi lain tersebut.

(6) Pengungkapan sebagaimana dimaksud huruf b disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasapengolahan air.

4) Ketentuan Transisi

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Pernyataan Kebijakan ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan Kebijakan ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan Kelompok Laporan Pelaksanaan Anggaran selain LPSAL yang disusun berdasarkan basis kas karena sampai dengan saat ini UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran disusun berdasarkan basis kas. Tujuan pelaporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang realisasi dan anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan lebih lanjut atas LRA untuk masing-masing pos Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan SILPA dapat dilihat secara rinci sebagaimana Tabel V.1 di bawah ini:

Tabel V.1 Ringkasan LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan	2.124.914.184.540,00	2.105.846.124.383,00	99,10	2.057.280.405.565,91	2,36
2.	Belanja Dan Transfer	2.215.562.514.390,00	2.162.787.509.404,00	97,62	2.105.985.875.749,00	2,70
3.	Surplus / (Defisit) = 1-2	(90.648.329.850,00)	(56.941.385.021,00)	62,82	(48.705.470.183,09)	16,91
4.	Pembiayaan	90.648.329.850,00	90.648.329.849,91	99,99	146.731.182.868,00	(38,22)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) = 3+4		**-**	**33.706.944.828,91**	**-**	**98.025.712.684,91**	**(65,61)**

A.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp2.105.846.124.383,00 atau mencapai 99,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.124.914.184.540,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.057.280.405.565,91 mengalami kenaikan sebesar Rp48.565.718.817,09 atau 2,36% dengan rincian padaTabel V.2 berikut.

Tabel V.2 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Penda patan Asli Daerah	314.598.106.120,00	307.369.375.961,00	97,70	267.058.875.925,91	15,09
2.	Penda patan Transfer	1.798.934.695.585,00	1.787.558.656.978,00	99,37	1.741.044.164.795,00	2,67
3.	Lain-la in Pendapatan yang Sah	11.381.382.835,00	10.918.091.444,00	95,93	49.177.364.845,00	(77,80)
	JUMLAH	**2.124.914.184.540,00**	**2.105.846.124.383,00**	**99,10**	**2.057.280.405.565,91**	**2,36**

Penyumbang terbesar Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Pendapatan Transfer sedangkan yang terkecil adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.1 berikut.

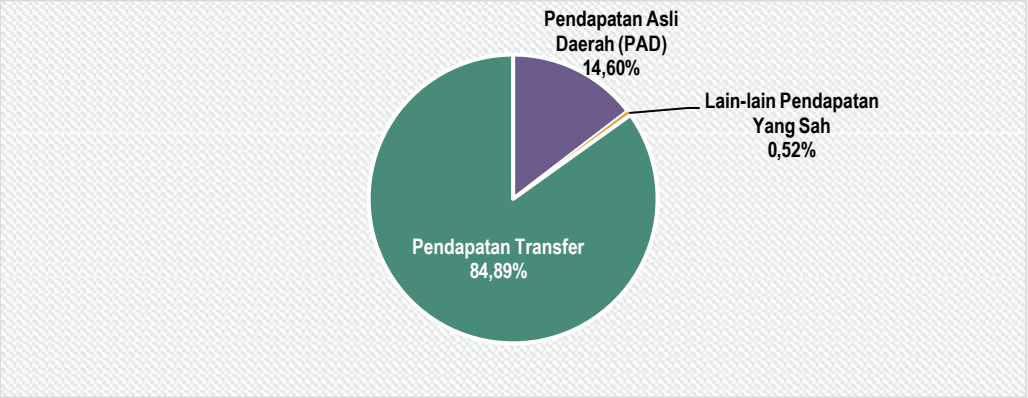

Gambar V.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp307.369.375.961,00 atau 97,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp314.598.106.120,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp267.058.875.925,91 mengalami kenaikan sebesar Rp40.310.500.035,09 atau 15,09 dengan rincian pada Tabel V.3 berikut.

Tabel V.3 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Pajak Daerah	71.655.000.000,00	75.756.036.031,00	105,72	65.448.626.748,00	15,75
2	Pendapatan Retribusi Daerah	203.206.238.087,00	196.646.187.282,00	96,77	11.205.591.108,00	1.654,89
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.464.935.245,00	25.809.039.238,00	101,35	23.040.333.270,00	12,02
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.271.932.788,00	9.158.113.410,00	64,17	167.364.324.799,91	(94,53)
	JUMLAH	**314.598.106.120,00**	**307.369.375.961,00**	**97,70**	**267.058.875.925,91**	**15,09**

Penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah TA 2024 adalah Pendapatan Retribusi Daerah sedangkan yang terkecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.2 sebagai berikut.

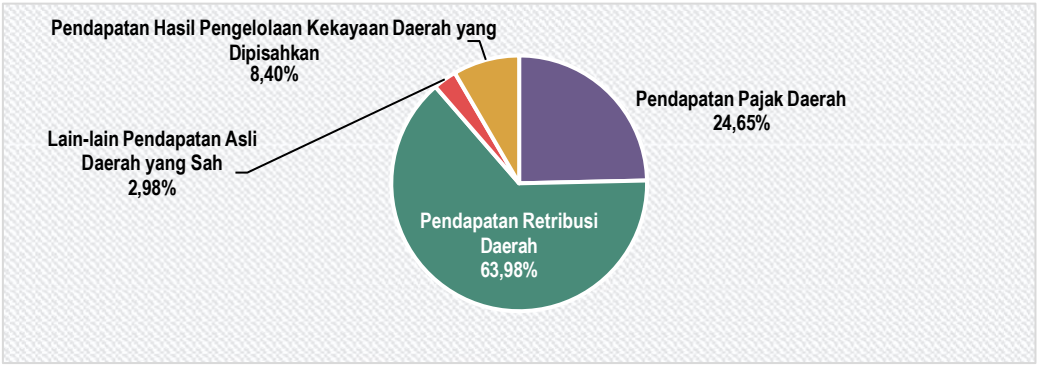

Gambar V.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp75.756.036.031,00 atau 105,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71.655.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp65.448.626.748,00, mengalami kenaikan sebesar Rp10.307.409.283,00, atau 15,75%, dengan rincian pada Tabel V.4 berikut.

Tabel V.4 Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.003.617.185,00	100,18	1.581.380.479,00	26,70
2.	Pajak Restoran	9.000.000.000,00	11.544.317.853,00	128,27	8.144.052.731,00	41,75
3.	Pajak Hiburan	250.000.000,00	261.166.277,00	104,47	133.356.609,00	95,84
4.	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	908.210.178,00	90,82	878.359.249,00	3,40
5.	Pajak Penerangan Jalan	20.005.000.000,00	21.017.979.615,00	105,06	18.051.051.369,00	16,44
6.	Pajak Parkir	100.000.000,00	120.085.100,00	120,09	105.396.000,00	13,94
7.	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	342.274.980,00	114,09	329.633.480,00	3,84
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	29.000.000.000,00	28.978.135.899,00	99,92	26.247.258.386,00	10,40
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000,00	10.580.248.944,00	105,80	9.978.138.445,00	6,03
	JUMLAH	**71.655.000.000,00**	**75.756.036.031,00**	**105,72**	**65.448.626.748,00**	**15,75**

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2024 direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo. Penyumbang terbesar adalah PBB-P2 dan yang terkecil adalah Pajak Parkir sebagaimana ilustrasi pada Gambar V.3 di bawah ini.

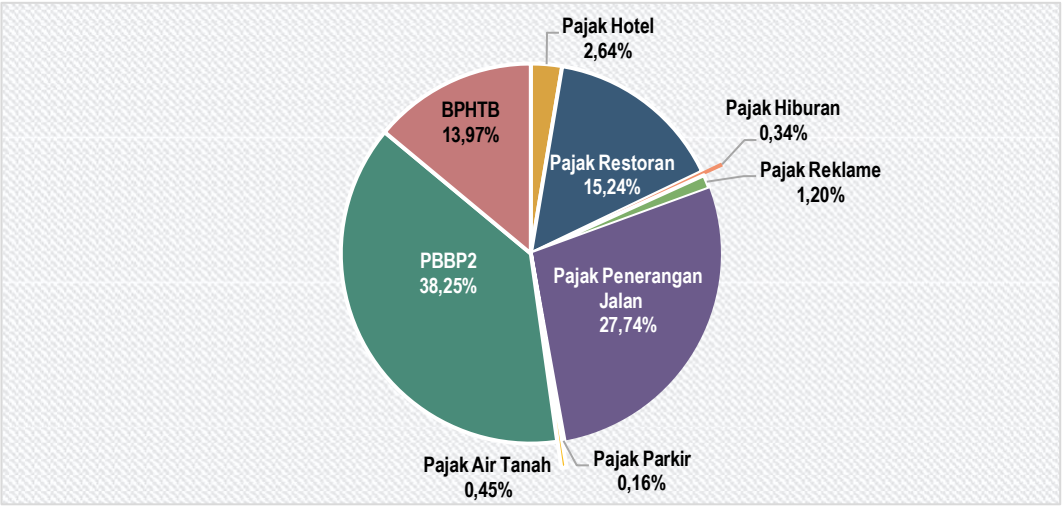

Gambar V.3 Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.1.a.1).a) Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp2.003.617.185,00 atau 100,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.581.380.479,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp422.236.706,00 atau 26,70%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan Obyek Pajak baru, pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, penggunaan teknologi *tapping-box*, dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Rincian anggaran dan realisasi Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 pada Tabel V.5 berikut.

Tabel V.5 Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.836.070.444,00	122,40	1.475.695.297,00	24,42
2.	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	500.000.000,00	167.546.741,00	33,51	105.685.182,00	58,53
	JUMLAH	**2.000.000.000,00**	**2.003.617.185,00**	**100,18**	**1.581.380.479,00**	**26,70**

A.1.a.1).b)Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp11.544.317.853,00 atau 128,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp8.144.052.731,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp3.400.265.122,00 atau 41,75%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan Obyek Pajak baru, pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, penggunaan teknologi tapping-box, dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum.
Rincian anggaran dan realisasi Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 pada Tabel V.6 berikut.

Tabel V.6 Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.000.000.000,00	4.557.406.406,00	113,94	2.244.440.952,00	103,05
2.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.000.000.000,00	6.986.911.447,00	139,74	5.899.611.779,00	18,43
	JUMLAH	**9.000.000.000,00**	**11.544.317.853,00**	**128,27**	**8.144.052.731,00**	**41,75**

A.1.a.1).c) Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp261.166.277,00 atau 104,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp133.356.609,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp127.809.668,00 atau 95,84%. Kenaikan tersebut berasal dari adanya penambahan obyek pajak yang ditetapkan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023, yaitu pengenaan Pajak Barang dan Jas Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan khususnya terhadap usaha pariwisata antara lain rekreasi wahana dan olahraga permainan.
Rincian anggaran dan realisasi Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 pada Tabel V.7 berikut.

Tabel V.7 Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	250.000.000,00	201.683.015,00	80,67	114.215.650,00	76,58
2.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	47.214.900,00	-	15.011.000,00	214,54
3.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)	-	12.268.362,00	-	4.129.959,00	197,06
	JUMLAH	**250.000.000,00**	**261.166.277,00**	**104,47**	**133.356.609,00**	**95,84**

A.1.a.1).d)Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat sebesar Rp908.210.178,00 atau 90,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp878.359.249,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.850.929,00 atau 3,40%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan Obyek Pajak baru di TA 2024.
Rincian anggaran dan realisasi Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 pada Tabel V.8 berikut.

Tabel V.8 Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	1.000.000.000,00	759.249.274,00	75,92	825.179.849,00	(7,99)
2.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	-	148.960.904,00	-	53.179.400,00	180,11
	JUMLAH	**1.000.000.000,00**	**908.210.178,00**	**90,82**	**878.359.249,00**	**3,40**

A.1.a.1).e) Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp21.017.979.615,00 atau 105,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.005.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp18.051.051.369,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp2.966.928.246,00 atau 16,44%. Kenaikan tersebut disebabkan mulai diterapkannya tarif baru sebesar 10% berdasarkan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 (tarif sebelumnya adalah sebesar 9%). PPJ dibagi ke dalam dua jenis yaitu PPJ Dihasilkan Sendiri dan PPJ Sumber Lain.
Rincian anggaran dan realisasi PPJ Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 pada Tabel V.9 berikut.

Tabel V.9 Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri /Videotron/Megatron	20.000.000.000,00	21.012.609.615,00	105,06	18.045.632.546,00	16,44
2.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000,00	5.370.000,00	107,40	5.418.823,00	(0,90)
	JUMLAH	**20.005.000.000,00**	**21.017.979.615,00**	**105,06**	**18.051.051.369,00**	**16,44**

Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana Tabel V.9 di atas merupakan penerimaan dari PLN, sedangkan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain berasal dari Wajib Pajak daerah lainnya.

A.1.a.1).f) Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp120.085.100,00 atau 120,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp105.396.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.689.100,00 atau 13,94%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan Obyek Pajak baru di TA 2024.

A.1.a.1).g) Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah (PAT) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp342.274.980,00 atau 114,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp329.633.480,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.641.500,00 atau 3,84%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan Obyek Pajak baru di TA 2024.

A.1.a.1).h)Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2024 mencapai Rp28.978.135.899,00 atau 99,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.000.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp26.247.258.386,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.730.877.513,00 atau 10,40%. Kenaikan dikarenakan upaya maksimal dari BPPKAD untuk memastikan efektivitas pemungutan PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan strategi sebagai berikut.

(1) Pemutakhiran Data SPPT PBB-P2
   (a) Kesesuaian data antara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan kondisi aktual objek pajak mendorong kepatuhan wajib pajak.
   (b) Proses pemutakhiran dilakukan secara masif dan berkelanjutan, baik oleh wajib pajak maupun BPPKAD.

(2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi
   Pelaksanaan secara rutin dan intensif melibatkan pemungut, pemerintah desa, serta wajib pajak.

(3) Sosialisasi dan Kemudahan Pembayaran
   (a) Sosialisasi melalui media daring/luring untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
   - Pembayaran dapat dilakukan secara fleksibel melalui: Aplikasi BIMA *Mobile,* Kantor Pos, Toko *Modern,* Kanal pembayaran digital lainnya.

Rincian ketetapan dan realisasi PBB-P2 per Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 pada Lampiran V.1.

Dalam pengelolaan PBB-P2 terdapat Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai dasar pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Wonosobo.

A.1.a.1).i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi BPHTB Kabupaten Wonosobo TA 2024 mencapai Rp10.580.248.944,00 atau 105,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp9.978.138.445,00 mengalami kenaikan sebesar Rp602.110.499,00 atau 6,03%. Kenaikan dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung yaitu:

(1) Penyempurnaan Sistem Aplikasi e-BPHTB
   Dilakukan *updating* dan *upgrading* aplikasi e-BPHTB untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

(2) Perubahan Kebijakan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
   Berdasarkan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023, ditetapkan:
   (a) NPOP TKP Rp300.000.000,00 untuk peralihan hak waris (sekali seumur hidup)
   (b) NPOP TKP Rp80.000.000,00 untuk peralihan hak selain waris
   Kebijakan ini menyebabkan wajib pajak yang melakukan *multiple* transaksi tetap berkewajiban membayar BPHTB penuh.

(3) Peningkatan Volume Peralihan Hak

Kenaikan jumlah transaksi peralihan hak melalui perubahan sertifikat tanah turut mendongkrak penerimaan BPHTB.

(4) Optimalisasi Proses Verifikasi
Pemeriksaan permohonan peralihan hak yang lebih ketat memastikan kesesuaian antara Nilai transaksi aktual dengan Nilai Pokok Objek Pajak (NPOP).

(5) Sinergi dengan Stakeholder Terkait
Koordinasi intensif dengan:
(a) PPAT/Notaris
(b) Pejabat Lelang
(c) Instansi terkait lainnya
(d) untuk optimalisasi pemungutan BPHTB.

A.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp196.646.187.282,00 atau 96,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp203.206.238.087,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp11.205.591.108,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp185.440.596.174,00, atau 1.654,89%. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh karena beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai diberlakukan tanggal 5 Januari 2024, antara lain beberapa PAD yang pada TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada Lain-lain PAD yang Sah (seperti Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dan Pendapatan BLUD), pada TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan pada Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.10 berikut.

Tabel V.10 Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1	Retribusi Jasa Umum	188.537.328.769,00	179.750.491.231,00	95,34	3.031.541.471,00	5.829,34
2	Retribusi Jasa Usaha	13.468.909.318,00	15.751.150.734,00	116,94	6.531.176.600,00	141,17
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000.000,00	1.144.545.317,00	95,38	1.642.873.037,00	(30,33)
	JUMLAH	**203.206.238.087,00**	**196.646.187.282,00**	**96,77**	**11.205.591.108,00**	**1.654,89**

Penyumbang terbesar Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Retribusi Jasa Umum dengan ilustrasi yang dapat dilihat pada Gambar V.4 di bawah ini:

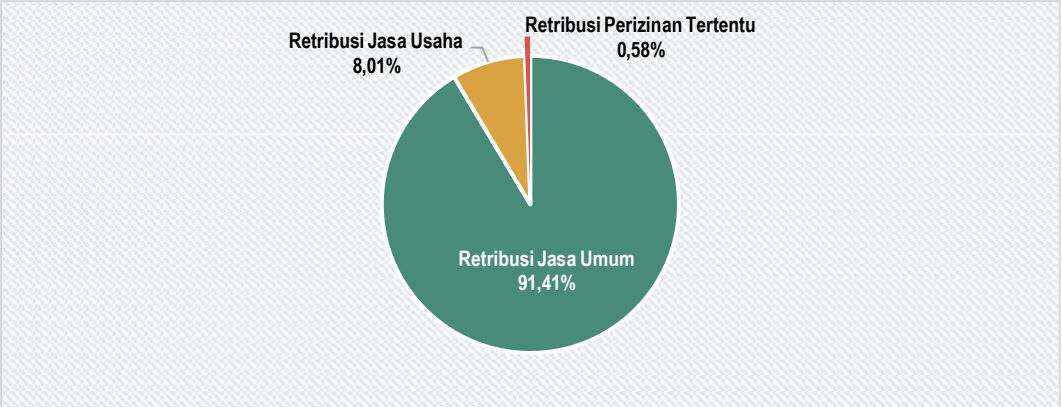

Gambar V.4 Komposisi Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.1.a.2).a) Retribusi Jasa Umum

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp179.750.491.231,00 atau 95,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp188.537.328.769,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.031.541.471,00, Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp176.718.949.760,00 atau 5.829,34% dikarenakan pemberlakukan Perda Nomor 11 Tahun 2023, dimana pendapatan dari pelayanan BLUD yang sebelumnya di Lain-lain PAD yang sah, namun pada TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di retribusi pelayanan kesehatan. Uraian terkait Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat dilihat pada Tabel V.11 berikut.

Tabel V.11 Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	179.747.328.769,00	177.579.311.366,00	98,79	554.970.000,00	31.898,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	400.000.000,00	443.939.000,00	110,98	231.541.500,00	91,73
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000,00	427.036.000,00	53,38	414.986.000,00	2,90
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000.000,00	1.192.014.865,00	15,89	815.074.644,00	46,25
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	343.856.500,00	(100,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	90.000.000,00	108.190.000,00	120,21	21.259.000,00	408,91
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	72.084.500,00	(100,00)
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	577.769.327,00	(100,00)
	JUMLAH	**188.537.328.769,00**	**179.750.491.231,00**	**95,34**	**3.031.541.471,00**	**5.829,34**

Retribusi Jasa Umum pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dengan komposisi penyumbang terbesarnya yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan penjelasan sebagai berikut.

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 direalisasikan sebesar Rp177.579.311.366,00 atau 98,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp179.747.328.769,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp554.970.000,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp177.024.341.366,00 atau 31.898,00%. dikarenakan pemberlakukan Perda Nomor 11 Tahun 2023, dimana pendapatan dari pelayanan BLUD yang sebelumnya di Lain-lain PAD yang sah, namun pada TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di retribusi pelayanan kesehatan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada TA 2023 berada di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonosobo, sedangkan pada TA 2024 retribusi termasuk dari seluruh UPTD Puskesmas Dinkes dan RSUD KRT Setjonegoro dengan rincian sebagaimana Tabel V.12 berikut.

Tabel V.12 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7) =((4)-(6))/(6)x100
1.	Dinkes	58.313.914.978,00	59.951.559.165,00	102,81	554.970.000,00	10.702,67
2.	RSUD KRT Setjonegoro	121.433.413.791,00	117.627.752.201,00	96,87	-	100,00
	JUMLAH	**179.747.328.769,00**	**177.579.311.366,00**	**98,79**	**554.970.000,00**	**31.898,00**

Rincian anggaran dan realisasi per jenis retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 pada Tabel V.13 berikut.

Tabel V.13 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	57.345.730.978,00	58.819.810.465,00	102,57	-	100,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	29.082.000,00	17.915.000,00	61,60	-	100,00
3.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	154.933.000,00	133.884.000,00	86,41	-	100,00
4.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	121.433.413.791,00	117.627.752.201,00	96,87	-	100,00
5.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	784.169.000,00	979.949.700,00	124,97	554.970.000,00	76,58
	JUMLAH	**179.747.328.769,00**	**177.579.311.366,00**	**98,79**	**554.970.000,00**	**31.898,00**

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan per OPD/BLUD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 pada Lampiran V.2.

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 direalisasikan sebesar Rp443.939.000,00 atau 110,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp231.541.500,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp212.397.500,00 atau 91,73% yang disebabkan mulai pemberlakuan tarif sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2023. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo (DLH).

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat terealisasikan sebesar Rp427.036.000,00 atau 53,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp800.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp414.986.000,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp12.050.000,00 atau 2,90%. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo (Disperkimhub).

(4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp1.192.014.865,00 atau 15,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp7.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp815.074.644,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp376.940.221,00 atau 46,25%. Kenaikan tersebut akibat diberlakukannya karena tarif tunggal sebagaimana ketentuan dalam Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo (Disdagkop UKM).

Rincian anggaran dan realisasi per jenis retribusi Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 pada Tabel V.14 berikut.

Tabel V.14 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Pelataran	1.667.000.000,00	280.798.900,00	16,84	291.144.000,00	(3,55)
2.	Retribusi Los	3.375.000.000,00	519.568.515,00	15,39	272.545.144,00	90,64
3.	Retribusi Kios	2.458.000.000,00	391.647.450,00	15,93	251.385.500,00	55,80
	JUMLAH	**7.500.000.000,00**	**1.192.014.865,00**	**15,89**	**815.074.644,00**	**46,25**

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menganggarkan maupun merealisasikan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini berbeda dengan TA 2023, di mana realisasi retribusi tersebut mencapai Rp343.856.500,00 melalui Disperkimhub. Perubahan ini terjadi karena berlakunya Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang efektif mulai 5 Januari 2024. Perda baru ini mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (beserta perubahannya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019), sehingga retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak lagi dipungut.

(6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 direalisasikan sebesar Rp108.190.000,00 atau 120,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp90.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp21.259.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp86.931.000,00 atau 408,91% yang disebabkan mulai pemberlakuan tarif sesuai Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023. Perbandingan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada Tabel V.15 berikut.

Tabel V.15 Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Perda 11 Tahun 2023 (Rp)	Perda Nomor 3 Tahun 2011 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
1.	Penyediaan Layanan Instalansi Pengolahan Air Limbah			
	a. Setiap kali penyedotan tinja untuk ukuran 1 tangki mobil tinja	250.000,00	50.000,00	200.000,00
	b. Pembuangan tinja di IPAL per 1 tangki mobil	150.000,00	-	150.000,00
	c. Setiap kali penyedotan tinja pada Instansi pemerintah, badan sosial dan tempat peribadatan serta lembaga kemasyarakatan per 1 tangki mobil	50.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	Penyediaan MCK di Taman Fatmawati, Taman Plaza, Taman Kartini dan Pasar			
	a. Buang air kecil	1.000,00	-	1.000,00
	b. Buang air besar	2.000,00	-	2.000,00
	c. Mandi	3.000,00	-	3.000,00
	JUMLAH	**456.000,00**	**75.000,00**	**381.000,00**

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan pada beberapa SKPD sebagaimana Tabel V.16 berikut.

Tabel V.16 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DPUPR	90.000.000,00	86.800.000,00	96,44	3.800.000,00	2.184,21
2.	Disdagkop UKM	-	21.390.000,00	-	17.459.000,00	22,52
	JUMLAH	**90.000.000,00**	**108.190.000,00**	**120,21**	**21.259.000,00**	**408,91**

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di DPUPR merupakan Penyediaan Layanan Instalansi Pengolahan Air Limbah, sedangkan pada Disdagkop UKM merupakan Penyediaan MCK.

(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menganggarkan maupun merealisasikan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Hal ini berbeda dengan TA 2023, di mana realisasi retribusi tersebut mencapai Rp72.084.500,00 melalui Disdagkop dan UKM. Perubahan ini terjadi karena berlakunya Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023. Perda baru ini mencabut Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (beserta perubahannya dalam Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2022), sehingga Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak lagi dipungut.

(8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menganggarkan maupun merealisasikan penerimaan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Hal ini berbeda dengan TA 2023, di mana realisasi retribusi tersebut mencapai Rp577.769.327,00 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosbo (Diskominfo). Perubahan ini terjadi karena berlakunya Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023. Perda baru ini mencabut Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (beserta perubahannya dalam Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019), sehingga Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi dipungut.

A.1.a.2).b) Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp15.751.150.734,00 atau 116,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.468.909.318,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.531.176.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.219.974.134,00 atau 141,17%. Penjelasan lebih lanjut terkait Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat pada Tabel V.17 berikut.

Tabel V.17 Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	9.600.000,00	-	405.088.400,00	(97,63)
2.	Retribusi Terminal	40.000.000,00	26.008.000,00	65,02	131.641.600,00	(80,24)
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	160.000.000,00	139.870.500,00	87,42	97.340.000,00	43,69
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	113.400.000,00	104.490.000,00	92,14	62.980.000,00	65,91
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	7.552.275.800,00	8.629.300.900,00	114,26	5.820.126.600,00	48,27
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000,00	16.000.000,00	106,67	14.000.000,00	14,29
7.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.588.233.518,00	6.825.881.334,00	122,15	-	100,00
	JUMLAH	**13.468.909.318,00**	**15.751.150.734,00**	**116,94**	**6.531.176.600,00**	**141,17**

Sesuai Tabel V.17 diatas, penyumbang terbesar realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 adalah Retribusi Jasa Usaha dengan ilustrasi Gambar V.5 sebagai berikut.

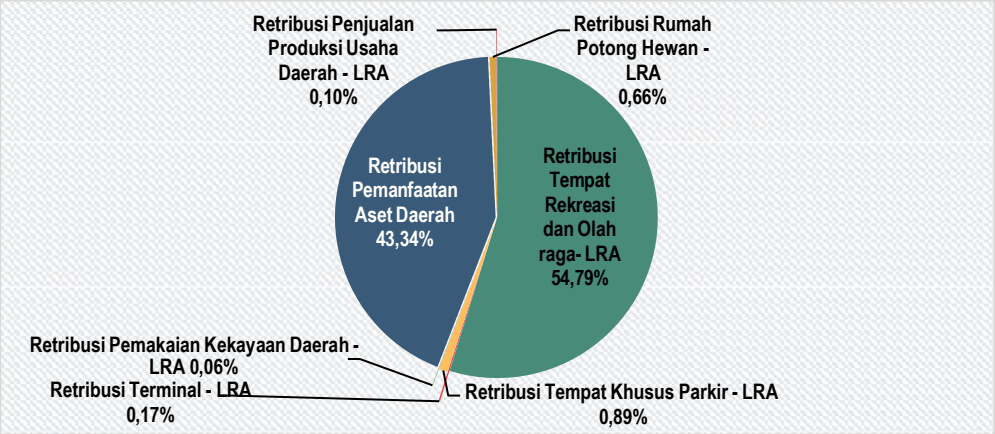

Gambar V.5 Komposisi Realisasi Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp9.600.000,00 pada DPUPR. Retribusi tersebut tidak dianggarkan dan merupakan Retribusi pemakaian laboratorium. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp405.088.400,00 pada sejumlah OPD, cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp395.488.400,00 atau 97,63% yang disebabkan oleh karena pada TA 2024 dianggarkan pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel V.18 berikut.

Tabel V.18 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per OPD TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	TA 2024 Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	TA 2023 Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	-	-	-	4.250.000,00	(100,00)
2.	Disnakerintrans	-	-	-	5.000.000,00	(100,00)
3.	DLH	-	-	-	15.050.000,00	(100,00)
4.	Diskominfo	-	-	-	23.000.000,00	(100,00)
5.	DPMPTSP	-	-	-	4.004.500,00	(100,00)
6.	Dispaperkan	-	-	-	4.018.500,00	(100,00)
7.	DPUPR	-	9.600.000,00	-	16.880.000,00	(43,13)
8.	DisdagkopUKM	-	-	-	94.802.900,00	(100,00)
9.	Bagian Umum	-	-	-	238.082.500,00	(100,00)
	JUMLAH	**-**	**9.600.000,00**	**-**	**405.088.400,00**	**(97,63)**

(2) Retribusi Terminal

Realisasi Retribusi Terminal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp26.008.000,00 atau 65,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp131.641.600,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp105.633.600,00 atau 80,24% yang disebabkan karena pada tahun 2023 Obyek Retribusi Terminal berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kemudian dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada TA 2024 Retribusi Terminal dipungut hanya berupa Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang kemudian diimplementasikan melalui Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023. Retribusi Terminal dianggarkan dan direalisasikan pada Disperkimhub.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp139.870.500,00 atau 87,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp160.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp97.340.000,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp42.530.500,00 atau 43,69%. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan dan direalisasikan pada dua OPD antara lain:

Tabel V.19 Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per OPD TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disparbud	125.000.000,00	132.170.500,00	105,74	89.640.000,00	47,45
2.	Disdagkop UKM	35.000.000,00	7.700.000,00	22,00	7.700.000,00	-
	JUMLAH	**160.000.000,00**	**139.870.500,00**	**87,42**	**97.340.000,00**	**43,69**

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp104.490.000,00 atau 92,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp113.400.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp62.980.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp41.510.000,00 atau 65,91% yang disebabkan oleh karena adanya pemberlakuan tarif sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo (Dispaperkan).

(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp8.629.300.900,00 atau 114,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.552.275.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.820.126.600,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp2.809.174.300,00 atau 48,27%. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (Disparbud) sebagaimana Tabel V.20 berikut.

Tabel V.20 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng	5.200.715.800,00	6.135.436.000,00	117,97	4.117.717.000	49,00
2	Obyek Wisata Telaga Menjer	600.000.000,00	588.874.000,00	98,15	479.892.000	22,71
3.	Obyek Wisata Kalianget	1.165.000.000,00	1.286.996.800,00	110,47	773.760.600	66,33
4.	Obyek Wisata Mangli	500.000.000,00	530.093.000,00	106,02	385.308.000	37,58
5	Obyek Wisata Waduk Wadaslintang	86.560.000,00	87.901.100,00	101,55	63.449.000	38,54
	JUMLAH	**7.552.275.800,00**	**8.629.300.900,00**	**114,26**	**5.820.126.600,00**	**48,27**

(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp16.000.000,00 atau 106,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp14.000.000,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.000,00 atau 14,29%. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, berupa penjualan bibit ikan, ikan konsumsi yang dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI) Kertek.

(7) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp6.825.881.334,00 atau 122,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.588.233.518,00 sedangkan TA 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasinya dikarenakan dianggarkan dan direalisasikan di Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.21 berikut.

Tabel V.21 Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per OPD TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	4.000.000,00	5.150.000,00	128,75	-	-
2.	Dinkes	-	60.000.000,00	-	-	-
3.	RSUD Setjonegoro	121.600.000,00	-	-	-	-
4.	DPUPR	151.500.000,00	-	-	-	-
5.	Disnakerintrans	35.000.000,00	37.405.000,00	106,87	-	-
6.	Dispaperkan	37.560.000,00	37.560.000,00	100,00	-	-
7.	DLH	5.000.000,00	14.800.000,00	296,00	-	-
8.	DPMPTSP	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	-
9.	Disparbud	198.404.200,00	268.143.899,00	135,15	-	-
10.	DisdagkopUKM	2.288.000.000,00	3.751.953.000,00	163,98	-	-
11.	Sekretariat Daerah	358.000.000,00	413.886.000,00	115,61	-	-
12.	BPPKAD	307.175.003,00	-	-	-	-
13.	Kec. Wonosobo	736.102.000,00	766.022.200,00	104,06	-	-
14.	Kec. Kertek	158.849.415,00	171.715.335,00	108,10	-	-
15.	Kec. Selomerto	302.450.000,00	402.132.000,00	132,96	-	-
16.	Kec. Leksono	1.497.000,00	20.975.000,00	1.401,14	-	-
17.	Kec. Watumalang	65.260.000,00	63.900.000,00	97,92	-	-
18.	Kec. Mojotengah	157.567.000,00	162.880.000,00	103,37	-	-
19.	Kec. Garung	23.520.000,00	21.200.000,00	90,14	-	-
20.	Kec. Kejajar	151.915.900,00	157.858.900,00	103,91	-	-
21.	Kec. Kalikajar	264.150.000,00	258.150.000,00	97,73	-	-
22.	Kec. Sapuran	144.451.000,00	137.800.000,00	95,40	-	-
23.	Kec. Kepil	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-	-
24.	Kec. Kaliwiro	24.533.000,00	24.350.000,00	99,25	-	-
25.	Kec. Wadaslintang	1.699.000,00	-	-	-	-
	JUMLAH	**5.588.233.518,00**	**6.825.881.334,00**	**122,15**	**-**	**-**

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah per jenis aset pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 pada Lampiran V.3.

A.1.a.2).c) Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu berupa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.144.545.317,00 atau 95,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.642.873.037,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp498.327.720,00 atau 30,33%. Penyebab penurunan tersebut terjadi karena Perda Nomor 11 Tahun 2023 mengubah nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Tahun 2024. Anggaran dan realisasi Retribusi PBG dapat dilihat pada Tabel V.22 berikut.

Tabel V.22 Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00	1.144.545.317,00	95,38	-	100,00
2.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	1.618.373.037,00	(100,00)
3.	Retribusi Izin Trayek	-	-	-	24.500.000,00	(100,00)
	JUMLAH	**1.200.000.000,00**	**1.144.545.317,00**	**95,38**	**1.642.873.037,00**	**(30,33)**

(1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Realisasi Retribusi PBG Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.144.545.317,00 atau 95,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00, sedangkan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi karena dianggarkan dan direalisasikan pada Retribusi IMB. Retribusi PBG TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (DPMPTSP).

(2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menganggarkan maupun merealisasikan Retribusi IMB karena dianggarkan dan direalisasikan pada Retribusi PBG, sedangkan TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp1.618.373.037,00. Retribusi PBG TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada DPMPTSP.

(3) Retribusi Izin Trayek

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menganggarkan maupun merealisasikan penerimaan Retribusi Izin Trayek. Hal ini berbeda dengan TA 2023, di mana realisasi retribusi tersebut mencapai Rp24.500.000,00 melalui Disperkimhub. Perubahan ini terjadi karena berlakunya Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023. Perda baru ini mencabut Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (beserta perubahannya dalam Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2022), sehingga Retribusi Izin Trayek tidak lagi dipungut.

A.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Pendapatan HPKDYD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp25.809.039.238,00 atau

101,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.464.935.245,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp23.040.333.270,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.768.705.968,00 atau 12,02%. Pendapatan HPKDYD tersebut merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagaimana Tabel V.23 berikut.

Tabel V.23 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	17.370.171.359,00	17.370.171.361,00	100,00	15.400.622.042,00	12,79
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	660.481.006,00	1.004.584.997,00	152,10	2.000.000.000,00	(49,77)
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	7.434.282.880,00	7.434.282.880,00	100,00	5.639.711.228,00	31,82
	JUMLAH	**25.464.935.245,00**	**25.809.039.238,00**	**101,35**	**23.040.333.270,00**	**12,02**

a) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) TA 2024 sebesar Rp17.370.171.361,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.370.171.359,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp15.400.622.042,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.969.549.319,00 atau 12,79%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.24 berikut.

Tabel V.24 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	PT BPR Bank Wonosobo	3.725.871.354,00	3.725.871.356,00	100,00	3.078.825.350,00	21,02
2.	PD BPR BKK Wonosobo	794.208.926,00	794.208.926,00	100,00	561.957.985,00	41,33
3.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	12.850.091.079,00	12.850.091.079,00	100,00	11.759.838.707,00	9,27
	JUMLAH	**17.370.171.359,00**	**17.370.171.361,00**	**100,00**	**15.400.622.042,00**	**12,79**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) TA 2024 sebesar Rp1.004.584.997,00 atau 152,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp660.481.006,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp995.415.003,00 atau 49,77% dengan rincian sebagaimana Tabel V.25 berikut.

Tabel V.25 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	PT Global Dharma Asri	153.881.006,00	42.341.109,00	27,52	-	100,00
2.	PT Bima Lukar	6.600.000,00	-	-	-	-
4.	PT Tambi	500.000.000,00	962.243.888,00	192,45	2.000.000.000,00	(51,89)
	JUMLAH	**660.481.006,00**	**1.004.584.997,00**	**152,10**	**2.000.000.000,00**	**(49,77)**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) dianggarkan dan direalisasikan di BPPKAD.

c) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) TA 2024 dapat terealisasikan sebesar Rp7.434.282.880,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.434.282.880,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.639.711.228,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp1.794.571.652,00 atau 31,82%, yang dianggarkan dan direalisasikan pada Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) dianggarkan dan direalisasikan di BPPKAD.

A.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lain-lain PAD yang Sah) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp9.158.113.410,00 atau 64,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.271.932.788,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp167.364.324.799,91 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp158.206.211.389,91 atau 94,53%. Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada Tabel V.26 di bawah ini.

Tabel V.26 Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	69.500.000,00	286.038.500,00	411,57	1.002.404.748,00	(71,46)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	387.136.000,00	-	3.418.260.414,00	(88,67)
3.	Jasa Giro	1.500.000.000,00	917.665.457,00	61,18	1.142.639.590,00	(19,69)
4.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	4.150.000,00	41,50	-	100,00
5.	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	3.281.378.863,00	164,07	2.285.799.744,00	43,55
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.000.000,00	11.355.000,00	81,11	61.212.485,00	(81,45)
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	8.034.134.963,00	684.213.945,00	8,52	1.058.133.715,00	(35,34)
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	44.047.851,00	-	209.754.523,00	(79,00)
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	203.146.264,00	-	334.194.606,00	(39,21)
10.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	21.408.600,00	(100,00)
11.	Pendapatan dari Pengembalian	1.819.262.240,00	2.513.104.521,00	138,14	1.876.325.804,00	33,94
12.	Pendapatan BLUD	525.035.585,00	825.877.009,00	157,30	155.687.851.448,91	(99,47)
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00	-	-	174.085.000,00	(100,00)
14.	Remunerasi	-	-	-	92.254.122,00	(100,00)
	JUMLAH	**14.271.932.788,00**	**9.158.113.410,00**	**64,17**	**167.364.324.799,91**	**(94,53)**

Sesuai Tabel V.26, penyumbang terbesar Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Pendapatan Bunga dengan ilustrasi sebagaimana gambar V.6 berikut.

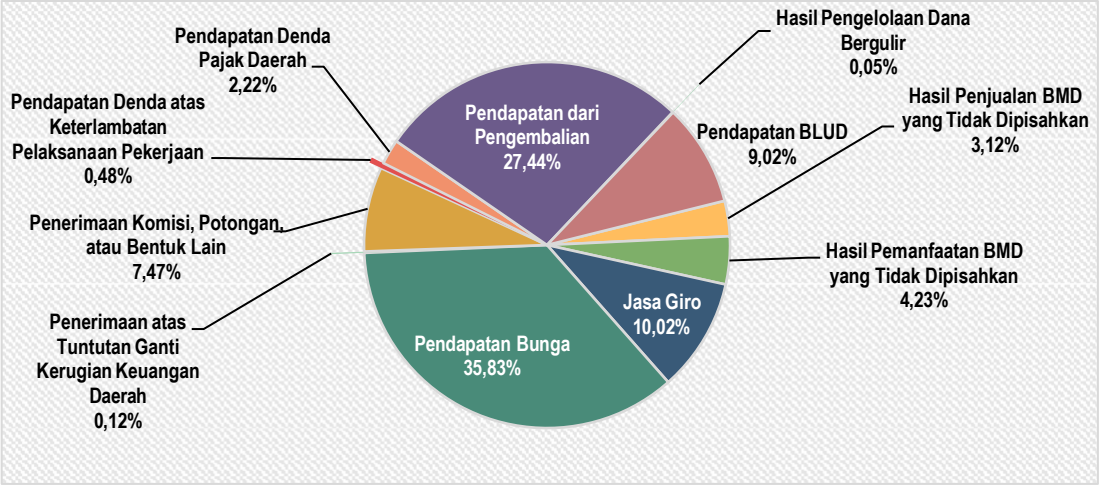

Gambar V.6 Komposisi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.1.a.4).a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp286.038.500,00 atau 411,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp69.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.002.404.748,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp716.366.248,00 atau 71,46%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.27 berikut.

Tabel V.27 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Hasil Penjualan Tanah	1.000.000,00	-	-	-	-
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	-	-	76.102.524,00	(100,00)
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	62.302.000,00	-	-	100,00
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
5.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	56.500.000,00	223.736.500,00	395,99	926.302.224,00	(75,85)
	JUMLAH	**69.500.000,00**	**286.038.500,00**	**411,57**	**1.002.404.748,00**	**(71,46)**

Penurunan signifikan tersebut disebabkan karena pada TA 2024 melakukan penjualan BMD yang sudah usang/rusak berat dan tidak dapat menunjang tugas pokok dan fungsi lebih sedikit dibandingkan dengan TA 2023.

Berdasarkan Tabel V.27 diatas, terdapat anggaran Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.000.000,00, namun tidak ada realisasi. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Perbup Wonosobo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap termasuk Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan (rusak berat, usang, atau sedang dalam proses penjualan) direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain. Setelah terjual, hasil penjualannya akan dicatat di pos Hasil Penjualan Aset Lainnya, karena pencatatan terakhir Peralatan dan Mesin berada di akun Aset Lain-lain yang merupakan bagian dari Aset Lainnya. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di BPPKAD.

A.1.a.4).b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menganggarkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, namun merealisasikan sebesar Rp387.136.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.418.260.414,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp3.031.124.414,00 atau 88,67%. Penurunan tersebut disebabkan oleh karena adanya ketentuan dalam Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023, dimana Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang sebelumnya pada TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan pada TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan pada Pendapatan Retribusi Daerah Hasil Realisasi Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.

Pengelolaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berada pada BPPKAD dengan bentuk sewa menyewa BMD.

A.1.a.4).c) Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro TA 2024 sebesar Rp917.665.457,00 atau 61,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.142.639.590,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp224.974.133,00 atau 19,69%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.28 berikut.

Tabel V.28 Jasa Giro Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.400.000.000,00	771.841.573,00	55,13	1.091.225.929,00	(29,27)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	145.823.884,00	145,82	51.413.661,00	183,63
	JUMLAH	**1.500.000.000,00**	**917.665.457,00**	**61,18**	**1.142.639.590,00**	**(19,69)**

Jasa Giro TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di BPPKAD atas penempatan kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Jateng, Rekening Penampungan Gaji di Bank Jateng, 25 Rekening BLUD di Bank Jateng, 24 Rekening BOK Puskesmas di BNI46, 24 Rekening Swakelola PMT Puskesmas, 92 Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bank Jateng, 516 Rekening BOS SD dan SMP Negeri di Bank Jateng, dan 516 Rekening BOSDA SD dan SMP Negeri di Bank Jateng.

Penerimaan Jasa Giro dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Wonosobo dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Wonosobo Nomor: 900/1092/BPPKAD/2018 Nomor 1710/PEM.01.01/023/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengelolaan Uang Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir diubah dengan addendum nomor 900/2084.1/BPPKA/2023 1010/PMS.04/023/2023 tanggal 29 November 2023.

A.1.a.4).d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024 sebesar Rp4.150.000,00 atau 41,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00, sedangkan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi dikarenakan diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Rincian Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024 adalah sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
A	**Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi**	**3.900.000,00**
1	Setoran Dana Bergulir dari USP PM	750.000,00
2	Setoran Dana Bergulir dari KUD HRP	3.150.000,00
B	**Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat**	**250.000,00**
3	Setoran Dana Bergulir dari IK Batako FKP Kejajar	250.000,00
	Jumlah A + B	**4.150.000,00**

A.1.a.4).e) Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga TA 2024 sebesar Rp3.281.378.863,00 atau 164,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagai berikut:

1) Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp33.433.673,00.
2) Hasil penempatan deposito Pemerintah Daerah yang bersumber dari Kas di Kas Daerah pada Bank Jateng sebesar Rp3.247.945.190,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.23 berikut.

Tabel V.29 Pendapatan Bunga Deposito Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	No Seri	Nominal (Rp)	Tanggal Penanaman	Tanggal Penutupan	Suku Bunga	Bunga Deposito (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	A367071	25.000.000.000,00	18/01/2024	26/03/2024	5,00%	232.876.711,00
2.	A367073	25.000.000.000,00	18/01/2024	18/07/2024	5,00%	623.287.669,00
3.	A367127	25.000.000.000,00	03/04/2024	03/04/2024	5,00%	99.315.068,00
4.	A367128	25.000.000.000,00	04/03/2024	14/11/2024	5,00%	873.287.669,00
5.	A367144	25.000.000.000,00	13/05/2024	15/08/2024	5,00%	321.917.807,00

6.	A387044	25.000.000.000,00	05/08/2024	30/12/2024	5,00%	503.424.656,00
7.	A387066	15.000.000.000,00	09/09/2024	30/12/2024	5,00%	230.136.984,00
8.	A387067	15.000.000.000,00	09/09/2024	30/12/2024	5,00%	230.136.984,00
9.	A387074	15.000.000.000,00	24/09/2024	28/11/2024	5,00%	133.561.642,00
JUMLAH						**3.247.945.190,00**

Pendapatan Bunga TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di BPPKAD.

A.1.a.4).f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2024 sebesar Rp11.355.000,00 atau 81,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp61.212.485,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp49.857.485,00 atau 81,45%. Penurunan tersebut disebabkan oleh karena pada TA 2024 sisa yang harus dilunasi oleh pihak yang menanggung beban Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian semakin berkurang serta pada TA 2024 tidak ada penambahan pembebanan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di BPPKAD.

A.1.a.4).g) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2024 sebesar Rp684.213.945,00 atau 8,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.034.134.963,00, sedangkan pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp1.058.133.715,00 mengalami penurunan sebesar Rp373.919.770,00 atau 35,34%. Pada realisasi Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain terdapat Opsen PKB dan BBNKB sebesar Rp194.352.000,00 yang disetor ke rekening Kas daerah pada bulan Desember 2024. Rincian realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2024 secara rinci adalah sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

	BPPKAD		
(1)	Pengembalian TL Temuan atas HP BPK pada BPBD TA 2023	:	199.021.716,00
(2)	Opsen PKB dan BBNKB Kabupaten Wonosobo	:	194.352.000,00
(3)	Pengembalian Kelebihan Belanja Modal Jalan TL Temuan atas HP BPK pada DPUPR TA 2023	:	100.000.000,00
(4)	Hasil Penjualan Pasar Murah Disperindag	:	55.770.000,00
(5)	Pelunasan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Diskominfo	:	34.194.550,00
(6)	Pengembalian TL Temuan atas HP BPK pada Disparbud (Premi Asuransi Jasa Raharja) TA 2023	:	30.099.880,00
(7)	Pengembalian dari PT Taspen	:	19.706.141,00
(8)	Kelebihan penerimaan PBB, Kelebihan penerimaan Denda PBB, Pajak Restoran, Penggunaan Fasilitas (alun-alun, lapangan kalibeber, pemasangan reklame)	:	15.420.291,00
(9)	Pengembalian dari PBVSI, PBSI, Kelebihan Pembayaran TKI DPRD, Kelebihan Pembayaran Asuransi DPRD, Sisa Tryout karate, lain-lain)	:	14.151.894,00
(10)	Pengembalian PNTPN Lembaga Dana PAUD	:	11.045.473,00
	DPUPR		
(1)	Penjualan Drum Bekas Aspal	:	10.452.000,00
	Jumlah		**684.213.945,00**

A.1.a.4).h) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menganggarkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, namun merealisasikan sebesar Rp44.047.851,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp209.754.523,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp165.706.672,00 atau 79,00%. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 direalisasikan di BPPKAD.

A.1.a.4).i) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 dapat sebesar Rp203.146.264,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp334.194.606,00

cenderung mengalami penurunan sebesar Rp131.048.342,00 atau 39,21%. Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 direalisasikan di BPPKAD.

A.1.a.4).j) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2024 tidak terdapat anggaran dan tidak terdapat realisasi. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp21.408.600,00 cenderung mengalami penurunan signifikan yaitu Rp21.408.600,00 atau 100,00%.
Realisasi Denda Retribusi Daerah tahun 2023 berada di bawah Disperkimhub. Namun, dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Retribusi PKB dan Retribusi Izin Trayek—yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah—telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Akibatnya, pada tahun 2024, kedua retribusi tersebut beserta dendanya tidak lagi dipungut.

A.1.a.4).k) Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 sebesar Rp2.513.104.521,00 atau 138,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.819.262.240,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.876.325.804,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp636.778.717,00 atau 33,94%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh karena pada TA 2023 hanya merupakan realisasi pengembalian atas kelebihan belanja pegawai tahun sebelumnya sedangkan pada TA 2024 termasuk juga realisasi pengembalian belanja dan pengembalian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pendapatan dari pengembalian direalisasikan di BPPKAD.

A.1.a.4).l) Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 sebesar Rp825.877.009,00 atau 157,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp525.035.585,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp155.687.851.448,91 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp154.861.974.439,91 atau 99,47% yang disebabkan karena diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dimana pendapatan dari pelayanan BLUD yang sebelumnya di Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di retribusi pelayanan kesehatan, sehingga pendapatan BLUD yang tersaji dalam akun ini berupa jasa giro dan hasil kerjasama dengan pihak lain. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLUD dapat dilihat pada Lampiran V.4.

A.1.a.4).m) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 namun tidak terealisasikan. Sedangkan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp174.085.000,00 sehingga dapat dikatakan mengalami penurunan signifikan sebesar 100%. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo (Disdukcapil), dengan diberlakukannya Perbup Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif, maka pada TA 2024 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tidak dipungut.

A.1.a.4).n) Remunerasi

Remunerasi TA 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi. Pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp92.254.122,00 berupa merupakan Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit*

Facility (TDF), sedangkan pada TA 2024 direalisasikan pada Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp33.433.673,00.

A.1.b. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.787.558.656.978,00 atau 99,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.798.934.695.585,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.741.044.164.795,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.514.492.183,00 atau 2,67%. Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian dapat dilihat pada Tabel V.30 berikut.

Tabel V.30 Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.325.111.779.585,00	1.336.062.892.256,00	100,83	1.334.827.545.401,00	0,09
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	270.231.755.000,00	269.753.653.000,00	99,82	260.174.448.000,00	3,68
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	203.591.161.000,00	181.742.111.722,00	89,27	146.042.171.394,00	24,44
	JUMLAH	**1.798.934.695.585,00**	**1.787.558.656.978,00**	**99,37**	**1.741.044.164.795,00**	**2,67**

Penyumbang terbesar Pendapatan Transfer TA 2024 adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.7 berikut.

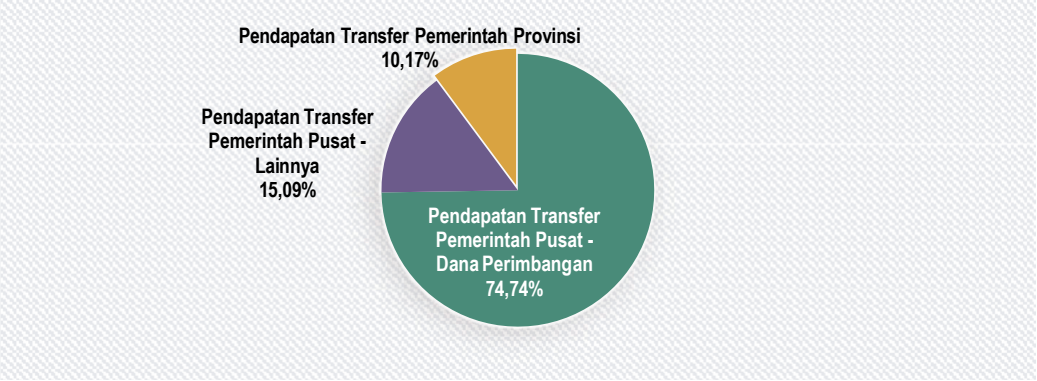

Gambar V.7 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.336.062.892.256,00 atau 100,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.325.111.779.585,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023

sebesar Rp1.334.827.545.401,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.235.346.855,00 atau 0,09%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.31 berikut.

Tabel V.31 Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	35.222.563.000,00	35.433.346.000,00	100,60	36.777.428.277,00	(3,65)
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.499.676.000,00	1.499.676.000,00	100,00	2.159.463.211,00	(30,55)
3.	Dana Alokasi Umum	854.879.952.000,00	877.850.621.000,00	102,69	832.084.548.325,00	5,50
4.	Dana Alokasi Khusus	433.509.588.585,00	421.279.249.256,00	97,18	463.806.105.588,00	(9,17)
	JUMLAH	**1.325.111.779.585,00**	**1.336.062.892.256,00**	**100,83**	**1.334.827.545.401,00**	**0,09**

Penyumbang terbesar Transfer Pemerintah Pusat berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan yang terkecil adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) sebagaimana ilustrasi pada Gambar V.8 berikut.

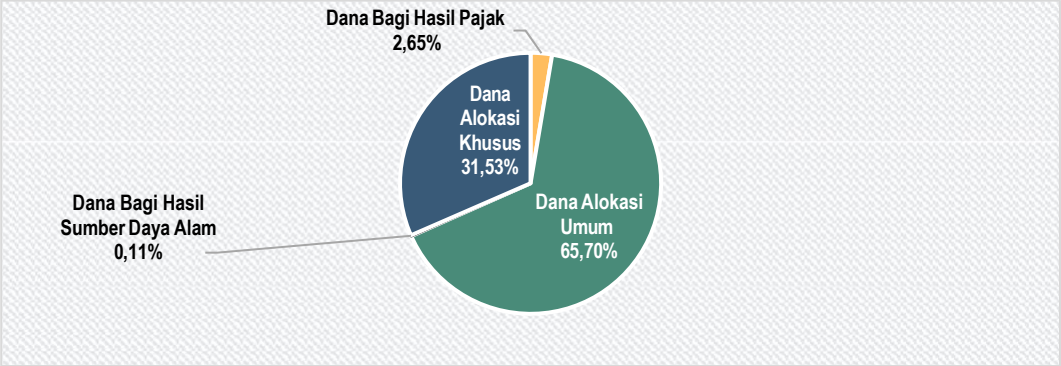

Gambar V.8 Komposisi RealisasiPendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.1.b.1).a) Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp35.433.346.000,00 atau 100,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.222.563,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp36.777.428.277,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp1.344.082.277,00 atau 3,65%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.32 berikut.

Tabel V.32 Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.767.225.000,00	4.767.225.000,00	100,00	6.079.353.164,00	(21,58)
2.	DBH PPh Pasal 21	11.260.877.000,00	11.260.877.000,00	100,00	11.014.221.464,00	2,24
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	677.253.000,00	677.253.000,00	100,00	867.079.302,00	(21,89)
4.	DBH Cukai	18.517.208.000,00	18.727.991.000,00	101,14	18.816.774.347,00	(0,47)
	JUMLAH	**35.222.563.000,00**	**35.433.346.000,00**	**100,60**	**36.777.428.277,00**	**(3,65)**

A.1.b.1).b) Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.499.676.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.499.676.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.159.463.211,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp659.787.211,00 atau 30,55%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.33 berikut.

Tabel V.33 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	50.999.000,00	50.999.000,00	100,00	24.662.996,00	106,78
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	83.687.000,00	83.687.000,00	100,00	161.405.345,00	(48,15)
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	28.989.000,00	28.989.000,00	100,00	40.154.453,00	(27,81)
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	384.000,00	384.000,00	100,00	219.568,00	74,89
5.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.000,00	2.000,00	100,00	-	100,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	238.460.000,00	238.460.000,00	100,00	434.518.638,00	(45,12)
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	100,00	1.498.502.211,00	(26,78)
	JUMLAH	**1.499.676.000,00**	**1.499.676.000,00**	**100,00**	**2.159.463.211,00**	**(30,55)**

A.1.b.1).c) Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp854.879.952.000,00 yang terdiri dari:

	Dasar Perpres Nomor 76 Tahun 2023			**(Dalam Rupiah)**
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	:		740.064.792.000,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	:		**114.815.160.000,00**
	Penggajian Formasi PPPK	:	11.049.660.000,00	
	Pendanaan Kelurahan	:	5.800.000.000,00	
	Bidang Pendidikan	:	29.515.367.000,00	
	Bidang Kesehatan	:	35.431.080.000,00	
	Bidang Pekerjaan Umum	:	33.019.053.000,00	
				854.879.952.000,00

Realisasi DAU Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp877.850.621.000,00 atau 102,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp854.879.952.000,00, berdasarkan KMK Nomor 416 Tahun 2024 terdapat penambahan DAU Tahun 2024 sebesar Rp22.970.669.000,00

yang ditetapkan dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Perbup Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun 2024 berupa DAU Tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke-13. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp832.084.548.325,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp45.766.072.675,00 atau 5,50%.

A.1.b.1).d) Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
Realisasi DAK Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp421.279.249.256,00 atau 97,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp433.509.588.585,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp463.806.105.588,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp42.526.856.332,00 atau 9,17% dengan rincian sebagaimana Tabel V.34 berikut.

Tabel V.34 Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	128.165.157.000,00	126.115.328.554,00	98,40	161.079.696.095,00	(21,71)
2.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	305.344.431.585,00	295.163.920.702,00	96,67	302.726.409.493,00	(2,50)
	JUMLAH	**433.509.588.585,00**	**421.279.249.256,00**	**97,18**	**463.806.105.588,00**	**(9,17)**

(1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik)

Realisasi DAK-Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp126.115.328.554,00 atau 98,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp128.165.157.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp161.079.696.095,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.964.367.541,00 atau 21,71% dengan rincian sebagaimana Tabel V.35 berikut.

Tabel V.35 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	517.877.000,00	484.534.680,00	93,56	446.727.000,00	8,46
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.397.876.000,00	14.037.337.985,00	97,50	8.446.481.600,00	66,19
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.111.000.000,00	7.878.090.153,00	97,13	5.804.551.952,00	35,72
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.057.974.000,00	1.052.113.193,00	99,45	-	100,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	7.615.835.000,00	(100,00)
6.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	3.300.000.000,00	3.248.597.017,00	98,44	4.681.806.752,00	(30,61)
7.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	24.950.000.000,00	23.969.883.780,00	96,07	15.933.687.950,00	50,44
8.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-	-	-	3.738.416.550,00	(100,00)
9.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.848.201.000,00	4.827.272.824,00	99,57	8.398.747.000,00	(42,52)
10.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	19.685.012.199,00	-	-	100,00
11.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	28.121.446.000,00	8.325.361.801,00	29,61	54.854.280.000,00	(84,82)
12.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.864.514.000,00	14.864.514.000,00	100,00	-	-
13.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	-	-	11.096.845.000,00	(100,00)
14.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	14.994.497.000,00	14.994.497.000,00	100,00	-	100,00
15.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	-	-	-	14.115.459.000,00	(100,00)
16.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.500.000.000,00	2.399.199.000,00	95,97	6.973.477.000,00	(65,60)
17.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	4.734.874.000,00	4.608.245.186,00	97,33	1.492.500.000,00	208,76
18.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	-	-	-	1.014.250.000,00	(100,00)
19.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	-	-	-	1.385.480.000,00	(100,00)
20.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.333.304.000,00	3.317.500.000,00	99,53	15.081.151.291,00	(78,00)
21.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.433.594.000,00	2.423.169.736,00	99,57	-	100,00
	JUMLAH	**128.165.157.000,00**	**126.115.328.554,00**	**98,40**	**161.079.696.095,00**	**(21,71)**

(2) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-Non Fisik)

Realisasi DAK-Non Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp295.163.920.702,00 atau 96,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp305.344.431.585,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp302.726.409.493,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp7.562.488.791,00 atau 2,50% dengan rincian sebagaimana Tabel V.36 berikut.

Tabel V.36 DAK-Non Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	90.198.276.352,00	89.955.989.348,00	99,73	90.209.560.332,00	(0,28)
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	100,00	4.040.000.000,00	(19,31)
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	147.020.207.000,00	140.184.360.000,00	95,35	142.786.512.354,00	(1,82)
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.939.557.000,00	2.939.557.000,00	100,00	3.034.810.552,00	(3,14)
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	554.625.000,00	561.413.000,00	101,22	66.367.000,00	745,92
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	-	-	14.556.788.955,00	(100,00)
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	4.063.567.772,00	(100,00)
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-	-	30.561.906.862,00	(100,00)
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11.078.800.000,00	10.907.712.034,00	98,46	8.609.385.664,00	26,70
10.	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-	-	398.797.263,00	(100,00)
11.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.323.000.000,00	1.266.674.000,00	95,74	1.048.405.239,00	20,82
12.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	611.687.000,00	596.668.200,00	97,54	288.482.500,00	106,83
13.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.243.650.000,00	1.227.675.827,00	98,72	311.825.000,00	293,71
14.	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.719.002.000,00	1.630.138.160,00	94,83	2.750.000.000,00	(40,72)
15.	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	525.170.000,00	523.267.920,00	99,64	-	100,00
16.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	15.290.688.162,00	15.266.801.180,00	99,84	-	100,00
17.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-	100,00
18.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.698.127.600,00	4.537.607.600,00	96,58	-	100,00
19.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	-	100,00
20.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.564.322.000,00	5.494.780.962,00	72,64	-	100,00
21.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	506.044.000,00	-	-	-	-
22.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.526.275.471,00	16.526.275.471,00	100,00	-	100,00
	JUMLAH	**305.344.431.585,00**	**295.163.920.702,00**	**96,67**	**302.726.409.493,00**	**(2,50)**

A.1.b.2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp269.753.653.000,00 atau 99,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp270.231.755.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp260.174.448.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.579.205.000,00 atau 3,68%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD) dengan rincian sebagaimana Tabel V.37 berikut.

Tabel V.37 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Dana Insentif Daerah	19.550.481.000,00	19.550.481.000,00	100,00	13.020.711.000,00	50,15
2.	Dana Desa	250.681.274.000,00	250.203.172.000,00	99,81	247.153.737.000,00	1,23
	JUMLAH	**270.231.755.000,00**	**269.753.653.000,00**	**99,82**	**260.174.448.000,00**	**3,68**

A.1.b.2).a) Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi DID Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp19.550.481.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.550.481.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terealisasi sebesar Rp13.020.711.000,00, cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp6.529.770.000,00 atau 50,15%.

Kenaikan tersebut disebabkan karena pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan dua jenis DID yaitu sebagai berikut:

(1) DID Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp11.782.789.000,00. DID tersebut berdasarkan KMK Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024; dan
(2) DID Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp7.767.692.000,00. DID tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal.

A.1.b.2).b)Dana Desa

Realisasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp250.203.172.000,00 atau 99,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp250.681.274.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp247.153.737.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.049.435.000,00 atau 1,23%.

Anggaran sebesar Rp250.681.274.000,00 disusun dalam APBD berdasarkan: (1) Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp243.674.506.000,00; dan (2) KMK Nomor 352 TA 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.006.768.000,00.

Penyaluran Dana Desa adalah secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengakui realisasi Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Surat Pengajuan Pengesahan Dana Desa (SP2DD) yang dicairkan dalam 2 tahap kepada 236 desa sebagai berikut.

				(Dalam Rupiah)
(1)	Tahap I	Bulan Maret 2024 s/d Mei 2024	:	125.489.716.200,00
(2)	Tahap II	Bulan Juli 2024 s/d Desember 2024	:	124.713.455.800,00
	Jumlah			**250.203.172.000,00**

Berdasarkan Lampiran Perbup Wonosobo Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024, total rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Wonosobo adalah sebesar

Rp250.681.274.000,00 berbeda dengan yang diterima sebesar Rp250.203.172.000,00 atau selisih Rp478.102.000,00 yang merupakan penyaluran tahap 2 di Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran yang tidak disalurkan karena tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran (realisasi belanja belum mencapai 60%).

A.1.b.3) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp181.742.111.722,00 atau 89,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp203.591.161.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp146.042.171.394,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.699.940.328,00 atau 24,44%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.38 berikut.

Tabel V.38 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	136.085.191.000,00	124.196.881.222,00	91,26	123.940.726.171,00	0,21
2	Bantuan Keuangan dari Provinsi	67.505.970.000,00	57.545.230.500,00	85,24	22.101.445.223,00	160,37
	JUMLAH	**203.591.161.000,00**	**181.742.111.722,00**	**89,27**	**146.042.171.394,00**	**24,44**

A.1.b.3).a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp124.196.881.222,00 atau 91,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp136.085.191.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp123.940.726.171,00, mengalami kenaikan sebesar Rp256.155.051,00 atau 0,21%, secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.39 di bawah ini.

Tabel V.39 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	36.215.732.000,00	28.226.828.230,00	77,94	31.290.160.191,00	(9,79)
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.202.791.000,00	14.014.435.358,00	86,49	15.432.360.129,00	(9,19)
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.922.214.000,00	28.879.717.323,00	103,43	26.962.317.621,00	7,11
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	354.841.000,00	300.425.061,00	84,66	318.340.752,00	(5,63)
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	55.389.613.000,00	52.775.475.250,00	95,28	49.937.547.478,00	5,68
	JUMLAH	**136.085.191.000,00**	**124.196.881.222,00**	**91,26**	**123.940.726.171,00**	**0,21**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Februari 2025 Nomor: 900.1.13.1/619 perihal Pemberitahuan Kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 menyatakan bahwa terdapat kurang salur (angka *unaudited*) kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp6.167.950.064,00 dengan rincian sebagai berikut.

			(Dalam Rupiah)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	:	3.117.330.040,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	:	1.573.439.118,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	:	1.434.715.246,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	:	42.465.660,00
		JUMLAH	**6.167.950.064,00**

A.1.b.3).b) Bantuan Keuangan dari Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp57.545.230.500,00 atau 85,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp67.505.970.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp22.101.445.223,00, mengalami peningkatan sebesar Rp35.443.785.277,00 atau 160,37%.
Peningkatan Bantuan Keuangan dari Provinsi pada TA 2024 berdasarkan penetapan alokasi dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0000417 tanggal 5 Januari 2024 perihal Penyampaian DPA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp67.505.970.000,00. Kemudian berdasarkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/2584 tanggal 23 Oktober 2024 perihal Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja Transfer Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024, perubahan alokasi tersebut maka ditetapkan Perbup Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2024. Secara rinci Bantuan Keuangan dari Provinsi dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.5.

A.1.c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp10.918.091.444,00 atau 95,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.381.382.835,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp49.177.364.845,00, Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp38.259.273.401,00 atau 77,80% yang disebabkan pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dari Pemerintah Pusat sedangkan pada TA 2024 tidak. Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan 2024 sepenuhnya merupakan Pendapatan Hibah.

A.1.c.1) Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp10.918.091.444,00 atau 95,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.381.382.835,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp49.177.364.845,00, Pendapatan Hibah TA 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp38.259.273.401,00 atau 77,80% dengan rincian dapat dilihat pada Tabel V.40 berikut.

Tabel V.40 Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.551.382.835,00	10.551.382.835,00	100,00	48.671.356.930,00	(78,32)
2.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	830.000.000,00	366.708.609,00	44,18	506.007.915,00	(27,53)
	JUMLAH	**11.381.382.835,00**	**10.918.091.444,00**	**95,93**	**49.177.364.845,00**	**(77,80)**

A.1.c.1).a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp10.551.382.835,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.551.382.835,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp48.671.356.930,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp39.199.974.095,00 atau 78,32% yang disebabkan pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Hibah Sanitasi dari Pemerintah Pusat sedangkan pada TA 2024 tidak, dengan rincian sebagaimana Tabel V.41 berikut.

Tabel V.41 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Hibah Jalan Daerah	-	-	-	35.170.444.930,00	(100,00)
2.	Hibah Sanitasi	3.174.000.000,00	3.174.000.000,00	100,00	6.930.000.000,00	(54,20)
3.	Hibah Terusan PDAM (Kinerja) / AMBK	7.377.382.835,00	7.377.382.835,00	100,00	2.070.912.000,00	256,24
4.	Hbah Air Minum Perkotaan	-	-	-	4.500.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	**10.551.382.835,00**	**10.551.382.835,00**	**100,00**	**48.671.356.930,00**	**(78,32)**

Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi hibah kepada daerah sebagai berikut:

(1) Hibah Sanitasi berupa Hibah Air Limbah Setempat (HALS) sebesar Rp3.174.000.000,00. Hibah tersebut diperoleh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

(2) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK) bantuan Pemerintah Australia yang diterushibahkan sebesar Rp450.000.000,00. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Tahun 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanggal 23 April 2024 Nomor: PE.12.03/LHP-116/PW11/4.2/2024 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam laporan konsultan verifikasi dinyatakan diterima (memenuhi syarat) dari sembilan indikator kinerja sehingga mendapatkan rekomendasi untuk potensi pencairan dana hibah AMBK tahun 2024 sebesar Rp7.377.382.835,00.

A.1.c.1).b) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp366.708.609,00 atau 44,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp830.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terealisasi sebesar Rp506.007.915,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp139.299.306,00 atau 27,53%.

A.2. BELANJA

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.162.787.509.404,00 atau 97,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.215.562.514.390,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.105.985.875.749,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.801.633.655,00 atau 2,70% dengan uraian lebih lanjut sebagaimana Tabel V.42 berikut.

Tabel V.42 Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja	1.813.154.496.320,00	1.760.857.593.334,00	97,12	1.735.166.767.179,00	1,48
2.	Transfer	402.408.018.070,00	401.929.916.070,00	99,88	370.819.108.570,00	8,39
	JUMLAH	**2.215.562.514.390,00**	**2.162.787.509.404,00**	**97,62**	**2.105.985.875.749,00**	**2,70**

Tabel V.42 di atas menunjukkan realisasi Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.760.857.593.334,00 atau 97,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.813.154.496.320,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.735.166.767.179,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.690.826.155,00 atau 1,48%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.43 berikut.

Tabel V.43 Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Operasi	1.552.087.751.829,00	1.523.312.033.260,00	98,15	1.400.523.258.948,00	8,77
2.	Belanja Modal	258.946.744.491,00	237.320.347.589,00	91,65	329.902.098.408,00	(28,06)
3.	Belanja Tak Terduga	2.120.000.000,00	225.212.485,00	10,62	4.741.409.823,00	(95,25)
	JUMLAH	**1.813.154.496.320,00**	**1.760.857.593.334,00**	**97,12**	**1.735.166.767.179,00**	**1,48**

Realisasi terbesar Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Belanja Operasi, sedangkan yang terkecil adalah Belanja Tak Terduga, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.9 berikut.

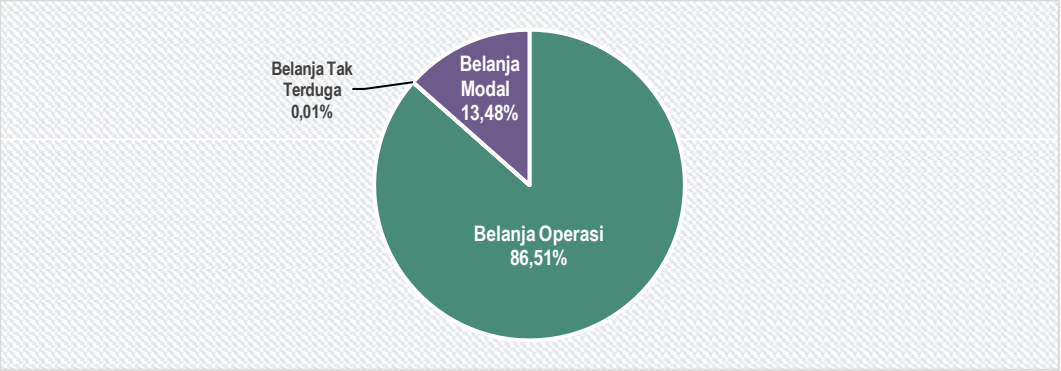

Gambar V.9 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.2.a Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.523.312.033.260,00 atau 98,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.552.087.751.829,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.400.523.258.948,00 mengalami kenaikan sebesar Rp122.788.774.312,00 atau 8,77%. Rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.44 berikut.

Tabel V.44 Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Pegawai	815.968.407.564,00	813.155.898.509,00	99,66	813.687.908.377,00	(0,07)
2.	Belanja Barang	571.459.506.660,00	547.721.173.944,00	95,85	437.524.507.656,00	25,19
3.	Belanja Subsidi	640.000.000,00	574.096.661,00	89,70	638.215.332,00	(10,05)
4.	Belanja Hibah	153.555.537.605,00	151.469.623.746,00	98,64	136.542.227.583,00	10,93
5	Belanja Bantuan Sosial	10.464.300.000,00	10.391.240.400,00	99,30	12.130.400.000,00	(14,34)
	JUMLAH	**1.552.087.751.829,00**	**1.523.312.033.260,00**	**98,15**	**1.400.523.258.948,00**	**8,77**

Penyumbang terbesar Belanja Operasi TA 2024 adalah Belanja Pegawai, sedangkan yang terkecil adalah Belanja Subsidi, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.10 sebagai berikut.

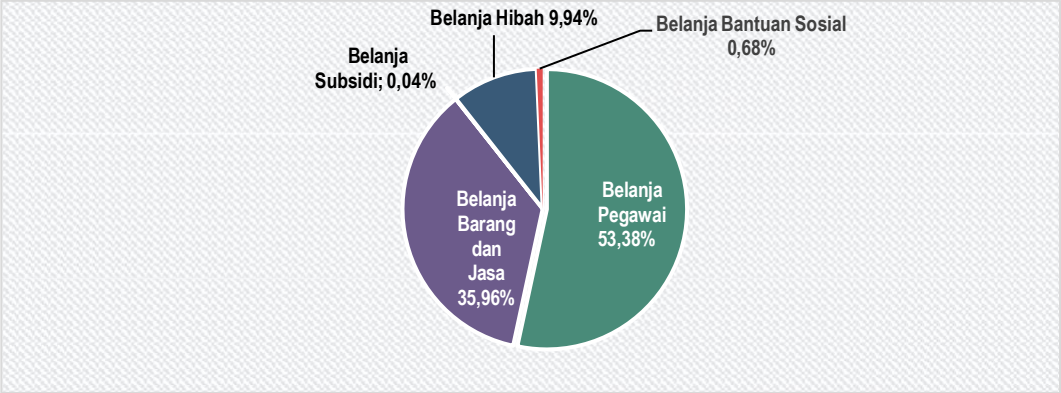

Gambar V.10 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.2.a.1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp813.155.898.509,00 atau 99,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp815.968.407.564,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp813.687.908.377,00 mengalami penurunan sebesar Rp532.009.868,00, atau 0,07%, rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.45 berikut.

Tabel V.45 Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	534.720.488.932,19	520.778.359.813,00	97,39	472.179.109.409,00	10,29
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.061.176.674,81	85.141.241.428,00	94,54	75.819.767.452,00	12,29
3.	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	164.423.040.802,00	182.046.190.971,00	110,72	146.970.845.046,00	23,87
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.063.139.593,00	23.927.694.423,00	95,47	24.330.027.690,00	(1,65)
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	810.761.562,00	491.411.874,00	60,61	480.667.576,00	2,24
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	889.800.000,00	771.000.000,00	86,65	852.000.000,00	(9,51)
7.	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	93.055.491.204,00	(100,00)
	JUMLAH	**815.968.407.564,00**	**813.155.898.509,00**	**99,66**	**813.687.908.377,00**	**(0,07)**

Uraian Belanja Pegawai untuk masing-masing sub rincian obyek dan realisasi per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.6.

A.2.a.1).a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 sebesar Rp520.778.359.813,00 atau 97,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp534.720.488.932,19. Mengalami kenaikan sebesar 10,29% atau Rp48.599.250.404,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp472.179.109.409,00.

A.2.a.1).b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 sebesar Rp85.141.241.428,00 atau 94,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp90.061.176.674,81. Mengalami kenaikan sebesar 12,29% atau Rp9.321.473.976,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp75.819.767.452,00 yang disebabkan pada TA 2023 terdapat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada bulan Juni sehingga hanya dianggarkan 7 bulan dan bulan Oktober hanya dianggarkan 3 bulan sedangkan pada TA 2024 sudah dianggarkan 14 bulan ditambah pengangkatan PPPK di bulan April.

A.2.a.1).c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 sebesar Rp182.046.190.971,00 atau 110,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp164.423.040.802,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp146.970.845.046,00 mengalami kenaikan sebesar 23,87% atau Rp35.075.345.925,00.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 melebihi anggaran perubahan yaitu pada Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar 111,44% dan Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebesar 110,88%, hal ini karena terdapat penambahan DAU Tahun 2024 sebesar Rp22.970.669.000,00 yang ditetapkan dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 23 tahun

2024 tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun 2024 berupa DAU Tambahan untuk TPG THR dan TPG ke -13 sebagai tindaklanjut atas KMK Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum TA 2024 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah yang ditetapkan tanggal 16 November 2024.

A.2.a.1).d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 sebesar Rp23.927.694.423,00 atau 95,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.063.139.593,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp24.330.027.690,00 mengalami penurunan sebesar 1,65% atau Rp402.333.267,00.

A.2.a.1).e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 sebesar Rp491.411.874,00 atau 60,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp810.761.562,00. Hal tersebut terjadi karena dalam Perubahan APBD TA 2024 dianggarkan dana kompensasi karena masa jabatan Bupati/Wakil Bupati periode 2021-2026 tidak mencapai 5 tahun (berakhir Desember 2024). Hal ini sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 yang didalamnya mengatur kompensasi bagi kepala daerah yang masa jabatannya kurang dari satu periode. Namun demikian Bupati/Wakil Bupati terpilih 2024 dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, sehingga kompensasi baru akan dibayarkan di TA 2025. Realisasi TA 2024 sebesar Rp491.411.874,00 mengalami kenaikan sebesar 2,24% atau Rp10.744.298,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp480.667.576,00.

A.2.a.1).f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 sebesar Rp771.000.000,00 atau 86,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp889.800.000,00. Jika dibandingan dengan Realisasi TA 2023 sebesar Rp852.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 9,51% atau Rp81.000.000,00.

A.2.a.1).g) Belanja Pegawai BLUD

Pada TA 2024, tidak dianggarkan dan direalisasikan Belanja Pegawai BLUD TA 2024, sedangkan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp93.055.491.204,00. Hal ini dikarenakan pada TA 2023 RSUD KRT Setjonegoro menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Pegawai BLUD pada akun Belanja Pegawai BLUD sedangkan pada TA 2024 dianggarkan pada akun Belanja Barang dan Jasa BLUD.

A.2.a.2) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp547.721.173.944,00 atau 95,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp571.459.506.660,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp437.524.507.656,00, mengalami kenaikan sebesar Rp110.196.666.288,00 atau 25,19%, rincian lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel V.46 sebagai berikut.

Tabel V.46 Rincian Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Barang	99.003.147.824,00	92.933.368.057,00	93,87	90.035.856.751,00	3,22
2.	Belanja Jasa	164.658.721.714,00	157.423.380.181,00	95,61	152.379.386.113,00	3,31
3.	Belanja Pemeliharaan	21.254.630.042,00	20.693.802.283,00	97,36	19.944.422.607,00	3,76
4.	Belanja Perjalanan Dinas	51.022.499.667,00	45.409.619.045,00	89,00	43.011.055.233,00	5,58
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.881.905.003,00	1.605.681.707,00	85,32	1.626.758.404,00	(1,30)
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.103.877.655,00	60.960.543.854,00	98,16	62.151.322.542,00	(1,92)
7.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	171.534.724.755,00	168.694.778.817,00	98,34	68.375.706.006,00	146,72
	JUMLAH	**571.459.506.660,00**	**547.721.173.944,00**	**95,85**	**437.524.507.656,00**	**25,19**

Uraian Belanja Barang untuk masing-masing sub rincian obyek dan realisasi per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.7.

A.2.a.2).a) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp92.933.368.057,00 atau 93,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp99.003.147.824,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp90.035.856.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.897.511.306,00 atau 3,22%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.47 dibawah ini.

Tabel V.47 Rincian Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Barang Pakai Habis	97.751.813.424,00	91.711.698.357,00	93,82	90.028.356.751,00	1,87
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	79.410.000,00	77.570.000,00	97,68	7.500.000,00	934,27
3.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.171.924.400,00	1.144.099.700,00	97,63	-	100,00
	JUMLAH	**99.003.147.824,00**	**92.933.368.057,00**	**93,87**	**90.035.856.751,00**	**3,22**

(1) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp91.711.698.357,00 atau 93,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp97.751.813.424,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp90.028.356.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.683.341.606,00 atau 1,87%. Uraian Belanja Barang Pakai Habis lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(2) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp77.570.000,00 atau 97,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp79.410.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.500.000,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp70.070.000,00 atau 934,27% yang berasal dari Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan TA 2024 yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp69.600.000,00,

sedangkan pada TA 2023 hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.500.000,00. Uraian Belanja Barang Tak Pakai Habis lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.144.099.700,00 atau 97,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.171.924.400,00, sedangkan pada TA 2023 tidak terdapat anggaran sehingga tidak terealisasi. Uraian Belanja Barang Tak Pakai Habis lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

A.2.a.2).b) Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp157.423.380.181,00 atau 95,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp164.658.721.714,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp152.379.386.113,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.043.994.068,00 atau 3,31%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.48 berikut.

Tabel V.48 Rincian Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Jasa Kantor	112.884.369.065,00	107.552.382.963,00	95,28	100.634.029.090,00	6,87
2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.341.456.688,00	40.992.001.404,00	96,81	33.871.141.435,00	21,02
3.	Belanja Sewa Tanah	138.313.027,00	132.722.027,00	95,96	132.270.000,00	0,34
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.884.784.658,00	2.798.780.667,00	97,02	2.862.428.092,00	(2,22)
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.149.853.420,00	1.063.981.500,00	92,53	1.214.293.945,00	(12,38)
6.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	23.000.000,00	(47,83)
7.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	110.608.658,00	108.932.000,00	98,48	97.674.625,00	11,53
8.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.562.307.030,00	1.527.092.125,00	97,75	1.506.478.994,00	1,37
9.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.834.204.863,00	1.715.355.337,00	93,52	3.786.198.627,00	(54,69)
10.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	823.681.005,00	699.363.310,00	84,91	1.328.888.341,00	(47,37)
11.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	667.723.300,00	583.894.924,00	87,45	602.182.358,00	(3,04)
12.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	248.000.000,00	236.104.904,00	95,20	120.200.000,00	96,43
13.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.200.000,00	769.000,00	64,08	-	100,00
	JUMLAH	**164.658.721.714,00**	**157.423.380.181,00**	**95,61**	**152.379.386.113,00**	**3,31**

Uraian Belanja Jasa untuk masing-masing sub rincian obyek dan realisasi per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(1) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp107.552.382.983,00 atau 95,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp112.884.589.065,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp106.834.629.696,00 mengalami kenaikan sebesar Rp717.753.287,00 atau 0,67%. Uraian Belanja Jasa Kantor lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(2) Belanja Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp40.992.001.404,00 atau 96,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.341.456.688,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp33.871.141.435,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.120.859.969,00 atau 21,02%. Uraian Belanja Belanja Iuran Jaminan/Asuransi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(3) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp132.722.027,00 atau 95,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp138.313.027,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp132.270.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp452.027,00 atau 0,34%. Uraian Belanja Sewa Tanah lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp2.798.780.667,00 atau 97,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.884.784.658,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.862.428.092,00 mengalami penurunan sebesar Rp63.647.425,00 atau 2,22%. Uraian Belanja Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yang dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.063.981.500,00 atau 92,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.149.853.420,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.214.293.945,00 mengalami penurunan sebesar Rp150.312.445,00 atau 12,38%. Uraian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp12.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp23.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.000.000,00 atau 47,83%. Uraian Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp108.932.000,00 atau 98,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp110.608.658,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp97.674.625,00 mengalami kenaikan yang sebesar Rp11.257.375,00 atau 11,53%. Uraian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.527.092.125,00 atau 97,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.562.307.030,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.506.478.994,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.613.131,00 atau 1,37%. Uraian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.715.355.337,00 atau 93,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.834.204.863,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.786.198.627,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.070.843.290,00 atau 54,69%. Uraian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp699.363.310,00 atau 84,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp823.681.005,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.328.888.341,00 mengalami penurunan sebesar Rp629.525.031,00 atau 47,37%. Uraian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp583.894.924,00 atau 87,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp667.723.300,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp602.182.358,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.287.434,00 atau 3,04%. Anggaran dan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2024 berada di BPPKAD, sedangkan pada TA 2023 juga terdapat realisasi di Kelurahan Garung dengan uraian per jenis pajak sebagaimana Tabel V.49 berikut.

Tabel V.49 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	OPD	TA 2024			TA 2023	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100	(7)	(8)=((5)-(7))/(7)x100
1.	Pajak Hotel	BPPKAD	15.960.000,00	15.960.000,00	100,00	12.369.000,00	29,03
2.	Pajak Restoran	BPPKAD	55.860.000,00	55.860.000,00	100,00	47.880.000,00	16,67
3.	Pajak Hiburan	BPPKAD	-	-	-	285.000,00	(100,00)
4.	Pajak Reklame	BPPKAD	7.980.000,00	7.980.000,00	100,00	8.550.000,00	(6,67)
5.	Pajak Penerangan Jalan	BPPKAD	184.731.300,00	184.731.300,00	100,00	159.657.000,00	15,71
6.	Pajak Parkir	BPPKAD	798.000,00	798.000,00	100,00	1.140.000,00	(30,00)
7.	Pajak Air Tanah	BPPKAD	2.394.000,00	2.394.000,00	100,00	3.420.000,00	(30,00)
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPPKAD	370.000.000,00	290.649.236,00	78,55	326.281.358,00	(10,92)
		Kel. Garung	-	-	-	12.600.000,00	(100,00)
9.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	BPPKAD	30.000.000,00	25.522.388,00	85,07	30.000.000,00	(14,93)
		JUMLAH	**667.723.300,00**	**583.894.924,00**	**87,45**	**602.182.358,00**	**(3,04)**

Pemberian Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan pada Perbup Wonosobo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Wonosobo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Pemberian Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan pada Perbup Wonosobo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Wonosobo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp236.104.904,00 atau 95,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp248.000.000,00, dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp120.200.000,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp115.904.904,00 atau 96,43% yang berasal dari adanya alokasi anggaran yang pada TA 2023 tidak dialokasikan pada TA 2024 dialokasikan dan kenaikan alokasi anggaran dengan rincian per jenis retribusi sebagaimana Tabel V.50 berikut.

Tabel V.50 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	OPD	TA 2024			TA 2023	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100	(7)	(8)=((5)-(7))/(7)x100
1.	Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampah an/Kebersihan	DLH	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-	100,00
2.	Retribusi Ja sa Usaha- Tempat Rekreasi da n Olahraga	Disparbud	217.804.400,00	216.538.852,00	99,42	120.200.000,00	80,15
3.	Retribusi J asa Usaha-Tempat Khusus Par kir	Disparbud	4.696.400,00	3.584.000,00	76,31	-	100,00
4.	Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Disparbud	13.499.200,00	3.982.052,00	29,50	-	100,00
		JUMLAH	**248.000.000,00**	**236.104.904,00**	**95,20**	**120.200.000,00**	**96,43**

a. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baru diberikan pada TA 2024 (untuk 8 petugas) berdasarkan SK Kepala DLH Nomor 600.4.15/2121/DLH tentang Pemberian Insentif Pemungut Retribusi Daerah Untuk Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.
b. Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 mencapai Rp216.538.852,00 atau 99,42% dari target anggaran sebesar Rp217.804.400,00, mengalami kenaikan 80,15% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp120.200.000,00. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan penerimaan retribusi dari Rp5.820.126.600,00 miliar pada TA 2023 menjadi Rp8.629.300.900,00 miliar pada TA 2024. Insentif diberikan kepada 23 petugas non-ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) melalui SK Kepala Disparbud Nomor 500.13/1518/Disparbud. Dasar besaran pemberian insentif adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbup Wonosobo Nomor 28 Tahun 2021 menyatakan bahwa besaran insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi sedangkan

insentif yang diberikan adalah 2,5% dari realisasi Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024.

c. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir di Disparbud baru diberikan pada TA 2024 (untuk 5 petugas) berdasarkan SK Kepala Disparbud No. 500.13/1518/Disparbud. Sebelumnya pada TA 2023 tidak dianggarkan.
d. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di Disparbud baru diberikan pada TA 2024 (untuk 2 petugas) berdasarkan SK Kepala Disparbud No. 500.13/1518/Disparbud. Sebelumnya pada TA 2023 tidak dianggarkan.

(13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp769.000,00 atau 64,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000,00, pada TA 2023 tidak ada anggaran dan realisasi. Uraian Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

A.2.a.2).c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp20.693.802.283,00 atau 97,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.254.630.042,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp19.944.422.607,00 mengalami kenaikan sebesar Rp749.379.676,00 atau 3,76%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.51 berikut.

Tabel V.51 Rincian Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Pemeliharaan Tanah	49.650.000,00	47.952.126,00	96,58	15.000.000,00	219,68
2.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.504.889.300,00	7.216.955.292,00	96,16	7.655.478.372,00	(5,73)
3.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.685.006.402,00	4.516.434.515,00	96,40	4.520.609.967,00	(0,09)
4.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.863.084.340,00	8.799.563.350,00	99,28	7.711.834.401,00	14,10
5.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	9.499.867,00	(100,00)
6.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	152.000.000,00	112.897.000,00	74,27	32.000.000,00	252,80
	JUMLAH	**21.254.630.042,00**	**20.693.802.283,00**	**97,36**	**19.944.422.607,00**	**3,76**

Uraian Belanja Pemeliharaan untuk masing-masing sub rincian obyek dan realisasi per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(1) Belanja Pemeliharaan Tanah

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp47.952.126,00 atau 96,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.650.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp15.000.000,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp32.952.126,00 atau 219,68% yang disebabkan pada TA 2024 Disdikpora mendapatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan gedung dan lapangan GOR Wonolelo sedangkan pada TA 2023 alokasi anggaran berada di Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD). Uraian Belanja Pemeliharaan tanah lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp7.216.955.292,00 atau 96,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.504.889.300,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.655.478.372,00 mengalami penurunan sebesar Rp438.523.080,00 atau 5,73%. Uraian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp4.516.434.515,00 atau 96,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.685.006.402,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.520.609.967,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.175.452,00 atau 0,09%. Uraian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp8.799.563.350,00 atau 99,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.863.084.340,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.711.834.401,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.087.728.949,00 atau 14,10%. Uraian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 tidak terdapat anggaran dan tidak terealisasi. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp9.499.867,00 dengan uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat terealisasi sebesar Rp112.897.000,00 atau 74,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp152.000.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp32.000.000,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp80.897.000,00 atau 252,80% yang disebabkan pada TA 2023 anggaran dan realisasi hanya berada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) untuk pemeliharaan *software* SiKKB, sedangkan pada TA 2024 juga terdapat di BPPKAD dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dengan rincian per *software* sebagaimana Tabel V.52 berikut.

Tabel V.52 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	OPD	TA 2024			TA 2023	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100	(7)	(8)=((5)-(7))/(7)x100
1.	*Billing Centre*	BPPKAD	30.000.000,00	29.526.000,00	98,42	-	100,00
2.	e-BPHTB	BPPKAD	40.000.000,00	36.630.000,00	91,58	-	100,00
3.	e-PBB	BPPKAD	40.000.000,00	36.741.000,00	91,85	-	100,00
4.	SiMaKe	Bappeda	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	100,00
5.	SiKKB	DPPKBPPPA	32.000.000,00	-	-	32.000.000,00	(100,00)
		JUMLAH	**152.000.000,00**	**112.897.000,00**	**74,27**	**32.000.000,00**	**252,80**

A.2.a.2).d) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 Rp45.409.619.045,00 atau 89,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.022.499.667,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp43.011.055.233,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.398.563.812,00 atau 5,58%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.53 berikut.

Tabel V.53 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.022.499.667,00	45.409.619.045,00	89,00	43.011.055.233,00	5,58
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**51.022.499.667,00**	**45.409.619.045,00**	**89,00**	**43.011.055.233,00**	**5,58**

Uraian Belanja Perjalanan Dinas lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

A.2.a.2).e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.605.681.707,00 atau 85,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.881.905.003,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.626.758.404,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.076.697,00 atau 1,30%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.54 berikut.

Tabel V.54 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.826.305.003,00	1.568.593.988,00	85,89	1.428.620.000,00	9,80
2.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.600.000,00	37.087.719,00	66,70	198.138.404,00	(81,28)
	JUMLAH	**1.881.905.003,00**	**1.605.681.707,00**	**85,32**	**1.626.758.404,00**	**(1,30)**

Uraian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per masing-masing sub rincian obyek dan realisasi per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.568.593.988,00 atau 85,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.826.305.003,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.428.620.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp139.973.988,00 atau 9,80%. Uraian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

(2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp37.087.719,00 atau 66,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.600.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp198.138.404,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp161.050.685,00 atau 81,28%. Uraian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

A.2.a.2).f) Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp60.960.543.854,00 atau 98,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp62.103.877.655,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp62.151.322.542,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.190.778.688,00 atau 1,92%. Uraian Belanja Barang dan Jasa BOS lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7.

A.2.a.2).g) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat terealisasi sebesar Rp168.694.778.817,00 atau 98,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp171.534.724.755,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp68.375.706.006,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp100.319.072.811,00 atau 146,72% yang disebabkan pada TA 2023 RSUD KRT Setjonegoro menganggarkan Belanja Pegawai BLUD di Belanja Barang dan Jasa BLUD. Belanja Barang dan Jasa BLUD berada pada 25 OPD dengan rincian sebagaimana tabel V.55 berikut.

Tabel V.55 Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Puskesmas Garung	3.826.893.525,00	3.569.360.108,00	93,27	1.527.644.449,00	133,65
2.	Puskesmas Kalibawang	1.684.588.947,00	1.542.930.539,00	91,59	1.014.336.999,00	52,11
3.	Puskesmas Kalikajar 1	2.297.015.326,00	2.149.040.251,00	93,56	835.206.456,00	157,31
4.	Puskesmas Kalikajar 2	2.101.802.478,00	2.009.022.257,00	95,59	860.175.043,00	133,56
5.	Puskesmas Kaliwiro	3.616.533.635,00	3.616.229.626,00	99,99	1.558.325.424,00	132,06
6.	Puskesmas Kejajar 1	2.532.258.642,00	2.562.374.639,00	101,19	923.184.826,00	177,56
7.	Puskesmas Kejajar 2	910.190.544,00	890.813.279,00	97,87	192.064.221,00	363,81
8.	Puskesmas Kepil 1	2.857.407.709,00	2.714.385.357,00	94,99	927.494.759,00	192,66
9.	Puskesmas Kepil 2	1.913.235.322,00	1.979.587.444,00	103,47	545.239.521,00	263,07
10.	Puskesmas Kertek 1	2.920.369.146,00	2.896.246.440,00	99,17	1.239.394.232,00	133,68
11.	Puskesmas Kertek 2	2.188.047.385,00	2.022.653.896,00	92,44	676.788.142,00	198,86
12.	Puskesmas Leksono 1	1.433.388.728,00	1.414.838.651,00	98,71	486.006.742,00	191,12
13.	Puskesmas Leksono 2	900.149.035,00	891.368.020,00	99,02	136.624.658,00	552,42
14.	Puskesmas Mojotengah	4.002.535.283,00	3.544.982.809,00	88,57	1.614.112.172,00	119,62
15.	Puskesmas Sapuran	4.800.568.147,00	4.310.448.899,00	89,79	1.954.420.423,00	120,55
16.	Puskesmas Selomerto 1	5.322.711.118,00	5.279.209.582,00	99,18	1.696.877.822,00	211,11
17.	Puskesmas Selomerto 2	1.041.820.429,00	1.036.431.264,00	99,48	286.176.565,00	262,16
18.	Puskesmas Sukoharjo 1	1.920.176.631,00	1.885.059.019,00	98,17	191.309.772,00	885,34
19.	Puskesmas Sukoharjo 2	969.264.010,00	968.951.751,00	99,97	127.996.017,00	657,02
20.	Puskesmas Wadaslintang 1	2.748.556.630,00	2.739.598.971,00	99,67	1.233.459.006,00	122,11
21.	Puskesmas Wadaslintang 2	1.366.464.119,00	1.365.470.107,00	99,93	335.562.107,00	306,92
22.	Puskesmas Watumalang	2.425.763.413,00	2.359.591.456,00	97,27	885.274.234,00	166,54
23.	Puskesmas Wonosobo 1	3.350.805.358,00	3.233.259.651,00	96,49	1.405.553.071,00	130,03
24.	Puskesmas Wonosobo 2	1.240.567.695,00	1.197.002.550,00	96,49	463.909.376,00	158,03
25.	RSUD Setjonegoro	113.163.611.500,00	112.515.922.251,00	99,43	47.258.569.969,00	138,09
	JUMLAH	**171.534.724.755,00**	**168.694.778.817,00**	**98,34**	**68.375.706.006,00**	**146,72**

A.2.a.3) Belanja Subsidi

Berdasarkan Lampiran Perbup Wonosobo Nomor 14 Tahun 2024 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Subsidi adalah pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi TA 2023 diberikan untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat pada PT. BPR Bank Wonosobo. Pemberian Subsidi diatur dalam Perbup Wonosobo Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup Wonosobo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) dan SK Bupati Wonosobo Nomor 580/161/2022 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo Sebagai Penyalur Subsidi Bunga KURDA di Kabupaten Wonosobo.

Realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp574.096.661,00 atau 89,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp640.000.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2023 realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Wonosobo

sebesar Rp638.215.332,00 mengalami penurunan sebesar 10,05% atau Rp64.118.671,00. Belanja Subsidi dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

A.2.a.4) Belanja Hibah

Berdasarkan Lampiran Perbup Wonosobo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp151.469.623.746,00 atau 98,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp153.555.537.605,00. Jika dibandingkan dengan TA 2023 realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp136.542.227.583,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp14.927.396.163,00 atau 10,93%. Kenaikan tersebut dapat dilihat pada Tabel V.56 berikut.

Tabel V.56 Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.291.201.800,00	32.288.713.048,00	99,99	18.475.653.200,00	74,76
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	88.404.731.945,00	86.733.923.645,00	98,11	104.661.438.551,00	(17,13)
3.	Belanja Hibah Dana BOS	12.338.265.860,00	12.101.306.035,00	98,08	12.330.735.832,00	(1,86)
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.107.778.000,00	1.107.778.000,00	100,00	1.074.400.000,00	3,11
5.	Belanja Hibah Dana BOSP	19.413.560.000,00	19.237.903.018,00	99,10	-	100,00
	JUMLAH	**153.555.537.605,00**	**151.469.623.746,00**	**98,64**	**136.542.227.583,00**	**10,93**

A.2.a.4).b) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp32.288.713.048,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.291.201.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp18.475.653.200,00, Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp13.813.059.848,00 atau 74,76%. Kenaikan tersebut disebabkan salah satunya karena dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum di Tahun 2024 maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo menghibahkan sejumlah uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo. Selain itu hibah juga diberikan kepada instansi pusat seperti Kodim dan Polres untuk keperluan pekerjaan penataan lingkungan kantor. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) dan Politik dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan rincian Tabel V.57 berikut.

Tabel V.57 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	OPD	Penerima Hibah	Keterangan	NPHD		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
				Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bakesbangpol	Bawaslu	Hibah Uang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024	900.1.9/1201/5.5/2023 3434/HK.01.01/K.JT-29/11/2023	10/11/2023	5.738.400.000,00	-
2	Bakesbangpol	KPU	Hibah Uang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024	900.1.9/1200/5.5/2023 01/KU.07-NK/3307/2023	10/11/2023	21.234.757.800,00	-
3	Bakesbangpol	Polres Wonosobo	Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024	900.1.10/448/2024 01/IV/2024	26/04/2024	1.700.000.000,00	-
4	Bakesbangpol	Kodim 0707 Wonosobo	Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024	900.1.10/447/2024 5/IV/2024	26/04/2024	1.041.000.000,00	-
5	Bakesbangpol	Polres Wonosobo	Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024	900.1.10/957/2024 007/IX/2024	29/09/2024	800.000.000,00	-
6	Bakesbangpol	KPU	Hibah Uang Pelaksanaan Pemilu 2024	900.1.9/1201/5.5/2023 3434/HK.01.01/K.JT-29/11/2023	10/11/2023	-	14.156.505.200,00
7	Bakesbangpol	Bawaslu	Hibah Uang Pelaksanaan Pemilu 2024	900.1.9/1201/5.5/2023 3434/HK.01.01/K.JT-29/11/2023	10/11/2023	-	3.825.600.000,00
8	DPUPR	Polres Wonosobo	Pembangunan Gedung Provos Polres Wonosobo	00.2.32/3806/DPUPR/2024	30/08/2024	962.733.000,00	-
9	DPUPR	Kodim 0707 Wonosobo	Penataan Makodim 0707 Wonosobo	000.2.32/3811.1/DPUPR/2024	02/09/2024	384.587.000,00	-
10	DPUPR	Kejaksaan Negeri Wonosobo	Rehab Rumah Dinas Kejaksaan	000.2.32/3974/DPUPR/2024	11/09/2029	194.524.000,00	-
11	DPUPR	Pengadilan Negeri Wonosobo	Penataan Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo	000.2.32/4892/DPUPR/2024	08/11/2024	135.394.248,00	-
12	DPUPR	Rutan Kelas II B Wonosobo	Pembangunan IPAL RUTAN Wonosobo	000.2.32/5095/DPUPR/2024	22/11/2024	97.317.000,00	-
13	DPUPR	Polres Wonosobo	Penataan Ruang Reskrim Mapolres Wonosobo	050/5542/DPUPR/2023	27/12/2023	-	97.938.000,00
14	DPUPR	Kodim 0707 Wonosobo	Penataan Kodim 0707 Wonosobo	050/4153/DPUPR/2023	26/09/2023	-	197.429.000,00
15	DPUPR	Polres Wonosobo	Penataan Mapolsek Wadaslintang	050/5544/DPUPR/2023	27/12/2023	-	198.181.000,00
			JUMLAH			**32.288.713.048,00**	**18.475.653.200,00**

A.2.a.4).c) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 Rp86.733.923.645,00 atau 98,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp88.404.731.945,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp104.661.438.551,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.927.514.906,00 atau 17,13%, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.58 berikut.

Tabel V.58 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.530.400.000,00	6.380.400.000,00	97,70	7.973.956.994,00	(19,98)
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.745.855.945,00	43.358.408.084,00	96,90	64.849.305.327,00	(33,14)
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	37.128.476.000,00	36.995.115.561,00	99,64	31.838.176.230,00	16,20
	JUMLAH	**88.404.731.945,00**	**86.733.923.645,00**	**98,11**	**104.661.438.551,00**	**(17,13)**

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada TA 2024 sebesar Rp6.380.400.000,00 atau 97,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.530.400.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp7.973.956.994,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.593.556.994,00 atau 19,98%. Penurunan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan direalisasikan tersebut berasal pada beberapa OPD pada Tabel V.59 berikut.

Tabel V.59 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	4.210.000.000,00	4.210.000.000,00	100,00	4,933,456,994.00	(14,66)
2.	Dinkes	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	350,000,000.00	(85,71)
3.	BKD	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	140.000.000,00	(14,29)
4.	Bakesbangpol	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	100,00	2,150,500,000.00	(38,62)
5.	Diskominfo	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	400,000,000.00	12,50
6.	Disnakerintrans	100.000.000,00	-	-	-	-
7.	Sekretariat Daerah	280.400.000,00	230.400.000,00	82,17	-	100,00
	JUMLAH	**6.530.400.000,00**	**6.380.400.000,00**	**97,70**	**7.973.956.994,00**	**(19,98)**

(a) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga merealisasikan belanja hibah sebesar Rp4.210.000.000,00 pada TA 2024. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.933.456.994,00 mengalami penurunan 14,66%. Hibah ini diberikan kepada beberapa lembaga nirlaba sebagaimana tercantum dalam Tabel V.60 berikut.

Tabel V.60 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Penerima Hibah	NPHD		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
		Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dewan Pendidikan Kabupaten Wonosobo	900/1667/2024	5/07/2024	50.000.000,00	-
2.	KONI Kabupaten Wonosobo	900/1095 /2024	03/07/2024	1.770.000.000,00	-
3.	KONI Kabupaten Wonosobo (Perubahan)	900/1709/2024	05/12/2024	2.090.000.000,00	-
4.	Pramuka KWARCAB Kabupaten Wonosobo	900/2292/2024	28/08/2024	200.000.000,00	-
5.	KORMI Kabupaten Wonosobo	900/2280/2024	28/08/2024	100.000.000,00	-
6.	KONI Kabupaten Wonosobo	900/1234/2023	22/05/2023	-	2.925.000.000,00
7.	KONI Kabupaten Wonosobo (Perubahan)	900/1908/2023	27/11/2023	-	1.562.500.000,00
8.	Pramuka KWARCAB Kabupaten Wonosobo	900/1234/2023	22/05/2023	-	391.105.994,00
9.	PRSI Kabupaten Wonosobo	900/3470.1/2023	28/11/2023	-	54.851.000,00
	JUMLAH			**4.210.000.000,00**	**4.933.456.994,00**

(b) Dinas Kesehatan merealisasikan belanja hibah sebesar Rp50.000.000,00 kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Wonosobo. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 yang mencapai Rp350.000.000,00 mengalami penurunan signifikan sebesar 85,71%. Penurunan terjadi karena pada TA 2023, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Wonosobo menerima alokasi khusus sebesar Rp300.000.000,00 untuk pembelian alat kesehatan dan penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, pada TA 2024 tidak terdapat alokasi dana untuk program tersebut dengan uraian sebagaimana Tabel V.61 berikut.

Tabel V.61 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Penerima Hibah	NPHD		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
		Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PMI Kabupaten Wonosobo	-	06/08/2024	50.000.000,00	-
2.	PMI Kabupaten Wonosobo	-	25/07/2023	-	50.000.000,00
3.	PMI Kabupaten Wonosobo	-	11/10/2023	-	300.000.000,00
	JUMLAH			**50.000.000,00**	**350.000.000,00**

(c) Badan Kepegawaian Daerah merealisasikan belanja hibah yang diberikan kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Wonosobo sebesar Rp120.000.000,00 pada TA 2024. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp140.000.000,00 mengalami penurunan 14,29%. Rincian belanja hibah tersebut sebagaimana Tabel V.62 berikut.

Tabel V.62 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Penerima Hibah	NPHD		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
		Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Korpri Kabupaten Wonosobo	800/006/2024	10/07/2024	120.000.000,00	-
2.	Korpri Kabupaten Wonosobo	-	21/08/2023	-	140.000.000,00
	JUMLAH			**120.000.000,00**	**140.000.000,00**

(d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merealisasikan belanja hibah sebesar Rp1.320.000.000,00 pada TA 2024. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp2,150,500,000.00 mengalami penurunan 38,62%. Hibah ini diberikan kepada beberapa lembaga nirlaba sebagaimana tercantum dalam Tabel V.63 berikut.

Tabel V.63 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Penerima Hibah	NPHD		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
		Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MUI Kabupaten Wonosobo	200.1.4.11/785/Kesbangpol 2.090/PD-MUI/WSB/VIII/2024	05/08/2024	50.000.000,00	-
2.	Yayasan Sahitya Bhakti Guna Kabupaten Wonosobo	200.1.4.11/786/Kesbangpol 006/YSBG/05/VIII/2024	05/08/2024	400.000.000,00	-
3.	Karang Taruna Kabupaten Wonosobo	200.1.4.11/782/Kesbangpol 03/KT-WNSB/VIII/2024	05/08/2024	50.000.000,00	-
4.	Pemuda Pancasila Kabupaten Wonosobo	200.1.4/11/779/Kesbangpol 03.I13/MPC/PP/KAB.WSB/X/202 4	05/08/2024	200.000.000,00	-
5.	Gereja Kristen Jawa Kabupaten Wonosobo	200.1.4.11/1087/Kesbangpol A/115/GKJ.Wsb/XI/2024	04/11/2024	150.000.000,00	-
6.	PWRI Kabupaten Wonosobo	200.1.4.11/1080/Kesbangpol 023/07/XI/2024	04/11/2024	50.000.000,00	-
7.	Yayasan Andi Sentosa Jaya Kabupaten Wonosobo	200.1.4.11/1079/Kesbangpol 05/ASJ/XI/2024	04/11/2024	50.000.000,00	-
8.	Perkumpulan Oemah Alam Mandala Kab. Wonosobo	200.1.4.11/1081/Kesbangpol 02 LGC/OAM/IX/2024	04/11/2024	90.000.000,00	-
9.	Bangkit Nusantara Kabupaten Wonosobo	200.1.4/11/1086/Kesbangpol 017/Y.BN/XI/2024	04/11/2024	80.000.000,00	-
10.	Perkumpulan Wonosobo Berbagi	200.1.4.11/1076/Kesbangpol 009/WSBBERBAGI/XI/2024	04/11/2024	150.000.000,00	-
11.	FKUB Kabupaten Wonosobo	200.1.4.11/776/Kesbangpol 015/FKUB-WSB/IX/2024	05/08/2024	50.000.000,00	-
12.	PD Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo	220/507/2023 177/III.0/c/2023	05/06/2023	-	500.000.000,00
13.	MUI Kabupaten Wonosobo	220/505/2023 2.045/PD-MUI/WSB/2023	05/06/2023	-	150.000.000,00
14.	KNPI Kabupaten Wonosobo	220/516/2023 00.19/A/DPD-KNPI/II/WSB/2023	05/06/2023	-	20.000.000,00
15.	PD Rifa'Iyah Kabupaten Wonosobo	220/515/2023 041/PD.Rifa'iyah/XII.X/VI/2023	19/07/2023	-	200.000.000,00
16.	PC NU Kabupaten Wonosobo	220/506/2023 153/PC.11.31/A/IV/2023	05/06/2023	-	1.150.000.000,00
17.	LVRI Kabupaten Wonosobo	220/703/2023 05/VII/23/B.05/VII/2023	30/07/2023	-	9.500.000,00
18.	Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri cabang Wonosobo	220/701/2023 B/10/VII/2023.PC.Wsb	03/07/2023	-	7.000.000,00
19.	PEPABRI Kabupaten Wonosobo	220/702/2023 B-15/VII/2023	03/07/2023	-	7.000.000,00
20.	ICMI Kabupaten Wonosobo	220/700/2023 2-21/MPD-ICMI/WSB/VII/23	03/07/2023	-	100.000.000,00
21.	DHC 45 Kabupaten Wonosobo	220/1243/2023 B-09/DHC-45/XI/2023	20/11/2023	-	7.000.000,00
		JUMLAH		**1.320.000.000,00**	**2.150.500.000,00**

(e) Dinas Komunikasi dan Informatika merealisasikan belanja hibah sebesar Rp450.000.000,00 pada TA 2024. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp400.000.000,00, mengalami kenaikan 12,50%. Hibah ini diberikan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo dengan rincian sebagaimana Tabel V.64 berikut.

Tabel V.64 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Penerima Hibah	NPHD		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
		Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo	500.12.3/005/Diskominfo 76/III/DR/Radio Pesona	20/03/2024	450.000.000,00	-
2.	LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo	500.12.3/09/Diskominfo 56/IV/DR/Radio Pesona	05/04/2023	-	400.000.000,00
		JUMLAH		**450.000.000,00**	**400.000.000,00**

(f) Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi mendapatkan alokasi anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp100.000.000,00 melalui Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, namun demikian anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan karena calon penerima hibah tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(g) Sekretariat Daerah (Setda) melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra) merealisasikan belanja hibah yang diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Wonosobo sebesar Rp230.400.000,00 pada TA 2024 berdasarkan NPHD Nomor: 400/1250.1/2024 tanggal 25 Juli 2024, sedangkan pada TA 2023 tidak terdapat alokasi anggaran.

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp43.358.408.084,00 atau 96,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp44.745.855.945,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp64.849.305.327,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.490.897.243,00 atau 33,14%, terutama disebabkan oleh penurunan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.65 berikut.

Tabel V.65 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.251.000.000,00	3.251.000.000,00	100,00	24.621.209.917,00	(86,80)
2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	41.494.855.945,00	40.107.408.084,00	96,66	40.228.095.410,00	(0,30)
	JUMLAH	**44.745.855.945,00**	**43.358.408.084,00**	**96,90**	**64.849.305.327,00**	**(33,14)**

(a) Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 sebesar Rp3.251.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.251.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp24.621.209.917,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp21.370.209.917,00 atau 86,80% yang berasal dari beberapa OPD pada Tabel V.66 berikut.

Tabel V.66 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per OPD TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	1.295.000.000,00	1.295.000.000,00	100,00	18.325.209.917,00	(92,93)
2.	Disparbud	1.956.000.000,00	1.956.000.000,00	100,00	6.296.000.000,00	(68,93)
	JUMLAH	**3.251.000.000,00**	**3.251.000.000,00**	**100,00**	**24.621.209.917,00**	**(86,80)**

i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengalami penurunan signifikan yang disebabkan pada TA 2023 belanja didalamnya termasuk Belanja BOP Kesetaraan Sekolah Non Formal sedangkan pada TA 2024 Belanja BOP Kesetaraan Sekolah Non Formal dianggarkan dan direalisasikan di Belanja Hibah Dana BOSP. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.67 berikut.

Tabel V.67 Rincian Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Penerima Hibah	NPHD		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
		Nomor	Tanggal		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KNPI	900/1234/2024	22/05/2024	100.000.000,00	-
2.	TIK Madin Imam Maufuro Dusun Bumen Desa Bumirejo	900/2538/2024	20/09/2024	25.000.000,00	-
3.	Ponpes Dirosatul Ulum Blederan, Kab. Wonosobo	900/1262/2024	18/09/2024	500.000.000,00	-
4.	Ponpes Al Islah Attabiq Pandansari Kel. Mudal Kecamatan Mojotengah	900/2542/2024	20/09/2024	70.000.000,00	-
5.	PDF Wustho Al- Mubarok Manggisan	900/1600/2024	14/11/2024	400.000.000,00	-
6.	TPQ Al Huda Krotog Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto	900/3279/2024	14/11/2024	100.000.000,00	-
7.	TPQ Darussalam Dusun Banaran Desa Kalierang Kecamatan Selomerto	900/3544/2024	05/12/2024	100.000.000,00	-
8.	TPQ Al Huda Kaliunjar	050/3203/2023	15/11/2023	-	80.000.000,00
9.	Yayasan Api Darussalam	050/3262/2023	15/11/2023	-	180.000.000,00
10	Pondok Pesantren PPTQ Bayanul Qur'an Nusantara Lengkongsari Kalikajar	050/3264/2023	15/11/2023	-	150.000.000,00
11	TPQ Hidayatush Shibyan Pagude	050/3261/2023	15/11/2023	-	30.000.000,00
12	BOP PAUD (627 Sekolah)	-	-	-	14.422.097.317,00
13	BOP Kesetaraan (18 SPNF)	-	-	-	3.463.112.600,00
	JUMLAH			**1.295.000.000,00**	**18.325.209.917,00**

ii. Disparbud pada TA 2024 mendapatkan alokasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.956.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.756.000.000,00 mengalami penurunan karena pada TA 2023 hibah diberikan kepada 288 kelompok kesenian sedangkan pada TA 2024 hibah diberikan kepada 50 kelompok kesenian dalam 2 tahap yaitu:

			(Dalam Rupiah)
1.	Tahap I (14 Kelompok kesenian)	: SK Bupati Wonosobo Nomor: 400.6.1/100/2024 Tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Belanja Hibah Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Wonosobo TA 2024 Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	565.000.000,00
2.	Tahap II (36 Kelompok kesenian)	: SK Bupati Wonosobo Nomor: 400.6.1/1999/2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2024 Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	1.391.000.000,00
		JUMLAH	**1.956.000.000,00**

(b) Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,30% yang berasal dari beberapa OPD sebagaimana Tabel V.68 berikut.

Tabel V.68 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	10.356.677.000,00	10.016.698.572,00	96,72	20.413.850.700,00	(50,93)
2.	Dispaperkan	31.138.178.945,00	30.090.709.512,00	96,64	19.814.244.710,00	51,86
	JUMLAH	**41.494.855.945,00**	**40.107.408.084,00**	**96,66**	**40.228.095.410,00**	**(0,30)**

i. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 pada Disdikpora adalah sebesar Rp10.016.698.572,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp20.413.850.700,00 mengalami penurunan signifikan sebesar 50,93% dikarenakan pada TA 2023 hibah 159 lembaga sebagai berikut.

	Uraian	**Jumlah Penerima**	**(Dalam Rupiah)**
1	TPQ/Madrasah Diniyah	79	12.270.498.000,00
2	TK/PAUD Swasta	50	3.997.344.000,00
3	SD/MI Swasta	15	2.503.615.400,00
4	SMP/MTS Swasta	15	1.642.393.300,00
	JUMLAH	**159**	**20.413.850.700,00**

Sedangkan pada TA 2024 jumlah penerima mengalami penurunan yang disalurkan kepada 78 lembaga sebagai berikut.

	Uraian	**Jumlah Penerima**	**(Dalam Rupiah)**
1	TPQ/Madrasah Diniyah	47	7.040.698.138,44
2	TK/PAUD Swasta	11	1.148.702.620,00
3	SD/MI Swasta	9	1.179.273.972,00
4	SMP/MTS Swasta	11	648.023.841,56
	JUMLAH	**78**	**10.016.698.572,00**

ii. Dinas Pangan, Pertanian, dan Peternakan (Dispaperkan) merealisasikan hibah barang sebesar Rp30.090.709.512,00 kepada berbagai badan dan lembaga nirlaba, sukarela, serta sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Jika dibandingkan dengan realiasasi TA 2023 sebesar Rp19.814.244.710,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar 51,86%. Berikut rincian lebih lanjut mengenai penyaluran hibah tersebut.

Tabel V.69 Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Penerima Hibah	Uraian	NPHD		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	23 Kelompok	Pembangunan *Screen House Modern*	000.3.4/012.01/NPHD.Swa.SHM/2024 s/d 000.3.4/012.23/NPHD.Swa.SHM/2024	25/03/2024	11.312.349.000,00	-
2.	29 Kelompok	Jalan Usaha Tani	000.3.4/016.01/NPHD.Swa.JUT/2024 s/d 000.3.4/016.27/NPHD.Swa.JUT/2024 & 500.1/1855/JUT.TP/2024 s/d 500.1/1856/JUT.TP/2024	25/03/2024 12/12/2024	5.724.357.352,00	-
3.	17 Kelompok	Jalan Produksi Perkebunan	000.3.4/017.01/NPHD/Swa.JP/2024 s/d 000.3.4/017.14/NPHD/Swa.JP/2024 & 500.8/215.1/NPHD/III/2024 - 500.8/215.3/NPHD/III/2024	25/03/2024 15/03/2024	4.788.329.000,00	-
4.	44 Kelompok	Bibit/Benih Ternak	500.7/01/NPHD/2024 s/d 500.7/12/NPHD/2024 ; 500.7/14/NPHD/2024 s/d 500.7/29/NPHD/2024 & 500.7/01-P/NPHD/2024 s/d 500.7/16-P/NPHD/2024	19/06/2024 22/10/2024	3.094.300.000,00	-
5.	116 Kelompok	*)	-	-	5.171.374.160,00	
6.	7 Kelompok	Bangunan *Rice Milling Unit (RMU) & Dryer*	000.6.1/642.1/Swa.RMU/2023 s/d 000.6.1/642.6/Swa.RMU/2023; 500.1/03/TP /2023 s/d 500.1/09/TP/2023; & 000.6.1/642/Swa.VD/2023	15/05/2023 21/06/2023 21/06/2023 15/05/2023	-	4.346.600.000,00
7.	13 Kelompok	Jalan Produksi; Jalan Usaha Tani	500.5/887/DAK-Rabat-Talud/2023; 000.3.4/700.1/Swa.JP/2023 s/d 000.3.4/700.4/Swa.JP/2023; & 000.3.4/701.1/Swa.JUT/2023 s/d 000.3.4/701.6/Swa.JUT/2023	09/09/2023 24/05/2023 23/02/2023	-	3.091.776.300,00
8.	34 Kelompok	Benih/Bibit Ternak	500.7/01/NPHD/2023 s/d 500.7/28/NPHD/2023 & 500.7/31/NPHD/2023 s/d 500.7/32/NPHD/2023	31/05/2023 10/11/2023	-	2.177.650.000,00
9.	10 Kelompok	Perahu/Kapal & Penangkap Ikan	500.5/245/DAK-Perahu/2023 s/d 500.5/254/DAK-Perahu/2023 & 500.5/255/DAK-SPI/2023 s/d 500.5/263.2/DAK-SPI/2023	11/07/2023	-	1.248.411.000,00
10	205 Kelompok	**)	-	-	-	8.949.807.410,00
		JUMLAH			**30.090.709.512,00**	**19.814.244.710,00**

*) Pupuk NPK Rendah *Chlor*; Gedung, Alat, Pengolah, dan solar *dryer* Kopi; Pekarangan Pangan Lestari (P2L); Sarpras Pendukung Pertanian; Dam Parit; *Cultivator*; Alat Rajang dan Rigen Tembakau; Kendaraan Roda 3; Bibit Tanaman buah; Pupuk NPK 16.16 / ZA; Bibit dan pakan Ikan; Sarpras Budidaya Tanaman; Bibit Durian.
**) Sarpras Budidaya Ikan; Alat Pencacah bahan Pupuk Organik (APPO), Pupuk NPK Rendah *Chlor*, Pupuk; *Power Thresser; Cultivator; Colour Sorter; Corn Sheller*; Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Perairan Darat & Sarprasnya; *Green House* Pertanian Presisi; Sarpras Unit Pengolah Ikan (UPI); Rehab Pabrik Pakan, Alat Prosesing Pakan Konsentrat; Bibit Alpokat, Bibit Kopi ; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian; Kendaraan Roda 3; Alat Pengolahan Tembakau; *Handsprayer* ; Benih dan Pakan Ikan ; Irigasi Perpipaan ; Alat Pasca Panen Kopi ; Pengolahan Magot ; Sarpras Pompa Air; Traktor Roda Dua; Benih Padi, Pupuk Organik, dan Saprodi

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp36.995.115.561,00 atau 99,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp37.128.476.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp31.838.176.230,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.156.939.331,00 atau 16,20%. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan dianggarkan dan direalisasikan di OPD sebagaimana Tabel V.70 berikut.

Tabel V.70 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DPUPR	32.039.000.000,00	32.035.152.000,00	99,99	30.697.692.000,00	4,36
2.	Bankesbangpol	-	-	-	50.000.000,00	(100,00)
3.	DLH	4.902.226.000,00	4.772.713.561,00	97,36	876.719.430,00	444,38
4.	Dispaperkan	-	-	-	64.264.800,00	(100,00)
5.	Sekretariat Daerah	162.250.000,00	162.250.000,00	100,00	149.500.000,00	8,53
6.	Dikpora	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-	100,00
	JUMLAH	**37.128.476.000,00**	**36.995.115.561,00**	**99,64**	**31.838.176.230,00**	**16,20**

(a) DPUPR merealisasiakan Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp32.035.152.000,00 untuk 80 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp30.697.692.000,00 mengalami kenaikan 4,36%. Realisasi hibah TA 2024 tersebut kepada 91 kelompok masyarakat.

(b) Bakesbangpol tidak merealisasiakan Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Kondisi ini berbeda dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp50.000.000,00 yang diberikan kepada Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Wonosobo sebesar Rp25.000.000,00 . Hibah diberikan dengan menggunakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 220/698/2023 07/DMD-MLKI.WSB/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Wonosobo sebesar Rp25.000.000,00 dengan NPHD Nomor 200/677/2023 22/FKUB-WSB/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

(c) DLH merealisasikan Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk Pemerintah Desa Sendangsari Kecamatan Garung berupa Pusat Daur Ulang (PDU) senilai Rp4.772.713.561,00 naik signifikan sebesar 444,38% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp876.719.430,00 yang diberikan kepada beberapa lembaga dengan rincian pada Tabel V.71 dibawah ini.

Tabel V.71 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Penerima Hibah	Uraian	NPHD		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pemerintah Desa Sendangsari	Pusat Daur Ulang (PDU)	-	17/12/2024	4.772.713.561,00	-
2.	Bumdes Hardjo Utomo Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo	Tempat Pengolahan Sampah – *Reduce, Reuse,* Recycle (TPS-3R)	050/312.3/2023 050/003/2023	18/04/2023	-	600.000.000,00
3.	Kelompok Bank Sampah Mandiri Dusun Klilin Desa Sindupaten Kecamatan Kertek	Sarpras Pengelolaan Sampah	050/849.11/2023	03/10/2023	-	88.869.000,00
4.	KPSM Kembang Langit Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang	Tempat Pengolahan Sampah – *Reduce, Reuse,* Recycle (TPS-3R)	050/1161.9/2023	11/12/2023	-	188.030.430,00
			JUMLAH		**4.772.713.561,00**	**876.719.430,00**

(d) Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan pada TA 2024 tidak merealisasiakan Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan namun pada TA 2023 terdapat hibah yang diberikan kepada 4 kelompok sebagai berikut:

			NPHD	(Dalam Rupiah)
1.	Afinitas TPPKK Desa Kalikarung	bibit, benih sayuran, buah, pupuk organik , sarpras, dan benih ikan	No. 500.1.4.2/1492/DP3 Tgl. 29/0/2023	19.785.500,00
2.	Afinitas TPPKK Desa Tlogojati	bibit, benih sayuran, buah, pupuk organik , sarpras, dan benih ikan	No. 500.1.4.2/14923/DP3 Tgl. 29/0/2023	19.785.500,00
3.	KWT. Maju / Mojotengah	Gabah Kering Giling (GKG)	Nomor : 500.1.3/1542/DP3 Tgl. 22/11/2023	12.346.900,00
4.	Gapoktan Permata / Kalikajar	Gabah Kering Giling (GKG)	Nomor : 500.1.3/1543/DP3 Tgl. 22/11/2023	12.346.900,00
			JUMLAH	**64.264.800,00**

(e) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada TA 2024 merealisasiakan Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berupa hewan qurban untuk kegiatan keagamaan Hari Raya Idul Adha dengan rincian sebagaimana Tabel V.72 berikut.

Tabel V.72 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Penerima Hibah	Jumlah Barang (Ekor)	NPHD		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Yayasan Amal Dan Kesejahteraan Umat Islam (Yakaumi) Kabupaten Wonosobo	5	900/20.1/2024	10/06/2024	162.250.000,00	-
2.	Masjid Agung Jami' Wonosobo	1	900/157.6/2023	22/06/2023	-	29.900.000,00
3.	Yayasan Masjid Al-Manshur Wonosobo	1	900/157.8/2023	22/06/2023	-	29.900.000,00
4.	PD Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo	1	900/157.4/2023	22/06/2023	-	29.900.000,00
5.	Masjid Baituttaqwa Desa Deroduwur Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo	1	900/157.6/2023	22/06/2023	-	29.900.000,00
6.	Masjid Thoriqul Huda Desa Reco Kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo	1	900/157.0/2023	22/06/2023	-	29.900.000,00
			JUMLAH		**162.250.000,00**	**149.500.000,00**

(f) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merealisasiakan hibah sebesar Rp25.000.000,00 kepada Insan Purnakaryawan, berdasarkan NPHD Nomor 900/1751/2024 tanggal 17 Juli 2024, sedangkan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

A.2.a.4).d) Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp12.101.306.035,00 atau 98,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.338.265.860,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp12.330.735.832,00 mengalami penurunan sebesar Rp229.429.797,00 atau 1,86%. Rincian Belanja Hibah Dana BOS yang diterima Satdikdas Swasta Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Belanja BOS SD Swasta TA 2024 (16 Sekolah)	:	3.235.114.574,00
Belanja BOS SMP Swasta TA 2024 (35 Sekolah)	:	8.866.191.461,00
JUMLAH	**:**	**12.101.306.035,00**

A.2.a.4).e) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.107.778.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.107.778.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.074.400.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.378.000,00 atau 3,11%. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 berada di Bakesbanpol yang dicairkan dalam 2 tahap yaitu:

			(Dalam Rupiah)
1. Bulan Juli 2024	:	SK Bupati Wonosobo Nomor: 200.1..5.2/146/2024 Tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Wonosobo	626.734.000,00
2. Bulan November 2024	:	SK Bupati Wonosobo Nomor: 200.1..5.2/1955/2024 Tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Wonosobo	481.044.000,00
		JUMLAH	**1.107.778.000,00**

Rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.73 berikut.

Tabel V.73 Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	294.939.000,00	294.939.000,00	100,00	268.354.000,00	9,91
2.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Perindo	31.885.000,00	31.885.000,00	100,00	43.327.000,00	(26,41)
3.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa	239.659.000,00	239.659.000,00	100,00	230.364.000,00	4,03
4.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai HANURA	30.772.000,00	30.772.000,00	100,00	43.269.000,00	(28,88)
5.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	70.511.000,00	70.511.000,00	100,00	70.234.000,00	0,39
6.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai NASDEM	78.601.000,00	78.601.000,00	100,00	75.793.000,00	3,70
7.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GOLKAR	112.388.000,00	112.388.000,00	100,00	105.960.000,00	6,07
8.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat	82.344.000,00	82.344.000,00	100,00	72.512.000,00	13,56
9.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GERINDRA	130.203.000,00	130.203.000,00	100,00	102.056.000,00	27,58
10.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	36.476.999,00	36.476.000,00	100,00	62.531.000,00	(41,67)
	JUMLAH	**1.107.778.999,00**	**1.107.778.000,00**	**100,00**	**1.074.400.000,00**	**3,11**

A.2.a.4).f) Belanja Hibah Dana BOSP

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp19.237.903.018,00 atau 99,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.413.560.000,00, sedangkan pada TA 2023 dianggarkan dan di realisasikan pada akun Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Belanja Hibah Dana BOSP merupakan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang dilaksanakan pada Disdikpora dengan rincian sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
BOP PAUD (658 Sekolah)	:	15.247.913.018,00
BOP Kesetaraan (19 SPNF)	:	3.989.990.000,00
JUMLAH	**:**	**19.237.903.018,00**

A.2.a.5) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp10.391.240.400,00 atau 99,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.464.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp12.130.400.000,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp1.739.159.600,00 atau 14,34%. Belanja Bantuan Sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.74 berikut.

Tabel V.74 Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7) =((4)-(6))/(6)x100
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.829.300.000,00	5.758.550.000,00	98,79	6.590.400.000,00	(12,62)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	2.435.000.000,00	6,78
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.035.000.000,00	2.032.690.400,00	99,89	3.105.000.000,00	(34,53)
	JUMLAH	**10.464.300.000,00**	**10.391.240.400,00**	**99,30**	**12.130.400.000,00**	**(14,34)**

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan pada beberapa OPD dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.75 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Penerima Bantuan Sosial	Surat Keputusan		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	**Terencana**					
1.	Bantuan Langsung tunai DBHCHT	4.079 Orang @Rp1.200.000,00	400.9/1877/2024	31/07/2024	4.894.800.000,00	-
2.	Bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50 Orang @ Rp.1.500.000,00	400.9/1904/2024	27/08/2024	75.000.000,00	-
3.	Bantuan Langsung tunai DBHCHT Tahap II	1.228 Orang @Rp600.000,00	400.9/1991/2024	06/11/2024	736.800.000,00	-
4.	Bantuan Bagi Lanjut Usia Non Potensial	60 orang @ Rp 1.500.000,00	460/107/2023	11/04/2024	-	90.000.000,00
5.	Bantuan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat	380 Orang @1.500.000,00	460/110/2023	14/04/2023	-	570.000.000,00
6.	Bantuan Langsung tunai DBHCHT	3.991 Orang @1.200.000,00	460/187/2023	06/06/2023	-	4.789.200.000,00
7.	Bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	15 KUBE @ Rp5.000.000,00	460/410/2023	31/10/2023	-	75.000.000,00
8.	Bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	37 Orang @ Rp1.000.000,00	460/410/2023	31/10/2023	-	37.000.000,00
9.	Bantuan Langsung tunai DBHCHT Tahap II	824 Orang @1.200.000,00	460/411/2023	31/10/2023	-	988.800.000,00
	Jumlah A				**5.706.600.000,00**	**6.550.000.000,00**
B.	**Tidak Terencana**					
1.	Bantuan layanan reunifikasi keluarga	13 Orang @ Rp.300.000,00	-	-	4.200.000,00	-
2.	Santunan Bagi PPKS kehabisan bekal dalam Provinsi Jawa Tengah	14 Orang @ Rp. 150.000,00	-	-	2.100.000,00	-
3.	Santunan bagi PPKS Kehabisan bekal luar Provinsi Jawa Tengah/DIY	23 Orang @ Rp250.000,00	-	-	5.750.000,00	-
4.	Santunan bagi PPKS kehabisan bekal luar pulau jawa	8 Orang @ Rp300.000,00	-	-	2.400.000,00	-
5.	Bantuan Transport Berobat Dalam Kota	11 Orang @ 500.000,00	-	-	5.500.000,00	-
6.	Bantuan Transport Berobat Luar Kota	32 Orang @ 1.000.000,00	-	-	32.000.000,00	-
7.	Bantuan layanan reunifikasi keluarga	2 Orang @ Rp300.000,00	-	-	-	600.000.00
8.	Santunan Bagi PPKS kehabisan bekal	33 Orang	-	-	-	7.300.000,00
9.	Bantuan Transport Berobat Dalam Kota	15 orang @ 500.000	-	-	-	7.500.000,00
10.	Bantuan Transport Berobat Luar Kota	25 orang @ 1.000.000	-	-	-	25.000.000,00
	Jumlah B				**51.950.000,00**	**40.400.000,00**
	JUMLAH (A+B)				**5.758.550.000,00**	**6.590.400.000,00**

b) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan yang terdiri dari Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan semen untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana dengan rincian sebagaimana Tabel V.76 berikut.

Tabel V.76 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Penerima Bantuan Sosial	Surat Keputusan		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	**Terencana**					
1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	105 Kepala Keluarga @ Rp20.000.000,00	911/176/2024	31/05/2024	2.100.000.000,00	-
2.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	105 Kepala Keluarga @ Rp20.000.000,00	911/213/2023	16/06/2024	-	2.100.000.000,00
3.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	8 Kepala Keluarga @ Rp20.000.000,00	-	-	-	160.000.000,00
	Jumlah A				**2.100.000.000,00**	**2.260.000.000,00**
B.	**Tidak Terencana**					
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Korban terdampak bencana	-	-	500.000.000,00	-
2.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Korban terdampak bencana	-	-	-	175.000.000,00
	Jumlah B				**500.000.000,00**	**175.000.000,00**
		JUMLAH (A+B)			**2.600.000.000,00**	**2.435.000.000,00**

c) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Kesehatan yang merupakan Bantuan Sosial terencana penyediaan fasilitas jamban keluarga dengan rincian sebagaimana Tabel V.77 berikut.

Tabel V.77 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Penerima Bantuan Sosial	Surat Keputusan		Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
		Nomor	Tanggal		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	14 Kelompok Masyarakat yang seluruhnya terdiri dari 450 Kepala Keluarga @ Rp2.500.000,00	440/410/2024	07/06/2024	1.125.000.000,00	-
2.	31 Kelompok Masyarakat yang seluruhnya terdiri dari 1.198 Kepala Keluarga @ Rp2.500.000,00	440/374/2023	09/10/2023	-	3.105.000.000,00
	JUMLAH			**1.125.000.000,00**	**3.105.000.000,00**

A.2.b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp237.320.347.589,00 atau 91,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp258.946.744.491,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp329.902.098.408,00, mengalami penurunan sebesar Rp92.581.750.819,00 atau 28,06%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.78 berikut.

Tabel V.78 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Tanah	8.445.850.000,00	1.209.626.140,00	14,32	-	100,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.996.997.722,00	46.521.357.115,00	89,47	71.513.835.592,00	(34,95)
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.001.801.096,00	53.094.884.557,00	98,32	75.966.224.399,00	(30,11)
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	136.623.971.000,00	128.968.218.227,00	94,40	173.441.211.700,00	(25,64)
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.898.779.904,00	6.791.551.850,00	98,45	8.956.129.217,00	(24,17)
6.	Belanja Modal Aset Lainnya.	979.344.769,00	734.709.700,00	75,02	24.697.500,00	2.874,83
	JUMLAH	**258.946.744.491,00**	**237.320.347.589,00**	**91,65**	**329.902.098.408,00**	**(28,06)**

Penyumbang terbesar Belanja Modal TA 2024 adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sedangkan yang terkecil adalah Belanja Aset Lainnya. Ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.11 sebagai berikut.

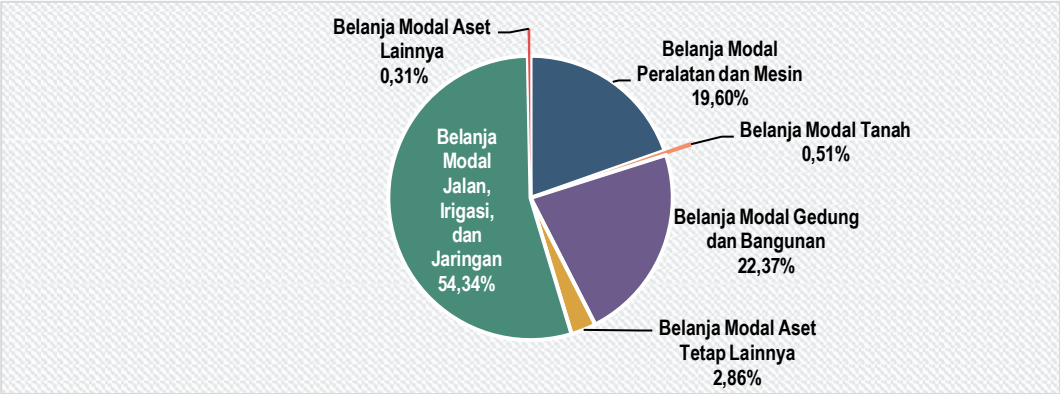

Gambar V.11 Komposisi Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.2.b.1) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.209.626.140,00 atau 14,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.445.850.000,00. Belanja Modal Tanah Persil TA 2024 dianggarkan di RSUD KRT Setjonegoro yang merupakan Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja diperuntukkan dalam rangka ekspansi perluasan area, meskipun terdapat anggaran sebesar Rp6.200.000.000,00, namun tidak dapat merealisasikannya hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi belanja yang dilakukan karena dengan mempertimbangkan capaian realisasi pendapatan selama TA 2024 maka dana yang tersedia tidak mencukupi.

Belanja Modal Tanah Persil tersebut merupakan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja. Belanja Modal Tanah Non Persil TA 2024 dianggarkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk pengadaan Tanah SMPN 10 Satap Wadaslintang sebesar Rp132.156.140,00 dan dianggarkan pula pada Dinas Lingkungan Hidup untuk perluasan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wonorejo sebesar Rp1.077.470.000,00 keduanya merupakan Belanja Modal Tanah Kering dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.79 berikut.

Tabel V.79 Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Tanah Persil	6.200.000.000,00	-	-	-	-
2.	Belanja Modal Non Persil	2.245.850.000,00	1.209.626.140,00	53,86	-	-
	JUMLAH	**8.445.850.000,00**	**1.209.626.140,00**	**14,32**	**-**	**-**

A.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 yaitu sebesar Rp46.521.357.115,00 atau 89,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.996.997.722,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp71.513.835.592,00, mengalami penurunan sebesar Rp24.992.478.477,00, atau 34,95%, dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.8.

A.2.b.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp53.094.884.557,00 atau 98,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp54.001.801.096,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yaitu sebesar Rp75.966.224.399,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.871.339.842,00, atau 30,11%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.80 berikut.

Tabel V.80 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	54.001.801.096,00	53.094.884.557,00	98,32	75.951.224.399,00	(30,09)
2.	Belanja Modal Monumen	-	-	-	15.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	**54.001.801.096,00**	**53.094.884.557,00**	**98,32**	**75.966.224.399,00**	**(30,11)**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.9.

A.2.b.4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp128.968.218.227,00 atau 94,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp136.623.971.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yaitu sebesar Rp173.441.211.700,00, mengalami penurunan sebesar Rp44.472.993.473,00, atau 25,64%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.81 berikut.

Tabel V.81 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	124.509.031.000,00	114.631.118.032,00	92,07	158.179.134.700,00	(27,53)
2.	Belanja Modal Bangunan Air	5.888.600.000,00	5.617.294.000,00	95,39	12.263.835.000,00	(54,20)
3.	Belanja Modal Instalasi	6.176.740.000,00	8.670.300.195,00	140,37	2.967.528.000,00	192,17
4.	Belanja Modal Jaringan	49.600.000,00	49.506.000,00	99,81	30.714.000,00	61,18
	JUMLAH	**136.623.971.000,00**	**128.968.218.227,00**	**94,40**	**173.441.211.700,00**	**(25,64)**

Realisasi Belanja Modal Instalasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 yaitu sebesar Rp8.670.300.195,00 atau 140,37% dari anggaran sesuai Perda Perubahan APBD TA 2024 yang ditetapkan sebesar Rp6.176.740.000,00. Hal tersebut melebihi anggaran yang ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun 2024 namun pengeluaran tersebut berdasarkan Pergeseran APBD TA dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2024, bahwa alokasi Belanja Modal Intalasi menjadi Rp8.778.240.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota berupa pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Uraian Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.10.

A.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp6.791.551.850,00 atau 98,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp6.898.779.904,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp8.956.129.217,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.164.577.367,00, atau 24,17%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.82 berikut, sedangkan untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.11.

Tabel V.82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	6.778.207.404,00	6.676.173.350,00	98,49	7.832.715.044,00	(14,77)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	120.572.500,00	115.378.500,00	95,69	364.989.263,00	(68,39)
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	758.424.910,00	(100,00)
	JUMLAH	**6.898.779.904,00**	**6.791.551.850,00**	**98,45**	**8.956.129.217,00**	**(24,17)**

A.2.b.6) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dari sub akun Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dengan realisasi sebesar Rp734.709.700,00 atau 75,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp979.344.769,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp24.697.500,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp710.012.200,00 atau 2.874,83% yang disebabkan pada TA 2024 terdapat alokasi anggaran pada beberapa OPD untuk pembelian/pengembangan *software* sedangkan pada TA 2023 hanya ada pada Sekretariat Daerah berupa E Agenda dengan rincian sebagaimana Tabel V.83 berikut.

Tabel V.83 Belanja Modal Aset Software Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	OPD	TA 2024			TA 2023	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4) x100	(7)	(8)=((5)-(6))/(7)x100
1.	Website Disperkimhub	Disperkimhub	35.000.000,00	34.600.000,00	98,86	-	-
2.	Sipawon	Disperkimhub	49.750.000,00	48.500.000,00	97,49	-	-
3.	PPDB SD	Disdikpora	83.904.200,00	83.083.500,00	99,02	-	-
4.	PPDB SMP	Disdikpora	84.041.500,00	83.083.500,00	98,86	-	-
5.	JDIH Setwan	Setwan	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00	-	-
6.	JDIH Wonosobo	Setda	30.000.000,00	29.736.900,00	99,12	-	-
7.	RME Merapi	Dinkes	42.000.000,00	41.900.000,00	99,76	-	-
8.	E Rekam Medis	Puskesmas Kejajar 1	46.000.000,00	45.500.000,00	98,91	-	-
9.	E Rekam Medis	Puskesmas Mojotengah	48.000.000,00	47.300.000,00	98,54	-	-
10.	E Rekam Medis	Puskesmas Wadaslintang 2	35.000.000,00	-	-	-	-
11.	Evaluasi dan Monitoring Kinerja	Bappeda	78.300.000,00	77.012.500,00	98,36	-	-
12.	Simwas	Inspektorat	18.137.069,00	17.760.000,00	97,92	-	-
13.	E Presensi	BKD	20.000.000,00	19.413.900,00	97,07	-	-
14.	SIMPEG	BKD	20.419.000,00	19.580.400,00	95,89	-	-
15.	Wotic	Disparbud	95.793.000,00	94.239.000,00	98,38	-	-
16.	Sistem Aplikasi Kepegawaian Kades dan Perangkat Desa	Dinsos PMD	100.000.000,00	-	-	-	-
17.	Sistem Aplikasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa	Dinsos PMD	100.000.000,00	-	-	-	-
18.	E agenda	Setda	-	-	-	24.697.500,00	(100,00)
		JUMLAH	**979.344.769,00**	**734.709.700,00**	**75,02**	**24.697.500,00**	**2.874,83**

E-Rekam Medis pada Puskesmas Wadaslintang 2 tidak direalisasikan karena terkendala dengan pemindahan data pasien dari sistem yang lama ke sistem baru. Sistem Aplikasi Kepegawaian Kades dan Perangkat Desa dan Sistem Aplikasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak dapat direalisasikan karena karena perubahan anggaran yang ditetapkan pada 23 September 2024 sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pengembangan dan pengadaan aplikasi.

A.2.c Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp225.212.485,00 atau 10,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.120.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.741.409.823,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp4.516.197.338,00 atau 95,25% yang disebabkan pada TA 2023 terdapat beberapa kejadian bencana alam yang untuk penanganannya menggunakan Belanja Tak terduga sedangkan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 berupa pengembalian kerugian BUMD PD Bhakti Husada.

A.3. Transfer

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp401.929.916.070,00 atau 99,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp402.408.018.070,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp370.819.108.570,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.110.807.500,00 atau 8,39% dengan rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.84 berikut.

Tabel V.84 Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Transfer Bagi Hasil Ke Desa	9.051.135.000,00	9.051.135.000,00	100,00	6.640.362.500,00	36,30
2.	Transfer Bantuan Keuangan	393.356.883.070,00	392.878.781.070,00	99,88	364.178.746.070,00	7,88
	JUMLAH	**402.408.018.070,00**	**401.929.916.070,00**	**99,88**	**370.819.108.570,00**	**8,39**

Realisasi terbesar Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Transfer Bantuan Keuangan sedangkan yang terkecil adalah Transfer Bagi Hasil Ke Desa dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.12 berikut.

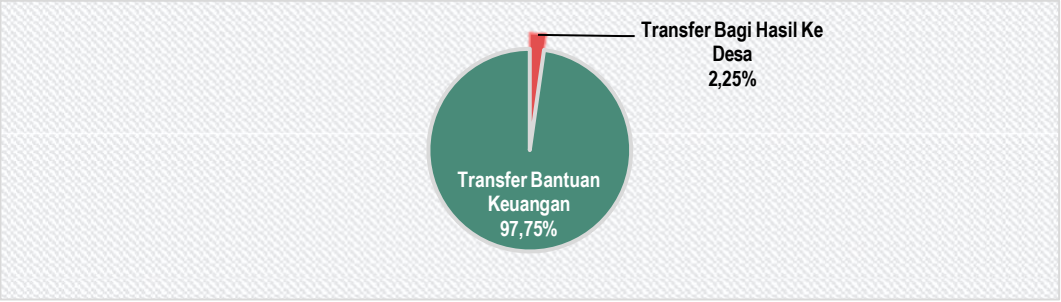

Gambar V.12 Komposisi Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

A.3.a. Transfer Bagi Hasil Ke Desa

Realisasi Transfer Bagi Hasil Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp9.051.135.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.051.135.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.640.362.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.410.772.500,00 atau 36,30%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.85 berikut.

Tabel V.85 Transfer Bagi Hasil Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Bagi Hasil Pajak	6.940.500.000,00	6.940.500.000,00	100,00	5.523.000.000,00	25,67
2.	Bagi Hasil Retribusi	2.110.635.000,00	2.110.635.000,00	100,00	1.117.362.500,00	88,89
	JUMLAH	**9.051.135.000,00**	**9.051.135.000,00**	**100,00**	**6.640.362.500,00**	**36,30**

Uraian Transfer Bagi Hasil ke Desa diberikan kepada 236 Desa untuk masing-masing rincian obyek dan daftar desa penerima transfer dapat dilihat pada Lampiran V.12.

A.3.b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp392.878.781.070,00 atau 99,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp393.356.883.070,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp364.178.746.070,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.700.035.000,00 atau 7,88%. Realisasi dan Anggaran Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan TA 2023 sepenuhnya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa dengan rincian sebagaimana Tabel V.86 berikut.

Tabel V.86 Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	353.497.546.070,00	(100,00)
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	393.356.883.070,00	392.878.781.070,00	99,88	10.681.200.000,00	3.578,23
	JUMLAH	**393.356.883.070,00**	**392.878.781.070,00**	**99,88**	**364.178.746.070,00**	**7,88**

Bantuan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.80 diatas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 adalah sebesar Rp392.878.781.070,00 atau 99,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp393.356.883.070,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp10.681.200.000,00 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 3.578,23% hal tersebut disebabkan karena pada TA 2023 Anggaran dan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berada pada Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Adapun rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
TMMD Desa Damarkasiyan Kec. Kertek	:	304.400.000,00
Bantuan Keuangan Khusus (berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 400.10/1977/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 400.10/457/2024 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2024) untuk 298 pekerjaan pada 236 Desa. Bantuan Keuangan khusus diberikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, mendukung peningkatan Indeks Desa Membangun, serta dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.	:	31.855.000.000,00
Dana Desa (berdasarkan Perbup Wonosobo Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2024) untuk 236 Desa	:	250.203.172.000,00
Alokasi Dana Desa (berdasarkan Perbup Wonosobo Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2024) untuk 236 Desa	:	110.516.209.070,00
JUMLAH	**:**	**392.878.781.070,00**

A.4. Surplus/(Defisit)

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Surplus/(Defisit) adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 memperoleh defisit yang terealisasikan sebesar Rp56.941.385.021,00 atau 62,82% dari anggaran yang ditetapkan adalah defisit sebesar Rp90.648.329.850,00. Jika dibandingkan dengan realisasi defisit TA 2023 defisit sebesar Rp48.705.470.183,09, cenderung mengalami penurunan sebesar Rp8.235.941.838,00 atau 16,90%.

A.5. Pembiayaan

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp90.648.329.849,91 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp90.648.329.850,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp146.731.182.868,00 mengalami penurunan sebesar Rp56.082.853.018,09 atau 38,22%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.87 berikut.

Tabel V.87 Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Penerimaan Pembiayaan	98.025.712.685,00	98.025.712.684,91	100,00	168.302.094.868,00	(41,76)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.377.382.835,00	7.377.382.835,00	100,00	21.570.912.000,00	(65,80)
Pembiayaan Netto (1-2)		**90.648.329.850,00**	**90.648.329.849,91**	**100,00**	**146.731.182.868,00**	**(38,22)**

A.5.a Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp98.025.712.684,91 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp98.025.712.685,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp168.302.094.868,00 mengalami penurunan sebesar Rp70.276.382.183,09 atau 41,76%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.88 berikut.

Tabel V.88 Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.025.712.685,00	98.025.712.684,91	100,00	138.291.994.868,00	(29,12)
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	30.000.000.000,00	(100,00)
3	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-	10.100.000,00	(100,00)
JUMLAH		**98.025.712.685,00**	**98.025.712.684,91**	**100,00**	**168.302.094.868,00**	**(41,76)**

A.5.a.1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp98.025.712.684,91 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp98.025.712.685,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp138.291.994.868,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.266.282.183,09 atau 29,12%.

A.5.a.2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 tidak terdapat anggaran dan tidak terdapat realisasi, dikarenakan pencairan Dana Cadangan telah dilakukan di TA 2023 realisasi sebesar Rp30.000.000.000,00.

A.5.a.3) Penerimaan Kembali Dana Bergulir

Realisasi Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah nihil, sedangkan TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp10.100.000,00, kondisi tersebut disebabkan pada TA 2024 direalisasikan pada akun Lain – lain PAD yang Sah Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp4.150.000,00.

A.5.b Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp7.377.382.835,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.377.382.835,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp21.570.912.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.193.529.165,00 atau 65,80% dikarenakan pada TA 2023 terdapat pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan di BPPKAD dengan rincian pada Tabel V.89 berikut.

Tabel V.89 Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	15.000.000.000,00	(100,00)
2.	Penyertaan Modal Daerah	7.377.382.835,00	7.377.382.835,00	100,00	6.570.912.000,00	12,27
	JUMLAH	**7.377.382.835,00**	**7.377.382.835,00**	**100,00**	**21.570.912.000,00**	**(65,80)**

Jika dilihat pada Tabel V.89 diatas, tidak terdapat realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2024. Sedangkan realisasi Penyertaan Modal Daerah pada BUMD TA 2024 sebesar Rp7.377.382.835,00 merupakan penyertaan modal pada Perumda Tirta Aji Kabupaten Wonosobo berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Penyertaan Modal Perumda Tirta Aji Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp7.377.382.835,00, penyertaan modal tersebut bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang merupakan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK) bantuan pemerintah Australia yang diterushibahkan sebagaimana dituangkan dalam Amandemen Ketiga Terhadap Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor PPH-1/MK.7/DTK.03/AMBK-DFAT/2021 tanggal 5 Februari 2021 antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

A.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi SILPA Kabupaten Wonosobo TA 2024 yang diperoleh adalah sebesar Rp33.706.944.828,91. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp98.025.712.684,91 mengalami penurunan signifikan sebesar 65,61%. Berikut ini adalah uraian SILPA TA 2024:

(Dalam Rupiah)

A.	**SILPA Terikat [1 s/d 4] :**				**26.076.835.236,91**
	1. Kas di Kas Daerah [a s/d h]			**13.152.521.741,00**	
	a. Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya [1) s/d 4)] :		2.925.390.775,00		
	1) Pendanaan Kelurahan	17.717.466,00			
	2) Bidang Pendidikan [a) + b)] :	1.686.409.484,00			
	a) Sisa 2024 622.365.775,00				
	b) SILPA 2023 1.064.043.709,00				
	3) Bidang Kesehatan [a) + b)] :	1.106.005.402,00			
	a) Sisa 2024 993.947.784,00				
	b) SILPA 2023 112.057.618,00				
	4) Bidang Pekerjaan Umum Sisa 2024 115.258.423,00	115.258.423,00			
	b. DAU Tambahan (THR & Gaji)		144.906.400,00		
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		3.775.576.460,00		
	d. DAK Fisik [1) + 2)] :		451.316.340,00		
	1) Sisa 2024	105.087.001,00			
	2) SILPA 2023	346.229.339,00			
	e. Dana Insentif Fiskal (DIF) [1) + 2)] :		344.330.446,00		
	1) Kinerja 2024	161.979.186,00			
	2) Kinerja 2023	182.351.260,00			
	f. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)		1.735.145.404,00		
	g. BPJS Kesehatan 4%		3.061.141.666,00		
	h. Bantuan Provinsi [1) + 2)] :		714.714.250,00		
	1) Penanggulangan Masalah Gizi	678.950.500,00			
	2) Makan Bergizi Gratis Anak Usia Sekolah	35.763.750,00			
	2. Kas di BLUD			**9.313.148.031,91**	
	3. Dana BOS			**1.253.194.183,00**	
	4. Kas Lainnya [a) + b)] :			**2.357.971.281,00**	
	a. Kas di Bendahara BOK		2.354.171.281,00		
	b. BOP Kesetaraan		3.800.000,00		
B.	**SILPA Bebas [1 + 2] :**				**7.630.109.592,00**
	1. Kas di Kas Daerah			**7.601.533.692,00**	
	2. Kas di Bendahara Penerimaan			**28.575.900,00**	
JUMLAH SILPA [A + B]					**33.706.944.828,91**

Saldo Akhir Kas di Neraca Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.848.551.572,91 sedangkan SILPA TA 2024 adalah sebesar Rp33.706.944.828,91 atau terdapat selisih sebesar Rp141.606.744,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.90 berikut.

Tabel V.90 Selisih Antara Saldo Kas dan SILPA Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Kas per 31/12/2024 (Rp)	SILPA per 31/12/2024 (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
1.	Kas di Kas Daerah	20.754.055.433,00	20.754.055.433,00	-
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	28.575.900,00	28.575.900,00	-
3.	Kas di BLUD	9.313.148.031,91	9.313.148.031,91	-
4.	Kas Dana BOS	1.253.194.183,00	1.253.194.183,00	-
5.	Kas Lainnya	2.499.578.025,00	2.357.971.281,00	141.606.744,00
	JUMLAH	**33.848.551.573,91**	**33.706.944.828,91**	**141.606.744,00**

Selisih sebesar Rp141.606.744,00 berada pada Kas Lainnya berupa kas tunai dan kas di bank dengan rincian sebagai berikut.

No.	OPD	Rekening Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dikpora	Bank Jateng - 3104112446	SD Negeri Wringinanom (BOSDA)	75.000,00
2.	Dikpora	Bank Jateng - 3023422572	SMPN 1 Watumalang (BOSDA)	96.000,00
3.	Dikpora	Bank Jateng - 3171029812	TK Negeri Pembina Selomerto	19.212,00
4.	Dikpora	Bank Jateng - 3023421321	SDN 2 Krasak (BOSDA)	5.000.000,00
5.	Dikpora	Bank Jateng - 3023211067	TK Negeri Pembina Selomerto	823,00
6.	Dikpora	Bank Jateng - 3104076717	TK Negeri Pembina Sapuran	54.321,00
7.	Dikpora	Bank Jateng - 3023418320	TK Negeri Pembina Wonosobo	97.955,00
8.	Dikpora	-	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) – Kas Tunai PFK (Pajak Daerah) BOP Kesetaraan yang belum disetorkan	1.629.000,00
9.	Setda	Bank Jateng - 1023012096	Bagian Penanganan Stunting Wonosobo	37.502.000,00
10.	BPPKAD	Bank Jateng - 1023001531	PFK berupa JKN 1% di rekening penampungan gaji	97.132.433,00
			Jumlah	**141.606.744,00**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

B.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2023 sebesar Rp98.025.712.684,91, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 sebagai SAL Awal TA 2024.

B.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Sisa SAL TA 2023 sebesar Rp98.025.712.684,91, untuk Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

B.3. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 menyajikan SAL Akhir sebesar Rp33.706.944.828,91. Saldo tersebut merupakan Defisit sebesar Rp56.941.385.021,00 ditambah Penggunaan Sisa SAL TA 2023 sebesar Rp98.025.712.684,91, dan dikurangi Pembiayaan Pengeluaran - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun berjalan pada Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo sebesar Rp7.377.382.835,00.

C. NERACA

C.1. ASET

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.892.326.378.413,85. Jika dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.990.751.001.422,51, mengalami penurunan sebesar Rp98.424.623.008,66 atau 2,47. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.91 di bawah ini.

Tabel V.91 Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Aset Lancar	82.739.941.120,47	168.737.529.028,11	(85.997.587.907,64)	(50,97)
2.	Investasi Jangka Panjang	330.422.502.527,82	300.533.317.974,08	29.889.184.553,74	9,95
3.	Aset Tetap	3.343.260.293.309,15	3.236.617.663.604,37	106.642.629.704,78	3,29
4.	Aset Lainnya	63.530.461.925,41	212.330.287.025,95	(148.799.825.100,54)	(70,08)
5.	Properti Investasi	72.373.179.531,00	72.532.203.790,00	(159.024.259,00)	(0,22)
	JUMLAH	**3.892.326.378.413,85**	**3.990.751.001.422,51**	**(98.424.623.008,66)**	**(2,47)**

C.1.a. ASET LANCAR

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.739.941.120,47. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.737.529.028,11, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp85.997.587.907,64 atau 50,97%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.92 berikut.

Tabel V.92 Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penu runan) Saldo	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Kas di Kas Daerah	20.754.055.433,00	83.309.803.483,00	(62.555.748.050,00)	(75,09)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	28.575.900,00	110.807.216,00	(82.231.316,00)	(74,21)
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	43.113.566,00	(43.113.566,00)	(100,00)
4.	Kas di BLUD	9.313.148.031,91	10.150.848.398,91	(837.700.367,00)	(8,25)
5.	Kas Dana BOS	1.253.194.183,00	1.014.029.022,00	239.165.161,00	23,59
6.	Kas Lainnya	2.499.578.025,00	3.736.643.019,00	(1.237.064.994,00)	(33,11)
7.	Piutang	28.717.920.111,40	46.964.501.115,40	(18.246.581.004,00)	(38,85)
8.	Piutang Lainnya	6.077.750.594,00	6.081.900.594,00	(4.150.000,00)	(0,07)
9.	Penyisihan Piutang	(20.233.780.615,94)	(16.455.170.868,84)	(3.778.609.747,10)	22,96
10.	Beban Dibayar Dimuka	97.453.886,00	166.353.469,67	(68.899.583,67)	(41,42)
11.	Persediaan	34.232.045.572,10	33.614.700.012,97	617.345.559,13	1,84
	JUMLAH	**82.739.941.120,47**	**168.737.529.028,11**	**(85.997.587.907,64)**	**(50,97)**

C.1.a.1) Kas di Kas Daerah

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.754.055.433,00. Jika dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.309.803.483,00, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp62.555.748.050,00 atau 75,09%. Penurunan Kas di Kas Daerah pada tahun 2024 dikarenakan belanja daerah yang cukup tinggi belum diimbangi dengan pendapatan daerahnnya.

Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo ditempatkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Wonosobo dengan Nomor Rekening 1023000019 atas nama RKUD Kab. Wonosobo. RKUD dibuka berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 900/145/2013 tentang Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebupaten Wonosobo. Selain menetapkan RKUD, SK Bupati Wonosobo juga menetapkan adanya rekening penampungan potongan gaji atau

belanja pegawai pada Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1023001531 atas nama PENAMPUNGAN GAJI. Rekening penampungan gaji tersebut per 31 Desember 2024 masih memiliki saldo sebesar Rp97.132.433,00 yang merupakan dana perhitungan pihak ketiga, yakni potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) 1% bulan Desember 2024 yang belum dibayarkan kepada BPJS karena menunggu penyelesaian kegiatan verifikasi para pihak.
Adapun mutasi penerimaan pada RKUD selama tahun 2024 sebesar Rp2.003.204.078.890,00 dan mutasi pengeluaran pada RKUD selama tahun 2024 sebesar Rp1.904.648.330.440,00. Penjelasan mutasi saldo Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

A	**Saldo Awal**			**83.309.803.483,00**
B	**Rincian Mutasi Penambahan**			
	1	Belanja Daerah atau Pencairan SP2D secara Bruto	1.614.085.373.544,00	
	2	Penanaman deposito	195.000.000.000,00	
	3	Jurnal koreksi mutasi	194.118.704.946,00	
		Jumlah Mutasi Penambahan		**2.003.204.078.490,00**
C	**Rincian Mutasi Pengurangan**			
	1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	130.165.071.995,00	
	2	Pendapatan Transfer	1.415.116.907.214,00	
	3	Contra post (CP)	1.613.916.221,00	
	4	Setoran Uang Persediaan tahun 2024 (UP tahun 2024)	506.499.442,00	
	5	Sisa SP2D -TU	970.096.608,00	
	6	Setoran Saldo Kas Bendahara Pengeluaran TA 2023	43.113.566,00	
	7	Setoran Saldo Kas Bendaharan Penerimaan TA 2023	110.807.216,00	
	8	Penerimaan Angsuran Dana Bergulir	4.150.000,00	
	9	Pembayaran Piutang TDF DBH Tahun 2023	2.958.287.000,00	
	10	Setoran Kekurangan Pembayaran JKN 1% Siltap Tahun 2023	40.776.232,00	
	11	Pencairan Deposito Bank Jateng	195.000.000.000,00	
	12	Jurnal koreksi mutasi	194.118.704.946,00	
		Jumlah Mutasi Pengurangan		**1.940.648.330.440,00**
D	**Saldo akhir**			**20.754.055.433,00**

Dari Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.754.055.433,00 tersebut termasuk didalamnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran (TA) 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian		Saldo (Rp)	Keterangan
SILPA yang mengikat			
Pendanaan Kelurahan	:	17.717.466,00	DAU *Specific Grant*
Bidang Pendidikan	:	1.686.409.484,00	DAU *Specific Grant*
Bidang Kesehatan	:	1.106.005.402,00	DAU *Specific Grant*
Bidang Pekerjaan Umum	:	115.258.423,00	DAU *Specific Grant*
DAU Tambahan (Tunjangan Hari Raya & Gaji)	:	144.906.400,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	:	3.775.576.460,00	
DAK Fisik	:	451.316.340,00	
Dana Insentif Fiskal (DIF)	:	344.330.446,00	
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	:	1.735.145.404,00	
Iuran BPJS Kesehatan 4%	:	3.061.141.666,00	
Bantuan Provinsi	:	714.714.250,00	
Jumlah Silpa yang Mengikat		**13.152.521.741,00**	

SILPA Bebas		
Kas di Kas Daerah	:	7.601.533.692,00
Jumlah SILPA Bebas	:	**7.601.533.692,00**
JUMLAH		**20.754.055.433,00**

Selama TA 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menempatkan sebagian Kas Daerah pada 9 (sembilan) rekening deposito Bank Jateng sebesar Rp195.000.000,00 dan mendapatkan bunga sebesar Rp3.247.945.190,00. Rekening deposito tersebut seluruhnya telah dicairkan pada akhir tahun 2024, sehingga per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak memiliki rekening deposito sebagai bagian dari Kas di Kasda.

C.1.a.2) Kas di Bendahara Penerimaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.575.900,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp110.807.216,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp82.231.316,00 atau 74,21%. Penurunan signifikan tersebut diakibatkan penerimaan pendapatan pada Bendahara Penerimaan telah segera disetorkan ke kas daerah sebelum tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan SK Bupati Wonosobo Nomor 900/1929/2024 tentang Penetapan Rekening pada SKPD Kabupaten Wonosobo ditetapkan bahwa Bendahara Penerimaan pada 42 OPD dapat menyetorkan penerimaan secara langsung ke RKUD dan dapat menyetorkan penerimaan melalui rekening penampungan penerimaan OPD sebelum secara otomatis per hari penerimaan tersebut diteruskan ke RKUD. Rekening penampungan penerimaan tersebut sebagai berikut:

Tabel V.93 Rekening Penampungan Penerimaan SKPD

No	Opd	Nomor Rekening	Bank	Peruntukan
I	BPPKAD	1023007131	Bank Jateng	Menampung setoran Pajak Daerah
2	BPPKAD	1023004841	Bank Jateng	Menampung setoran PBB P2
3	RSUD Setjonegoro	1023009869	Bank Jateng	Program *host to host* Bank Jateng dengan RSUD (tetapi belum mulai operasional)
4	Disparbud	1023011405	Bank Jateng	Untuk menampung setoran retribusi pariwisata Wonosobo
5	Disparbud	1023011952	Bank Jateng	Untuk menampung setoran retribusi Disparbud
6	Kelurahan	1023011936	Bank Jateng	Untuk menampung setoran retribusi Kelurahan
7	Dinkes	1023011944	Bank Jateng	Untuk menampung setoran retribusi Dinkes
8	Disdikpora	102301196 I	Bank Jateng	Untuk menampung setoran retribusi Disdkpora
9	DPUPR	1023011979	Bank Jateng	Untuk menampung setoran retribusi Dinas PUPR
10	Disnakerintran	1023011987	Bank Jateng	Untuk menampung setoran retribusi Disnakerintran
11	Diskominlo	1023011995	Bank Jateng	Untuk menampung setoran retribusi Diskominfo
12	Disdaakop UKM	1023012002	Bank Jateng	Untuk menampung setoran retribusi Dlisdagkop UKM
13	Disperkimhub	1023012011	Bank Jateng	Untuk menampung setoran retribusi Disperkimhub

Seluruh rekening diatas aktif selama tahun 2024 dan bersaldo Nihil per 31 Desember 2024.

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.575.900.00 berupa uang tunai penerimaan pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) yang belum menyetorkan penerimaannya pada tanggal 31 Desember 2024 karena bank libur. Kas di Bendahara Penerimaan Disparbud tersebut telah disetorkan ke RKUD melalui Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 33.07/42.0/000011/STS/3.26.2.22.0.000.01.0000/2/2025 tanggal 6 Januari 2025.

Rincian saldo kas dan mutasi Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember dapat dilihat pada Lampiran V.13.

C.1.a.3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar nihil, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.113.566,00, mengalami penurunan sebesar Rp43.113.566,00 atau 100%.

Berdasarkan SK Bupati Wonosobo Nomor 900/1929/2024 tentang Penetapan Rekening pada SKPD Kabupaten Wonosobo ditetapkan 87 Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 39 OPD. 87 Rekening tersebut terdiri dari: 39 rekening Bendahara Pengeluaran OPD, delapan rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah, sembilan rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Puskesmas (BOP), satu rekening Bendahara Pengeluaran Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan satu rekening Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).

Saldo awal, mutasi dan saldo akhir pada rekening Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2024 sebagai berikut:

(1) Saldo awal sebesar Rp43.113.566,00, terdiri dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2023 pada Puskesmas Leksono 1 sebesar Rp1.152.983,00, Puskesmas Kalibawang sebesar Rp2.398.933,00, dan Sekretariat DPRD sebesar Rp39.561.650,00;
(2) Mutasi penambahan sebesar Rp1.629.208.761.590,00, terdiri dari: Pencairan SP2D Belanja sebesar Rp1.632.772.010.104,00, Pemotongan pajak sebesar Rp5.446.890.275,00, Pelimpahan SP2D-UP sebesar Rp2.390.000.000,00, Pelimpahan SP2D-GU sebesar Rp18.087.497.588,00;
(3) Mutasi pengurangan sebesar Rp1.629.251.875.156,00 terdiri dari: Pengeluaran belanja sebesar Rp1.624.024.580.102,00, Penyetoran pajak sebesar Rp5.446.890.275,00, Setoran sisa kas di bendahara tahun 2023 sebesar Rp43.113.566,00, Sisa pelimpahan SP2D-GU sebesar Rp210.027.456,00, Pengembalian sisa SP2D-UP/TU dan Belanja sebesar Rp3.090.512.271,00; dan
(4) Saldo akhir sebesar Rp0,00.

Rincian saldo kas dan mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember dapat diihat pada Lampiran V.14.

C.1.a.4) Kas di BLUD

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.313.148.031,91. Jika dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.150.848.398,91, mengalami penurunan sebesar Rp837.700.367,00 atau 8,25%.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki 2 buah BLUD, yakni BLUD RSUD KRT Setjonegoro dan BLUD Puskesmas sebanyak 25 Puskesmas. Berdasarkan SK Bupati Wonosobo Nomor 900/1929/2024 tentang Penetapan Rekening pada SKPD Kabupaten Wonosobo ditetapkan:

(1) Pengelolaan Kas di BLUD RSUD KRT Setjonegoro dilaksanakan pada 3 rekening, yaitu: Rekening pengelolaan pendapatan pada Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1023009869 atas nama Penampungan RSUD Setjonegoro; Rekening pengelolaan

pendapatan pada BRI dengan Nomor Rekening 011201000470307 atas nama RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo; dan Rekening pengeluaran RSUD pada Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1023004174 atas nama Bendh Pengel RSUD KAB WSB.

(2) Pengelolaan Kas di BLUD Puskesmas dilaksanakan pada 24 rekening pada Bank Jateng.

Kas di BLUD TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada Tabel V.94 berikut.

Tabel V.94 Kas di BLUD TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Kas di BLUD pada RSUD KRT Setjonegoro	5.188.972.565,91	5.472.642.242,91	(283.669.677,00)	(5,18)
2.	Kas di BLUD pada 24 Puskesmas	4.124.175.466,00	4.678.206.156,00	(554.030.690,00)	(11,84)
	JUMLAH	**9.313.148.031,91**	**10.150.848.398,91**	**(837.700.367,00)**	**(8,25)**

Penjelasan terkait saldo Kas BLUD dijelaskan sebagai berikut:

(1) Saldo awal sebesar Rp10.150.848.398,91, terdiri dari Saldo Kas BLUD RSUD tahun 2023 sebesar Rp5.472.242,91,00, dan Saldo Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp4.678.206.156,00;

(2) Mutasi penambahan Kas BLUD sebesar Rp186.643.181.715,73, terdiri dari: penambahan kas BLUD RSUD berupa pendapatan sebesar Rp118.362.469.554,00, dan pemungutan pajak sebesar Rp6.721.201.630,00; serta penambahan kas BLUD pada 24 Puskesmas berupa pendapatan sebesar Rp59.729.847.811,00, dan pemungutan pajak sebesar Rp2.383.693.410,73;

(3) Mutasi pengurangan Kas BLUD sebesar Rp187.480.882.082,73,00 terdiri dari: pengeluaran belanja BLUD RSUD sebesar Rp118.646.139.231,00, dan penyetoran pajak sebesar Rp6.721.201.630,00; serta pengeluaran belanja BLUD pada 24 Puskesmas sebesar Rp59.729.847.811,00, dan penyetoran pajak sebesar Rp2.383.693.410,73; dan

(4) Saldo akhir Kas BLUD sebesar Rp9.313.148.031,91 terdiri dari:

(a) Saldo Kas di BLUD RSUD KRT Setjonegoro Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.188.972.565,91, yaitu:

- Sisa Kas Bendahara Pengeluaran BLUD pada rekening Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1023004174 atas nama Bendh Pengel RSUD KAB WSB sebesar Rp3.272.977.943,00;
- Sisa Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD sebesar Rp1.915.994.622,91 yang terdiri dari: Kas bank di BRI dengan Nomor Rekening 011201000470307 atas nama RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo sebesar Rp1.896.631.045,91, dan Kas tunai di Bendahara Penerimaan sebesar Rp19.363.577,00; dan
- Tidak terdapat saldo akhir/sisa kas pada rekening Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1023009869 atas nama Penampungan RSUD Setjonegoro (rekening belum dioperasionalkan).

(b) Saldo Kas di BLUD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.124.175.466,00 berada pada 24 puskesmas.

Rincian saldo awal, mutasi dan saldo akhir Kas BLUD pada RSUD KRT Setjonegoro dan 24 BLUD Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran V.15.

Pada tahun 2024, BLUD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Rincian nama BLUD, KAP dan hasil audit berupa opini masing-masing pada Lampiran V.16.

C.1.a.5) Kas Dana BOS (BOS Reguler dan Kinerja)

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.253.194.183,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.014.029.022,00, mengalami kenaikan sebesar Rp239.165.161,00 atau 23,59%.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membantu sekolah dalam membiayai operasional sekolah, berupa administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat pembelajaran, pembayaran honor guru, pengembangan perpustakaan, dan pemeliharaan sarana prasarana. Sedangkan BOS Kinerja adalah program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memberikan apresiasi kepada satuan pendidikan yang memiliki kinerja baik dengan tujuan untuk memacu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai prestasi. Dana BOS Kinerja ini digunakan untuk mendukung kegiatan yang mendukung perbaikan mutu pendidikan, seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan pengadaan sarana prasarana.

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS Reguler dan BOS Kinerja tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP. Untuk mendukung pengelolaan dana BOSP, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerbitkan SK Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 900/1929/2024 tentang Penetapan Rekening pada SKPD Kebupaten Wonosobo. Dalam SK Bupati tersebut ditetapkan 517 rekening tabungan pada Bendahara Dana BOS yang digunakan oleh 444 SD Negeri, 72 SMP Negeri dan 51 SD/SMP Swasta dalam pengelolaan BOSP.

Saldo awal, mutasi dan saldo akhir Kas Dana BOS (BOS Reguler dan Kinerja) tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel V.95 dibawah ini.

Tabel V.95 Saldo Kas di Bendahara BOS TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Penambahan	Pengeluaran	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Kas Dana BOS di 436 SD Negeri	529.743.633,00	56.427.561.187,00	56.335.452.708,00	621.852.112,00
2.	Kas Dana BOS di 70 SMP Negeri	484.285.389,00	24.687.122.126,00	24.540.065.444,00	631.342.071,00
3.	Kas Dana BOS di 51 Sekolah Swasta	-	12.101.306.035,00	12.101.306.035,00	-
	JUMLAH	**1.014.029.022,00**	**93.215.989.348,00**	**92.976.824.187,00**	**1.253.194.183,00**

Penjelasan terkait saldo dan mutasi Kas Dana BOS dijelaskan sebagai berikut:

(1) Saldo awal sebesar Rp1.041.029.022,00 merupakan sisa Kas Dana BOS tahun 2023, terdiri dari: sebesar Rp529.743.633,00 pada 440 SD Negeri, sebesar Rp484.285.389,00 pada 71 SMP Negeri, dan sebesar Nihil pada SD/SMP Swasta.
(2) Mutasi penambahan Kas Dana BOS sebesar Rp93.215.980.348,00 sehingga penerimaan dana BOS tahun 2024 sebesar Rp94.230.018.370 (Rp1.041.029.022,00 + Rp93.215.980.348,00), terdiri dari:
    (a) Penerimaan dana BOS Reguler sebesar Rp89.955.989.348,00 pada 436 SD Negeri, 72 SMP Negeri dan 51 SD/SMP Swasta;
    (b) Penerimaan dana BOS Kinerja sebesar Rp3.260.000.000,00 pada 80 SD Negeri, 22 SMP Negeri, dan 6 SD/SMP Swasta.

    Tidak ada penerimaan dana BOS Affirmasi pada tahun 2024 pada sekolah di Kabupaten Wonosobo.
(3) Mutasi pengurangan Kas Dana BOS sebesar Rp92.976.824.187,00 terdiri dari:
    (a) Pengunaan dana BOS Reguler sebesar Rp89.955.989.348,00 pada 436 SD Negeri, 72 SMP Negeri dan 51 SD/SMP Swasta;
    (b) Pengunaan dana BOS Kinerja sebesar Rp3.260.000.000,00 pada 80 SD Negeri, 22 SMP Negeri, dan 6 SD/SMP Swasta.
(4) Saldo akhir Kas Dana BOS sebesar Rp1.253.194.183,00 terdiri dari: sebesar Rp621.852.112,00 pada 436 SD Negeri, sebesar Rp631.342.071,00 pada 70 SMP Negeri, dan sebesar Nihil pada SD/SMP Swasta di Kabupaten Wonosobo.

    Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 tersebut berupa sisa kas di rekening bank sebesar Rp1.138.448.886,00 dan sisa kas tunai di bendahara BOS sebesar Rp114.745.297,00. Pada akhir tahun 2024, tidak terdapat kewajiban perpajakan yang belum disetorkan oleh sekolah.

Rincian nama sekolah penerima Dana BOS dan sisa Dana BOS, baik BOS Reguler dan BOS Kinerja per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran V.17.

C.1.a.6) Kas Lainnya

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.499.578.025,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.736.643.019,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.237.064.994,00 atau 33,11% dengan rincian dapat dilihat pada Tabel V.96 berikut.

Tabel V.96 Saldo Kas Lainnya TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan – Kas di Bendahara BOK	3.352.930.529,00	17.298.455.414,00	18.297.214.662,00	2.354.171.281,00
2.	Kas Lain-lain	3.404.238,00	20.184.617.180,00	20.179.050.418,00	8.971.000,00
	a. Kas Lain-lain pada Disdikpora, yaitu				
	- Kas BOS Kesetaraan	2.492.400,00	4.762.645.000,00	4.761.337.400,00	3.800.000,00
	- BOS PAUD	911.838,00	15.416.801.180,00	15.417.713.018,00	-
	- BOSDA	-	5.171.000,00	-	5.171.000,00

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
	b. Kas Lain-lain pada Bagian Kesra Setda – Kas Penanganan Stunting	37.502.000,00	204.058,00	204.058,00	37.502.000,00
	JUMLAH	**3.397.241.005,00**	**57.667.893.832,00**	**58.655.519.556,00**	**2.409.615.281,00**

Kas Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdiri dari:

(1) Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan - Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Dana BOK Puskesmas pada tahun 2024 adalah Dana Alokasi Khusus non-fisik yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional kesehatan di tingkat Puskesmas. Tujuan utama BOK Puskesmas tahun 2024 adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, serta mendukung Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Peraturan dan petunjuk teknis (Juknis) yang digunakan dalam pengelolaan dana BOK Puskesmas adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK.

Penjelasan terkait saldo dan mutasi Kas Lainnya – Kas di Bendahara BOK dijelaskan: Saldo awal merupakan saldo Dana BOK tahun 2023 sebesar Rp3.352.930.529,00 pada 24 puskesmas; Mutasi penambahan dan pengurangan merupakan penerimaan dan belanja dana DAK Non Fisik - BOK tahun 2024 sebesar Rp17.298.455.414,00; dan Saldo akhir Kas di Bendahara BOK merupakan sisa kas dana BOK tahun 2024 sebesar Rp2.354.171.281,00 pada 24 puskesmas dengan rincian pada Lampiran V.18.

Seluruh kas di Bendahara BOK dikelola pada rekening BOK Puskesmas masing-masing sebagaimana penetapan rekening dalam SK Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 900/1929/2024 tentang Penetapan Rekening pada SKPD Kebupaten Wonosobo.

Namun demikian, atas saldo akhir Kas Dana BOK pada Puskesmas Kepil 1 sebesar Rp62.396.002,00, terdiri dari kas di bank sebesar Rp58.706.865,00 dan kas tunai pada Bendahara BOK sebesar Rp3.689.137,00. Kas tunai tersebut merupakan dana retur yang gagal transfer pada transaksi insentif ukm dengan nomor referensi transaksi 20241218142532306481 dan dikembalikan ke ke rekening Bank BNI BOK Puskesmas Kepil 1 pada tanggal 13 Januari 2025.

(2) Saldo Kas Lainnya pada Disdikpora, terdiri dari:
   (a) Kas Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
   Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C, baik meliputi: sanggar kegiatan belajar maupun pusat kegiatan belajar masyarakat. Pengelolaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan mengacu pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.
   (b) Kas Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
   Dana BOP PAUD merupakan salah satu jenis DAK Non Fisik untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD). Pengelolaan dana BOP PAUD juga mengacu pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.

(c) Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSP Daerah/BOSDA)
Dana BOSP Daerah adalah bantuan operasional sekolah dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mendukung biaya personalia dan operasional bagi Satuan Pendidikan. Pengelolaan Dana BOSP diatur dalam Perbup Wonosobo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOSP Daerah bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Penjelasan terkait saldo Kas Lainnya pada Disdikpora per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.343.311,00 yang seluruhnya merupakan kas di bank dengan rincian pada Tabel V.97 berikut.

Tabel V.97 Saldo Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga per 31 Desember 2024

No (1)	Uraian (2)	No. Rekening (3)	Saldo Per 31/12/2024 (Rp) (4)	
A	**Kas BOP Pendidikan Kesetaraan**	**-**	**-**	**-**
B	**Kas BOP PAUD**			**172.311,00**
1.	TK Negeri Pembina Sapuran	Bank Jateng 3104076717	54.321,00	
2.	TK N Pembina Selomerto	Bank Jateng 3171029812	19.212,00	
3.	TK Negeri Pembina Selomerto	Bank Jateng 3023211067	823,00	
4.	TK Negeri Pembina Wonosobo	Bank Jateng 3023418320	97.955,00	
C	**Kas BOSP Daerah//BOSDA**			**5.171.000,00**
1.	SDN Wringinanom (BOSDA)	Bank Jateng 3104112446	75.000,00	
2.	SMPN 1 Watumalang (BOSDA)	Bank Jateng 3023422572	96.000,00	
3.	SDN 2 Krasak (BOSDA)	Bank Jateng 3023421321	5.000.000,00	
	JUMLAH			**5.343.311,00**

(3) Saldo Kas Penanganan Stunting Wonosobo

Dana penanganan stunting merupakan dana yang dihimpun oleh Bagian Kesra Setda pada tahun 2023. Dana penanganan stunting berasal dari sumbangan masyarakat/instansi/perusahaan/lembaga swasta untuk percepatan penanganan stunting di Kabupaten Wonosobo. Untuk mengelola dana penanganan stunting dibuka rekening giro pada PT Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1023012096 a.n. Penanganan Stunting Wonosobo. Rekening tersebut dibentuk berdasarkan Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Nomor 900/214/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Bank Jateng.

Sejak pembukaan rekening pada bulan Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023, dana telah dihimpun sebesar Rp78.182.000,00 dan telah dipergunakan untuk kegiatan penanganan stunting pada Desa Sigedang dan Kelurahan Kejajar, Kecamatan Kejajar sebesar Rp40.680.000,00, sehingga per 31 Desember 2023 terdapat saldo sebesar Rp37.502.000,00. Atas pengelolaan rekening tersebut telah diperoleh jasa giro sebesar Rp228.037,00 yang secara otomatis disetorkan ke Kas Daerah.

Saldo dana penanganan stunting per 31 Desember 2023 dan saldo per 31 Desember 2024 adalah sama sebesar Rp37.502.000,00.

Selisih antara saldo Kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.848.551.572,91 dengan SILPA 2023 sebesar Rp33.706.944.828,91 adalah sebesar Rp141.606.744,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Kas Lainnya pada Bagian Kesra Setda - Penanganan Stunting Wonosobo sebesar Rp37.502.000,00;
(2) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa JKN 1% di rekening penampungan gaji sebesar Rp97.132.433,00;
(3) Saldo Kas pada Sekolah Negeri penerima dana BOSDA sebesar Rp5.343.311,00; dan
(4) Saldo Kas Dana BOP Kesetaraan dalam bentuk kas tunai pada UPTD SKB Wonosobo, merupakan pajak daerah yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.629.000,00.

C.1.a.7) Piutang

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp28.717.920.111,40. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.964.501.115,40 mengalami penurunan sebesar Rp18.246.581.004,00 atau 38,85 %, dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.98 berikut.

Tabel V.98 Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Pajak Daerah	11.359.268.270,00	67.689.924.831,00	65.175.787.087,00	13.873.406.014,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	4.025.674.302,00	109.040.387.226,00	104.764.523.338,00	8.301.538.190,00
3.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.450.709.706,00	-	24.450.709.706,00	-
4.	Piutang lain-lain PAD yang sah	3.954.114.450,40	658.872.158,00	4.237.950.737,00	375.035.871,40
5.	Piutang Transfer Lainnya dari Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-
6.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.174.734.387,00	6.167.940.036,00	3.174.734.387,00	6.167.940.036,00
	JUMLAH	**46.964.501.115,40**	**183.557.124.251,00**	**201.803.705.255,00**	**28.717.920.111,40**

C.1.a.7).a)Piutang Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.873.406.014,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.359.268.270,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.514.137.744,00 atau 22,13,% dengan uraian dibawah ini:

(1) Saldo awal Piutang Pajak sebesar Rp11.359.268.270,00;
(2) Mutasi penambahan berupa: Ketetapan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp67.689.924.831,00; dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah – Kurang Bayar (SKPD-KB) sebesar Rp178.507.244,00;
(3) Mutasi pengurangan berupa: Penerimaan pendapatan atas piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp659.636.348,00; Penerimaan pendapatan atas Ketetapan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp64.462.745.545,00 dan Penerimaan pendapatan atas SKPD-KB sebesar Rp53.405.194,00; dan
(4) Saldo akhir Piutang Pajak sebesar Rp13.873.406.014,00.

Berikut rincian per jenis Piutang Pajak dapat dilihat pada Tabel V.99 berikut.

Tabel V.99 Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Pajak Hotel	30.562.625,00	2.377.984.127,00	2.003.617.185,00	404.929.567,00
2.	Piutang Pajak Restoran	110.929.285,00	11.867.582.581,00	11.544.317.853,00	434.194.013,00
3.	Piutang Pajak Hiburan	8.830.500,00	261.366.277,00	261.166.277,00	9.030.500,00
4.	Piutang Pajak Reklame	698.514.391,00	902.796.043,00	908.210.178,00	693.100.256,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	6.127.020,00	21.017.979.615,00	21.017.979.615,00	6.127.020,00
6.	Piutang Pajak Parkir	4.144.000,00	120.965.100,00	120.085.100,00	5.024.000,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	21.779.947,00	342.629.160,00	342.274.980,00	22.134.127,00
8.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	202.400,00	-	-	202.400,00
9.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.478.178.102,00	30.798.621.928,00	28.978.135.899,00	12.298.664.131,00
	JUMLAH	**11.359.268.270,00**	**67.689.924.831,00**	**65.175.787.087,00**	**13.873.406.014,00**

Pengelolaan Piutang Pajak Daerah berada di BPPKAD dengan penjelasan sebagai berikut.

(1) Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp404.929.567,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.562.625,00 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp374.366.942,00 atau 1.224,92% yang disebabkan pada TA 2024 terdapat ketetapan Pajak Daerah serta penerbitan SKPD-KB atas Pemeriksaan Pajak Daerah yang per 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya. Adapun mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan uraian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Hotel	**:**	**30.562.625,00**
Mutasi Tambah	**:**	**2.377.984.127,00**
Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	2.282.657.410,00
SKPDKB TA 2024	:	95.326.717,00
Mutasi Kurang	**:**	**2.003.617.185,00**
Penerimaan pendapatan atas piutang tahun-tahun sebelumnya	:	-
Penerimaan pendapatan atas Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	1.954.120.468,00
Penerimaan pendapatan atas SKPDKB TA 2024	:	49.496.717,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Hotel	**:**	**404.929.567,00**

(2) Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp434.194.013,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp110.929.285,00, mengalami kenaikan sebesar Rp323.264.728,00 atau 291,42%, yang disebabkan terdapat ketetapan Pajak Daerah TA 2024 serta penerbitan SKPDKB atas Pemeriksaan Pajak Daerah yang per 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya. Adapun mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan uraian sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Restoran	**:**	**110.929.285,00**
Mutasi Tambah	**:**	**11.867.582.581,00**
Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	11.784.402.054,00
SKPDKB TA 2024	:	83.180.527,00
Mutasi Kurang	**:**	**11.544.317.853,00**
Penerimaan pendapatan atas piutang tahun-tahun sebelumnya	:	23.777.285,00
Penerimaan pendapatan atas Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	11.516.632.091,00
Penerimaan pendapatan atas SKPDKB TA 2024	:	3.908.477,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Restoran	**:**	**434.194.013,00**

(3) Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.030.500,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar

Rp8.830.500,00, mengalami kenaikan sebesar Rp200.000,00 atau 2,26%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan uraian sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Hiburan	**:**	**8.830.500,00**
Mutasi Tambah	**:**	**261.366.277,00**
Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	261.366.277,00
Mutasi Kurang	**:**	**261.166.277,00**
Penerimaan pendapatan atas piutang tahun-tahun sebelumnya	:	-
Penerimaan pendapatan atas Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	261.166.277,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Hiburan	**:**	**9.030.500,00**

(4) Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp693.100.256,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp698.514.391,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.414.135,00 atau 0,78%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan uraiansebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Reklame	**:**	**698.514.391,00**
Mutasi Tambah	**:**	**902.796.043,00**
Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	902.796.043,00
Mutasi Kurang	**:**	**908.210.178,00**
Penerimaan pendapatan atas piutang tahun-tahun sebelumnya	:	8.804.750,00
Penerimaan pendapatan atas Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	899.405.428,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Reklame	**:**	**693.100.256,00**

(5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.127.020,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.127.020,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan (stagnan) selama TA 2024 dengan uraian mutasi/koreksi selama TA 2024 sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Penerangan Jalan	**:**	**6.127.020,00**
Mutasi Tambah	**:**	**21.017.979.615,00**
Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	21.017.979.615,00
Mutasi Kurang	**:**	**21.017.979.615,00**
Penerimaan pendapatan atas piutang tahun-tahun sebelumnya	:	-
Penerimaan pendapatan atas Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	21.017.979.615,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan	**:**	**6.127.020,00**

(6) Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.024.000,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.144.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp880.000,00 atau 21,24% yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan uraian sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Parkir	**:**	**4.144.000,00**
Mutasi Tambah	**:**	**120.965.100,00**
Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	120.965.100,00
Mutasi Kurang	**:**	**120.085.100,00**
Penerimaan pendapatan atas piutang tahun-tahun sebelumnya	:	-
Penerimaan pendapatan atas Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	120.085.100,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Parkir	**:**	**5.024.000,00**

(7) Piutang Pajak Air Tanah

Tabel V.99 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Air Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.134.127,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.779.947,00 mengalami kenaikan sebesar Rp354.180,00 atau 1,63%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan uraian sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Air Tanah	**:**	**21.779.947,00**
Mutasi Tambah	**:**	**342.629.160,00**
Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	342.629.160,00
Mutasi Kurang	**:**	**342.274.980,00**
Penerimaan pendapatan atas piutang tahun-tahun sebelumnya	:	55.500,00
Penerimaan pendapatan atas Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	342.219.480,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Air Tanah	**:**	**22.134.127,00**

(8) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp202.400,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp202.400,00 cenderung stagnan. Saldo tersebut diakui sejak TA 2015 dan tidak mengalami mutasi sampai dengan tahun 2024.

(9) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.298.664.131,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.478.178.102,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.820.486.029,00 atau 17,37%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan uraian sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang PBB-P2	**:**	**10.478.178.102,00**
Mutasi Tambah	**:**	**30.798.621.928,00**
Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	30.798.621.928,00
Mutasi Kurang	**:**	**28.978.135.899,00**
Penerimaan pendapatan atas piutang tahun-tahun sebelumnya	:	626.998.813,00
Penerimaan pendapatan atas Ketetapan Pajak Daerah TA 2024	:	28.351.137.086,00
Saldo Akhir Piutang PBB-P2	**:**	**12.298.664.131,00**

C.1.a.7).b) Piutang Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.301.538.190,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.025.674.302,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.275.863.888,00 atau 106,21%, antara lain disebabkan pada TA 2023 Jasa Pelayanan Kesehatan dan pemanfaatan aset daerah disajikan pada akun Piutang Lain-lain PAD, sedangkan pada TA 2024 disajikan pada akun Piutang Retribusi Daerah dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal Piutang Retribusi Daerah	**:**	**4.025.674.302,00**
Mutasi/Koreksi Tambah	**:**	**109.040.387.226,00**
Ketetapan Retribusi Daerah	:	10.954.176.923,00
Reklas dari Piutang Lain-lain PAD yang sah	:	620.991.087,00
Reklas antar Piutang Retribusi Daerah	:	492.880.250,00
Konfirmasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dari BPJS Kesehatan	:	278.361.000,00
Klaim Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD KRT Setjonegoro ke: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pasien Covid-19, PT. Geo Dipa Energi, Jasa raharja, Pasien Gizi Buruk,dan Pasien Umum	:	96.693.977.966,00
Mutasi/Koreksi Kurang	**:**	**104.764.523.338,00**

Penerimaan Pendapatan atas Piutang Retribusi Daerah	:	102.897.584.257,00
Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD KRT Setjonegoro: kelebihan klaim BPJS Kesehatan, kelebihan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan perubahan klaim Jasa Raharja menjadi pasien umum	:	1.286.165.500,00
Reklas antar Piutang Retribusi Daerah	:	492.880.250,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Pasien Umum	:	87.403.331,00
Pendapatan Diterima dimuka th 2023		490.000,00
Saldo Akhir Piutang Retribusi Daerah	**:**	**8.301.538.190,00**

Berikut rincian per jenis Piutang Retribusi Daerah lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.100 berikut.

Tabel V.100 Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Jasa Umum	3.275.177.082,00	99.884.216.279,00	96.782.366.437,00	6.377.026.924,00
2.	Piutang Retribusi Jasa Usaha	497.696.950,00	8.011.625.630,00	6.837.611.584,00	1.671.710.996,00
3.	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	252.800.270,00	1.144.545.317,00	1.144.545.317,00	252.800.270,00
	JUMLAH	**4.025.674.302,00**	**109.040.387.226,00**	**104.764.523.338,00**	**8.301.538.190,00**

(1) Piutang Retribusi Jasa Umum

Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.377.026.924,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.275.177.082,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.101.849.842,00 atau 94,71%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perubahan klasifikasi akuntansi dimana Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya dicatat dalam Piutang Lain-lain PAD pada TA 2023, dialihkan ke Piutang Retribusi Daerah pada TA 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menetapkan Pelayanan Kesehatan sebagai Objek Retribusi Jasa Umum. Uraian Retribusi Jasa Umum lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.101 berikut.

Tabel V.101 Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	98.078.038.303,00	95.853.669.359,00	2.224.368.944,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	317.919.000,00	-	-	317.919.000,00
3.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2.560.734.531,00	1.806.177.976,00	894.502.528,00	3.472.409.979,00
4.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	396.523.551,00	-	34.194.550,00	362.329.001,00
	JUMLAH	**3.275.177.082,00**	**99.884.216.279,00**	**96.782.366.437,00**	**6.377.026.924,00**

(a) Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 berada pada BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD untuk tahun pengakuan 2011 s.d. 2024 sebesar Rp2.224.368.944,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Puskesmas	Uraian	Tahun Pengakuan	Nilai (Rp)
1.	Puskesmas Wonosobo 1	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	29.005.000,00
2.	Puskesmas Kertek 1	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	2.880.000,00
3.	Puskesmas Selomerto 1	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	101.975.000,00
4.	Puskesmas Leksono 1	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	2.180.000,00
5.	Puskesmas Watumalang	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	1.754.000,00
6.	Puskesmas Mojotengah	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	1.200.000,00
7.	Puskesmas Garung	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	30.325.000,00
8.	Puskesmas Kejajar 1	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	11.578.000,00
9.	Puskesmas Kalikajar 1	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	1.259.000,00
10.	Puskesmas Kaliwiro	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	67.640.000,00
11.	Puskesmas Kalibawang	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	14.230.000,00
12.	Puskesmas Leksono 2	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	6.007.000,00
13.	Puskesmas Kejajar 2	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	1.537.000,00
14.	Puskesmas Kalikajar 2	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	2.271.000,00

15.	Puskesmas Kepil 2	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	600.000,00
16.	Puskesmas Sukoharjo 2	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	3.920.000,00
17.	RSUD KRT Setjonegoro	Piutang atas klaim BPJS Kesehatan*)	2024	861.254.800,00
18.	RSUD KRT Setjonegoro	Piutang atas klaim BPJS Ketenagakerjaan	2023-2024	6.159.169,00
19.	RSUD KRT Setjonegoro	Piutang Pasien *Covid*-19	2021-2023	520.039.000,00
20.	RSUD KRT Setjonegoro	Piutang Pasien Jasa Raharja	2023-2024	74.343.372,00
21.	RSUD KRT Setjonegoro	Piutang Pasien Umum	2011-2024	484.211.603,00
		Jumlah		**2.224.368.944,00**

*) Berdasarkan surat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Magelang tanggal 6 Januari 2025 Nomor: 60/VI-04/0125 Perihal: Jawaban Konfirmasi Piutang.

(b) Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berada di Disperkimhub untuk tahun pengakuan 2016 s.d. 2022 sebesar Rp317.919.000,00 dan tidak ada mutasi selama 2024.

(c) Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar berada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop UKM) untuk tahun pengakuan 2010 s.d. 2024 sebesar Rp3.472.409.979,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Retribusi Pelayanan Pasar	Tahun Pengakuan	Nilai (Rp)
A.	**Abonemen Kios (1 s/d 9)**		**1.948.141.770,00**
1.	Pasar Induk Wonosobo	2011-2024	854.420.000,00
2.	Pasar Wonosobo	2010-2018	369.381.150,00
3.	Pasar Kertek	2010-2024	249.211.430,00
4.	Pasar Selomerto	2024	12.217.800,00
5.	Pasar Leksono	2022-2024	9.422.400,00
6.	Pasar Sapuran	2014-2024	199.021.240,00
7.	Pasar Garung	2023-2024	33.692.325,00
8.	Pasar Kejajar	2023-2024	22.551.000,00
9.	Pasar kaliwiro	2023-2024	198.224.425,00
B.	**Abonemen Kios (1 s/d 9)**		**1.524.268.209,00**
1.	Pasar Induk Wonosobo	2013-2024	504.593.704,00
2.	Pasar Wonosobo	2015-2018	24.338.400,00
3.	Pasar Kertek	2010-2024	737.129.848,00
4.	Pasar Selomerto	2023-2024	10.816.900,00
5.	Pasar Leksono	2023-2024	1.246.500,00
6.	Pasar Sapuran	2011-2024	121.138.404,00
7.	Pasar Garung	2010-2024	81.033.900,00
8.	Pasar Kejajar	2017-2024	34.300.553,00
9.	Pasar kaliwiro	2024	9.670.000,00
	Jumlah A+B		**3.472.409.979,00**

(d) Saldo Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk tahun pengakuan 2020 s.d. 2023 dan terdapat pembayaran pada TA 2024 sebesar Rp34.194.550,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp362.329.001,00.

(2) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 mencapai Rp1.671.710.996,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp497.696.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.174.014.046,00 atau 235,89%. Kenaikan signifikan ini utamanya disebabkan oleh perubahan klasifikasi pencatatan pemanfaatan aset daerah dari akun Piutang Lain-lain PAD pada TA 2023 ke akun Piutang Retribusi Daerah pada TA 2024, sesuai amanat Pasal 101 ayat (1) Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengklasifikasikan pemanfaatan aset daerah dalam penyediaan barang/jasa sebagai Objek Retribusi Jasa Usaha. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.102 berikut.

Tabel V.102 Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Penambahan	Mutasi/Koreksi (Rp) Pengurangan	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	492.896.950,00	-	492.880.250,00	16.700,00
2.	Piutang Retribusi Terminal	600.000,00	8.172.000,00	-	8.772.000,00
3.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00
4.	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	8.003.453.630,00	6.344.731.334,00	1.658.722.296,00
	JUMLAH	**497.696.950,00**	**8.011.625.630,00**	**6.837.611.584,00**	**1.671.710.996,00**

(a) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berada di DPMPTSP sebesar Rp16.700,00 untuk pengakuan tahun 2017;

(b) Piutang Retribusi Terminal berada di Disperkimhub berupa Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal (MCK dan Kios) untuk tahun pengakuan 2020 s.d. 2024 sebesar Rp8.772.000,00;

(c) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir berada di Disparbud untuk pengakuan tahun 2013 sebesar Rp4.200.000,00 dan tidak ada mutasi selama 2013 s.d. 2024;

(d) Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berada pada 11 OPD sedengan rincian sebagai berikut.

No	OPD	Uraian	Tahun Pengakuan	Nilai (Rp)
1.	Disparbud	*Foodcourt* Kalianget, Gedung TIC Dieng, Kios Blok Taman Syailendra (Terminal Dieng II 2019), Kios Dieng *Plateau Theater*, Kios DPT, Kios Gardu Pandang, Kios Gelanggang Renang Mangli, Kios Taman Kuliner dan *Creative Centre*, Gerbang Mandala Wisata, Kios Taman Syailendra, Kios Terminal Dieng, Taman Syailendra (Bagi Hasil KSP)	2018-2024	463.278.546,00
2.	Disdagkop UKM	Sewa BMD tanah dan atau bangunan: Kios SPBU Sapen, Kios Plaza	2018-2023	433.959.250,00
3.	Kec. Wonosobo	Sewa BMD tanah dan atau bangunan: Kel Jlamprang, Kel Kejiwan, Kel Sambek, Kel Mlipak, Kel Rojoimo, Kel Kramatan, Kel Jaraksari, Kel Bumireso, Kel Kalianget,	2013-2024	409.130.500,00
4.	Kec. Kertek	Sewa BMD tanah dan atau bangunan: Kel Wringinanom	2023	4.500.000,00
5.	Kec. Selomerto	Sewa BMD tanah dan atau bangunan: Kel Selomerto	2023	210.000.000,00
6.	Kec. Watumalang	Sewa BMD tanah dan atau bangunan: Kel Wonoroto	2015	52.525.000,00
7.	Kec. Kalikajar	Sewa BMD tanah dan atau bangunan: Kel Kalikajar	2022-2024	9.200.000,00
8.	Kec. Sapuran	Sewa BMD tanah dan atau bangunan: Kel Sapuran	2017-2022	22.641.000,00
9.	Kec. Kepil	Sewa BMD tanah dan atau bangunan: Kel Kepil	2017-2018	6.938.000,00
10.	Kec. Wadaslintang	Sewa BMD tanah dan atau bangunan: Kel Wadaslintang	2013-2018	23.450.000,00
11.	Kec. Mojotengah	Sewa BMD tanah dan atau bangunan: Kel Kalibeber	2017-2024	23.100.000,00
		Jumlah		**1.658.722.296,00**

(3) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 untuk pengakuan tahun 2013 s.d. tahun 2021 sebesar Rp252.800.270,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp252.800.270,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan (stagnan) selama TA 2024 dengan uraian dapat dilihat pada Tabel V.103 berikut.

Tabel V.103 Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	179.143.484,00	-	-	179.143.848,00
2.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	23.858.036,00	-	-	23.858.036,00
3.	Piutang Retribusi Izin Trayek	49.798.750,00	-	-	49.798.750,00
	JUMLAH	**252.800.270,00**	**-**	**-**	**252.800.270,00**

1) Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berada di DPMPTSP, per 31 Desember 2024 untuk pengakuan tahun 2013 s.d. tahun 2021 sebesar Rp179.143.484,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp179.143.484,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan (stagnan) selama TA 2024 saldo piutang cenderung stagnan.
2) Saldo Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berada di DPMPTSP, untuk pengakuan tahun 2013 s.d. tahun 2017 sebesar Rp23.858.036,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.858.036,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan (stagnan) selama TA 2024.
3) Piutang Retribusi Izin Trayek berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.798.750,00, Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.798.750,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan (stagnan) selama TA 2024.

C.1.a.7).c) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PHPKDD) per 31 Desember 2024 adalah nihil. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.450.709.706,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.450.709.706,00, atau 100,00%, dikarenakan sampai dengan LK Pemerintah Kabupaten Wonsosobo TA 2024 terbit belum ada BUMD yang mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Uraian Piutang PHPKDD lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.104 berikut.

Tabel V.104 Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	12.850.091.079,00	-	12.850.091.079,00	-
2.	BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	440.464.393,00	-	440.464.393,00	-
3.	BPR Bank Wonosobo	3.725.871.354,00	-	3.725.871.354,00	-
4.	Perumda PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo	7.434.282.880,00	-	7.434.282.880,00	-
	JUMLAH	**24.450.709.706,00**	**-**	**24.450.709.706,00**	**-**

C.1.a.7).d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp375.035.871,40. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.954.114.450,40 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp3.579.078.579,00 atau 90,52%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan klasifikasi akuntansi, dimana jasa pelayanan kesehatan dan pemanfaatan aset daerah yang sebelumnya dicatat dalam Piutang Lain-lain PAD pada TA 2023, dialihkan ke akun Piutang

Retribusi Daerah pada TA 2024. Perubahan kebijakan pencatatan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pengelompokkan jenis pendapatan daerah sebagaimana ketentuan dalam Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.105 berikut.

Tabel V.105 Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	1.082.508.460,40	286.172.158,00	999.068.000,00	369.612.618,40
2.	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.355.000,00	-	5.355.000,00	-
3.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.723.253,00	-	-	2.723.253,00
4.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.283.314.000,00	-	1.283.314.000,00	-
5.	Piutang Pendapatan BLUD	1.580.213.737,00	372.700.000,00	1.950.213.737,00	2.700.000,00
	JUMLAH	**3.954.114.450,40**	**658.872.158,00**	**4.237.950.737,00**	**375.035.871,40**

(1) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp369.612.618,40. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.082.508.460,40 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp712.895.842,00 atau 65,86%. Penurunan signifikan ini dikarenakan perubahan klasifikasi pencatatan pemanfaatan aset daerah dari akun Piutang Lain-lain PAD pada TA 2023 ke akun Piutang Retribusi Daerah pada TA 2024, sesuai amanat Pasal 101 ayat (1) Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.106 berikut.

Tabel V.106 Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Kelurahan Leksono	327.950.000,00	-		327.950.000,00
2.	BPPKAD	41.662.460,40	286.172.158,00	286.172.000,00	41.662.618,40
3.	Disperkimhub	8.172.000,00	-	8.172.000,00	-
4.	Disparbud	176.900.000,00	-	176.900.000,00	-
5.	Kelurahan Kejiwan	10.550.000,00	-	10.550.000,00	-
6.	Kelurahan Sambek	8.600.000,00	-	8.600.000,00	-
7.	Kelurahan Pagerkukuh	61.560.000,00	-	61.560.000,00	-
8.	Kelurahan Rojoimo	152.450.000,00	-	152.450.000,00	-
9.	Kelurahan Kramatan	16.860.000,00	-	16.860.000,00	-
10.	Kelurahan Bumireso	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
11.	Kelurahan Kalianget	82.700.000,00	-	82.700.000,00	-
12.	Kelurahan Kertek	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
13.	Kelurahan Wringinamon	9.500.000,00	-	9.500.000,00	-
14.	Kelurahan Wonoroto	52.525.000,00	-	52.525.000,00	-
15.	Kelurahan Kalibeber	18.600.000,00	-	18.600.000,00	-
16.	Kelurahan Kalikajar	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
17.	Kelurahan Sapuran	27.191.000,00	-	27.191.000,00	-
18.	Kelurahan Kepil	6.938.000,00	-	6.938.000,00	-
19.	Kelurahan Wadaslintang	23.450.000,00	-	23.450.000,00	-
	JUMLAH	**1.082.508.460,40**	**286.172.158,00**	**999.068.000,00**	**369.612.618,40**

(2) Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada BPPKAD, per 31 Desember 2024 sebesar nihil. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.355.000,00 mengalami penurunan signifikan dikarenakan pelunasan saldo oleh Sdr. PU dan tidak ada penambahan pembebanan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti pada TA 2024.

(3) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
Saldo Piutang Penerimaan atas Pendapatan Denda Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada BPPKAD, per 31 Desember 2024 untuk pengakuan tahun 2023 sebesar Rp2.723.253,00. Jika dibandingkan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan (stagnan) selama TA 2024. Piutang denda pajak daerah berupa denda pajak hotel pada Gotel ARJ sebesar Rp860.333,00 dan Hotel CNM sebesar Rp1.862.920,00.

(4) Piutang Pendapatan dari Pengembalian
Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 adalah nihil. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.283.314.000,00 mengalami penurunan 100%.

(5) Piutang Pendapatan BLUD
Saldo Piutang Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo berada pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.700.000,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.580.213.737,00 mengalami penurunan drastis sebesar Rp1.577.513.737,00 atau 99,83%. Penurunan drastis ini disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi, dimana Piutang Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya dicatat dalam Piutang Lain-lain PAD pada TA 2023, dialihkan ke Piutang Retribusi Daerah pada TA 2024, sesuai amanat Pasal 101 ayat (1) Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan Layanan Kesehatan sebagai Objek Retribusi Jasa Umum. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.107 berikut :

Tabel V.107 Saldo Piutang Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Puskesmas Wonosobo 1	35.175.000,00	-	35.175.000,00	-
2.	Puskesmas Kertek 1	11.780.000,00	-	11.780.000,00	-
3.	Puskesmas Leksono 1	2.180.000,00	-	2.180.000,00	-
4.	Puskesmas Watumalang	14.442.000,00	-	14.442.000,00	-
5.	Puskesmas Mojotengah	4.376.000,00	-	4.376.000,00	-
6.	Puskesmas Garung	20.744.400,00	-	20.744.400,00	-
7.	Puskesmas Kalikajar 1	1.285.000,00	-	1.285.000,00	-
8.	Puskesmas Kaliwiro	42.986.000,00	-	42.986.000,00	-
9.	Puskesmas Wadaslintang 1	2.535.000,00	-	2.535.000,00	-
10.	Puskesmas Sukoharjo 1	1.741.000,00	-	1.741.000,00	-
11.	Puskesmas Kalibawang	16.951.000,00	-	16.951.000,00	-
12.	Puskesmas Wonosobo 2	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
13.	Puskesmas Kertek 2	29.481.000,00	-	29.481.000,00	-
14.	Puskesmas Selomerto 2	2.439.000,00	-	2.439.000,00	-
15.	Puskesmas Leksono 2	1.246.000,00	-	1.246.000,00	-
16.	Puskesmas Kejajar 2	8.405.000,00	-	8.405.000,00	-
17.	Puskesmas Kalikajar 2	2.180.000,00	-	2.180.000,00	-
18.	Puskesmas Kepil 2	500.000,00	-	500.000,00	-
19.	Puskesmas Wadaslintang 2	10.945.000,00	-	10.945.000,00	-
20.	Puskesmas Sukoharjo 2	7.197.000,00	-	7.197.000,00	-
21.	RSUD KRT Setjonegoro	1.362.225.337,00	372.700.000,00	1.732.225.337,00	2.700.000,00
	JUMLAH	**1.580.213.737,00**	**372.700.000,00**	**1.950.213.737,00**	**2.700.000,00**

C.1.a.7).e) Piutang Transfer Lainnya dari Pusat – Dana Perimbangan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Piutang Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Nihil. Hal ini sesuai ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dimana piutang diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan dalam bentuk dokumen sah mengenai adanya kurang salur atau nilai terutang sejumlah tertentu yang belum dibayarkan pada akhir tahun anggaran.

C.1.a.7).f) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.167.940.036,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.174.734.387,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.993.205.649,00 atau 94,28% yang dikarenakan adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.108 Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
A	**Piutang Bagi Hasil dari Provinsi**				
1.	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	597.427.581,00	3.117.344.666,00	597.427.581,00	3.117.344.666,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.111.630,00	1.573.414.464,00	15.111.630,00	1.573.414.464,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.397.280.863,00	1.434.715.246,00	2.397.280.863,00	1.434.715.246,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	16.522.433,00	42.465.660,00	16.522.433,00	42.465.660,00
B	**Piutang Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri**	148.391.880,00	-	148.391.880,00	-
	Jumlah	**3.174.734.387,00**	**6.167.940.036,00**	**3.174.734.387,00**	**6.167.940.036,00**

(1) Saldo awal Piutang Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp3.174.734.387,00;
(2) Mutasi penambahan berupa penambahan piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp6.167.940.036,00;
(3) Mutasi pengurangan sebesar Rp3,174.734.387,00 terdiri atas: Penerimaan pendapatan atas Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp3.026.342.507,00 dan Penerimaan Pendapatan atas Piutang Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri, yaitu PT. Geo Dipa Energi (Persero) yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Maret 2024 sebesar Rp148.391.880,00; dan
(4) Saldo akhir Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp6.167.940.036 merupakan Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp6.167.940.036,00.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Mei 2025 Nomor B.900.1.14.3/11/2025 tentang Rekomendasi Penyaluran Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah TA 2024 dan SP2D Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 33600029 tanggal 16 Mei 2025 diketahui terdapat transfer ke RKUD Kabupaten Wonosobo atas kurang salur Bagi Hasil Pajak sebesar Rp6.167.950.064,00 dengan rincian:

			(Dalam Rupiah)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	:	3.117.330.040,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	:	1.573.439.118,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	:	1.434.715.246,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	:	42.465.660,00
		JUMLAH	**6.167.950.064,00**

C.1.a.8) Piutang Lainnya

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.077.750.549,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.081.900.594,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.150.000,00 atau 0,07%, yang sepenuhnya merupakan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang berupa dana bergulir pada 3 OPD dengan rincian Tabel V.109 berikut.

Tabel V.109 Saldo Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	4.873.986.744,00	-	4.150.000,00	4.871.036.744,00
2.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	599.935.300,00		-	599.935.300,00
3.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi	606.778.550,00	-	-	606.778.550,00
	JUMLAH	**6.081.900.594,00**	**-**	**4.150.000,00**	**6.077.750.594,00**

Rincian lebih lanjut terkait dengan Saldo Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang berupa Dana Bergulir dapat dilihat pada Lampiran V.19.

C.1.a.9) Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp20.233.780.615,94). Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp16.455.170.868,84) mengalami kenaikan sebesar (Rp3.778.609.747,10) atau 22,96%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2024 dengan rincian sebagaimana Tabel V.110 di bawah ini.

Tabel V.110 Saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(6.234.310.973,30)	372.453.888,90	2.222.966.472,40	(8.084.823.556,80)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.328.501.009,00)	418.406.176,00	2.800.459.730,30	(5.710.554.563,60)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(810.458.292,54)	466.330.230,70	16.523.840,00	(360.651.901,84)
4.	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.081.900.594,00)	61.451.500,00	57.301.500,00	(6.077.750.594,00)
	JUMLAH	**(16.455.170.868,84)**	**1.318.641.795,60**	**5.097.251.542,70**	**(20.233.780.615,94)**

(a) Penyisihan Piutang Pajak Daerah
Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo berada pada BPPKAD dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp8.084.823.556,80). Jika

dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp6.234.310.973,30) mengalami kenaikan sebesar (Rp1.850.512.583,50) atau 29,68%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.111 berikut.

Tabel V.111 Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(20.518.600,50)	-	1.195.942,90	(21.627.043,40)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(86.167.200,00)	-	523.800,00	(86.778.500,00)
3.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(132.686.926,90)	123.856.426,90	-	(8.830.500,00)
4.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(557.356.712,60)	-	128.210.271,40	(685.566.984,00)
5.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(6.127.020,00)	-	-	(6.127.020,00)
6.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(4.069.000,00)	-	7.500,00	(4.076.500,00)
7.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(21.724.447,00)	-	-	(21.724.447,00)
8.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(202.400,00)	-	-	(202.400,00)
9.	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	(5.405.458.666,30)	248.597.462,00	2.093.028.958,10	(7.249.890.162,40)
	JUMLAH	**(6.234.310.973,30)**	**372.453.888,90**	**2.222.966.472,40**	**(8.084.823.556,80)**

(1) Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar (Rp21.627.043,40) merupakan piutang tahun 2010 s.d. 2023 dengan kualitas piutang lancar sebesar Nihil, kurang lancar sebesar (Rp992.634.201,00), diragukan sebesar Nihil dan macet sebesar (Rp20.634.201,00);

(2) Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar (Rp86.778.500,00) merupakan piutang tahun 2010 s.d. 2022 dengan kualitas piutang lancar dan kurang lancar sebesar Nihil, diragukan sebesar (Rp373.500,00) dan macet sebesar (Rp86.405.000,00);

(3) Penyisihan Piutang Pajak Hiburan sebesar (Rp8.830.500,00) merupakan piutang tahun 2010 s.d. 2016 dengan kualitas seluruhnya macet sebesar (Rp8.830.500,00);

(4) Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar (Rp685.566.984,00) merupakan piutang tahun 2012 s.d. 2022 dengan kualitas piutang lancar dan kurang lancar Nihil, diragukan sebesar (Rp4.142.657,00) dan macet sebesar (Rp681.424.327,00);

(5) Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar (Rp6.127.020,00) merupakan piutang tahun 2010 s.d. 2015 dengan kualitas piutang seluruhnya macet;

(6) Penyisihan Piutang Pajak Parkir sebesar (Rp4.076.500,00) merupakan piutang tahun 2015 s.d. 2023 dengan kualitas piutang lancar Nihil, kurang lancar sebesar (Rp7.500,00), diragukan Nihil dan macet sebesar (Rp4.069.000,00);

(7) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah sebesar (Rp21.627.043,40) merupakan piutang tahun 2011 s.d. 2017 dengan kualitas piutang selurunya macet;

(8) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar (Rp202.400,00) merupakan piutang tahun 2015 dengan kualias piutang seluruhnya macet; dan

(9) Penyisihan Piutang PBB-P2 sebesar (Rp7.249.890.162,40) merupakan piutang tahun 2013 s.d. 2023 dengan kualitas piutang lancar dan kurang lancar sebesar

Nihil, diragukan sebesar (Rp1.496.734.468,40), dan macet sebesar (Rp5.630.427.399,00). Jatuh Tempo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bulan September, sehingga untuk menghitung umur piutang adalah per 30 September tahun berkenaan.

Rincian penyisihan piutang per jenis pajak daerah pada Lampiran V.20.

(b) Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp5.710.554.563,30). Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.328.501.009,00) mengalami kenaikan sebesar Rp2.382.053.554,30 atau 71,57%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.112 berikut.

Tabel V.112 Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/204 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Retribusi	(388.411.626,00)	384.211.626,00	30.388.000,00	(34.588.000,00)
2.	Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	963.229.203,80	(963.229.203,00)
3.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	(317.919.000,00)	-	-	(317.919.000,00)
4.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Los	(921.761.908,00)	-	218.358.039,50	(1.140.119.947,50)
5.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Kios	(1.022.669.255,00)	-	192.317.140,00	(1.214.986.395,00)
6.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	34.194.550,00	396.523.551,00	(362.329.001,00)
7.	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	-	-	20.850.000,00	(20.850.000,00)
8.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	(424.322.250,00)	-	9.637.000,00	(433.959.250,00)
9.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	-	-	8.172.000,00	(8.172.000,00)
10.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	(600.000,00)	-	-	(600.000,00)
11.	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(203.018.220,00)	-	-	(203.018.220,00)
12.	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	(49.798.750,00)	-	-	(49.798.750,00)
13.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	-	-	960.984.796,00	(960.984.796,00)
	JUMLAH	**(3.328.501.009,00)**	**418.406.176,00**	**2.800.459.730,30**	**(5.710.554.563,30)**

(1) Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kelurahan Kepil dan Kelurahan Wadaslintang sebesar (Rp34.588.000,00) merupakan piutang tahun 2013 s.d. 2024 dengan kualitas macet sebesar (Rp34.588.000,00) ;

(2) Penyisihan Piutang Retribusi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD Setjonegoro sebesar (Rp963.229.203,00) merupakan piutang tahun 2011 s.d. 2024 dengan kualitas kurang lancar sebesar (Rp1.744.055,00), diragukan sebesar (Rp55.419.091,00), dan macet sebesar (Rp963.229.204,00);

(3) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar (Rp317.919.000,00) merupakan piutang tahun 2016 s.d. 2022 dengan kualitas piutang Macet sebesar (Rp317.919.000);

(4) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Los pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar (Rp1.140.119.947,50) merupakan piutang tahun 2010 s.d. 2024 dengan kualitas piutang diragukan sebesar (Rp51.514.505,50), dan macet sebesar (Rp1.088.605.442,00) ;

(5) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Kios pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar (Rp1.214.986.395,00) merupakan piutang tahun 2010 s.d. 2023 dengan kualitas diragukan sebesar (Rp111.642.195,00), dan macet sebesar (Rp1.103.344.200,00);

(6) Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp362,329.001,00) merupakan piutang tahun 2020 s.d. 2023 dengan kualitas macet sebesar (Rp362.329.001,00) ;

(7) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah pada Kelurahan Kalibeber sebesar (Rp20.850.000,00) merupakan piutang tahun 2017 s.d. 2024 dengan kualitas diragukan sebesar (Rp2.250.000,00), dan macet sebesar (Rp18.600.000,00) ;

(8) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar (Rp433.959.250,00) merupakan piutang tahun 2018 s.d. 2024 dengan macet sebesar (Rp433.959.250,00) ;

(9) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar (Rp8.172.000,00) merupakan piutang tahun 2020 dengan kualitas piutang macet sebesar (Rp8.172.000,00) ;

(10) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar (Rp600.000,00) merupakan piutang tahun 2020 dengan kualitas macet sebesar (Rp600.000,00);

(11) Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp203.018.220,00) merupakan piutang tahun 2013 s.d. 2024 dengan kualitas macet sebesar (Rp203.018.220,00);

(12) Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukimandan Perhubungan sebesar (Rp49.798.750,00) merupakan piutang tahun 2015 s.d. 2020 dengan kualitas piutang macet sebesar (Rp49.798.750,00); dan

(13) Penyisihan Piutang Retribusi penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kelurahan Jlamprang diragukan, Kelurahan Kejiwan, Kelurahan Pagerkukuh, Kelurahan Rojoimo, Kelurahan Kramatan, Kelurahan Jaraksari, Kelurahan Kalianget, Kelurahan Selomerto, Kelurahan Wonoroto, kelurahan Kalikajar, dan Kelurahan Sapuran merupakan piutang tahun 2013 s.d. 2024

dengan kualitas piutang macet sebesar (Rp804.874.546,00) dan diragukan sebesar (Rp156.110.250,00).

Rincian penyisihan piutang per jenis retribusi daerah pada Lampiran V.21.

(c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp360.651.901,84). Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp810.458.292,54) mengalami penurunan sebesar Rp449.806.390,70 atau 55,5%. Penurunan yang cukup besar dikarenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa PAD yang sebelumnya pada TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada Lain-lain PAD yang Sah - Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, pada TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan pada Pendapatan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut mengakibatkan pencatatan piutang dan penyisihan direklasifikasi dari piutang dan penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah ke piutang dan penyisihan piutang retribusi dan untuk beban penyisihan piutangnya menyesuaikan.

Berikut rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel V.113 berikut.

Tabel V.113 Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	(79.314.900,00)	79.314.900,00		-
2.	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD	(619.880.061,84)	275.752.000,00	16.523.840,00	(360.651.901,84)
3.	Penyisihan Piutang BLUD	(111.263.330,70)	111.263.330,70		-
	JUMLAH	**(810.458.292,54)**	**466.330.230,70**	**16.523.840,00**	**(360.651.901,84)**

Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD per 31 Desember 2024 sebesar (Rp360.651.901,84) berada pada 2 OPD, antara lain Kelurahan Leksono dan BPPKAD. Penyisihan piutang retribusi tersebut merupakan piutang retribusi tahun 2012 s.d. 2023 dengan kualitas piutang kurang lancar sebesar (Rp773.601,84), diragukan sebesar (Rp1.998.300,00), dan macet sebesar (Rp357.880.000,00).

Rincian penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah per OPD pada Lampiran V.22.

(d) Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp6.077.750.594,00). Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp6.081.900.594,00) mengalami penurunan sebesar Rp4.150.000,00 atau 0,07% dikarenakan adanya pembayaran angsuran dana bergulir atas nama USP PM sebesar Rp750.000,00 tanggal 23 Agustus 2024, KUD HRP sebesar Rp3.150.000,00 tanggal 30 September 2024, IK Batako FKP Kejajar sebesar Rp250.000,00 tanggal 3 Januari 2024

Saldo Piutang Lainnya berasal dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir, yang penyisihannya diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam perhitungan

penyisihan, nilai piutang terlebih dahulu dikurangi dengan jaminan atau sita jaminan yang valid. Namun, terdapat jaminan senilai Rp58.124.000,00 yang belum dapat dijadikan pengurang karena dokumen agunan hanya berupa bukti kepemilikan tanpa verifikasi kondisi fisik barang serta belum ada kuasa penjualan agunan. Oleh karena itu, seluruh piutang dana bergulir tahun 2024 dikategorikan sebagai "Macet" dan disisihkan 100%.

C.1.a.10) Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp97.453.886,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.353.469,67 mengalami penurunan sebesar Rp68.899.583,67 atau 41,42%. Rincian beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 Tabel V.114 di bawah ini.

Tabel V.114 Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	SKPD	Nilai Polis/Kontrak (Rp)	Periode Pertanggungan Mulai	Akhir	Beban TA 2024 (Rp)	Beban Dibayar Dimuka Premi/Bulan	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	RSUD Setjonegoro	73.736.658,00	04/05/2024	04/05/2025	73.736.658,00	6.144.721,50	4	24.578.886,00
2.	Sekretariat DPRD	79.500.000,00	11/12/2024	11/12/2025	79.500.000,00	6.625.000,00	11	72.875.000,00
	JUMLAH	**153.236.658,00**			**153.236.658,00**	**12.769.721,50**		**97.453.886,00**

(a) Beban Dibayar Dimuka pada Sekretariat DPRD merupakan pengakuan asuransi kendaraan dengan nilai polis atau kontrak sebesar Rp79.500.000,00 mulai dari tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025. Nilai Beban Dibayar Dimuka pada Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.875.000,00; dan

(b) Beban Dibayar Dimuka pada RSUD KRT Setjonegoro merupakan premi asuransi kesehatan dokter dengan nilai polis atau kontrak sebesar Rp73.736.658,00,00 mulai dari tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025. Nilai Beban Dibayar Dimuka pada RSUD KRT Setjonegoro 31 Desember 2024 sebesar Rp24.578.886,00.

C.1.a.11) Persediaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.232.045.572,10. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp617.345.559,13 atau 1,84% dibandingkan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.614.700.012,97. Penjelasan terkait mutasi saldo Persediaan sebagai berikut:

	Uraian	*(Dalam Rupiah)*
(1)	**Saldo Awal per 31 Desember 2023**	**33.614.700.012,97**
(2)	**Mutasi Tambah**	**199.978.674.455,14**
	Perolehan Persediaan dari Belanja Barang	161.787.625.511,00
	Perolehan Persediaan dari Belanja Pemeliharaan	395.723.000,00
	Perolehan Persediaan dari Belanja Hibah	1.774.555.248,00
	Perolehan Persediaan dari Belanja Modal	460.509.421,00
	Perolehan Persediaan dari Hibah Pemerintah Daerah	19.181.055.889,48
	Perolehan Persediaan dari Hibah Kementerian	4.803.932.492,27
	Perolehan Persediaan dari Hibah Pihak Ketiga	811.382.060,68
	Perolehan Persediaan dari Utang Belanja Tahun 2024	9.187.490.115,00
	Koreksi atas Kurang Catat Persediaan Tahun 2024	1.576.400.717,71
(3)	**Mutasi Kurang**	**199.361.328.896,01**
	Beban Persediaan Tahun 2024	186.535.779.306,80
	Penghapusan Persediaan Tahun 2024	1.472.635.777,77
	Pemberian Hibah Barang Persediaan	7.543.249.476,92
	Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap	1.388.149.750,00
	Reklasifikasi Persediaan ke Beban Jasa	75.408.560,00
	Pembayaran Utang Persediaan Tahun 2023	2.322.987.247,00

	Koreksi atas Lebih Catat Persediaan Tahun 2023	23.118.777,52
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir per 31 Desember 2024**	**34.232.045.572,10**

Uraian saldo dan mutasi Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal Persediaan sebesar Rp33.614.700.012,99 merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Perolehan Persediaan dari Belanja Barang sebesar Rp161.787.625.511,00 terdiri dari Belanja Barang APBD tahun 2024 sebesar Rp92.933.368.057,00, Belanja Barang BOS tahun 2024 sebesar Rp28.755.302.286,00, dan Belanja Barang BLUD tahun 2024 sebesar Rp40.098.955.168,00;
3. Perolehan Persediaan dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp395.723.000,00 merupakan Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi DPUPR tahun 2024;
4. Perolehan Persediaan dari Belanja Hibah sebesar Rp1.774.555.248,00 merupakan Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada pihak lain pada DPUPR;
5. Perolehan Persediaan dari Belanja Modal sebesar Rp460.509.421,00 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp457.196.521,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.112.900,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.200.000,00;

(1) Perolehan Persediaan dari Hibah Pemerintah Daerah sebesar Rp19.181.055.889,48 dengan rincian:

No.	Instansi Pemberi Hibah	Nama Barang	Nilai
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Obat	8.238.734.699,74
2	Kementerian Kesehatan	Obat	7.420.137.164,74
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara	Obat	149.155.200,00
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Obat	20.340.000,00
5	Dinas Permades dan PPKB Kabupaten Banjarnegara	Obat-obatan Lainnya	1.371.700,00
6	BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Obat-obatan Lainnya	3.218.951.125,00
7	Dispermades dan Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	Bahan Cetak	132.366.000,00
	TOTAL		**19.181.055.889,48**

(2) Perolehan Persediaan dari Hibah Kementerian sebesar Rp4.803.932.492,25 dengan rincian:

No.	Instansi Pemberi Hibah	Nama Barang	Nilai
1	Kementerian Perhubungan	Komponen Rambu Lalu Lintas	73,750,000.00
2	Kementerian Kesehatan	Suku Cadang Alat Laboratorium	63,865,600.00
3	Kementerian Dalam Negeri	Bahan Cetak	448,430,840.00
4	Kementerian PUPR	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masy.	4,112,872,000.00
5	Kemendikbudristek	Bahan Cetak	105,014,052.27
	TOTAL		**4,803,932,492.27**

(3) Perolehan Persediaan dari Hibah Pihak Ketiga sebesar Rp811.382.060,68 dengan rincian:

No.	Instansi Pemberi Hibah	Nama Barang	Nilai
1	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masy.	13,158,000.00
2	Bank Jateng	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masy.	507,155,000.00
3	Bank Wonosobo	Natura	65,870,000.00
4	Rumah Sakit dan Apotek Swasta	Obat	225,199,060.68
	TOTAL		**811,382,060.68**

(4) Perolehan Persediaan dari Utang Belanja tahun 2024 sebesar Rp9.187.490.115,00 yang merupakan utang belanja barang tahun 2024 pada RSUD KRT Setjonegoro;

(5) Koreksi atas kurang catat Persediaan tahun 2024 sebesar Rp1.576.400.715,64 terdiri dari kurang catat Persediaan Obat sebesar Rp1.437.392.310,89, Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp75.087.736,00, Bahan Cetak sebesar Rp55.068,75, dan Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp63.865.600,00;

(6) Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp186.535.779.306,80 merupakan penggunaan Persediaan selama tahun 2024 untuk kegiatan operasional pemda;

(7) Penghapusan Persediaan tahun 2024 sebesar Rp1.472.635.777,77 merupakan penghapusan Obat sebesar Rp1.284.875.765,71 dan penghapusan Bahan Cetak sebesar Rp187.760.012,06 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 400.7.18/2050/2024 tanggal 31 Desember 2024;

(8) Pemberian Hibah Barang Persediaan sebesar Rp7.543.249.476,92 merupakan hibah Obat ke klinik swasta sebesar Rp679.116.545,92, hibah Obat Lainnya ke klinik dan rumah sakit swasta sebesar Rp998.717.871,00, hibah Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp4.115.365.060,00, dan hibah Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Lainnya sebesar Rp1.750.050.000,00;

(9) Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap sebesar Rp1.388.149.750,00 merupakan Persediaan yang memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp614.983.750,00 dan Persediaan yang memenuhi kriteria Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp773.166.000,00;

(10) Reklasifikasi Persediaan ke Beban Jasa sebesar Rp75.408.560,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa namun direalisasikan untuk jasa ongkos kirim sehingga tidak memenuhi kriteria Persediaan;

(11) Pembayaran Utang Persediaan tahun 2023 sebesar Rp2.322.987.247,00 merupakan realisasi Belanja Barang tahun 2024 untuk membayar utang atas perolehan Persediaan tahun 2023 pada RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp2.244.879.794,00, Puskesmas Selomerto 1 sebesar Rp43.761.500,00, Puskesmas Kalikajar 2 sebesar Rp2.063.953,00, dan Disnakerintrans sebesar Rp32.282.000,00;

(12) Koreksi atas lebih catat Persediaan tahun 2023 sebesar Rp23.118.777,52 merupakan koreksi atas kelebihan pencatatan saldo Persediaan Obat tahun 2023; dan

(13) Saldo akhir Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.232.045.572,10 dengan rincian sebagai berikut.

(a) Barang Pakai Habis

Barang Pakai Habis merupakan jenis barang persediaan yang digunakan dalam operasional yang memiliki sifat habis pakai atau dikonsumsi dalam waktu yang relatif singkat dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.115 Saldo Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Bahan	1.715.046.225,60	16.868.231.107,00	18.175.859.161,22	407.418.171,38
2	Suku Cadang	161.442.712,05	381.552.343,00	542.835.054,85	160.000,20
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.972.278.832,80	47.900.076.738,00	48.371.973.224,96	2.500.382.345,84
4	Obat-obatan	27.204.661.439,71	61.915.426.884,05	60.384.038.812,59	28.736.049.511,17
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	368.794.378,00	11.720.827.564,00	9.737.922.089,00	2.351.699.853,00
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	199.700.500,00	199.700.500,00	-
7	Natura dan Pakan	1.192.476.424,83	59.697.439.617,00	60.726.740.353,06	163.175.688,77
	Jumlah	**33.614.700.012,99**	**198.683.254.753,05**	**198.139.069.195,67**	**34.158.885.570,37**

Saldo Barang Pakai Habis per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.158.885.572,10 diantaranya Barang yang Digunakan untuk Pelayanan Masyarakat berupa Obat-Obatan sebesar Rp27.827.638.212,17 dan Barang yang Disimpan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp2.351.699.853,00 dengan sumber dana APBD pada DPUPR Sebesar Rp1.894.608.248,00 dan BPBD sebesar Rp457.091.605,00.

(b) Barang Tak Pakai Habis

Barang Tak Pakai Habis merupakan jenis barang persediaan yang digunakan dalam operasional yang memiliki sifat tak habis pakai atau dikonsumsi dalam waktu yang relatif lama berupa Komponen Rambu-Rambu dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp73.160.000,00 sedangkan per 31 Desember 2023 nihil.

Penyajian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.232.045.572,10 telah didukung rincian pada Lampiran V.23. Penyajian saldo Persediaan sebesar Rp34.232.045.572,10 tidak termasuk Persediaan Barang Konsinyasi/Titipan sebesar Rp141.338.008,00 dan Persediaan Kedaluwarsa sebesar Rp187.760.012,06 dengan penjelasan sebagai berikut.

- Persediaan Barang Konsinyasi/Titipan

  Saldo Persediaan Barang Konsinyasi/Titipan pada RSUD KRT Setjonegoro per 31 Desember 2024 sebesar Rp141.338.008,00 merupakan sisa barang konsinyasi yang dititipkan oleh penyedia/rekanan di Gudang Farmasi RSUD KRT Setjonegoro, dengan rincian barang konsinyasi dari Afina Sinar Cemerlang sebesar Rp78.872.664,00 dan barang konsinyasi dari Daun Pandan Medika sebesar Rp62.465.344,00. Atas hal tersebut RSUD KRT Setjonegoro tidak memiliki hak penuh dalam pengelolaan dan kepemilikan barang titipan tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai Persediaan.

- Persediaan Kedaluwarsa

  Saldo Persediaan Kedaluwarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp187.760.012,06 merupakan Bahan Cetak berupa karcis yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama OPD	Jumlah	Nilai Total
1	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	39,651	1,589,181.05
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	44,418	1,886,026.75
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	250,996	10,288,487.58
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	110,572	7,956,722.48
5	Dinas Lingkungan Hidup (Karcis Tarif Lama)	9,598	297,353.20
6	Dinas Lingkungan Hidup (Karcis Tarif Baru)	400	20,000.00
7	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	3,663,900	165,722,241.00
	Total	**4,119,535**	**187,760,012.06**

C.1.b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp330.422.502.527,82, dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.533.317.974,08, mengalami kenaikan sebesar Rp29.889.184.553,74 atau 9,95%. dengan rincian berikut.

Tabel V.116 Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Investasi Jangka Panjang Permanen	330.422.502.527,82	300.533.317.974,08	29.889.184.553,74	9,95
	JUMLAH	**330.422.502.527,82**	**300.533.317.974,08**	**29.889.184.553,74**	**9,95**

C.1.b.1) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar 330.422.502.527,82, dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.533.317.974,08, mengalami kenaikan sebesar Rp29.889.184.553,74 atau 9,95%. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). dengan rincian pada Tabel V.117 berikut.

Tabel V.117 Saldo Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Pe nurunan) Saldo	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	51.501.000.000,00	51.501.000.000,00	-	-
2.	PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	17.376.074.799,16	16.702.411.809,03	673.662.990,13	4,03
3.	PT BKK Jateng (Perseroda)	6.350.000.000,00	6.350.000.000,00	-	-
4.	Perumda Air Minum Tirta Aji	159.109.207.681,29	141.721.176.102,26	17.388.031.579,03	12,27
5.	PD. BPR Bank Wonosobo	56.903.460.201,00	46.642.923.131,99	10.260.537.069,01	22,00
6.	PT. Bima Lukar	565.879.624,20	579.794.795,25	(13.915.171,05)	(2,40)
7.	PT. PRPP Jawa Tengah	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-
8.	PD. Bhakti Husada	671.183.005,00	487.102.695,00	184.080.310,00	37,79
9.	PT Global Dharma Asri	15.468.413.991,17	15.731.487.244,55	(263.073.253,38)	(1,67)
10.	PT. Tambi	22.337.283.226,00	20.677.422.196,00	1.659.861.030,00	8,03
	JUMLAH	**330.422.502.527,82**	**300.533.317.974,08**	**29.889.184.553,74**	**9,95**

Penilaian Investasi pada Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut.

a) Metode Biaya

Metode Biaya digunakan untuk menghitung Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Tabel V.118 di bawah ini.

Tabel V.118 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) – Metode Biaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian		Saldo Per 31/12/2024	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023
		Kepemilikan	(Rp)	Debit	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(%)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1,17	51.501.000.000,00	-	-	51.501.000.000,00
2.	PT BKK JATENG (Perseroda)	1,73	6.350.000.000,00	-		6.350.000.000,00
3.	PT. PRPP Jawa Tengah	0,18	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00
	JUMLAH	**3,47**	**57.991.000.000,00**	**-**	**-**	**57.991.000.000,00**

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Metode Biaya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp57.991.000.000,00 dan 2023 sebesar Rp57.991.000.000,00 atau tidak terdapat Mutasi selama TA 2024.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas digunakan untuk menghitung Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagaimana Tabel V.119 di bawah ini:

Tabel V.119 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD – Metode Ekuitas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	Kepemilikan (%)	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	56,06	16.702.411.809,03	673.662.990,13	-	17.376.074.799,16
2.	PD. BPR Bank Wonosobo (Perseroda)	100,00	46.642.923.131,99	10.260.537.069,01	-	56.903.460.201,00
3.	Perumda Air Minum Tirta Aji	84,82	141.721.176.102,26	17.388.031.579,03	-	159.109.207.681,29
4.	PT. Bima Lukar	55,00	579.794.795,25	-	13.915.171,05	565.879.624,20
5.	PD. Bhakti Husada	100,00	487.102.695,00	184.080.310,00	-	671.183.005,00
6.	PT Global Dharma Asri (Perseroda)	99,01	15.731.487.244,55	-	263.073.253,38	15.468.413.991,17
7.	PT. Perkebunan Tambi	50,00	20.677.422.196,00	1.659.861.030,00	-	22.337.283.226,00
	JUMLAH		**242.542.317.974,08**	**30.166.172.978,17**	**276.988.424,43**	**272.431.502.527,82**

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Metode Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp272.431.502.527,82 dan 2023 sebesar Rp242.542.317.974,08 Mutasi Debet selama TA 2024 sebesar Rp30.166.172.978,17 dengan Mutasi Kredit sebesar Rp276.988.424,43 dengan perhitungan sebagai berikut.

(1) PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)

Kepemilikan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo PT.BPR BKK Wonosobo (Perseroda) berdasarkan surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-489/KR.0313/2022 tertanggal 25 Nopember 2022 sebesar Rp12.250.000.000,00 atau 56,06% dan Kepemilikan Modal Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp9.600.000.000,00 atau 43,94%, adapun nilai investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.376.074.799,16 dengan perhitungan sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Investasi Permanen	:	**16.702.411.809,03**
Perhitungan dengan Metode Ekuitas	:	
Modal Disetor	:	21.850.000.000,00
Penambahan Tahun 2024	:	4.077.726.295,00
Cadangan Umum 2023	:	2.653.627.052,00
Cadangan Tujuan 2023	:	2.414.142.192,00
Laba (rugi) tahun berjalan 2023	:	2.575.840.580,00
Deviden	:	(1.416.712.319,00)
CSR	:	(77.275.218,00)
Cadangan Umum	:	(257.584.058,00)
Cadangan Tujuan	:	(257.584.058,00)
Tantiem	:	(103.033.623,00)
Jasa Produksi	:	(206.067.246,00)
Dana Kesejahteraan	:	(257.584.058,00)
Jumlah Ekuitas	:	**30.995.495.539,00**
prosentase kepemilikan Pemda 56,06%	:	17.376.074.799,16
Saldo akhir Investasi Permanen	:	**17.376.074.799,16**
Bertambah / (berkurang)	:	**673.662.990,13**

(2) PD. BPR Bank Wonosobo (Perseroda)

Kepemilikan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada PT.BPR Bank Wonosobo (Perseroda) adalah 100%, dan Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.000.000.000,00, namun sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 6 September 2024 Nomor 900.1.13.2/611.1/EK menyetujui penambahan modal disetor berupa aset tetap (Inbreng) pada PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) senilai Rp8.979.888.000,00 berupa :

(a) Tanah seluas 330m^2 dan 1 unit bagunan Gedung kantor permanen seluas 125m^2 yang terletak di Jalan Sarwo Edi Sapuran senilai Rp1.554.842.000,00, dan
(b) Tanah seluas 382m^2, 1 unit bangunan gedung kantor permanen seluas 256m^2, dan 1 unit bangunan gedung kantor permanen seluas 87m^2 yang terletak di Jalan Parakan Nomor 126 Kertek senilai Rp7.425.046.000,00.

Penambahan modal disetor berupa aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum ada persetujuan dari OJK, sehingga masih dicatat pada akun Dana Setoran Modal – Kewajiban. Adapun nilai investasi pada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda) per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.903.460.201,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Investasi Permanen	**:**	**46.642.923.131,99**
Perhitungan dengan Metode Ekuitas	**:**	
Modal yang disetor	:	25.000.000.000,00
Cadangan Umum 2023	:	7.996.595.348,00
Cadangan Tujuan 2023	:	6.870.582.452,00
Belum ditentukan penggunaannya	:	6.775.745.331,99
Deviden setor Pemda	:	(3.725.871.354,74)
Cadangan tanggung jawab sosial dan lingkungan	:	(203.229.346,59)
Cadangan tantiem	:	(270.972.462,12)
Cadangan jasa produksi	:	(541.944.924,24)
Cadangan dana kesejahteraan karyawan	:	(677.431.155,30)
Laba (rugi) periode berjalan	:	6.700.098.312,00
Jumlah Ekuitas	**:**	**47.923.572.201,00**
Tambahan Penyertaan Modal - *Inbreng*	:	8.979.888.000,00
Prosentase kepemilikan Pemda 100%	:	56.903.460.201,00
Saldo akhir Investasi Permanen	**:**	**56.903.460.201,00**
Bertambah / (berkurang)	**:**	**10.260.537.069,01**

(3) Perumda Air Minum Tirta Aji

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Perumda Air Minum Tirta Aji Tahun per 31 Desember 2024 adalah 84,82% atau sebesar Rp132.560.875.091,00 dengan rincian sebagai berikut.

			(Dalam Rupiah)
1.	Sarana air bersih, inventaris dan sarana lainnya	:	641.302.995,00
2.	Tambahan Modal Tahun 2008 s/d 2023	:	120.419.317.261,00
3.	Tambahan Modal Tahun 2024	:	7.377.382.835,00
4.	Hibah Jaringan Pipa SPAM dari kementerian PUPR(BAST 639/BA/DC/2024)	:	4.112.872.000,00
	Jumlah	**:**	**132.550.875.091,00**

Adapun Kepemilikan Pemerintah Pusat adalah 15,18% atau sebesar Rp23.722.601.066,00 yang merupakan bangunan reservoir dan pengadaan/pemasangan pipa di wilayah kerja PDAM Tirta Aji. Aset tersebut berasal dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Saldo investasi permanen pada PDAM Tirta Aji adalah sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Investasi Permanen	**:**	**141.721.176.102,26**
Perhitungan dengan Metode Ekuitas	**:**	
Penyertaan Pemerintah Daerah	:	121.060.620.256,00
Penyertaan Pemerintah Pusat	:	23.722.601.066,00
Tambahan Penyertaan Modal	:	11.490.254.835,00
Cadangan Umum 2023	:	9.127.428.960,00
Laba ditahan	:	2.064.816.683,00
Laba tahun berjalan 2023	:	13.516.877.963,00
Jasa Produksi	:	(1.351.687.796,00)
Laba Pemerintah Daerah	:	(7.434.282.880,00)

Penyisihan cadangan umum	:	3.000.000.000,00
Dana Sosial dan Pendidikan	:	(1.351.687.796,00)
Sumbangan Dana Pensiun dan sosial	:	(1.351.687.796,00)
Laba (rugi) tahun berjalan	:	15.091.287.511,00
Jumlah ekuitas	:	**187.584.541.006,00**
prosentase kepemilikan Pemda 84,82%	:	159.109.207.681,29
Saldo akhir Investasi Permanen	:	**159.109.207.681,29**
Bertambah / (berkurang)	:	**17.388.031.579,03**

(4) PT. Bima Lukar

Kepemilikan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo PT.Bima Lukar sebesar Rp415.800.000,00 atau 55% dan Kepemilikan Modal Perorangan (terdiri 4 orang dengan modal disetor Rp85.050.000,00 per orang) sebesar Rp340.200.000,00 atau 45%, adapun nilai investasi Pemkab Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp565.879.624,20 dengan perhitungan sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Investasi Permanen	:	**579.794.795,25**
Perhitungan dengan Metode Ekuitas	:	
Modal disetor	:	756.000.000,00
saldo laba	:	234.290.022,00
Laba (rugi) tahun berjalan	:	38.582.022,00
Jumlah Ekuitas	:	**1.028.872.044,00**
prosentase kepemilikan Pemda 55%	:	565.879.624,20
Saldo Akhir Investasi Permanen	:	**565.879.624,20**
Bertambah / (berkurang)	:	**(13.915.171,05)**

(5) PD. Bhakti Husada

Kepemilikan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo PD Bhakti Husada adalah 100% atau sebesar Rp2.493.938.000,00, adapun nilai investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp671.183.005,00, kondisi yang menyebabkan penurunan modal disetor oleh Pemda dibandingkan nilai investasi antara lain disebabkan PD. Bhakti Husada sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami kerugian. Adapun perhitungan perhitungan investasi sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Investasi Permanen		**487.102.695,00**
Perhitungan dengan Metode Ekuitas		
Modal	:	2.493.938.000,00
Donasi	:	13.950.000,00
Cadangan Umum	:	84.336.202,00
Laba(Rugi) Tahun 2020	:	(133.331.345,00)
Laba(Rugi) Tahun 2021	:	(1.786.605.677,00)
Laba(Rugi) Tahun 2022	:	(255.508.522,00)
Laba(Rugi) Tahun 2023	:	(94.576.818,00)
Aset Bhakti Mart	:	92.573.715,00
Dana sumbangan	:	72.327.140,00
Pengurangan kerugian tahun 2021	:	225.212.485,00
Laba (rugi) tahun berjalan	:	(41.132.175,00)
prosentase kepemilikan Pemda 100%	:	**671.183.005,00**
Saldo akhir Investasi Permanen	:	**671.183.005,00**
Bertambah / (berkurang)	:	**184.080.310,00**

(6) PT Global Dharma Asri (Perseroda)

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT.Global Dharma Asri (Perseroda) adalah 99,01%, atau sebesar Rp15.000.000.000,00, sedangkan 0,99% atau sebesar Rp150.000.000,00 merupakan Modal disetor dari Kopkar Mitra Setia Anda. Nilai Investasi PT.Global Dharma Asri (Perseroda) per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.468.413.991,17 dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	(*Dalam Rupiah*)
Saldo Awal Investasi Permanen	**15.731.487.244,55**

Perhitungan dengan Metode Ekuitas		
Modal Disetor	:	15.150.000.000,00
Cadangan Umum 2023	:	631.586.235,00
Saldo Laba	:	38.780.598,00
Laba tahun 2023	:	86.199.294,00
Pembagian deviden	:	(51.210.176,00)
Jasa Produksi	:	(5.442.751,00)
dana Kesejateraan	:	(7.775.360,00)
Tantiem	:	(3.887.680,00)
Dana CSR	:	(3.887.680,00)
Laba (rugi) tahun berjalan	:	(211.279.972,00)
Jumlah Ekuitas	:	**15.623.082.508,00**
prosentase kepemilikan Pemda 99,01%	:	15.468.413.991,17
Saldo akhir Investasi Permanen	:	**15.468.413.991,17**
Bertambah / (berkurang)	:	**(263.073.253,38)**

(7) PT. Perkebunan Tambi

Wonosobo sebesar Rp7.000.001.000,00 atau 50% dan PT Indoglobal Galang Pamitra sebesar Rp7.000.001.000,00 atau 50%. Nilai investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.337.283.226,00 dengan perhitungan investasi sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Investasi Permanen		**20.677.422.196,00**
Perhitungan dengan Metode Ekuitas		
Modal disetor	:	14.000.002.000,00
Tambahan Modal disetor	:	20.261.568.000,00
Cadangan Umum	:	4.678.997.906,00
Saldo Laba	:	2.414.276.486,00
Laba Tahun berjalan	:	5.469.937.487,00
Deviden tunai	:	(1.924.487.778,00)
Jasa Produksi	:	(223.777.649,00)
Tanggungjawab Sosial	:	(1.950.000,00)
Jumlah Ekuitas	**:**	**44.674.566.452,00**
prosentase kepemilikan Pemda 50%	:	22.337.283.226,00
Saldo Akhir Investasi Permanen	**:**	**22.337.283.226,00**
Bertambah / (berkurang)	**:**	**1.659.861.030,00**

Laporan Keuangan BUMD Tahun 2024 yang sudah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut.

No	Nama BUMD	Kantor Akuntan Publik	Opini/Keterangan
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & rekan	WTP
2.	PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	Tarmizi Achmad	WTP
3.	PT BKK Jateng (Perseroda)	Darsono & Budi Cahyo Santoso	WTP
4.	Perumda Air Minum Tirta Aji	Ida Nurhayati	WTP
5.	PD. BPR Bank Wonosobo	Ida Nurhayati	WTP
6.	PT. Bima Lukar	Siswanto	TMP
7.	PT. PRPP Jawa Tengah	Arnestesa	WTP
8.	PD. Bhakti Husada	Agus Wahjono	WDP
9.	PT Global Dharma Asri	Suratman Freddy Loing	WDP
10.	PT. Tambi	Leonard, Mulia & Richard	WTP

C.1.c. ASET TETAP

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.343.260.293.309,15 mengalami kenaikan sebesar Rp106.642.629.704,78 atau 3,29% dibandingkan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.236.617.663.604,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.120 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Tanah	793.674.993.350,06	777.161.335.964,06	16.513.657.386,00	2,12

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp) 2024	2023	Kenaikan / (Penurunan) Saldo (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
2.	Peralatan dan Mesin	701.518.632.664,51	763.121.291.355,61	(61.602.658.691,10)	(8,07)
3.	Gedung dan Bangunan	1.499.440.860.936,14	1.265.821.194.286,17	233.619.666.649,97	18,46
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.036.884.120.936,27	2.899.895.910.200,59	136.988.210.735,68	4,72
5.	Aset Tetap Lainnya	52.280.397.340,29	126.942.634.058,18	(74.662.236.717,89)	(58,82)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.425.884.949,00	4.728.161.487,00	697.723.462,00	14,76
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.745.964.596.867,13)	(2.601.052.863.747,23)	(144.911.733.119,90)	5,57
	JUMLAH	**3.343.260.293.309,15**	**3.236.617.663.604,37**	**106.642.629.704,78**	**3,29**

Aset Tetap yang disajikan bebas dari sengketa dan permasalahan hukum berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Wonosobo nomor 268/KPN.W12-U28/HK.1.3/V/2025 yang menerangkan bahwa tidak terdapat aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang menjadi objek suatu sengketa perkara baik perdata maupun pidana.

Penyajian saldo Aset Tetap tersebut tidak termasuk Aset Bersejarah berdasarkan Laporan Hasil Sidang Penilaian Kompensasi atas Nilai Signifikansi Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Kecamatan Sapuran, Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 430/1112/DISPARBUD/2020 yang disusun oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo telah ditemukan 24 Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Aset Bersejarah	Bahan
1	Nampan Perunggu motif Padmasankha	Perunggu
2	Nampan Perunggu motif Vas Bunga Sulur	Perunggu
3	Nampan Perunggu Polos	Perunggu
4	Centhong Tembaga motif Padma	Tembaga
5	Mangkuk keramik glasir putih	Keramik
6	Lepek keramik glasir coklat.	Keramik
7	Cawan Perunggu polos.	Perunggu
8	Cawan Tembaga motif suluran daun.	Tembaga
9	Cawan Perunggu motif Hexagonal.	Perunggu
10	Cawan Perunggu berkelopak polos alas Cembung.	Perunggu
11	Cawan Perunggu motif Dekoratif.	Perunggu
12	Cawan Tembaga motif Stiliran.	Tembaga
13	Cawan Perunggu berkelopak bentuk tiga kelopak bunga, motif tiap sisi.	Perunggu
14	Takaran beras (beruk) tembaga motif suluran daun.	Tembaga
15	Fragmen lis nampan perunggu.	Perunggu
16	Fragmen mata rantai perunggu	Perunggu
17	Gelang Perunggu Bergotri.	Perunggu
18	Gelang Perunggu	Perunggu
19	Fragmen Amulet Perak.	Perak
20	Fragmen Arca Kepala Singa (Simha)	Batu Pasir
21	Arca Siwa-Parwati (kalyanasundaramurti)	Batu Breksi
22	Kemuncak Bertakik	Batu Andesit
23	Kemuncak Polos	Batu Andesit
24	Kemuncak Susun	Batu Andesit

Aset Bersejarah tersebut seluruhnya dalam kondisi baik dan saat ini disimpan dan dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah melakukan kegiatan inventarisasi BMD yang meliputi seluruh Barang Milik Daerah (BMD). Pelaksanaan inventarisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi BMD Tahun 2023-2024. Kegiatan inventarisasi tahap pertama, pada tahun 2023, difokuskan untuk BMD berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Sedangkan pada tahun 2024 objek inventarisasi meliputi Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya. Guna melaksanakan kegiatan Inventarisasi tersebut, dibentuklah tim Inventarisasi yang terdiri dari Tim Inventarisasi pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, Tim Verifikasi dan Tim Peneliti.

Tim Inventarisasi pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 502.03/237/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang tahun 2023-2024 dan dengan surat penugasan dari OPD masing-masing. Tim ini bertugas untuk melakukan kegiatan inventarisasi barang pada wilayah kewenangan masing-masing dan melaporkan secara berjenjang terhadap hasil Inventarisasi kepada Bupati Wonosobo, serta melakukan tindak lanjut hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tim Verifikasi merupakan tim yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan penelitian terhadap laporan hasil Inventarisasi yang disajikan oleh tim Inventarisasi. Verifkiasi ini meliputi kebenaran dan kelengkapan berkas hasil Inventarisasi dan data pendukung atau informasi lainnya yang diperlukan. Tim ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 502.03/238/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Inventarisasi BMD Tahun 2023-2024. Tim ini terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, unsur BPPKAD sebagai SKPKD/Pejabat Penatausahaan Pengelola BMD, dan unsur Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasa Internal Pemerintah.

Selanjutnya, Tim Peneliti. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 502.03/239/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hasil Inventarisasi BMD Tahun 2023/2024. Tim Peneliti bertugas untuk meneliti kebenaran hasil Inventarisasi dan menindaklanjuti penyelesaian terhadap permasalahan BMD yang tidak ditemukan/tidak dapat diketahui keberadaannya berdasarkan laporan hasil Inventarisasi. Tim ini juga terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, unsur BPPKAD sebagai SKPKD/Pejabat Penatausahaan Pengelola BMD, dan unsur Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasa Internal Pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut atas rincian Aset Tetap sebagai berikut.

C.1.c.1) TANAH

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp793.674.993.350,06 mengalami kenaikan sebesar Rp16.513.657.386,00 atau 2,12% dibandingkan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp777.161.335.964,06. Penjelasan terkait mutasi saldo Aset Tetap Tanah sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

(1)	Saldo Awal	777.161.335.964,06
(2)	**Mutasi Tambah**	**19.082.989.624,00**
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Modal	1.209.626.140,00
	Perolehan Aset Tetap dari Hibah Masyarakat	14.950.000,00
	Reklasifikasi dari Properti Investasi	3.095.428.510,00
	Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lain-lain	10.864.240.000,00
	Koreksi atas Hasil Inventarisasi	3.898.744.974,00
(3)	**Mutasi Kurang**	**2.569.332.238,00**
	Penghapusan Aset Tetap Yang Akan Ditindaklanjuti Dengan Penyertaan Modal	54.357.363,00
	Reklasifikasi ke Properti Investasi	2.514.974.875,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir**	**793.674.993.350,06**

Uraian saldo dan mutasi Aset Tetap Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar Rp777.161.335.964,06 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);

2. Perolehan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal sebesar Rp1.209.626.140,00 terdiri dari Belanja Modal Tanah Kering pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp132.156.140,00 dan Belanja Modal Tanah Kering pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.077.470.000,00, yang seluruhnya bersumber dari realisasi belanja modal APBD;
3. Perolehan tanah dari hibah sebesar Rp14.950.000,00 merupakan pemberian hibah tanah dari warga kepada Kantor Kelurahan Kejiwan atas sebidang tanah seluas 23m^2 untuk bangunan MCK berdasarkan surat pernyataan hibah No. 590/48/II/2024 tanggal 5 Februari 2024;
4. Reklasifikasi dari Properti Investasi menjadi Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.095.428.510,00 dengan rincian yaitu tujuh bidang tanah pertanian sebesar Rp1.997.694.510,00, empat bidang tanah bangunan sebesar Rp941.060.000,00, dan dua bidang tanah lapangan sebesar Rp156.674.000,00;
5. Reklasifikasi dari Aset Lain Lain sebesar Rp10.864.240.000,00 merupakan reklasifikasi Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan dari Aset Lain - lain (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga/BGS/BSG) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;
6. Perolehan tanah dari kegiatan inventarisasi sebesar Rp3.898.744.974,00 merupakan penambahan tanah pemda atas empat bidang tanah yang baru ditemukan saat kegiatan Inventarisasi yaitu tiga bidang tanah untuk jalan pada DPUPR sebesar Rp3.709.240.974,00 dan satu bidang tanah untuk bangunan pada BPPKAD sebesar Rp189.504.000,00;
7. Penghapusan tahun 2024 sebesar Rp54.357.363,00 merupakan dua bidang tanah bangunan pada Kantor Kecamatan Sapuran sebesar Rp16.157.363,00 dan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp38.200.000,00 yang dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Wonosobo berdasarkan BAST nomor 028/1234/2024 tanggal 6 September 2024, Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo nomor 170/24 tahun 2024 tanggal 8 Juli 2024, dan Keputusan Bupati nomor 028/1930/2024 tanggal 11 September 2024;
8. Reklasifikasi ke properti investasi sebesar Rp2.514.974.875,00 terdiri dari 24 bidang tanah bengkok sebesar Rp1.193.757.467,00, tiga bidang tanah disewakan sebesar Rp91.917.000,00, dan satu bidang tanah area Taman Fatmawati yang disewakan sebesar Rp1.229.300.408,00;
9. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp793.674.993.350,06 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.121 Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1	Tanah Persil	82.085.800.082,15	12.126.960.140,00	2.569.332.238,00	91.643.427.984,15
2	Tanah Non-Persil	7.649.142.082,00	3.269.150.650,00	1.209.626.140,00	9.708.666.592,00
3	Lapangan	687.426.393.799,91	4.958.334.974,00	61.830.000,00	692.322.898.773,91
	JUMLAH	**777.161.335.964,06**	**20.354.445.764,00**	**3.840.788.378,00**	**793.674.993.350,06**

a. Tanah Persil

Tanah Persil merupakan sebidang tanah yang memiliki batas-batas tertentu dan dipertakan dalam rencana kota atau perluasan kota dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.122 Saldo Aset Tetap Tanah Persil Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	7.598.166.716,15	-	-	7.598.166.716,15
2	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	10.678.245.250,00	11.614.240.000,00	-	22.292.485.250,00
3	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	144.750.000,00	-	-	144.750.000,00
4	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	3.824.859.500,00	-	-	3.824.859.500,00
5	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	59.682.297.616,00	512.720.140,00	2.569.332.238,0)	57.625.685.518,00
6	Tanah Persil Lainnya	157.481.000,00	-	-	157.481.000,00
	TOTAL	**82.085.800.082,15**	**12.126.960.140,00**	**2.569.332.238,00**	**91.485.946.984,15**

b. Tanah Non-Persil

Tanah non persil merupakan sebidang tanah yang belum ditetapkan batas-batasnya secara resmi dan legal atau belum memiliki nomor identifikasi persil (NIB) dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.123 Saldo Aset Tetap Tanah Non-Persil Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tanah Basah	764.177.160,00	-	-	764.177.160,00
2	Tanah Hutan	281.567.000,00	-	-	281.567.000,00
3	Tanah Kering	2.808.800.305,00	1.209.626.140,00	1.209.626.140,00	2.808.800.305,00
4	Tanah Pertanian	3.794.597.617,00	2.059.524.510,00	-	5.854.122.127,00
	TOTAL	**7.649.142.082,00**	**3.269.150.650,00**	**1.209.626.140,00**	**9.708.666.592,00**

c. Lapangan

Lapangan merupakan sebidang tanah yang diperuntukkan untuk arena olahraga dan kegiatan lainnya dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.124 Saldo Aset Tetap Tanah Lapangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tanah Lapangan Olah Raga	23.680.040.321,00	156.674.000,00	61.830.000,00	23.774.884.321,00
2	Tanah Lapangan Parkir	4.500.487.048,00	-	-	4.500.487.048,00
3	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	16.000.000,00	1.077.470.000,00	-	1.093.470.000,00
4	Tanah Untuk Bangunan Air	110.472.244.759,00	-	-	110.472.244.759,00
5	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	967.878.970,00	-	-	967.878.970,00
6	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	7.373.644.929,00	14.950.000,00	-	7.388.594.929,00
7	Tanah Untuk Jalan	528.562.245.764,91	3.709.240.974,00	-	532.271.486.738,91
8	Tanah Untuk Makam	6.029.765.255,00	-	-	6.029.765.255,00
9	Tanah Untuk Taman	5.824.086.753,00	-	-	5.824.086.753,00
	TOTAL	**687.426.393.799,91**	**4.958.334.974,00**	**61.830.000,00**	**692.322.898.773,91**

Penyajian saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp793.674.993.350,06 dan Rp777.161.335.964,06 telah didukung rincian pada Lampiran V.24.

C.1.c.2) PERALATAN DAN MESIN

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp701.518.632.664,51 mengalami penurunan sebesar Rp61.602.658.691,10 atau 8,07% dibandingkan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp763.121.291.355,61. Penjelasan terkait mutasi saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Awal**	**763.121.291.355,61**
(2)	**Mutasi Tambah**	**96.464.408.411,73**
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.521.357.115,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Persediaan	614.983.750,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Pemeliharaan	170.967.170,00
	Perolehan Aset Tetap dari Pemberian Hibah	742.707.850,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	6.064.693.530,00

	Reklasifikasi Antar Aset Tetap - Peralatan & Mesin	28.294.944.038,39
	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung & Bangunan	414.639.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Jalan. Irigasi & Jaringan	49.506.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	142.128.500,00
	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	638.493.798,23
	Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	47.300.000,00
	Kurang Catat Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	10.315.156.657,93
	Koreksi kesalahan pencatatan	167.174.336,00
	Koreksi Pencatatan karena Gabung	656.737.872,00
	Koreksi Pencatatan karena Pecah	1.623.618.794,18
(3)	**Mutasi Kurang:**	**158.067.067.100,85**
	Penghapusan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	27.698.977.579,11
	Hibah Keluar Aset Tetap	217.705.000,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	6.064.693.530,00
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	28.294.944.038,39
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung & Bangunan	1.996.500.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Jalan. Irigasi & Jaringan	2.701.780.000,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang menjadi Persediaan	456.696.521,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang menjadi Beban Pemeliharaan	1.932.202.496,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang menjadii Beban Ekstrakomptabel	187.920.500,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	14.840.900,00
	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	85.801.940.655,72
	Koreksi Pencatatan karena Pecah	1.786.302.901,63
	Koreksi Pencatatan karena Gabung	655.237.872,00
	Lebih Catat Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	95.151.411,00
	Koreksi Kesalahan Pencatatan	162.173.696,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir**	**701.518.632.664,51**

Uraian saldo dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar Rp763.121.291.355,61 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan realisasi belanja modal untuk Peralatan dan Mesin tahun 2024 senilai Rp13.546.252.448,00 yang terdiri dari belanja modal bersumber dari BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, senilai Rp9.559.308.225,00, bersumber dari BLUD yang berada pada RSUD. KRT. Setjonegoro dan UPTD. Puskesmas dan senilai Rp23.105.560.673,00 dan senilai Rp23.415.796.442,00 yang bersumber dari APDB;
3. Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Persediaan senilai Rp614.983.750,00 merupakan perolehan atau reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari realisasi belanja Persediaaan/barang tahun 2024, senilai Rp3.996.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, senilai Rp1.670.000,00 pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, senilai Rp493.692.750,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, senilai Rp17.900.000,00 pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan senilai Rp97.725.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari belanja Pemeliharaan senilai Rp170.967.170,00 merupakan perolehan atau reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari realisasi belanja Pemeliharaan/jasa tahun 2024 yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Perolehan peralatan dan mesin dari pemberian hibah sebesar Rp742.707.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

	OPD Penerima Hibah	Nilai	Pemberi Hibah
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	193,800,000.00	Kementrian Perhubungan
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	317,252,850.00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
3.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	150,000,000.00	Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19,835,000.00	BPBD Prov Jateng
5.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	4,350,000.00	BPD. Bank Jateng
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	46,970,000.00	BPD. Bank Jateng
7.	Inspektorat	8,150,000.00	BPR. Bank Wonosobo
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	2,350,000.00	BPD. Bank Jateng
	TOTAL	**742,707,850.00**	

6. Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Serah Terima Antar OPD sebesar Rp6.064.693.530,00 merupakan transaksi internal antar satuan dan/atau unit kerja pada pemerintah daerah;

7. Reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.294.944.038,39 merupakan transaksi reklasifikasi internal antar sub akun dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

8. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan senilai Rp414.639.000,00 merupakan perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan. Senilai Rp13.200.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, senilai Rp399.339.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan senilai Rp2.100.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

9. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp49.506.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

10. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp142.128.500,00 merupakan perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari realisasi belanja Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;

11. Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain yang memenuhi kriteria menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp638.493.798,23 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.166.667,00, DPUPR sebesar Rp80.000.000,00, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp419.374.065,23, BPBD sebesar Rp41.646.000,00, DLH sebesar Rp7.107.463,00, Diskominfo sebesar Rp54.741.884,00, Puskesmas Wadaslintang 1 sebesar Rp19.753.659,00, Puskesmas Wonosobo 2 sebesar Rp3.000.000,00, Kantor Kecamatan Kaliwiro sebesar Rp2.206.560,00, dan Kantor Kelurahan Wonorejo sebesar Rp8.497.500,00;

12. Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud yang memenuhi kriteria menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp47.300.000,00 pada Puskesmas Mojotengah berupa pembelian personal komputer;

13. Kurang catat saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp10.315.156.657,93 yang merupakan hasil kegiatan inventarisasi aset yang dilaksanakan selama tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama OPD/Unit Kerja	Jumlah Unit	Nilai (dalam Rupiah)
1.	Sekretariat Daerah – Bagian Organisasi	7	10.100.000,00
2.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.158	9.505.408.109,93
3.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1.021.200,00
4.	Dinas PMPTSP	6	26.253.000,00
5.	Dinas Kesehatan	1	32.942.350,00
6.	BPPKAD	2	17.090.000,00
7.	Inspektorat	6	33.882.324,00
8.	Badan Kesbangpol	1	800.000,00
9.	Badan Kepegawaian Daerah	1	1.700.000,00
10.	Kantor Kecamatan (7 Kecamatan)	15	38.200.000,00
11.	Puskesmas (15 Puskesmas)	85	568.664.674,00
12.	Kantor Kelurahan (16 Kelurahan)	30	79.095.000,00
	TOTAL	**1.313,00**	**10.315.156.657,93**

14. Koreksi Kesalahan Pencatatan sebesar Rp167.174.336,00 merupakan koreksi kesalahan pencatatan (kuantitas, harga dan/atau kode barang), yang ditemukan pada kegiatan Inventarisasi, terdiri dari koreksi kesalahan pencatatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar Rp72.020.350,00 dan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM sebesar Rp95.153.986,00;

15. Koreksi kesalahan pencatatan karena gabung sebesar Rp656.737.872,00 merupakan koreksi pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan karena penggabungan pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan temuan Hasil Inventarisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp71.782.397,00, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.985.000,00, Puskesmas Wadaslintang 2 sebesar 170.194.273,00, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Rp402.631.322,00, dan Kelurahan Jaraksari sebesar Rp5.144.800,00;

16. Koreksi kesalahan pencatatan karena pecah sebesar Rp1.623.618.794,18 merupakan koreksi pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan karena pemecahan pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan temuan hasil Inventarisasi;

17. Penghapusan aset selama tahun 2024 sebesar Rp27.698.977.579,11 berdasarkan SK Bupati nomor 000.2.4/2053/2024 tanggal 31 Desember 2024 pada Lampiran I sebesar Rp9.192.601.614,59, SK Bupati nomor 028/2008/2024 tanggal 29 November 2024 pada Lampiran I sebesar Rp17.494.981.055,41, dan SK Bupati nomor 028/2009/2024 tanggal 29 November 2024 pada Lampiran I sebesar Rp1.011.394.909,11;

18. Hibah keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai 217.705.000,00 terdiri dari Hibah keluar Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp191.350.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Kepolisian Resor Wonosobo (BAST Hibah No: 900.1.12.1/1267/2024 tanggal 22 Agustus 2024) dan sebesar Rp26.355.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya kepada Pemerintah Desa Jojogan (BAST No. 000.2.4/1180.2/2024 tanggal 21 Oktober 2024);

19. Pengurangan peralatan dan mesin atas serah terima antar OPD sebesar Rp6.064.693.530,00 merupakan transaksi internal antar satuan dan/atau unit kerja pada pemerintah daerah;

20. Reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.294.944.038,39 merupakan transaksi internal antar sub akun dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
21. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin namun memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.996.500.000,00 pada RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp1.995.000.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp1.500.000,00;
22. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin namun memenuhi kriteria Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.701.780.000,00 pada Diskominfo sebesar Rp83.280.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp2.618.500.000,00;
23. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin namun memenuhi kriteria Persediaan sebesar Rp456.696.521,00 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp97.768.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp133.410.000,00, DPUPR sebesar Rp2.770.000,00, Disperkimhub sebesar Rp13.128.675,00, sepuluh puskesmas sebesar Rp51.293.100,00, RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp3.885.000,00, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp75.934.850,00, BPBD sebesar Rp19.990.000,00, Dispendukcapil sebesar Rp1.803.096,00, Dispaperkan sebesar Rp1.600.000,00, DLH sebesar Rp6.668.800,00, Diskominfo sebesar Rp42.270.000,00, dan Kantor Kecamatan Kaliwiro sebesar Rp6.175.000,00;
24. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin namun merupakan Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.932.202.496,00 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp24.000.000,00, Disperkimhub sebesar Rp1.720.565.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp14.400.000,00, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp47.469.996,00, DLH sebesar Rp5.000.000,00, DPMPTSP sebesar Rp62.326.500,00, Diskominfo sebesar Rp40.741.000,00, Kantor Kecamatan Kalibawang sebesar Rp2.700.000,00, dan Puskesmas Leksono 1 sebesar Rp15.000.000,00;
25. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin namun merupakan Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp187.920.500,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp170.641.000,00, Dispendukcapil sebesar Rp800.000,00, RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp347.000,00, Kantor Kecamatan Kaliwiro sebesar Rp9.547.500,00, Puskesmas Leksono 1 sebesar Rp205.000,00, dan Kantor Kelurahan Jlamprang sebesar Rp6.380.000,00;
26. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin namun memenuhi kriteria Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.840.900,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
27. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin namun memenuhi kriteria Aset Lain-Lain sebesar Rp85.801.940.655,72 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp420.682.470,80, Sekretariat Daerah sebesar Rp948.273.647,00, DPUPR sebesar Rp608.894.082,00, Disperkimhub sebesar Rp2.941.705.648,69, Dinas Kesehatan sebesar Rp15.083.300.885,86, RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp25.188.582.667,00, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp25.396.222.196,04, BPBD sebesar Rp319.044.383,00, Dinsospermades sebesar Rp276.290.669,00, DPPKBP3A sebesar Rp572.255.434,00, Dispendukcapil sebesar

Rp1.757.531.328,00, Disnakerintrans sebesar Rp373.702.450,42, Dispaperkan sebesar Rp1.740.850.209,00, DLH sebesar Rp2.578.698.076,27, DisdagkopUKM sebesar Rp399.644.616,91, BPPKAD sebesar Rp1.203.161.534,16, Inspektorat sebesar Rp70.540.304,00, Baperlitbangda sebesar Rp583.363.763,00, Disparbud sebesar Rp561.912.169,92, Badan Kesbangpol sebesar Rp64.452.410,00, Satpol PP sebesar Rp169.764.591,00, BKD sebesar Rp1.304.994.733,00, DPMPTSP sebesar Rp201.445.041,00, Disarpusda sebesar Rp96.958.752,00, Diskominfo sebesar Rp369.854.817,00, Kantor Kecamatan sebesar Rp1.585.045.249,80, dan Kantor Kelurahan sebesar Rp984.768.526,86;

28. Koreksi atas lebih catat saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya pemecahan aset berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi aset tahun 2024 sebesar Rp1.786.302.901,63;

29. Koreksi atas lebih catat saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya penggabungan aset berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi aset tahun 2024 sebesar Rp655.237.872,00;

30. Lebih catat penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi aset selama tahun 2024 sebesar Rp95.151.411,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp83.204.722,00, Puskesmas Mojotengah sebesar Rp1.215.000,00, dan Puskesmas Kertek 2 sebesar Rp10.731.689,00;

31. Koreksi Kesalahan Pencatatan sebesar Rp162.173.696,00 merupakan koreksi kesalahan pencatatan (kuantitas, harga dan/atau kode barang), yanga terdiri dari koreksi kesalahan pencatatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar Rp67.019.710,00 dan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM sebesar Rp95.153.986,00;

32. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp701.518.632.664,51 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.125 Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Besar	21.511.238.382,00	5.145.640.018,00	6.961.249.275,00	19.695.629.125,00
2,	Alat Angkutan	107.941.152.748,61	8.184.862.240,00	5.600.750.678,00	110.525.264.310,61
3,	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.263.636.183,87	2.952.581.698,46	1.321.203.795,27	5.895.014.087,06
4,	Alat Pertanian	3.370.009.271,00	314.677.517,00	1.151.024.597,00	2.533.662.191,00
5,	Alat Kantor dan Rumah Tangga	136.102.828.272,30	27.208.116.946,82	23.795.209.773,12	139.515.735.446,00
6,	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.780.193.153,77	3.744.801.914,83	7.311.295.298,77	12.213.699.769,82
7,	Alat Kedokteran dan Kesehatan	246.440.558.645,81	16.145.333.513,37	50.591.816.471,45	211.994.075.687,73
8,	Alat Laboratorium	65.266.371.514,96	7.422.453.218,44	22.677.440.333,41	50.011.384.397,98
9,	Alat Persenjataan	19.250.000,00	214.764.350,00	96.711.450,00	137.302.900,00
10	Komputer	130.398.992.626,63	22.021.972.942,93	33.690.391.120,34	118.730.574.449,22
11	Alat Eksplorasi	2.799.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	2.799.000,00
12	Alat Pengeboran	1.895.000,00	31.750.000,00	31.750.000,00	1.895.000,00
13	Alat Keselamatan Kerja	3.710.488.203,00	742.012.768,00	629.015.188,00	3.823.485.783,00
14	Alat Peraga	74.691.154,00	3.284.500,00	35.278.843,00	42.696.811,00
15	Peralatan Proses/Produksi	12.057.226,00	10.417.000,00	-	22.474.226,00
16	Rambu-rambu	27.085.144.723,52	1.995.445.000,00	3.780.955.905,70	25.299.633.817,82
17	Peralatan Olahraga	1.139.985.250,14	301.494.783,88	368.174.371,78	1.073.305.662,24
	JUMLAH	**763.121.291.355,61**	**96.464.408.411,73**	**158.067.067.100,85**	**701.518.632.664,51**

Penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp701.518.632.664,51 dan Rp763.121.291.355,61 telah didukung rincian pada Lampiran V.25.

C.1.c.3) GEDUNG DAN BANGUNAN

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.499.440.860.936,14 mengalami kenaikan sebesar Rp233.619.666.649,97 atau 18,46% dibandingkan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.265.821.194.286,17. Penjelasan terkait mutasi saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Awal per 31 Desember 2023**	**1.265.821.194.286,17**
(2)	**Mutasi Tambah**	**252.119.153.303,00**
	Perolehan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal	53.094.884.557,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan dari Belanja Pemeliharaan	372.037.598,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan dari Hibah Masuk Aset Tetap	16.339.898.000,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan dari Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	6.785.538.683,00
	Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin	1.996.500.000,00
	Reklasifikasi dari Properti Investasi	2.730.004.145,00
	Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lain-lain	170.800.290.320,00
(3)	**Mutasi Kurang**	**18.499.486.653,03**
	Penghapusan Aset Tetap Yang Akan Ditindaklanjuti Dengan Penyertaan Modal	435.453.670,00
	Hibah Ke Pemerintah Desa	2.803.989.281,70
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	6.785.538.683,00
	Reklasifikasi ke Peralatan & Mesin	414.639.000,00
	Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi & Jaringan	887.215.753,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	73.456.000,00
	Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.299.789.586,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Persediaan	1.112.900,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan	5.000.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	3.017.790.215,33
	Reklasifikasi ke Properti Investasi	2.775.501.564,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir per 31 Desember 2024**	**1.499.440.860.936,14**

Uraian saldo dan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar Rp1.265.821.194.286,17 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Perolehan gedung dan bangunan dari Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp53.094.884.557,00 terdiri dari Belanja Modal APBD tahun 2024 sebesar Rp53.065.784.557,00 dan Belanja Modal BLUD tahun 2024 sebesar Rp29.100.000,00;
3. Perolehan gedung dan bangunan dari Belanja Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp372.037.598,00 dengan rincian sebagai berikut.

No,	Nama SKPD	Nama Barang	Nilai
1,	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Bangunan Gedung Kantor	178.748.998,00
2,	Kelurahan Kertek	Bangunan Parkir	94.538.600,00
3,	Kantor Kecamatan Wadaslintang	Rumah Negara Golongan I	98.750.000,00
	Jumlah		**372.037.598,00**

4. Perolehan gedung dan bangunan dari pemberian hibah sebesar Rp16.339.898.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Instansi Pemberi Hibah	Nama Barang	Nilai (Rp)
1.	Komite	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.024.500,00
2.	Paguyuban Pasar Pagi Wonosobo	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	947.773.000,00
3.	Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR	Taman	4.985.905.900,00
4.	Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR	Taman	2.302.881.000,00

5.	Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR	Taman	7.875.313.600,00
6.	Kementrian Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	35.000.000,00
7.	Kementrian Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	35.000.000,00
8.	Kementrian Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	35.000.000,00
9.	Kementrian Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	30.000.000,00
10	Kementrian Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	35.000.000,00
11.	Kementrian Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	35.000.000,00
		Jumlah	**16.339.898.000,00**

5. Perolehan gedung dan bangunan atas serah terima antar OPD sebesar Rp6.785.538.683,00 merupakan transaksi internal antar satuan dan/atau unit kerja pada pemerintah daerah;

6. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang memenuhi kriteria menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.996.500.000,00 pada RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp1.995.000.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp1.500.000,00;

7. Reklasifikasi dari Properti Investasi Gedung yang memenuhi kriteria menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.730.004.145,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nilai
1.	BPPKAD	Bangunan Gedung Kantor	395.574.710,00
2.	DISPARBUD	Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi	169.658.082,00
3.	DISPARBUD	Taman	217.197.253,00
4.	DISPAPERKAN	Bangunan Gedung Kantor	1.947.574.100,00
		Jumlah	**2.730.004.145,00**

8. Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS/BSG)) yang memenuhi kriteria menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp170.800.290.320,00 yaitu bangunan Pasar induk pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;

9. Penghapusan aset selama tahun 2024 sebesar Rp435.453.670,00 untuk dijadikan penyertaan modal berdasarkan SK Bupati nomor 028/99/2024 tanggal 1 April 2024;

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nilai
1,	Kecamatan Sapuran	Bangunan Gedung Kantor	39.878.960,00
2,	BPPKAD	Bangunan Gedung Kantor	395.574.710,00
		Jumlah	**435.453.670,00**

10. Pemberian hibah sebesar Rp2.803.989.281,70 dengan rincian.

No	Nama OPD	Nama Barang	Penerima Hibah	Nilai (Rp)
1	Dindikpora	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Pemerintah Desa Sukoharjo	711.389.186,00
2	Dindikpora	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemerintah Desa Banyukembar	67.571.979,00
3	DPUPR	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Pemerintah Desa Trimulyo	198.573.773,60
4	DPUPR	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Pemerintah Hibah Desa Tirip	197.170.642,80
5	DPUPR	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Pemerintah Desa Bendungan	147.794.762,60
6	DPUPR	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Pemerintah Desa Depok	147.798.798,10
7	DPUPR	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Pemerintah Desa Tempurejo	101.010.552,60
8	DPUPR	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Pemerintah Desa Pengarengan	195.917.000,00
9	DPUPR	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Pemerintah Desa Selomanik	195.885.000,00
10	DPUPR	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Pemerintah Desa Tegalsari	97.905.000,00
11	DPUPR	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Pemerintah Desa Tegalsari	195.698.000,00
12	DPUPR	Bangunan Gedung Kantor	Pemerintah Desa Karangsambung	38.528.671,00
13	DPUPR	Bangunan Gedung Kantor	Pemerintah Desa Kalierang	260.478.000,00
14	Kelurahan Jlamprang	Bangunan Gedung Kantor	TK Asy Syamsuriyah	29.498.621,00
15	Dindikpora	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Desa Wonosroyo	218.769.295,00
		Jumlah		**2.803.989.281,70**

11. Pengurangan gedung dan bangunan atas serah terima antar OPD sebesar Rp6.785.538.683,00 merupakan transaksi internal antar satuan dan/atau unit kerja pada pemerintah daerah

12. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan namun memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp414.639.000,00 dengan rincian;

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nilai
1.	DPMPTSP	Bangunan Gedung Kantor	2.100.000,00
2.	Disnakertrans	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/ Hanggar	13.200.000,00
3.	DISPARBUD	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	399.339.000,00
		Jumlah	**414.639.000,00**

13. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan namun memenuhi kriteria Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp887.215.753,00 pada Dindikpora sebesar Rp732.970.753,00, Kelurahan Kejiwan sebesar Rp147.700.000,00, dan DLH sebesar Rp6.545.000,00;

14. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan namun memenuhi kriteria Aset Tetap Lainnya sebesar Rp73.456.000,00 pada Kantor Kelurahan Selomerto;

15. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan namun memenuhi kriteria Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.299.789.586,00 berupa bangunan gedung tempat olahraga sebesar Rp198.513.000,00 dan bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp1.101.276.586,00;

16. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan namun memenuhi kriteria barang Persediaan sebesar Rp1.112.900,00 berupa bangunan gedung pertokoan pada Disdagkop UKM;

17. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan namun memenuhi kriteria Beban Persediaan sebesar Rp5.000.000,00 pada Disnakerintrans;

18. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan namun memenuhi kriteria Aset Lain-Lain sebesar Rp3.017.790.215,33 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp162.344.016,00, Dindikpora sebesar Rp248.050.218,00, Dispaperkan sebesar Rp1.224.639.768,00, DLH sebesar Rp1.010.555.972,00, Disparbud sebesar Rp320.421.957,33, dan DPMPTSP sebesar Rp51.778.284,00;

19. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan namun memenuhi kriteria Properti Investasi Gedung sebesar Rp2.775.501.564,00 pada Disparbud;

20. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.499.440.860.936,14 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.126 Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.	Bangunan Gedung	1.242.422.703.838,17	266.650.391.643,00	33.734.273.862,03	1,475,338,821,619,14
2.	Monumen	6.965.303.019,00	-	137.499.256,00	6,827,803,763,00
3.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	16.433.187.429,00	841.048.125,00	-	17,274,235,554,00
	Jumlah	**1.265.821.194.286,17**	**267.491.439.768,00**	**33.871.773.118,03**	**1.499.440.860.936,14**

Rincian saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan dijabarkan sebagai berikut.

a. Bangunan Gedung

Merupakan aset tetap berupa konstruksi teknis yang terikat secara permanen dengan tanah, memiliki struktur atap dan dinding, serta berfungsi untuk tempat kegiatan seperti

administrasi, pelayanan, atau operasional. Rincian saldo dan mutasi bangunan gedung pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut.

Tabel V.127 Saldo Akhir Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Asrama	7.664.637.290,00	-	-	7.664.637.290,00
2	Bangunan Fasilitas Umum	10.840.864.428,00	3.404.450.082,00	147.700.000,00	14.097.614.510,00
3	Bangunan Gedung Garasi/Pool	4.083.285.819,00	261.757.550,00	29.100.000,00	4.315.943.369,00
4	Bangunan Gedung Instalasi	2.865.852.690,00	-	73.560.000,00	2.792.292.690,00
5	Bangunan Gedung Kantor	207.790.099.226,59	10.859.391.055,00	3.802.971.132,00	214.846.519.149,59
6	Bangunan Gedung Krematorium	198.000.000,00	-	-	198.000.000,00
7	Bangunan Gedung Laboratorium	18.059.657.344,81	2.242.135.677,00	359.484.596,00	19.942.308.425,80
8	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	1.421.397.768,00	669.984.600,00	1.224.639.768,00	866.742.600,00
9	Bangunan Gedung Perpustakaan	48.218.869.907,08	1.081.244.050,00	-	49.300.113.957,08
10	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	91.298.965.588,62	172.656.550.617,00	1.276.103.800,00	262.679.412.405,62
11	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	29.204.098.369,59	2.366.162.569,00	623.756.761,00	30.946.504.177,59
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.622.462.568,00	6.021.497.531,00	5.046.100.883,00	21.597.859.216,00
13	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	37.791.532.329,08	14.228.419.073,00	5.417.975.158,70	46.601.976.243,38
14	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	472.238.736.280,76	27.038.063.032,00	6.920.041.675,00	492.356.757.637,76
15	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	38.796.316.563,60	2.663.490.992,00	3.147.070.126,00	38.165.337.429,60
16	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	9.993.867.191,00	-	-	9.993.867.191,00
17	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	1.100.928.748,00	1.988.303.867,00	1.988.303.867,00	1.100.928.748,00
18	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	5.117.280.323,33	25.441.000,00	96.133.957,33	5.046.587.366,00
19	Bangunan Gudang	4.693.117.409,50	-	-	4.693.117.409,50
20	Bangunan Kesehatan	187.891.891.865,70	4.557.590.782,00	2.338.153.130,00	190.111.329.517,70
21	Bangunan Parkir	1.614.411.534,00	130.554.600,00	-	1.744.966.134,00
22	Bangunan Peternakan/Perikanan	46.699.200,00	-	-	46.699.200,00
23	Bangunan Stasiun Bus	148.293.000,00	-	-	148.293.000,00
24	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
25	Rumah Negara Golongan I	11.090.360.420,00	98.750.000,00	-	11.189.110.420,00
26	Rumah Negara Golongan II	2.764.628.310,00	-	-	2.764.628.310,00
27	Rumah Negara Golongan III	8.207.776.357,52	783.808.016,00	391.904.008,00	8.599.680.365,52
28	Taman	18.538.673.306,00	15.572.796.550,00	851.275.000,00	33.260.194.856,00
	TOTAL	**1.242.422.703.838,18**	**266.650.391.643,00**	**33.734.273.862,03**	**1.475.338.821.619,14**

b. Monumen

Merupakan aset tetap berupa bangunan atau struktur yang didirikan untuk memperingati peristiwa sejarah, tokoh, atau nilai budaya, dan memiliki nilai simbolis tinggi. Rincian saldo dan mutasi angunan Monumen pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut.

Tabel V.128 Saldo Akhir Monumen Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Bangunan Peninggalan	206.800.000,00	-	-	206,800,000,00
2	Tugu	6.758.503.019,00	-	137.499.256,00	6,621,003,763,00
	Jumlah	**6.965.303.019,00**	**-**	**137.499.256,00**	**6.827.803.763,00**

c. Tugu Titik Kontrol/Pasti

Merupakan aset tetap berupa bangunan atau tanda fisik yang digunakan sebagai referensi geodetik (patokan koordinat) untuk pemetaan, survei, atau penentuan batas wilayah. Rincian saldo dan mutasi bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut.

Tabel V.129 Saldo Akhir Tugu Titik Kontrol/Pasti Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Pagar	14.869.632.061,00	841.048.125,00	-	15.710.680.186,00
2	Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.327.385.768,00	-	-	1.327.385.768,00
3	Tugu/Tanda Batas Lainnya	236.169.600,00	-	-	236.169.600,00
	Jumlah	**16.433.187.429,00**	**841.048.125,00**	**-**	**17.274.235.554,00**

Penyajian saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.499.440.860.936,14 dan Rp1.265.821.194.286,17 telah didukung rincian pada Lampiran V.26.

C.1.c.4) JALAN IRIGASI DAN JARINGAN

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.036.884.120.936,27 mengalami kenaikan sebesar

Rp136.988.210.735,68 atau 4,72% dibandingkan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.899.895.910.200,59. Penjelasan terkait mutasi saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Awal**	**2.899.895.910.200,59**
(2)	**Mutasi Tambah**	**693.390.591.579,67**
	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024	128.968.218.227,00
	Perolehan Jalan irigasi dan Jaringan dari Persediaan	773.166.000,00
	Perolehan Jalan irigasi dan Jaringan dari Belanja Pemeliharaan	1.152.171.000,00
	Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin	2.701.780.000,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan	887.215.753,00
	Koreksi Pencatatan karena Pecah	536.632.641.867,00
	Koreksi Pencatatan karena Gabung	6.272.503.998,00
	Kurang Catat Aset Tetap	16.002.894.731,67
(3)	**Mutasi Kurang**	**556.402.380.844,00**
	Hibah Ke Pemerintah Desa	13.447.728.976,00
	Reklasifikasi Jalan Irigasi dan Jaringan ke Peralatan & Mesin	49.506.000,00
	Koreksi Pencatatan karena Gabung	8.267.626.590,00
	Koreksi Pencatatan karena Pecah	534.637.519.269,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir**	**3.036.884.120.936,27**

Uraian saldo dan mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar Rp2.899.895.910.200,59 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Perolehan jalan irigasi dan jaringan dari Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp53.094.884.557,00 seluruhnya bersumber dari APBD pada DPUPR sebesar Rp110.368.180.000,00, Disperkimhub sebesar Rp18.550.532.227,00, dan Diskominfo sebesar Rp49.506.000,00;
3. Perolehan Aset Tetap Jalan irigasi dan Jaringan dari Persediaan sebesar Rp773.166.000,00 adalah perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Persediaan tahun 2024, terdiri atas Instalasi Gardu Listrik Distribusi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;
4. Perolehan Aset Tetap Jalan irigasi dan Jaringan dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.152.171.000,00 adalah perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Pemeliharaan tahun 2024 yang merupakan pemeliharaan ruas jalan Jawa-Kalibeber yang dikapitalisasikan ke aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Peralatan & Mesin sebesar Rp2.701.780.000,00 adalah perolehan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD tahun 2024, terdiri atas Instalasi Gardu Listrik Lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp83.280.000,00 dan Instalasi Air Kotor Lainnya senilai Rp2.618.500.000,00 pada Dinas Kesehatan;
6. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria menjadi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp887.215.753,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp732.970.753,00, DLH sebesar Rp6.545.000,00, dan Kantor Kelurahan Kejiwan sebesar Rp147.700.000,00;

7. Koreksi atas kurang catat saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena adanya pemecahan aset berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi aset tahun 2024 sebesar Rp536.632.641.870,01;
8. Koreksi atas kurang catat saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena adanya penggabungan aset berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi aset tahun 2024 sebesar Rp6.272.503.998,00;
9. Kurang catat saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp16.002.894.731,67 yang merupakan hasil kegiatan inventarisasi aset yang dilaksanakan selama tahun 2024 berupa jalan kabupaten pada DPUPR;
10. Pemberian hibah sebesar Rp13.447.728.976,00 merupakan hibah kepada pemerintah desa dan kelompok masyarakat dengan rincian pada Lampiran V.27;
11. Reklasifikasi aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan namun memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.506.000,00 pada Diskominfo;
12. Koreksi atas lebih catat saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena adanya penggabungan aset berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi aset tahun 2024 sebesar Rp8.267.626.599,00 berupa jalan kabupaten pada DPUPR;
13. Koreksi atas lebih catat saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena adanya pemecahan aset berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi aset tahun 2024 sebesar Rp534.637.519.269,00 berupa jalan kabupaten pada DPUPR;
14. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.036.884.120.936,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.130 Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
1.	Jalan dan Jembatan	2.173.731.093.819,43	766.789.493.756,67	637.427.017.545,99	2.303.093.570.030,11
2.	Bangunan Air	646.600.369.137,17	7.342.642.264,00	7.758.986.157,00	646.184.025.244,17
3.	Instalasi	72.957.773.394,99	23.755.785.330,00	12.597.835.712,00	84.115.723.012,99
4.	Jaringan	6.606.673.849,00	49.506.000,00	3.165.377.200,00	3.490.802.649,00
	Jumlah	**2.899.895.910.200,59**	**797.937.427.350,67**	**660.949.216.614,99**	**3.036.884.120.936,27**

Rincian saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dijabarkan sebagai berikut.

a. Jalan dan Jembatan

Merupakan infrastruktur berupa konstruksi fisik yang dibangun untuk menghubungkan lokasi atau dua titik terpisah dan memfasilitasi transportasi darat, termasuk jalan, jembatan, flyover dan underpass. Saldo dan mutasi Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo diuraikan pada tabel di bawah ini;

Tabel V.131 Saldo Akhir Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Jalan Desa	195.727.619.505,10	19.318.597.096,00	9.940.976.032,00	205.105.240.569,10
2	Jalan Khusus	1.796.874.329.121,76	659.337.025.187,68	625.564.944.928,99	1.830.646.409.380,45
3	Jalan Lainnya	-	74.431.930.658,99	-	74.431.930.658,99
4	Jalan Nasional	-	8.637.613.355,00	-	8.637.613.355,00
5	Jembatan Pada Jalan Desa	10.330.125.632,67	-	1.756.847.585,00	8.573.278.047,67
6	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	168.653.432.559,90	5.064.327.459,00	42.793.000,00	173.674.967.018,90
7	Jembatan Pada Jalan Khusus	2.024.131.000,00	-	-	2.024.131.000,00
8	Jembatan Pada Jalan Nasional	121.456.000,00	-	121.456.000,00	-
	Jumlah	**2.173.731.093.819,43**	**766.789.493.756,67**	**637.427.017.545,99**	**2.303.093.570.030,11**

b. Bangunan Air

Adalah infrastruktur yang dibangun untuk mengelola sumber daya air, termasuk pengendalian banjir, irigasi dan pasokan air bersih. Saldo dan mutasi Bangunan Air pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo diuraikan pada tabel di bawah ini;

Tabel V.132 Saldo Akhir Bangunan Air Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	6.545.000,00	-	6.545.000,00
2	Bangunan Air Kotor Lainnya	2.311.732.949,00	129.291.000,00	129.291.000,00	2.311.732.949,00
3	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	33.853.101.926,22	880.670.753,00	472.329.000,00	34.261.443.679,22
4	Bangunan Pelengkap Air Kotor	624.240.289,00	-	-	624.240.289,00
5	Bangunan Pelengkap Irigasi	545.648.159,00	-	38.700.000,00	506.948.159,00
6	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	4.894.694.000,00	-	-	4.894.694.000,00
7	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	727.586.500,00	-	473.108.500,00	254.478.000,00
8	Bangunan Pembawa Air Kotor	10.171.029.817,88	-	-	10.171.029.817,88
9	Bangunan Pembawa Irigasi	574.646.804.371,93	5.488.003.000,00	5.004.549.688,00	575.130.257.683,93
10	Bangunan Pembawa Pasang Surut	85.223.000,00	-	40.223.000,00	45.000.000,00
11	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	58.190.500,00	-	-	58.190.500,00
12	Bangunan Pembuang Air Kotor	293.844.851,00	-	-	293.844.851,00
13	Bangunan Pembuang Irigasi	2.056.424.577,00	-	186.766.000,00	1.869.658.577,00
14	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	6.772.415.560,14	838.132.511,00	492.489.513,00	7.118.058.558,14
15	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	195.238.420,00	-	-	195.238.420,00
16	Bangunan Pengaman Air Kotor	423.814.000,00	-	-	423.814.000,00
17	Bangunan Pengaman Irigasi	2.748.903.729,00	-	610.164.456,00	2.138.739.273,00
18	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	341.686.000,00	-	49.793.000,00	291.893.000,00
19	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	1.420.176.127,00	-	-	1.420.176.127,00
20	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	292.797.326,00	-	-	292.797.326,00
21	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	3.318.847.884,00	-	-	3.318.847.884,00
22	Bangunan Pengambilan Irigasi	168.222.150,00	-	-	168.222.150,00
23	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	93.750.000,00	-	-	93.750.000,00
24	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	195.090.000,00	-	-	195.090.000,00
25	Bangunan Waduk Air Kotor	99.335.000,00	-	-	99.335.000,00
26	Bangunan Waduk Irigasi	261.572.000,00	-	261.572.000,00	-
	Jumlah	**646.600.369.137,17**	**7.342.642.264,00**	**7.758.986.157,00**	**646.184.025.244,17**

c. Instalasi

Merupakan perangkat atau sistem teknis yang dipasang secara permanen untuk mendukung operasional tertentu seperti listrik, air atau komunikasi. Saldo dan mutasi Bangunan Instalasi pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel V.133 Saldo Akhir Instalasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Bangunan Penampung Sampah	1.731.710.377,00	-	-	1.731.710.377,00
2	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	7.272.973.386,59	-	699.067.647,00	6.573.905.739,59
3	Instalasi Air Buangan Domestik	10.312.819.024,00	321.738.940,00	96.223.970,00	10.538.333.994,00
4	Instalasi Air Buangan Pertanian	20.285.013,00	-	-	20.285.013,00
5	Instalasi Air Kotor Lainnya	252.979.000,00	5.237.000.000,00	2.618.500.000,00	2.871.479.000,00
6	Instalasi Air Permukaan	273.523.500,00	-	119.287.000,00	154.236.500,00
7	Instalasi Air Sumber / Mata Air	585.498.635,00	-	54.826.000,00	530.672.635,00
8	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	50.007.355.264,40	9.443.466.195,00	319.620.000,00	59.131.201.459,40
9	Instalasi Gardu Listrik Induk	900.918.720,00	-	-	900.918.720,00
10	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	-	8.753.580.195,00	8.670.300.195,00	83.280.000,00
11	Instalasi Jaringan Pipa Gas	199.152.000,00	-	-	199.152.000,00
12	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	66.572.000,00	-	-	66.572.000,00
13	Instalasi Pengolahan Gas	7.902.400,00	-	-	7.902.400,00
14	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	693.056.875,00	-	20.010.900,00	673.045.975,00
15	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	7.050.000,00	-	-	7.050.000,00
16	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	625.977.200,00	-	-	625.977.200,00
	Jumlah	**72.957.773.394,99**	**23.755.785.330,00**	**12.597.835.712,00**	**84.115.723.012,99**

d. Jaringan

Aset infrastruktur berupa sistem terhubung yang mendistribusikan sumber daya (listrik, air, gas, data) dari satu titik ke titik lain. Saldo dan mutasi Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.134 Saldo Akhir Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Jaringan Air Minum Lainnya	90.251.172,00	-	-	90.251.172,00
2	Jaringan Distribusi	3.399.850.969,00	-	1.669.274.000,00	1.730.576.969,00
3	Jaringan Gas Lainnya	85.995.800,00	-	-	85.995.800,00

4	Jaringan Listrik Lainnya	14.700.000,00	49.506.000,00	49.506.000,00	14.700.000,00
5	Jaringan Pembawa	1.370.831.350,00	-	655.634.150,00	715.197.200,00
6	Jaringan Pipa Distribusi	329.723.508,00	-	-	329.723.508,00
7	Jaringan Transmisi	1.315.321.050,00	-	790.963.050,00	524.358.000,00
	TOTAL	**6.606.673.849,00**	**49.506.000,00**	**3.165.377.200,00**	**3.490.802.649,00**

Penyajian saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.036.884.120.936,27 dan Rp2.899.895.910.200,59 telah didukung rincian pada Lampiran V.28.

C.1.c.5) ASET TETAP LAINNYA

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.280.397.340,29 mengalami penurunan sebesar Rp74.662.236.717,89 atau 58,82% dibandingkan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp126.942.634.058,18. Penjelasan terkait mutasi saldo Aset Tetap Lainnya dan Jaringan sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Awal**	**126.942.634.058,18**
(2)	**Mutasi Tambah**	**8.409.452.475,00**
	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024	6.791.551.850,00
	Reklasifikasi antar Aset Tetap Lainnya	1.529.603.725,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung & Bangunan	73.456.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	14.840.900,00
(3)	**Mutasi Kurang**	**83.071.689.192,89**
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Lainnya	1.529.603.725,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan & Mesin	142.128.500,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang menjadi Persediaan	2.700.000,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Beban Jasa	600.000,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Beban Ekstrakomptabel	750.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain	33.158.244.351,01
	Penghapusan Aset Tetap Lainnya	47.361.902.930,88
	Penghapusan Aset Tetap	802.303.686,00
	Hibah Keluar Aset Tetap	73.456.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir**	**52.280.397.340,29**

Uraian saldo dan mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar Rp126.942.634.058,18 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Perolehan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp6.791.551.850,00 berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari APBD senilai Rp422.830.000,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dan seharga Rp6.368.721.850,00 yang bersumber dari BOS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

3. Reklasifikasi antar Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.529.603.725,00 yang terdiri dari reklasifikasi antar Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.267.705.525,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan sebesar Rp261.898.200,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
4. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya dari Gedung & Bangunan merupakan transaksi yang berasal dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan menjadi Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp73.456.000,00 pada Kelurahan Selomerto;
5. Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin menjadi Aset Tetap Lainnya (Alat Musik) sebesar Rp14.840.900,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;
6. Reklasifikasi antar Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.529.603.725,00 yang terdiri dari reklasifikasi antar Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.267.705.525,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan sebesar Rp261.898.200,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
7. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainya yang memenuhi kriteria menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp142.128.500,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
8. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainya yang memenuhi kriteria menjadi Barang Persediaan sebesar Rp2.700.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
9. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainya yang memenuhi kriteria menjadi Beban Jasa sebesar Rp600.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
10. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainya yang memenuhi kriteria menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp750.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
11. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainya yang memenuhi kriteria menjadi Aset Lain-Lain sebesar Rp33.158.244.351,00 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp292.416.469,00, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp32.856.538.561,23, Dispaperkan sebesar Rp1.080.000,00, Disarpusda sebesar Rp4.200.000,00, Kantor Kecamatan Wonosobo sebesar Rp990.000,00, dan Kantor Kecamatan Leksono sebesar Rp3.019.320,77;
12. Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp47.361.902.930,88 merupakan penghapusan berdasarkan hasil Inventarisasi BMD tahun 2024 (Lampiran IV Keputusan Bupati Nomor: 028/2008/2024 tentang Penghapusan BMD yang Tidak Memenuhi Kriteria sebagai Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Tergolong sebagai Barang Persediaan atau Pemeliharaan dan Lampiran VI, V, VI Keputusan Bupati Nomor: 028/2009/2024 tentang Penghapusan BMD yang Memenuhi Kriteria Penghapusan Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi BMD Tahun 2023-2024, dan Lampiran II SK Bupati No, 028/2030/2024 tentang Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya yang dikarenakan menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah (P3D)
13. Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp802.303.686,00 merupakan penghapusan tahun 2024 berdasarkan SK Bupati Nomor: 000.2.4/2091/2024 yang terdiri dari: Penghapusan Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap dalam renovasi sebesar

Rp136.644.005,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan sebesar Rp665.659.681,00 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;

14. Pemberian hibah sebesar Rp73.456.000,00 merupakan hibah dari Kelurahan Selomerto kepada Rukun Warga 9 Kelurahan Selomerto berupa Gedung balai RW 9 Kelurahan Selomerto berdasarkan BAST nomor 000.2.4/0529/2024 tanggal 30 Desember 2024;
15. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.280.397.340,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.135 Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
1.	Bahan Perpustakaan	120.083.622.078,60	8.205.777.075,00	80.804.301.062,69	47.485.098.090,91
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	4.983.298.293,58	130.219.400,00	1.389.778.444,20	3.723.739.249,38
3.	Tanaman	1.073.410.000,00	0,00	1.850.000,00	1.071.560.000,00
4.	Aset Tetap Dalam Renovasi	802.303.686,00	73.456.000,00	875.759.686,00	0,00
	JUMLAH	**126.942.634.058,18**	**8.409.452.475,00**	**83.071.689.192,89**	**52.280.397.340,29**

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya dijabarkan sebagai berikut.

a. Bahan Perpustakaan

Berikut merupakan rincian Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2024:

Tabel V.136 Saldo Akhir Bahan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Audio Visual	251.225.637,57	-	42.175.547,57	209.050.090,00
2	Bahan Kartografi	892.566.349,05	-	415.495.466,37	477.070.882,68
3	Bentuk Mikro (Microform)	12.000,00	-	12.000,00	-
4	Buku Agama	3.913.322.180,03	282.977.500,00	2.633.925.634,59	1.562.374.045,44
5	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	4.748.920.515,20	394.976.600,00	3.652.931.752,04	1.490.965.363,16
6	Buku Filsafat	1.015.282.843,02	13.635.600,00	782.507.767,33	246.410.675,69
7	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	2.284.434.572,12	30.636.700,00	1.931.226.158,79	383.845.113,33
8	Buku Ilmu Bahasa	16.361.869.551,47	1.138.300.125,00	11.725.086.690,33	5.775.082.986,14
9	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.761.746.183,15	95.141.300,00	1.193.724.024,56	663.163.458,59
10	Buku Ilmu Sosial	9.866.269.770,65	234.580.200,00	6.569.349.132,22	3.531.500.838,43
11	Buku Laporan	52.656.418,16	-	49.209.191,64	3.447.226,52
12	Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	20.380.900.004,15	503.088.500,00	17.974.134.835,96	2.909.853.668,19
13	Buku Umum	57.253.127.274,59	5.082.917.650,00	33.306.978.432,26	29.029.066.492,33
14	Karya Grafika (Graphic Material)	186.741.753,00	-	136.268.712,00	50.473.041,00
15	Karya Musik	12.280.118,00	-	11.711.118,00	569.000,00
16	Lukisan Dan Ukiran	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
17	Naskah (Manuskrip) / Asli	3.639.341,00	-	3.639.341,00	-
18	Serial	265.795.277,44	6.692.900,00	112.227.058,05	160.261.119,39
19	Tarscalt	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
20	Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	813.637.290,00	422.830.000,00	261.898.200,00	974.569.090,00
21	Three Dimensional Artefacs And Realita	2.695.000,00	-	300.000,00	2.395.000,00
	Jumlah	**120.083.622.078,60**	**8.205.777.075,00**	**80.804.301.062,69**	**47.485.098.090,91**

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Berikut merupakan rincian Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024:

Tabel V.137 Saldo Akhir Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	35.847.900,00	-	11.677.900,00	24.170.000,00
2	Alat Musik	4.262.670.184,92	130.219.400,00	1.275.963.987,57	3.116.925.597,35
3	Alat Peraga Kesenian	31.351.300,00	-	3.000.000,00	28.351.300,00
4	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	97.910.810,00	-	13.800.000,00	84.110.810,00
5	Barang Kerajinan	113.735.000,55	-	44.165.000,55	69.570.000,00
6	Lukisan	54.057.500,00	-	4.655.000,00	49.402.500,00
7	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	340.628.043,48	-	8.526.621,48	332.101.422,00
8	Pahatan	35.153.180,00	-	19.300.560,00	15.852.620,00
9	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	11.944.374,60	-	8.689.374,60	3.255.000,00
	Jumlah	**4.983.298.293,55**	**130.219.400,00**	**1.389.778.444,20**	**3.723.739.249,35**

c. Tanaman

Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya Tanaman yang dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah Tanaman yang dipelihara/dirawat pada Taman Kota, Alun-alun, Arboretum (kebun botani yang mengkoleksi pepohonan) dan Taman Tepian Jalan Protokol dengan beberapa jenis pohon sebagai berikut : Alpukat, Angsana, Belimbing, Beringin, Bintaro, Bungur, Cemara, Dadap Merah, Durian, Flambboyan, Glodokan/Glodongan, Ipik/Gayam, Jati, Jimitri, Kamboja, Karet, Kayu Putih, Kelapa, Kelengkeng, Kepel, Kersen, Ketapang, Keruing, Kupu-kupu, Mahoni, Manggis, Melinjo, Nangka, Nagasari/Dewadaru, Pagoda, Palem Sadang, Petai, Pinisium, Pulle, Rambutan, Sapu Tangan, Sawo, Sepatu Dea, Sikat Botol, Sukun, Tanjung, Tabebuya, dan Trembesi. Saldo akhir Aset Tetap Lainnya (Tanaman) pada Pemerintah Kabuapten Wonosobo senilai Rp1.071.560.000,00 merupakan tanaman dalam kategori aset tetap yang ada pada pengelolaan Dinas Linkungan Hidup.

Penyajian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp52.280.397.340,29 dan Rp126.942.634.058,18 telah didukung rincian pada Lampiran V.29.

C.1.c.6) KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.425.884.949,00 mengalami kenaikan sebesar Rp697.723.462,00 atau 14,76% dibandingkan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.728.161.487,00. Penjelasan terkait mutasi saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

	Uraian	(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Awal**	**4.728.161.487,00**
(2)	**Mutasi Tambah**	**1.299.789.586,00**
	Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung & Bangunan	1.299.789.586,00
(3)	**Mutasi Kurang**	**602.066.124,00**
	Penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	602.066.124,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir**	**5.425.884.949,00**

Uraian saldo dan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar Rp4.728.161.487,00 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 yang belum selesai bangunan fisiknya di tahun 2024 sebesar Rp1.299.789.586,00 pada Kantor Kelurahan Kaliwiro sebesar Rp198.513.000,00, Kantor Kelurahan Wadaslintang sebesar Rp199.241.146,00, Kantor Kelurahan Kalikajar sebesar Rp197.084.957,00, Kantor Kelurahan Wonosobo Timur sebesar Rp120.004.000,00, Kantor Kelurahan Jlamprang sebesar Rp189.513.467,00, Kantor Kelurahan Rojoimo sebesar 197.671.000,00, dan Kantor Kelurahan Kalianget sebesar Rp197.762.016,00;
3. Penghapusan selama tahun 2024 sebesar Rp602.066.124,00 berdasarkan BAST nomor 000.2.4/0498/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp146.974.568,00 dan SK Bupati nomor 000.2.4/2092/2024 tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 455.091.556,00;
4. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.425.884.949,00 merupakan Konstruksi dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan dengan rincian pada Lampiran V.30.

C.1.c.7) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.745.964.596.867,13) mengalami kenaikan sebesar (Rp144.911.733.119,89) atau 5,57% dibandingkan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.601.052.863.747,23) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.138 Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasii (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(592.287.115.994,32)	(82.790.408.618,23)	(122.681.108.061,82)	(552.396.416.550,73)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(330.794.240.225,77)	(41.966.395.159,13)	(3.002.866.085,30)	(369.757.769.299,60)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.676.533.053.689,34)	(544.919.717.718,92)	(398.622.593.266,27)	(1.822.830.178.141,99)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.438.453.837,81)	(654.598.902,00)	(1.112.819.865,00)	(980.232.874,81)
	Jumlah	**(2.601.052.863.747,24)**	**(670.331.120.398,28)**	**(525.419.387.278,39)**	**(2.745.964.596.867,13)**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per jenis Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar (Rp552.396.416.550,73) mengalami penurunan sebesar Rp39.890.699.443,59 atau 6,74% dibandingkan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar (Rp592.287.115.994,32). Penjelasan terkait mutasi saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Awal**	**(592.287.115.994,32)**
(2)	**Mutasi Tambah**	**(82.790.408.618,23)**
	Beban Penyusutan	(59.201.878.961,83)
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	(515.415.030,00)
	Reklasifikasi antar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.899.710.983,06)
	Kurang catat saldo	(10.392.025.729,16)
	Koreksi tambah karena pemecahan aset	(1.445.449.710,18)
	Koreksi tambah karena penggabungan aset	(335.928.204,00)
(3)	**Mutasi Kurang**	**(122.681.108.061,82)**
	Penghapusan	(26.609.489.992,29)
	Pemberian hibah	(212.998.750,00)
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	(515.415.030,00)
	Reklasifikasi antar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.498.040.375,06)
	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(12.727.268,00)
	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(83.962.074.555,84)

	Lebih catat saldo	(170.289.937,00)
	Koreksi kurang karena pemecahan aset	(1.458.849.680,63)
	Koreksi kurang karena penggabungan aset	(241.222.473,00)
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir**	**(552.396.416.550,73)**

Uraian saldo dan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar (Rp592.287.115.994,32) merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Beban Penyusutan sebesar (Rp59.201.878.961,83) merupakan Beban Penyusutan selama tahun 2024;
3. Serah terima antar OPD merupakan transaksi internal pemda sebesar (Rp515.415.030,00);
4. Reklasifikasi antar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan perpindahan akumulasi penyusutan antar sub akun peralatan dan mesin sebesar (Rp10.899.710.983,06);
5. Kurang catat saldo akumulasi penyusutan berdasarkan perhitungan ulang dalam rangka kegiatan Inventarisasi BMD tahun 2024 sebesar (Rp10.392.025.729,16);
6. Koreksi atas kurang catat saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya pemecahan aset berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi aset tahun 2024 sebesar (Rp1.445.449.710,18);
7. Koreksi atas kurang catat saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan and Mesin karena adanya penggabungan aset berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi aset tahun 2024 sebesar (Rp335.928.204,00);
8. Penghapusan selama tahun 2024 sebesar (Rp26.609.489.992,29) berdasarkan SK Bupati nomor 000.2.4/2053/2024 tanggal 31 Desember 2024 pada Lampiran I, SK Bupati nomor 028/2008/2024 tanggal 29 November 2024 pada Lampiran I, dan SK Bupati nomor 028/2009/2024 tanggal 29 November 2024 pada Lampiran I;
9. Pemberian hibah sebesar (Rp212.998.750,00) merupakan hibah kepada Polres Wonosobo dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kendaraan roda empat sebesar berdasarkan BAST nomor 900.1.13.1/1267/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dan hibah kepada Desa Jojogan Kecamatan Kejajar dari Dinas Lingkungan Hidup berupa alat angkut sampah berdasarkan BAST nomor 000.2.4/1180.2/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
10. Serah terima antar OPD merupakan transaksi internal pemda sebesar (Rp515.415.030,00);
11. Reklasifikasi antar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan perpindahan akumulasi penyusutan antar sub akun peralatan dan mesin sebesar (Rp9.498.040.375,06). Perbedaan nilai reklasifikasi antar akumulasi penyusutan peralatan dan mesin antara mutasi tambah dan mutasi kurang disebabkan karena perbedaan masa manfaat dan perhitungan beban penyusutannya;

12. Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.727.268,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
13. Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar (Rp83.962.074.555,84) pada 27 OPD;
14. Lebih catat saldo akumulasi penyusutan berdasarkan perhitungan ulang dalam rangka kegiatan inventarisasi aset tahun 2024 sebesar (Rp170.289.937,00);
15. Koreksi atas lebih catat saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya pemecahan aset berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi aset tahun 2024 sebesar (Rp1.458.849.680,63);
16. Koreksi atas lebih catat saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya penggabungan aset berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi BMD tahun 2024 sebesar (Rp241.222.473,00);
17. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar (Rp552.396.416.550,73) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.139 Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024
		(Rp)	Tambah	Kurang	*(Rp)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(14.849.451.613,00)	(4.036.332.586,00)	(1.625.636.482,00)	(12.438.755.509,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(85.841.530.151,61)	(2.593.712.999,00)	(7.522.570.778,00)	(90.770.387.930,61)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel & Alat Ukur	(3.431.045.917,99)	(1.121.351.018,46)	(2.154.507.204,46)	(4.464.202.103,99)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(3.203.590.507,00)	(945.880.805,00)	(194.295.954,00)	(2.452.005.656,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Dan Rumah Tangga	(101.773.846.282,75)	(19.530.337.936,03)	(23.713.939.310,29)	(105.957.447.657,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	(11.798.439.327,72)	(4.398.390.923,78)	(1.413.905.507,83)	(8.813.953.911,77)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran & Kesehatan	(193.734.469.572,81)	(40.004.584.781,78)	(19.816.869.561,39)	(173.467.218.277,24)
8	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium	(47.452.743.816,15)	(18.121.410.461,92)	(5.168.970.017,43)	(34.500.303.371,67)
9	Akumulasi Penyusutan Senjata Api	(1.166.667,00)	(1.555.555,00)	(111.684.205,00)	(111.295.317,00)
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(100.582.661.740,63)	(29.095.484.789,34)	(19.891.328.279,93)	(91.378.505.231,22)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(728.906,00)	-	(349.875,00)	(1.078.781,00)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	(22.875,00)	-	(189.500,00)	(212.375,00)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(2.600.067.190,00)	(406.699.196,00)	(472.502.644,00)	(2.665.870.638,00)
14	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(30.721.322,00)	(15.299.520,00)	(12.166.961,00)	(27.588.763,00)
15	Akumulasi Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi	(2.442.874,00)	-	(5.780.825,00)	(8.223.699,00)
16	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(26.080.602.548,52)	(2.045.896.545,70)	(359.354.689,00)	(24.394.060.691,82)
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga	(903.584.682,14)	(364.170.943,80)	(326.356.823,89)	(865.770.562,23)
	Jumlah	**(592.287.115.994,32)**	**(122.681.108.061,82)**	**(82.790.408.618,22)**	**(552.396.416.550,73)**

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp369.757.769.299,60) mengalami kenaikan sebesar (Rp38.963.529.073,83) atau 11,78% dibandingkan saldo Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp330.794.240.225,77), Penjelasan terkait mutasi saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

	Uraian	(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Awal per 31 Desember 2023**	**(330.794.240.225,77)**
(2)	**Mutasi Tambah**	**(41.966.395.159,13)**
	Beban Tahun berjalan	(30.889.952.147,00)
	Reklasifikasi Akum Peny Aset Tetap dari Akum Peny Aset Lain-lain	(9.173.853.581,00)
	Reklasifikasi dari Akum Peny Properti Investasi	(1.075.220.086,00)
	Koreksi atas Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	(66.556.819,13)
	Koreksi atas Kurang Catat Saldo Awal yang dari BGS Tahun 2020	(760.812.526,00)
(3)	**Mutasi Kurang**	**(3.002.866.085,30)**
	Hibah Ke Pemerintah Desa	(539.785.353,00)
	Penghapusan Akum Peny Yang Akan Ditindaklanjuti Dengan Penyertaan Modal	(476.290.605,00)
	Reklasifikasi ke Akum Peny Aset Lain-lain	(1.461.719.093,00)
	Reklasifikasi ke Akum Peny Properti Investasi	(458.706.132,00)
	Koreksi atas Lebih Catat Akumulasi Penyusutan	(66.364.902,30)
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir per 31 Desember 2024**	**(369.757.769.299,60)**

Uraian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp330.794.240.225,77) merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Beban Tahun berjalan sebesar (Rp30.889.952.147,00) merupakan penambahan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan dari beban penyusutan selama tahun 2024;
3. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp9.173.853.581,00) merupakan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM (reklasifikasi dari BGS/BSG);
4. Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp1.075.220.086,00) dengan rincian.

Nama Barang	Nilai
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(289.196.640,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(106.378.070,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(14.420.938,00)
Akumulasi Penyusutan Taman	(9.049.886,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(656.174.552,00)
Jumlah	**(1.075.220.086,00)**

5. Koreksi atas Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp66.556.819,13) dengan rincian.

Nama SKPD	Nama Barang	Nilai
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	(65.972.324,00)
Puskesmas Sukoharjo 1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Kesehatan	(346.343,00)
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	(155.449,00)
DPPKBPPPA	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(17.098,00)
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(16.153,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(44.581,00)
Kantor Kecamatan Wadaslintang	akumulasi penyusutan Rumah Negara Golongan I	(4.871,00)
Dinas Lingkungan Hidup	Akumulasi Penyusutan Taman	(0,13)
	Jumlah	**(66.556.819,13)**

6. Kurang catat nilai akumulasi penyusutan senilai (Rp760.812.526,00) merupakan koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan dari gedung BGS.

7. Hibah Ke Pemerintah Desa Belanja Barang sebesar (Rp539.785.353,00) dengan rincian.

Nama SKPD	Nama Barang	Nilai
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	(154.928.849,00)
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(13.725.426,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(72.532.178,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	(295.550.711,00)
Kelurahan Jlamprang	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(3.048.189,00)
	Jumlah	**(539.785.353,00)**

8. Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Akan Ditindaklanjuti Dengan Penyertaan Modal sebesar (Rp476.290.605,00) dengan rincian.

Nama SKPD	Nama Barang	Nilai
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(40.836.935,00)
Kantor Kecamatan Sapuran	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(39.878.960,00)
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(395.574.710,00)
	Jumlah	**(476.290.605,00)**

9. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp1.461.719.093,00) dengan rincian.

Nama SKPD	Nama Barang	Nilai
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(72.442.127,00)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(71.706.736,00)
DPMPTSP	Akumulasi Penyusutan Tugu	(10.269.354,00)
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	(109.041.064,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(18.750.000,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(18.870.735,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(83.400.000,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(13.704.273,00)
Dinas Lingkungan Hidup	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	(14.344.200,00)
Dinas Lingkungan Hidup	Akumulasi Penyusutan Taman	(148.973.125,00)
Dinas Lingkungan Hidup	Akumulasi Penyusutan Tugu	(11.572.335,00)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pemotong Hewan	(888.645.144,00)
	Jumlah	**(1.461.719.093,00)**

10. Reklasifikasi ke Akum Peny Properti Investasi sebesar (Rp458.706.132,00) dengan rincian.

Nama SKPD	Nama Barang	Nilai
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(386.933.340,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(69.643.059,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(2.129.733,00)
	Jumlah	**(458.706.132,00)**

11. Koreksi atas Lebih Catat Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp66.364.902,30) merupakan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga senilai (Rp66.364.901,00) pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga senilai (Rp1,03) pada DPUPR.

12. Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp369.757.769.299,60) dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.140 Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1,	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(328.073.254.948,77)	3.002.866.085,30	41.637.802.905,13	(366.708.191.768,60)
2,	Akumulasi Penyusutan Monumen	(1.311.430.926,00)	-	328.592.254,00	(1.640.023.180,00)
3,	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(1.409.554.351,00)	-	-	(1.409.554.351,00)
	JUMLAH	**(330.794.240.225,77)**	**3.002.866.085,30**	**41.966.395.159,13**	**(369.757.769.299,60)**

3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.808.555.390.554,75) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.676.533.053.689,34) mengalami kenaikan sebesar (Rp132.022.336.861,41) atau 7,87%, Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan penjelasan sebagai berikut.

	Uraian	(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Awal**	**(1.676.533.053.693,34)**
(2)	**Mutasi Tambah**	**(544.919.717.718,92)**
	Beban Penyusutan	(150.708.918.757,34)
	Koreksi Pencatatan karena Pecah (Penambahan)	(8.943.877.367,00)
	Koreksi Pencatatan karena Gabung	(4.370.576.014,00)
	Kurang Catat Nilai Akum Peny Aset Tetap	(380.679.573.153,00)
	Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	(266.714.913,07)
(3)	**Mutasi Kurang**	**(398.622.593.266,27)**
	Hibah Ke Pemerintah Desa	(4.691.602.144,00)
	Koreksi Pencatatan karena Pecah (Pengurangan)	(387.098.448.161,27)
	Koreksi Pencatatan karena Gabung (Pengurangan)	(6.829.563.093,00)
	Lebih Catat Akumulasi Penyusutan	(2.979.868,00)
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir**	**(1.822.830.178.141,99)**

Penjelasan terkait mutasi/koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

(1) Saldo awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai (Rp1.676.533.053.693,34) merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 (Audited);
(2) Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai (Rp150.708.918.757,34) merupakan beban penyusutan tahun berjalan;
(3) Koreksi Pencatatan karena Pecah sebesar (Rp8.943.877.367,00) adalah Koreksi Pencatatan Pecah Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan koreksi pecah karena Inventarisasi;
(4) Koreksi Pencatatan karena Gabung sebesar (Rp4.370.576.014,00) adalah Koreksi Pencatatan Gabung Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan koreksi pecah karena Inventarisasi;
(5) Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp380.679.573.153,00) terdiri dari: Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan Kabupaten senilai (Rp379.876.298.607,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Akumulasi Penyusutan Jalan Lainnya senilai (Rp803.274.546,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Jalan Desa senilai (Rp916.667,00) pada Kantor Kecamatan Sukoharjo;
(6) Kurang Catat Akumulasi Penyusutan (Penambahan Inventarisasi) sebesar (Rp266.714.913,07) adalah Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
(7) Hibah Jalan Irigasi, dan Jaringan ke Pemerintah Desa sebesar (Rp4.691.602.144,00) terdiri dari:

No	Instansi Pemberi Hibah	Nilai	Instansi Penerima
1,	Dinas Lingkungan Hidup	(Rp20.010.900,00)	Pemerintah Desa
2,	Kecamatan Wonosobo	(Rp174.856.567,00)	Pemerintah Desa
3,	Kecamatan Kertek	(Rp585.159.349,00)	Pemerintah Desa
4,	Kecamatan Leksono	(Rp270.100.379,00)	Pemerintah Desa
5,	Kecamatan Garung	(Rp108.896.218,00)	Pemerintah Desa
6,	Kelurahan Kejajar	(Rp36.034.330,00)	Pemerintah Desa
7,	Kecamatan Mojotengah	(Rp355.959.016,00)	Pemerintah Desa
8,	Kecamatan Watumalang	(Rp244.979.685,00)	Pemerintah Desa
9,	Kecamatan Kalikajar	(Rp889.377.475,00)	Pemerintah Desa
10.	Kecamatan Kepil	(Rp487.300.949,00)	Pemerintah Desa

11.	Kecamatan Kaliwiro	(Rp349.515.866,00)	Pemerintah Desa
12.	Kecamatan Wadaslintang	(Rp1.142.929.615,00)	Pemerintah Desa
13.	Kelurahan Wadaslintang	(Rp5.481.795,00)	Pemerintah Desa
14.	Kecamatan Sukoharjo	(Rp21.000.000.00)	Pemerintah Desa
	Jumlah	**(4.691.602.144,00)**	

(8) Koreksi Pencatatan karena Pecah (Pengurangan Inventarisasi) sebesar (Rp387.098.448.161,27) adalah Koreksi Pencatatan Pecah Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
(9) Koreksi Pencatatan karena Gabung (Pengurangan Inventarisasi) sebesar (Rp6.829.563.093,00) adalah Koreksi Pencatatan Gabung Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
(10) Lebih catat Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp216.915.936,00) merupakan Jalan, Irigasi dan Jaringan koreksi kesalahan pencatatan beban penyusutan;
(11) Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigas dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.822.830.178.141,99) dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.141 Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.	Akm. Peny. Jalan dan Jembatan	(1.446.328.963.675,68)	(590.283.534.676,84)	(456.077.171.527,27)	(1.580.535.326.825,25)
2.	Akm. Peny. Bangunan Air Irigasi	(215.902.140.243,66)	(13.703.448.249,08)	(1.882.788.548,00)	(227.722.799.944,74)
3.	Akm. Penyusutan Instalasi	(11.584.020.384,00)	(2.237.483.766,00)	(616.206.161,00)	(13.205.297.989,00)
4.	Akm. Penyusutan Jaringan	(2.717.929.390,00)	(173.860.168,00)	(1.525.036.175,00)	(1.366.753.383,00)
	JUMLAH	**(1.676.533.053.693,34)**	**(606.398.326.859,92)**	**(460.101.202.411,27)**	**(1.822.830.178.141,99)**

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp980.232.874,81) mengalami penurunan sebesar (Rp458.220.963,00) atau 31,86% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.438.453.837,81), dengan rincian sebagai berikut.

(1)	**Saldo Awal**	**(1.438.453.837,81)**
(2)	**Mutasi Tambah**	**(654.598.902,00)**
	Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	(532.832.000,00)
	Kurang Catat Inventarisasi	(8.698.913,00)
	Beban Penyusutan	(113.067.989,00)
(3)	**Mutasi Kurang**	**(1.112.819.865,00)**
	Reklas Ke Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	(450.692.889,00)
	Penghapusan Inventarisasi	(57.276.848,00)
	Penghapusan Tahun Berjalan	(604.850.128,00)
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir**	**(980.232.874,81)**

Uraian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp1.438.453.837,81) merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 (Audited);

b) Kurang catat nilai akumulasi penyusutan tahun berjalan sebesar (Rp532.832.000,00) merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM,

c) Kurang catat nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp8.698.913,00) merupakan Akumulasi penyusutan Alat Musik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,

d) Penambahan Beban Penyusutan Akumulasi Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp113.067.989,00) terdiri dari:

   (1) Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp86.120.821,00) berupa Akumulasi Penyusutan Alat Musik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

   (2) Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp13.282.768,00) berupa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;

   (3) Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp13.664.400,00) berupa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi pada Dinas Lingkungan Hidup;

e) Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya ke Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain sebesar (Rp450.692.889,00) terdiri dari:

   (1) Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya ke Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain sebesar (Rp268.799.469,00) merupakan Akumulasi Penyusutan Alat Musik pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

   (2) Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya ke Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain sebesar (Rp181.893.420,00) merupakan Akumulasi Penyusutan Alat Musik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

f) Penghapusan Inventarisasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp57.276.848.00) merupakan penghapusan berdasarkan hasil inventarisasi BMD tahun 2024 yang terdiri dari:

   (1) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp50.553.889,00) berupa akumulasi penyusutan alat musik pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;

   (2) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp6.722.959,00) berupa akumulasi penyusutan alat musik pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

g) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp604.850.128,00) merupakan penghapusan yang dilakukan pada tahun berjalan yang terdiri dari:

   (1) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp42.131.900,00) berupa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi pada Dinas Lingkungan Hidup;

(2) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp562.718.228,00) berupa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;

h) Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp980.232.874,81) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.142 Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
1,	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(1.393.382.877,81)	(94.819.734,00)	(507.969.737,00)	(980.232.874,81)
2,	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(45.070.960,00)	(559.779.168,00)	(604.850.128,00)	-
	JUMLAH	**(1.438.453.837,81)**	**(654.598.902,00)**	**(1.112.819.865,00)**	**(980.232.874,81)**

C.1.d. DANA CADANGAN

Neraca Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa tidak terdapat saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.

C.1.e. ASET LAINNYA

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.530.461.925,41 mengalami penurunan sebesar Rp148.799.825.100,54 atau 70,08% dibandingkan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp212.330.287.025,95 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.143 Saldo Akhir Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	24.039.159,00	30.039.159,00	(6.000.000,00)	(19,97)
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	14.351.051.019,00	185.861.241.481,00	(171.510.190.462,00)	(92,28)
3.	Aset Tidak Berwujud	4.973.526.393,00	9.155.067.109,00	(4.181.540.716,00)	(45,67)
4.	Amortisasi	(2.157.124.124,00)	(5.210.636.461,00)	3.050.512.337,00	(58,60)
5.	Aset Lain-lain	64.642.771.600,74	65.780.164.904,66	(1.137.393.303,92)	(1,73)
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(18.303.802.122,33)	(46.243.876.166,71)	27.940.074.044,38	(60,42)
7.	*Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah	-	2.958.287.000,00	(2.958.287.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**63.530.461.925,41**	**212.330.287.025,95**	**(148.799.825.100,54)**	**(70,08)**

Penjelasan lebih lanjut atas rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

C.1.e.1) TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.039.159,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.000.000,00 atau 19,97% dibandingkan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.039.159,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.144 Saldo Akhir Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	SKTJM	Tahun Pengakuan	Jatuh Tempo	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
1.	SWG	SKTJM No.950/540/2012	2012	31 Desember 2021	20.039.159,00	-	6.000.000,00	20.039.159,00

No	Uraian	SKTJM	Tahun Pengakuan	Jatuh Tempo	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
2.	KSF	SKTJM No. 028/033/2020	2020	30 November 2020	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
		Jumlah			**30.039.159,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**24.039.159,00**

Penyajian saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.039.159,00 tersebut tidak terdapat tuntutan ganti rugi yang masih berada di kementerian negara/lembaga/daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN, tuntutan ganti rugi yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan, dan tidak terdapat barang/uang yang telah disita sebagai jaminan.

C.1.e.2) KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.351.051.019,00 mengalami penurunan sebesar Rp171.510.190.462,00 atau 92,28% dibandingkan saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp185.861.241.481,00 dengan rincian sebagai berikut.

	Uraian	(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Awal**	**185.861.241.481,00**
(2)	**Mutasi Tambah**	**10.154.339.858,00**
	Koreksi Saldo Awal (Kerja sama Pemanfaatan)	980.486.277,00
	Koreksi Saldo Awal (BGS/BSG)	9.173.853.581,00
(3)	**Mutasi Kurang**	**181.664.530.320,00**
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	10.864.240.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	170.800.290.320,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir**	**14.351.051.019,00**

Uraian saldo dan mutasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar Rp185.861.241.481,00 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Koreksi lebih atas kurang catat Kemitraan Dengan Pihak Ketiga berupa Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Taman Syailendra dengan PT. Global Dharma Asri (Perseroda) berdasarkan PKS nomor 028/0073/2023 dan nomor 001/GDA-PKS/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 sebesar Rp980.486.277,00;
3. Koreksi lebih atas kurang catat Kemitraan Dengan Pihak Ketiga berupa Bangun Guna Serah (BGS) Pasar Induk pada Disdagkop UKM sebesar Rp9.173.853.581,00;
4. Reklasifikasi atas Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yang memenuhi kriteria Aset Tetap Tanah karena perjanjian kerjasama telah berakhir pada Disdagkop UKM sebesar Rp10.864.240.000,00;
5. Reklasifikasi atas Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yang memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena perjanjian kerjasama telah berakhir pada Disdagkop UKM sebesar Rp170.800.290.320,00;

   Reklasifikasi kurang aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut didasarkan pada telaahan hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo status aset tetap kemitraan pihak ketiga tanggal 24 April 2025, bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengambil alih hak pengelolaan Tanah dan Bangunan dimaksud dari

PT, JGU (selaku kuasa PT, PTW) sebagaimana tertuang melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT, JGU Nomor : 511,2/07/2004 tanggal 14 Juni 2004 dan diubah dengan addendum perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT, JGU Nomor : 511,2/10/2005 tanggal 16 Agustus 2005, Ruang lingkup perjanjian tersebut khusus untuk melaksanakan pengalihan pengelolaan lahan dan bangunan seluas + 9,184 M2 dalam keadaan baik dengan harga kompensasi yang disepakati sebesar Rp6.600.000.000,00, (enam milyar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

(a) Kios di lantai dasar, lantai satu, lantai dua sejumlah 102 kios;
(b) Area parkir di lantai dasar seluas 5.348 m2;
(c) Fasilitas ruang genset, ME di lantai dasar seluas 264 m2;
(d) Perkantoran dan outdoor di lantai tiga seluas 1.976 m2,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang milik Daerah dapat diperoleh dari : barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Penambahan akun aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 (Taman Syailendra) Desa Dieng Kecamatan Kejajar dan Bangunan Diatasnya Nomor : 028/0073/2023 Nomor: 001/GDA-PKS11/2023 dengan PT Global Dharma Asri (Perseroda) yang berisi bahwa kedua belah pihak sepakat Aset Tetap Tanah dan Bangunan Taman Syailendra Dieng tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo telah ditetapkan menjadi aset khusus Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo dan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan tersebut oleh PT Global Dharma Asri (Perseroda) adalah 20 tahun dengan kewajiban menyerahkan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

6. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.351.051.019,00 berupa KSP Pengelolaan Taman Syailendra yang terdiri atas sebidang tanah sebesar Rp2.894.672.700,00, 23 unit gedung dan bangunan sebesar Rp11.278.367.587,00, dan delapan unit instalasi gardu listrik sebesar Rp178.010.732,00.

C.1.e.3) ASET TIDAK BERWUJUD

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada 31 Desember 2024 sebesar Rp4.973.526.393,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.155.067.109,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.181.540.716,00 atau 46%, Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan penjelasan sebagai berikut.

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	:	**9.155.067.109,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	:	**734.709.700,00**
	Belanja Modal		734.709.700,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	:	**4.916.250.416,00**
	Penghapusan Aset Lainnya		4.868.950.416,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap		47.300.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2024**	:	**4.973.526.393,00**

Uraian saldo dan mutasi Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar Rp9.155.067.109,00 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Perolehan Aset Tidak Berwujud dari Belanja Modal sebesar Rp734.709.700,00 berasal dari Belanja Modal Software dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya yang bersumber dari APBD senilai Rp641.909.700,00 dan senilai Rp92.800.000,00 bersumber dari BLUD;
3. Penghapusan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.868.950.416,00 merupakan penghapusan Software atau aplikasi yang sudah tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan laporan hasil inventarisasi BMD tahun 2024, penghapusan tersebut dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 000.2.4/2052/2024 tentang Penghapusan BMD Berupa Aset Tak Berwujud (Software) yang Sudah Tidak Dipakai Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi BMD Tahun 2024;
4. Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp47.300.000,00 berupa Belanja Modal Software ke Personal Komputer (Aset Tetap Peralatan dan Mesin) pada Puskesmas Mojotengah;
5. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.973.526.393,00 berupa 86 software dan aplikasi dengan masa manfaat 10 tahun, diantaranya aplikasi SIMPUS dan SIMKEU sebesar Rp522.411.490,00, SISMIOP sebesar Rp196.250.000,00, Sistem Informasi Pertanahan sebesar Rp149.725.000,00, SIMPEG sebesar Rp137.500.000,00, Sistem Informasi Analisis Media dan Pendapat Umum sebesar Rp126.373.500,00 dengan rincian pada Lampiran V.31. Penyajian nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.973.526.393,00 tidak terdapat penghentian dan pelepasan, tidak terdapat perubahan periode dan metode amortisasi, tidak terdapat software dan aplikasi yang dimiliki bersama dengan pihak lain, dan tidak terdapat indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang direncanakan.

C.1.e.4) AMORTISASI

Berdasarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus, Masa manfaat Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut.

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.01.	*Goodwill*	5
1.5.3.02.	Lisensi dan *franchise*	10
1.5.3.03.	Hak cipta	20
1.5.3.04.	Paten	20

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.05.	*Software*	10

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.157.124.124,00) mengalami penurunan sebesar Rp3.053.512.337,00 atau 58,60% dibandingkan saldo Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp5.210.636.461,00) dengan rincian sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Awal**	**(5.210.636.461,00)**
(2)	**Mutasi Tambah**	**(602.898.226,00)**
	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	(394.711.803,00)
	Kurang Catat Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(208.186.423,00)
(3)	**Mutasi Kurang**	**(3.656.410.563,00)**
	Penghapusan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.656.410.563,00)
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir**	**(2.157.124.124,00)**

Uraian saldo dan mutasi Amortisasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar (Rp5.210.636.461,00) merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun berjalan senilai (Rp394.711.803,00) berasal dari beban amortisasi tahun 2024;
3. Kurang Catat Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai (Rp208.186.423,00) merupakan kurang catat berdasarkan hasil Inventarisasi BMD tahun 2024;
4. Penghapusan Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai (Rp3.656.410.563,00) merupakan penghapusan Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun berjalan berupa Akumulasi Amortisasi Software sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 000.2.4/2052/2024 tentang Penghapusan BMD Berupa Aset Tak Berwujud (Software) yang Sudah Tidak Dipakai Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi BMD Tahun 2024;
5. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.157.124.124,00) berupa 86 software dan aplikasi dengan masa manfaat 10 tahun, diantaranya aplikasi SIMPUS dan SIMKEU sebesar (Rp522.411.490,00), SISMIOP sebesar (Rp196.250.000,00), Sistem Informasi Pertanahan sebesar (Rp119.780.000,00), SIMPEG sebesar (Rp69.895.833,00), Sistem Informasi Analisis Media dan Pendapat Umum sebesar (Rp64.239.863,00).

C.1.e.5) ASET LAIN LAIN

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.642.771.600,75, Aset Lain-lain tersebut terdiri dari Aset Rusak Berat/Usang dan Kas di Tabulin, Saldo akhir Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.642.771.600,75 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.780.164.904,66 mengalami penurunan sebesar Rp1.206.637.928,91 atau 1,83%, Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan rincian sebagai berikut.

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	:	**65.780.164.904,66**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	:	**226.053.177.297,44**
	Reklasifikasi dari aset tetap		121.977.975.222,07
	Mutasi Masuk antar SKPD		104.061.885.805,37
	Koreksi Kurang Catat		13.316.270,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	:	**227.190.570.601,35**
	Penghapusan Aset Lainnya		122.472.461.401,76
	Reklasifikasi ke Aset Tetap		638.493.798,23
	Mutasi Keluar antar SKPD		104.061.885.805,36
	Lebih Catat Aset Tetap		17.729.596,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2024**	:	**64.642.771.600,75**

Saldo akhir Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel V.145 Saldo Akhir Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 *(Rp)*	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Aset Rusak Berat/Usang	64.692.265.131,66	226.039.861.027,44	227.190.546.005,35	63.541.580.153,75
2.	Kas di Tabulin	1.087.899.773,00	13.316.270,00	24.596,00	1.101.191.447,00
	JUMLAH	**65.780.164.904,66**	**226.053.177.297,44**	**227.190.570.601,35**	**64.642.771.600,75**

a) Aset Rusak Berat/Usang

Aset yang kondisi fisik dan fungsinya tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar atau tidak dapat diperbaiki lagi. Aset rusak berat biasanya sudah tidak layak digunakan dan membutuhkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

Saldo Aset Rusak Berat/Usang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.541.580.153,75, mengalami penurunan sebesar Rp1.150.684.977,91 atau 1,78% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023, yakni sebesar Rp64.692.265.131,66, Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

	Uraian		*(Dalam Rupiah)*
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	:	**64.692.265.131,66**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	:	**226.039.861.027,43**
	Reklasifikasi dari aset tetap	:	121.977.975.222,06
	Mutasi Masuk antar SKPD (Debet)		104.061.885.805,37
	Koreksi Kurang Catat		-
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	:	**227.190.546.005,34**
	Penghapusan Aset Lainnya	:	122.472.461.401,74
	Koreksi Kesalahan Pencatatan		638.493.798,23
	Mutasi Masuk antar SKPD (Kredit)		104.061.885.805,37
	Lebih Catat Aset Tetap		17.705.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2024**	:	**63.541.580.153,75**

Uraian saldo dan mutasi Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Saldo awal sebesar Rp65.780.164.904,66 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp121.977.975.222,06 terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan

Mesin sebesar Rp86.094.357.124,73, reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.865.827.882,01, reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.017.790.215,33;

3) Mutasi masuk antar SKPD senilai Rp104.061.885.805,37 merupakan mutasi masuk Aset Rusak Berat dari OPD ke BPPKAD selaku Pengelola Barang;

4) Kurang catat atas penyajian Aset Rusak Berat yang merupakan hasil kegiatan inventarisasi BMD tahun 2024 sebesar Rp13.316.270,00;

5) Penghapusan Aset Rusak Berat sebesar Rp122.472.461.401,76 merupakan penghapusan Aset Rusak Berat pada tahun berjalan pada Pengguna Barang sebesar Rp118.652.296.050,43 (7 SK Bupati) dan pada Pengelola Barang sebesar Rp3.820.165.351,33 (6 SK Bupati);

6) Koreksi kesalahan pencatatan sebesar Rp638.493.798,23 merupakan koreksi pencatatan dari Aset Rusak Berat yang memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

7) Mutasi keluar antar SKPD senilai Rp104.061.885.805,37 merupakan mutasi masuk Aset Rusak Berat dari OPD ke BPPKAD selaku Pengelola Barang;

8) Lebih catat Aset Rusak Berat senilai Rp17.705.000,00 merupakan koreksi lebih catat terhadap Aset Rusak Berat berdasarkan hasil inventarisasi pada Dindikpora sebesar Rp8.665.000,00 dan Kantor Kelurahan Sapuran sebesar Rp9.040.000,00;

9) Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.541.580.153,75 dengan rincian yang dapat di lihat pada Lampiran V.32.

b) Kas di Tabulin

Tabungan sosial yang dilakukan oleh calon pengantin, ibu hamil dan ibu yang akan bersalin maupun masyarakat umum untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan persalinan serta pemeliharaan kesehatan selama nifas. Tabulin diatur dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sisa Dana Tabungan Bersalin di Kabupaten Wonosobo.

Tabel V.146 Saldo Akhir Aset Lain-lain- Kas di Tabulin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 *(Rp)*	Mutasi (Rp) Tambah	Kurang	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Kecamatan Wonosobo PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda) No Rek: 01.101.06168	110.787.469,00	1.761.480,00	-	112.548.949,00
2.	Kecamatan Kertek PT.BPR BKK Jateng (Perseroda) No Rek: 01.520.9000179	21.711.880,00	325.772,00	-	22.037.652,00
3.	Kecamatan Selomerto PD. BPR BKK Wonosobo No Rek 06.101.18255	126.276.260,00	2.009.044,00	-	128.285.304,00
4.	Kecamatan Leksono PD BPR BKK Leksono No Rek: 05.101.03127	47.211.278,00	736.767,00	-	47.948.045,00
5.	Kecamatan Watumalang PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda) Kc Watumalang No Rek: 04.101.03681	14.901.775,00	216.008,00	-	15.117.783,00
6.	Kecamatan Mojotengah	110.424.051,00	1.755.623,00	-	112.179.674,00

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 *(Rp)*	Mutasi (Rp) Tambah	Kurang	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
7.	PD BKK Kertek Cabang Mojotengah No Rek: 01.520.2002551 Kecamatan Garung	79.203.065,00	-	-	79.203.065,00
8.	Bank Jateng Wonosobo No Rek: 2-023-15199-8 Kecamatan Kejajar	89.485.229,00	1.418.134,00	-	90.903.363,00
9.	BPR BKK Wonosobo Kec. Kejajar No Rek: 03.101.03986 Kecamatan Kalikajar	62.219.204,00	391.553,00	-	62.610.757,00
10.	PD. BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.02.04.00140 Kecamatan Sapuran	180.378.842,00	1.533.770,00	-	181.912.612,00
11.	PD. BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.01.10.00325 Kecamatan Kepil	116.855.407,00	899.765,00	-	117.755.172,00
12.	PD. BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.02.19.00094 Kecamatan Kaliwiro	11.909.667,00	167.783,00	-	12.077.450,00
13.	PD. BPR BKK Wonosobo Kc Kaliwiro No Rek: 007.01.028492 Kecamatan Wadaslintang	105.438.588,00	2.079.503,00	-	107.518.091,00
14.	PD. BPR BKK Wonosobo No Rek: 008.01.009801 Kecamatan Sukoharjo	10.042.425,00	-	596,00	10.041.829,00
15.	BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.02.18.00141 Kecamatan Kalibawang	1.054.633,00	21.068,00	24.000,00	1.051.701,00
	BPR BKK Wonosobo No Rek: 09.101.01156 **Jumlah**	**1.087.899.773,00**	**13.316.270,00**	**24.596,00**	**1.101.191.447,00**

C.1.e.6) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp18.303.802.122,33), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp46.243.876.166,71), mengalami penurunan sebesar (Rp27.940.074.044,36) atau 60,42%, mutasi/koreksi selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**(46.243.876.166,71)**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah:**	**:**	**(196.352.303.659,28)**
	Reklaisifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat	:	(85.874.486.537,82)
	Mutasi antar SKPD (Masuk)	:	(100.093.531.690,73)
	Koreksi Saldo Awal-Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat		(164.044,31)
	Koreksi Saldo Awal-Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(10.154.339.858,00)
	Kurang catat beban penyusutan- Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(229.781.527,42)
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang:**	**:**	**(224.292.377.703,66)**
	Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan	:	(11.786.585,00)
	Penghapusan		(114.489.687.450,66)
	Mutasi antar SKPD (Keluar)	:	(100.093.531.690,73)
	Koreksi Kesalahan Pencatatan		(523.518.398,27)
	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) ke Aset Tetap		(9.173.853.581,00)
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2024**	**:**	**(18.303.802.122,33)**
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(1.210.267.804,42)
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat		(17.093.534.317,91)

Uraian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Saldo awal sebesar (Rp46.243.876.166,71) merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2) Koreksi tambah atas kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tahun 2024 sebesar (Rp10.154.339.858,00);
3) Kurang catat beban penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tahun 2024 sebesar (Rp229.781.527,42);
4) Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang memenuhi kriteria Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar (Rp85.874.486.537,82);
5) Koreksi tambah atas kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat tahun 2024 sebesar (Rp164.044,31);
6) Mutasi masuk antar akumulasi penyusutan aset rusak berat tahun 2024 sebesar (Rp100.093.531.691,73);
7) Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yang memenuhi kriteria Akumulasi Penyusutan Aset tetap tahun 2024 sebesar (Rp9.173.853.581,00);
8) Lebih catat Beban Penyusutan Aset Rusak Berat tahun 2024 sebesar (Rp11.786.582,00);
9) Penghapusan akumulasi penyusutan aset rusak berat tahun 2024 sebesar (Rp114.489.687.450,66) berdasarkan SK Bupati (13 SK Penghapusan);
10) Koreksi kurang atas kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat tahun 2024 sebesar (Rp523.518.398,27);
11) Mutasi keluar antar akumulasi penyusutan aset rusak berat tahun 2024 sebesar (Rp100.093.531.691,73);
12) Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar (Rp18.303.802.122,33) yaitu Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar (Rp17.093.534.317,91) dan Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar (Rp1.210.267.804,42).

Saldo akhir dan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel V.147 Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1,	Aset Rusak Berat/Usang	(46.243.876.166,71)	(185.968.182.273,86)	(215.118.524.122,66)	(17.093.534.317,91)
2,	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	(10.384.121.385,42)	(9.173.853.581,00	(1.210.267.804,42)
	JUMLAH	**(46.243.876.166,71)**	**(196.352.303.659,28)**	**(224.292.377.703,66)**	**(18.303.802.122,33)**

C.1.e.7) *TREASURY DEPOSIT FACILITY*

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 nihil mengalami penurunan sebesar Rp2.958.287.000,00 atau 100% dibandingkan saldo Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.958.287.000,00. Hal tersebut dikarenakan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF pada tahun 2023 telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Umum Daerah.

C.1.f. PROPERTI INVESTASI

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.373.179.531,00 mengalami penurunan sebesar Rp159.024.259,00 atau

0,22% dibandingkan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.532.203.790,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.148 Saldo Akhir Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Properti Investasi – Tanah	62.959.530.699,00	2.514.974.875,00	3.095.428.510,00	62.379.077.064,00
2.	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	14.577.359.861,00	2.775.501.564,00	2.730.004.145,00	14.622.857.280,00
3.	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(5.004.686.770,00)	(699.288.129,00)	(1.075.220.086,00)	(4.628.754.813,00)
	JUMLAH	**72.532.203.790,00**	**4.591.188.310,00**	**4.750.212.569,00**	**72.373.179.531,00**

Penyajian saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.373.179.531,00 tidak terdapat revaluasi, pengklasifikasian dilakukan menurut klasifikasi aset tetapnya, tidak terdapat kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan, dan tidak terdapat properti investasi yang disewa oleh pemerintah daerah lainnya. Uraian properti investasi disajikan sebagai berikut.

C.1.f.1) PROPERTI INVESTASI TANAH

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.379.077.064,00 mengalami penurunan sebesar Rp580.453.635,00 atau 0,92% dibandingkan saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.959.530.699,00, dengan rincian sebagai berikut.

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	:	**62.959.530.699,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	:	**2.514.974.875,00**
	Reklasifikasi Properti Investasi Tanah dari Aset Tetap Tanah		2.514.974.875,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	:	**3.095.428.510,00**
	Reklasifikasi Properti Investasi Tanah ke Aset Tetap Tanah		3.095.428.510,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2024**	:	**62.379.077.064,00**

Uraian saldo dan mutasi Properti Investasi Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar Rp62.959.530.699,00 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah yang memenuhi kriteria Properti Investasi Tanah tahun 2024 sebesar Rp2.514.974.875,00;
3. Reklasifikasi Properti Investasi Tanah yang memenuhi kriteria Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.095.428.510,00;
4. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.379.077.064,00 dengan rincian pada Lampiran V.33.

C.1.f.2) PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.622.857.280,00 mengalami kenaikan sebesar Rp45.497.419,00 atau 0,31% dibandingkan saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.577.359.861,00, dengan rincian sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**14.577.359.861,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**2.775.501.564,00**
	Reklasifikasi Properti Investasi Gedung dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan		2.775.501.564,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**2.730.004.145,00**
	Reklasifikasi Properti Investasi Gedung ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan		2.730.004.145,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2024**	**:**	**14.622.857.280,00**

Uraian saldo dan mutasi Properti Investasi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar Rp14.577.359.861,00 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria Properti Investasi Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp2.775.501.564,00;
3. Reklasifikasi Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.730.004.145,00 terdiri dari;
   (a) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 1.947.574.100,00
   (b) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp395.574.710,00
   (c) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp386.855.335,00
4. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.622.857.280,00 dengan rincian pada Lampiran V.34.

C.1.f.3) AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.628.754.813,00) mengalami penurunan sebesar Rp375.931.957,00 atau 7,51% dibandingkan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp5.004.686.770,00), dengan rincian sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**(5.004.686.770,00)**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**(699.288.129,00)**
	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dari Akum Peny Aset Tetap		(458.706.132,00)
	Beban Penyusutan		(240.581.997,00)
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**(1.075.220.086,00)**

	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan ke Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan		(1.075.220.086,00)
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2024**	**:**	**(4.628.754.813,00)**

Uraian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal sebesar (Rp5.004.686.770,00) merupakan saldo per 31 Desember 2023 (Audited);
2. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang memenuhi kriteria Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp458.706.132,00);
3. Beban Penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp240.581.997,00);
4. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp1.075.220.086,00);
5. Saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.628.754.813,00).

C.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp18.263.265.194,51 dan TA 2023 sebesar Rp19.645.205.129,90 dan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

C.2.a. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp18.263.265.194,51. Jika dibandingkan dengan saldo TA 2023 sebesar Rp19.645.205.129,90 mengalami penurunan sebesar Rp1.381.939.935,39 atau 7,03%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.149 di bawah ini:

Tabel V.149 Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		Per 31/12/2024	Per 31/12/2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	98.761.433,00	301.119.529,00	(202.358.096,00)	(67,20)
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.191.096.515,51	2.292.947.719,90	2.898.148.795,61	126,39
1.	Utang Belanja	12.969.407.246,00	17.051.137.881,00	(4.081.730.635,00)	(23,94)
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
	JUMLAH	**18.263.265.194,51**	**19.645.205.129,90**	**(1.381.939.935,39)**	**(7,03)**

C.2.a.1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2024 adalah Rp98.761.433,00. Jika dibandingkan dengan Saldo TA 2023 sebesar Rp301.119.529,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp202.358.096,00 atau 67,2% karena pada TA 2023 terdapat kurang catat utang PFK berupa JKN 1% di rekening penampungan. Dengan uraian sebagaimana Tabel V.150 sebagai berikut.

Tabel V.150 Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	301.119.529,00	301.119.529,00	97.132.433,00	97.132.433,00
2.	Utang PPN Pusat	-	-	1.629.000,00	1.629.000,00
	JUMLAH	**301.119.529,00**	**301.119.529,00**	**98.761.433,00**	**98.761.433,00**

a. Utang Iuran Jaminan Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.132.433,00 yang merupakan utang PFK berupa JKN 1% di rekening penampungan gaji pada Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1023001531 atas nama Penampungan Gaji. PFK dikelola oleh PPKD.
b. Utang PPN Pusat sebesar Rp1.629.000,00 yang merupakan utang pajak daerah pada Bendahara Pengeluaran BOP Kesetaraan pada UPTD SKB Wonosobo pada Disdikpora yang disetorkan pada tanggal 14 Februari 2025 ke kas daerah.

C.2.a.2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan bahwa saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.191.096.515,51. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.292.947.719,90, saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.898.148.795,61 atau 126,39%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2023 dengan penjelasan di bawah ini:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023	:	**2.292.947.719,90**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**2.165.497.711,57**
Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	:	2.165.497.711,57
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**5.063.646.507,18**
Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	:	5.063.646.507,18
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024	**:**	**5.191.096.515,51**

Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan perhitungan perjanjian atau ketetapan pendapatan. Saldo Pendapatan diterima dimuka per entitas Saldo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran V.35.

C.2.a.3) Utang Belanja

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan bahwa saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.969.407.246,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.051.137.881,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.081.730.635,00 atau 23,94%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2023 yang dapat dilihat pada Tabel V.151 di bawah ini.

Tabel V.151 Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		Per 31/12/2024	Per 31/12/2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Utang Belanja Pegawai	768.065.486,00	12.296.602.095,00	(11.528.536.609,00)	(93,75)
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.201.341.760,00	4.713.545.786,00	7.487.795.974,00	158,86

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		Per 31/12/2024	Per 31/12/2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
3.	Utang Belanja Bantuan Sosial	-	40.990.000,00	(40.990.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	**12.969.407.246,00**	**17.051.137.881,00**	**(4.081.730.635,00)**	**(23,94)**

Uraian Utang Belanja untuk masing-masing sub rincian obyek dan realisasi per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.36.

a) Utang Belanja Pegawai

Tabel V.151 di atas menunjukkan saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp768.065.486,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.296.602.095,00 mengalami penurunan yang signifikan yaitu Rp11.528.536.609,00 atau 93,75%. Mutasi/koreksi selama tahun berjalan dengan uraian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel V.152 berikut.

Tabel V.152 Saldo Utang Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.684.225,00	5.518.970.574,00	6.136.094.463,00	623.808.114,00
2.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.289.917.870,00	12.289.917.870,00	144.257.372,00	144.257.372,00
	JUMLAH	**12.296.602.095,00**	**17.808.888.444,00**	**6.280.351.835,00**	**768.065.486,00**

(1) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp623.808.114,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.684.225,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp617.123.889,00 atau 9.232,54%. Kenaikan terjadi dikarenakan pada TA 2023 belum tersedianya data utang belanja gaji dan tunjangan ASN sehingga tidak disajikan, sedangkan pada TA 2024 terdapat data utang belanja gaji dan tunjangan ASN sehingga disajikan adanya nilai utang belanja gaji dan tunjangan ASN.

(2) Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp144.257.372,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.289.917.870,00 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp12.145.660.498,00 atau 98,83%. Mutasi/koreksi selama tahun berjalan dengan uraian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel V.153 berikut.

Tabel V.153 Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Kore ksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	12.284.990.642,00	12.284.990.642,00	144.257.372,00	144.257.372,00
2.	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.927.228,00	4.927.228,00	-	-
	JUMLAH	**12.289.917.870,00**	**23.299.605.637,20**	**144.257.372,00**	**144.257.372,00**

(a) Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

Saldo Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp144.257.372,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.284.990.642,00 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp12.145.660.498,00 atau 98,83%, yang disebabkan pada TA 2023 masih terdapat utang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD KRT Setjonegoro atas pendapatan klaim pasien *covid-19* dan jasanya baru dapat dibagikan di TA 2024. Sementara di TA 2024 semua pendapatan langsung dibagikan jasa pelayanannya. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.154 dibawah ini.

Tabel V.154 Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet: Pembayaran Utang	Debet: Koreksi Lebih Catat Utang	Kredit: Utang Tahun Berjalan	Kredit: Koreksi Reklasifikasi Utang	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)=(3)-(4)-(5)+(6)+(7)
1	RSUD KRT Setjonegoro	12.193.985.923,00	12.193.985.923,00	-	144.257.372,00	-	144.257.372,00
2	Puskesmas Sukoharjo 2	91.004.719,00	91.004.719,00	-	-	-	-
	JUMLAH	**12.284.990.642,00**	**12.284.990.642,00**	-	144.257.372,00	**-**	144.257.372,00

Pada TA 2023, utang belanja jasa pelayanan RSUD KRT Setjonegoro terdiri dari dua komponen utama:

		(Dalam Rupiah)
i.	40% dari pendapatan yang harus dibagikan sebagai jasa pelayanan sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi di RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo	12.110.490.008,00
ii.	Kewajiban pembayaran premi BPJS Kesehatan 4%	83.495.915,00
		12.193.985.923,00

Pada TA 2024, terjadi perubahan kebijakan dimana Perbup Wonosobo Nomor 24 Tahun 2017 tersebut dicabut dan diganti dengan Perbup Wonosobo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Remunerasi pada BLUD RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo. Perubahan regulasi ini menghapus mekanisme pembagian 40% pendapatan untuk jasa pelayanan, sehingga

seluruh pendapatan langsung dibagikan tanpa menimbulkan utang jasa pelayanan.

Akibat perubahan ini, utang belanja jasa pelayanan TA 2024 hanya terdiri dari kewajiban pembayaran premi BPJS Kesehatan 4% sebesar Rp144.257.372,00, tanpa ada komponen utang dari pembagian jasa pelayanan seperti tahun sebelumnya. Perubahan kebijakan ini menyebabkan penurunan signifikan utang belanja jasa pelayanan di RSUD KRT Setjonegoro sebesar 98,82% atau Rp12.049.728.551,00 dibandingkan tahun 2023.

(b) Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Saldo Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan per 31 Desember 2024 adalah nihil, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.927.228,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp4.927.228,00 atau 100,00%.

b) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.201.341.760,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.487.795.974,00 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 158,86% dikarenakan adanyan mutasi/koreksi sebagaimana Tabel V.155 berikut.

Tabel V.155 Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Barang	2.348.397.397,00	2.322.987.247,00	9.187.490.115,00	9.212.900.265,00
2.	Utang Belanja Jasa	2.016.799.009,00	1.963.890.388,00	2.391.000.267,00	2.443.908.888,00
3.	Utang Belanja Pemeliharaan	345.197.880,00	346.372.880,00	541.767.607,00	540.592.607,00
4.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	1.315.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00
5.	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.836.500,00	1.836.500,00	-	-
	JUMLAH	**4.713.545.786,00**	**4.636.402.015,00**	**12.124.197.989,00**	**12.201.341.760,00**

(1) Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.212.900.265,00. Jika dibandingkan dengan saldo utang belanja barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.348.397.397,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.864.502.868,00 atau 74,51% yang berasal dari mutasi/koreksi selama TA 2024, dengan uraian sebagaimana tabel V.156 dibawah ini.

Tabel V.156 Saldo Utang Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	UBBPH-Bahan-Bahan Kimia	691.563.624,00	691.563.624,00	2.005.879.976,00	2.005.879.976,00
2.	UBBPH-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.542.858,00	19.542.858,00	49.870.544,00	49.870.544,00
3.	UBBPH -Bahan-Isi Tabung Gas	109.010.890,00	109.010.890,00	142.308.250,00	142.308.250,00

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
4.	UBBPH- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.370.588,00	76.370.588,00	128.259.087,00	128.259.087,00
5.	UBBPH - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13.667.463,00	13.667.463,00	38.086.625,00	38.086.625,00
6.	UBBPH - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	38.398.718,00	38.398.718,00	67.324.157,00	67.324.157,00
7.	UBBPH-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	89.196.397,00	89.196.397,00	37.232.700,00	37.232.700,00
8.	UBBPH -Obat-Obatan- Obat-Obatan	1.015.662.764,00	1.015.662.764,00	6.390.073.154,00	6.390.073.154,00
9.	UBBPH -Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.410.150,00	-	-	25.410.150,00
10.	UBBPH- Natura dan Pakan - Natura	235.548.945,00	235.548.945,00	328.455.622,00	328.455.622,00
11.	UBBPH-Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-
12.	UBBPH -Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	31.385.000,00	31.385.000,00	-	-
	JUMLAH	**2.348.397.397,00**	**2.322.987.247,00**	**9.187.490.115,00**	**9.212.900.265,00**

*) UBBPH : Utang Belanja Barang Pakai Habis

(a) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.005.879.976,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp691.563.624,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp691.563.624,00, serta mutasi dan koreksi bertambah Rp2.005.879.976,00 dengan uraian tabel V.157 dibawah ini:

Tabel V.157 Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet Pembayaran Utang	Debet Koreksi Lebih Catat Utang	Kredit Utang Tahun Berjalan	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)-(5))+(6)
1.	RSUD KRT Setjonegoro	679.187.124,00	313.879.095,00	-	2.005.879.976,00	2.005.879.976,00
2.	Puskesmas Selomerto 1	12.376.500,00	12.376.500,00-	-	-	-
	JUMLAH	**691.563.624,00**	**326.255.595,00**	**-**	**2.005.879.976,00**	**2.371.188.005,00**

(b) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.870.544,00 berada di RSUD KRT Setjonegoro. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.542.858,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp19.542.858,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp49.870.544,00.

(c) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas per 31 Desember 2024 sebesar Rp142.308.250,00 nilai tersebut berada di RSUD KRT Setjonegoro. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp109.010.890,00 mengalami kenaikan Rp33.297.360,00 dikarenakan adanya

mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp109.010.890,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp142.308.250,00.

(d) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp128.259.087 yang berada di RSUD KRT Setjonegoro yang berasal dari utang tahun berjalan. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp76.370.588,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp76.370.588,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp128.259.087,00.

(e) Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.086.625,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.667.463,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp13.667.463,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp38.398.718,00.

(f) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.324.157,00 pada RSUD KRT Setjonegoro. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.398.718,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp38.398.718,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp67.324.157,00.

(g) Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2023 adalah Rp89.196.397,00 yang berada di RSUD KRT Setjonegoro. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.232.700,00 mengalami penurunan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp89.196.397,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp37.232.700,00.

(h) Utang Belanja Barang Pakai Habis - Obat-Obatan-Obat-Obatan

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis - Obat-Obatan - Obat-Obatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.390.073.154,00 pada RSUD KRT Setjonegoro. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.015.662.764,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp1.015.662.764,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp6.390.073.154,00.

(i) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.410.150,00, yang merupakan retensi/jaminan pemeliharaan kegiatan pembangunan tambahan

sumur kapasitas 1,5L/Detik Desa Sigedang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo TA 2019 yang oleh penyedia yaitu CV. JS dan sampai dengan 31 Desember 2024 belum dilakukan klaim/penagihan atas retensi tersebut. Tidak terdapat pengurangan/penambahan utas belanja barang pakai habis-barang dijual/diserahkan kepada Masyarakat.

(j) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura per 31 Desember 2024 sebesar Rp328.455.622,00 pada RSUD KRT Setjonegoro. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp235.548.945,00 mengalami kenaikan dikarenakan mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp235.548.945,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp328.455.622,00.

(k) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat per 31 Desember 2023 terdapat saldo sebesar Rp2.640.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 adalah nihil karena telah dibayar pada tahun 2024.

(l) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

Saldo Utang Belanja Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp31.385.000,00 sedangkan per 31 Desember 2024 adalah nihil karena telah dibayarkan pada tahun 2024.

(2) Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.443.908.888,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.016.799.009,00 mengalami kenaikan dikarenakan dari mutasi/koreksi selama TA 2024 dengan uraian sebagaimana tabel V.158 dibawah ini.

Tabel V.158 Saldo Utang Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	UBJK -Jasa Tenaga Kesehatan	74.204.877,00	65.174.000,00	32.688.500,00	41.719.377,00
2.	UBJK –Jasa Tenaga Laboratorium	430.974.950,00	430.974.950,00	327.926.740,00	327.926.740,00
3.	UBJK -Jasa Tenaga Ahli	20.979.000,00	20.979.000,00	41.269.800,00	41.269.800,00
4.	UBJK-Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	26.651.655,00	26.651.655,00
5.	UJBK-Jasa Tenaga Juru Masak	-	-	42.900.000,00	42.900.000,00
6.	UBJK-Jasa Kalibrasi	-	-	198.578.094,00	198.578.094,00
7.	UBJK -Jasa Pengolahan Sampah	6.724.503,00	6.724.503,00	6.817.854,00	6.817.854,00
8.	UBJK –Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.445.000,00	2.445.000,00	-	-
9.	UBJK -Tagihan Telepon	45.250.698,00	45.731.775,00	43.414.711,00	42.933.634,00
10.	UBJK -Tagihan Air	78.225.080,00	79.852.015,00	80.880.527,00	79.253.592,00
11.	UBJK -Tagihan Listrik	237.922.976,00	239.400.889,00	322.988.718,00	321.510.805,00
12.	UBJK -Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	180.000,00	180.000,00	455.000,00	455.000,00
13.	UBJK - Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	33.307.074,00	33.845.149,00	36.604.793,00	36.066.718,00
14.	UBJK –Paket/Pengiriman	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
15.	UBJK -Rekening Penerangan Jalan Umum	967.105.109,00	967.105.109,00	976.547.291,00	976.547.291,00
16.	UBJK -Pengolahan Air Limbah	70.230.167,00	70.230.167,00	50.750.970,00	50.750.970,00
17.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	1.118.256,00	1.237.728,00	119.472,00
18.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	42.840,00	42.840,00	579.304,00	579.304,00
19.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	46.735,00	46.735,00	724.132,00	724.132,00

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
20.	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	181.228.200,00	181.228.200,00
21.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	-	-	18.731.250,00	18.731.250,00
22.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	49.120.000,00	-	-	49.120.000,00
	JUMLAH	**2.016.799.009,00**	**1.963.890.388,00**	**2.391.000.267,00**	**2.443.908.888,00**

*) UBJK : Utang Belanja Jasa Kantor

(a) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.719.377,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp74.204.877,00 mengalami penurunan dikarenakan dari mutasi/koreksi dengan rincian sebagaimana tabel V.159 berikut.

Tabel V.159 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Kredit Utang Tahun Berjalan	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Pusk Wonosobo 1	19.019.000,00	19.019.000,00	-	11.786.000,00	11.786.000,00
2.	Pusk Selomerto 1	9.685.000,00	9.685.000,00	-	8.937.500,00	8.937.500,00
3.	Pusk Sukoharjo 2	9.030.877,00	-	-	-	9.030.877,00
4.	Pusk Kejajar 2	-	-	-	11.590.000,00	11.590.000,00
5.	RSUD KRT Setjonegoro	1.700.000,00	1.700.000,00	-	375.000,00	375.000,00
6.	Pusk Kalikajar 2	34.770.000,00	34.770.000,00	-	-	-
	JUMLAH	**74.204.877,00**	**65.174.000,00**	**-**	**32.688.500,00**	**41.719.377,00**

(b) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Laboratorium per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp327.926.740,00 yang berada di RSUD KRT Setjonegoro. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp430.974.950,00, mengalami penurunan dikarenakan mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp430.974.950,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp327.926.740,00.

(c) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli TA 2024 sebesar Rp41.269.800,00 berada di RSUD KRT Setjonegoro. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.979.000,00 mengalami kenaikan dikareanakan mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp41.269.800,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp41.269.800,00.

(d) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.651.655,00 yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro. Saldo utang belanja jasa kantor-jasa tenaga kebersihan per 31 Desember TA 2024 sebesar Nihil.

(e) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masal

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.900.000,00 yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro. Saldo belanja jasa kantor-jasa tenaga juru masal per 31 Desember 2023 sebesar Nihil.

(f) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan per 31 Desember 2024 sebesar Rp198.578.094,00 yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro. Saldo belanja jasa kantor-jasa kalibrasi per 31 Desember 2023 sebesar Nihil.

(g) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.817.854,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.724.503,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi/koreksi dengan rincian sebagaimana Tabel V.160 berikut.

Tabel V.160 Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per 31 Desember TA 2024 dan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet		Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Pusk Kertek 1	-	-	-	1.883.736,00	1.883.736,00
2.	Pusk Kertek 2	3.402.048,00	3.402.048,00	-	1.110.933,00	1.110.933,00
3.	Pusk Leksono 2	832.500,00	832.500,00	-	1.004.400,00	1.004.400,00
4.	Pusk Wadaslintang 1	2.489.955,00	2.489.955,00	-	2.818.785,00	2.818.785,00
	JUMLAH	**6.724.503,00**	**6.724.503,00**	**-**	**6.817.854,00**	**6.817.854,00**

(h) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan TA 2024 sebesar nihil, dengan perhitungan sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**2.445.000,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**2.445.000,00**
Pembayaran Utang	:	2.445.000,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**-**
Utang Tahun Berjalan	:	-
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**-**

(i) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.933.634,00. Jika dibandingkan dengan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.250.698,00 mengalami penurunan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp45.731.775,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp43.414.711,00. Rincian mutasi/koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Tahun Anggaran 2024 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.37.

(j) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.253.592,00. Jika dibandingkan dengan saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon per 31 Desember 2023 sebesar Rp78.225.080,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp79.852.015,00, serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp80.880.527,00. Rincian mutasi/koreksi Tahun Anggaran 2024 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.38.

(k) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik per 31 Desember 2024 sebesar Rp321.510.805,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 237.922.976,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan

koreksi berkurang sebesar Rp239.400.889,00 serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp322.988.718,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.39.

(l) Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah per 31 Desember 2024 sebesar Rp455.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp180.000,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp180.000,00 serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp455.00,00. Rincian Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah per entitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.161 di bawah ini:

Tabel V.161 Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)			Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Debet		Kredit	
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Pusk. Wonosobo 2	90.000,00	90.000,00	-	280.000,00	280.000,00
2.	Kel. Leksono	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00
3.	Kel. Sambek	-	-	-	85.000,00	85.000,00
	JUMLAH	**180.000,00**	**180.000,00**	**-**	**455.000,00**	**455.000,00**

(m) Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.066.718,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.307.074,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi berkurang sebesar Rp33.845.149,00 serta mutasi dan koreksi bertambah sebesar Rp36.604.793,00. Rincian Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan entitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.40.

(n) Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.000,00 berada di RSUD KRT Setjonegoro. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.000,00 mengalami penurunan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**40.000,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**40.000,00**
Pembayaran Utang	:	40.000,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**25.000,00**
Utang Tahun Berjalan	:	25.000,00
	:	
Saldo Per 31 Desember 2024	:	**25.000,00**

(o) Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum TA 2024 sebesar Rp976.547.291,00 berada di BPPKAD. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp967.105.109,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**967.105.109,00**

Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**967.105.109,00**
Pembayaran Utang	:	967.105.109,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**976.547.291,00**
Utang Tahun Berjalan	:	976.547.291,00
Saldo Per 31 Desember 2024	**:**	**976.547.291,00**

(p) Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah per 31 Desember 2024 Rp50.750.970,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp70.230.167,00 mengalami penurunan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi. Berikut uraian saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.750.970,00 sebagai berikut.

Tabel V.162 Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet		Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Pusk. Selomerto 1	12.482.267,00	12.482.267,00	-	-	-
2.	RSUD KRT Setjonegoro	57.747.900,00	57.747.900,00	-	50.750.970,00	50.750.970,00
	JUMLAH	**70.230.167,00**	**70.230.167,00**	**-**	**50.750.970,00**	**50.750.970,00**

(q) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Saldo Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN per 31 Desember 2024 terdapat saldo sebesar Rp119.472,00, sedangkan per 31 Desember 2023 adalah nihil, dengan rincian sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2023	:	**-**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**1.118.256,00**
Pembayaran Utang	:	1.118.256,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**1.237.728,00**
Utang Tahun Berjalan	:	1.237.728,00
Saldo Per 31 Desember 2024	**:**	**119.472,00**

(r) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN TA 2024 sebesar Rp579.304,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.840,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi. Berikut uraian saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp579.304,00 sebagai berikut.

Tabel V.163 Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet		Kredit	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Kel. Jaraksari	22.680,00	22.680,00	-	-	-
2.	Kel. Rojoimo	20.160,00	20.160,00	-	40.320,00	40.320,00
3.	Kel. Tawangsari	-	-	-	145.151,00	145.151,00
4.	Kel. Wonosobo Barat	-	-	-	393.833,00	393.833,00
	JUMLAH	**42.840,00**	**42.840,00**	**-**	**579.304,00**	**579.304,00**

(s) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Saldo Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN TA 2024 sebesar Rp724.132,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.181 berikut.. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.735,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi. Berikut uraian saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp724.132,00 sebagai berikut.

Tabel V.164 Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2023	Mutasi/Koreksi (Rp)			Saldo Per 31/12/2024
			Debet		Kredit	
		(Rp)	Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Kel. Jaraksari	21.535,00	21.535,00	-	-	-
2.	Kel. Rojoimo	25.200,00	25.200,00	-	50.400,00	50.400,00
3.	Kel. Wonosobo Barat	-	-	-	492.292,00	492.292,00
4.	Kel. Tawangsari	-	-	-	181.440,00	181.440,00
	JUMLAH	**46.735,00**	**46.735,00**	**-**	**724.132,00**	**724.132,00**

(t) Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya

Saldo Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp181.228.200,00 yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro. Nilai tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar nihil.

(u) Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang

Saldo Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.731.250,00 yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro. Nilai tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar nihil.

(v) Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus

Saldo Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.120.000,00 pada DPUPR yang merupakan saldo utang tahun 2014 berupa Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kejiwan - Gondang - Kuripan CV. DR pada DPUPR. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 saldo tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan (stagnan).

(3) Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 adalah Rp540.592.607,00 yang seluruhnya berada pada RSUD KRT Setjonegoro. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp345.197.880,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi/koreksi selama TA 2024. Berikut uraian saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp540.592.607,00 sebagai berikut.

Tabel V.165 Saldo Utang Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo 31/12/2023 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo 31/12/2024 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus	6.412.750,00	6.412.750,00	2.250.000,00	2.250.000,00
2.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	2.350.000,00	2.350.000,00
3.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	-	-	30.070.257,00	30.070.257,00
4.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer	-	-	7.432.350,00	7.432.350,00
5.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum	337.610.130,00	337.610.130,00	-	
6.	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan	-	1.175.000,00	499.665.000,00	498.490.000,00
7.	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	1.175.000,00	1.175.000,00	-	-
	JUMLAH	**345.197.880,00**	**346.372.880,00**	**541.767.607,00**	**540.592.607,00**

(4) Utang Belanja Perjalanan Dinas

Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri per 31 Desember 2024 merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp3.940.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.315.000,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi dan koreksi. Berikut uraian saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.940.000,00 sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**1.315.000,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**1.315.000,00**
Pembayaran Utang	:	1.315.000,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**3.940.000,00**
Utang Tahun Berjalan	:	3.940.000,00
Saldo Per 31 Desember 2024	**:**	**3.940.000,00**

Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 berada pada RSUD KRT Setjonegoro.

(5) Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Saldo Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat berupa Utang Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.836.500,00 yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro sedangkan per 31 Desember 2024 bersaldo Nihil karena telah dibayar pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**1.836.500,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**1.836.500,00**
Pembayaran Utang	:	1.836.500,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**-**
Utang Tahun Berjalan	:	-
Saldo Per 31 Desember 2024	**:**	**-**

c) Utang Belanja Bantuan Sosial

Saldo Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 adalah nihil, sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.990.000,00. Saldo Utang Belanja Bantuan Sosial tersebut merupakan Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu pada RSUD KRT Setjonegoro yang telah dibayarkan pada tahun 2024,. dengan rincian sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**40.990.000,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**40.990.000,00**
Pembayaran Utang	:	40.990.000,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**-**
Utang Tahun Berjalan	:	-
Saldo Per 31 Desember 2024	**:**	**-**

C.2.a.4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar nihil.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Kelebihan Pembayaran BPHTB-Pemindahan Hak yang diklaim oleh Wajib Pajak di BPPKAD Kabupaten Wonosobo. Berikut uraian saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.000.000,00 sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**-**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	
Pembayaran Utang	:	-
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**4.000.000,00**
Utang Tahun Berjalan	:	4.000.000,00
Saldo Per 31 Desember 2024	**:**	**4.000.000,00**

C.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.874.063.113.219,34. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.971.105.796.292,61 mengalami penurunan sebesar Rp97.042.683.073,27 atau 2,44%, dengan rincian sebagai berikut.

Saldo awal Ekuitas	**3.971.105.796.292,61**
Surplus/ (Defisit) - LO TA 2024	(113.757.975.994,46)
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar atas Ekuitas Awal TA 2024	16.715.292.921,19
Saldo akhir Ekuitas	**3.874.063.113.219,34**

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Saldo Ekuitas dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan poin F. Laporan Perubahan Ekuitas.

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Wonosobo disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Penjelasan lebih lanjut atas LO TA 2024 untuk masing-masing pos dapat dilihat sebagaimana Tabel V.166 di bawah ini:

Tabel V.166 Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan – LO	1.881.426.496.828,97	1.915.174.743.853,02	(33.748.247.024,05)	(1,76)
2.	Beban	1.945.188.563.760,84	1.704.863.383.166,07	240.325.180.594,78	14,10
3.	**Jumlah Surplus/Defisit Dari Operasi (1-2)**	**(63.762.066.931,87)**	**210.311.360.686,95**	**(274.073.427.618,83)**	**(130,32)**
4.	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(49.770.696.577,59)	(156.127.252.854,65)	106.356.556.277,07	(68,12)
5.	**Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (3+4)**	**(113.532.763.509,46)**	**54.184.107.832,30**	**(167.716.871.341,76)**	**(309,53)**
6.	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	(225.212.485,00)	-	(225.212.485,00)	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO (5+6)	**(113.757.975.994,46)**	**54.184.107.832,30**	**(167.942.083.826,76)**	**(309,95)**

D.1. PENDAPATAN - LO

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan – LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan – LO Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp1.881.426.496.828,97. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.748.247.024,05 atau 1,76% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.915.174.743.853,02. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.167 berikut.

Tabel V.167 Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	291.095.225.465,56	289.222.596.997,77	1.872.628.467,79	0,65
2.	Pendapatan Transfer - LO	1.537.538.795.507,00	1.493.657.436.038,00	43.881.359.469,00	2,94
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah- LO	52.792.475.856,41	132.294.710.817,25	(79.502.234.960,84)	(60,09)
	JUMLAH	**1.881.426.496.828,97**	**1.915.174.743.853,02**	**(33.748.247.024,05)**	**(1,76)**

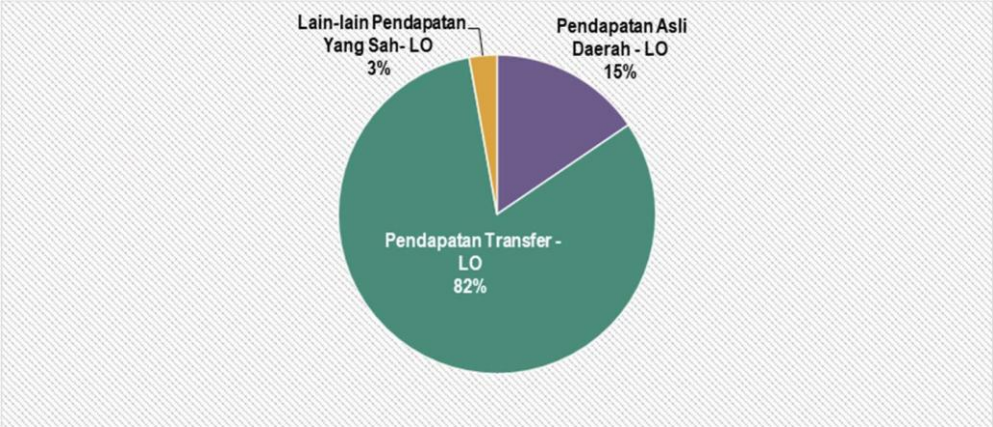

Gambar V.13 Komposisi Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo T A 2024

D.1.a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp291.095.225.465,56. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.872.628.467,79 atau 0,65% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp289.222.596.997,77. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.168 berikut.

Tabel V.168 Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	78.263.388.578,60	65.749.980.543,31	12.513.408.035,29	19,03
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	196.218.857.867,13	12.720.930.203,33	183.497.927.663,80	1.442,49
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	9.696.030.143,17	44.738.403.371,95	(35.042.373.228,78)	(78,33)
4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	6.916.948.876,66	166.013.282.879,18	(159.096.334.002,53)	(95,83)
	JUMLAH	**291.095.225.465,56**	**289.222.596.997,77**	**1.872.628.467,79**	**0,65**

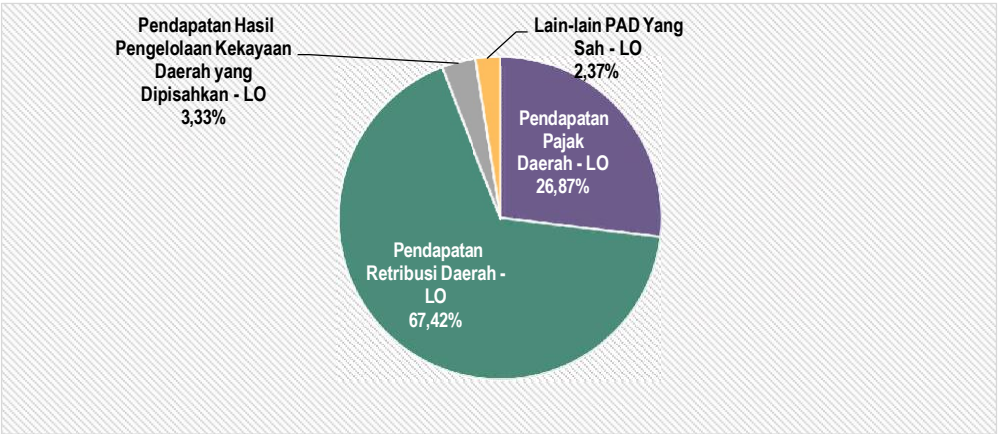

Gambar V.14 Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2024

D.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp78.263.388.578,60. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.513.408.035,29 atau 19,03% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp65.749.980.543,31, dengan rincian sebagaimana Tabel V.169 berikut.

Tabel V.169 Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pajak Hotel - LO	2.377.984.127,00	1.501.706.866,00	876.277.261,00	58,35
2.	Pajak Restoran - LO	11.867.582.581,00	8.074.397.485,00	3.793.185.096,00	46,98
3.	Pajak Hiburan - LO	261.366.277,00	133.356.609,00	128.009.668,00	95,99
4.	Pajak Reklame - LO	900.010.846,60	878.331.733,31	21.679.113,29	2,47
5.	Pajak Penerangan Jalan - LO	21.017.979.615,00	18.051.051.369,00	2.966.928.246,00	16,44
6.	Pajak Parkir - LO	120.965.100,00	100.821.000,00	20.144.100,00	19,98
7.	Pajak Air Tanah - LO	342.629.160,00	329.688.980,00	12.940.180,00	3,92
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	30.798.621.928,00	26.702.488.056,00	4.096.133.872,00	15,34
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	10.576.248.944,00	9.978.138.445,00	598.110.499,00	5,99
	JUMLAH	**78.263.388.578,60**	**65.749.980.543,31**	**12.513.408.035,29**	**19,03**

Pada Tabel V.169 diatas, tidak terdapat realisasi Pajak Mineral Bukan Logam – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 karena berdasarkan data Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, IUP di Kabupaten Wonosobo yang telah diterbitkan masih dalam tahap eksplorasi sehingga tidak terdapat laporan produksi pada aplikasi SILUP maupun laporan produksi secara berkala dari pemegang IUP.

Perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah – LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	:	78.263.388.578,60
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	:	(75.756.036.031,00)
Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)	:	(13.873.406.014,00)
Piutang Pajak Tahun 2023 (Neraca)	:	11.359.268.270,00
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	:	93.867.057,98
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2023 (Neraca)	:	(91.081.861,58)
Selisih	:	**(4.000.000,00)**
Penjelasan Selisih		
Utang Kelebihan Pembayaran BPHTB-Pemindahan Hak	:	(4.000.000,00)
Jumlah		**(4.000.000,00)**

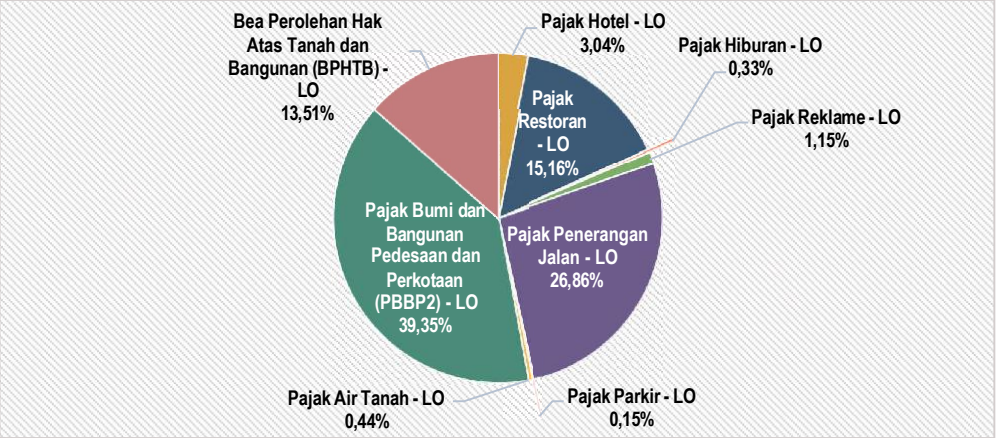

Gambar V.15 Komposisi Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2024

a) Pajak Hotel - LO

Pajak Hotel – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp2.377.984.127,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp876.277.261,00 atau 58,35% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.501.706.866,00. Perbedaan antara Pendapatan Pajak Hotel – LO dengan Pendapatan Pajak Hotel - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Hotel _LO Tahun 2024	:	2.377.984.127,00
Pendapatan Pajak Hotel_LRA Tahun 2024	:	(2.003.617.185,00)
Selisih	:	**374.366.942,00**
Penjelasan Selisih		
Piutang atas SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Pokok TA 2024	:	45.830.000,00
Piutang atas SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) TA 2024	:	328.536.942,00
Jumlah	:	**374.366.942,00**

b) Pajak Restoran - LO

Pajak Restoran – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp11.867.582.581,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.793.185.096,00 atau 46,98% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp8.074.397.485,00. Perbedaan antara Pendapatan Pajak Restoran – LO dengan Pendapatan Pajak Restoran - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Restoran _LO Tahun 2024	:	11.867.582.581,00
Pendapatan Pajak Restoran_LRA Tahun 2024	:	(11.544.317.853,00)
Selisih	:	**323.264.728,00**
Penjelasan Selisih		
Pelunasan Piutang Tahun-tahun sebelumnya	:	(23.777.285,00)
Piutang atas SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Pokok TA 2024	:	58.824.100,00
Piutang atas SPTPD TA 2024	:	288.217.913,00
Jumlah	:	**323.264.728,00**

c) Pajak Hiburan - LO

Pajak Hiburan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp261.366.277,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp128.009.668,00 atau 95,99% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp133.356.609,00. Perbedaan antara Pendapatan Pajak Hiburan – LO dengan Pendapatan Pajak Hiburan - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Hiburan _LO Tahun 2024	:	261.366.277,00
Pendapatan Pajak Hiburan_LRA Tahun 2024	:	(261.166.277,00)
Selisih	:	**200.000,00**
Penjelasan Selisih		
Piutang atas SPTPD TA 2024	:	200.000,00
Jumlah	:	**200.000,00**

d) Pajak Reklame - LO

Pajak Reklame – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp900.010.846,60. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.679.113,29 atau 2,47% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp878.331.733,31. Pajak Reklame – LO dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selama TA 2024 dikurangi pendapatan diterima di muka TA 2024 ditambah pendapatan diterima di muka tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam rupiah)
Ketetapan Selama TA 2024	902.796.043,00
Pendapatan Diterima Di muka TA 2024	(93.867.057,98)
Pendapatan Diterima Di muka TA 2023	91.081.861,58
	900.010.846,60

Perbedaan antara Pendapatan Pajak Reklame – LO dengan Pendapatan Pajak Reklame - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Reklame _LO Tahun 2024	:	900.010.846,60
Pendapatan Pajak Reklame_LRA Tahun 2024	:	(908.210.178,00)
Selisih	:	**(8.199.331,40)**
Penjelasan Selisih		
Pelunasan Piutang Tahun-tahun sebelumnya	:	(8.804.750,00)
Piutang atas SKPD TA 2024	:	3.390.615,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	:	(93.867.057,98)
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 (Neraca)	:	91.081.861,58
Jumlah	:	**(8.199.331,40)**

e) Pajak Penerangan Jalan - LO

Pajak Penerangan Jalan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp21.017.979.615,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.966.928.246,00 atau 16,44% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp18.051.051.369,00. Pajak Penerangan Jalan – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2024 sebesar Rp21.017.979.615,00. Tidak terdapat Perbedaan antara Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LO dengan Pendapatan Pajak Reklame - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dengan penjelasan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan_LO Tahun 2024	:	21.017.979.615,00
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan_LRA Tahun 2024	:	21.017.979.615,00
Selisih	:	**-**

f) Pajak Parkir - LO

Pajak Parkir – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp120.965.100,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.144.100,00 atau 19,98% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp100.821.000,00. Pajak Parkir – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2024 sebesar Rp120.965.100,00. Perbedaan antara Pendapatan Pajak Parkir – LO dengan Pendapatan Pajak Parkir - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Parkir _LO Tahun 2024	:	120.965.100,00
Pendapatan Pajak Parkir_LRA Tahun 2024	:	(120.085.100,00)
Selisih	:	**880.000,00**
Penjelasan Selisih		
Piutang atas SPTPD TA 2024	:	880.000,00
	:	**880.000,00**

g) Pajak Air Tanah - LO

Pajak Air Tanah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp342.629.160,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.940.180,00 atau 3,92% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp329.688.980,00. Pajak Air Tanah – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selama TA 2024 sebesar Rp342.629.160,00. Perbedaan antara Pendapatan Pajak Air Tanah – LO dengan Pendapatan Pajak Air Tanah - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Air Tanah _LO Tahun 2024	:	342.629.160,00
Pendapatan Pajak Air Tanah_LRA Tahun 2024	:	(342.274.980,00)
Selisih	:	**354.180,00**
Penjelasan Selisih		
Pelunasan Piutang Tahun-tahun sebelumnya	:	(55.500,00)
Piutang atas SKPD TA 2024	:	409.680,00
	:	**354.180,00**

h) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO

PBBP2–LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp30.798.621.928,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.096.133.872,00 atau 15,34% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp26.702.488.056,00. PBBP2 – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBBP2 yang diterbitkan selama Tahun 2024 pada 15 kecamatan sebesar Rp30.798.621.928,00.

Tabel V.170 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Ketetapan Pokok (Rp)	Ketetapan Pokok (Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Kec. Wadaslintang	2.264.645.127,00	1.995.475.156,00	269.169.971,00	13,49
2.	Kec. Kepil	2.199.745.682,00	2.023.416.441,00	176.329.241,00	8,71
3.	Kec. Sapuran	2.052.184.893,00	1.843.169.654,00	209.015.239,00	11,34
4.	Kec. Kaliwiro	2.320.710.267,00	1.969.390.159,00	351.320.108,00	17,84
5.	Kec. Leksono	1.384.900.783,00	1.116.749.215,00	268.151.568,00	24,01
6.	Kec. Selomerto	1.711.494.155,00	1.435.276.092,00	276.218.063,00	19,24
7.	Kec. Kalikajar	2.471.879.650,00	2.104.352.311,00	367.527.339,00	17,47
8.	Kec. Kertek	2.730.274.533,00	2.326.710.887,00	403.563.646,00	17,34
9.	Kec. Wonosobo	3.770.655.371,00	3.567.743.333,00	202.912.038,00	5,69
10.	Kec. Watumalang	1.846.240.655,00	1.548.029.163,00	298.211.492,00	19,26
11.	Kec. Mojotengah	1.928.059.597,00	1.578.068.161,00	349.991.436,00	22,18
12.	Kec. Garung	1.856.167.090,00	1.581.088.671,00	275.078.419,00	17,40
13.	Kec. Kejajar	1.791.925.506,00	1.513.159.740,00	278.765.766,00	18,42
14.	Kec. Sukoharjo	1.430.575.923,00	1.196.426.456,00	234.149.467,00	19,57
15.	Kec. Kalibawang	1.039.162.696,00	903.432.617,00	135.730.079,00	15,02
	JUMLAH	**30.798.621.928,00**	**26.702.488.056,00**	**4.096.133.872,00**	**15,34**

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO

BPHTB – LO Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp10.576.248.944,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp598.110.499,00 atau 5,99% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp9.978.138.445,00.

D.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp196.218.857.867,13. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp183.497.927.663,80 atau 1.442,49% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp12.720.930.203,33. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.171 berikut.

Tabel V.171 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Jasa Umum - LO	181.646.321.886,00	3.270.556.716,00	178.375.765.170,00	5.453,99
2.	Retribusi Jasa Usaha - LO	13.427.990.664,13	7.807.500.450,33	5.620.490.213,80	71,99
3.	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	1.144.545.317,00	1.642.873.037,00	(498.327.720,00)	(30,33)
	JUMLAH	**196.218.857.867,13**	**12.720.930.203,33**	**183.497.927.663,80**	**1.442,49**

Perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	(dalam rupiah)
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	196.218.857.867,13
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA)	(196.646.187.282,00)
Piutang Retribusi Tahun Berjalan (Neraca)	(8.301.538.190,00)
Piutang Retribusi Tahun 2023 (Neraca)	4.025.674.302,00
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	4.319.945.332,53
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2023 (Neraca)	(498.499.416,67)
Selisih	**(881.747.387,01)**

Penjelasan Selisih :	
Reklas dari Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan BLUD) ke Piutang Retribusi (Piutang Ret Plyn Kesehatan di Puskesmas)	(217.988.400,00)
Reklas dari Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan BLUD) Ke Piutang Retribusi (Piutang Ret Plyn Kesehatan di RSUD)	(1.022.225.337,00)
Reklasifikasi Dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Hasil Sewa BMD) ke Piutang Retribusi (Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Usaha)	(8.172.000,00)
Pendapatan Diterima Dimuka yang Berasal dari pembayaran atas Sewa Pasar Grosir Th 2023 namun untuk membayar sewa TA 2024	(704.724.000,00)
Reklas dari pendapatan diterima dimuka th lalu (hasil sewa bmd) ke pendapatan diterima dimuka (retribusi pemanfaatan aset daerah)	1.039.167.799,99
pembayaran piutang pada Diskominfo yang pada TA 2024 sudah tidak memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi	34.194.550,00
koreksi atas kesalahan pencatatan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah berupa tanah eks TPA di Sikunang masa sewa 2023 s.d 2024	(2.000.000,00)
Jumlah	**(881.747.387,01)**

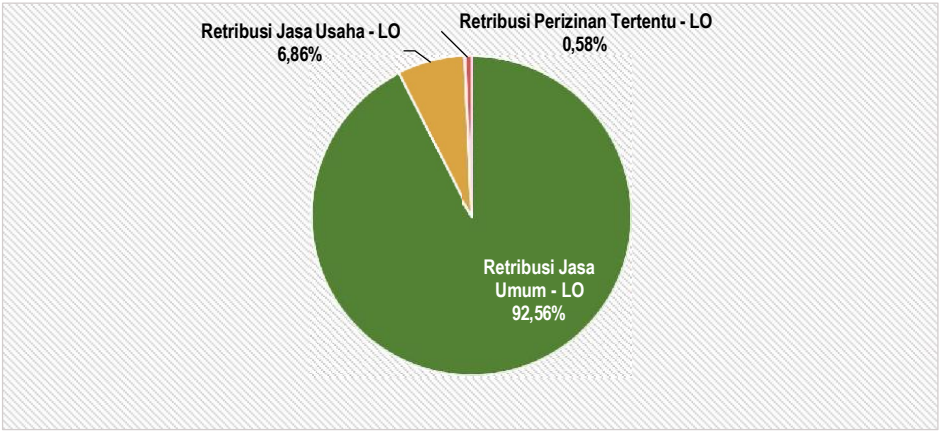

Gambar V.16 Komposisi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2024

a) Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp181.646.321.886,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp178.375.765.170,00 atau 5.453,99% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp3.270.556.716,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.172 berikut.

Tabel V.172 Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	178.563.466.573,00	554.970.000,00	178.008.496.573,00	32.075,34
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	443.939.000,00	231.541.500,00	212.397.500,00	91,73
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	427.036.000,00	414.986.000,00	12.050.000,00	2,90
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	2.103.690.313,00	1.143.110.867,00	960.579.446,00	84,03
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	-	343.856.500,00	(343.856.500,00)	(100,00)
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	108.190.000,00	21.259.000,00	86.931.000,00	408,91
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	-	72.084.500,00	(72.084.500,00)	(100,00)
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	-	488.748.349,00	(488.748.349,00)	(100,00)
	JUMLAH	**181.646.321.886,00**	**3.270.556.716,00**	**178.375.765.170,00**	**5.453,99**

Retribusi Jasa Umum – LO pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 yang terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO

Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp178.563.466.573,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp178.008.496.573,00 atau 32.075,34% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp554.970.000,00. Kenaikan signifikan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO disebabkan karena diberlakukanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dimana pendapatan dari pelayanan BLUD yang sebelumnya di Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp443.939.000,00. Nilai tersebut mengalami

kenaikan signifikan sebesar Rp212.397.500,00 atau 91,73% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp231.541.500,00 disebabkan oleh karena adanya pemberlakuan tarif baru sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp427.036.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.050.000,00 atau 2,90% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp414.986.000,00. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

(4) Retribusi Pelayanan Pasar - LO

Retribusi Pelayanan Pasar – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp2.103.690.313,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp960.579.446,00 atau 84,03% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.143.110.867,00. Retribusi Pelayanan Pasar – LO dianggarkan dan dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp343.856.500,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp343.856.500,00. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO sebelumnya dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Retribusi Pengujian Kendaraan pada TA 2024 Bermotor tidak dapat terealisasikan dikarenakan dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang sebelumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp108.190.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp86.931.000,00 atau 408,91% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp21.259.000,00 yang disebabkan oleh karena adanya pemberlakuan tarif baru sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp72.084.500,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp72.084.500,00. Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang sebelumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO sebelumnya dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

(8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp488.748.349,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp488.748.349,00. Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang sebelumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO sebelumnya dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

b) Retribusi Jasa Usaha - LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp13.427.990.664,13. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.620.490.213,80 atau 71,99% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp7.807.500.450,33. Secara rinci Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO dapat dilihat pada Tabel V.173 berikut.

Tabel V.173 Retribusi Jasa Usaha – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Fp) 2024	2023	Kenaikan/ (P enurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	9.609.416,67	1.681.412.250,33	(1.671.802.833,66)	(99,43)
2.	Retribusi Terminal – LO	26.008.000,00	131.641.600,00	(105.633.600,00)	(80,24)
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	139.870.500,00	97.340.000,00	42.530.500,00	43,69
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	104.490.000,00	62.980.000,00	41.510.000,00	65,91
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO	8.629.300.900,00	5.820.126.600,00	2.809.174.300,00	48,27
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	16.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	14,29
7.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	4.502.711.847,46	-	4.502.711.847,46	-
	JUMLAH	**13.427.990.664,13**	**7.807.500.450,33**	**5.620.490.213,80**	**71,99**

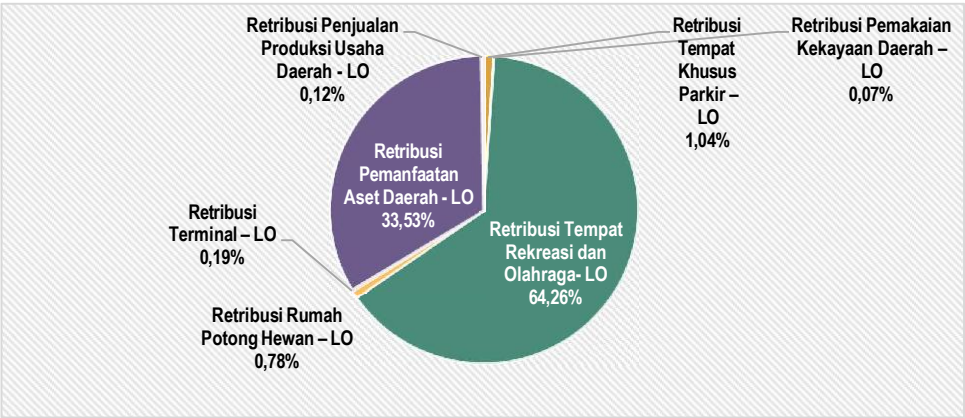

Gambar V.17 Komposisi Retribusi Jasa Usaha – LO Kabupaten Wonosobo TA 2024

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran TA 2024 adalah sebesar Rp9.609.416,67. Nilai tersebut

mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.671.802.833,66 atau 99,43% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.681.412.250,33. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO TA 2024 dikelola oleh beberapa OPD dengan rincian sebagaimana Tabel V.174 berikut.

Tabel V.174 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp) 2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dikpora	-	4.250.000,00	(4.250.000,00)	(100,00)
2.	DPUPR	9.600.000,00	16.880.000,00	(7.280.000,00)	(43,13)
3.	Disnakerintrans	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4.	DLH	-	15.050.000,00	(15.050.000,00)	(100,00)
5.	Diskominfo	-	23.000.000,00	(23.000.000,00)	(100,00)
6.	DPMPTSP	9.416,67	3.955.250,33	(3.945.833,66)	(99,76)
7.	Dispaperkan	-	4.018.500,00	(4.018.500,00)	(100,00)
8.	Disdagkop UKM	-	1.371.176.000,00	(1.371.176.000,00)	(100,00)
9.	Bag Umum	-	238.082.500,00	(238.082.500,00)	(100,00)
	JUMLAH	**9.609.416,67**	**1.681.412.250,33**	**(1.671.802.833,66)**	**(99,43)**

(2) Retribusi Terminal - LO

Retribusi Terminal – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp26.008.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp105.633.600,00 atau 80,24% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp131.641.600,00 yang disebabkan karena pada tahun 2023 Obyek Retribusi Terminal berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kemudian dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada TA 2024 Retribusi Terminal dipungut hanya berupa Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha. Retribusi Terminal – LO TA 2024 dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO

Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp139.870.500,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.530.500,00 atau 43,69% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp97.340.000,00. Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan rincian sebagaimana Tabel V.175 berikut.

Tabel V.175 Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp) 2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Disparbud	132.170.500,00	89.640.000,00	42.530.500,00	47,45
2.	Disdagkop UKM	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-
	JUMLAH	**139.870.500,00**	**97.340.000,00**	**42.530.500,00**	**43,69**

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan - LO

Retribusi Rumah Potong Hewan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp104.490.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp41.510.000,00 atau 65,91% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar

Rp62.980.000,00 yang disebabkan oleh karena adanya pemberlakuan tarif baru sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2024 dikelola oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.

(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp8.629.300.900,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.809.174.300,00 atau 48,27% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp5.820.126.600,00. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp16.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.000,00 atau 14,29% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp14.000.000,00. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 dikelola oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan - LO, berupa penjualan bibit ikan, ikan konsumsi, serta retribusi nelayan.

(7) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp4.502.711.847,46 sedangkan TA 2023 sebesar Nihil. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 sehingga rekening Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO di Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LO.

c) Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp1.144.545.317,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp498.327.720,00 atau 30,33% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.642.873.037,00, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.176 berikut.

Tabel V.176 Retribusi Perizinan Tertentu – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	-	1.618.373.037,00	(1.618.373.037,00)	(100,00)
2.	Retribusi Izin Trayek – LO	-	24.500.000,00	(24.500.000,00)	(100,00)
3.	Retribusi Persetujuan Bangunan - LO	1.144.545.317,00	-	1.144.545.317,00	100,00
	JUMLAH	**1.144.545.317,00**	**1.642.873.037,00**	**(498.327.720,00)**	**(30,33)**

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.618.373.037,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.618.373.037,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan anggaran di Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya dianggarkan pada rekening Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO menjadi rekening Retribusi Persetujuan Bangunan – LO. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO sebelumnya dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu.

(2) Retribusi Izin Trayek – LO

Retribusi Izin Trayek – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp24.500.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 yaitu sebesar Rp24.500.000,00. Retribusi Izin Trayek TA 2024 mengalami penurunan signifikan disebabkan oleh karena diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Izin Trayek yang sebelumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Retribusi Persetujuan Bangunan - LO

Retribusi Persetujuan Bangunan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp1.144.545.317,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Nihil. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2024 dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu.

D.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp9.696.030.143,17. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp35.042.373.228,78, atau 78,33% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp44.738.403.371,95. Penurunan signifikan tersebut diakibatkan pada TA 2023 terdapat pengakuan piutang dividen berdasarkan RUPS BUMD pada PT. BPD Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Aji dan PT. BPR Bank Wonosobo sedangkan pada TA 2024 terdapat kenaikan nilai investasi termasuk didalamnya kenaikan akibat penyertaan modal inbreng Aset Tetap PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2024 dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah berupa dividen atas penyertaan modal pada BUMD. Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	:	9.696.030.143,17
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	:	(25.809.039.238,00)
Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 (Neraca)	:	24.450.709.706,00
Selisih	:	**8.337.700.611,17**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) tahun 2024:		
- PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda) (Kurang catat)	:	(2,00)
- PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	:	(794.208.926,00)
- Perumda Air Minum Tirta Aji	:	-
- PT Global Dharma Asri	:	(42.341.109,00)
- PT Bimalukar (Apotik Cahaya)	:	-
- PD Bhakti Husada	:	-
- PT Perkebunan Tambi	:	(962.243.888,00)
- Bank Jateng	:	-
Koreksi Ekuitas - kelebihan catat piutang bagian laba PT.BPR BKK Wonosobo (Perseroda) Th 2022 bagian milik Provinsi Jateng	:	(440.464.393,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD dengan metode ekuitas		
- Kenaikan nilai investasi PDAM		5.897.776.744,03
- kenaikan nilai investasi PT.BPR Bank Wonosobo		1.280.649.069,01
- kenaikan nilai investasi PD Bhakti Husada		184.080.310,00

- kenaikan nilai investasi PT. BPR BKK Wonosobo	673.662.990,13
- kenaikan nilai investasi PT PERKEBUNAN TAMBI	1.659.861.030,00
Selisih	**8.337.700.611,17**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO TA 2024 secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.177 di bawah ini.

Tabel V.177 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.954.312.059,14	24.850.704.185,94	(22.896.392.126,80)	(92,14)
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.843.941.340,00	1.151.266.684,08	692.674.655,92	60,17
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	5.897.776.744,03	18.736.432.501,93	(12.838.655.757,90)	(68,52)
	JUMLAH	**9.696.030.143,17**	**44.738.403.371,95**	**(35.042.373.228,78)**	**(78,33)**

(1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO TA 2024 adalah sebesar Rp1.954.312.059,14. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp22.896.392.126,80 atau 92,14%, jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp24.850.704.185,94 yang disebabkan pada TA 2024 tidak terdapat terdapat penambahan piutang dividen TA 2024 sedangkan TA 2023 ada. dengan rincian sebagaimana Tabel V.178 berikut.

Tabel V.178 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Pe nurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	PT Bank Jateng	-	12.850.091.079,00	(12.850.091.079,00)	(100,00)
2.	PT BPR BKK Wonosobo	673.662.990,13	1.500.430.199,95	(826.767.209,82)	(55,10)
3.	PD.BPR Bank Wonosobo	1.280.649.069,01	10.500.182.906,99	(9.219.533.837,98)	(87,80)
	JUMLAH	**1.954.312.059,14**	**24.850.704.185,94**	**(22.896.392.126,80)**	**(92,14)**

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO TA 2024 adalah sebesar Rp1.843.941.340,00 yang merupakan kenaikan nilai investasi. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp692.674.655,92 atau 60,17% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.151.266.684,08 dengan rincian sebagaimana Tabel V.179 berikut.

Tabel V.179 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	PT Global Dharma Asri	-	67.757.706,93	(67.757.706,93)	(100,00)
2.	PT. Bimo Lukar	-	59.197.552,15	(59.197.552,15)	(100,00)
3.	PD. Bhakti Husada	184.080.310,00	(94.576.818,00)	278.657.128,00	(294,64)
4.	PT. Tambi	1.659.861.030,00	1.118.888.243,00	540.972.787,00	48,35
	JUMLAH	**1.843.941.340,00**	**1.151.266.684,08**	**692.674.655,92**	**60,17**

(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO TA 2024 adalah sebesar Rp5.897.776.744,03 yang merupakan kenaikan nilai investasi. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp12.838.655.757,89 atau 68,52% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp18.736.432.501,92. Penurunan signifikan tersebut disebabkan oleh tidak terdapat penambahan piutang dividen TA 2024 atas RUPS BUMD tahun 2025.

D.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp6.916.948.876,66. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp159.096.334.002,52 atau 95,83% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp166.013.282.879,18. Penyebab penurunan signifikan yang terbesar adalah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 yang pada TA 2023 beberapa akun dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang Sah seperti Pendapatan BLUD – LO, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO pada TA 2024 disajikan di akun Pendapatan Retribusi Daerah – LO.

Perbedaan antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	:	6.916.948.876,66
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	:	(9.158.113.410,00)
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	:	(375.035.871,40)
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 (Neraca)	:	3.954.114.450,40
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	:	777.284.125,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2023 (Neraca)	:	(664.198.641,66)
Selisih		**1.450.999.529,00**
Penjelasan Selisih :		
Koreksi Hasil Inventarisasi - Penghapusan dan ditindaklanjuti dengan penjualan	:	(208.632.500,00)
Tindak lanjut Penghapusan Sk No. 028/114/2024 dengan cara penjualan (Disdukcapil)	:	(1.111.000,00)
Kurang catat piutang hasil sewa BMD_M. SJAHID, SIP, M.SI. (PDAM) 6 bidang	:	(274.675.000,00)
Kurang catat piutang hasil sewa BMD_Fatchul	:	(11.497.000,00)
Koreksi Pembayaran Piutang Yang Disetorkan Langsung Ke Kas Daerah melalui BPPKAD	:	1.242.114.000,00
Pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain	:	(6.000.000,00)
pelunasan piutang pada Diskominfo yang pada TA 2024 sudah tidak memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi	:	(34.194.550,00)
Pelunasan piutang atas temuan TA 2023 (CV Banyu Urip) - DPUPR	:	(100.000.000,00)
pelunasan piutang pada DPUPR atas temuan TA 2023.	:	(1.142.114.000,00)
Reklas ke piutang retribusi	:	2.293.109.737,00
penerimaan piutang sewa PT DHOST perjanjian sewa No. 291/MS/DTN/IV/2023 (PT Dhost Telekomunikasi Nusantara/operator XL)	:	(306.000.000,00)

Koreksi kurang catat saldo piutang karena kesalahan pencatatan tahun 2023_BPPKAD	:	(158,00)
Angsuran Pokok Dana bergulir	:	4.150.000,00
Jumlah		**1.450.999.529,00**

Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dapat dilihat pada Tabel V.180 di bawah ini.

Tabel V.180 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	76.295.000,00	258.595.109,00	(182.300.109,00)	(70,50)
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	186.611.850,00	2.502.768.222,67	(2.316.156.372,67)	(92,54)
3.	Jasa Giro - LO	917.665.457,00	1.142.639.590,00	(224.974.133,00)	(19,69)
4.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	4.150.000,00	-	4.150.000,00	-
5.	Pendapatan Bunga - LO	3.281.378.863,00	2.237.677.219,00	1.043.701.644,00	46,64
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	550.019.395,00	1.058.133.715,00	(508.114.320,00)	(48,02)
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	44.047.851,00	209.754.523,00	(165.706.672,00)	(79,00)
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	203.146.264,00	336.917.859,00	(133.771.595,00)	(39,70)
9.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	-	21.408.600,00	(21.408.600,00)	(100,00)
10.	Pendapatan dari Pengembalian - LO	1.329.790.521,00	1.876.325.804,00	(546.535.283,00)	(29,13)
11.	Pendapatan BLUD - LO	323.843.675,66	156.103.824.843,26	(155.779.981.167,60)	(99,79)
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	-	174.085.000,00	(174.085.000,00)	(100,00)
13.	Remunerasi-LO	-	91.152.394,26	(91.152.394,26)	(100,00)
	JUMLAH	**6.916.948.876,66**	**166.013.282.879,18**	**(159.096.334.002,53)**	**(95,83)**

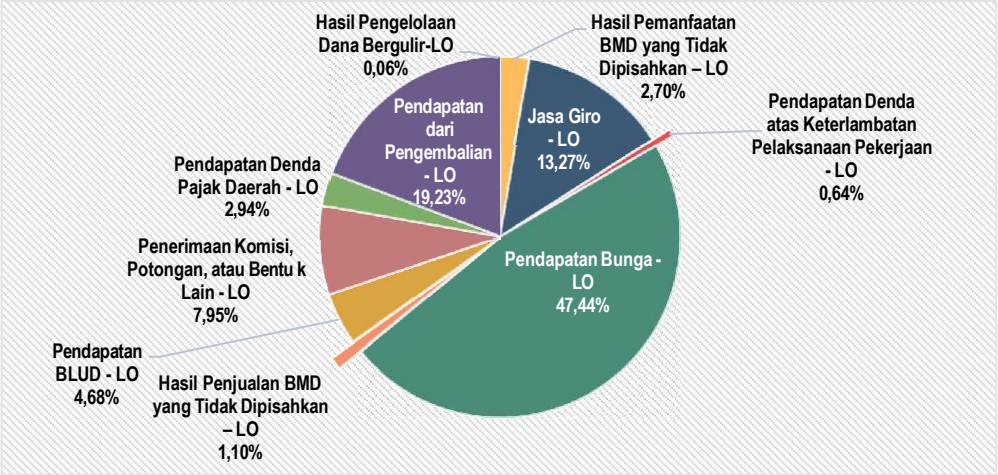

Gambar V.18 Komposisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2024

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO TA 2024 adalah sebesar Rp76.295.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp182.300.109,00 atau 70,50% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp258.595.109,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.181 berikut.

Tabel V.181 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	-	73.412.524,00	(73.412.524,00)	(100,00)
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LO	62.302.000,00	(55.710.700,00)	118.012.700,00	211,83
3.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	-	256.927.985,00	(256.927.985,00)	(100,00)
4.	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain - LO	13.993.000,00	(16.034.700,00)	30.027.700,00	187,27
	JUMLAH	**76.295.000,00**	**258.595.109,00**	**(182.300.109,00)**	**(70,50)**

Pada Tabel diatas, Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO mengalami penurunan signifikan disebabkan karena pada TA 2024 melakukan penjualan Barang Milik Daerah yang sudah usang/rusak berat dan tidak dapat menunjang tugas pokok dan fungsi lebih sedikit jika dibandingkan dengan TA 2023. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO TA 2024 adalah sebesar Rp186.611.850,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp2.316.156.372,67 atau 92,54% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp2.502.768.222,67. Penurunan signifikan tersebut disebabkan oleh karena adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan tanggal 5 Januari 2024 dimana Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang sebelumnya pada TA 2023 disajikan pada Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2024 disajikan pada Pendapatan Retribusi Daerah. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

c) Jasa Giro - LO

Jasa Giro - LO TA 2024 adalah sebesar Rp917.665.457,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp224.974.133,00 atau 19,69% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.142.639.590,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.182 berikut.

Tabel V.182 Jasa Giro – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah – LO	771.841.573,00	1.091.225.929,00	(319.384.356,00)	(29,27)
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara – LO	145.823.884,00	51.413.661,00	94.410.223,00	183,63
	JUMLAH	**917.665.457,00**	**1.142.639.590,00**	**(224.974.133,00)**	**(19,69)**

Jasa Giro - LO TA 2024 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang berasal atas penempatan kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Jateng, Rekening Penampungan Gaji di Bank Jateng, 25 Rekening BLUD di Bank Jateng, 24 Rekening BOK Puskesmas di BNI46, 24 Rekening Swakelola PMT Pusksmas, 92 Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bank Jateng, 516 Rekening BOS SD dan SMP Negeri di Bank Jateng, dan 516 Rekening BOSDA SD dan SMP Negeri di Bank Jateng. Penerimaan Jasa Giro dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Wonosobo dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Cabang Wonosobo nomor: 900/1092/BPPKAD/2018 nomor 1710/PEM.01.01/023/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pengelolaan Uang Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir diubah dengan addendum nomor 900/2084.1/BPPKA/2023 1010/PMS.04/023/2023 tanggal 29 November 2023.

d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO TA 2024 adalah sebesar Rp4.150.000,00 sedangkan pada TA 2023 adalah nihil disebabkan diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dimana kas angsuran

yang diterima mengurangi langsung Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi di Neraca.

e) Pendapatan Bunga - LO

Pendapatan Bunga – LO TA 2024 adalah sebesar Rp3.281.378.863,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.043.701.644,00 atau 46,64% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp2.237.677.219,00. Pendapatan Bunga TA 2024 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

f) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO TA 2024 adalah sebesar Rp550.019.395,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp508.114.320,00 atau 48,02% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.058.133.715,00. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO TA 2024 dikelola di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO TA 2024 adalah sebesar Rp44.047.851,00 Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp165.706.672,00 atau 79,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp209.754.523,00. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 dikelola di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas PUPR.

h) Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO

Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO TA 2024 adalah sebesar Rp203.146.264,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp133.771.595,00 atau 39,70% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp336.917.859,00. Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO TA 2024 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

i) Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO TA 2024 adalah Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp21.408.600,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp21.408.600,00. Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA – LO sebelumnya dikelola oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan.

j) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Pendapatan dari Pengembalian - LO TA 2024 adalah sebesar Rp1.329.790.521,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp546.535.283,00 atau 29,13% jika jika dibandingkan dengan TA 2023 adalah sebesar Rp1.876.325.804,00. Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas PUPR.

k) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD – LO TA 2024 adalah sebesar Rp323.843.675,66. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp155.779.981.167,60 atau 99,79% jika

dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp156.103.824.843,26. Pendapatan BLUD dikelola oleh RSUD KRT Setjonegoro dan Puskesmas di Kabupaten Wonosobo. Penurunan signifikan tersebut disebabkan karena diberlakukanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dimana pendapatan dari pelayanan BLUD yang sebelumnya di Lain-lain PAD Yang Sah – LO pada TA 2024 direalisasikan di Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO.

l) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2024 - LO adalah Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp174.085.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 adalah Rp174.085.000,00. Penurunan signifikan tersebut disebabkan karena ditetapkannya Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Kependudukan yang mulai diberlakukan tanggal 5 Mei 2023, sehingga Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan lagi memungut denda atas keterlambatan pengurusan kependudukan. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO sebelumnya dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

m) Remunerasi-LO

Remunerasi – LO TA 2024 adalah sebesar Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp91.152.394,26 atau 100% jika dibandingkan TA 2023 sebesar Rp91.152.394,26. Remunerasi tersebut merupakan Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF). Penurunan signifikan tersebut disebabkan pada TA 2024 direalisasikan pada Pendapatan Bunga – LO sebesar Rp33.433.673,00.

D.1.b. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp1.537.538.795.507,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.881.359.469,00 atau 2,94% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.493.657.436.038,00. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.183 berikut.

Tabel V.183 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	1.333.104.605.256,00	1.333.243.194.913,00	(138.589.657,00)	(0,01)
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	19.550.481.000,00	13.020.711.000,00	6.529.770.000,00	50,15
3.	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	184.883.709.251,00	147.393.530.125,00	37.490.179.126,00	25,44
	JUMLAH	**1.537.538.795.507,00**	**1.493.657.436.038,00**	**43.881.359.469,00**	**2,94**

D.1.b.1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.333.104.605.256,00, nilai pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp138.589.657,00, atau 0,01% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.333.243.194.913,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.184 berikut.

Tabel V.184 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dana Bagi Hasil Pajak – LO	32.516.241.000,00	35.456.070.000,00	(2.939.829.000,00)	(8,29)
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO	1.458.494.000,00	1.896.471.000,00	(437.977.000,00)	(23,09)
3.	Dana Alokasi Umum – LO	877.850.621.000,00	832.084.548.325,00	45.766.072.675,00	5,50
4.	Dana Alokasi Khusus – LO	421.279.249.256,00	463.806.105.588,00	(42.526.856.332,00)	(9,17)
	JUMLAH	**1.333.104.605.256,00**	**1.333.243.194.913,00**	**(138.589.657,00)**	**(0,01)**

Perbedaan antara Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	:	1.333.104.605.256,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA	:	1.336.062.892.256,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca)	:	-
Selisih		**2.958.287.000,00**
Penjelasan Selisih :		
Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) TA 2023		2.958.287.000,00
Jumlah		**2.958.287.000,00**

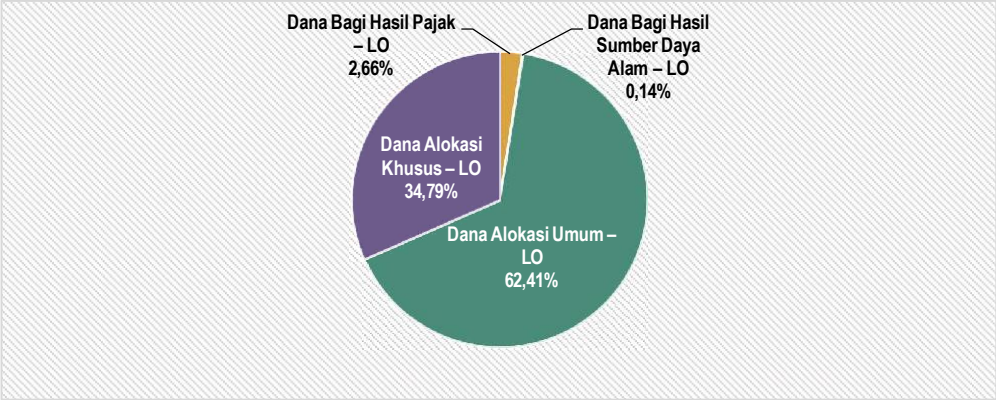

Gambar V.19 Komposisi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

D.1.b.1).a Dana Bagi Hasil Pajak – LO

Dana Bagi Hasil Pajak – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp32.516.241.000,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.939.829.000,00 atau 8,29% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp35.456.070.000,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.185 berikut.

Tabel V.185 Bagi Hasil Pajak - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (P enurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DBH PBB-LO	3.848.660.000,00	5.792.804.000,00	(1.944.144.000,00)	(33,56)
2.	DBH PPh Pasal 21-LO	9.350.207.000,00	11.659.541.000,00	(2.309.334.000,00)	(19,81)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	589.383.000,00	860.199.000,00	(270.816.000,00)	(31,48)
4.	DBH CHT-LO	18.727.991.000,00	17.143.526.000,00	1.584.465.000,00	9,24
	JUMLAH	**32.516.241.000,00**	**35.456.070.000,00**	**(2.939.829.000,00)**	**(8,29)**

D.1.b.1).b Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.458.494.000,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp437.977.000,00 atau 23,09% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.896.471.000,00 dengan rincian sebagaimanaTabel V.186 berikut:

Tabel V.186 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DBH SDA Minyak Bumi-LO	17.112.000,00	56.478.000,00	(39.366.000,00)	(69,70)
2.	DBH SDA Gas Bumi-LO	83.687.000,00	139.409.000,00	(55.722.000,00)	(39,97)
3.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	21.851.000,00	25.292.000,00	(3.441.000,00)	(13,61)
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	227.000,00	240.000,00	(13.000,00)	(5,42)
5.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	2.000,00	-	2.000,00	100,00
6.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	238.460.000,00	388.303.000,00	(149.843.000,00)	(38,59)
7..	DBH SDA Perikanan-LO	1.097.155.000,00	1.286.749.000,00	(189.594.000,00)	(14,73)
	JUMLAH	**1.458.494.000,00**	**1.896.471.000,00**	**(437.977.000,00)**	**(23,09)**

D.1.b.1).c Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp877.850.621.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp45.766.072.675,00 atau 5,50% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp832.084.548.325,00.

D.1.b.1).d Dana Alokasi Khusus - LO

Dana Alokasi Khusus – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp421.279.249.256,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp42.526.856.332,00 atau 9,17% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp463.806.105.588,00, Dana Alokasi Khusus – LO terbagi atas Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO dengan rincian sebagaimana Tabel V.187 di bawah ini:

Tabel V.187 Dana Alokasi Khusus - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	126.115.328.554,00	161.079.696.095,00	(34.964.367.541,00)	(21,71)
2.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	295.163.920.702,00	302.726.409.493,00	(7.562.488.791,00)	(2,50)
	JUMLAH	**421.279.249.256,00**	**463.806.105.588,00**	**(42.526.856.332,00)**	**(9,17)**

1. **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO**
   Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp126.115.328.554,00, sedangkan pada TA 2023 adalah Rp161.079.696.095,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp34.964.367.541,00 atau 21,71% dengan rincian sebagaimana Tabel V.188 berikut.

Tabel V.188 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	484.534.680,00	446.727.000,00	37.807.680,00	8,46
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	14.037.337.985,00	8.446.481.600,00	5.590.856.385,00	66,19
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	7.878.090.153,00	5.804.551.952,00	2.073.538.201,00	35,72
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	-	7.615.835.000,00	(7.615.835.000,00)	(100,00)
5.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	3.248.597.017,00	4.681.806.752,00	(1.433.209.735,00)	(30,61)
6.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	23.969.883.780,00	15.933.687.950,00	8.036.195.830,00	50,44
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	1.052.113.193,00	1.014.250.000,00	37.863.193,00	3,73
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)--LO	2.423.169.736,00	-	2.423.169.736,00	-
9.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	19.685.012.199,00	54.854.280.000,00	(35.169.267.801,00)	(64,11)
10.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	8.325.361.801,00	-	8.325.361.801,00	-
11.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	14.864.514.000,00	11.096.845.000,00	3.767.669.000,00	33,95
12.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	-	3.738.416.550,00	(3.738.416.550,00)	(100,00)
13.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	4.827.272.824,00	8.398.747.000,00	(3.571.474.176,00)	(42,52)
14.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	2.399.199.000,00	6.973.477.000,00	(4.574.278.000,00)	(65,60)
15.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	4.608.245.186,00	1.492.500.000,00	3.115.745.186,00	208,76
16.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	-	1.385.480.000,00	(1.385.480.000,00)	(100,00)
17.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	3.317.500.000,00	15.081.151.291,00	(11.763.651.291,00)	(78,00)
18.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	14.994.497.000,00	14.115.459.000,00	879.038.000,00	6,23
	JUMLAH	**126.115.328.554,00**	**161.079.696.095,00**	**(34.964.367.541,00)**	**(21,71)**

2. **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp295.163.920.702,00, sedangkan pada TA 2023 adalah Rp302.726.409.493,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.562.488.791,00 atau 2,50% dengan rincian sebagaimana Tabel V.189 berikut:

Tabel V.189 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	89.955.989.348,00	90.209.560.332,00	(253.570.984,00)	(0,28)
2.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	140.184.360.000,00	4.040.000.000,00	136.144.360.000,00	3.369,91
3.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	3.260.000.000,00	142.786.512.354,00	(139.526.512.354,00)	(97,72)
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.939.557.000,00	3.034.810.552,00	(95.253.552,00)	(3,14)
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	561.413.000,00	66.367.000,00	495.046.000,00	745,92
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	-	14.556.788.955,00	(14.556.788.955,00)	(100,00)
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	-	4.063.567.772,00	(4.063.567.772,00)	(100,00)
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	-	30.561.906.862,00	(30.561.906.862,00)	(100,00)
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	10.907.712.034,00	8.609.385.664,00	2.298.326.370,00	26,70
10.	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	523.267.920,00	398.797.263,00	124.470.657,00	31,21
11.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO	1.266.674.000,00	1.048.405.239,00	218.268.761,00	20,82
12.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	596.668.200,00	288.482.500,00	308.185.700,00	106,83
14..	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	-	311.825.000,00	(311.825.000,00)	(100,00)
15.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	1.227.675.827,00	-	1.227.675.827,00	100,00
16..	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	1.630.138.160,00	2.750.000.000,00	(1.119.861.840,00)	(40,72)
17.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	15.266.801.180,00	-	15.266.801.180,00	100,00
18.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	150.000.000,00	-	150.000.000,00	100,00
19.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	4.537.607.600,00	-	4.537.607.600,00	100,00
20.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	135.000.000,00	-	135.000.000,00	100,00
21.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	5.494.780.962,00	-	5.494.780.962,00	100,00
22.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	16.526.275.471,00	-	16.526.275.471,00	100,00
	JUMLAH	**295.163.920.702,00**	**302.726.409.493,00**	**(7.562.488.791,00)**	**(2,50)**

D.1.b.2) Transfer Pemerintah Pusat lainnya - LO

Tabel V.183 di atas menunjukkan bahwa pada Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp19.550.481.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp6.529.770.000,00 atau 50,15% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp13.020.711.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan penilaian dari Pemerintah Pusat sehingga mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp7.767.692.000,00. Pada Perubahan APBD TA 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik

Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 memperoleh alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp11.782.789.000,00. Alokasi tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

D.1.b.3) Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Transfer Pemerintah Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp184.883.709.251,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.490.179.126,00 atau 25,44% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp147.393.530.125,00, dengan uraian sebagaimana Tabel V.190 di bawah ini.

Tabel V.190 Transfer Pemerintah Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	127.338.478.751,00	125.292.084.902,00	2.046.393.849,00	1,63
2.	Bantuan Keuangan Provinsi - LO	57.545.230.500,00	22.101.445.223,00	35.443.785.277,00	160,37
	JUMLAH	**184.883.709.251,00**	**147.393.530.125,00**	**37.490.179.126,00**	**25,44**

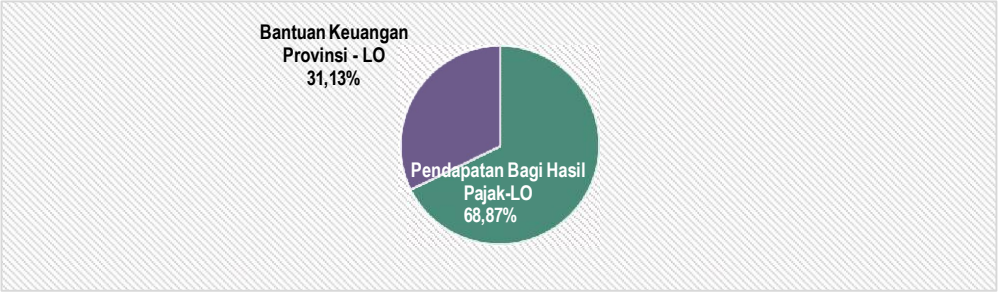

Gambar V.20 Komposisi Transfer Pemerintah Provinsi - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

Perbedaan antara Transfer Pemerintah Provinsi -LO dengan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Transfer Pemerintah Provinsi-LO	:	184.883.709.251,00
Transfer Pemerintah Provinsi-LRA	:	(181.742.111.722,00)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	:	(6.167.940.036,00)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	:	3.174.734.387,00
Selisih		**148.391.880,00**
Penjelasan Selisih :		
pendapatan hibah bonus produksi PT. GEO DIPA ENERGI Triwulan IV TA 2023		148.391.880,00
Jumlah		**148.391.880,00**

D.1.b.3).a Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sesuai Tabel V.190 di atas TA 2024 adalah sebesar Rp127.338.478.751,00, sedangkan pada TA 2023 adalah sebesar Rp125.292.084.902,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.046.393.849,00 atau 1,63% dengan rincian sebagaimana Tabel V.191 berikut.

Tabel V.191 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp) 2024	2023	Kenaikan/ (Pe nurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	30.746.745.315,00	30.878.264.529,00	(131.519.214,00)	(0,43)
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	15.572.738.192,00	14.876.599.509,00	696.138.683,00	4,68
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	27.917.151.706,00	29.309.853.506,00	(1.392.701.800,00)	(4,75)
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	326.368.288,00	289.819.880,00	36.548.408,00	12,61
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	52.775.475.250,00	49.937.547.478,00	2.837.927.772,00	5,68
	JUMLAH	**127.338.478.751,00**	**125.292.084.902,00**	**2.046.393.849,00**	**1,63**

D.1.b.3).b Bantuan Keuangan Provinsi – LO

Bantuan Keuangan Provinsi – LO sesuai Tabel V.190 di atas TA 2024 adalah sebesar Rp57.545.230.500,00, sedangkan pada TA 2023 adalah sebesar Rp22.101.445.223,00 atau mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp35.443.785.277,00 atau 160,37% dengan rincian sebagaimana Tabel V.192 berikut.

Tabel V.192 Bantuan Keuangan Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp) 2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	TMMD – LO	-	-	-	-
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	57.545.230.500,00	22.101.445.223,00	35.443.785.277,00	160,37
	JUMLAH	**57.545.230.500,00**	**22.101.445.223,00**	**35.443.785.277,00**	**160,37**

Kenaikan signifikan Bantuan Keuangan Provinsi – LO disebabkan karena berdasarkan penetapan alokasi sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0000417 Tanggal 5 Januari 2024 perihal Penyampaian DPA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa Provinsi Jawa Tengah TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp57.545.230.500,00.

D.1.c. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Tabel V.168 diatas menunjukkan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp52.792.475.856,41. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp79.502.234.960,84 atau 60,09% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp132.294.710.817,25. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.193 berikut.

Tabel V.193 Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp) 2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Hibah – LO	52.792.475.856,41	132.294.710.817,25	(79.502.234.960,84)	(60,09)
2.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	**52.792.475.856,41**	**132.294.710.817,25**	**(79.502.234.960,84)**	**(60,09)**

Perbedaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2024 dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan_LO	:	52.792.475.856,41
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan_LRA	:	(10.918.091.444,00)
Selisih		**41.874.384.412,41**
Penjelasan Selisih :		
Pendapatan hibah barang yang menjadi persediaan	:	24.925.220.442,41

Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap	:	
-Tanah	:	14.950.000,00
-Peralatan dan Mesin	:	742.707.850,00
-Gedung dan Bangunan	:	16.339.898.000,00
pengakuan pendapatan hibah bonus produksi PT. GEO DIPA ENERGI Triwulan IV TA 2023	:	(148.391.880,00)
Jumlah		**41.874.384.412,41**

D.1.c.1) Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp52.792.475.856,41, nilai pendapatan tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp79.502.234.960,84 atau 60,09% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp132.294.710.817,25 dengan rincian sebagaimana Tabel V.194 berikut.

Tabel V.194 Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	31.130.854.677,25	64.682.818.042,00	(33.551.963.364,75)	(51,87)
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	19.234.412.889,48	12.936.933.548,25	6.297.479.341,23	48,68
3.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	14.950.000,00	78.182.000,00	(63.232.000,00)	(80,88)
4.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri -LO	218.316.729,00	664.399.795,00	(446.083.066,00)	(67,14)
5.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	2.193.941.560,68	53.932.377.432,00	(51.738.435.871,32)	(95,93)
	JUMLAH	**52.792.475.856,41**	**132.294.710.817,25**	**(79.502.234.960,84)**	**(60,09)**

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp31.130.854.677,25, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.551.963.364,75 atau 51,87% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp64.682.818.042,00, yang terdiri dari.

		(dalam Rupiah)
(1)	Hibah Taman Dari KemenPUPR (Dinas PUPR)	7.875.313.600,00
(2)	Hibah dari Kementerian Perhubungan (Disperkimhub)	267.550.000,00
(3)	Hibah Taman Dari KemenPUPR (DLH)	7.288.786.900,00
(4)	Hibah Dirjen Dukcapil Kemendagri RI (Disdukcapil)	428.066.840,00
(5)	Hibah Kementerian Kesehatan (Dinkes)	143.868.450,00
(6)	Hibah Terusan PDAM	7.377.382.835,00
(7)	Hibah Air Limbah dan Sanitasi (HALS)	3.174.000.000,00
(8)	Hibah bantuan dari pemerintah pusat (Dikpora)	355.000.000,00
(9)	Hibah bahan cetak dan jasa penyelenggaraan acara (Disdikpora)	108.014.052,25
(10)	Koreksi atas penyesuaian penyertaan modal pada BUMD PDAM	4.112.872.000,00
	Jumlah	**31.130.854.677,25**

b) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp19.234.412.889,48, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.297.479.341,23 atau 48,68% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp12.936.933.548,25. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya berada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.828.367.064,48, hibah pada RSUD Setjonegoro sebesar Rp1.371.700,00, hibah pada BPBD sebesar Rp32.993.000,00, hibah pada Disdukcapil sebesar Rp152.730.000,00, dan hibah pada DPPKBPPPA sebesar Rp3.218.951.125,00.

c) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp14.950.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp63.232.000,00 atau 80,88% jika dibandingkan dengan TA 2023 Rp78.182.000,00. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO berada di Kelurahan Kejiwan yang merupakan hibah tanah dari masyarakat BAST No. 590/48/II/2024 yang digunakan untuk bangunan MCK.

d) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp218.316.729,00, nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp446.083.066,00 atau 67,14% jika dibandingkan dengan TA 2023 yang Rp664.399.795,00. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO adalah berupa Bonus Produksi dari PT. Geo Dipa Energi selama tahun 2024.

e) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp2.193.941.560,68, nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp51.738.435.871,32 atau 95,93% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp53.932.377.432,00, yang terdiri dari.

	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	Disdikpora	68.024.500,00
2	Dinkes	282.950.000,00
3	RSUD KRT Setjonegoro	273.049.060,68
4	Satpol PP	2.350.000,00
5	DLH	5.900.000,00
6	Disdukcapil	15.660.000,00
7	DPPKB PP PA	7.500.000,00
8	Disparbud	41.050.000,00
9	Bagian Adbang Setda	49.130.000,00
10	Bagian Kesra Setda	7.800.000,00
11	Bagian Perekonomian & SDA Setda	50.000.000,00
12	Bagian Umum Setda	40.000.000,00
13	Setwan	40.930.000,00
14	Inspektorat	25.150.000,00
15	BPPKAD	166.820.000,00
16	BKD	165.505.000,00
17	Disdagkop UKM	952.123.000,00
	JUMLAH	**2.193.941.560,68**

D.2. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp1.945.188.563.760,84. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp240.325.180.594,78 atau 14,10% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.704.863.383.166,07 uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.195 berikut.

Tabel V.195 Beban Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pegawai	866.738.451.236,33	802.924.812.735,14	63.813.638.501,19	7,95
2.	Beban Persediaan	186.724.449.804,50	172.850.638.036,04	13.873.811.768,46	8,03
3.	Beban Jasa	236.356.614.992,33	202.994.680.284,00	33.361.934.708,33	16,43
4.	Beban Pemeliharaan	29.455.652.483,00	27.797.393.188,00	1.658.259.295,00	5,97
5.	Beban Perjalanan Dinas	53.169.621.613,00	50.263.878.364,00	2.905.743.249,00	5,78
6.	Beban Subsidi	574.096.661,00	638.215.332,00	(64.118.671,00)	(10,05)
7.	Beban Hibah	164.223.938.985,28	145.528.387.321,67	18.695.551.663,61	12,85
8.	Beban Bantuan Sosial	11.602.909.582,00	13.348.347.900,00	(1.745.438.318,00)	(13,08)
9.	Beban Penyusutan	241.996.363.012,50	163.849.640.345,28	78.146.722.667,22	47,69
10.	Beban Transfer	151.726.744.070,00	123.665.371.570,00	28.061.372.500,00	22,69
11.	Beban Penyisihan Piutang	2.619.721.320,90	822.070.749,94	1.797.650.570,96	218,67
12	Beban Lain-lain	-	179.947.340,00	(179.947.340,00)	(100,00)
	JUMLAH	**1.945.188.563.760,84**	**1.704.863.383.166,07**	**240.325.180.594,78**	**14,10**

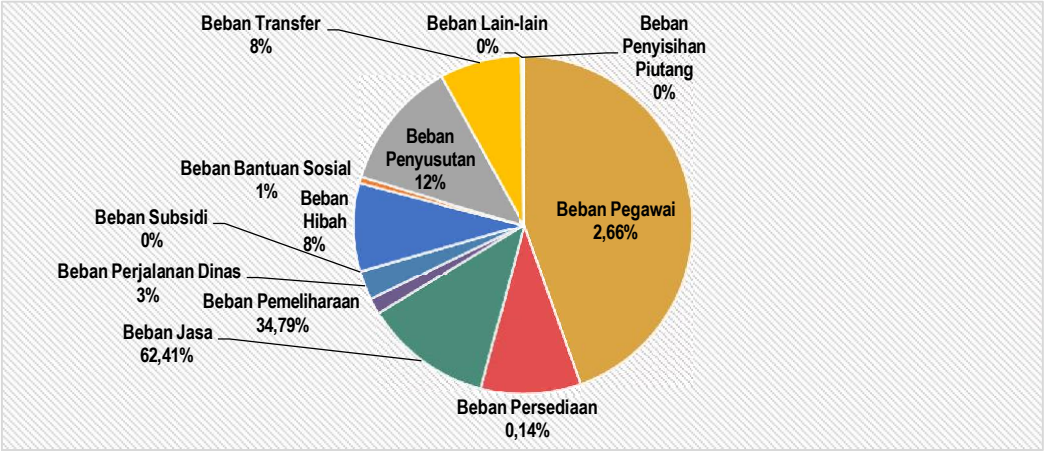

Gambar V.21 Komposisi beban Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024

D.2.a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp866.738.451.236,33. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp63.813.638.501,19 atau 7,95% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp802.924.812.735,14.

Perbedaan antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Beban Pegawai Tahun Berjalan (LO)	:	866.738.451.236,33
Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	:	(813.155.898.509,00)
Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan (Neraca)	:	(768.065.486,00)
Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 (Neraca)	:	12.296.602.095,00
Selisih	:	**65.111.089.336,33**
Penjelasan Selisih		
Beban dibayar dimuka tahun lalu	:	23.402.219,33
Beban dibayar dimuka tahun berjalan	:	(24.578.886,00)
Koreksi Ekuitas kurang catat utang belanja pegawai tahun lalu	:	(1.329.199.906,00)
koreksi reklasifikasi dari beban barang dan jasa BLUD	:	66.475.117.653,00
utang belanja barang jasa yang dibayar menggunakan blj pegawai	:	(34.770.000,00)
reklasifikasi dari utang belanja pegawai ke utang belanja barang dan jasa	:	1.118.256,00
JUMLAH	:	**65.111.089.336,33**

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.196 berikut.

Tabel V.196 Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	521.928.682.832,00	472.779.598.583,00	49.149.084.249,00	10,40
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	85.141.241.428,00	77.570.602.242,00	7.570.639.186,00	9,76
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	234.479.597.346,00	212.629.942.422,80	21.849.654.923,20	10,28
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.927.694.423,00	24.335.627.346,00	(407.932.923,00)	1,68)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	491.411.874,00	480.667.576,00	10.744.298,00	2,24
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	771.000.000,00	852.000.000,00	(81.000.000,00)	(9,51)
7.	Beban Pegawai BLUD	(1.176.666,67)	14.276.374.565,34	(14.277.551.232,01)	(100,01)
	JUMLAH	**866.738.451.236,33**	**802.924.812.735,14**	**63.813.638.501,19**	**7,95**

1) Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Tabel V.196 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp521.928.682.832,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.149.084.249,00 atau 10,40% jika dibandingkan TA 2023 sebesar Rp472.779.598.583,00, yang dijelaskan lebih rinci sebagaimana Tabel V.197 di bawah ini:

Tabel V.197 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Gaji Pokok ASN	394.071.009.306,00	355.199.803.721,00	38.871.205.585,00	10,94
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	36.547.051.095,00	32.984.946.942,00	3.562.104.153,00	10,80
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.964.230.000,00	4.830.820.000,00	133.410.000,00	2,76
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.867.876.540,00	30.067.968.700,00	2.799.907.840,00	9,31
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.270.010.000,00	2.970.530.000,00	(700.520.000,00)	(23,58)
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	21.184.151.984,00	20.420.870.751,00	763.281.233,00	3,74
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.818.404.247,00	1.412.152.063,00	406.252.184,00	28,77
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	51.312.429,00	5.132.368,00	46.180.061,00	899,78
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.957.098.588,00	21.957.772.904,00	2.999.325.684,00	13,66
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	799.387.563,00	732.403.827,00	66.983.736,00	9,15
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.398.151.080,00	2.197.197.307,00	200.953.773,00	9,15
	JUMLAH	**521.928.682.832,00**	**472.779.598.583,00**	**49.149.084.249,00**	**10,40**

2) Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp85.141.241.428,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.570.639.186,00 atau 9,76 % jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp77.570.602.242,00, yang dijelaskan lebih rinci sebagaimana Tabel V.198 di bawah ini:

Tabel V.198 Beban Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.741.093.800,00	30.007.680.194,50	1.733.413.605,50	5,78
2.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.686.704.471,00	5.423.005.259,00	263.699.212,00	4,86
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	95.611.996,00	88.908.929,00	6.703.067,00	7,54
4.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	47.617.831.161,00	42.051.007.859,50	5.566.823.301,50	13,24
	JUMLAH	**85.141.241.428,00**	**77.570.602.242,00**	**7.570.639.186,00**	**9,76**

3) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp234.479.597.346,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.849.654.923,20 atau 10,28% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp212.629.942.422,80 yang dijelaskan lebih rinci sebagaimana Tabel V.199 di bawah ini:

Tabel V.199 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	162.271.672.822,00	140.319.851.120,00	21.951.821.702,00	15,64
2.	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	414.685.200,00	151.776.300,00	262.908.900,00	173,22
3.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	482.860.000,00	3.606.515.000,00	(3.123.655.000,00)	(86,61)
4.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	54.678.420.856,00	65.449.918.248,80	(10.771.497.392,80)	(16,46)
5.	Beban Honorarium	(4.927.228,00)	3.101.881.754,00	(3.106.808.982,00)	(100,16)
6.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	13.834.885.696,00	-	13.834.885.696,00	-
7.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	2.802.000.000,00	-	2.802.000.000,00	-
	JUMLAH	**234.479.597.346,00**	**212.629.942.422,80**	**21.849.654.923,20**	**10,28**

4) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp23.927.694.423,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp407.932.923,00 atau 1,68% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp24.335.627.346,00, yang dijelaskan lebih rinci sebagaimana Tabel V.200 di bawah ini:

Tabel V.200 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (P enurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Uang Representasi DPRD	996.030.000,00	1.004.010.000,00	(7.980.000,00)	(0,79)
2.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	122.503.500,00	129.353.700,00	(6.850.200,00)	(5,30)
3.	Beban Tunjangan Beras DPRD	144.104.360,00	137.308.320,00	6.796.040,00	4,95
4.	Beban Uang Paket DPRD	85.260.000,00	86.058.000,00	(798.000,00)	(0,93)
5.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.444.243.500,00	1.455.814.500,00	(11.571.000,00)	(0,79)
6.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.038.075,00	126.154.350,00	(23.116.275,00)	(18,32)
7.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.353.000,00	15.529.500,00	(5.176.500,00)	(33,33)
8.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.628.000.000,00	5.670.000.000,00	(42.000.000,00)	(0,74)
9.	Beban Tunjangan Reses DPRD	871.500.000,00	1.417.500.000,00	(546.000.000,00)	(38,52)
10.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	21.714.500,00	129.087.000,00	(107.372.500,00)	(83,18)
11.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.124.957.488,00	8.260.811.976,00	(135.854.488,00)	(1,64)
12.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.952.000.000,00	5.904.000.000,00	48.000.000,00	0,81
13.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	423.990.000,00	-	423.990.000,00	-
	JUMLAH	**23.927.694.423,00**	**24.335.627.346,00**	**(407.932.923,00)**	**(1,68)**

5) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp491.411.874,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.744.298,00 atau 2,24% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp480.667.576,00, yang dijelaskan lebih rinci sebagaimana Tabel V.201 di bawah ini:

Tabel V.201 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	-	-
2.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-
3.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	-	-
4.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.041.640,00	3.041.640,00	-	-
5.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	653.994,00	1.784.696,00	(1.130.702,00)	(63,36)
6.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.960,00	1.960,00	-	-
7.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.328.000,00	5.328.000,00	-	-
8.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	-	-
9.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	-	-
10.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	278.657.000,00	314.662.000,00	(36.005.000,00)	(11,44)
11.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutn Retribusi Daerah	47.880.000,00	-	47.880.000,00	-
	JUMLAH	**491.411.874,00**	**480.667.576,00**	**10.744.298,00**	**2,24**

6) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp771.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp81.000.000,00 atau 9,51% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp852.000.000,00.

7) Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.176.666,67. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.277.551.232,01 atau 100,01% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp14.276.374.565,34.

D.2.b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp186.724.449.804,50. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.873.811.768,46 atau 8,03% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp172.850.638.036,04.

Perbedaan antara Beban Persediaan – LO dengan Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan – LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO)	:	186.724.449.804,50
Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA)	:	(92.933.368.057,00)
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	:	34.232.045.572,10
Persediaan Barang Tahun 2023 (Neraca)	:	(33.614.700.012,97)
Selisih	:	**94.408.427.306,63**
Penjelasan Selisih		
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOS	:	28.755.302.286,00
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD	:	40.098.955.168,00
Reklasifikasi Belanja Modal	:	460.509.421,00
Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan	:	395.723.000,00
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi Belanja Hibah	:	1.774.555.248,00
Utang Belanja Barang Tahun 2024	:	9.187.490.115,00
pemberian hibah dari pemerintah lain (Provinsi/Kabupaten Lain)	:	19.181.055.889,48
pemberian hibah dari Kementerian	:	4.803.932.492,25
pemberian hibah dari Pihak Ketiga	:	811.382.060,68
kurang catat saldo persediaan Tahun 2024	:	1.576.400.715,64
Serah terima persediaan antar OPD (Masuk)	:	27.257.702.396,16
Kurang Reklas dari belanja BOK	:	13.736.759,00
Bertambahnya persediaan karena reklas dari Belanja Modal (barang ekstrakomptabel)	:	188.670.508,73

penghapusan persediaan	:	(1.472.635.777,78)
Reklasifikasi beban jasa	:	(75.408.560,00)
Reklasifikasi Aset Tetap	:	(1.388.149.750,00)
Utang Belanja Tahun 2023	:	(2.322.987.247,00)
pemberian hibah barang persediaan (keluar)	:	(7.543.249.476,58)
koreksi atas lebih catat saldo persediaan Tahun 2023	:	(23.118.777,52)
Serah terima persediaan antar OPD (Keluar)	:	(27.257.702.396,16)
JUMLAH	:	**94.408.427.306,63**

Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.202 berikut.

Tabel V.202 Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Barang Pakai Habis	186.395.443.604,50	172.790.653.036,04	13.604.790.579,46	7,87
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	78.160.000,00	36.060.000,00	42.100.000,00	116,75
3.	Beban Barang Bekas Dipakai	-	23.925.000,00	(23.925.000,00)	(100,00)
4.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitallisasi	250.846.200,00	-	250.846.200,00	100,00
	JUMLAH	**186.724.449.804,50**	**172.850.638.036,04**	**13.873.811.768,46**	**8,03**

1) Beban Barang Pakai Habis

Beban Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp186.395.443.615,50. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.604.790.579,46 atau 7,87% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp172.790.653.036,04.

2) Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp78.160.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp42.100.000,00 atau 116,75% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp36.060.000,00. Beban Barang Tak Habis Pakai berupa komponen peralatan yang berada di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan komponen rambu-rambu yang berada di Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan.

3) Beban Barang Bekas Dipakai

Beban Barang Bekas Dipakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp23.925.000,00 atau 100% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp23.925.000,00.

4) Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp250.846.200,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp250.846.200,00 atau 100% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Nihil.

D.2.c. Beban Jasa

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp236.356.614.992,33. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp33.361.934.708,33 atau 16,43% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp202.994.680.284,00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.203 berikut.

Tabel V.203 Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Jasa Kantor	181.496.629.326,00	153.375.187.239,00	28.121.442.087,00	18,34
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	42.137.105.779,33	34.419.267.929,00	7.717.837.850,33	22,42
3.	Beban Sewa Tanah	139.672.027,00	139.220.000,00	452.027,00	0,32
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.570.949.467,00	3.199.994.209,00	370.955.258,00	11,59
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.098.884.400,00	1.223.713.945,00	(124.829.545,00)	(10,20)
6.	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.000.000,00	23.000.000,00	(11.000.000,00)	(47,83)
7.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	114.452.000,00	121.109.625,00	(6.657.625,00)	(5,50)
8.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	769.000,00	-	769.000,00	100,00
9.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.129.929.732,00	1.992.642.179,00	137.287.553,00	6,89
10.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.454.102.337,00	3.635.001.627,00	(2.180.899.290,00)	(60,00)
11.	Beban jasa Ketersediaan layanan (Availability Payment)	5.200.000,00	-	5.200.000,00	100,00
12.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	1.164.866.341,00	(1.164.866.341,00)	(100,00)
13.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.600.015.586,00	1.120.946.478,00	479.069.108,00	42,74
14.	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	583.894.924,00	602.182.358,00	(18.287.434,00)	(3,04)
15.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	236.104.904,00	120.200.000,00	115.904.904,00	96,43
16.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.776.905.510,00	1.857.348.354,00	(80.442.844,00)	(4,33)
	JUMLAH	**236.356.614.992,33**	**202.994.680.284,00**	**33.361.934.708,33**	**16,43**

1) Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp181.496.629.326,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.121.442.087,00 atau 18,34% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp153.375.187.239,00.

2) Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban Iuran Jaminan/Asuransi Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp42.137.105.779,33. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.717.837.850,33 atau 22,42% jika diband ingkan dengan TA 2023 sebesar Rp34.419.267.929,00.

3) Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp139.672.027,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp452.027,00 atau 0,32% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp139.220.000,00.

4) Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar 3.570.949.467,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp370.955.258,00 atau 11,59% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp3.199.994.209,00.

5) Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar 1.098.884.400,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp124.829.545,00 atau 10,20% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.223.713.945,00.

6) Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp12.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.000.000,00 atau 47,83% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp23.000.000,00.

7) Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp114.452.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.657.625,00 atau 5,50% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp121.109.625,00.

8) Beban Sewa Aset Tidak Berwujud

Beban Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp769.000,00, sedangkan untuk TA 2023 sebesar Nihil.

9) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp2.129.929.732,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp137.287.553,00 atau 6,89% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.992.642.179,00.

10) Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.454.102.337,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp2.180.899.290,00 atau 60,0% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp3.635.001.627,00.

11) Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp5.200.000,00, sedangkan untuk TA 2023 sebesar Nihil.

12) Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Pendidikan PNS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.164.866.341,00 atau 100% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.164.866.341,00.

13) Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.600.015.586,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp479.069.108,00 atau 42,74% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.120.946.478,00.

14) Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp583.894.924,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.287.434,00 atau 3,04% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp602.182.358,00.

15) Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp236.104.904,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp115.904.904,00 atau 96,43% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp120.200.000,00.

16) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar 1.776.905.510,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp80.442.844,00 atau 4,33% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.857.348.354,00.

D.2.d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp29.455.652.483,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.658.259.295,00 atau 5,97% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp27.797.393.188,00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.204 berikut.

Tabel V.204 Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	47.952.126,00	15.000.000,00	32.952.126,00	219,68
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.199.848.841,00	11.239.207.652,00	(1.039.358.811,00)	(9,25)
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.086.371.766,00	9.525.004.893,00	561.366.873,00	5,89
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.994.492.750,00	6.976.680.776,00	2.017.811.974,00	28,92
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	14.090.000,00	9.499.867,00	4.590.133,00	48,32
6.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	112.897.000,00	32.000.000,00	80.897.000,00	252,80
	JUMLAH	**29.455.652.483,00**	**27.797.393.188,00**	**1.658.259.295,00**	**5,97**

1) Beban Pemeliharaan Tanah

Beban Pemeliharaan Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp47.952.126,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp32.952.126,00 atau 219,68% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp15.000.000,00. Kenaikan tersebut berasal dari pemeliharaan tanah GOR Wonolelo pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp10.199.848.841,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 1.039.358.811,00 atau 9,25% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp11.239.207.652,00.

3) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar 10.086.371.766,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 561.366.873,00 atau 5,89% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp9.525.004.893,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.205 di bawah ini:

Tabel V.205 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.427.952.542,00	3.627.200.179,00	(199.247.637,00)	(5,49)
2.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	11.716.500,00	54.714.000,00	(42.997.500,00)	(78,59)
3.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.780.570.566,00	2.456.893.756,00	323.676.810,00	13,17
4.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	13.385.000,00	(13.385.000,00)	(100,00)
5.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.595.320.993,00	2.053.009.177,00	542.311.816,00	26,42
6.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	40.000.000,00	199.453.794,00	(159.453.794,00)	(79,95)
7.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	207.177.687,00	-	207.177.687,00	-
8.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	-	8.400.000,00	(8.400.000,00)	(100,00)
9.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	34.383.000,00	32.375.031,00	2.007.969,00	6,20
10.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	318.836.809,00	587.798.986,00	(268.962.177,00)	(45,76)
11.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	105.441.010,00	-	105.441.010,00	-
12.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	12.950.000,00	(12.950.000,00)	(100,00)
13.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	564.972.659,00	435.980.820,00	128.991.839,00	29,59
14.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	-	38.023.050,00	(38.023.050,00)	(100,00)
15.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	-	4.821.100,00	(4.821.100,00)	(100,00)
	JUMLAH	**10.086.371.766,00**	**9.525.004.893,00**	**561.366.873,00**	**5,89**

4) Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp8.994.492.750,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.017.811.974,00 atau 28,92% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp6.976.680.776,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.206 di bawah ini:

Tabel V.206 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	5.203.160.500,00	3.496.346.435,00	1.706.814.065,00	48,82
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	1.702.040.000,00	-	1.702.040.000,00	-
3.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	112.297.000,00	214.268.000,00	(101.971.000,00)	(47,59)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	146.752.000,00	376.152.000,00	(229.400.000,00)	(60,99)
5.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	477.518.000,00	510.496.500,00	(32.978.500,00)	(6,46)
6.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.057.493.000,00	1.243.777.500,00	(186.284.500,00)	(14,98)
7.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	119.575.000,00	119.570.000,00	5.000,00	0,004
8.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	49.048.500,00	521.658.600,00	(472.610.100,00)	(90,60)
9.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	69.067.350,00	199.502.000,00	(130.434.650,00)	(65,38)
10.	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	-	85.531.801,00	(85.531.801,00)	(100,00)
11.	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	-	199.379.940,00	(199.379.940,00)	(100,00)
12	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	9.998.000,00	(9.998.000,00)	(100,00)
13	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	12.066.000,00	-	12.066.000,00	-
14	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	11.717.400,00	-	11.717.400,00	-
15.	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	33.758.000,00	-	33.758.000,00	-
	JUMLAH	**8.994.492.750,00**	**6.976.680.776,00**	**2.017.811.974,00**	**28,92**

5) Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp14.090.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.590.133,00 atau 48,32% sedangkan pada TA 2023 sebesar Rp9.499.867,00.

6) Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp112.897.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp80.897.000,00 atau 252,80%, sedangkan pada TA 2023 adalah Rp32.000.000,00. Kenaikan tersebut karena terdapat anggaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud pada TA 2023 yang berada di Bappeda dan BPPKAD.

D.2.e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar 53.169.621.613,00. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.905.743.249,00 atau 5,78% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp50.263.878.364,00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.207 berikut.

Tabel V.207 Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (P enurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.169.621.613,00	50.263.878.364,00	2.905.743.249,00	5,78
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-
	JUMLAH	**53.169.621.613,00**	**50.263.878.364,00**	**2.905.743.249,00**	**5,78**

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp53.169.621.613,00 berupa Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sedangkan pada TA 2023 sebesar Rp50.263.878.364,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dilihat pada Tabel V.208 di bawah ini.

Tabel V.208 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp) 2024	2023	Kenaikan/ (Pe nurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	25.745.608.567,00	22.579.356.935,00	3.166.251.632,00	14,02
2.	Beban Perjalanan Dinas Tetap	5.234.992.002,00	8.628.859.700,00	(3.393.867.698,00)	(39,33)
3.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.354.351.920,00	17.606.555.729,00	3.747.796.191,00	21,29
4.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	417.815.000,00	416.525.000,00	1.290.000,00	0,31
5.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	416.854.124,00	1.032.581.000,00	(615.726.876,00)	(59,63)
	JUMLAH	**53.169.621.613,00**	**50.263.878.364,00**	**2.905.743.249,00**	**5,78**

Pada Tabel V.208 diatas dapat dilihat bahwa Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota mengalami penurunan signifikan karena terdapat penurunan nilai Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar 67,60% atau Rp364.804.000,00 dan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 92,79% atau Rp345.483.876,00.

D.2.f. Beban Subsidi

Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp574.096.661,00. Nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp64.118.671,00 atau 10,05% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp638.215.332,00. Beban Subsidi dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM berupa bantuan subsidi KURDA kepada UKM melalui PT. BPR Bank Wonosobo.

D.2.g. Beban Hibah

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp164.223.938.985,28. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.695.551.663,61 atau 12,85% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp145.528.387.321,67.

Perbedaan antara Belanja Hibah – LRA dengan Beban Hibah – LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)	:	164.223.938.985,28
Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)	:	(151.469.623.746,00)
Selisih	:	**12.754.315.239,28**
Penjelasan Selisih		
Belanja hibah (DPUPR) ke instansi vertikal namun belum diserahterimakan sehingga masih tercatat pada persediaan	:	(1.774.555.248,00)
Hibah ke Pemerintah Desa	:	11.136.580.070,70
Hibah ke lembaga kesehatan swasta	:	998.717.871,00
Hibah kepada pemda lainnya	:	679.116.545,58
Hibah kepada masyarakat	:	73.456.000,00
Jumlah	:	**12.754.315.239,28**

Rincian Beban Hibah dapat dilihat pada Tabel V.209 sebagai berikut:

Tabel V.209 Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.155.157.800,00	18.540.311.539,00	13.614.846.261,00	73,43
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	11.813.203.556,28	7.302.382.071,63	4.510.821.484,65	61,77
3.	Beban Hibah Uang kepada BUMD	-	46.203.193,86	(46.203.193,86)	(100,00)
4.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	87.808.590.576,00	106.234.354.685,18	(18.425.764.109,18)	(17,34)
5.	Beban Hibah Dana BOS	12.101.306.035,00	12.330.735.832,00	(229.429.797,00)	(1,86)
6.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.107.778.000,00	1.074.400.000,00	33.378.000,00	3,11
7.	Beban Hibah Dana BOSP	19.237.903.018,00	-	19.237.903.018,00	-
	JUMLAH	**164.223.938.985,28**	**145.528.387.321,67**	**18.695.551.663,61**	**12,85**

1) Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp32.155.157.800,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp13.614.846.261,00 atau 73,43% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp18.540.311.539,00. Kenaikan tersebut disebabkan salah satunya karena dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum di Tahun 2024 maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo menghibahkan sejumlah uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo. Selain itu hibah juga diberikan kepada instansi pusat seperti Kodim dan Polres untuk keperluan pekerjaan penataan lingkungan kantor. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2024 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

2) Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp11.813.203.556,28, nilai beban tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.510.821.484,65 atau 61,77% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp7.302.382.071,63. Kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah lainnya yaitu Pemerintah Desa Berupa Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

3) Beban Hibah Uang kepada BUMD

Beban Hibah Uang kepada BUMD Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp46.203.193,86 atau 100%, sedangkan pada TA 2023 adalah Rp46.203.193,86.

4) Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp87.808.590.576,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.425.764.109,18 atau 17,34% jika

dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp106.234.354.685,18, dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.210 berikut.

Tabel V.210 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.380.400.000,00	7.997.750.357,89	(1.617.350.357,89)	(20,22)
2.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.357.125.955,00	66.183.858.359,29	(21.826.732.404,29)	(32,98)
3.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	37.071.064.621,00	32.052.745.968,00	5.018.318.653,00	15,66
	JUMLAH	**87.808.590.576,00**	**106.234.354.685,18**	**(18.425.764.109,18)**	**(17,34)**

5) Beban Hibah Dana BOS

Beban Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp12.101.306.035,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp229.429.797,00 atau 1,86%, jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp12.330.735.832,00.

6) Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.107.778.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp33.378.000,00 atau 3,11% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.074.400.000,00.

7) Bantuan Hibah Dana BOSP

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp19.237.903.018,00, sedangkan untuk TA 2023 adalah Nihil.

D.2.h. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp11.602.909.582,00. Nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.745.438.318,00 atau 13,08% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp13.348.347.900,00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.211 berikut.

Tabel V.211 Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penur ınan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	6.970.219.182,00	7.808.347.900,00	(838.128.718,00)	(10,73)
2.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.600.000.000,00	2.435.000.000,00	165.000.000,00	6,78
3.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	2.032.690.400,00	3.105.000.000,00	1.072.309.600,00)	(34,53)
	JUMLAH	**11.602.909.582,00**	**13.348.347.900,00**	**(1.745.438.318,00)**	**(13,08)**

Perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial – LRA dengan Beban Bantuan Sosial – LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Beban Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LO)	:	11.602.909.582,00
Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LRA)	:	(10.391.240.400,00)
Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023	:	40.990.000,00
Selisih	:	1.252.659.182,00
Penjelasan Selisih		
Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	:	1.252.659.182,00
Jumlah	:	1.252.659.182,00

1) Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp6.970.219.182,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp838.128.718,00 atau 10,73% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp7.808.347.900,00, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.212 di bawah ini:

Tabel V.212 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.758.550.000,00	6.631.080.000,00	(872.530.000,00)	(13,16)
2.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.211.669.182,00	1.177.267.900,00	34.401.282,00	2,92
		6.970.219.182,00	**7.808.347.900,00**	**(838.128.718,00)**	**(10,73)**

2) Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp2.600.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp165.000.000,00 atau 6,78% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp2.435.000.000,00. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan berupa perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah bagi korban bencana.

3) Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp2.032.690.400,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.072.309.600,00 atau 34,53% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp3.105.000.000,00. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.213 di bawah ini :

Tabel V.213 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp) 2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.385.000.000,00	3.105.000.000,00	(1.720.000.000,00)	(55,39)
2.	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	647.690.400,00	-	647.690.400,00	-
	JUMLAH	**2.032.690.400,00**	**3.105.000.000,00**	**(1.072.309.600,00)**	**(34,53)**

D.2.i. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp241.996.363.012,50. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp78.146.722.667,22 atau 47,69% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp163.849.640.345,28. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.214 berikut.

Tabel V.214 Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp) 2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	59.201.878.961,83	65.663.200.311,31	(6.461.321.349,48)	(9,84)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.890.536.640,93	21.555.217.396,98	9.335.319.243,95	43,31
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	150.708.918.757,34 .	75.435.300.781,18	75.273.617.976,16	99,79
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	121.766.902,00	624.868.619,81	(503.101.717,81)	(80,51)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	229.781.527,41	-	229.781.527,41	100,00
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	240.581.997,00	-	240.581.997,00	100,00
7	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	602.898.226,00	571.053.236,00	31.844.990,00	5,58
	JUMLAH	**241.996.363.012,50**	**163.849.640.345,28**	**78.146.722.667,23**	**47,69**

1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp59.201.878.961,83, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.461.321.349,48 atau 9,84% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp65.663.200.311,31.

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	:	59.201.878.961,83
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (Neraca)	:	(552.396.416.550,76)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 (Neraca)	:	592.287.115.994,32
Selisih	:	**99.092.578.405,38**
Penjelasan Selisih		
Mutasi tambah tahun berjalan:		
Serah Terima Antar OPD (Masuk)	:	(515.415.030,00)
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	:	(27.270.000,00)
Mutasi tambah hasil inventarisasi:		
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	:	-
Reklasifikasi Antar Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	:	(10.899.710.983,06)
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	:	(9.547.558.068,93)
Koreksi Pencatatan karena Pecah (Penambahan)	:	(542.452.913,00)
Koreksi Pencatatan karena Gabung (Penambahan)	:	(98.905.731,00)

Koreksi Kesalahan Pencatatan	:	(757.271.717,23)
Mutasi kurang tahun berjalan:		
Serah Terima Antar OPD (Keluar)	:	515.415.030,00
Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	:	18.492.500,00
Hibah Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	:	212.998.750,00
Mutasi kurang hasil inventarisasi:		
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	:	12.727.268,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	:	83.882.538.480,84
Reklasifikasi Antar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	:	9.557.826.403,06
Koreksi Pencatatan karena Pecah (Pengurangan)	:	555.352.883,42
Koreksi Pencatatan karena Gabung (Pengurangan)	:	4.200.000,00
Lebih Catat Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	:	82.534.231,00
Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -Peralatan dan Mesin	:	26.609.489.992,28
Koreksi Kesalahan Pencatatan	:	29.587.310,00
Jumlah	:	**99.092.578.405,38**

2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp30.890.536.640,93, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.335.319.243,95 atau 43,31% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp21.555.217.396,98, dengan rincian sebagaimana Tabel V.215 berikut.

Tabel V.215 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.832.735.157,93	20.173.420.666,98	9.659.314.490,95	47,88
2.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	591.117.505,00	969.633.705,00	(378.516.200,00)	(39,04)
3.	Beban Penyusutan Monumen	138.091.724,00	139.440.301,00	(1.348.577,00)	(0,97)
4.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	328.592.254,00	272.722.724,00	55.869.530,00	20,49
	JUMLAH	**30.890.536.640,93**	**21.555.217.396,98**	**9.335.319.243,95**	**43,31**

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	:	30.890.536.640,93
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 (Neraca)	:	(369.757.769.298,80)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 (Neraca)	:	330.794.240.225,77
Selisih	:	**(8.072.992.432,10)**
Penjelasan Selisih		
Mutasi Tambah :		
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	:	(826.784.852,00)
Reklasifikasi dari Properti Investasi	:	(1.075.220.086,00)
Reklasifikasi dari Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	:	(9.173.853.581,00)
Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	:	(0,13)
Mutasi Kurang :		
Lebih Catat Akumulasi Penyusutan	:	66.364.904,03
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	:	1.461.719.093,00
Hibah Ke Pemerintah Desa	:	580.622.288,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	:	458.706.132,00
Penghapusan Aset Tetap Yang Akan Ditindaklanjuti Dengan Penyertaan Modal	:	435.453.670,00
Jumlah	:	**(8.072.992.432,10)**

3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp136.434.131.169,32, nilai beban tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp60.998.830.388,14 atau 80,86% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp75.435.300.781,18 dengan rincian sebagaimana Tabel V.216 berikut.

Tabel V.216 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	134.594.126.574,26	58.124.683.116,60	76.469.443.457,66	113,56
2.	Beban Penyusutan Bangunan Air	13.703.448.249,08	14.613.573.001,58	(910.124.752,50)	(6,23)
3.	Beban Penyusutan Instalasi	2.237.483.766,00	2.524.234.852,00	(286.751.086,00)	(11,36)
4.	Beban Penyusutan Jaringan	173.860.168,00	172.809.811,00	1.050.357,00	0,61
	JUMLAH	**150.708.918.757,34**	**75.435.300.781,18**	**75.273.617.976,16**	**99,79**

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)	:	136.434.131.169,32
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 (Neraca)	:	(1.808.555.390.554,76)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 (Neraca)	:	1.676.533.053.689,35
Selisih	:	**4.411.794.303.91**
Penjelasan Selisih		
Mutasi Tambah:		
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Jalan, Irigasi & Jaringan	:	(136.476.150,00)
Koreksi sensus:		
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Jalan, Irigasi & Jaringan	:	(266.714.913,07)
Koreksi Pencatatan karena Pecah (Penambahan)	:	(15.156.124,02)
Mutasi Kurang:		
Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Jalan, Irigasi & Jaringan	:	138.539.347,00
Hibah Ke Pemerintah Desa	:	3.802.224.669,00
Hibah Ke Pemerintah Desa (Inventarisasi)	:	889.377.475,00
Jumlah	:	**4.411.794.303,91**

4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp121.766.902,00, nilai beban tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp503.101.717,81 atau 80,51% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp624.868.619,81.

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LO)	:	121.766.902,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 (Neraca)	:	(980.232.874,81)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 (Neraca)	:	1.438.453.837,81)
Selisih	:	**579.987.865,00**

Penjelasan Selisih		
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	:	(532.832.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	:	450.692.889,00
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	:	662.126.976,00
Jumlah	:	**579.987.865,00**

5) Beban Penyusutan Properti Investasi

Beban Penyusutan Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp240.581.997,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp240.581.997,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Nihil.

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun Berjalan (LO)	:	240.581.997,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024 (Neraca)	:	(4.628.754.813,00))
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023 (Neraca)	:	1.438.453.837,81
Selisih	:	**616.513.954,00**
Penjelasan Selisih		
Reklasifikasi dari Properti Investasi	:	1.075.220.086,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	:	(458.706.132,00)
Jumlah	:	**616.513.954,00**

6) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp602.898.226,00, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp31.844.990,00 atau 5,58% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp571.053.236,00.
Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)	:	602.898.226,00 0
Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca)	:	(2.157.124.124,00)
Akumulasi Amortisasi Tahun 2023 (Neraca)	:	5.210.636.461,00
Selisih	:	**3.656.410.563,00**
Penjelasan Selisih		
penghapusan aset tidak beruwujud software	:	3.656.410.563,00
Jumlah	:	**3.656.410.563,00**

D.2.j. Beban Transfer

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp151.726.744.070,00. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.061.372.500,00 atau 22,69% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp123.665.371.570,00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.217 berikut.

Tabel V.217 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Pe nurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bagi Hasil	9.051.135.000,00	6.640.362.500,00	2.410.772.500,00	36,30
2.	Beban Bantuan Keuangan	142.675.609.070,00	117.025.009.070,00	25.650.600.000,00	21,92
	JUMLAH	**151.726.744.070,00**	**123.665.371.570,00**	**28.061.372.500,00**	**22,69**

Realisasi Belanja Transfer-LRA sebesar Rp401.929.916.070,00 sedangkan Beban Transfer-LO sebesar Rp151.726.744.070,00, terdapat selisih Rp250.203.172.000,00 yang merupakan realisasi Belanja Dana Desa yang tidak masuk dalam Laporan Operasional.

1) Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp9.051.135.000,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.410.772.500,00 atau 36,30% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp6.640.362.500,00, yang diklasifikasikan menjadi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa serta Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagaimana Tabel V.218 di bawah ini.

Tabel V.218 Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.940.500.000,00	5.523.000.000,00	1.417.500.000,00	25,67
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.110.635.000,00	1.117.362.500,00	993.272.500,00	88,89
	JUMLAH	**9.051.135.000,00**	**6.640.362.500,00**	**2.410.772.500,00**	**36,30**

Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 berada di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah – PPKD.

2) Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp142.675.609.070,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.650.600.000,00 atau 21,92% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp117.025.009.070,00, yang dijelaskan sebagaimana Tabel V.219 di bawah ini.

Tabel V.219 Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	-	106.343.809.070,00	(106.343.809.070,00)	(100)
2.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	142.675.609.070,00	10.681.200.000,00	131.994.409.070,00	1235,76
	JUMLAH	**142.675.609.070,00**	**117.025.009.070,00**	**25.650.600.000,00**	**21,92**

Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 berada di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah – PPKD.

D.2.k. Beban Penyisihan Piutang

Tabel V.195 di atas menunjukkan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Rp2.619.721.320,90, nilai beban tersebut mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp1.797.650.570,96 atau 218,67% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp822.070.749,94. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.220 berikut.

Tabel V.220 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	837.149.157,30	266.228.753,70	570.920.403,60	214,45
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.785.948.323,60	446.957.722,50	1.338.990.601,10	299,58
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	773.840,00	118.984.273,74	(118.210.433,74)	(99,35)
4.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(4.150.000,00)	(10.100.000,00)	5.950.000,00	(58,91)
	JUMLAH	**2.619.721.320,90**	**822.070.749,94**	**1.797.650.570,96**	**218,67**

1) Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar sebesar Rp837.149.157,30, nilai beban tersebut mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp570.920.403,60 atau 214,45% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp266.228.753,70. Kenaikan tersebut dikarenakan terdapat perubahan kualitas piutang, terutama pada Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2). Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagaimana Tabel V.221 berikut.

Tabel V.221 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	1.195.942,90	-	1.195.942,90	-
1.	Beban Penyisihan Pajak Restoran	523.800,00	87.500,00	436.300,00	498,63
2.	Beban Penyisihan Pajak Reklame	4.353.844,50	123.856.426,90	(119.502.582,40)	(96,48)
3.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	7.500,00	639.000,00	(631.500,00)	(98,83)
4.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	-	1.377.783,50	(1.377.783,50)	(100,00)
5.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	831.068.069,90	140.268.043,30	690.800.026,60	492,49
	JUMLAH	**837.149.157,30**	**266.228.753,70**	**570.920.403,60**	**214,45**

2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban Penyisihan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.785.948.323,60, nilai beban tersebut mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp1.338.990.601,10 atau 299,58% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp446.957.722,50, dengan rincian sebagaimana Tabel V.222 berikut.

Tabel V.222 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	1.240.758.427,60	374.874.497,50	865.883.930,10	230,98
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	545.189.896,00	72.083.225,00	473.106.671,00	656,33
	JUMLAH	**1.785.948.323,60**	**446.957.722,50**	**1.338.990.601,10**	**299,58**

Berikut adalah penjelasan terkait Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024:

a) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp1.240.758.427,60. Nilai tersebut mengalami kenaikan yang signifikan

sebesar Rp865.883.930,10 atau 230,98% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp374.874.497,50, penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.223 berikut:

Tabel V.223 Beban Penyisihan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	38.852.000,00	(38.852.000,00)	(100.00)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	-	276.952.383,50	(276.952.383,50)	(100,00)
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(21.882.625,00)	59.070.114,00	(80.952.739,00)	(137,05)
4.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	851.965.873,10	-	851.965.873,10	100,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Los	218.358.039,50	-	218.358.039,50	100,00
6.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	192.317.140,00	-	192.317.140,00	100,00
	JUMLAH	**1.240.758.427,60**	**374.874.497,50**	**865.883.930,10**	**230,98**

b) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp545.189.896,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp473.106.671,00 atau 656,33% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp72.083.225,00 dikarenakan terdapat reklasifikasi piutang lain-lain PAD yang Sah menjadi piutang Retribusi Jasa Usaha, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.224 berikut:

Tabel V.224 Beban Penyisihan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (P enurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	72.083.225,00	(72.083.225,00)	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	9.637.000,00	-	9.637.000,00	100,00
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Aset Daerah	533.302.896,00	-	533.302.896,00	100,00
	JUMLAH	**545.189.896,00**	**72.083.225,00**	**473.106.671,00**	**656,33**

3) Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp773.840,00, nilai beban tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp118.210.433,74 atau 99,35% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp118.984.273,74 dikarenakan terdapat reklasifikasi piutang lain-lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi Jasa Usaha, dengan rincian sebagaimana Tabel V.225 berikut.

Tabel V.225 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	773.840,00	78.628.061,84	(77.854.221,84)	(99,02)
2.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	-	40.356.211,90	(40.356.211,90)	(100)
	JUMLAH	**773.840,00**	**118.984.273,74**	**(118.210.433,74)**	**(99,35)**

4) Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar (Rp4.150.000,00) berupa penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang dana bergulir, sedangkan pada TA 2023 sebesar (Rp10.100.000,00).

D.2.l. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah Nihil, nilai beban tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp179.947.340,00, atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp179.947.340,00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.226 berikut.

Tabel V.226 Beban Lain - lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Lain-lain	-	-	-	-
2.	Beban Barang Ekstra Komptable	-	179.947.340,00	(179.947.340,00)	(100,00)
	JUMLAH	**-**	**179.947.340,00**	**(179.947.340,00)**	**(100,00)**

1) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp179.947.340,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp179.947.340,00. Beban Lain-lain tersebut merupakan beban barang ekstra komptabel.

D.3. SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI

Surplus/(Defisit) dari Operasi merupakan selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan Defisit Dari Operasi sebesar Rp63.762.066.931,87, nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp274.073.427.618,83 atau 130,32% dibandingkan dengan TA 2023 yang mendapatkan surplus sebesar Rp210.311.360.686,95, dengan perhitungan sebagaimana Tabel V.227 berikut.

Tabel V.227 Surplus/(Defisit) Dari Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan - LO	1.881.426.496.828,97	1.915.174.743.853,02	(33.748.247.024,05)	(1,76)
2.	Beban	1.945.188.563.760,84	1.704.863.383.166,07	240.325.180.594,78	14,10
	Surplus/(Defisit)=1-2	**(63.762.066.931,87)**	**210.311.360.686,95**	**(274.073.427.618,83)**	**(130,32))**

D.4. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebesar Rp49.770.696.577,59. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp106.356.556.277,06 atau 68,12% jika dibandingkan dengan TA 2023 yang juga mendapatkan defisit sebesar Rp156.127.252.854,65, dengan uraian sebagaimana Tabel V.228 berikut.

Tabel V.228 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	1.111.000,00	661.982.003,00	(660.871.003,00)	(99,83)
2.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.005.568.811,00	24.370.465.388,00	(15.364.896.577,01)	(63,05)
3.	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	(58.355.387.495,76)	(45.457.820.106,24)	(12.897.567.389,52)	28,37
4.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(421.988.892,83)	(135.701.880.139,42)	135.279.891.246,59	(99,69)
	Jumlah	**(49.770.696.577,59)**	**(156.127.252.854,66)**	**106.356.556.277,06**	**(68,12)**

D.4.a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar TA 2024 adalah sebesar Rp1.111.000,00, nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp660.871.003,00 atau 99,83% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp661.982.003,00. Surplus Penjualan Aset Non Lancar berasal dari BPPKAD dengan rincian sebagaimana Tabel V.229 berikut:

Tabel V.229 Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	RSUD	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
2.	DPMPTSP	-	815.000,00	(815.000,00)	(100,00)
3.	Disdagkop UKM	-	305.000,00	(305.000,00)	(100,00)
4.	Kel Sambek	-	700.000,00	(700.000,00)	(100,00)
5.	Kel Kertek	-	15.000,00	(15.000,00)	(100,00)
6.	Kel Wringinanom	-	23.000,00	(23.000,00)	(100,00)
7.	Kec Mojotengah	-	344.500,00	(344.500,00)	(100,00)
8.	Kel Kalibeber	-	18.500,00	(18.500,00)	(100,00)
9.	Kel Mudal	-	63.500,00	(63.500,00)	(100,00)
10.	Kel Andongsili	-	30.000,00	(30.000,00)	(100,00)
11.	Kec Kalikajar	-	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
12.	Kel Kaliwiro	-	5.000,00	(5.000,00)	(100,00)
13.	Kec Wadaslintang	-	986.527,00	(986.527,00)	(100,00)
14.	Kel Wadaslintang	-	82.000,00	(82.000,00)	(100,00)
15.	Kec Sukoharjo	-	84.666,00	(84.666,00)	(100,00)
16.	Inspektorat	-	1.530.000,00	(1.530.000,00)	(100,00)
17.	BPPKAD	1.111.000,00	646.596.310,00	(645.485.310,00)	(99,83)
18.	BKD	-	183.000,00	(183.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**1.111.000,00**	**661.982.003,00**	**(660.871.003,00)**	**(99,83)**

D.4.b. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp9.005.568.811,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp15.364.896.577,00 atau 63,05% jika dibandingkan TA 2023 adalah sebesar Rp24.370.465.388,00. Kenaikan signifikan tersebut sebagian besar karena terdapat inventarisasi Barang Milik Daerah pada TA 2024 di DPUPR terkait pencatatan pecah berupa Jalan Kabupaten dan Jalan Lainnya. Selain itu, pada PPKD terdapat penyesuaian nilai investasi pada BUMD dengan pencatatan metode Ekuitas. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat pada Tabel V.230 berikut:

Tabel V.230 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dikpora	40.836.935,00	271.509.612,00	(230.672.677,00)	(84,96)
2.	Pusk Kec Kertek 1	-	4.816.108,00	(4.816.108,00)	(100,00)
3.	Pusk Kec Selomerto 1	-	38.446.215,00	(38.446.215,00)	(100,00)
4.	Pusk Kec Leksono 1	-	19.881.321,00	(19.881.321,00)	(100,00)
5.	Pusk Kec Watumalang	-	844.291,00	(844.291,00)	(100,00)
6.	Pusk Kec Mojotengah	-	2.021.927,00	(2.021.927,00)	(100,00)
7.	Pusk Kec Garung	-	2.152.408,00	(2.152.408,00)	(100,00)
8.	Pusk Kec Kejajar 1	-	28.372,00	(28.372,00)	(100,00)
9.	Pusk Kec Kalikajar 1	-	2.476.234,00	(2.476.234,00)	(100,00)
10.	Pusk Kec Sapuran	-	4.241.579,00	(4.241.579,00)	(100,00)
11.	Pusk Kec Kepil 1	-	2.798.300,00	(2.798.300,00)	(100,00)
12.	Pusk Kec Kaliwiro	-	16.541.120,00	(16.541.120,00)	(100,00)
13.	Pusk Kec Kertek 2	-	1.069.842,00	(1.069.842,00)	(100,00)
14.	Pusk Kec Kalikajar 2	-	6.510.637,00	(6.510.637,00)	(100,00)
15.	Pusk Kec Kepil 2	-	770.693,00	(770.693,00)	(100,00)
16.	Pusk Kec Sukoharjo 2	-	4.000.849,00	(4.000.849,00)	(100,00)
17.	DLH	-	171.629.335,00	(171.629.335,00)	(100,00)
18.	Disparbud	-	23.247.434.607,00	(23.247.434.607,00)	(100,00)
19.	Kec Wonosobo	-	128.289.600,00	(128.289.600,00)	(100,00)
20.	Kel Wonosobo Barat	-	16.328.101,00	(16.328.101,00)	(100,00)
21.	Kel Pagerkukuh	-	186.429.075,00	(186.429.075,00)	(100,00)
22.	Kel Tawangsari	-	23.294.416,00	(23.294.416,00)	(100,00)
23.	Kel Kertek	-	27.374.495,00	(27.374.495,00)	(100,00)
24.	Kec Selomerto	-	61.100.350,00	(61.100.350,00)	(100,00)
25.	Kel Kalibeber	-	4.619.324,00	(4.619.324,00)	(100,00)
26.	Kec Garung	-	3.386.979,00	(3.386.979,00)	(100,00)
27.	Kec Kejajar	-	80.294.038,00	(80.294.038,00)	(100,00)
28.	Kec Sapuran	-	1.547.598,00	(1.547.598,00)	(100,00)
29.	Kel Kepil	-	338.070,00	(338.070,00)	(100,00)
30.	Kec Wadaslintang	-	35.867.693,00	(35.867.693,00)	(100,00)
31.	BKD	-	4.422.199,00	(4.422.199,00)	(100,00)
32.	DPUPR	-15.156.124,01	-	-15.156.124,01	100,00
33.	PPKD	8.979.888.000,00	-	8.979.888.000,00	100,00
	Jumlah	**9.005.568.811,00**	**24.370.465.388,00**	**(15.364.896.577,01)**	**63,05**

D.4.c. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar TA 2024 adalah sebesar Rp58.355.387.495,76, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.897.567.389,52 atau 28,37% jika dibandingkan dengan Defisit Penjualan Aset Non Lancar TA 2023 sebesar Rp45.457.820.106,24.

D.4.d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp421.988.892,83, nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp135.279.891.246,59 atau 99,69% jika dibandingkan dengan TA 2023 yang juga mendapatkan Defisit sebesar Rp135.701.880.139,42. Kenaikan signifikan tersebut karena terdapat inventarisasi Barang Milik Daerah pada TA 2024 berupa Peralatan dan Mesin, serta Aset Tetap Lainnya.

D.5. SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA

Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2024 adalah sebesar Rp113.532.763.509,46 yang berasal dari Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasi ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp167.716.871.341,76 atau 309,53% dibandingkan dengan TA 2023 yang mendapatkan Surplus sebesar Rp54.184.107.832,30. Rincian Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa dapat dilihat pada 0berikut:

Tabel V.231 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Surplus/(Defisit) Dari Operasi	(63.762.066.931,87)	210.311.360.686,95	(274.073.427.618,83)	(130,32)
2	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(49.770.696.577,60)	(156.127.252.854,66)	106.356.556.277,07	(68,12)
	Jumlah	**(113.532.763.509,46)**	**54.184.107.832,30**	**(167.716.871.341,76)**	**(309,53)**

D.6. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa TA 2024 adalah sebesar Rp225.212.485,00 yang sepenuhnya merupakan Beban Luar Biasa sedangkan pada TA 2023 tidak terdapat Pos Luar Biasa. Beban Luar Biasa sebesar Rp225.212.485,00 merupakan Pencairan Dana atas Pengembalian kerugian PD. Bhakti Husada Tahun 2021.

D.7. SURPLUS/(DEFISIT) – LO

Defisit-LO TA 2024 adalah sebesar Rp113.757.975.994,46 dengan yang berasal dari Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa ditambah Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp167.942.083.826,76 atau 309,95% dibandingkan dengan TA 2023 yang mendapatkan Surplus sebesar Rp54.184.107.832,30 dengan perhitungan sebagaimana Tabel V.232 berikut:

Tabel V.232 Surplus/(Defisit) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2024	2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(113.532.763.509,46)	54.184.107.832,30	(167.716.871,341,76)	(309,53)
2.	Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	(225.212.485,00)	-	(225.212.485,00)	-
	Surplus/(Defisit) - LO: 1+2	**(113.757.975.994,46)**	**54.184.107.832,30**	**(167.942.083.826,76)**	**(309,95)**

E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan realisasi tahun 2023 yang merupakan konsolidasi dari Laporan Arus Kas Bendahara Umum Daerah (BUD), Laporan Arus Kas BLUD Puskesmas, Laporan Arus Kas BLUD RSUD, Laporan Arus Kas dari Dana BOS, dan Laporan Arus Kas Lainnya. Ringkasan Laporan Arus Kas disajikan sebagaimana Tabel V.233 berikut.

Tabel V.233 Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
A.	**Arus Kas Bersih Dari**:				
1.	Aktivitas Operasi	180.092.924.068,00	280.194.223.476,91	(100.101.299.408,91)	(35,73)
2.	Aktivitas Investasi	(244.411.691.924,00)	(320.470.605.660,00)	76.058.913.736,00	(23,73)
3.	Aktivitas Pendanaan	-	10.100.000,00	(10.100.000,00)	(100,00)
4.	Aktivitas Transitoris	(197.925.276,00)	192.369.485,00	(390.294.761,00)	(202,89)
B. (1+2+3+4)	**Kenaikan/(Penurunan) Kas**	**(64.516.693.132,00)**	**(40.073.912.698,09)**	**(24.442.780.433,91)**	**60,99**
C.	**Saldo Awal Kas**	**98.365.244.704,91**	**138.439.157.403,00**	**(40.073.912.698,09)**	**(28,95)**
Saldo Akhir Kas (B+C)		**33.848.551.572,91**	**98.365.244.704,91**	**(64.516.693.132,00)**	**(65,59)**

E.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Wonososbo TA 2024 adalah sebesar Rp180.092.924.068,00 sedangkan pada TA 2023 adalah sebesar Rp280.194.223.476,91 dengan rincian sebagai berikut.

		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1)	Arus Masuk Kas	2.105.560.085.883,00	2.056.278.000.817,91
2)	Arus Keluar Kas	1.925.467.161.815,00	1.776.083.777.341,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1-2)	**180.092.924.068,00**	**280.194.223.476,91**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 menunjukkan angka yang positif yang berarti bahwa Pendapatan Operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional, jika dibandingkan dengan TA 2023 terjadi penurunan sebesar 35,73%.

E.1.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp2.105.560.085.883,00 dibandingkan TA 2023 sebesar Rp2.056.278.000.817,91 mengalami kenaikan sebesar 2,40%, dengan rincian pada Tabel V.234 sebagai berikut.

Tabel V.234 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Penerimaan Pajak Daerah	75.756.036.031,00	65.448.626.748,00	10.307.409.283,00	15,75
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	196.646.187.282,00	11.205.591.108,00	185.440.596.174,00	1.654,89
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.809.039.238,00	23.040.333.270,00	2.768.705.968,00	12,02
4.	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	8.872.074.910,00	166.361.920.051,91	(157.489.845.141,91)	(94,67)
5.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	35.433.346.000,00	36.777.428.277,00	(1.344.082.277,00)	(3,65)
6.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.499.676.000,00	2.159.463.211,00	(659.787.211,00)	(30,55)
7.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	877.850.621.000,00	832.084.548.325,00	45.766.072.675,00	5,50
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	421.279.249.256,00	463.806.105.588,00	(42.526.856.332,00)	(9,17)
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	19.550.481.000,00	13.020.711.000,00	6.529.770.000,00	50,15
10	Penerimaan Dana Desa	250.203.172.000,00	247.153.737.000,00	3.049.435.000,00	1,23
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	124.196.881.222,00	123.940.726.171,00	256.155.051,00	0,21
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	57.545.230.500,00	22.101.445.223,00	35.443.785.277,00	160,37
13	Penerimaan Hibah	10.918.091.444,00	49.177.364.845,00	(38.259.273.401,00)	(77,80)
	Jumlah Arus Kas Masuk	**2.105.560.085.883,00**	**2.056.278.000.817,91**	**49.282.085.065,09**	**2,40**

E.1.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp1.925.467.161.815,00 dibandingkan TA 2023 sebesar Rp1.776.083.777.341,00 mengalami kenaikan sebesar 8,41% dengan rincian pada Tabel V.235 sebagai berikut.

Tabel V.235 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pembayaran Pegawai	813.155.898.509,00	813.687.908.377,00	(532.009.868,00)	(0,07)
2.	Pembayaran Barang	547.721.173.944,00	437.524.507.656,00	110.196.666.288,00	25,19
3.	Pembayaran Subsidi	574.096.661,00	638.215.332,00	(64.118.671,00)	(10,05)
4.	Pembayaran Hibah	151.469.623.746,00	136.542.227.583,00	14.927.396.163,00	10,93
5.	Pembayaran Bantuan Sosial	10.391.240.400,00	12.130.400.000,00	(1.739.159.600,00)	(14,34)
6.	Pembayaran Bantuan Keuangan	392.878.781.070,00	364.178.746.070,00	28.700.035.000,00	7,88
7.	Pembayaran Tidak Terduga	225.212.485,00	4.741.409.823,00	(4.516.197.338,00)	(95,25)
8.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	6.940.500.000,00	5.523.000.000,00	1.417.500.000,00	25,67
9.	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.110.635.000,00	1.117.362.500,00	993.272.500,00	88,89
	Jumlah Arus Kas Keluar	**1.925.467.161.815,00**	**1.776.083.777.341,00**	**149.383.384.474,00**	**8,41**

E.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Wonososbo TA 2024 adalah sebesar **(**Rp244.411.691.924,00) sedangkan pada TA 2023 adalah sebesar **(**Rp320.470.605.660,00) dengan rincian sebagai berikut.

		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1)	Arus Masuk Kas	286.038.500,00	31.002.404.748,00
2)	Arus Keluar Kas	244.697.730.424,00	351.473.010.408,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1-2)	**(244.411.691.924,00)**	**(320.470.605.660,00)**

E.2.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Kabupaten Wonosobo TA 2024 sebesar Rp286.038.500,00 sedangkan TA 2023 sebesar Rp31.002.404.748,00 dengan rincian sebagaimana tabel V.236 berikut.

Tabel V.236 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Pen runan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	30.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)
2.	Penjualan atas Peralatan dan mesin	-	76.102.524,00	(76.102.524,00)	(100,00)
3.	Penjualan atas Gedung dan bangunan	62.302.000,00	-	62.302.000,00	-
4.	Penjualan Aset lainnya	223.736.500,00	926.302.224,00	(702.565.724,00)	(75,85)
	Jumlah Arus Masuk Kas	**286.038.500,00**	**31.002.404.748,00**	**(30.716.366.248,00)**	**(99,08)**

E.2.b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp244.697.730.424,00 dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp351.473.010.408,00 mengalami penurunan sebesar 30,38% dengan rincian pada Tabel V.237 sebagai berikut.

Tabel V.237 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	15.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(100,00)
2.	Perolehan Tanah	1.209.626.140,00	-	1.209.626.140,00	-
3.	Perolehan Peralatan dan Mesin	46.521.357.115,00	71.513.835.592,00	(24.992.478.477,00)	(34,95)
4.	Perolehan Gedung dan Bangunan	53.094.884.557,00	75.966.224.399,00	(22.871.339.842,00)	(30,11)
5.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.968.218.227,00	173.441.211.700,00	(44.472.993.473,00)	(25,64)
6.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.791.551.850,00	8.956.129.217,00	(2.164.577.367,00)	(24,17)
7.	Perolehan Aset Lainnya	734.709.700,00	24.697.500,00	710.012.200,00	2.874,83
8.	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	7.377.382.835,00	6.570.912.000,00	806.470.835,00	12,27
	Jumlah Arus Kas Keluar	**244.697.730.424,00**	**351.473.010.408,00**	**(106.775.279.984,00)**	**(30,38)**

E.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Wonososbo TA 2024 tidak terdapat realisasi sedangkan pada TA 2023 adalah Rp10.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1)	Aus Masuk Kas	-	10.100.000,00
2)	Arus Kas Keluar	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1-2)	**-**	**10.100.000,00**

E.3.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Kabupaten Wonosobo TA 2024 tidak terdapat realisasi sedangkan pada TA 2023 terdapat setoran Dana Bergulir sebesar Rp10.100.000,00 dengan rincian pada Tabel V.238 sebagai berikut.

Tabel V.238 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	10.100.000,00	(10.100.000,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk	**-**	**10.100.000,00**	**(10.100.000,00)**	**(100,00)**

E.3.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2024 dan 2023 tidak terdapat Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan.

E.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 adalah sebesar (Rp197.925,276,00) dibandingkan TA 2023 adalah sebesar Rp192.369.485,00 mengalami penurunan signifikan sebesar 202,89% yang disebabkan antara lain adanya setoran JKN 1% di rekening penampungan gaji nomor rekening 1023.001531. Adapun perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris dapat dijelaskan sebagai berikut.

		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1)	Arus Masuk Kas	110.409.112.368,05	117.432.432.939,41
2)	Arus Keluar Kas	110.607.037.644,05	117.240.063.454,41
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (1-2)	**(197.925.276,00)**	**192.369.485,00**

E.4.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp110.409.112.368,05 dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp117.432.432.939,41 mengalami penurunan sebesar 5,98% dengan rincian pada Tabel V.239 sebagai berikut.

Tabel V.239 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	110.404.016.368,05	117.391.512.088,41	(6.987.495.720,36)	(5,95)
2.	Kiriman Uang Masuk	5.096.000,00	38.392.491,00	(33.296.491,00)	(86,73)
3.	Penerimaan Koreksi	-	2.528.360,00	(2.528.360,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Masuk Kas	**110.409.112.368,05**	**117.432.432.939,41**	**(7.023.320.571,36)**	**(5,98)**

Pada Tahun Anggaran 2024, terdapat Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga di Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp110.404.016.368,05 yang merupakan penerimaan potongan pajak pusat, pajak daerah dan potongan JKN 1 % dari tambahan penghasilan dan tunjangan penghasilan guru pada rekening penampungan gaji No. rek 1023001531 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Umum Daerah, adapun Kiriman Uang Masuk sebesar Rp5.096.000,00 merupakan saldo bank bendahara pengeluaran sekolah negeri per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No	No. Rekening	Uraian	(dalam Rupiah)	Keterangan
1	Bank Jateng 3023422572	SMPN 1 Watumalang (BOSDA)	96.000,00	BOSDA
2	Bank Jateng 3023056436	SD Negeri 1 Kalibening	5.000.000,00	BOSDA
	Jumlah		**5.096.000,00**	

E.4.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp110.607.037.644,05 dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp117.240.063.454,41 mengalami penurunan sebesar 5,66%, dengan rincian pada Tabel V.240 sebagai berikut.

Tabel V.240 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (P enurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	110.606.374.464,05	117.099.154.682,41	(6.492.780.218,36)	(5,54)
2.	Kiriman Uang Keluar	663.180,00	138.408.446,00	(137.745.266,00)	(99,52)
3.	Pengeluaran Koreksi	-	2.500.326,00	(2.500.326,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Keluar	**110.607.037.644,05**	**117.240.063.454,41**	**(6.633.025.810,36)**	**(5,66)**

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.240 di atas menunjukkan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp110.606.374.464,05 merupakan setoran atas pajak pusat, pajak daerah dan setoran JKN 1 % dari tambahan penghasilan dan tunjangan penghasilan guru pada rekening penampungan gaji nomor rekening 1023001531 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Umum Daerah, adapun Kiriman Uang Keluar per 31 Desember 2024 sebesar Rp663.180,00 merupakan penarikan atau penutupan pada rekening bank sekolah negeri dengan rincian sebagai berikut.

No	No. Rekening	Uraian	(Dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Bank Jateng 1023003470	TKN Pembina Sapuran	20.000,00	
2.	Bank Jateng 3104099512	TKN Pembina Sapuran	133.311,00	sudah ditutup
3.	Bank Jateng 3023418320	TK N Pembina Wonosobo	383.324,00	Saldo Per 31 Desember 2023
4.	Bank Jateng 3023357061	TK N Pembina Wonosobo	100.000,00	uang lembaga sudah ditarik tgl 14 maret 2024
5.	Bank Jateng 3155010711	SMPN 10 Satap Wadaslintang	10.000,00	
6.	Bank Jateng 3023056436	SDN 1 Kalibening	16.544,00	sudah ditutup krn rek BOS Lama
7.	Bank Jateng 3023421550	SDN 2 Rojoimo	1,00	
		Jumlah	**663.180,00**	

E.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2024 mengalami penurunan kas sebesar Rp64.516.693.132,00 yang berasal dari arus kas bersih Aktivitas Operasi, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi, arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan, dan arus kas bersih Aktivitas Transitoris, sedangkan pada TA 2023 juga mengalami penurunan Kas sebesar Rp40.073.912.698,09.

E.5.a. Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas TA 2024 merupakan saldo akhir Kas TA 2023 sebesar Rp98.365.244.704,91 dengan rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel V.241 sebagai berikut.

Tabel V.241 Saldo Awal Kas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Kas di Kas Daerah	83.309.803.483,00	93.480.222.258,00	(10.170.418.775,00)	(10,88)
2.	Kas di BLUD RSUD	5.472.642.242,91	40.038.976.180,00	(34.566.333.937,09)	(86,33)
3.	Kas di BLUD Puskesmas	4.678.206.156,00	3.147.581.093,00	1.530.625.063,00	48,63
4.	Kas di Bendahara Penerimaan	110.807.216,00	26.771.800,00	84.035.416,00	313,90
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran	43.113.566,00	42.209.500,00	904.066,00	2,14
6.	Kas Dana BOS	1.014.029.022,00	-	1.014.029.022,00	-
7.	Kas Lainnya	3.736.643.019,00	1.703.396.572,00	2.033.246.447,00	119,36
Jumlah Saldo Awal Kas		**98.365.244.704,91**	**138.439.157.403,00**	**(40.073.912.698,09)**	**(28,95)**

E.5.b. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas TA 2024 adalah sebesar Rp33.848.551.572,91 dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp98.365.244.704,91 mengalami penurunan sebesar 65,59% dengan rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel V.242 berikut.

Tabel V.242 Saldo Akhir Kas untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
a.	Kas di Kas Daerah	20.754.055.433,00	83.309.803.483,00	(62.555.748.050,00)	(75,09)
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	28.575.900,00	110.807.216,00	(82.231.316,00)	(74,21)
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	43.113.566,00	(43.113.566,00)	(100,00)
d.	Kas di BLUD	9.313.148.031,91	10.150.848.398,91	(837.700.367,00)	(8,25)
e	Kas Dana BOS	1.253.194.183,00	1.014.029.022,00	239.165.161,00	23,59
f.	Kas Lainnya	2.499.578.025,00	3.736.643.019,00	(1.237.064.994,00)	(33,11)
	Jumlah Saldo Akhir Kas	**33.848.551.572,91**	**98.365.244.704,91**	**(64.516.693.132,00)**	**(65,59)**

E.5.b.1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.754.055.433,00 yang ditempatkan pada Bank Jateng nomor rekening 1-023-00001-9.

E.5.b.2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp28.575.900,00 yang berada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti dalam Tabel V.243 sebagai berikut.

Tabel V.243 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Disparbud	28.575.900,00	68.971.600,00	(40.395.700,00)	(58,57)
2.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
3.	Dinas Perkimhub	-	881.700,00	(881.700,00)	(100,00)
4.	Disdagkop	-	12.453.916,00	(12.453.916,00)	(100,00)
5.	Kelurahan Bumireso	-	28.250.000,00	(28.250.000,00)	(100,00)
	Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	**28.575.900,00**	**110.807.216,00**	**(82.231.316,00)**	**(74,21)**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp28.575.900,00 telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 6 Januari 2025.

E.5.b.3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tidak memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.

E.5.b.4) Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.313.148.031,91 dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

E.5.b.5) Kas di BLUD RSUD

Saldo Kas di BLUD RSUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.188.972.565,91 merupakan saldo kas pada RSUD KRT Setjonegoro per 31 Desember 2024 yang ditempatkan pada dua bank yaitu:

	Uraian		Nilai (Rp)
1.	Bank Jateng No Rek: 1.023.004.174	:	3.272.977.943,00
2.	BRI No Rek: 0112.01.000470.30.7	:	1.915.994.622,91
			5.188.972.565,91

E.5.b.5).1) Kas di BLUD Puskesmas

Saldo Kas di BLUD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.124.175.466,00 berupa Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Adapun rincian Kas Di BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	(Dalam Rupiah)
1.	Puskesmas Wonosobo 1	219.581.548,00
2.	Puskesmas Kertek 1	50.376.003,00
3.	Puskesmas Selomerto 1	474.199.115,00
4.	Puskesmas Leksono 1	148.975.957,00
5.	Puskesmas Watumalang	165.361.104,00
6.	Puskesmas Mojotengah	694.350.498,00
7.	Puskesmas Garung	251.269.619,00
8.	Puskesmas Kejajar 1	124.909.175,00
9.	Puskesmas Kalikajar 1	23.328.657,00
10.	Puskesmas Sapuran	421.800.110,00
11.	Puskesmas Kepil 1	169.915.507,00
12.	Puskesmas Kaliwiro	86.742.249,00
13.	Puskesmas Wadaslintang 1	130.509.247,00
14.	Puskesmas Sukoharjo 1	72.578.564,00
15.	Puskesmas Kalibawang	45.239.574,00
16.	Puskesmas Wonosobo 2	60.628.525,00
17.	Puskesmas Kertek 2	398.857.870,00
18.	Puskesmas Selomerto 2	56.424.495,00
19.	Puskesmas Leksono 2	46.533.687,00
20.	Puskesmas Kejajar 2	38.101.557,00
21.	Puskesmas Kalikajar 2	88.180.901,00
22.	Puskesmas Kepil 2	158.555.271,00
23.	Puskesmas Wadaslintang 2	180.058.964,00
24.	Puskesmas Sukoharjo 2	17.697.269,00
	Jumlah	**4.124.175.466,00**

E.5.b.5).2) Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.253.194.183,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

		(dalam Rupiah)
Kas Dana BOS TA 2023		
Saldo Kas Dana BOS SD	:	621.825.112,00
Saldo Kas Dana BOS SMP	:	631.342.071,00
Jumlah		**1.253.194.183,00**

E.5.b.6) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2024 adalah sebesar Rp2.499.578.025,00 berupa Kas Lain-lain yang terdiri dari:

a) Saldo Bank Pada Bendahara yang ada penetapanya (SK Bupati) per 31 Desember 2024 adalah Sebesar Rp5.343.311,00.

No	No. Rekening	Uraian	(dalam Rupiah)
1.	Bank Jateng 3104076717	TKN Pembina Sapuran	54.321,00
2.	Bank Jateng 3171029812	TK N Pembina Selomerto	19.212,00
3.	Bank Jateng 3023211067	TK N Pembina Selomerto	823,00
4.	Bank Jateng 3023418320	TK N Pembina Wonosobo	97.955,00
5.	Bank Jateng 3104112446	SDN Wringinanom (BOSDA)	75.000,00
6.	Bank Jateng 3023422572	SMPN 1 Watumalang (BOSDA)	96.000,00
7.	Bank Jateng 3023421321	SDN 2 Krasak (BOSDA)	5.000.000,00
	Jumlah		**5.343.311,00**

b) Saldo Kas UPTD SKB Wonosobo sebesar Rp5.429.000,00 merupakan sisa kas dari Dana BOK Kesetaraan berupa saldo kas di bank Nomor rekening bank jateng 3023358301 sebesar Rp3.800.000,00 dan tunai sebesar Rp1.629.000,00 yang merupakan utang pfk dari pajak daerah, telah disetor ke kas daerah pada tanggal 14 Februari 2025.

c) Saldo Kas BOK per 31 Desember 2024 pada Puskesmas berupa saldo bank yang disimpan di Bank BNI Cabang Wonosobo dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	(Dalam Rupiah)
1.	Puskesmas Wonosobo 1	53.243.529,00
2.	Puskesmas Kertek 1	135.329.664,00
3.	Puskesmas Selomerto 1	128.302.372,00
4.	Puskesmas Leksono 1	115.749.732,00
5.	Puskesmas Watumalang	91.580.764,00
6.	Puskesmas Mojotengah	76.629.139,00
7.	Puskesmas Garung	78.981.578,00
8.	Puskesmas Kejajar 1	64.373.396,00
9.	Puskesmas Kalikajar 1	134.988.167,00
10.	Puskesmas Sapuran	54.031.311,00
11.	Puskesmas Kepil 1	58.706.865,00
12.	Puskesmas Kaliwiro	120.603.942,00
13.	Puskesmas Wadaslintang 1	74.701.838,00
14.	Puskesmas Sukoharjo 1	146.498.552,00
15.	Puskesmas Kalibawang	34.825.280,00
16.	Puskesmas Wonosobo 2	174.422.687,00
17.	Puskesmas Kertek 2	80.065.404,00
18.	Puskesmas Selomerto 2	74.364.625,00
19.	Puskesmas Leksono 2	17.560.450,00
20.	Puskesmas Kejajar 2	99.229.072,00
21.	Puskesmas Kalikajar 2	298.877.534,00
22.	Puskesmas Kepil 2	162.048.539,00
23.	Puskesmas Wadaslintang 2	37.855.767,00
24.	Puskesmas Sukoharjo 2	37.511.937,00
	Jumlah	**2.350.482.144,00**

Terdapat Saldo Kas BOK per 31 Desember 2024 pada Puskesmas Kepil 1 berupa kas tunai sebesar Rp3.689.137,00.

d) Saldo Kas Penanganan Stunting Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.502.000,00 nomor rekening Bank Jateng 1023012096, hal ini berdasarkan SK Bupati Nomor: 978.5/330/2023 tentang penunjukan pengelola rekening penghimpunan bantuan yang bersumber dari masyarakat untuk percepatan penanganan stunting.

e) Saldo Rekening Penampungan Gaji per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.132.433,00 nomor rekening Bank Jateng 1023001531 yang merupakan penampungan potongan JKN 1 % dari tambahan penghasilan dan tunjangan penghasilan guru.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas selama tahun 2024. Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.874.063.113.219,34 dari saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.971.105.796.292,61 ditambah Surplus/(Defisit) LO TA 2024 sebesar (Rp113.757.975.994,46) dan ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2024 sebesar Rp16.715.292.921,19

F.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal TA 2024 sebesar Rp3.971.105.796.292,61 berasal dari saldo Ekuitas Neraca per 31 Desember 2023.

F.2. Surplus/(Defisit) LO TA 2024

Berdasarkan perhitungan pada Laporan Operasional (LO) TA 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh Defisit sebesar (Rp113.757.975.994,46) yang berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban-LO TA 2024. Surplus/Defisit tahun 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp167.942.083.826,76 atau 309,95% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp54.184.107.832,30. Penurunan tersebut disebabkan antara lain adanya kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, Penghapusan Aset Daerah, dan Penjualan Aset Daerah.

F.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar menggambarkan transaksi selama satu tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih tahun 2024. Total nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan Tahun 2024 sebesar Rp16.715.292.921,19 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp59.059.531.880,70 atau 77,94% dari tahun 2023 sebesar Rp75.774.824.801,89 yang sebagian besar disebabkan adanya kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan rincian terdiri dari:

	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	**Koreksi Nilai Persediaan**	**80.646.159,79**
2	**Lain-lain**	**16.634.646.761,40**
	Kas Lainnya	4.432.820,00
	Piutang	1.612.501.690,00
	Piutang Dana Bergulir	(4.150.000,00)
	Penyisihan Piutang	(1.013.363.426,20)
	Aset Tetap Tanah	3.898.744.974,00
	Peralatan dan Mesin	746.771.126,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.736.179.818,61
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.947.602.591,70)
	Aset Lain-lain - Kas Tabulin	13.291.674,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(80.893.519,31)
	Utang Belanja	(1.331.265.804,00)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	**16.715.292.921,19**

F.3.a. Koreksi Nilai Persediaan

Atas dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar terdapat Koreksi Nilai persediaan pada TA 2024 sebesar Rp80.646.159,79 sedangkan pada TA 2023 terdapat koreksi persediaan sebesar (Rp663.766.080,90). Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp80.646.159,79 dengan rincian sebagai berikut.

	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	Koreksi kurang catat persediaan	1.576.400.715,10
2	Koreksi lebih catat persediaan	(23.118.777,52)
3	Koreksi persediaan yang dihapus	(1.472.635.777,79)
	Koreksi Nilai Persediaan	**80.646.159,79**

a) Koreksi Kurang Catat Persediaan

Koreksi kurang catat persediaan sebesar Rp1.576.400.715,10 terdapat pada sepuluh entitas antara lain:

No	Entitas	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dinkes	Koreksi kurang catat obat dari retur program	159.737.582,07
		Koreksi retur masuk dari pengembalian pembelian obat	12.777.073,10
		Koreksi kurang catat hibah masuk persediaan tahun 2023	63.865.600,00
(2)	Puskesmas Selomerto 1	Koreksi kurang catat saldo awal obat	6.788,79
(3)	Puskesmas Garung	Koreksi nilai saldo awal persediaan	0,86
(4)	Puskesmas Kejajar 1	Koreksi kurang catat persediaan obat	0,16
(5)	Puskesmas Kalikajar 1	Koreksi kurang catat persediaan	1.008.719,00
(6)	Puskesmas Sapuran	Koreksi kurang catat persediaan	781.911,09
(7)	Puskesmas Selomerto 2	Koreksi kurang catat persediaan obat	9.100,00
(8)	RSUD	Koreksi atas kurang catat kurang catat persediaan dari pengembalian obat sub unit ke gudang obat RSUD	1.263.071.135,28
(9)	BPBD	Koreksi atas kurangcatat persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya (2018)	75.087.736,00
(10)	Disparbud	Koreksi kurang catat saldo awal persediaan	55.068,75
		Koreksi Kurang Catat persediaan	**1.576.400.715,10**

b) Koreksi Lebih Catat Persediaan

Koreksi lebih catat persediaan sebesar (Rp23.118.777,52) terdapat pada tiga entitas antara lain:

No	Entitas	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dinas Kesehatan	Koreksi atas retur keluar pengembalian pembelian obat	21.397.073,10
		Koreksi atas lebih catat nilai persediaan	5,31
(2)	Puskesmas Leksono 2	Koreksi Lebih catat persediaan	0,03
(3)	Puskesmas Kepil 2	Koreksi lebih catat persediaan	0,02
(4)	Puskesmas Mojotengah	Koreksi lebih catat persediaan	1.721.699,06
		Koreksi Lebih Catat Persediaan	**23.118.777,52**

c) Koreksi Persediaan yang Dihapus

Koreksi persediaan yang dihapus sebesar (Rp1.472.635.777,79) pada beberapa entitas antara lain:

No	Entitas	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dinas Kesehatan	Koreksi atas penghapusan persediaan obat	988.960.508,68
(2)	Puskesmas Wonosobo 1	Pemusnahan Obat ED	22.361.854,79
(3)	Puskesmas Kertek 1	Pemusnahan Obat ED	17.252.728,23
(4)	Puskesmas Selomerto 1	Penghapusan persediaan obat	28.075.764,20
(5)	Puskesmas Leksono 1	Penghapusan persediaan obat	6.979.920,33
(6)	Puskesmas Mojotengah	koreksi penghapusan persediaan	17.561.715,48
(7)	Puskesmas Garung	Penghapusan persediaan	19.565.607,64
(8)	Puskesmas Kejajar 1	Penghapusan Obat ED	6.602.122,00
(9)	Puskesmas Kalikajar 1	Pemusnahan Obat ED	6.464.832,50
(10)	Puskesmas Sapuran	Penghapusan Persediaan	19.918.616,00
(11)	Puskesmas Kepil 1	Penghapusan Obat ED	4.475.420,00
(12)	Puskesmas Kaliwiro	koreksi atas penghapusan persediaan obat	2.463.898,00
(13)	Puskesmas Wadaslintang 1	koreksi atas penghapusan obat	6.895.854,00
(14)	Puskesmas Sukoharjo 1	Penghapusan persediaan	13.688.353,15
(15)	Puskesmas Kalibawang	Koreksi Penghapusan Persediaan Obat	2.073.416,00
(16)	Puskesmas Wonosobo 2	Penghapusan Obat	3.787.092,20
(17)	Puskesmas Kertek 2	Penghapusan Obat	4.918.592,76
(18)	Puskesmas Selomerto 2	koreksi atas penghapusan persediaan obat	8.028.892,57
(19)	Puskesmas Leksono 2	Penghapusan obat ED	3.892.043,00
(20)	Puskesmas Kejajar 2	Penghapusan obat	8.966.313,02
(21)	Puskesmas Kalikajar 2	Penghapusan Persediaan	8.106.623,00
(22)	Puskesmas Kepil 2	Penghapusan Obat	70.660.560,01
(23)	Puskesmas Wadaslintang 2	Penghapusan Persediaan	11.173.128,17
(24)	Puskesmas Sukoharjo 2	Penghapusan persediaan obat	2.001.910,00
(25)	BPPKAD	Penghapusan Karcis tarif lama	187.760.012,06
		Koreksi Persediaan yang Dihapus	**1.472.635.777,79**

F.3.b. Lain-lain

Atas dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar terdapat lain-lain pada TA 2024 sebesar Rp16.634.646.761,40 sedangkan TA 2023 sebesar Rp76.438.590.882,79 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp59.803.944.121,39 atau 77,94%.

1) Koreksi Kas Lainnya sebesar Rp4.432.820,00 yang berasal dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	Kurang catat saldo kas lainnya dari SMPN 1 Watumalag dan SDN 2 Krasak	5.096.000,00
2	Koreksi lebih catat kas lainnya saldo bank Sekolah Negeri	(663.180,00)
	Koreksi Kas Lainnya	**4.432.820,00**

2) Koreksi atas Piutang sebesar Rp1.612.501.690,00 yang terdapat pada beberapa entitas sebagai berikut.

No	Entitas	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	BPPKAD	Koreksi kurang catat saldo piutang akrena kesalahan pencatatan tahun 2023	158,00
		Koreksi Kurang Catat Saldo Piutang Sewa PDAM perjanjian nomor: 028/003/2023 tgl 9/12/2023	274.675.000,00
		Koreksi Kurang Catat Saldo Piutang Sewa PDAM perjanjian nomor: 028/24/2023 tgl 2/1/2023	11.497.000,00
		Koreksi atas kurang catat piutang bagian laba dividen pada BUMD PT BPR BKK Wonosobo	353.744.535,00
		Koreksi atas kesalahan pencatatan penerimaan dividen BUMD	1.004.584.997,00
2	DLH	pembayaran piutang yang diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	2.000.000,00
3	RSUD Setjonegoro	koreksi atas addendum sewa tower PT DHOST yang dipotong 10% untuk pembayaran pph	(34.000.000,00)
		Koreksi Piutang	**1.612.501.690,00**

3) Koreksi Piutang Dana Bergulir sebesar (Rp4.150.000,00) yang mrerupakan penerimaan angsuran dana bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

4) Koreksi atas penyisihan piutang sebesar (Rp1.013.363.426,20) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah berupa koreksi kurang catat penyisihan piutang PBB per 31 Desember 2023 atas perubahan kualitas umur piutang.

5) Koreksi atas Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.898.744.974,00 yang merupakan kurang catat aset tetap tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.709.240.974,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp189.504.000,00.

6) Koreksi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp746.771.126,00 yang berasal dari kegiatan Inventarisasi BMD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	Kurang catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin	756.979.113,00
2	Koreksi atas kesalahan pencatatan yang mengurangi ekuitas	(10.207.987,00)
	Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**746.771.126,00**

Kurang catat aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp756.979.113,00, sebagian besar terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp608.409.295,00. Selain itu terdapat koreksi atas kesalahan pencatatan aset tetap perlatan dan mesin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp10.207.987,00.

7) Koreksi atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.736.179.818,61 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan kurang catat Jalan Kabupaten berdasarkan hasil kegiatan dari Inventarisasi BMD TA 2024.
8) Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disebabkan karena adanya kegiatan Inventarisasi BMD TA 2024 sebesar (Rp2.947.602.591,70) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	Koreksi atas lebih catat pengakuan akumulasi penyusutan	360.128.708,86
2	Koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan	(3.229.869.174,56)
3	Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai akumulasi penyusutan	(77.862.122,00)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**(2.947.602.591,70)**

9) Koreksi Aset Lain-lain berupa Kas Tabulin sebesar Rp13.291.674,00 pada beberapa kecamatan dengan rincian sebagai berikut.

No	Entitas	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	Kec Wonosobo	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	1.761.480,00
2	Kec Kertek	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	325.772,00
3	Kec Selomerto	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	2.009.044,00
4	Kec Watumalang	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	216.008,00
5	Kec Leksono	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	736.767,00
6	Kec. Mojotengah	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	1.755.623,00
7	Kec. Kejajar	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	1.418.134,00
8	Kec Kalikajar	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	391.553,00
9	Kec. Sapuran	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	1.533.770,00
10	Kec. Kepil	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	899.765,00
11	Kec. Kaliwiro	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	167.783,00
12	Kec. Wadaslintang	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	2.079.503,00
13	Kec. Kalibawang	Kurang catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	21.068,00
14	Kec. Sukoharjo	Lebih catat pengakuan saldo akhir kas tabulin	(24.596,00)
		Koreksi Kas Tabulin	**13.291.674,00**

10) Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar (Rp80.893.519,31) yang berasal dari adanya kurang catat nilai akumulasi penyusutan pada beberapa entitas sebagai berikut.

No	Entitas	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	Dinas Kesehatan	Koreksi atas kesalahan pencatatan hasil inventarisasi BMD	(240.000,00)
2	Puskesmas Wonosobo 1	Koreksi atas kesalahan pencatatan hasil inventarisasi BMD	(653.400,00)
3	Puskesmas Kertek 1	Koreksi atas kesalahan pencatatan hasil inventarisasi BMD	(370.126,00)
4	Puskesmas Kepil 1	Koreksi atas kesalahan pencatatan hasil inventarisasi BMD	(4.643.163,00)
5	Puskesmas Wonosobo 2	Koreksi atas kesalahan pencatatan hasil inventarisasi BMD	(241.683,00)
6	Laboratorium Kesehatan Daerah	Koreksi atas kesalahan pencatatan hasil inventarisasi BMD	(74.581.103,00)
7	BPPKAD	Koreksi atas kurang catat saldo awal	(164.044,31)
		Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	**(80.893.519,31)**

11) Koreksi atas kurang catat Utang Belanja TA 2023 yang dibayarkan pada TA 2024 sebesar (Rp1.331.265.804,00) yang terdapat pada beberapa entitas sebagai berikut.

No	Entitas	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(152.807.219,00)
2	Dinas Kesehatan	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(28.179.941,00)
3	Puskesmas Selomerto 2	Koreksi atas kurang catat utang beban jasa kantor tahun 2023	(642.199,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(38.025.075,00)
5	Disperkimhub	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(6.474.363,00)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(31.178.006,00)
7	Dinas Sosial PMD	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(44.966.575,00)
8	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(71.708.378,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(111.349.579,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(24.023.450,00)

No	Entitas	Uraian	(Dalam Rupiah)
11	DPPKB PP PA	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(113.390.152,00)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(54.731.952,00)
13	DPMPTSP	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(42.946.582,00)
14	Dinas Arpusda	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(35.100.000,00)
15	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(122.244.929,00)
16	Disdagkop UKM	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(54.692.636,00)
17	Bagian Umum	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(212.564.528,00)
18	Sekretariat DPRD	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(27.008.644,00)
19	Kecamatan Sapuran	Koreksi atas kurang catat utang belanja jasa kantor tahun 2023	(1.423.699,00)
20	Inspektorat	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(14.467.475,00)
21	Bappeda	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(93.261.668,00)
22	Badan Kepegawaian Daerah	koreksi kurang catat utang pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024	(50.078.754,00)
		Koreksi Utang Belanja	**(1.331.265.804,00)**

F.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.874.063.113.219,34 yang berasal dari Ekuitas Awal Rp3.971.105.796.292,61 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp113.757.975.994,46) dan dampak kumulatif adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar sebesar Rp16.715.292.921,19.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Aplikasi Pendukung Laporan Keuangan

1. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)
   Merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah.

2. FMIS (Financial Management Information System)
   Adalah SIMDA Next-G yang merupakan pengembangan aplikasi SIMDA dengan basis Web yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan.

3. e-PBB
   Aplikasi pelayanan yang digunakan oleh wajib pajak untuk untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi sppt, tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung masuk ke pejabat terkait.

4. Sismiop (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)
   Sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemprosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.

5. e-BPHTB
   Sistem informasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan BPHTB.

6. Sim Gaji (Sistem Informasi Manajemen Gaji)
   Sistem aplikasi penggajian yang dibangun oleh PT. Taspen (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji PNS Daerah pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Teknologi Informasi yang dapat diakses dan terintegrasi dengan unit kerja lainnya serta dapat menyajikan data secara akurat, tepat dan *up to date*.

7. Simtrada
   Sistem informasi untuk menyajikan data realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa.

8. ALADIN (Aplikasi DAK Non Fisik)
   Aplikasi yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi DAK Non Fisik.

9. OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
   Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan laporan sesuai kebutuhan.

10. e-Bantuan BPKAD Provinsi Jawa Tengah
    Aplikasi untuk pengajuan persyaratan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah.

11. Si Bapers
    Aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan data terkait manajemen pencatatan persediaan.
12. SITAWON (Sistem Informasi Pendapatan Wonosobo)
    Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah administrasi pajak daerah Kabupaten Wonosobo.
13. SIMDA-BMD
    Sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

B. Pengelolaan Keuangan Desa

Kabupaten Wonosobo memiliki 236 desa yang tersebar di 15 kecamatan, telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa desa diwajibkan menyusun APBDesa sebagai dasar implementasi pengelolaan keuangan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Berkaitan dengan hal tersebut dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ikhtisar realisasi Pelaksanaan APBDesa selama TA 2024 dari 236 desa se-Kabupaten Wonosobo, secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel VI.1 Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan	499.777.422.493,00	498.328.621.434,66	1.448.801.058,34
Belanja	509.804.324.656,00	482.105.480.882,42	27.698.843.773,58
Surplus/(Defisit)	(10.026.902.163,00)	16.223.140.552,24	26.250.042.715,24
Pembiayaan			
- Penerimaan	14.516.877.555,00	14.335.479.931,00	181.397.624,00
- Pengeluaran	4.489.975.392,00	3.336.653.252,00	1.153.322.140,00
Pembiayaan Netto	10.026.902.163,00	10.998.826.679,00	(971.924.516,00)
SILPA	**-**	**27.221.967.231,24**	**(27.221.967.231,24)**

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 236 desa yang tersebar di 15 wilayah kecamatan, sumber pendapatan desa salah satunya adalah dana transfer dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Transfer bantuan keuangan:

(dalam Rupiah)

a.	Dana Desa (Penetapan)	243.674.506.000,00
b.	Alokasi Dana Desa (Penetapan)	109.298.209.070,00

Keuangan desa sebagai sumber pendanaan desa harus dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

C. Kegiatan yang Dianggarkan Kembali Pada Tahun Anggaran 2024

Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki program kegiatan yang dianggarkan kembali di tahun anggaran 2025.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk komitmen kami mewujudkan visi "Wonosobo Sejahtera, Adil, dan Makmur" melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (PP No. 71 Tahun 2010), laporan ini tidak hanya merefleksikan kinerja keuangan pemerintah, tetapi juga menjadi bukti nyata upaya kami dalam mendistribusikan sumber daya secara adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Kami terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada tiga pilar utama: (1) optimalisasi anggaran untuk program-program prioritas yang mendorong pemerataan pembangunan, (2) peningkatan akuntabilitas melalui penyelesaian temuan pemeriksaan, serta (3) inovasi sistem pengendalian untuk memastikan setiap kebijakan fiskal selaras dengan prinsip keadilan sosial. Langkah strategis ini kami tempuh untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Wonosobo.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap amanat visi daerah, laporan keuangan ini kami sajikan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Kami meyakini bahwa transparansi pengelolaan APBD merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan semangat gotong royong, kami mengajak seluruh *stakeholder* untuk bersama-sama memanfaatkan laporan keuangan ini sebagai alat evaluasi dan bahan perencanaan pembangunan ke depan. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, kami optimis dapat mewujudkan Wonosobo yang semakin sejahtera, adil dalam pembagian hasil pembangunan, dan makmur secara berkelanjutan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Mari kita terus bekerja sama untuk memastikan setiap kebijakan keuangan daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Wonosobo.

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman / obligasi	tanggal/tahun perjanjian pinjaman/ obligasi	jumlah pinjaman/nilai nominal obligasi (Rp)	jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								pokok pinjaman daerah	bunga	Pokok pinjaman daerah	bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1.	1983	PT Bank Jateng	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Saham	5,000,000,000,000.00	51,501,000,000.00	0.00	51,501,000,000.00	4,948,499,000,000.00	12,850,091,079.00	0.00	51,501,000,000.00
2.	1976	PERUMDA AIR MINUM	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	300,000,000,000.00	159,109,207,681.29	0.00	159,109,207,681.29	140,890,792,318.71	8,300,000,000.00	0.00	159,109,207,681.29
3.	1980	PD BPR - Bank Wonosobo	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	100,000,000,000.00	56,903,460,201.00	0.00	56,903,460,201.00	43,096,539,799.00	4,200,000,000.00	0.00	56,903,460,201.00
4.	1970	PD BPR - BKK Wonosobo (Perseroda)	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	81,000,000,000.00	17,376,074,799.16	0.00	17,376,074,799.16	63,623,925,200.84	838,481,152	0.00	17,376,074,799.16
5.	2002	PT BKK JATENG (Perseroda)	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	924,840,000,000.00	6,350,000,000.00	0.00	6,350,000,000.00	918,490,000,000.00	0.00	0.00	6,350,000,000.00
6.	1965	PT. TAMBI	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2001	Penyertaan Modal	22,337,283,226.00	22,337,283,226.00	0.00	22,337,283,226.00	0.00	1,596,000,000	0.00	22,337,283,226.00
7.	1979	PT . Bimolukar (Apotik Cahaya)	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2016	Penyertaan Modal	756,000,000.00	565,879,624.20	0.00	565,879,624.20	190,120,375.80	20,000,000	0.00	565,879,624.20

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
8.	2001	PD Bhakti Husada	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2011	Penyertaan Modal	2,000,000,000.00	671,183,005.00	0.00	671,183,005.00	1,328,816,995.00	0.00	0.00	671,183,005.00
9.	2006	PT PRPP Semarang	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	200,000,000,000.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	199,860,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
10.	2014	PT Global Dharma Asri	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	60,000,000,000.00	15,468,413,991.17	0.00	15,468,413,991.17	44,531,586,008.83	0.00	0.00	15,468,413,991.17
			Jumlah	-	6,690,933,283,226.00	330,422,502,527.82	-	330,422,502,527.82	6,360,510,780,698	27,804,572,231	-	330,422,502,527.82

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T - 2	Perkiraan Penambahan tahun T- 1	Perkiraan Pengurangan tahun T - 1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T - 1
1	2	3	4	5	6	7 (4+5-6)
1	Tanah	Aset Tetap	777,161,335,964.06	19,082,989,624.000	2,569,332,238.000	793,674,993,350.06
2	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap	763,121,291,355.61	96,464,408,411.73	158,067,067,100.85	701,518,632,664.51
3	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap	1,265,821,194,286.18	252,119,153,303.00	18,499,486,653.03	1,499,440,860,936.14
4	Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap	2,899,895,910,200.59	693,390,591,579.68	556,402,380,844.00	3,036,884,120,936.27
5	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap	126,942,634,058.17	8,409,452,475.00	83,071,689,192.89	52,280,397,340.29
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Tetap	4,728,161,487.00	1,299,789,586.00	602,066,124.00	5,425,884,949.00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Aset Tetap	(2,601,052,863,747.24)	(670,331,120,398.28)	(525,419,387,278.39)	(2,745,964,596,867.13)
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Aset lain-Lain	30,039,159.00	-	6,000,000.000	24,039,159.00
9	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Aset lain-Lain	185,861,241,481.00		171,510,190,462.000	14,351,051,019.00
10	Aset Tak Berwujud	Aset lain-Lain	9,155,067,109.00		4,181,540,716.000	4,973,526,393.00
11	Amortisasi	Aset lain-Lain	(5,210,636,461.00)	3,050,512,337.000		(2,160,124,124.00)
12	Aset Lain-lain	Aset lain-Lain	65,780,164,904.66		1,137,393,303.920	64,642,771,600.74
13	Akumulasi Penyusutan Aset Lain	Aset lain-Lain	(46,243,876,166.71)	27,940,074,044.38		(18,303,802,122.33)
14	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Aset lain-Lain	2,958,287,000.00		2,958,287,000.000	-
	Jumlah		3,448,947,950,630.32	431,425,850,962.510	291,223,302,636.380	3,406,787,755,234.55

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

1. TAHUN PERTAMA

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n -1		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 TA T-1 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)	
				APBD Induk TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
Jumlah				-	-	-	-	-

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun n - 2	Perkiraan Penambahan Tahun n - 1	Perkiraan Pengurangan Tahun n - 1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun n - 1
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1.	Piutang Pajak	2010-2022	11,359,268,270.00	67,689,924,831	65,175,787,087	13,873,406,014.00
2.	Piutang Retribusi	2010-2022	4,025,674,302.00	109,040,387,226	104,764,523,338	8,301,538,190.00
3.	Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah	2011-2022	3,954,114,450.40	658,872,158	4,237,950,737	375,035,871.40
4.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	24,450,709,706.00	-	24,450,709,706	-
5.	Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	-
6.	Piutang Dana Transfer Pemerintah Daerah - Dana Bagi Hasil Pajak		3,026,342,507.00	6,167,940,036	3,026,342,507.00	6,167,940,036.00
7.	Piutang Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri	2022	148,391,880.00	-	148,391,880	-
8.	Piutang Lainnya	2001-2008	6,081,900,594.00	-	4,150,000	6,077,750,594.00
		Jumlah	53,046,401,709.40	183,557,124,251	201,807,855,255	34,795,670,705.40

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT